SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

TAHUN 2025—2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025—2029.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
3. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2025—2029 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau disebut Renstra-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025—2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

8. Rencana . . .

8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

(1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional.

(2) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan, Menteri melakukan pembinaan sumber daya manusia perencana.

(4) Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan, ditetapkan kementerian/lembaga koordinator dan kementerian/lembaga pengampu pada masing-masing prioritas nasional.

(5) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengoordinasikan penyusunan kebijakan/program/kegiatan pada Renstra-KL dan rencana kerja kementerian/lembaga yang berkontribusi terhadap prioritas nasional sesuai dengan lingkup prioritas yang menjadi kewenangannya.

(6) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. dasar hukum bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Renstra-KL;

b. dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional;

c. dasar hukum bagi Pemerintah dalam menyusun RKP;

d. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional; dan

e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.

(7) RPJM Nasional memuat proyek strategis nasional.

(8) RPJM Nasional wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

Pasal 3

(1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Renstra-KL dan RPJM Daerah.

(2) Dalam menyusun Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga koordinator pada masing-masing prioritas nasional yang bersesuaian.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam menyusun Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga wajib berkonsultasi, berkoordinasi dengan, dan mendapat persetujuan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 4

(1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang sesuai dengan kebijakan satu data Indonesia, dan dengan menerapkan manajemen risiko Pembangunan Nasional.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional.

(5) Hasil evaluasi paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan Menteri kepada Presiden.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a. narasi RPJM Nasional Tahun 2025—2029 yang memuat evaluasi dan tantangan pembangunan, kebijakan pembangunan, prioritas nasional, arah pembangunan wilayah, pendanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan;

b. matriks . . .

b. matriks pembangunan RPJM Nasional Tahun 2025—2029;

c. matriks kementerian/lembaga RPJM Nasional Tahun 2025—2029; dan

d. arah pembangunan kewilayahan RPJM Nasional Tahun 2025—2029;

(2) Narasi RPJM Nasional Tahun 2025—2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Matriks pembangunan RPJM Nasional Tahun 2025—2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(4) Matriks kementerian/lembaga RPJM Nasional Tahun 2025—2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5) Arah pembangunan kewilayahan RPJM Nasional Tahun 2025—2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Nasional bersifat indikatif.

(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Nasional disampaikan oleh Menteri kepada Presiden dalam sidang kabinet untuk mendapatkan keputusan.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKP.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025–2029

NARASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2025–2029

SK No 253034 A

BAB I
Evaluasi dan Tantangan Pembangunan

1.1 Kilas Balik Pembangunan Tahun 2020–2024 dan Perkembangan Global

Kondisi perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan dinamika global.

> Sejarah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mampu mencapai pertumbuhan tinggi lebih dari 8,0 persen pada lima tahun yang berbeda, yaitu tahun 1968, 1973, 1977, 1980, dan 1995

- **1968**
  - Keterbukaan Indonesia terhadap investor asing;
  - Penyederhanaan prosedur perdagangan luar negeri;
  - Pengendalian inflasi.
- **1973**
  - Kenaikan harga minyak dunia secara drastis (*oil boom*).
- **1977**
  - Lonjakan harga minyak;
  - Substitusi impor.
- **1980**
  - Diversifikasi ekspor nonmigas dengan kayu sebagai komoditas utama;
  - Deregulasi perbankan, keuangan, dan perdagangan sehingga memberikan kemudahan investasi asing;
  - Program swasembada pangan.
- **1995**
  - Kebangkitan industri manufaktur, otomotif, dan jasa;
  - Masuknya investasi asing langsung.

Gambar 1.1
Trajektori Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (persen)

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Dalam RPJMN Tahun 2020–2024, sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun. Namun demikian, pada awal tahun 2020, dunia dilanda *unprecedented shock* pandemi COVID-19 sehingga berdampak terhadap penurunan kinerja perekonomian global, termasuk Indonesia.

Melalui berbagai kebijakan yang telah dilakukan, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pulih lebih cepat dibandingkan dengan banyak negara lain. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen dan tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang cukup untuk mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 8,0 persen.

Gambar 1.2
Indeks Produk Domestik Bruto Riil Tahun 2019–2023 (2019=100)

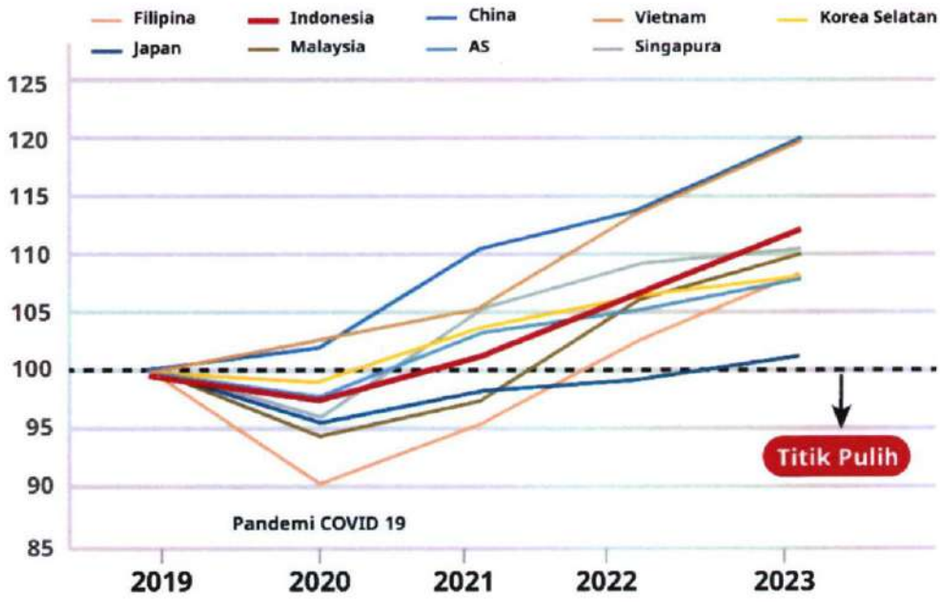

Sumber: BPS, Oxford Economics Database (diolah)

Perkembangan Global

Secara umum dalam periode tahun 2025–2029, perekonomian global masih dilanda ketidakpastian.

1.2 Evaluasi Pembangunan Tahun 2020–2024

Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk saat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang terjadi pada tahun 2020. Langkah cepat tanggap diwujudkan sebagai respons kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif untuk meredam dampak gejolak ekonomi global dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.

1.2.1 Ketahanan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan meskipun sempat terkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Sebelum pandemi *Corona Virus Disease* 2019, pencapaian *Gross National Income* per kapita tahun 2019 menjadikan Indonesia masuk ke dalam negara *Upper-Middle Income Countries*. Namun demikian, adanya pandemi mengakibatkan penurunan *Gross National Income* per kapita sehingga Indonesia turun menjadi negara *Lower Middle Income Countries*. Berbagai upaya pemulihan yang dilakukan menyebabkan perekonomian Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif, ditandai oleh peningkatan *Gross National Income* per kapita dan menjadikan Indonesia kembali ke dalam negara *Upper-Middle Income Countries*. Pencapaian pembangunan ekonomi selama beberapa tahun terakhir turut didukung dengan berbagai capaian positif, di antaranya (1) peningkatan pola konsumsi pangan rumah tangga, (2) peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, (3) penyediaan lapangan kerja per tahun, (4) peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian, (5) pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, (6) nilai ekspor produk industri pengolahan dan realisasi investasi luar Jawa, serta (7) peningkatan penerimaan pajak.

Gambar 1.3
Tren Capaian Pertumbuhan Ekonomi

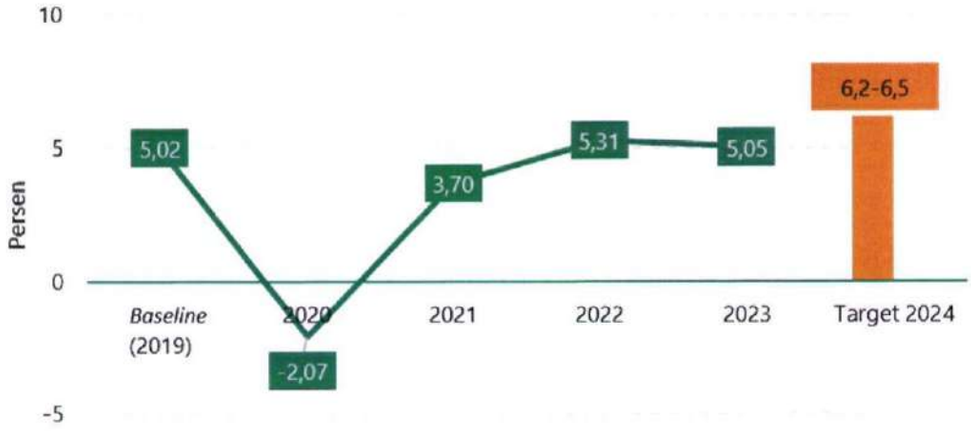

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Berdasarkan peningkatan capaian selama 5 tahun (2019–2023) di daerah, pertumbuhan ekonomi di Wilayah Maluku lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua mengalami kontraksi yang dipicu oleh turunnya produksi pada sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2023, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Hal tersebut didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan dan pertambangan.

Gambar 1.4
Capaian Pertumbuhan Ekonomi per Wilayah

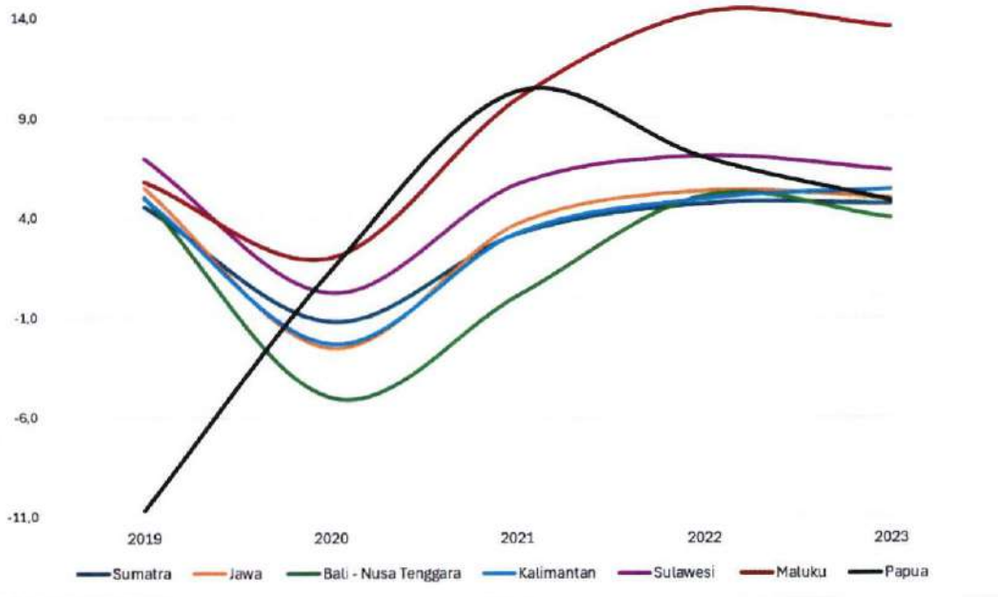

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

Gambar 1.5
Tren Capaian Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas

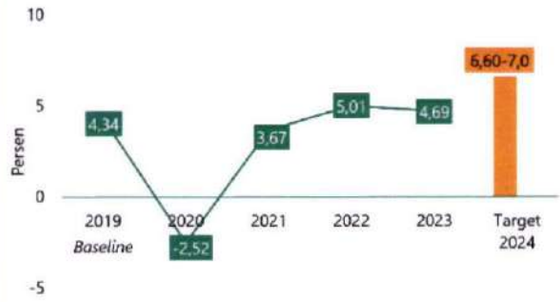

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.6
Tren Capaian *Share* Industri Pengolahan

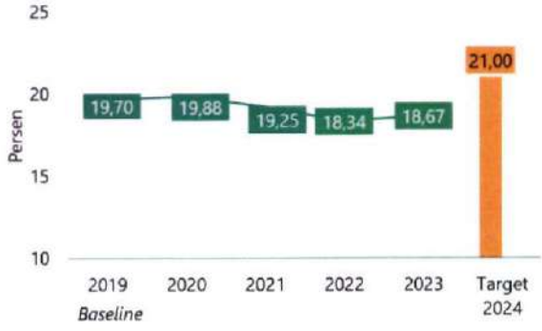

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.7
Distribusi Capaian *Share* Industri Pengolahan di Daerah

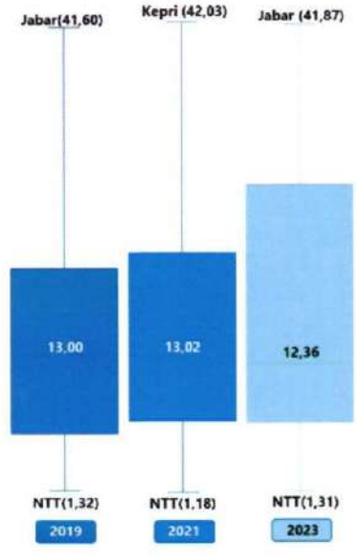

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

- Dalam lima tahun terakhir, kinerja pertumbuhan industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami tekanan pada tahun 2020.
- Salah satu kontribusi paling signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional datang dari sektor industri baja. Sektor industri baja sangat berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui nilai tambah serta menjadi *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing ekonomi. Pertumbuhan industri baja di berbagai daerah, khususnya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara terus didorong untuk memenuhi permintaan produk besi baja dari luar negeri, terutama China, dan peningkatan produksi domestik untuk produk ferronikel.
- Program strategis yang mendukung pertumbuhan Produk Domestik Bruto industri pengolahan antara lain (1) pemberlakuan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, (2) insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah sektor otomotif, (3) peningkatan penggunaan produk dalam negeri, (4) peningkatan jumlah standar nasional Indonesia industri, (5) program *making* Indonesia 4.0, (6) pengembangan sekolah menegah kejuruan *link and match* industri, (7) sertifikasi tenaga kerja industri, serta (8) program harga gas bumi tertentu.

Gambar 1.8
Tren Capaian Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Nasional

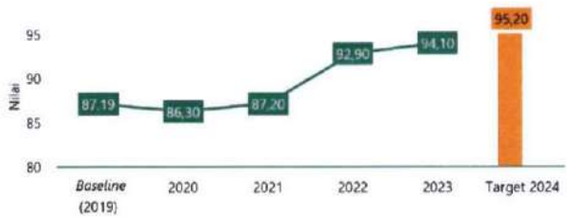

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.9
Distribusi Capaian Skor PPH (Tertinggi dan Terendah) di Daerah

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

- Skor Pola Pangan Harapan Nasional meningkat mendekati angka 100, mengindikasikan bahwa konsumsi pangan di wilayah Indonesia semakin beragam dan bergizi seimbang.
- Program dan kegiatan yang mendukung peningkatan akses pangan yang merata dan terjangkau antara lain (a) intervensi bantuan pangan; serta (b) edukasi terkait penerapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.
- Provinsi dengan skor pola pangan harapan tertinggi pada tahun 2023 yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Sementara itu, daerah yang perlu didorong akselerasi pencapaian skor pola pangan harapan yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Maluku.

- Nilai Tukar Petani nasional terjaga stabilitasnya di atas angka 100.
- Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian antara lain (a) bantuan subsidi input pertanian (benih, pupuk, dan pestisida); (b) pengembangan infrastruktur pertanian (sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sistem logistik); serta (c) diversifikasi produk dengan adaptasi teknologi pertanian modern.
- Provinsi dengan Nilai Tukar Petani di atas 100 yang tertinggi pada tahun 2023 yaitu Provinsi Riau, Bengkulu, dan Kalimantan Barat. Sementara itu, provinsi dengan Nilai Tukar Petani kurang dari 100 yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Papua Barat.

Gambar 1.10
Tren Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional

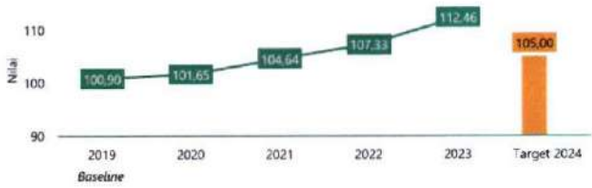

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.11
Distribusi Capaian Nilai Tukar Petani (NTP)
(Tertinggi dan Terendah) di Daerah

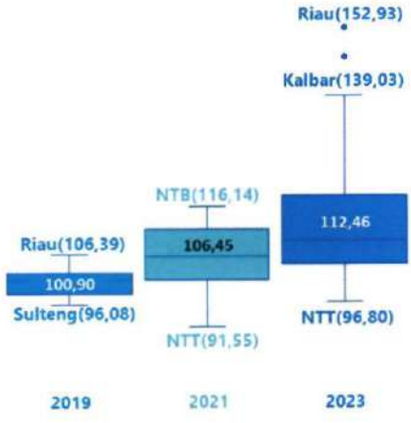

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

Gambar 1.12
Tren Capaian Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun

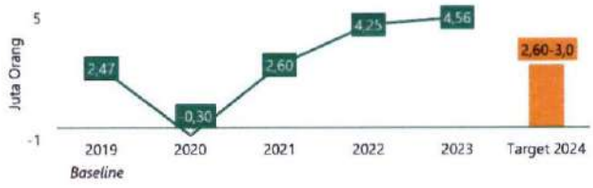

Sumber Data: Sakernas (BPS), berbagai tahun (diolah)
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020-2024

Penyediaan lapangan kerja per tahun berhasil ditingkatkan kembali setelah penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Pencapaian ini didorong melalui program bantuan berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019, stimulus ekonomi, kartu pra-kerja, pembukaan kembali sektor-sektor ekonomi secara bertahap dalam sektor-sektor padat karya, dan penyelenggaraan pelatihan kerja dan uji kompetensi.

Dengan demikian, dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh, kebijakan yang perlu menjadi fokus perhatian ke depan antara lain (1) hilirisasi industri pengolahan yang mendorong investasi dan ekspor; (2) kinerja logistik; (3) penguatan pariwisata; (4) kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah; serta 5) swasembada pangan dan energi.

1.2.2 Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, berkat upaya pemerintah yang terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial, jaminan sosial, dan bantuan sosial hingga graduasi bantuan sosial. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, serta meminimalisasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh berbagai krisis. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, upaya ini menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia secara bertahap.

Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta akses terhadap modal usaha yang lebih mudah dan terjangkau, sebagai kunci dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup berbagai inisiatif seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan, serta kredit usaha rakyat yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah. Selain itu, program desa wisata dan produk unggulan desa mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur dasar yang merata juga menjadi prasyarat penting untuk mendukung pengurangan kemiskinan, dengan fokus pada pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan akses air bersih dan sanitasi, serta peningkatan akses listrik di daerah terpencil.

- Tingkat kemiskinan meningkat pada tahun 2020 akibat kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Namun demikian, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam perlindungan sosial maka tingkat kemiskinan dapat kembali menurun hingga tahun 2023.
- Program perlindungan sosial yang terintegrasi menjadi landasan utama dalam upaya pengurangan kemiskinan, mencakup program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, serta bantuan sosial tunai. Selain itu, inovasi perlindungan sosial adaptif dirancang untuk menghadapi berbagai risiko dan krisis, seperti Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang melindungi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan perluasan cakupan jaminan kesehatan nasional serta jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Registrasi sosial ekonomi menjadi dasar penting untuk pemutakhiran dan pengelolaan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi memanfaatkan data kemiskinan dan kesejahteraan sosial dari berbagai sumber untuk mempermudah identifikasi dan penyaluran bantuan kepada yang berhak.
- Tingkat kemiskinan di 34 provinsi selama lima tahun terakhir terus menurun. Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah. Sementara itu, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi namun tren kinerjanya terus membaik.

Gambar 1.13
Tren Capaian Tingkat Kemiskinan

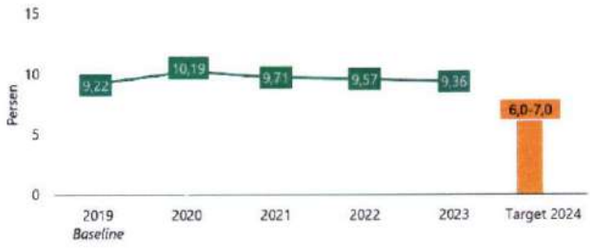

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.14
Distribusi Tingkat Kemiskinan di Daerah

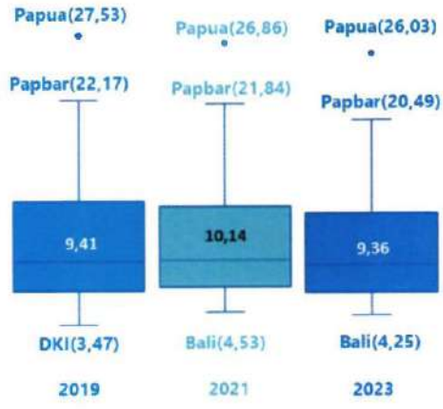

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

1.2.3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 73,55 (berdasarkan proyeksi sensus 2010) atau 74,39 (berdasarkan proyeksi sensus 2020). Berbagai pencapaian positif lainnya yang telah diraih antara lain perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses pendidikan yang telah memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung dengan pencapaian pada bidang kesehatan dan pendidikan. Pencapaian pada bidang kesehatan di antaranya (1) cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, (2) penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita, (3) pemenuhan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan, (4) peningkatan

kualitas rumah sakit dan kuantitas tenaga kesehatan, serta (5) peningkatan kapasitas obat dan makanan memenuhi syarat.

Selain itu, pencapaian pada bidang pendidikan, antara lain (1) peningkatan rata-rata lama sekolah dari penduduk usia 15 tahun ke atas, (2) peningkatan penduduk yang menempuh pendidikan tinggi, (3) penurunan kesenjangan akses pendidikan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya, serta (4) peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja.

Secara umum, perbaikan kebijakan yang perlu diakselerasi ke depan antara lain (1) pemerataan akses pendidikan, (2) peningkatan kualitas pendidikan, (3) pemerataan pelayanan kesehatan, dan (4) peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hal tersebut untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia berjalan optimal dan merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 1.15
Tren Capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

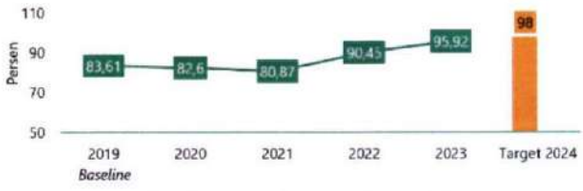

Sumber Data: sismonev.djsn.go.id.
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.16
Distribusi Capaian Cakupan Kepesertaan JKN (Tertinggi dan Terendah) di Daerah

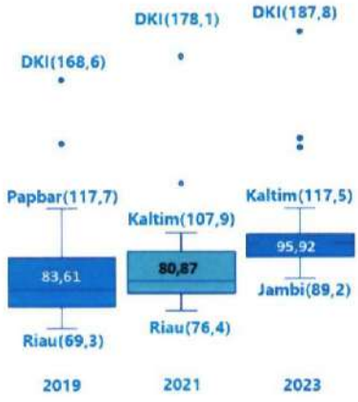

Sumber Data: sismonev.djsn.go.id

- Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat pada tahun 2023, meski sempat turun pada 2020–2021 akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- Pencapaian cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional didorong dengan adanya intervensi dari pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi daerah yang memiliki cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional tertinggi. Selama tahun 2019 hingga 2023, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di seluruh daerah meningkat dengan peningkatan tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara, Riau, dan Papua Barat.

Gambar 1.17
Tren Capaian Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

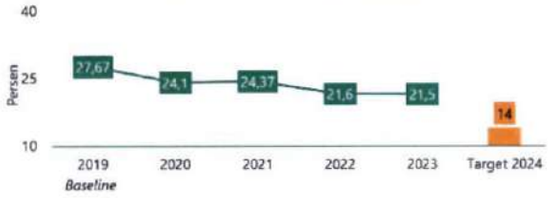

Sumber Data: SSGBI (*Baseline*), SSGI (Tahun 2021 dan 2022), Data SKI 2023, Kemenkes, berbagai tahun (diolah).
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.18
Distribusi Capaian Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (Tertinggi dan Terendah) di Daerah

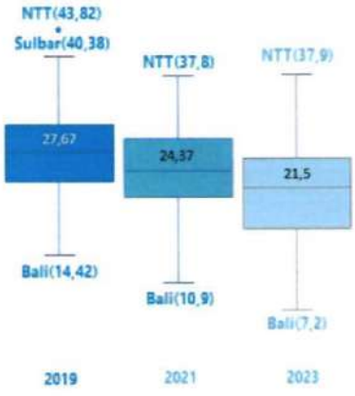

Sumber Data: SSGBI (*Baseline*), SSGI (Tahun 2021 dan 2022), Data SKI 2023, Kemenkes, berbagai tahun (diolah).

- Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) berhasil diturunkan dari tahun ke tahun.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai salah satu regulasi pemerintah dalam mendorong percepatan penurunan *stunting* melalui intervensi spesifik dan sensitif.
- Program utama dalam mendorong percepatan penurunan *stunting* antara lain perluasan cakupan program jaring pengaman sosial seperti program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
- Provinsi Bali menjadi satu-satunya provinsi dengan kategori *stunting* rendah (kurang dari 10 persen). Keberhasilan Provinsi Bali didorong melalui penguatan konvergensi lintas sektor, intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran, peningkatan kolaborasi lini lapangan, penyediaan data sasaran yang valid, penguatan *monitoring* dan evaluasi di berbagai jenjang, peningkatan sosialisasi, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

- Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat hingga tahun 2023, namun rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 8,92 masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yang telah mencapai 9,33.
- Program kegiatan strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan antara lain (a) bantuan operasional satuan pendidikan, (b) Program Indonesia Pintar, (c) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pasokan energi (listrik), (d) peningkatan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan, serta (e) program afirmasi pendidikan.
- Provinsi Bali dan Papua merupakan provinsi dengan capaian rata-rata lama sekolah meningkat cukup signifikan selama tahun 2019 hingga 2023. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki capaian tertinggi, sedangkan daerah yang perlu didorong dalam upaya percepatan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan antara lain Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Gambar 1.19
Tren Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

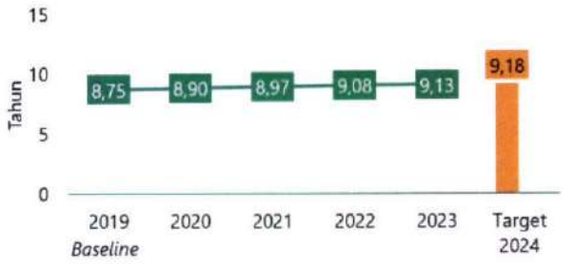

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.20
Distribusi Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tertinggi dan Terendah) di Daerah

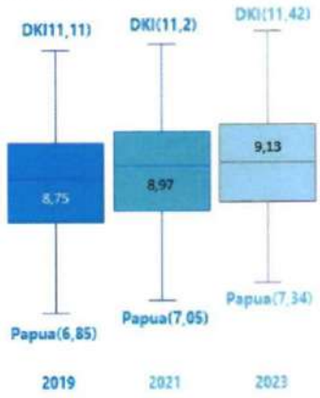

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

Pembangunan sosial budaya dan keagamaan merupakan pilar penting dalam memperkuat identitas dan kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat. Berbagai pencapaian positif telah diraih, seperti meningkatnya toleransi antarumat beragama, penguatan peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta peningkatan budaya literasi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan harmoni sosial, partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya, serta penanganan konflik berbasis agama dan budaya. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan pembangunan di bidang sosial budaya, dan keagamaan terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 1.21
Tren Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama

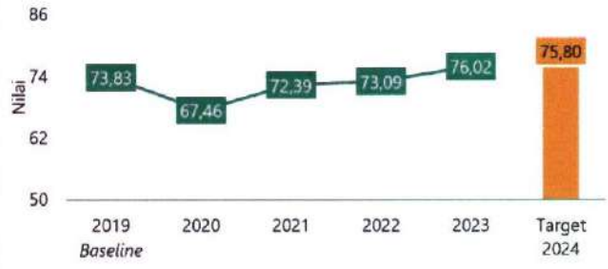

Sumber Data: Kemenag, berbagai tahun (diolah).
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.22
Distribusi Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (Tertinggi dan Terendah) di Daerah

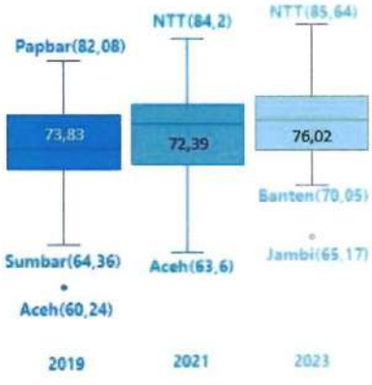

Sumber Data: Kemenag, berbagai tahun (diolah).

- Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dinilai dari aspek toleransi, kerja sama, dan kesetaraan mengalami peningkatan dan berhasil melampaui target 2024.
- Program kegiatan strategis dalam mendukung pencapaian, antara lain (a) penguatan forum kerukunan umat beragama di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, (b) peningkatan literasi keagamaan yang moderat dan inklusif, serta (c) dialog kerukunan umat beragama.
- Provinsi dengan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Provinsi Jambi. Aspek kerja sama di Provinsi Jambi belum optimal dibandingkan aspek toleransi dan kesetaraan. Artinya, keterlibatan aktif, empati, dan simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan masih perlu diperkuat dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir semua daerah mengalami perbaikan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2023.

Gambar 1.23
Tren Capaian Kinerja Nilai Budaya Literasi

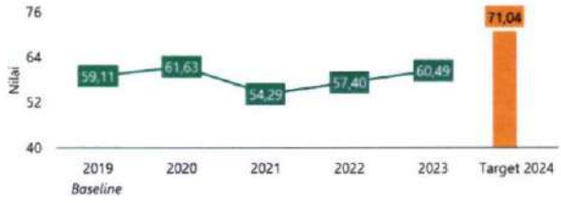

Sumber Data: Kemendikbudristek, berbagai tahun (diolah)
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.24
Distribusi Capaian Nilai Budaya Literasi
(Tertinggi dan Terendah) di Daerah

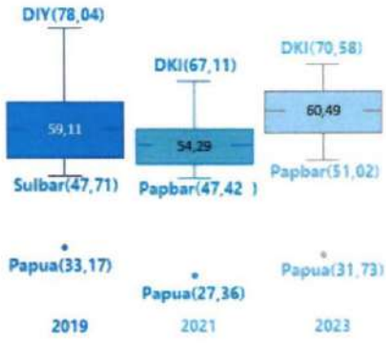

Sumber Data: Kemendikbudristek, berbagai tahun (diolah)

- Nilai budaya literasi meningkat pada tahun 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 karena terbatasnya layanan perpustakaan/taman bacaan yang dapat melayani masyarakat secara langsung.
- Intervensi strategis dalam mendukung pencapaian, antara lain (a) penguatan perpustakaan tingkat desa/kelurahan serta implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, (b) program standardisasi dan akreditasi perpustakaan, (c) penyediaan pojok baca digital, serta (d) pengembangan aplikasi perpustakaan digital yang terhubung dengan jejaring nasional perpustakaan yang melibatkan 781 lembaga dan tercatat dalam Indonesia *OneSearch*.
- Provinsi dengan capaian nilai budaya literasi tertinggi pada tahun 2023 adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sementara, daerah yang perlu didorong peningkatan pencapaian nilai budaya literasi adalah Provinsi Papua.

1.2.4 Pengembangan Wilayah

Pencapaian pembangunan kewilayahan di Indonesia telah menunjukkan sejumlah kemajuan signifikan, terutama dalam (1) pengembangan kawasan pusat pertumbuhan (kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan destinasi pariwisata prioritas); (2) investasi pada kawasan pusat pertumbuhan, (3) peningkatan perkembangan status pembangunan desa; (4) peningkatan jumlah wilayah metropolitan Jawa; (5) penurunan tingkat kemiskinan desa dan daerah tertinggal; serta (6) revitalisasi badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama.

Hal yang perlu menjadi fokus perhatian ke depan antara lain (1) pengentasan daerah tertinggal; (2) produksi komoditas unggulan (kelapa sawit, kopi, tebu, lada, pala, dan cengkeh) untuk mendukung hilirisasi; serta (3) penurunan ketimpangan wilayah dengan pemerataan kualitas sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas lapangan pekerjaan, serta infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah.

- Perkembangan pembangunan desa mengalami peningkatan dilihat dari peningkatan jumlah desa mandiri dan desa berkembang.
- Faktor yang mendorong peningkatan pembangunan desa hingga tahun 2023, di antaranya (a) penurunan tingkat kemiskinan perdesaan menjadi 12,22 persen; serta (b) peningkatan kemajuan dan kemandirian desa melalui revitalisasi 9.114 badan usaha milik desa berkembang, 1.677 badan usaha milik desa maju, 564 badan usaha milik desa bersama berkembang, dan 532 badan usaha milik desa bersama maju.
- Program kegiatan strategis dalam mendukung percepatan pembangunan desa, antara lain pembangunan infrastruktur pedesaan (jalan, jembatan, drainase, pasar desa, posyandu, dan pendidikan anak usia dini), penetapan prioritas penggunaan dana desa, dan pengembangan badan usaha milik desa.
- Provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak terdapat di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sedangkan daerah yang perlu didorong untuk peningkatan desa mandiri sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.

Gambar 1.25
Tren Capaian Perkembangan Status Pembangunan Desa
(Desa Mandiri dan Berkembang)

Sumber Data: Kemen PPN/Bappenas, berbagai tahun (diolah)
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.26
Distribusi Jumlah Desa Mandiri
(Tertinggi dan Terendah) di Daerah

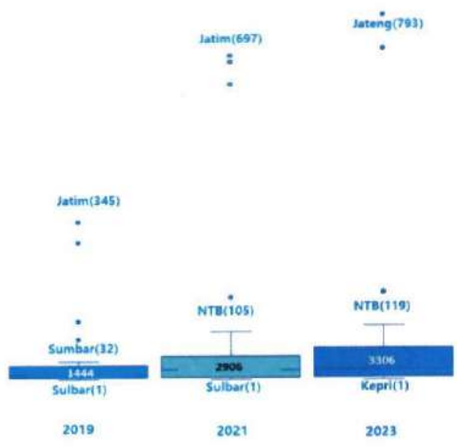

Sumber Data: Kemen PPN/Bappenas, berbagai tahun (diolah)

1.2.5 Penguatan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejumlah pencapaian penting telah diraih, seperti peningkatan akses terhadap air bersih, listrik, dan layanan sanitasi, serta pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan transportasi yang memperlancar arus barang dan orang antarwilayah.

Namun demikian, tantangan masih ada, terutama terkait dengan pemerataan akses infrastruktur di wilayah terpencil dan perbatasan, serta pemanfaatan, pemeliharaan, dan keberlanjutan infrastruktur yang sudah dibangun. Oleh karena itu, perlu adanya fokus yang berkelanjutan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan perluasan aksesibilitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh pelosok negeri.

Gambar 1.27
Tren Capaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau

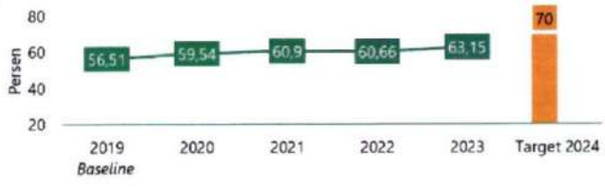

Sumber Data: Susenas (Badan Pusat Statistik), berbagai tahun (diolah).
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.28
Distribusi Capaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau (Tertinggi dan Terendah) di Daerah

Sumber Data: Susenas (Badan Pusat Statistik), berbagai tahun (diolah).

- Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau terus meningkat hingga tahun 2023. Namun demikian, perlu terus didorong intervensi dalam mengakselerasi pemenuhan hunian layak.
- Intervensi strategis yang mendorong pencapaian antara lain (a) penyediaan rusunawa dan rumah khusus, (b) penanganan permukiman kumuh, (c) penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, (d) subsidi bantuan uang muka, serta (e) bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.
- Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang signifikan pada akses hunian layak dan terjangkau dari tahun 2019 hingga 2023. Sementara itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan pencapaian tertinggi sedangkan Provinsi Papua merupakan daerah yang perlu diakselerasi pencapaiannya.

- Rasio elektrifikasi meningkat dari tahun ke tahun.
- Intervensi strategis yang mendukung keberhasilan pencapaian antara lain (a) program bantuan pasang baru listrik; (b) perluasan jaringan (*grid extension*) untuk desa yang dekat jaringan distribusi eksisting; (c) pembangunan pembangkit komunal (menggunakan energi setempat) menggunakan pembangkit listrik tenaga surya+baterai ataupun pembangkit listrik tenaga mikro hidro; serta (d) pemasangan alat penyalur daya listrik dan stasiun pengisian energi listrik untuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal.
- Sebagian besar provinsi memiliki capaian rasio elektrifikasi telah mendekati 100 persen pada tahun 2023, kecuali Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.

Gambar 1.29
Tren Capaian Rasio Elektrifikasi

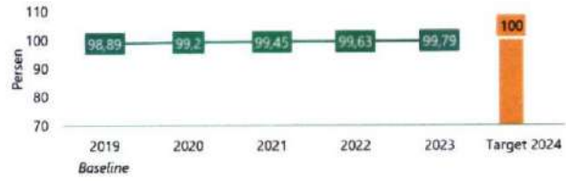

Sumber Data: Laporan Kinerja KESDM Tahun 2023 dan Berita Acara Penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.30
Distribusi Capaian Rasio Elektrifikasi
(Tertinggi dan Terendah) di Daerah

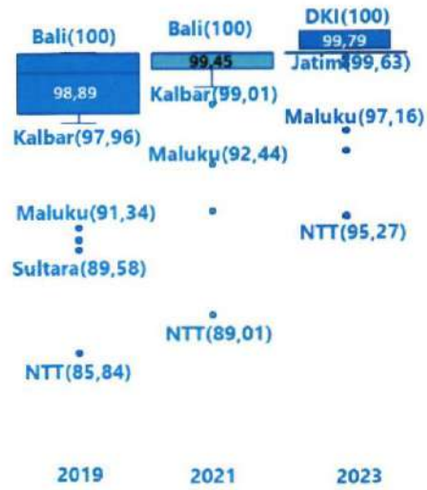

Sumber Data: Laporan Kinerja KESDM Tahun 2023 dan Berita Acara Penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik

1.2.6 Pembangunan Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti (1) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem *mangrove* dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana.

Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Gambar 1.31
Tren Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

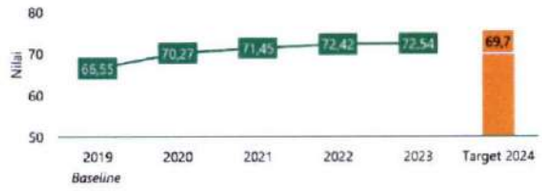

Sumber Data: Kemen LHK, berbagai tahun.
Keterangan: Capaian 2019–2020 merupakan metode lama, capaian 2021–2023 merupakan metode baru, target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024.

Gambar 1.32
Distribusi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Tertinggi dan Terendah) di Daerah

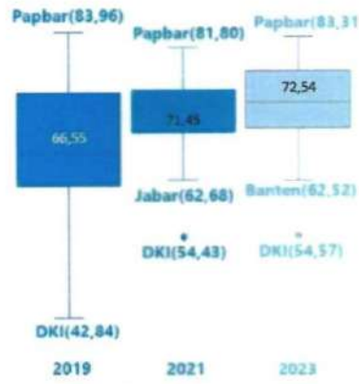

Sumber Data: Kemen LHK, berbagai tahun.

Keterangan: Capaian 2019 merupakan metode lama, capaian 2021–2023 merupakan metode baru.

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari tahun ke tahun. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 justru memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- Program kegiatan strategis yang mendorong pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah, antara lain program langit biru, program kali bersih, program Indonesia hijau, program gambut lestari, dan program pantai lestari.
- Berdasarkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup provinsi dari tahun ke tahun, provinsi dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terbesar adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Provinsi yang mengalami penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah Provinsi Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, Papua, dan Sulawesi Tengah.
- Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup provinsi tahun 2023, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tertinggi berada pada Provinsi Papua Barat, Papua, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, sedangkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang perlu dioptimalkan berada pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kualitas lingkungan hidup salah satunya dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi suatu daerah yang sangat bergantung pada sektor industri pengolahan, pertambangan, dan jasa.

Gambar 1.33
Capaian IKLH di 34 Provinsi Tahun 2019 dan 2023

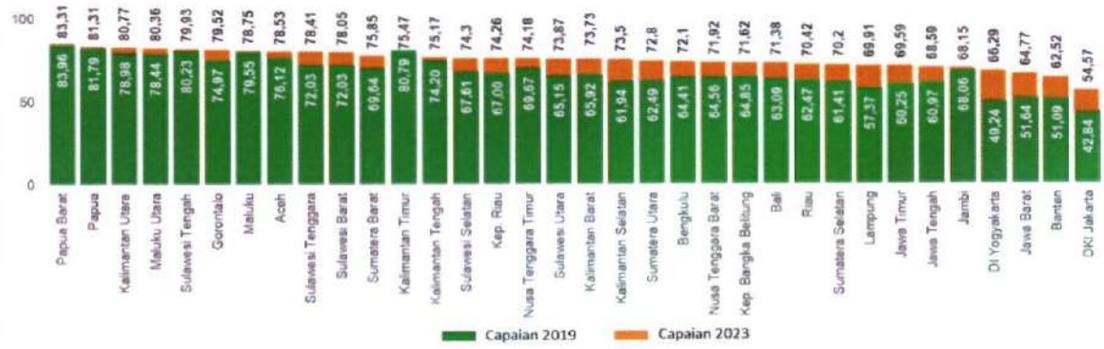

Sumber Data: Kemen LHK, berbagai tahun (diolah).

1.2.7 Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan merupakan fondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara. Sejumlah pencapaian menunjukkan peningkatan, seperti (1) penguatan partisipasi dalam kerja sama internasional, (2) reformasi birokrasi, (3) peningkatan profesionalisme dalam pertahanan, serta (4) langkah-langkah strategis dalam menjaga keamanan nasional.

Adapun kebijakan yang perlu menjadi fokus perhatian ke depan, antara lain (1) penurunan tingkat kriminalitas, (2) keadilan dalam penegakan hukum dan penguatan demokrasi, (3) mitigasi risiko ancaman keamanan siber, serta (4) transparansi dan akuntabilitas serta pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk terus memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas tata kelola, sistem hukum yang adil, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman keamanan global dan domestik di masa depan.

Capaian pembangunan politik demokrasi ditandai dengan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia.

Gambar 1.34
Tren Capaian Indeks Demokrasi Indonesia

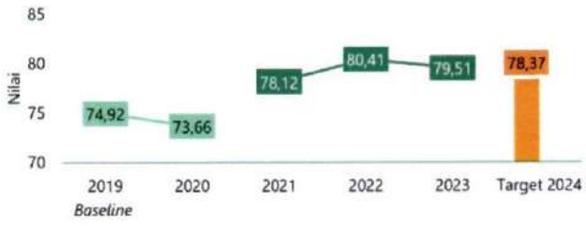

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah).
Keterangan: Capaian *baseline* hingga 2020 merupakan metode lama, capaian 2021–2023 merupakan metode baru, target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.35
Distribusi Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (Tertinggi dan Terendah) di Daerah

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

- Pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia hingga tahun 2020 dinilai dari pencapaian tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Adapun pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia sejak tahun 2021 mengalami penyempurnaan penilaian dengan mengintegrasikan aspek politik, ekonomi, dan sosial, serta memberikan indeks untuk tingkat nasional, pusat, dan provinsi.
- Berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia tingkat provinsi, peningkatan terbesar terjadi pada Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara, sementara tiga daerah yang mengalami penurunan terbesar yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, dan Maluku Utara.
- Berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia tingkat provinsi pada tahun 2023, capaian tertinggi berada pada Provinsi Bali, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan daerah yang perlu didorong penguatan demokrasi terutama pada aspek kapasitas lembaga demokrasi berada pada Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Papua, dan Maluku.

Gambar 1.36
Capaian Indeks Demokrasi Indonesia di 34 Provinsi Tahun 2019 dan 2023

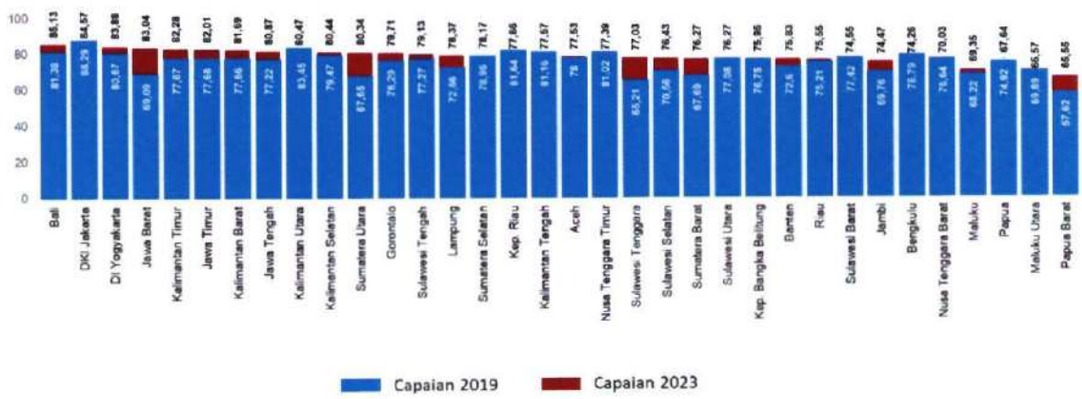

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah).
Keterangan: Capaian 2019 merupakan metode lama, capaian 2023 merupakan metode baru.

Capaian kinerja pembangunan bidang hukum ditandai dengan tren positif nilai Indeks Pembangunan Hukum dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Capaian penting pembangunan bidang hukum juga ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengedepankan pendekatan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif bagi masyarakat.

Gambar 1.37
Tren Capaian Indeks Pembangunan Hukum

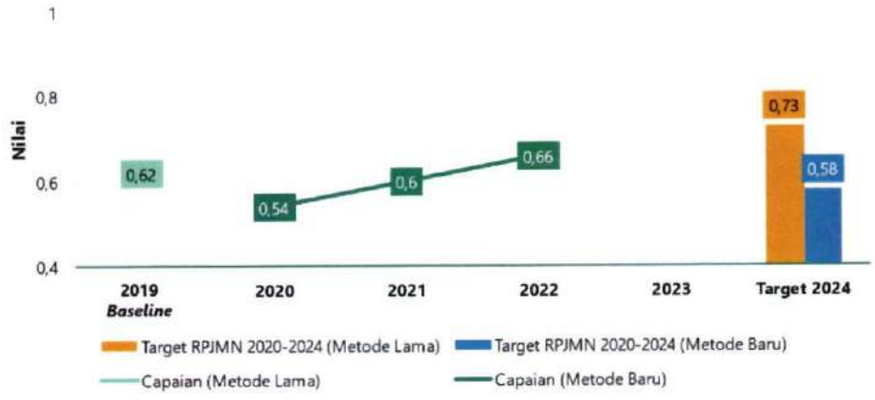

Sumber Data: Kemen PPN/Bappenas, berbagai tahun (diolah).
Keterangan: *Baseline* 2019 merupakan metode lama, capaian 2020–2022 merupakan metode baru.

- Secara perhitungan, Indeks Pembangunan Hukum mengalami penyesuaian metodologi pada tahun 2020, menjadi lima pilar (budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum) dan tiga sumber data (survei masyarakat, data administratif kementerian/lembaga, dan wawancara pakar).
- Capaian Indeks Pembangunan Hukum pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten. Indeks Pembangunan Hukum tahun 2020 masuk dalam kategori cukup, kemudian meningkat pada tahun 2022 dan masuk dalam kategori baik. Peningkatan ini menunjukkan kualitas pembangunan hukum yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait semakin menuju ke arah positif dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan tren capaian Indeks Pembangunan Hukum tersebut yakni sinkronisasi implementasi kebijakan prioritas nasional oleh multiaktor dan secara lintas sektor, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- Intervensi strategis yang mendorong pencapaian Indeks Pembangunan Hukum antara lain (a) penataan tata kelola regulasi, (b) penegakan hukum pidana dilakukan melalui penerapan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi dan implementasi keadilan restoratif, serta (c) peningkatan akses keadilan bagi masyarakat dilaksanakan melalui layanan bantuan hukum.

Capaian keamanan dan ketertiban menunjukkan komitmen kuat dan semangat antusias dengan ditandainya tren positif pada hasil nilai-nilai indikator pengukuran seperti meningkatnya *Global Terrorism Index* dari 5,07 pada tahun 2019 menjadi 3,99 pada tahun 2023. Adapun capaian perilaku antikorupsi masyarakat direpresentasikan melalui indeks perilaku anti korupsi.

Gambar 1.38
Tren Capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi

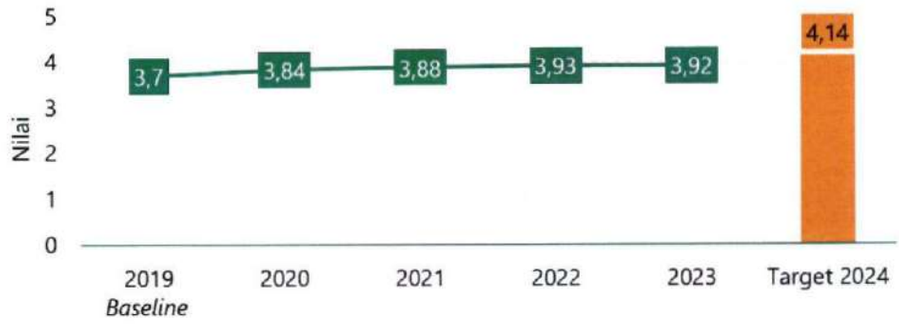

Sumber Data: BPS dan KPK, berbagai tahun (diolah).
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

- Indeks Perilaku Anti Korupsi menunjukkan perbaikan dari tahun 2019 ke tahun 2022, namun sedikit menurun sebesar 0,01 poin pada tahun 2023 disebabkan adanya penurunan dimensi pengalaman sebagai salah satu dimensi pembentuk capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi.
- Program strategis yang mendorong pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi antara lain (a) *Roadshow Bus* untuk sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat, (b) Desa Anti Korupsi, (c) Politik Cerdas Berintegritas untuk pembekalan antikorupsi kepada peserta pemilu, (d) Hajar Serangan Fajar sebagai kampanye antikorupsi kepada masyarakat terkait pencegahan politik uang dan korupsi menjelang pemilu, (e) program penguatan anti korupsi bagi penyelenggara negara ber-integritas sebagai program penguatan komitmen antikorupsi yang menyasar para pemimpin dan pejabat negara di kementerian/lembaga, serta (f) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagai program yang mendukung para bunda atau guru pendidikan anak usia dini untuk berperan sebagai penggerak antikorupsi sekaligus membentuk karakter anak dalam upaya pencegahan korupsi.

- Salah satu ukuran perbaikan tata kelola pemerintah yaitu melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi ≥ Baik cenderung meningkat pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi periode 2020–2024 mencakup tiga aspek yaitu reformasi, hasil antara, dan pemenuhan.
- Intervensi strategis yang mendorong pencapaian, antara lain (a) optimalisasi pendampingan dan bimbingan teknis secara *online* dengan memanfaatkan media Youtube secara reguler melalui program "Bisa Tanya Kemen PANRB" untuk informasi kebijakan baru; (b) penggunaan sistem Aplikasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi maupun E-SAKIP, (c) kebijakan Reformasi Birokrasi tematik termasuk modul pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta (d) kegiatan *RBXperience* yang bertujuan memfasilitasi kementerian/lembaga Meso untuk ikut menjelaskan terkait perannya dalam reformasi birokrasi dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya.

Gambar 1.39
Tren Capaian Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ Baik

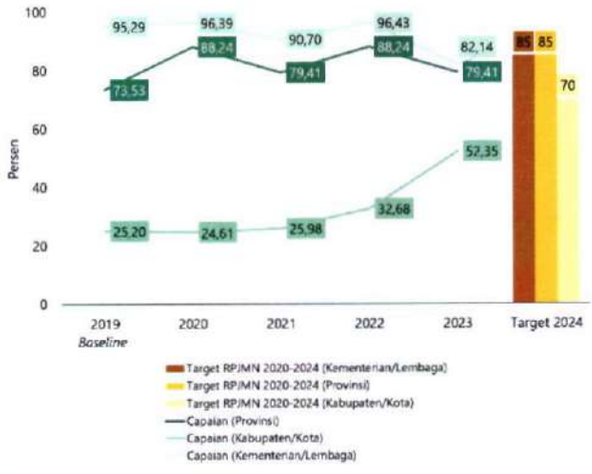

Sumber Data: Kemen PANRB, berbagai tahun (diolah).
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

1.3 Batasan Pembangunan (*Development Constraint*)

Terdapat dua aspek yang menjadi batas dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kapasitas ruang fiskal. Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup, dan keseimbangan antara keduanya melalui ketersediaan sumber daya alam. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah batasan kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya, seperti limbah.

Di sisi lain, kapasitas ruang fiskal merupakan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin besar dan beragam. Kedua aspek batasan pembangunan tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut untuk pada akhirnya dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka memastikan kesinambungan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Penjabaran kedua aspek tersebut, antara lain

1.3.1 Kawasan Lindung di Darat dan Perairan

Sampai tahun 2023, perlindungan kawasan yang telah dilaksanakan di daratan mencapai 51,14 juta hektare atau 26,85 persen dari luas daratan di Indonesia, yang terdiri dari kawasan hutan lindung sebesar 15,38 persen serta kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebesar 11,47 persen (IBSAP 2025–2045). Sedangkan luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil pada tahun 2024 mencapai 29,9 juta hektare atau sebesar 9,2 persen dari luas Laut Indonesia, dengan peningkatan sebesar 665.049,5 hektare. Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir,

dan pulau-pulau kecil ditargetkan mencapai 30 persen pada tahun 2045 (*30 by 45*) yang setara dengan 97,5 juta hektare.

Dari total 70 juta hektare areal yang bernilai keanekaragaman hayati tinggi di daratan, sebanyak 43 juta hektare yang berada di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru (Bappenas, 2018). Untuk itu, pembangunan harus memperhatikan dan mengintegrasikan areal di luar kawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam; dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil berupa areal preservasi yang bertujuan untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup sumber daya hayati dan ekosistemnya.

Kawasan konservasi dikelola berdasarkan tiga prinsip, yaitu (a) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan konservasi menjadi benteng terakhir untuk melindungi habitat spesies kunci dan keanekaragaman hayati hingga level genetik. Pembangunan yang tidak berkelanjutan akan berdampak tidak hanya pada berkurangnya area kawasan konservasi tersebut, tetapi juga mempercepat kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Gambar 1.40
Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia Tahun 2024

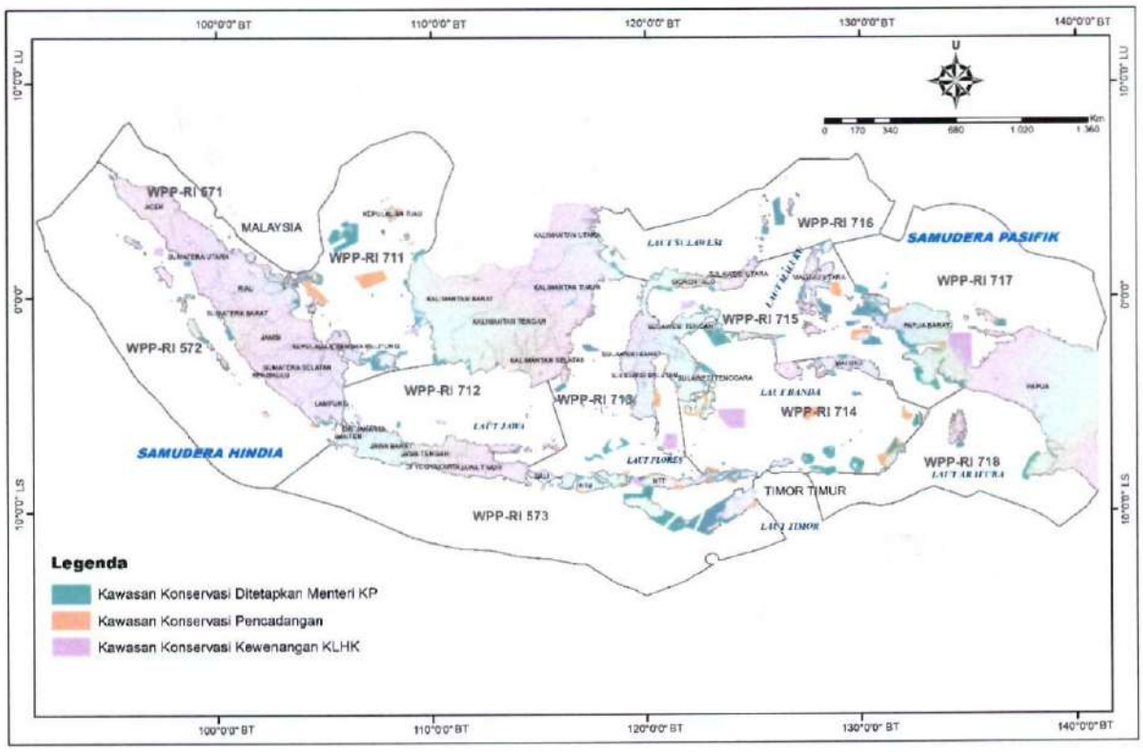

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024.

Gambar 1.41
Peta Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru
di Daratan dan Hutan Lindung di Indonesia

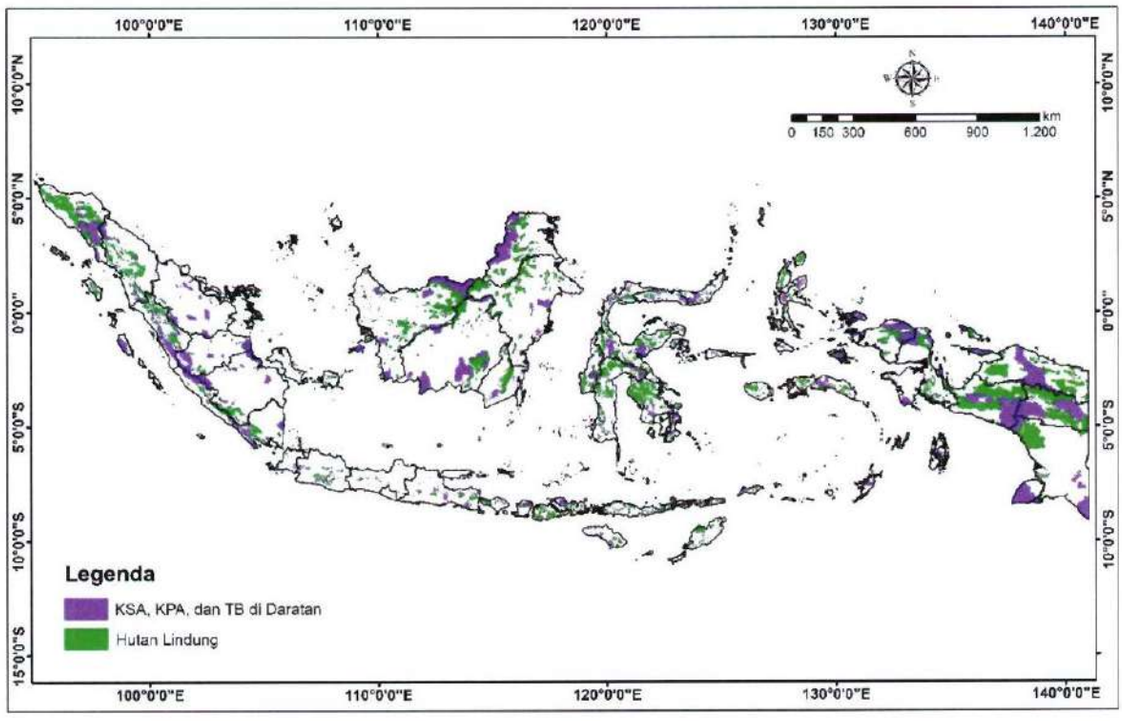

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

1.3.2 Tutupan Hutan Primer dan Hutan di Atas Lahan Gambut

Kawasan hutan harus dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya dan tampung lingkungan yang memungkinkan segala aktivitas ekonomi berjalan secara berkesinambungan. Pada tahun 2022, Indonesia memiliki tutupan hutan seluas 96,16 juta hektare yang tersebar di dalam dan luar kawasan hutan. Untuk mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, laju deforestasi harus dipertahankan tidak melebihi luasan 130.000 hektare per tahun.

Indonesia juga memiliki lahan gambut seluas 13,42 juta hektare yang sangat penting dalam penyimpanan karbon. Seluas 2,35 juta hektare dari luas lahan gambut tersebut merupakan hutan primer, sementara sekitar 11,07 juta hektare terdiri dari hutan sekunder, hutan tanaman, perkebunan, dan penggunaan lainnya. Selanjutnya, terdapat kawasan hutan di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain yang memiliki nilai jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati seluas 7,15 juta hektare yang harus dipertahankan keberadaannya. Kawasan tersebut berada di luar kawasan hutan yang sangat rentan untuk dialihfungsikan ke penggunaan lainnya dan pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk aktivitas ekonomi.

1.3.3 Habitat Spesies Kunci

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati sangat tinggi yang tersebar dalam 22 tipe ekosistem, baik di darat maupun di laut (IBSAP 2025–2045). Apabila dikelola dengan baik, kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa ini, mulai dari

ekosistem, spesies, dan genetik dapat menjadi modalitas dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Keberadaan ekosistem di Indonesia telah menjadi rumah bagi puluhan ribu spesies flora dan fauna yang berperan menjaga keseimbangan alam termasuk beberapa spesies endemik Indonesia antara lain Komodo (*Varanus komodoensis*), Orangutan (*Pongo spp.*), Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Maleo (*Macrocephalon maleo*), dan Anoa (*Bubalus spp.*). Keanekaragaman spesies yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari adanya peran daya dukung lingkungan yang memberikan dukungan terhadap keberlangsungan hidup setiap individu spesies, utamanya berupa ketersediaan habitat sebagai tempat untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak.

Salah satu faktor pembatas yang harus menjadi perhatian utama dalam merencanakan pembangunan di Indonesia adalah habitat dari spesies kunci. Spesies kunci merupakan flora dan fauna yang diprioritaskan untuk dilindungi serta dapat mewakili keanekaragaman hayati secara keseluruhan dalam sebuah ekosistem. Kehilangan spesies kunci akan mengakibatkan gangguan terhadap keberlanjutan struktur, fungsi, dan produktivitas dari habitat atau ekosistem tersebut.

Terdapat sembilan spesies kunci yang menjadi faktor pembatas di dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yaitu Babi Rusa, Anoa, Badak Jawa, Owa Jawa, Gajah Kalimantan, Orangutan Kalimantan, Orangutan Sumatra, Gajah Sumatra, dan Harimau Sumatra. Habitat spesies kunci ini diprakirakan akan berkurang secara signifikan akibat pengurangan luas tutupan hutan. Sebagai dampaknya, spesies-spesies tersebut semakin terancam punah. Prakiraan penurunan luas habitat kesembilan spesies kunci tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.42.

Gambar 1.42
Ancaman Penyusutan Tutupan Hutan pada Habitat Beberapa Spesies Kunci sampai dengan 2045

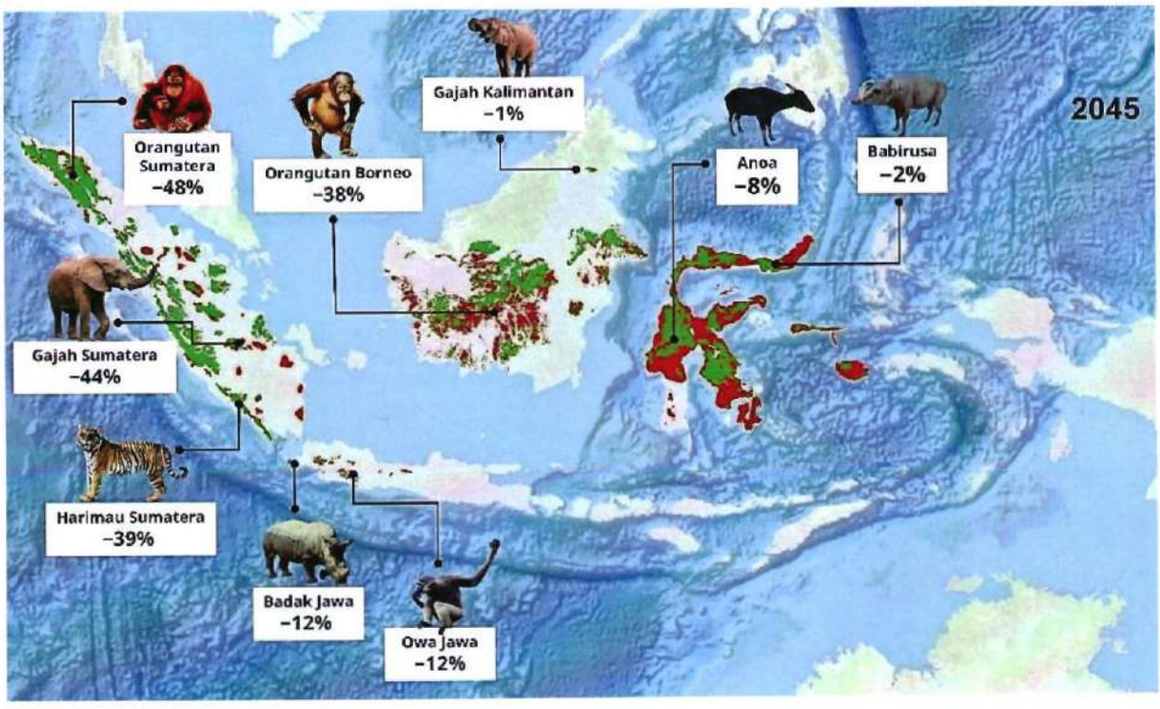

Analisis menunjukkan bahwa tutupan hutan pada habitat spesies kunci di sebelah barat garis Wallacea akan menyusut dari 80,3 persen pada tahun 2000 menjadi 49,7 persen pada tahun 2045, terutama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu, luas *key biodiversity areas* di sisi timur Garis Wallacea, khususnya wilayah Papua diperkirakan juga berkurang signifikan akibat masifnya pembangunan. Sebagai wilayah yang mengalami penurunan luas habitat spesies kunci terbesar, pembangunan di wilayah Sumatera dan Kalimantan harus lebih mempertimbangkan keberadaan habitat dari spesies yang terancam punah tersebut. Sesuai hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk luasan habitat spesies kunci, secara nasional yang harus dipertahankan di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru minimal seluas 43,2 juta hektare. Apabila luasan habitat satwa kunci ini tidak dapat dipertahankan, fungsi ekosistem dapat terganggu dan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

1.3.4 Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim menyebabkan berbagai perubahan pada lingkungan, seperti pola curah hujan yang tidak menentu, kenaikan temperatur air laut, kenaikan muka air laut, serta peningkatan kejadian iklim ekstrem. Di wilayah pesisir, dampak perubahan ini sangat nyata dengan meningkatnya risiko bahaya, salah satunya penggenangan pesisir (*coastal inundation*). Indonesia dengan garis pantai yang panjang dan banyaknya pulau-pulau kecil, menjadi salah satu wilayah yang paling terancam oleh perubahan iklim ini. Rendahnya resiliensi masyarakat pesisir terhadap ancaman tersebut menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi, hingga rusaknya ekosistem pantai.

Kombinasi antara penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut semakin memperparah risiko di wilayah pesisir. Di beberapa wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Semarang yang berada di pantai utara Pulau Jawa, penurunan tanah berlangsung dengan kecepatan 1–15 cm per tahun. Di luar Jawa, laju penurunan tanah bervariasi antara 1–8 cm per tahun. Dengan kenaikan muka air laut setinggi 50 cm yang diproyeksikan di masa depan, wilayah-wilayah padat penduduk di pesisir dapat tergenang secara permanen. Selain itu, pulau-pulau kecil juga terancam oleh abrasi dan penggenangan akibat kenaikan muka air laut, yang bisa menyebabkan hilangnya pulau-pulau tersebut dalam jangka panjang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 311 kabupaten/kota, 1.643 kecamatan, dan 6.367 desa/kelurahan di wilayah pesisir Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini berpotensi besar mengalami perpindahan penduduk, khususnya akibat abrasi dan bencana hidrometeorologi seperti banjir pesisir atau rob. Dalam kurun waktu 5–10 tahun terakhir, sekitar 234 kabupaten/kota, 796 kecamatan, dan 1.888 desa/kelurahan atau sekitar 30 persen dari total desa pesisir di Indonesia telah menunjukkan potensi perpindahan penduduk. Daerah ini mencakup 150 desa di kawasan metropolitan serta 92 desa di pulau-pulau kecil terluar, yang semakin memperparah risiko sosial-ekonomi (Gambar 1.43).

Gambar 1.43
Sebaran Kawasan Pesisir Rentan Perpindahan Penduduk sebagai Dampak Perubahan Iklim

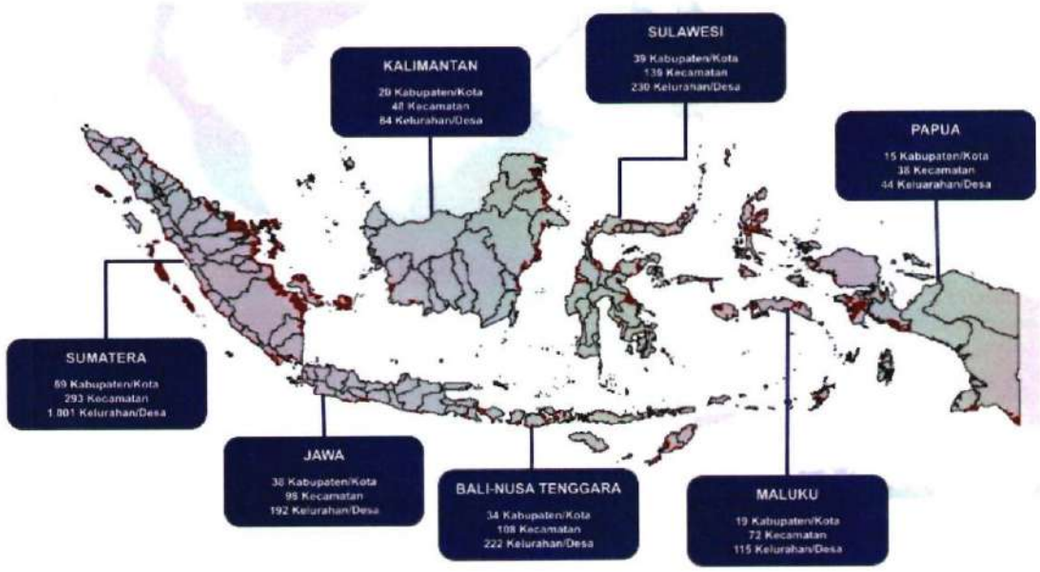

Sumber: Kajian People Displacement Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Perubahan iklim diprediksi akan membawa dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Data dari Climate Central menyebutkan bahwa sekitar 23 juta penduduk pesisir di Indonesia diproyeksikan akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, penting untuk memahami profil wilayah pesisir yang rentan agar bisa merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Profil ini harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berperan besar dalam menentukan ketahanan masyarakat pesisir.

1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

Kondisi geografis yang terletak di Cincin Api Pasifik menjadikan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Penelitian lain juga mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga belas zona *megathrust* di sepanjang pesisir barat dan selatan Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Laut Banda yang berpotensi mengakibatkan bencana gempa dan tsunami. Data ini menjadi bukti penting yang menunjukkan bahwa Indonesia dikelilingi kawasan yang rawan terhadap bencana.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana tahun 2023 menunjukkan bahwa 13 provinsi di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi, sementara 25 provinsi lainnya berada pada tingkat risiko bencana yang sedang. Tidak ada provinsi yang tergolong ke dalam kelas risiko bencana rendah. Provinsi dengan risiko bencana tertinggi adalah Sulawesi Barat, Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, provinsi dengan risiko bencana terendah adalah Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan DKI Jakarta.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 168 kabupaten/kota berada dalam klasifikasi risiko bencana tinggi dan 346 kabupaten/kota lainnya memiliki risiko bencana sedang (Gambar 1.44). Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Halmahera Selatan, dan

Kabupaten Nias Utara mencatatkan skor risiko bencana tertinggi. Hal ini menunjukkan tingkat kerentanan akan bencana yang tinggi dan perlunya perhatian lebih. Sementara itu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Kepulauan Seribu, dan Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki skor risiko bencana terendah, tetapi tetap perlu melakukan upaya pengurangan risiko bencana mengingat kabupaten/kota tersebut tergolong dalam klasifikasi risiko bencana sedang.

Gambar 1.44
Sebaran Tingkat Risiko Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2023

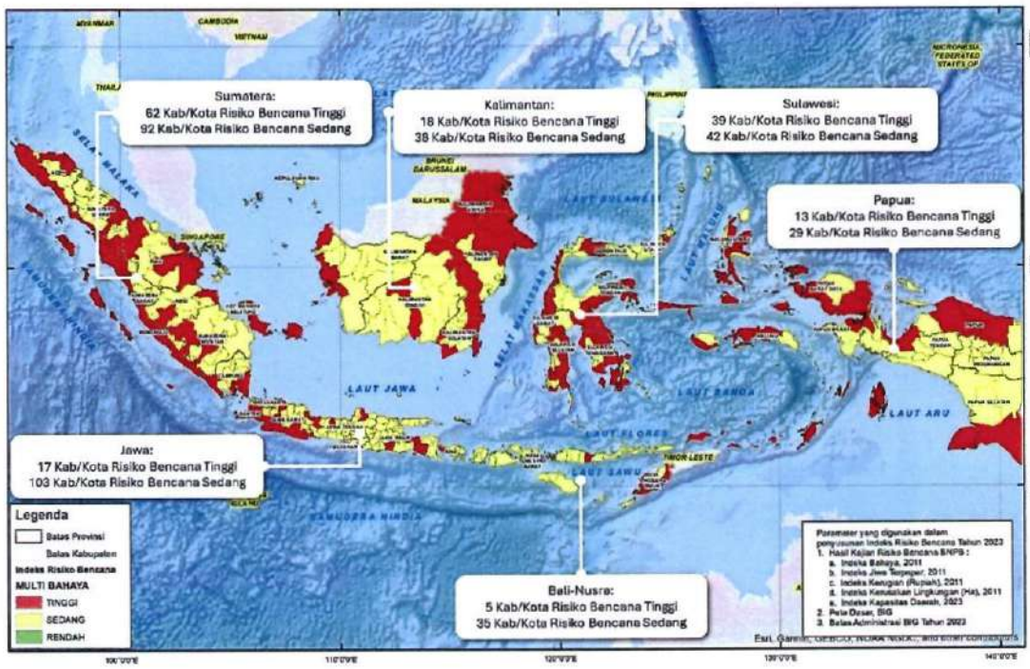

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023.

Data-data di atas menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang signifikan. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana.

1.3.6 Ketersediaan Air

Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya air untuk mendukung berbagai sektor kehidupan, terutama di tengah pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi. Ketersediaan air yang memadai sangat penting untuk menjamin pasokan air bersih, mendukung sektor pertanian, serta menopang berbagai industri yang menjadi pilar pembangunan. Potensi sumber daya air Indonesia tersebar di beberapa wilayah, dengan total air permukaan sebesar 2.783,3 miliar m^3 per tahun dan potensi air tanah dari cekungan air tanah sebesar 20.903,3 miliar m^3 per tahun. Namun demikian, potensi sumber daya air ini tidak diimbangi dengan penyebarannya.

Penyebaran potensi air di Indonesia belum merata baik secara musim maupun geografis. Wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa, yang menampung 56,1 persen populasi nasional, hanya memiliki 6,3 persen dari total ketersediaan air permukaan. Sebaliknya, wilayah-wilayah dengan sumber daya air melimpah seperti Papua (27,6 persen), Kalimantan

(28,5 persen), dan Sumatera (26,1 persen) menampung populasi yang jauh lebih kecil. Ketidakseimbangan distribusi air ini menimbulkan tekanan air (*water stress*) yang lebih besar di daerah-daerah dengan permintaan air tinggi.

Di sisi lain, keberadaan hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air alami tertekan akibat tingginya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Saat ini, 12,7 juta hektare lahan kritis sudah tidak berfungsi sebagai media pengatur tata air. Di sisi lain, jumlah hari hujan cenderung menurun, sementara intensitas hujan lebih lebat dan ekstrem. Perubahan ini meningkatkan risiko banjir di daerah hilir saat kejadian hujan ekstrem serta memperpanjang periode kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan air dalam memenuhi permintaan air di masa mendatang.

Gambar 1.45
Distribusi Ketersediaan Air dan Populasi per Pulau di Indonesia Berdasarkan Proporsi Nasional

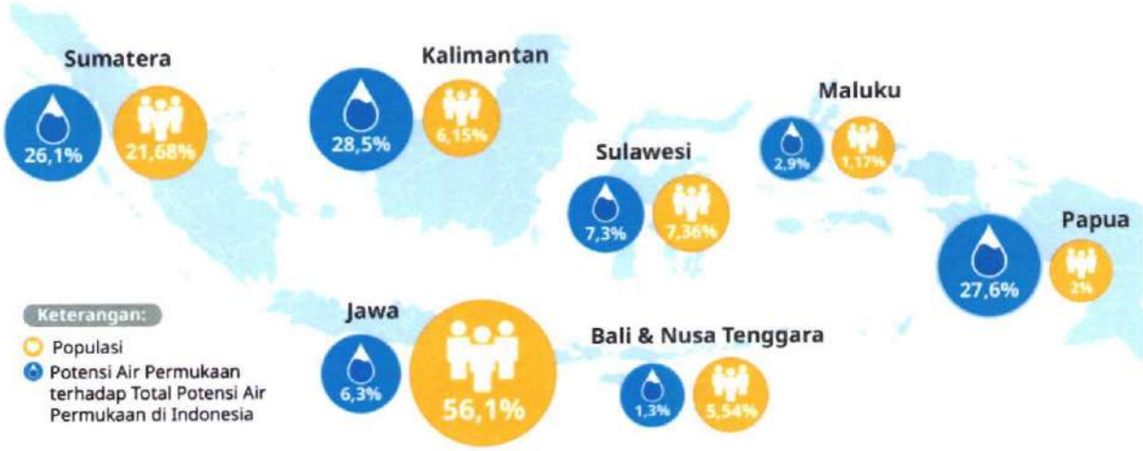

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

1.3.7 Ketersediaan Energi

Indonesia memiliki kekayaan cadangan energi dan sumber daya mineral yang sangat besar. Cadangan minyak yang telah terbukti mencapai 2,27 miliar barel, sementara cadangan potensialnya sebesar 1,9 miliar barel. Untuk gas alam, Indonesia memiliki cadangan total sebesar 54,83 triliun kaki kubik standar, terdiri dari 36,34 triliun kaki kubik standar cadangan terbukti dan 18,49 triliun kaki kubik standar cadangan potensial. Namun, berdasarkan rasio cadangan terhadap produksi, cadangan minyak diprakirakan akan habis dalam 6,7 tahun dan cadangan gas dapat bertahan selama 21,2 tahun. Cadangan batu bara Indonesia mencapai 36,30 miliar ton, dengan rasio cadangan terhadap produksi sekitar 65 tahun. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai mineral penting, termasuk nikel dengan cadangan bijih sebesar 5,24 miliar ton, tembaga 3,01 miliar ton, dan bauksit 3,22 miliar ton. Permintaan untuk mineral ini diproyeksikan akan meningkat dengan adanya transisi energi yang sedang berlangsung.

Pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia juga menawarkan potensi yang besar jika didukung oleh perkembangan teknologi, serta diharapkan akan meningkatkan daya saing terhadap energi fosil dan mengurangi biaya produksi listrik dari sumber-sumber seperti tenaga surya dan angin. Potensi total energi terbarukan di Indonesia diprakirakan mencapai

3.716 gigawatt, di mana energi surya mendominasi dengan total energi sebesar 3.294 gigawatt. Sisanya berasal dari biomassa, air, panas bumi, angin, laut, dan energi terbarukan lainnya. Meskipun begitu, pada tahun 2023, pemanfaatan energi terbarukan di sektor listrik baru mencapai sekitar 13,3 gigawatt atau hanya 0,35 persen dari total potensi yang ada.

Gambar 1.46
Sebaran Potensi Sumber Daya Energi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

1.3.8 Kapasitas dan Keterbatasan Ruang Fiskal

Ruang fiskal Indonesia saat ini relatif terbatas di tengah upaya Indonesia untuk keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju. Hal tersebut tecermin dari indikator penerimaan perpajakan Indonesia yang terus menurun secara historis. Rasio perpajakan Indonesia pernah mencapai 20 persen produk domestik bruto pada tahun 1980-an. Namun hingga tahun 2024, rasio perpajakan Indonesia terus menurun menjadi sebesar 10,1 persen produk domestik bruto. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal Indonesia justru menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan negara lain, rasio perpajakan Indonesia merupakan salah satu yang terendah. Dibandingkan kelompok negara maju, rasio perpajakan Indonesia di tahun 2023 mencapai 10,3 persen produk domestik bruto, sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan Inggris (27,3 persen produk domestik bruto), Meksiko (14,3 persen produk domestik bruto), Brazil (14,2 persen produk domestik bruto), dan Kanada (14,0 persen produk domestik bruto). Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kelompok negara Association of Southeast Asian Nations, Indonesia juga relatif tertinggal dengan Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Laos, Malaysia, dan Timor Leste. Hal tersebut menunjukkan rasio perpajakan Indonesia yang relatif masih rendah dibandingkan dengan berbagai kelompok negara.

Studi komparatif dengan beberapa negara memperlihatkan bahwa untuk menjadi negara maju, dukungan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara sangat diperlukan. Sebagai contoh, Korea Selatan pada tahun 1995 berhasil lepas dari *middle income trap* dengan rasio

penerimaan negara pada saat itu mencapai 17,6 persen produk domestik bruto. Chile pada tahun 2013 juga berhasil lepas dari *middle income trap* dengan rasio penerimaan negara sebesar 20,6 persen produk domestik bruto.

Kebutuhan pendanaan RPJMN Tahun 2020–2024 dihadapkan pada tantangan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah. Dalam periode RPJMN Tahun 2020–2024, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4–Rp35.455,6 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan badan usaha milik negara menyumbang masing-masing sebesar 8,4–10,1 persen dan 8,5–8,8 persen, sedangkan sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta. Sementara itu, dari sisi kemampuan pemerintah, pendapatan negara melalui penerimaan pajak (*tax ratio*) masih berada pada kisaran kurang dari 11 persen. Tantangan tersebut juga tampak pada kondisi defisit yang mencapai Rp3.192 triliun selama periode tahun 2020–2024 atau rata-rata Rp638 triliun per tahun.

Sebagai gambaran konkret lainnya, kebutuhan pendanaan infrastruktur untuk meningkatkan stok infrastruktur menjadi 50 persen *gross domestic product* pada tahun 2024 membutuhkan anggaran Rp6.445 triliun dengan rencana porsi pemerintah sebesar 37 persen, penugasan badan usaha milik negara/daerah sebesar 21 persen, dan peran swasta sebesar 42 persen. Kondisi ini perlu disikapi dengan memperkuat dukungan pendanaan non-anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui swasta atau pendanaan inovatif lainnya.

Dengan keterbatasan ruang fiskal tersebut, agenda pemerintah untuk mengatasi isu lingkungan, perubahan iklim, dan upaya mewujudkan *net-zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat memerlukan dukungan pembiayaan inovatif yang melibatkan partisipasi serta kolaborasi lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat.

1.4 Peluang dan Tantangan Pembangunan

1.4.1 Peluang Pembangunan

(1) Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

Resiliensi Ekonomi

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia adalah contoh negara di Asia yang memiliki resiliensi positif dalam perekonomian (World Bank, 2024).

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi cenderung stabil pada kisaran 5,0-6,0 persen selama periode 2005–2019, dan kembali berkinerja positif pasca COVID-19 dengan pertumbuhan 5,05 persen (yoy) pada 2023. Bank Indonesia merilis tren inflasi dalam kurun 2012 hingga 2024 yang cenderung mengalami penurunan rata-rata 0,32 persen per tahun. Inflasi yang stabil dan terkendali, menciptakan ruang kebijakan untuk fokus pada ekspansif kebijakan fiskal guna mendorong pertumbuhan sektor riil. Surplus neraca perdagangan yang konsisten selama periode 2020-2024, terutama sektor nonmigas sebesar 27.628,8 juta USD pada 2020 dan meningkat menjadi 41.823,0 juta USD pada 2024 (Kementerian Perdagangan, 2024). Hal ini memberikan peluang untuk memperkuat cadangan devisa, stabilitas nilai tukar, dan investasi sektor strategis seperti infrastruktur, industri pengolahan, dan teknologi.

(2) Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan

Hutan produksi seluas **37,95 juta** hektare ► telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan

Hutan produksi dan hutan lindung seluas **56,62 juta** hektare ► belum dibebani izin usaha pemanfaatan hutan (KLHK, 2024)

Hutan seluas **8,01 juta** hektare ► dikelola oleh masyarakat dengan skema Perhutanan Sosial (PS) (KLHK,2024)

Sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik. Terdapat 22 tipe ekosistem alami, termasuk tutupan lahan berhutan seluas 95,56 juta hektare dan perairan laut seluas 325,74 juta hektare yang tersebar dalam tujuh ekoregion (BPS, 2023; KKP, 2024). Indonesia juga memiliki keanekaragaman spesies di daratan dan perairan, serta potensi sumber daya genetik yang dapat dikembangkan menjadi sumber pangan, obat, bioenergi, dan biomaterial melalui bioekonomi dan bioprospeksi.

Keanekaragaman hayati Indonesia berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, sektor kehutanan berkontribusi sekitar 3,8 miliar USD terhadap PDB tahun 2021-2023, serta sektor perikanan sekitar 32,11 miliar USD atau setara dengan 2,6% dari PDB Indonesia (BPS, 2023). Kontribusi ekonomi sektor kehutanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan energi dapat ditingkatkan melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan mekanisme Multi Usaha Kehutanan. Selain itu, skema perhutanan sosial juga berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui *agroforestry, silvofishery, silvopasture,* dan kegiatan usaha kehutanan lainnya.

Selain potensi ekonomi, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mendukung pembangunan di antaranya:

- penyedia jasa lingkungan (termasuk air dan oksigen)
- sumber penghidupan masyarakat
- edukasi dan pelestarian budaya

- penyimpan karbon, terutama vegetasi gambut dan mangrove (kawasan hutan memiliki lahan gambut tropis seluas **9,9 juta ha** dari total **13,4 juta ha** lahan gambut yang ada di Indonesia).

Indonesia tidak hanya memiliki potensi keanekaragaman hayati, tetapi juga potensi EBT dan mineral. Potensi EBT mencapai 3.687 GW meliputi energi surya, hidro, panas bumi, bioenergi, bayu, dan energi laut. Sementara berdasarkan data KESDM tahun 2023, potensi mineral terdiri dari:

- komoditas nikel sebesar **17,3 miliar ton**
- komoditas bauksit sebesar **6,2 miliar ton**
- komoditas tembaga sebesar **15,8 miliar ton**
- komoditas timah sebesar **7,3 m³**

Selain itu telah ditetapkan 47 mineral kritis yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional dan pertahanan keamanan negara.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki luas perairan laut 6,4 juta km² dengan potensi sumber daya perikanan 12,01 juta ton pada 11 wilayah pengelolaan perikanan. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut dan ekosistem pesisir yang terdiri dari 3,36 juta hektare mangrove, 293 ribu hektare lamun, dan 2,5 juta hektare terumbu karang. Untuk menjamin keberlanjutan dari keanekaragaman hayati laut tersebut, pada tahun 2023 Indonesia telah menetapkan 29,1 juta hektare kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sumber daya perikanan dan ekosistem tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan ketahanan pangan akuatik dan meningkatkan kesehatan laut Indonesia.

(3) Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Sosial

Populasi besar ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meraih bonus demografi dan meningkatkan daya saing nasional.

- Membuka peluang besar menjadi penyedia sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi baik laki-laki dan perempuan yang mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui dukungan pendidikan dan keterampilan yang memadai serta pembentukan lingkungan pendukung ramah perempuan dan keluarga.
- Produktivitas tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan, yang dapat menjadi instrumen mencegah konflik dan memperkuat kerukunan dan persatuan.

(4) Pengembangan Teknologi

Sebanyak 67 persen populasi dunia telah terhubung dengan internet pada tahun 2023 (UNDP, 2024).

Teknologi digital berperan sebagai *enabler* yang mendorong kemajuan di berbagai sektor termasuk pengembangan dan perluasan infrastruktur digital yang kokoh.

2.778 peneliti *artificial intelligence* (AI), diperkirakan dapat membantu pekerjaan manusia hingga sekitar 50 persen pada tahun 2047 (UNDP, 2024). Peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi .

Peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui:

- Revolusi industri 4.0 (otomatisasi, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things*) yang akan semakin matang.
- Industri 5.0 (kolaborasi manusia dan mesin membuka peluang efisiensi tinggi di berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan).
- Pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) dalam memprediksi dan mengelola risiko teknologi, serta memprediksi potensi bencana alam dengan memberikan mitigasi risiko yang lebih baik

(5) Sumber-Sumber Pertumbuhan Inovatif

Untuk mencapai target pertumbuhan tinggi dalam jangka menengah, dibutuhkan sektor- sektor produktif sebagai sumber-sumber pertumbuhan inovatif.

Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

Industrialisasi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam

Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau

Pengembangan ekonomi digital *(e-commerce, financial technology)*

1.4.2 Tantangan Pembangunan

(1) Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015–2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010–2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971–1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005–2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005–2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010–2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015–2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

Gambar 1.47
Rata-rata Pertumbuhan TFP
Index Antarnegara

Gambar 1.48
Total Factor Productivity Index
2010–2022 (2010=1,0)

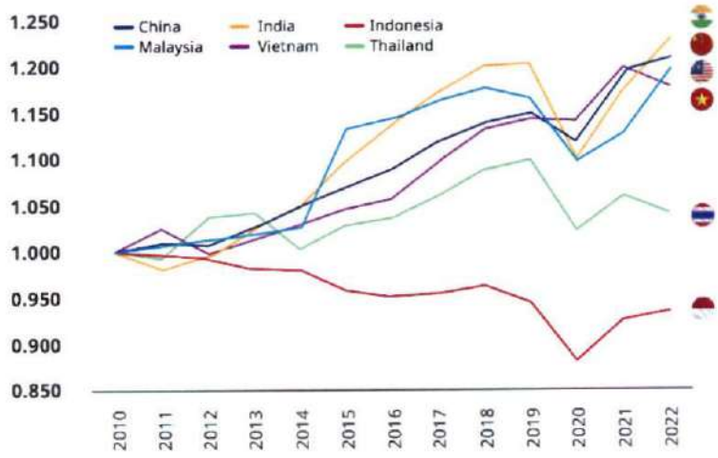

Sumber: Asian Productivity Organization (2024), diolah

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

(2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Co-operation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019–2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

(4) Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

(5) Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan *(triple planetary crisis)* yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50–75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diprakirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particulate matter* 2,5 (World Health Organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga

yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment Programmė, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

(6) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inflasi global diprakirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary

Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tecermin dari penurunan *Baltic Dry Index level* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022.

Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

(7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/*Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019–2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

BAB II
Kebijakan Pembangunan

2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

2.1.1 RPJMN Tahun 2025–2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPN Tahun 2025–2045

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2.1
Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

Dalam RPJPN Tahun 2025–2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan (Gambar 2.2) dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.

Gambar 2.2
Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045

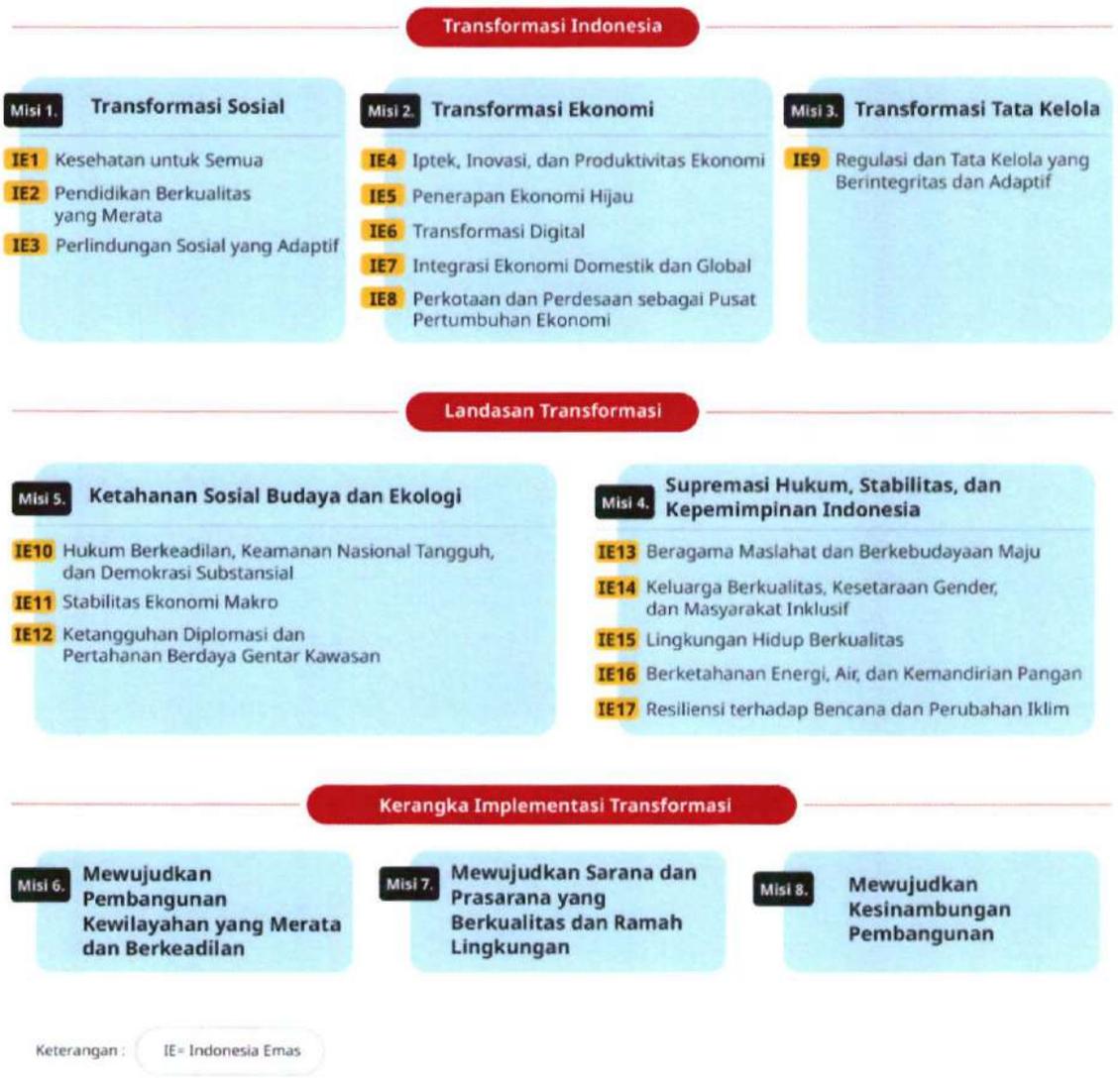

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025–2045 (Gambar 2.3).

Gambar 2.3
Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I

Tahapan Pertama Merupakan Penguatan Transformasi

Transformasi Sosial	• Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial • Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif
Transformasi Ekonomi	• Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan • Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja • Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama • Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia • Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa
Transformasi Tata Kelola	• Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi • Penyempurnaan fondasi penataan regulasi • Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi • Peningkatan kualitas ASN berbasis merit • Kebijakan pembangunan berbasis bukti • Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan • Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi • Penguatan kapasitas masyarakat sipil
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	• Pembaharuan substansi hukum • Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila • Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional • Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai • Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif • Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan • Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi • Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	• Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat • Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana • Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup • Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan • Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK
Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	• Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi • Pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa) • Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital • Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN) • Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*)
Kesinambungan Pembangunan	• Reformasi tata kelola fiskal • Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan nonpemerintah

Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

2.1.2 Visi Misi Presiden 2025–2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"*. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Gambar 2.4
Visi Misi Presiden

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 2.5
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

2.1.3 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

Gambar 2.6
Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025–2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025–2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Gambar 2.7
Keterkaitan RPJMN Tahun 2025–2029 dengan RPJPN Tahun 2025–2045

2.2 Kerangka Pikir dan Kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029

RPJMN Tahun 2025–2029 mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan teknokratik dan politis. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045. Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan.

Kesatuan arah pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu RPJMN Tahun 2025–2029 juga menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga. Di samping itu rencana pembangunan daerah juga harus diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025–2029. Selain sinkronisasi di bidang perencanaan, sinergi antara perencanaan dan penganggaran juga merupakan bagian yang penting di dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan tidak hanya mencakup strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan namun mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi di seluruh Indonesia. *Highlight* intervensi kebijakan wilayah dan provinsi ini disusun untuk menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah.

Gambar 2.8
Kerangka Pikir RPJMN Tahun 2025–2029

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, langkah penguatan juga dilakukan pada tata kelola pembangunan terutama pada aspek pengendalian pembangunan secara terpadu. Pengendalian memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Pengendalian pembangunan dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko pembangunan nasional.

2.2.1 Sasaran Pembangunan Nasional

RPJMN Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Gambar 2.9
Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025–2029

Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya ungkit RPJMN Tahun 2025–2029 dalam mencapai sasaran pembangunan.

2.2.2 Strategi Prioritas Pembangunan

RPJMN Tahun 2025–2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Strategi menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Pada periode 2025–2029, pemerintah menetapkan dua target utama dalam upaya penurunan kemiskinan. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5–5,0 persen, sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Kedua, menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5 persen pada tahun 2026, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target kemiskinan ekstrem ini juga mengikuti standar internasional pada USD 2,15 *Purchasing Power Parity* per kapita per hari. Fokus diarahkan pada penduduk paling miskin, kelompok rentan yang menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak, serta penduduk miskin dan rentan, perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan terluar sampai dapat tergraduasi dari kemiskinan. Untuk mendukung efektivitas strategi penurunan kemiskinan, akan dilakukan penyempurnaan metodologi penghitungan angka kemiskinan, agar lebih akurat, sesuai dengan perkembangan standar hidup layak, serta terbandingkan antar waktu dan wilayah.

Gambar 2.10
Kerangka Pikir Penurunan Kemiskinan dalam RPJPN pada periode RPJMN Tahun 2025–2029

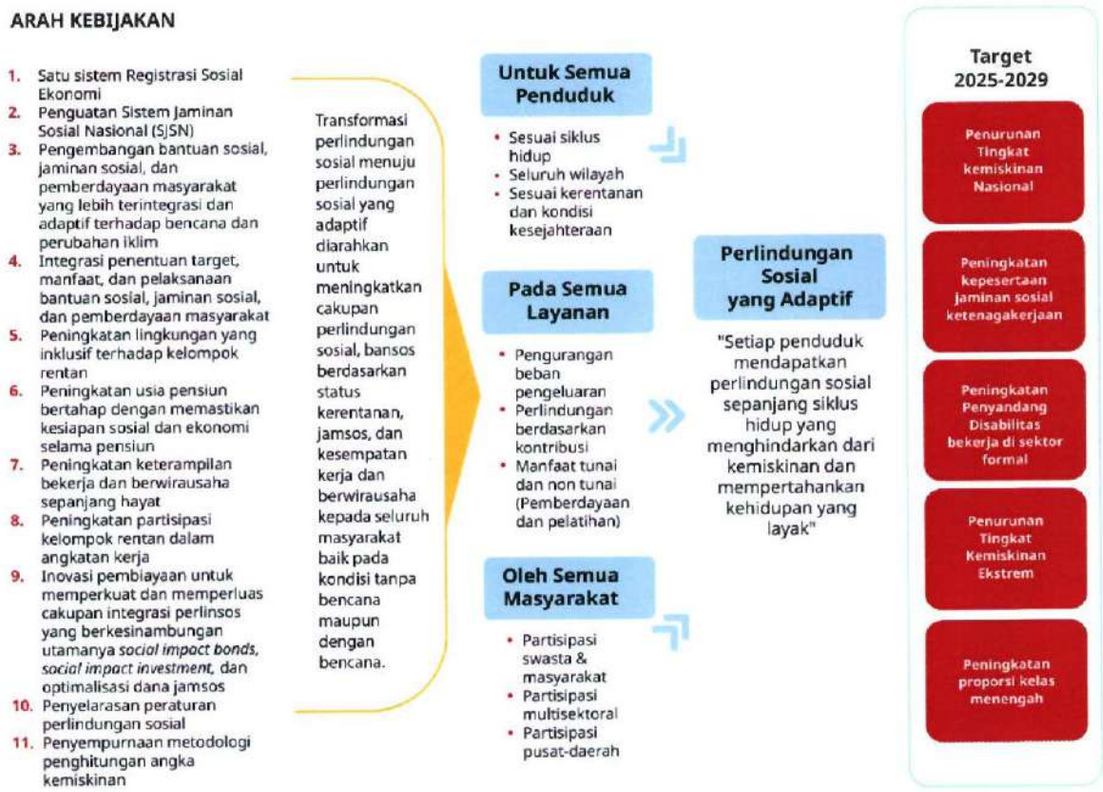

Pemerintah menempatkan perlindungan sosial adaptif sebagai motor penggerak untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pendekatan ini mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, termasuk melalui pengembangan dan standardisasi kegiatan yang selama ini belum dianggap berkontribusi pada perekonomian, seperti pendampingan pembangunan dan perawatan kelompok rentan (*caregiving*).

Gambar 2.11
Strategi Empat Pilar Utama Penurunan Kemiskinan

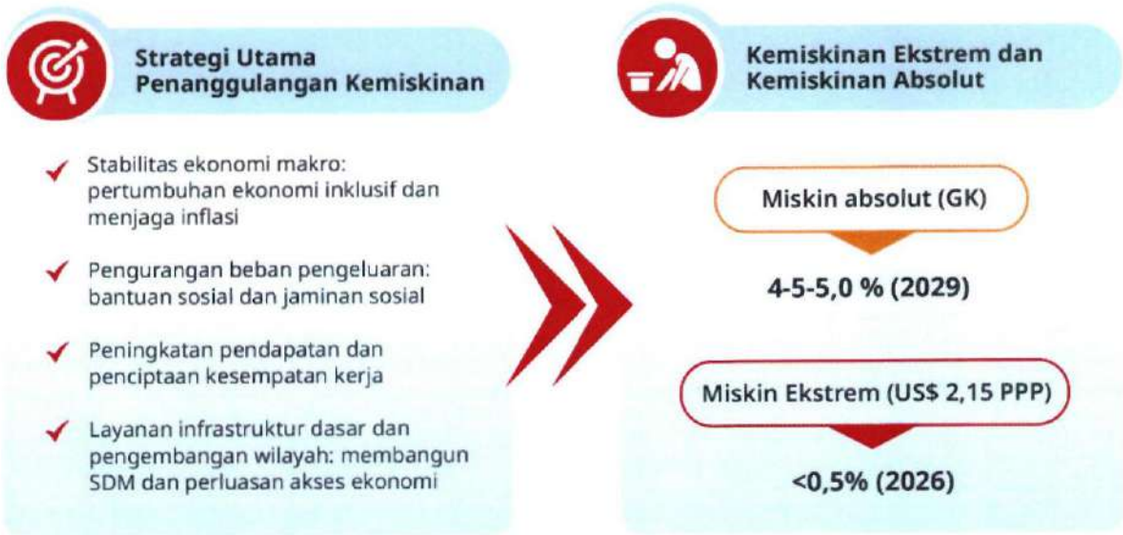

Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah menetapkan empat strategi. Strategi pertama adalah memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif bertujuan memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat.

Strategi kedua dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai alat integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Untuk mendukung akurasi dan efektivitas pelaksanaan, pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi dalam penargetan yang secara terus menerus dimutakhirkan dan berbagi pakai melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi serta diperkuat melalui teknologi digital dalam penyaluran.

Strategi ketiga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha untuk mendukung graduasi dari kemiskinan. Langkah yang dilakukan termasuk melalui peningkatan kapasitas yang relevan serta berbasis potensi dan kebutuhan, perluasan akses terhadap sumber daya produktif, dan penerapan prinsip afirmatif. Strategi Kartu Usaha menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi dengan sektor swasta.

Strategi keempat memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Strategi ini difokuskan pada 10 provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya serta wilayah-wilayah 3T dan kantong kemiskinan. Intervensi akan dilakukan melalui penyediaan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya.

Gambar 2.12
Prasyarat Penurunan Kemiskinan

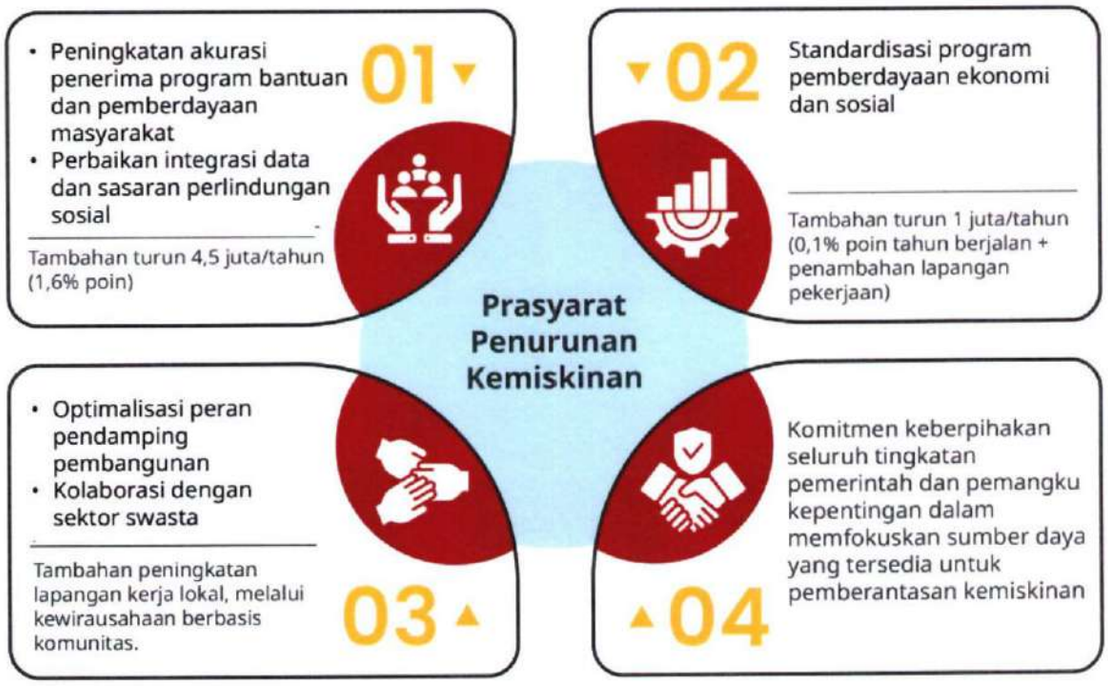

Strategi penurunan kemiskinan tersebut dilakukan dengan pendekatan lintas sektor lintas Prioritas Nasional. Hal ini membutuhkan prasyarat yaitu *pertama*, integrasi dan peningkatan akurasi data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, penerapan pendekatan yang terstandar, inklusif, dan berkesinambungan dalam perluasan program pemberdayaan ekonomi dan sosial. *Ketiga*, optimalisasi pendampingan pembangunan dan peningkatan kolaborasi strategis multi sektor dengan partisipasi kuat masyarakat dan sektor swasta untuk mempercepat peningkatan keberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, mendorong kewirausahaan berbasis komunitas, dan meningkatkan akses terhadap pasar serta teknologi. *Keempat*, komitmen keberpihakan seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memfokuskan sumber daya yang tersedia untuk pemberantasan kemiskinan.

Melalui sinergi dari keempat strategi ini, pemerintah optimis penurunan kemiskinan dapat tercapai. Pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi landasan untuk memastikan program-program yang dijalankan memiliki dampak yang nyata dan berkesinambungan.

Strategi meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan manusia menempatkan manusia dan masyarakat pada bagian sentral sebagai obyek dan subyek pembangunan. Dengan memprioritaskan pembangunan manusia, sebuah negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan.

Pemerintah diberi mandat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan manusia menempatkan manusia dan masyarakat pada bagian sentral sebagai obyek dan subyek pembangunan.

Ketergantungan pada sumber daya alam tanpa berpusat pada pembangunan manusia mengakibatkan pembangunan akan bersifat tidak berkelanjutan (*unsustainable*).

Tujuan upaya pembangunan manusia adalah membangun manusia dan masyarakat yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing.

Diperlukan transformasi pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup untuk masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif.

Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia, dan pembangunan modal sosial budaya. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang. Lebih lanjut, ilustrasi kerangka pikir pembangunan manusia digambarkan berikut ini.

Gambar 2.13
Kerangka Pikir Pembangunan Manusia RPJPN 2025–2045

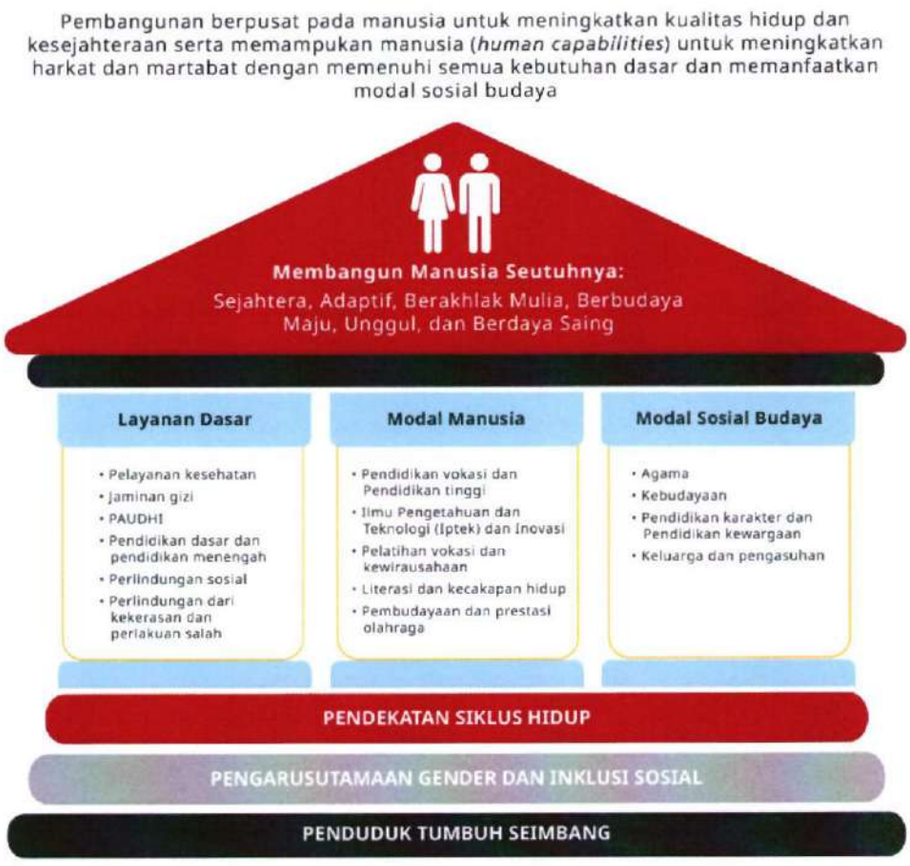

Sebagai tolok ukur capaian peningkatan kualitas sumber daya manusia pada RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029, digunakan Indeks Modal Manusia yang merefleksikan potensi kontribusi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan keterjangkauan akses dan kualitas pembangunan yang tersedia selama periode tumbuh kembang manusia. Dalam lima tahun ke depan, Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat dari 0,54 di tahun 2020 menjadi 0,59 di tahun 2029.

Pilar utama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang produktif adalah intervensi secara konkret dalam pendidikan dan kesehatan. Intervensi kunci di bidang pendidikan antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, penguatan pengelolaan pendidik, serta penciptaan tenaga kependidikan berkualitas. Strategi peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui wajib belajar 13 tahun; pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul; revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas; restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, perlindungan hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja; perluasan layanan pendidikan anak usia dini; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi; serta peningkatan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan vokasi berdaya saing unggul.

Gambar 2.14
Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Peningkatan Kualitas SDM

Kondisi Perlu

1. Peningkatan Efektivitas Belanja Pemerintah Pusat
2. Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah
3. Tata Kelola Pelayanan Publik
4. Penerapan dan Penegakan Hukum
5. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
6. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan
7. Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan
8. Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan
9. Penguatan Resiliensi Anak
   Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan perlakuan salah lainnya
10. Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak
11. Rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan

Enabler

1. Pengembangan Konektivitas jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan
2. Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran
3. Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi
4. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya
5. Penguatan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang logistik
6. Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, Pramuka, dan pencegahan perilaku berisiko
7. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro
8. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
9. Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba
10. Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan
11. Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi
12. Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan
13. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional
14. Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa
15. Pembangunan Daerah Tertinggal
16. Pengembangan dana sosial keagamaan produktif
17. Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
18. Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga
19. Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi bagi Keluarga Rentan
20. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
21. Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan

Intervensi Kunci Pendidikan

1. Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
2. Pembangunan den penyelenggoraan sekolah unggul
3. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas
4. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
5. Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
6. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
7. Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
8. Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi

Intervensi Kunci Kesehatan

1. Penurunan kematian ibu dan anak
2. Pencegahan dan Penurunan *stunting*
3. Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
4. Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
5. Penuntasan Tuberkulosis
6. Investasi pelayanan kesehatan primer
7. Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota
8. dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
9. Pengendalian penyakit menular lainnya
10. Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa
11. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro
12. Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan

Sedangkan di bidang kesehatan, intervensi kunci terdiri dari pencegahan *stunting* serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Strategi pencegahan *stunting* difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan. Strategi peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa diwujudkan melalui peningkatan akses dan manajemen terpadu pelayanan kesehatan; penguatan deteksi dini penyakit, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa disertai investasi pelayanan primer untuk perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan.

Strategi mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga ujung tombak ini bekerja secara sinergis. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dalam kondisi ini, pembangunan tidak hanya bertumpu pada angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ujung tombak mendorong terciptanya lapangan kerja, investasi produktif, dan inovasi. Melalui industrialisasi, digitalisasi, pengembangan infrastruktur serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah sesuai keunggulannya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga memperkuat basis fiskal untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3 persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029. Secara konkret terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*. Lebih lanjut disampaikan pada infografis di bawah ini.

8 Strategi

+

Deregulasi Perijinan serta Kebijakan Fiskal dan Moneter *pro-Growth*

- Peningkatan Produktivitas Pertanian menuju Swasembada Pangan
- Industrialisasi (hilirisasi): padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau
- Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
- Transformasi Digital
- Investasi: FDI berorientasi ekspor dan Investasi non-APBN
- Belanja negara untuk produktivitas:
  - ✓ Makan Bergizi Gratis
  - ✓ Pembangunan 3 juta rumah
  - ✓ dll

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan kontribusi dari pertumbuhan wilayah, dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci. Dalam hal ini terdapat faktor pendorong yang dapat mengakselerasi pemerataan antarwilayah sebagai berikut.

Sumatera

Perekonomian **Sumatera** didorong melalui **hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan** (karet, kelapa sawit, perikanan, dan juga industri kimia dasar), pengembangan **KSPP Sumatera Selatan**, serta **peningkatan aktivitas pariwisata** melalui pengembangan DPP Danau Toba.

Kalimantan

Perekonomian **Kalimantan** didorong melalui **pengembangan *Superhub* Ekonomi Nusantara, pembangunan IKN, pengembangan KSPP Kalteng**, serta hilirisasi bauksit dan kelapa sawit.

Sulawesi

Perekonomian **Sulawesi** didorong melalui **penguatan industri hilir berbasis sumber daya hayati dan mineral** khususnya **nikel**, serta **peningkatan aktivitas pariwisata** pada DPP Manado-Likupang dan DPP Wakatobi.

Maluku

Perekonomian **Maluku** didorong pertama melalui **hilirisasi industri pengembangan pertambangan nikel, pengembangan KI Pulau Obi dan KI IWIP Teluk Weda, penguatan Kawasan DPP Morotai, pengembangan sektor pertanian komoditas unggulan**, serta **pengembangan kota.**

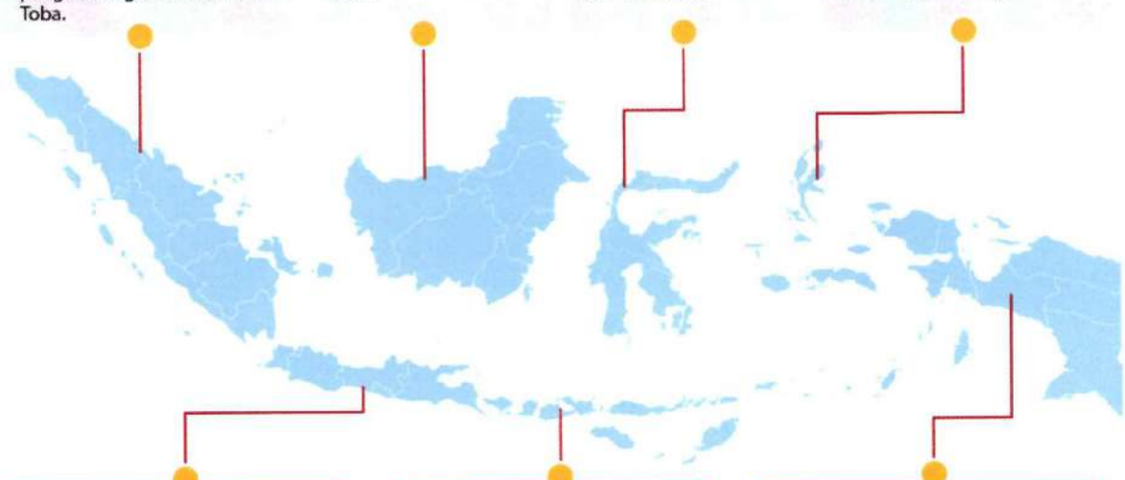

Jawa

Perekonomian **Jawa** didorong melalui **penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif** dan **aktivitas pariwisata**, seperti *Borobudur as The World's Largest Buddhist Pilgrimage Destination*, Yogyakarta dan Prambanan, **optimalisasi kinerja industri hilir dan berteknologi tinggi**, dan **pengembangan Wilayah Metropolitan.**

Bali - Nusa Tenggara

Perekonomian **Bali - Nusra** didorong melalui **hilirisasi industri** rumput laut dan tembaga, **penguatan sektor pariwisata** dengan penataan **DPP Labuan Bajo, DPP Lombok-Gili Tramena**, dan **Kawasan Pariwisata Ulapan** Bali, serta **pengembangan Kawasan Perkotaan Singaraja, Mataram**, dan **Labuan Bajo.**

Papua

Perekonomian **Papua** didorong melalui **pengembangan kawasan pariwisata** seperti DPP Raja Ampat, pariwisata rintisan berbasis bahari, budaya, dan minat khusus, **peningkatan infrastruktur** dan **konektivitas** untuk menunjang **empat daerah otonom baru, peningkatan aktivitas pertanian** dan **perikanan berbasis komoditas unggulan**, seperti pengembangan KSPP di Papua Selatan.

Pendekatan lintas sektor digunakan dalam mengoperasionalkan strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di dalam Prioritas Nasional 2 dititikberatkan pada langkah mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, ekonomi hijau, ekonomi digital, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi biru.

Prioritas Nasional 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Swasembada Pangan

- Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan
- Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya
- Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)
- Pengembangan Pangan Hewani
- Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati

Swasembada Energi

- Peningkatan Penyediaan Energi
- Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi
- Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan

Ekonomi Digital

- Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital
- Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya

Swasembada Air

- Konservasi Sumber Daya Air
- Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa

Pertahanan dan Keamanan

- Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema *Spend to Invest*

Ekonomi Hijau

- Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik
- Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
- Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR

Ekonomi Biru

- Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut

Prioritas Nasional 3 menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selanjutnya Prioritas Nasional 4 menitikberatkan pada pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas.

Prioritas Nasional 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Pengembangan Infrastruktur

- Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital
- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
- Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
- Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
- Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
- Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena
- Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim

Prioritas Nasional 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Pengembangan SDM Berkualitas

- Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi
- Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
- Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

Prioritas Nasional 5 menitikberatkan pada hilirisasi Sumber Daya Alam unggulan, industri padat karya terampil, industri padat teknologi inovasi, industri dasar, dan pengembangan kawasan.

Prioritas Nasional 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Hilirisasi SDA Unggulan

- Pengembangan Hilirisasi Nikel
- Pengembangan Hilirisasi Tembaga
- Pengembangan Hilirisasi Bauksit
- Pengembangan Hilirisasi Timah
- Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit
- Pengembangan Hilirisasi Kelapa
- Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut

Industri Padat Karya Terampil

- Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Industri Padat Teknologi Inovasi

- Pembangunan Industri Semikonduktor
- Pengembangan Industri Dirgantara

Industri Dasar

- Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja
- Pengembangan Industri Kimia

Pengembangan Kawasan

- Pengembangan KEK Sei Mangkei
- Pengembangan KIT Batang
- Pengembangan KI Weda Bay

Adapun Prioritas Nasional 6 menitikberatkan pada pemerataan ekonomi, Prioritas Nasional 7 menitikberatkan pada reformasi birokrasi, serta Prioritas Nasional 8 menitikberatkan pada mitigasi dampak lingkungan.

Prioritas Nasional 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Pemerataan Ekonomi

- Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa
- Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
- Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU

Prioritas Nasional 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Reformasi Birokrasi

- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan
- Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN

Prioritas Nasional 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Mitigasi Dampak Lingkungan

- Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut

Transformasi sektor publik sebagai pengungkit mewujudkan strategi penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Untuk dapat menjadi pengungkit kuat pencapaian sasaran pembangunan diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Transformasi digital merupakan elemen kunci mendorong birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel termasuk mengurangi kebocoran anggaran melalui pendekatan yang berbasis data dan bukti.

Kebijakan publik yang masih mengandalkan kepada cara kerja lama dengan kultur pelayanan yang konvensional akan segera kadaluwarsa

Pembangunan nasional perlu mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola sektor publik.

- Birokrasi yang lincah *(agile)*
- Adaptif, bervisi melampaui zamannya *(thinking ahead)*, secara terus menerus *(thinking again)*
- Dalam horizon berpikir luas lintas batas *(thinking across)*
- Pengambilan keputusan berbasis bukti *(evidence based)*
- didukung dengan data terintegrasi *(integrated big-data)*

RPJMN 2025– 2029 menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan.

Diperlukan fondasi yang kokoh melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh, didukung transformasi digital sebagai elemen kunci.

Penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi langkah utama meliputi penyusunan kebijakan digital yang terintegrasi, pengembangan arsitektur sistem digital pemerintahan, dan evaluasi berkelanjutan atas kinerja sistem yang ada. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya digital menjadi aspek fundamental, dengan fokus pada pelatihan berbasis teknologi, dan pengelolaan layanan digital secara profesional. Transformasi digital layanan publik dalam pemerintah digital diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha. Layanan ini dirancang agar cepat, tepat, dan terjangkau. Upaya ini didukung oleh penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Data yang terintegrasi dan saling terhubung antarinstansi menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat.

Pemerintah Digital

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital
2. Penguatan Teknologi Pemerintah Digital
3. Pengembangan Budaya dan Kompetensi Digital ASN
4. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
5. Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data

Peran Pemerintah Digital sebagai pengungkit pembangunan:

- Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu sehingga pengelola program perlindungan sosial dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Didukung oleh kebijakan Satu Data Indonesia untuk memastikan penyaluran manfaat kepada kelompok yang membutuhkan secara efisien.
- Pemerintah digital berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi. Proses perizinan yang transparan, cepat, dan akurat mendorong investasi baru, meningkatkan daya saing ekonomi, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
- Sistem pengadaan berbasis elektronik yang lebih baik dan maju, sistematis, serta terintegrasi dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa.
- Modernisasi teknologi sistem perpajakan dapat memberikan banyak manfaat sebagai upaya meningkatkan rasio pajak, meminimalisir penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.
- Pemerintah digital berperan sebagai pengungkit pembangunan melalui transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan. Melalui pengembangan platform layanan publik terpadu, pemerintah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Sistem yang terintegrasi ini memastikan layanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program pemerintah digital diharapkan tercipta fondasi yang kuat untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik. Dengan teknologi yang andal, data yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, serta layanan publik yang modern, pemerintah digital memberikan kontribusi nyata pada pencapaian tujuan utama pembangunan nasional.

Dalam era perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tuntutan untuk mengatur/meregulasi semakin bertambah, sehingga regulasi memegang peranan yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum. Sementara itu, terlalu banyak regulasi dapat menimbulkan fenomena hiperregulasi dan disharmoni regulasi yang berujung pada terhambatnya pembangunan, inefisiensi administrasi, hingga ketidakpastian hukum. Sejalan dengan upaya tersebut, dukungan tata kelola regulasi yang baik juga diperlukan, sehingga terbentuk regulasi yang tepat sasaran, *agile*, memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Salah satu pilihan kebijakan untuk mengondisikan regulasi yang baik adalah dengan mendorong penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi dilakukan dengan beberapa

metode, meliputi (1) deregulasi, yaitu dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang menjadi hambatan bagi kegiatan atau sektor tertentu; (2) kodifikasi, yaitu dengan menggabungkan ketentuan-ketentuan dalam sektor terkait ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang sistematis dan mudah dipahami; (3) konsolidasi, yaitu dengan menyajikan dokumen peraturan perundang-undangan yang telah diubah di beberapa peraturan ke dalam satu dokumen; dan/atau (4) omnibus *legislation*, yaitu pembentukan peraturan yang menggabungkan pembentukan norma baru dengan perubahan dan/atau pencabutan berbagai norma dalam berbagai peraturan yang luas.

2.2.2.1 Kegiatan Prioritas Utama

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.

Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memerhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya.

Tabel 2.1
Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025–2029

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1
2	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema *Spend to Invest*	Prioritas Nasional 2
3	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	
5	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	
6	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	
7	Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)	
8	Pengembangan Pangan Hewani	
9	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	
10	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	
11	Peningkatan Penyediaan Energi	
12	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	
13	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	
14	Konservasi Sumber Daya Air	

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
15	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	
16	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	
17	Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	
18	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	
19	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	
20	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	
21	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	
22	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	
23	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	
24	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	
25	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	
26	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	
27	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Prioritas Nasional 3
28	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	
29	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	
30	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	
31	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	
32	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	
33	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	
34	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	
35	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4
36	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	
37	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	
38	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	
39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	
40	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	
41	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
42	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	
43	Pencegahan dan Penurunan Stunting	
44	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	
45	Penuntasan TBC	
46	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	
47	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	
48	Eliminasi Penyakit Kusta & *Schistosomiasis*	
49	Investasi pelayanan kesehatan primer	
50	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	
51	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	
52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	
53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	
54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	
55	Pengembangan Hilirisasi Nikel	Prioritas Nasional 5
56	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	
57	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	
58	Pengembangan Hilirisasi Timah	
59	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	
60	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	
61	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	
62	Pengembangan Industri Kimia	
63	Pembangunan Industri Semikonduktor	
64	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	
65	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	
66	Pengembangan Industri Dirgantara	
67	Pengembangan KEK Sei Mangkei	
68	Pengembangan KIT Batang	
69	Pengembangan KI Weda Bay	
70	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Prioritas Nasional 6
71	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	
72	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
73	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	
74	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	
75	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	
76	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Prioritas Nasional 7
77	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep *Total Reward* Berbasis Kinerja ASN	
78	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	
79	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	
80	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	
81	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Prioritas Nasional 8
82	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	
83	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	

Secara lebih rinci masing-masing Kegiatan Prioritas Utama disampaikan pada Apendiks Daftar Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025–2029.

2.2.2.2 Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional. Perencanaan dan penyusunan Proyek Strategis Nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan. Proyek Strategis Nasional antara lain Program Makan Bergizi Gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Gambar 2.15
Kerangka Pikir Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari Pemerintah.

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian Proyek-Proyek Strategis Nasional merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional. Proyek Strategis Nasional ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan Proyek Strategis Nasional dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah. Untuk memastikan Proyek Strategis Nasional berjalan sesuai dengan rencana, dilakukan langkah-langkah pengendalian dan evaluasi kesiapan serta kinerja pelaksanaannya serta diterapkan manajemen risiko pembangunan nasional. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan pemutakhiran Proyek Strategis Nasional yang dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme RKP.

Dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional, pemerintah dapat memberikan kemudahan baik dalam bentuk perizinan maupun non perizinan. Untuk maksud tersebut, akan dilakukan harmonisasi regulasi dan penataan kelembagaan pengelolaan Proyek Strategis Nasional.

Tabel 2.2
Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025–2029*)

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
	Makan Bergizi Gratis		
Baru			
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		
Baru			
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten /Kota	Nasional	Kementerian Kesehatan
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Kementerian Kesehatan
Carry over			
6	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)	Jawa Barat	Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
		Swasembada Pangan	
Baru			
7	Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan *Food Estate*	Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan	Kementerian Pertanian, Swasta
8	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	Nasional	Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator)
9	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum
10	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Nasional	Kementerian Pertanian, Swasta
11	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	Bali	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta
12	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	Jawa Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Swasembada Air	
Baru			
13	*Giant Sea Wall* Pantai Utara Jawa	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah	Kementerian Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta
Carry over			
14	Bendungan Way Apu	Maluku	Kementerian Pekerjaan Umum
15	Bendungan Jragung	Jawa Tengah	Kementerian Pekerjaan Umum
16	Bendungan Mbay	Nusa Tenggara Timur	Kementerian Pekerjaan Umum
17	Bendungan Bulango Ulu	Gorontalo	Kementerian Pekerjaan Umum
18	SPAM Regional Wosusokas	Jawa Tengah	Kementerian Pekerjaan Umum
19	SPAM Regional Benteng - Kobema	Bengkulu	Kementerian Pekerjaan Umum
		Swasembada Energi	
Baru			
20	PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi	Kalimantan Utara	Swasta

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
21	Bioetanol (Berbasis Tebu)	Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan	Dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
22	*Biorefinery* Sumatera	Riau, Sumatera Selatan	PT Pertamina
23	RDMP RU VI Balongan (*Rescoping*)	Jawa Timur	PT Pertamina
Carry over			
24	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Maluku	Swasta
25	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)	Jawa Timur	PT Pertamina
26	Pengembangan *Biofuel* dari Metanol dan etanol di Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	PT Pertamina
27	*North Hub Development* Project Selat Makassar	Kalimantan	Swasta
28	RDMP RU IV Cilacap (*Rescoping*)	Jawa Tengah	PT Pertamina
29	*Biorefinery* Cilacap	Jawa Tengah	PT Pertamina
30	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan	Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, Palu	PT Pertamina/PGN
	Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital		
Baru			
31	Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu	Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua	Kementerian Pertanian, Swasta
32	Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash	Jawa Timur	BUMN, Swasta

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
33	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	Swasta
34	Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat,	PT MIND ID, Swasta
35	Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi	Nasional	Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia
36	Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik *Chlor Alkali* dan *Ethylene Dichloride* Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia *New Ethylene Project*	Banten	Swasta
37	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)
38	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia	Nasional	Badan Informasi Geospasial
Carry over			
39	Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe	Nanggroe Aceh Darussalam	BUPP KEK Arun Lhokseumawe
40	Pengembangan KEK Sei Mangkei	Sumatera Utara	BUPP KEK Sei Mangkei

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
41	Pengembangan KEK Galang Batang	Kepulauan Riau	BUPP KEK Galang Batang
42	Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang	Jawa Tengah	Swasta
43	Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana	Kalimantan Barat	Swasta
44	Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	Kalimantan Utara	Swasta
45	Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay	Maluku Utara	Swasta
46	Kawasan Industri Bantaeng	Sulawesi Selatan	Swasta
47	Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS	Papua Barat	Swasta
48	Kawasan Industri Tanah Kuning	Kalimantan Utara	Swasta
49	Kawasan Industri Pulau Ladi	Kepulauan Riau	Swasta
50	Kawasan Industri Fakfak	Papua Barat	BUMN
51	Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park	Sulawesi Tengah	Swasta
52	Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park	Sulawesi Selatan	Swasta
53	Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park	Kepulauan Riau	Swasta
54	Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park	Sulawesi Tenggara	Swasta
55	Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park	Sulawesi Tenggara	Swasta
56	Kawasan Industri ASPIRE Stargate	Sulawesi Tenggara	Swasta
57	Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran	Kepulauan Riau	Swasta
58	Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara	Sulawesi Tenggara	Swasta

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
59	Kawasan Industri Futong	Riau	Swasta
60	Kawasan Industri Pulau Penebang	Kalimantan Barat	Swasta
61	Kawasan Industri Kumai Multi Energi	Kalimantan Tengah	Swasta
62	Kawasan Industri Alumina Toba	Kalimantan Barat	Swasta
63	Kawasan Industri Indo Mineral Mining	Sulawesi Tengah	Swasta
64	Kawasan Industri Tabuk	Kalimantan Tengah	Swasta
65	Kawasan Industri Rimau	Kalimantan Tengah	Swasta
		Konektivitas dan Kawasan	
Baru			
66	Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu	Maluku	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
67	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas	Sumatera	BUMN (Penugasan)
68	Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua	Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat	Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat
Carry over			
69	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Ibu Kota Nusantara	Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta
70	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan
71	Pembangunan Jakarta Metropolitan *Mass Rapid Transit* Koridor Timur - Barat	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten	Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta
72	Jalan Tol Serang - Panimbang	Banten	Kementerian Pekerjaan Umum
73	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	Jawa Timur	Kementerian Pekerjaan Umum
74	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
		Perumahan dan Permukiman	
Baru			
75	Pembangunan 3 Juta Rumah	Nasional	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)
76	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado	Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta
Carry over			
77	Jakarta Sewerage System	DKI Jakarta	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta

*) Keterangan:

(a) Daftar Proyek Strategis Nasional tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah/ ditambah berdasarkan evaluasi atas Proyek-Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-*carry over*, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

(b) Penyusunan dan penetapan Proyek Strategis Nasional, termasuk proyek-proyek baru dan *carry over* yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

(c) Proyek Strategis Nasional, baik proyek-proyek baru maupun *carry over*, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden.

2.2.3 Strategi Kewilayahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Prioritas (Asta Cita) Presiden-Wakil Presiden terpilih untuk mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju unggul, dan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Seluruh program prioritas tersebut perlu dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah terkait dengan tetap memerhatikan kesinambungan dan tahapan pembangunan sesuai RPJPN 2025–2045 yang menekankan pada tiga transformasi dan dua landasan transformasi.

Tujuan pembangunan kewilayahan adalah terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan/strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memerhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah. Strategi pengembangan wilayah secara khusus dituliskan pada Bab IV Arah Pembangunan Wilayah serta menjadi Lampiran IV Arah Kebijakan Kewilayahan per Provinsi yang tidak terpisahkan dari RPJMN Tahun 2025–2029.

Gambar 2.16
Tema Wilayah Tahun 2025–2029

Mempertimbangkan setiap wilayah memiliki potensi dan karakteristik khusus untuk tumbuh dan berkembang, maka dirumuskan tema pembangunan wilayah untuk setiap pulau besar yang ada. Strategi pembangunan kewilayahan serta tema pembangunan pulau dalam RPJMN Tahun 2025–2029 di atas memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Untuk itu, perlu sinergi kebijakan pusat dan daerah untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks serta mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2.4 Penguatan Tata Kelola Pembangunan: Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Perubahan kondisi internal dan eksternal sangat dinamis yang membutuhkan respons kebijakan yang adaptif. Penyusunan kebijakan didesain mempertimbangkan peluang dan tantangan atau potensi risiko yang dihadapi.

Di dalam penyusunan RPJMN Tahun 2025–2029, terutama dalam penyusunan intervensi kegiatan prioritas utama, telah diinisiasi penerapan perencanaan berbasis risiko. Desain kebijakan mempertimbangkan indikasi risiko dan perlakuan risiko pembangunan. Indikasi risiko yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan kegiatan prioritas utama tersebut antara lain dapat berupa risiko sosial seperti penolakan masyarakat dan sengketa antarkelompok adat akibat kondisi lahan berupa ulayat, serta ketidakstabilan sosial di daerah konflik yang dapat menghambat pelaksanaan proyek, risiko ekonomi seperti fluktuasi harga dan minat investasi, risiko lingkungan seperti cuaca ekstrem, deforestasi dan hilangnya ekosistem, serta risiko tata kelola seperti inkonsistensi kebijakan dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Penyusunan indikasi dan perlakuan risiko kegiatan prioritas utama tersebut merupakan bentuk implementasi awal Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor, yang mendukung amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Indikasi tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan profil risiko oleh para instansi pelaksana atau Unit Pemilik Risiko. Adanya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor mendorong seluruh entitas baik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha untuk mengelola risiko secara kolaboratif dalam mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor sekaligus memperkuat pengendalian prioritas pembangunan nasional, yang dimulai dari tahap

perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Pendekatan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor memperkuat pengendalian pelaksanaan yang selama ini lebih bersifat reaktif atas masalah yang sudah terjadi (*problem-based*). Dengan adanya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, pengendalian pelaksanaan akan menjadi bersifat *proaktif-kolaboratif* dalam mengantisipasi potensi risiko dan meminimalisasi dampak atas masalah yang terjadi. Hal tersebut berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Gambar 2.17
Penerapan MRPN Lintas Sektor

Pengendalian pelaksanaan berbasis MRPN diintegrasikan dengan manajemen kinerja pembangunan yang memanfaatkan sistem informasi terpadu. Sistem tersebut digunakan oleh para pelaku kebijakan yang terlibat, baik Kementerian/Lembaga/Daerah maupun Badan Usaha. Pengelolaan risiko secara kolaboratif diharapkan dapat mendorong kinerja pembangunan nasional, dengan terus mengantisipasi dinamika perubahan yang berdampak pada sasaran secara berkelanjutan.

2.2.5 Pengarusutamaan Pembangunan

RPJMN Tahun 2025–2029 menggunakan lima pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*.

01 Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan Inklusi Sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

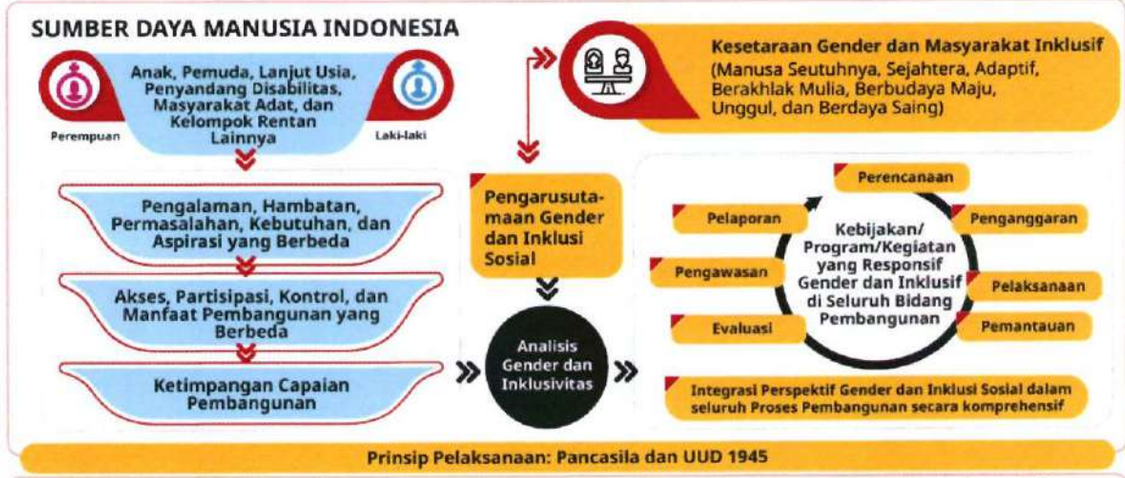

Strategi PUG dan Inklusi Sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh di semua Prioritas Nasional (PN) maupun non-PN untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan inklusif, yang didahului dengan proses (a) analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu gender strategis di berbagai bidang dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) dan aspek ketidakadilan gender (kekerasan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe) menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan data lainnya yang relevan baik kuantitatif maupun kualitatif; (b) analisis faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender di ranah keluarga, masyarakat, dan pemerintah; dan (c) penyusunan rencana aksi/intervensi beserta identifikasi institusi yang relevan untuk melaksanakan rencana aksi/intervensi tersebut. Selanjutnya, dalam rangka memastikan konvergensi upaya pencapaian target kesetaraan gender, disusun strategi nasional/rencana aksi/dokumen kebijakan strategis lainnya di tingkat pusat dan daerah

02 Pengarusutamaan SDGs

Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (a) Setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (b) Mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (c) Penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah, dan Penguatan Kolaborasi Multi-Pihak; (d) Pemantauan dan Evaluasi pencapaian target SDGs ; dan (e) Inklusi Sosial dan Keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan;

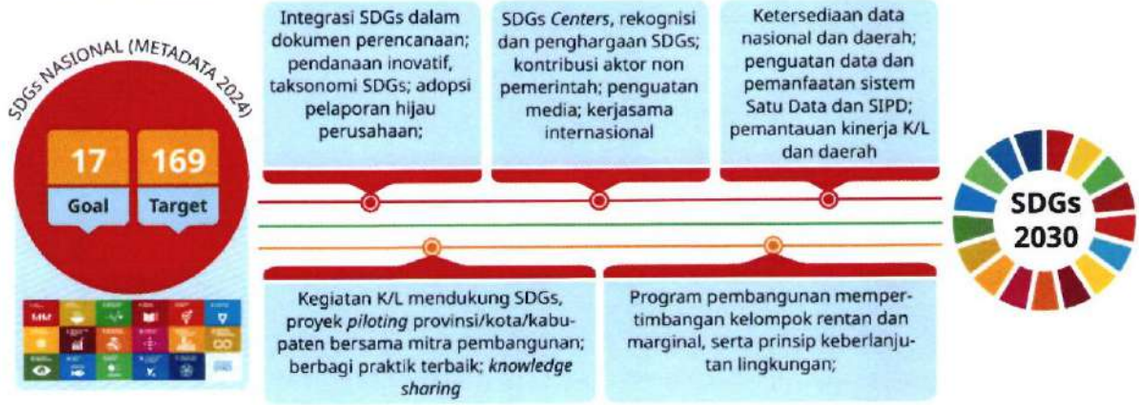

03 Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*), serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif, (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

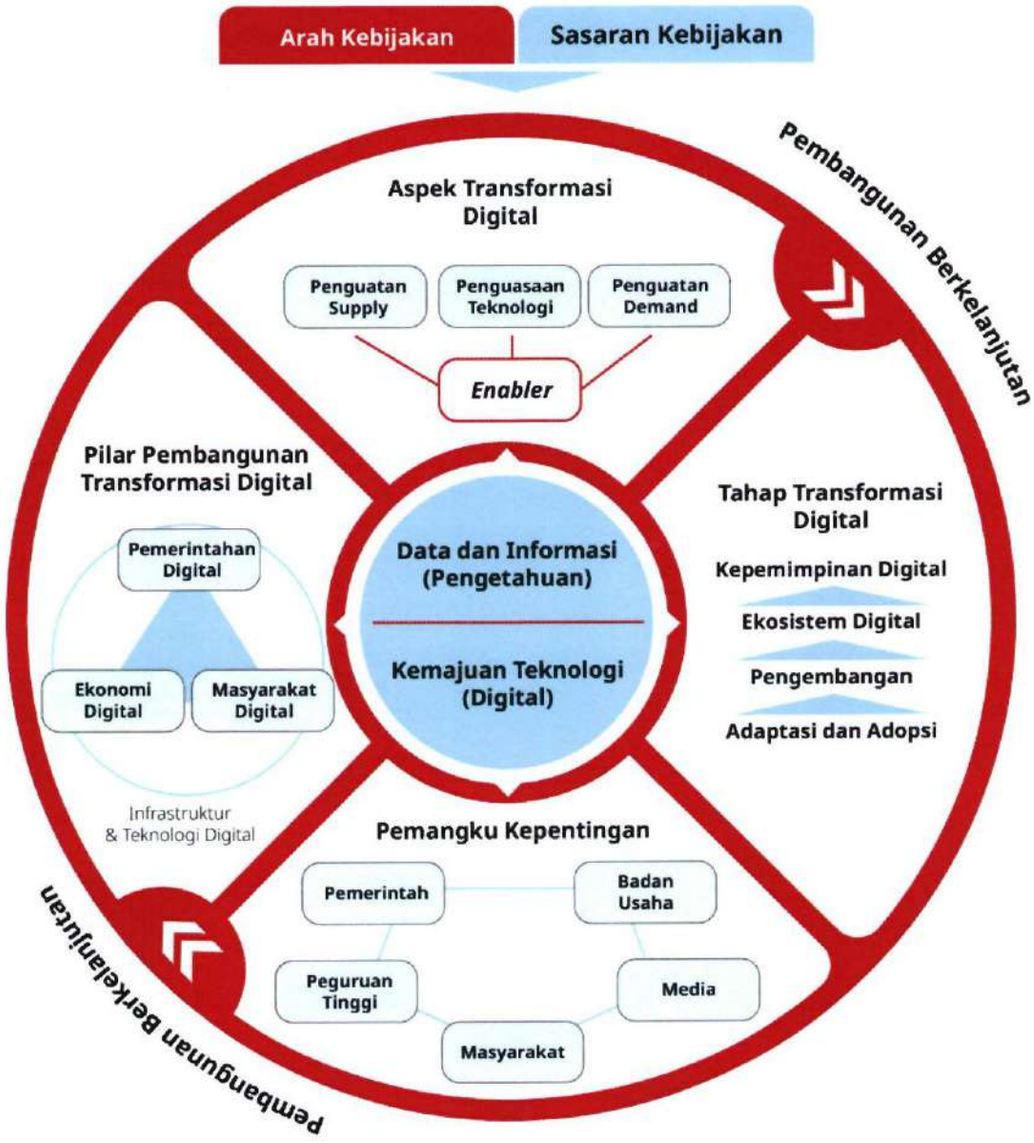

04 Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Pada RPJMN 2025-2029, strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada (1) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral, (2) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan, (3) pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan, (4) implementasi praktik pertanian rendah karbon, (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru, (6) peningkatan upaya dekarbonisasi industri, (7) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah, dan (8) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

05 Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan Berketahanan Iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan, untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Hal ini difokuskan pada 4 (empat) sektor prioritas yaitu sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan sektor kesehatan. Strategi pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk mencapai persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB dengan peningkatan ketahanan iklim pada empat sektor prioritas melalui (1) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (2) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, (3) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (4) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, dan (5) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan.

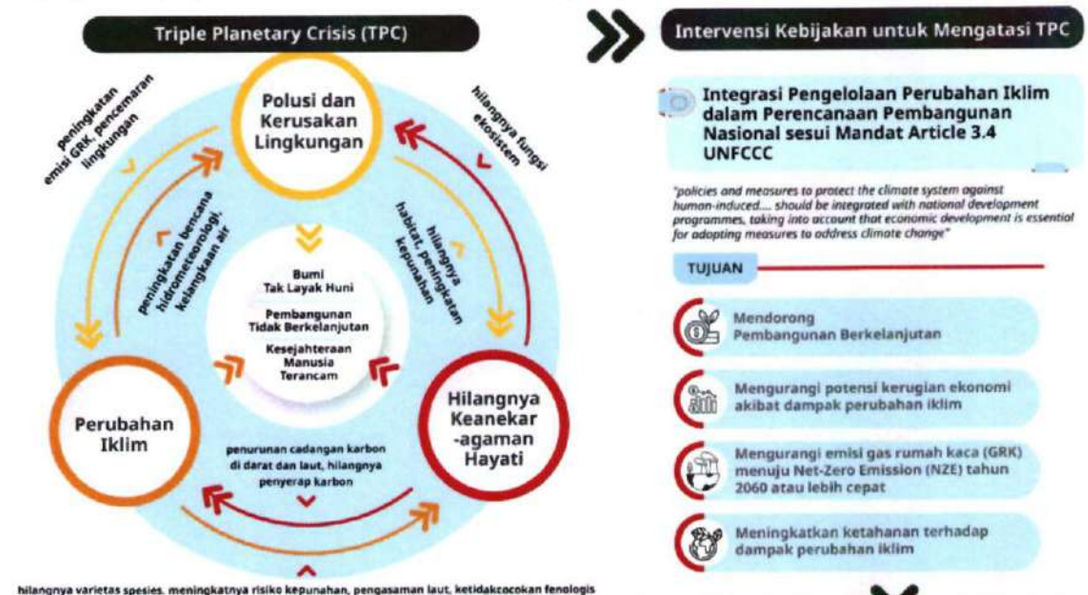

2.3 Kerangka Ekonomi Makro

2.3.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025–2029

Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8,0 persen yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut, *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD8.000 pada tahun 2029 (Gambar 2.18).

Gambar 2.18
Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025–2029

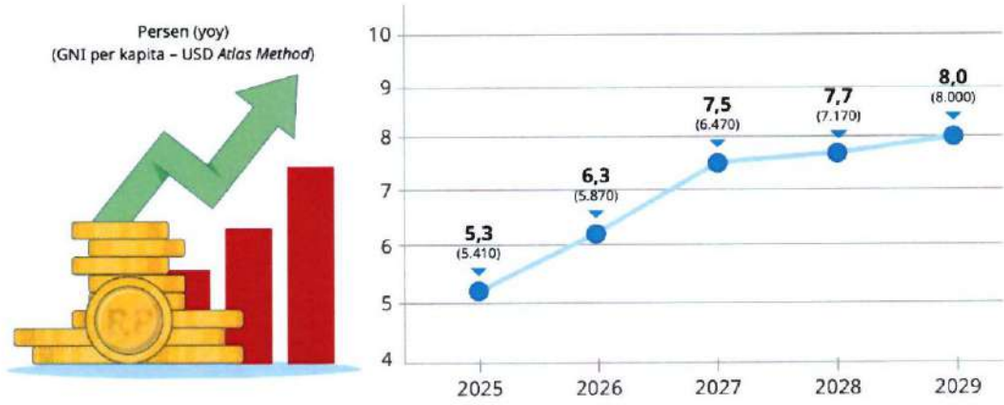

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Berdasarkan target/sasaran besar pembangunan selama lima tahun ke depan, maka kebijakan ekonomi makro akan didukung kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural yang adaptif.

Di samping itu, perbaikan kualitas pembangunan akan menjadi modal bagi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan ditunjukkan oleh Gambar 2.19. Pertumbuhan inklusif dicerminkan melalui penurunan tingkat kemiskinan, dan rasio gini sebagai indikator ketimpangan, seiring dengan peningkatan Indeks Modal Manusia yang dicapai melalui pemenuhan gizi dan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga memerhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Gambar 2.19
Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025–2029

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

2.3.1.1 Sumber-sumber Pertumbuhan Baru dan Inovatif

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka menengah, peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Sektor-sektor produktif diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong penciptaan kelas menengah. Untuk itu, pengembangan sektor-sektor produktif harus disinergikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta investasi infrastruktur sesuai dengan karakteristik sektornya.

Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Pada subsektor perikanan dan akuakultur, penerapan nilai-nilai seperti pengembangan pangan akuatik (*bluefood*) akan menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan nilai tambah potensi sumber daya pesisir serta peningkatan produktivitas hasil perikanan melalui penyediaan infrastruktur pendukung dan sarana prasarana kemaritiman kelautan perikanan.

Sumber pertumbuhan baru pada sektor industri akan diarahkan melalui kebijakan industrialisasi yang fokus pada penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kompleksitas industri. Peran industri kecil menengah diperkuat menjadi mitra rantai pasok industri besar-sedang. Penerapan ekonomi hijau seperti transisi energi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan juga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru, khususnya pada sektor pengadaan listrik.

Pada sektor jasa-jasa, sumber pertumbuhan baru sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan berasal dari peningkatan aktivitas pariwisata baik dari wisatawan mancanegara maupun nusantara. Seiring dengan fokus pembangunan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, program pembangunan sekolah unggulan dan pembangunan rumah sakit berkualitas juga dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa pendidikan dan kesehatan.

Ekonomi digital seperti pengembangan dan peningkatan ekosistem digital juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi sektor informasi dan komunikasi, seiring dengan tingginya tren digitalisasi ke depan seperti *e-commerce*, *telework*, serta penggunaan *artificial intelligence*.

Salah satu Program Hasil Terbaik Cepat memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru pada beberapa sektor, seperti sektor industri makanan minuman, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Program ini berpotensi memenuhi kebutuhan gizi harian anak serta membantu ekonomi keluarga.

Sebagai prasyarat dalam membangun berbagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di atas, dibutuhkan dukungan konektivitas seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik, energi, dan digital. Selain itu, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan destinasi pariwisata prioritas juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru serta mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan pengadaan listrik. Pembangunan dan penyediaan perumahan di perkotaan serta pembangunan wilayah metropolitan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan sektor *real estate* dan juga konstruksi.

Sejalan dengan pembangunan sektor-sektor produktif di atas, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto/investasi pada jangka menengah diprakirakan akan tumbuh tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam jangka menengah akan diarahkan pada sektor dan aktivitas produktif yang memiliki *multiplier* besar terhadap perekonomian. Selain itu, iklim investasi juga diarahkan agar semakin kondusif disertai dengan reformasi birokrasi dan deregulasi sehingga memberikan kepastian usaha dan investasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas, rincian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025–2029 (Persen)

Indikator	*Outlook* 2024	Tahun 2025	Tahun 2029
Pertumbuhan PDB	5,05	5,30	8,00
Sisi Pengeluaran			
Konsumsi Masyarakat	5,14	5,14	7,27
Konsumsi Pemerintah	6,51	6,66	8,40
Investasi (PMTB)	4,47	5,61	9,65
Ekspor Barang dan Jasa	6,92	6,95	9,50
Impor Barang dan Jasa	7,09	7,16	10,61
Sisi Produksi			
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,81	2,20	3,46
Pertambangan dan Penggalian	4,51	5,52	7,51
Industri Pengolahan	4,89	5,50	8,14
Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	4,49	5,09	7,85

Indikator	*Outlook* 2024	Tahun 2025	Tahun 2029
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,03	2,05	2,98
Konstruksi	7,52	7,65	9,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,69	4,96	7,00
Transportasi dan Pergudangan	9,59	9,73	11,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,20	9,53	11,57
Informasi dan Komunikasi	7,34	7,69	10,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,78	6,52	8,30
Real Estate	2,34	2,45	4,00
Jasa Perusahaan	8,35	8,45	11,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,52	3,05	6,70
Jasa Pendidikan	3,57	3,85	5,44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,76	8,91	10,30
Jasa Lainnya	9,28	6,55	9,92

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

2.3.1.2 Memperkuat Peran Kelas Menengah

Penguatan peran kelas menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Proporsi kelas menengah (*aspiring middle class* dan *middle class*) yang mencakup 72,20 persen dari total populasi telah berkontribusi sebesar 82,30 persen terhadap konsumsi rumah tangga nasional pada tahun 2023. Peningkatan proporsi kelas menengah akan mendorong penduduk miskin dan rentan miskin terentaskan untuk mengisi kelas menengah. Mengingat pentingnya peran kelas menengah dalam perekonomian nasional, maka diperlukan upaya penguatan peran kelas menengah melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas, terutama pada sektor-sektor produktif seperti manufaktur dan teknologi tinggi yang berorientasi pada pekerjaan formal.

Sementara pada sektor informal, penyerapan tenaga kerja didorong melalui program regenerasi petani serta penciptaan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang selanjutnya akan menjadi stimulus bagi peningkatan wirausaha dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan proporsi kelompok kelas menengah menciptakan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam, termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new lifestyle)* sehingga berpotensi meningkatkan daya beli.

Upaya memperkuat permintaan domestik juga didukung oleh upaya-upaya dalam penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, seperti penguatan kebijakan redistribusi melalui bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan ekonomi daerah dan program pembangunan infrastruktur. Berdasarkan penjelasan di atas, penguatan peran kelas menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi ditunjukkan oleh Gambar 2.20.

Gambar 2.20
Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Peran Kelas Menengah

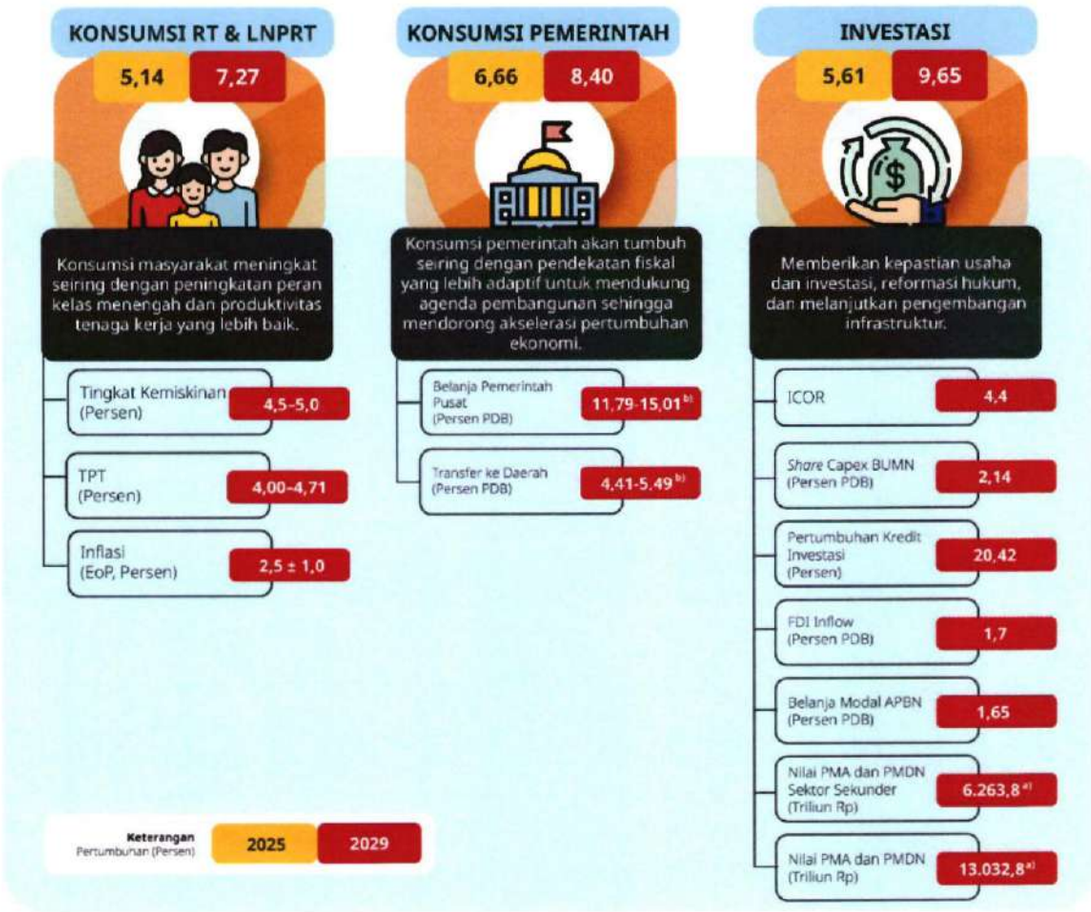

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Keterangan: a) Total nilai 2025 sampai dengan 2029, b) *Range End of Period* tahun 2029.

2.3.1.3 Perkuatan Peran Sektor Eksternal

Perkuatan peran sektor eksternal dilakukan melalui peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah dan pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global. Selanjutnya, perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang dikompetisikan secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat partisipasi dan daya tawar ekonomi Indonesia dalam rantai nilai global.

Peningkatan ekspor barang pada tahun 2025–2029 akan didukung oleh ekspor produk berteknologi menengah tinggi, ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi, serta ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam seiring dengan berlanjutnya program hilirisasi dan industrialisasi yang mendorong kompleksitas produk ekspor. Nilai devisa pariwisata ditargetkan meningkat seiring dengan penguatan belanja

wisatawan mancanegara yang berkualitas dan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Sementara itu, impor barang dan jasa juga akan tumbuh tinggi, utamanya untuk memenuhi kebutuhan permintaan domestik seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dalam mencapai pertumbuhan yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, integrasi ekonomi domestik dan global dapat dilihat pada Gambar 2.21.

Gambar 2.21
Sasaran PDB Pengeluaran: Perkuatan Peran Sektor Eksternal

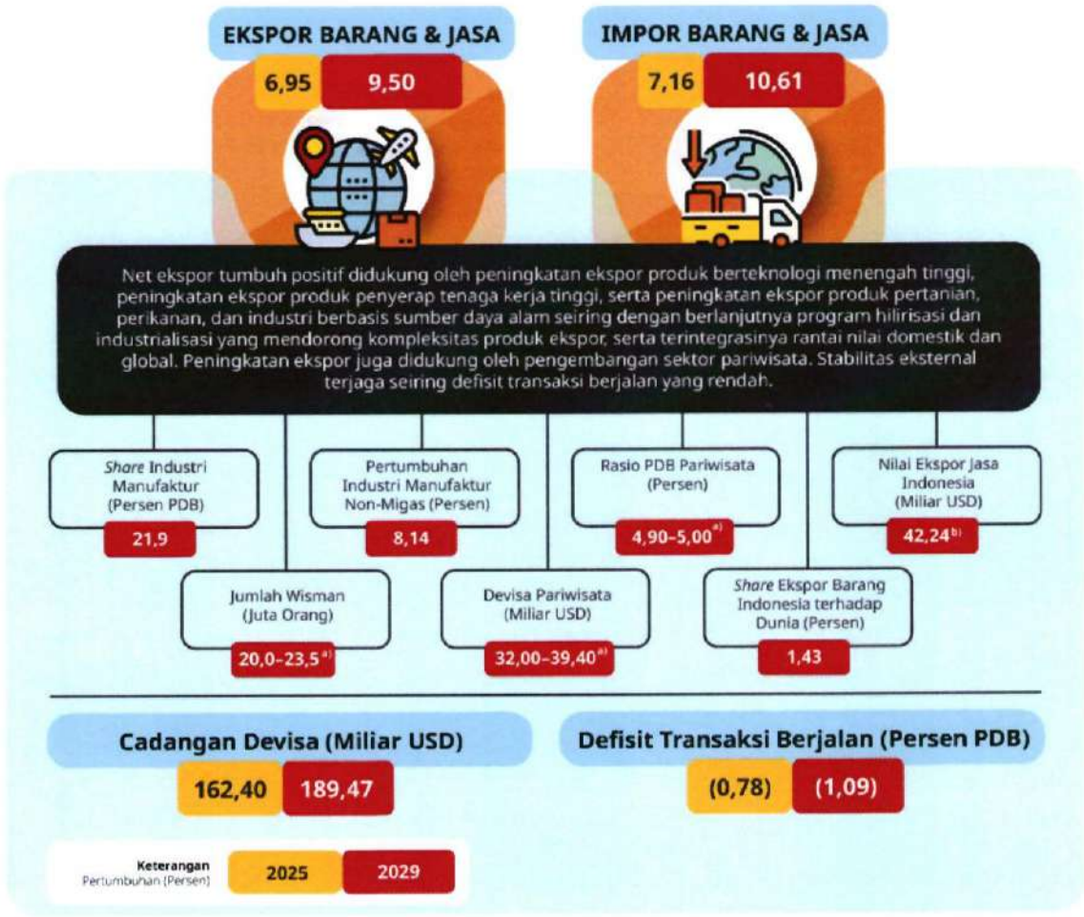

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Keterangan: a) *Range End of Period* tahun 2029, dan b) *End of Period* tahun 2029 berdasarkan target dalam Prioritas Nasional 5 Program Prioritas 5.

Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas eksternal yang tecermin melalui defisit transaksi berjalan yang dijaga rendah dan peningkatan cadangan devisa selama tahun 2025–2029 ditunjukkan oleh Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2025–2029 (Miliar USD)

Indikator	*Outlook* 2024	Tahun 2025	Tahun 2029
Transaksi Berjalan	(10,61)	(11,87)	(25,80)
Barang	36,45	34,99	31,10
Ekspor	256,62	276,89	402,95
Impor	(220,17)	(241,90)	(371,85)
Jasa	(18,81)	(18,52)	(15,23)
Ekspor	36,99	43,73	68,59
Impor	(55,81)	(62,26)	(83,82)
Pendapatan Primer	(34,78)	(35,71)	(53,00)
Pendapatan Sekunder	6,54	7,37	11,37
Transaksi Modal dan Finansial	20,21	21,08	33,19
Transaksi Modal	0,04	0,04	0,04
Transaksi Finansial	20,16	21,03	33,15
Investasi Langsung	15,58	17,50	31,53
Investasi Portofolio	16,97	11,85	13,79
Investasi Lainnya	(12,43)	(8,34)	(12,20)
Total (Transaksi Berjalan+ Modal dan Finansial)	9,60	9,20	7,42
Memorandum:			
Posisi Cadangan Devisa	154,10	162,40	189,47
Dalam Bulan Impor	6,7	6,4	5,0
Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,75)	(0,78)	(1,09)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Keterangan: Angka dalam kurung bernilai negatif.

2.3.1.4 Penerapan Kebijakan Fiskal yang Adaptif

Kebijakan fiskal jangka menengah 2025–2029 diarahkan pada upaya untuk mengakselerasi reformasi struktural sebagai kunci bagi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah mengambil pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (*pro-stability*) dan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*).

Peningkatan pendapatan negara dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dari sisi perpajakan, arah kebijakan berfokus pada implementasi Pembaruan Sistem Inti

Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) secara menyeluruh; reformasi pajak yang lebih progresif; penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak; simplifikasi proses bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan; intensifikasi kebijakan dan ekstensifikasi objek cukai, peningkatan tarif cukai hasil tembakau secara bertahap, simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau, serta perbaikan tata kelola cukai hasil tembakau untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan penerimaan negara; serta penajaman *tax incentive* tepat sasaran berbasis sektor dan wilayah prioritas, termasuk orientasi pada riset dan inovasi, serta teknologi tinggi seperti semikonduktor dan energi bersih, serta insentif untuk peningkatan investasi dan revitalisasi industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah melalui (a) percepatan dan perluasan digitalisasi pemerintah daerah terutama elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga digitalisasi sektor-sektor produktif pendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, serta (b) penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak, arah kebijakan berfokus pada (a) reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, (b) optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, (c) pemanfaatan aset barang milik negara, dan (d) peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, serta inovasi layanan berbasis pemanfaatan teknologi dan informasi.

Optimalisasi belanja negara dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) melalui penguatan jenis belanja produktif dan bersifat *countercyclical* untuk percepatan investasi publik. Dalam rangka mewujudkan kebijakan fiskal produktif, belanja negara diarahkan pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta riset dan inovasi untuk menyiapkan Indonesia dalam menghadapi tantangan industri masa depan (antara lain teknologi informasi, manufaktur berbasis riset dan inovasi, ekonomi hijau dan ekonomi biru, termasuk ekonomi sirkuler dan energi terbarukan). Kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk bersifat afirmatif dengan cara memberikan perhatian khusus dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah. Pemerintah memprioritaskan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan situasi krisis yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi negara serta melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Langkah afirmatif ini penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan ketahanan terhadap risiko-risiko eksternal. Kebijakan ini diselaraskan dengan program pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Di sisi lain, dibutuhkan perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel untuk menutup *financing gap* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Arah kebijakan pembiayaan berfokus pada (a) pengelolaan pembiayaan utang dan pinjaman dengan memerhatikan tingkat defisit yang aman, serta komposisi optimal untuk meminimalkan risiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (b) pemanfaatan surat berharga negara untuk investasi yang mendorong produktivitas, penurunan kemiskinan, serta pembiayaan *below the line* yang mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis antara lain infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi, mencakup agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), serta energi baru terbarukan; (c) optimalisasi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha yang *sustainable* dan lebih masif; (d) pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*); serta (e) penguatan peran Badan Usaha Milik Negara, Badan

Layanan Umum, *Special Mission Vehicle*, dan *Sovereign Wealth Funds*; serta (f) optimalisasi pembiayaan investasi, utamanya kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai *agent of development*. Upaya pengembangan inovasi pembiayaan juga dilakukan di daerah melalui optimalisasi pemanfaatan pembiayaan utang daerah, baik pinjaman daerah maupun obligasi dan/atau sukuk daerah, pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah, serta optimalisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

Penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang tepat sasaran untuk investasi yang meningkatkan produktivitas jangka panjang akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran tersebut di atas, rincian sasaran fiskal tahun 2025–2029 dapat dilihat dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Sasaran Fiskal Tahun 2025–2029 (Persen PDB)

Uraian	Realisasi Sementara 2024[a]	APBN 2025 [b]	2029
Pendapatan Negara	12,82	12,36	13,75–18,00
Penerimaan Perpajakan	10,07	10,24	11,52–15,00
PNBP	2,61	2,11	2,21–2,99
Belanja Negara	15,11	14,89	16,20–20,50
Belanja Pemerintah Pusat	11,13	11,11	11,79–15,01
Transfer ke Daerah	3,89	3,78	4,41–5,49
Keseimbangan Primer	(0,09)	(0,26)	(0,15)–(0,20)
Surplus/Defisit	(2,29)	(2,53)	(2,45)–(2,50)
Stok Utang Pemerintah	39,5	39,15	39,01–39,10
Pembiayaan Investasi	(0,37)	(0,64)	(0,50)–(1,0)

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Keterangan: Angka dalam kurung bernilai negatif. a) Realisasi Sementara 2024 berdasarkan Konferensi Pers APBN 2024 oleh Menteri Keuangan pada 6 Januari 2025 dan b) Sasaran 2025 menggunakan kesepakatan APBN 2025 antara Pemerintah dan DPR RI.

2.3.1.5 Stabilitas Moneter sebagai *Enabler* Transformasi

Arah kebijakan untuk menjaga stabilitas moneter jangka menengah 2025–2029 dilakukan dengan mengoptimalkan bauran kebijakan sebagai pemampu (*enabler*) untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tidak hanya mendukung stabilitas (*pro-stability*), namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan didukung oleh pendalaman pasar keuangan.

Kebijakan moneter jangka menengah diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Sasaran inflasi tahun 2025–2029 dijaga dalam rentang 2,5±1,0 persen melalui upaya pengendalian inflasi, meliputi (a) implementasi kebijakan Suku Bunga Bank Indonesia

yang responsif terhadap dinamika perekonomian global dan domestik, (b) stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan *imported inflation*, (c) penguatan komunikasi kebijakan untuk menjangkar ekspektasi, (d) perbaikan dan integrasi data neraca pangan, serta (e) penguatan sinergi/koordinasi tim pengendalian inflasi nasional untuk menyelesaikan permasalahan struktural penyebab inflasi serta pengelolaan subsidi harga energi tepat waktu dan tepat sasaran.

Kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, berdaya tahan terhadap gejolak global, serta tetap kondusif untuk mendorong daya saing ekspor dan menarik investasi portofolio asing. Kebijakan pengendalian nilai tukar rupiah dilakukan melalui (a) pengendalian inflasi harga impor, (b) intervensi secara *spot* maupun *forward* sesuai kebutuhan, serta (c) pengelolaan kecukupan cadangan devisa, di antaranya melalui pengelolaan lalu lintas devisa sesuai dengan kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal yang didukung oleh sinergi kebijakan sektor riil dan keuangan.

Kebijakan makroprudensial diselaraskan dengan kebijakan sektor keuangan untuk menyediakan likuiditas yang memadai dalam rangka mendorong intermediasi keuangan, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui (a) perluasan jenis instrumen berbasis ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; (b) kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas; (c) pengaturan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial untuk menjaga fleksibilitas likuiditas, kredit, dan stabilitas sistem keuangan; serta (d) penguatan *surveillance* sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dengan berkoordinasi erat bersama pemangku kepentingan terkait.

Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk menciptakan sistem yang modern, efisien, inklusif, dan terintegrasi dengan tatanan global untuk akselerasi ekonomi-keuangan digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka menengah, kebijakan sistem pembayaran diupayakan untuk menciptakan struktur industri sehat dan efisien (termasuk menurunkan biaya transaksi pembayaran agar dapat dimanfaatkan oleh semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah), serta menyediakan infrastruktur aman dan andal dalam mendukung kebijakan industri sehingga dapat meningkatkan skala ekonomi, melalui (a) pengembangan platform pembayaran digital sejalan dengan kebijakan sistem pembayaran inklusif yang ditetapkan Bank Indonesia yang terinterkoneksi, terinteroperabilitas, dan terintegrasi; (b) perluasan dan pemerataan sistem pembayaran berbasis digital, *multicurrency*, dan berstandar internasional di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terluar, terdepan; (c) modernisasi infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan pusat data transaksi pembayaran serta inovasi pembayaran menggunakan *big data analytics*; dan (d) percepatan eksperimentasi rupiah digital (CBDC) sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.

2.3.1.6 Pemerataan Ekonomi di Setiap Wilayah

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, serta mempersiapkan Indonesia menuju transformasi ekonomi lebih maju, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru akan didorong hingga tingkat daerah melalui pembangunan koridor kewilayahan yang memerhatikan karakteristik di setiap wilayah.

Pemerataan wilayah pada periode jangka menengah 2025–2029 ditujukan untuk mendorong penguatan transformasi Indonesia dengan mendorong keunggulan dan potensi perekonomian masing-masing wilayah. Pemerataan ekonomi wilayah diarahkan untuk

meningkatkan kontribusi ekonomi Wilayah Kawasan Timur Indonesia dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia. Pada tahun 2023, kontribusi ekonomi Kawasan Barat Indonesia mencapai 79,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi ekonomi Kawasan Timur Indonesia yang hanya sebesar 20,9 persen. Kontribusi Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2029 ditargetkan akan meningkat hingga 22,4 persen, dengan pertumbuhan mencapai 8,8 persen. Sementara, Kawasan Barat Indonesia akan dijaga momentum pertumbuhannya hingga sebesar 7,7 persen di tahun 2029.

Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada periode jangka menengah 2025–2029 akan didorong melalui peningkatan aktivitas pertanian dan perikanan berbasis komoditas unggulan, seperti pengembangan Kawasan Swasembada Pangan di Provinsi Papua Selatan dan riset-inovasi berbasis komoditas kopi, kakao, sagu, udang, dan tuna-cakalang-tongkol. Selain itu, aktivitas sektor jasa akan ditingkatkan melalui aktivitas pariwisata, seperti pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat serta pariwisata rintisan berbasis bahari, minat khusus, dan budaya. Di sisi lain, pengembangan dan penataan kota kecil berkarakter khusus Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, juga dilakukan sebagai upaya pemerataan ekonomi di Wilayah Papua. Perekonomian Wilayah Papua juga ditargetkan akan meningkat seiring aktivitas hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam, utamanya minyak dan gas bumi. Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas juga akan didorong seiring dengan terbentuknya empat daerah otonom baru. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua pada tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh mencapai 7,7 persen.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Maluku ditargetkan tumbuh sebesar 11,1 persen pada tahun 2029. Pertumbuhan tersebut didorong oleh berlanjutnya pengembangan hilirisasi pertambangan di kawasan pusat pertumbuhan industri, seperti Kawasan Industri Teluk Weda, Kawasan Industri Pulau Obi, dan Kawasan Industri Buli dan pengembangan industri gas bumi di Blok Masela. Selain itu, Wilayah Maluku juga akan didorong oleh Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai dan pengembangan kawasan pariwisata rintisan berbasis bahari dan sejarah. Dalam upaya pemerataan ekonomi, Wilayah Maluku juga mendorong pengembangan sektor primer, utamanya sektor pertanian komoditas unggulan tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster serta pala dan kelapa juga terus dikembangkan di Wilayah Maluku. Selain itu, Wilayah Maluku juga akan fokus pada pengembangan dan penataan kota di sekitar kawasan industri, pengembangan Kota Sofifi, serta pengembangan kota kecil berkarakteristik khusus Banda Neira dan kawasan perkotaan Saumlaki, melalui peningkatan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, serta penataan kawasan dan peningkatan citra kota.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh sebesar 9,9 persen. Target tersebut didorong oleh peningkatan produktivitas sektor unggulan, melalui inovasi teknologi pertanian dan perikanan, peningkatan ekspor, serta pengembangan industri hilir berbasis sumber daya hayati dan mineral khususnya hilirisasi nikel yang difokuskan pada Kawasan Industri di Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan Industri Morowali) dan Sulawesi Tenggara (Kawasan Industri Konawe). Peningkatan kinerja ekonomi juga didorong oleh aktivitas sektor pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang dan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi, pembangunan perkotaan melalui pengembangan Wilayah Metropolitan Manado, Wilayah Metropolitan Makassar, dan kawasan perkotaan sedang, serta pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, dan kawasan komoditas unggulan.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh sebesar 8,2 persen. Pembangunan Wilayah Kalimantan difokuskan pada pengembangan, peningkatan produktivitas ekonomi, serta pemerataan ekonomi Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan *Superhub* Ekonomi Nusantara dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Upaya tersebut juga didorong melalui pengembangan hilirisasi industri berbasis mineral dan sumber daya alam, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi IKN, dan pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, dan kawasan komoditas unggulan.

Perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh 8,4 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa pariwisata melalui penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting dan kawasan pariwisata rintisan, seperti Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok–Gili Tramena, kawasan pariwisata rintisan di Pulau Sumba, dan Kawasan Pariwisata Ulapan Bali. Selain itu, perekonomian Bali-Nusa Tenggara didorong peningkatan nilai tambah sektor primer melalui percepatan hilirisasi industri tembaga serta penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas unggulan agrikultur. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perkotaan akan memberikan dampak nilai tambah terhadap perekonomian dalam mendukung operasionalisasi pengembangan potensi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Sumatera pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh sebesar 7,2 persen. Pengembangan Wilayah Sumatera difokuskan pada peran strategis untuk mewujudkan swasembada pangan, air, dan energi. Perekonomian Wilayah Sumatera akan didorong oleh kinerja industri seiring dengan pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan (karet, kelapa sawit, dan perikanan, serta penguatan industri kimia dasar). Hilirisasi industri ini juga didorong melalui pengembangan Kawasan Pengembangan Industri, Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas, dan ekonomi kreatif yang tersebar di 5 kawasan, yaitu Dataran Tinggi Gayo-Danau Laut Tawar, Danau Toba, Dataran Tinggi Minangkabau, Candi Muarojambi, dan Belitung. Pengembangan sektor jasa akan didorong oleh pengembangan kawasan perkotaan, baik di wilayah metropolitan maupun non-wilayah metropolitan, serta Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung.

Wilayah Jawa pada periode 2025–2029 akan dikembangkan sebagai megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Perekonomian Wilayah Jawa didorong oleh kinerja aktivitas jasa melalui penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif dan peningkatan aktivitas pariwisata di 8 kawasan wilayah Jawa. Sementara itu, industrialisasi Wilayah Jawa juga akan terus didorong dengan optimalisasi kinerja industri hilir dan berteknologi tinggi di 10 Kawasan Wilayah Jawa. Peningkatan konektivitas juga terus diperkuat untuk mengatasi tingginya biaya logistik serta untuk meningkatkan daya saing investasi wilayah. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan serta pengembangan wilayah metropolitan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan sektor *real estate* dan juga konstruksi. Selain itu, peningkatan produktivitas di sektor pertanian juga akan terus didorong melalui pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energi yang tersebar di 11 kawasan dan pengembangan kawasan komoditas unggulan yang tersebar di 10 kawasan di Wilayah Jawa. Sejalan dengan upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa pada tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh sebesar 7,9 persen.

Berdasarkan arah kebijakan pemerataan ekonomi di setiap wilayah, rincian sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi tahun 2029 dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut.

Gambar 2.22
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2025–2029

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

2.3.2 Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan

2.3.2.1 Kebutuhan Investasi

Selama tahun 2025–2029, dibutuhkan total investasi sebesar Rp47.573,45 triliun atau rata-rata sebesar Rp9.514,69 triliun per tahun yang berasal dari investasi pemerintah, investasi Badan Usaha Milik Negara, dan investasi swasta/masyarakat. Investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian tahun 2025–2029. Rincian kebutuhan investasi tahun 2025–2029 dapat dilihat dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Kebutuhan Investasi Tahun 2025–2029

No	Uraian	Nilai (Triliun Rp)	*Share* (Persen)
1	Investasi Pemerintah	3.435,04	7,22
2	Investasi BUMN	2.915,14	6,13
3	Investasi Swasta/Masyarakat	41.223,26	86,65
Total Kebutuhan Investasi		47.573,45	

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

2.3.2.2 Sumber Pembiayaan

Kebutuhan investasi tahun 2025–2029 pada Tabel 2.7 akan dibiayai oleh tiga sumber, yaitu (a) pemerintah, (b) Badan Usaha Milik Negara, dan (c) swasta/masyarakat. Pembiayaan investasi dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara sangat terbatas sehingga sumber pembiayaan investasi swasta/masyarakat yang salah satunya berasal dari sektor keuangan, seperti kredit perbankan, penerbitan saham, dan obligasi sangat diperlukan.

Tabel 2.7
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2025–2029

Uraian	*Share* (Persen)
Pembiayaan Investasi Pemerintah	7,22
Pembiayaan Investasi BUMN	
(2.1) Dana Internal BUMN	4,04
Pembiayaan Investasi Swasta/Masyarakat	88,74
(3.1) Kredit Perbankan (*flow*)	16,91
(3.2) Penerbitan Saham	1,35
(3.3) Penerbitan Obligasi Korporasi	2,46
(3.4) Dana Internal Masyarakat	68,01

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Dalam kurun waktu 2025–2029, kontribusi sektor keuangan meliputi perbankan, saham, dan obligasi korporasi ditargetkan rata-rata sebesar 20,73 persen per tahun. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pendalaman sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah. Percepatan pendalaman sektor keuangan ke depan tidak hanya difokuskan pada perbankan, melainkan juga pada sektor keuangan nonbank (termasuk pasar modal). Selain itu, peran dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf sebagai alternatif sumber pembiayaan investasi perlu ditingkatkan, mengingat potensinya yang besar.

Selanjutnya, percepatan pendalaman sektor keuangan akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, guna mendukung pemerataan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keseluruhan arah kebijakan tersebut tentunya didukung oleh penguatan sinergi dan koordinasi antarseluruh pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk penguatan peran tim percepatan akses keuangan di daerah.

2.3.2.3 Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIB-PPN)

Sebagai salah satu agen pembangunan *(agent of development)*, posisi Badan Usaha Milik Negara berperan penting sebagai garda terdepan dalam mendukung inisiatif strategis pemerintah guna mencapai sasaran pembangunan nasional.

Dalam kurun waktu 2025–2029, terdapat beberapa inisiatif strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan investasi Badan Usaha Milik Negara, di antaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Kayan dan Mamberamo, pembangunan interkoneksi antar pulau (*super grid*), pembangunan Moda Raya Terpadu Jakarta Barat–Jakarta Timur, serta dukungan terhadap stabilisasi harga pangan. Selanjutnya, rencana investasi Badan Usaha Milik Negara yang selaras dengan Prioritas Nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, pemerintah dapat memberikan berbagai bentuk dukungan, termasuk memastikan kesiapan regulasi, mempercepat proses perizinan, mengatasi hambatan dalam pelaksanaan, serta menyediakan dukungan fiskal sesuai peraturan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

2.3.2.4 Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIS-PPN)

Investasi yang merupakan salah satu faktor utama pendorong perekonomian membutuhkan peran besar investasi swasta dan masyarakat di tengah keterbatasan kapasitas pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, dukungan investasi swasta dan masyarakat terhadap perekonomian serta keselarasan rencana investasi swasta terhadap agenda prioritas pembangunan nasional perlu menjadi perhatian.

Upaya pemerintah dalam pemetaan dukungan investasi swasta terhadap pemenuhan kebutuhan investasi dalam perekonomian dan keselarasan rencana investasi swasta tersebut dengan prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Rencana Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional merupakan beberapa daftar keputusan investasi dari swasta dan masyarakat yang akan dikurasi berdasarkan kriteria tertentu dengan berbagai sumber informasi, baik dari kementerian/lembaga, badan usaha, asosiasi pelaku usaha, maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, Rencana Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional menjadi gambaran bagaimana swasta dan masyarakat memiliki peran dalam mendorong perekonomian dan memiliki keselarasan dengan agenda prioritas pembangunan dalam mencapai target investasi.

BAB III
Prioritas Nasional

3.1 Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Konstelasi di tengah era global yang sarat dengan berbagai tantangan, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial. Pancasila tidak sekadar mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara. Prinsip demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara.

Sejalan dengan itu, konstitusi juga mengamanatkan pengarusutamaan dan pemajuan hak asasi manusia pada setiap kebijakan pembangunan yang menegaskan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak setiap individu, terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan, demi pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif. Pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, Pemerintah berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

3.1.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Dalam rangka mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia				
1	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51 (2023)	81,69–85,23	83,42–86,96
2	Indeks Hak Asasi Manusia	2,70 (2023)	2,75	2,85

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

3.1.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

Isu

- Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang masif;
- Memudarnya etika sosial, moral, dan budaya;
- Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme;
- Keragaman budaya, suku, agama, dan etnis;
- Penerapan Pancasila di kalangan pejabat masih kurang (sebanyak 45,8%);
- Penerapan Pancasila di masyarakat masih kurang (sebanyak 30,3%);
- Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri bangsa;
- Media massa hanya mendapatkan 20% dari total anggaran belanja iklan;
- Penetrasi media konvensional di masyarakat jauh berkurang. Tingkat penetrasi televisi selalu di atas 90%, kini tinggal 86%, radio 13%, koran dan majalah hanya 8%. Berbanding terbalik dengan media *online* yang sudah mencapai 70-an%, serta media sosial 62%;
- Disrupsi media mengubah pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi (sebanyak 89% masyarakat lebih percaya informasi dari televisi);
- Catatan KPK sejak tahun 2002 hingga Januari 2022 menunjukkan terdapat 22 gubernur dan 148 bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi;
- Pada rentang 2021-2023, ICW mencatat terdapat 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi;
- Terdapat 125 permohonan *judicial review* terhadap UU yang disahkan DPR selama periode 2019-2024;
- Pelanggaran etik penyelenggara pemilu, berdasarkan Laporan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (terdapat 118 putusan selama 2023);
- 72% LSM terkena dampak negatif pada sektor keuangan (tahun 2020) akibat COVID-19;
- Masih ditemukan kebijakan yang dinilai diskriminatif berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, baik di level pusat maupun daerah (305 peraturan diskriminatif per 2021);
- Sejak 2020-2023, Komnas HAM telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM (11.722 pengaduan);
- Minimnya Pendidikan HAM secara berkelanjutan bagi penyelenggara negara dan non-penyelenggara negara;
- Indonesia belum meratifikasi beberapa perjanjian utama internasional tentang hak asasi manusia;
- Pada umumnya, pendekatan pemajuan dan penegakan HAM adalah secara nasional dan belum dilaksanakan berdasarkan kekhususan geografis dan demografis setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Peluang dan Faktor Pendorong

- Pancasila merupakan ideologi yang dapat menjadi sumber spiritualitas, pemersatu bangsa, dan keadilan sosial;
- Pancasila dan wawasan kebangsaan memuat gagasan, nilai-nilai, dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam mengatur tingkah laku seluruh masyarakat Indonesia;
- Adanya keragaman budaya, suku, agama, dan etnis;
- Koalisi antara Dewan Pers dan *civil society* yang semakin menguat untuk mewujudkan praktik demokrasi substansial;
- Optimalisasi dan agresivitas organisasi pers;
- Sinergitas akademisi dan praktisi dalam pelaksanaan program pelatihan dan inovasi bagi jurnalis/perusahaan pers;
- Nilai kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia bersumber dan berakar pada budaya bangsa;
- Organisasi kemasyarakatan menjadi saluran aspirasi alternatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan;
- Semakin kuatnya hubungan anggota legislatif dan konstituen yang didukung platform artikulasi dan partisipasi digital;
- Masyarakat sipil menjadi *counterbalance* dari institusi demokrasi yang menjaga keseimbangan ekosistem demokrasi;
- Adanya berbagai instrumen hukum, seperti Perpres No.53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM dan Strategi Nasional HAM yang dapat digunakan untuk mengoptimalisasi pengarusutamaan dan pemajuan HAM secara nasional;
- Terdapat pedoman penyusunan kebijakan dan regulasi yang dapat membantu mengurangi kebijakan diskriminatif serta memastikan kebijakan yang disusun memenuhi standar HAM.

Arah Kebijakan

- Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional
- Penguatan Komunikasi Publik dan Media
- Penguatan Lembaga Demokrasi
- Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil
- Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM

3.1.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 1, akan dilaksanakan berbagai intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

(1) Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional diarahkan untuk memperkuat Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila, serta pengembangan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Selain itu, ditopang pula dengan penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah yang didukung dengan penyelenggaraan pendidikan pengkaderan tingkat pusat dan daerah, serta pelatihan untuk pelatih pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional dicapai melalui (a) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (b) pelaksanaan gerakan nasional KITA BERSAUDARA; dan (c) peningkatan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah.

(2) Penguatan komunikasi publik dan media diarahkan untuk menciptakan ekosistem komunikasi, kebebasan pers, dan media massa yang berintegritas. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas lembaga, kompetensi, dan etika insan pers, termasuk penyehatan media arus utama, serta penguatan kelembagaan dan sistem komunikasi publik nasional, pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang bertalenta digital. Penguatan komunikasi publik dicapai melalui (a) penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S); dan (b) penguatan sistem komunikasi dan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.

(3) Penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.

(4) Penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; serta (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

(5) Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan kelembagaan berperspektif hak asasi manusia, serta perlindungan hak asasi manusia terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia, humanis, inklusif, dan gender; pendidikan hak asasi manusia bagi aktor negara dan nonnegara; pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia; penghapusan praktik diskriminasi; dan penguatan mekanisme penanganan pengaduan hak asasi manusia pada kementerian/lembaga/daerah. Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia dicapai melalui (a) internalisasi hak asasi manusia untuk kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender; serta (b) perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan praktik diskriminasi.

3.1.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 1 "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia" sebagai berikut.

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Penyusunan Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik didorong oleh berbagai permasalahan dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, seperti isu kelembagaan, klasifikasi informasi, hak dan kewajiban pemohon informasi, serta sanksi hukum. Selain itu, terdapat ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara peran kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) dengan kuasi eksekutif, yang mengakibatkan banyaknya hambatan dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Internalisasi Ideologi Pancasila

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Internalisasi Ideologi Pancasila dilatarbelakangi oleh beberapa tantangan, seperti masih lemahnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi di tengah masyarakat. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, wajib diutamakan melalui pengarusutamaan ideologi Pancasila sejak dini, berkesinambungan, dan dengan pendekatan berbasiskan ramah pengguna. Selain itu, perlu memperkuat wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara, anggota legislatif, dan masyarakat umum.

Kelembagaan eksisting untuk memfasilitasi pelaksanaan Prioritas Nasional 1 dinilai telah memadai sehingga tidak ada kerangka kelembagaan yang diusulkan.

3.2 Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain.

Dalam kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada pencapaian swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; dan sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan.

Prinsip pertama dari Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius dan mampu mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini diimplementasikan dengan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan ekonomi digital menjadi akselerasi peningkatan daya saing. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita.

Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat. Atas dasar hal tersebut, pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029 merumuskan pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3.2.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Dalam mendukung proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan 6 (enam) sasaran pembangunan jangka menengah untuk membantu mengawal keberhasilan pada tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan				
1	Asia Power Index (*Military Capability*)	15,7	16	20
2	Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)	65,6	65,7	66,1

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	67,5	68,5
4	*Global Cybersecurity Index*	100	100	98
5	Indeks Keamanan Laut Nasional	59	60	64
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
6	Indeks Ketahanan Pangan	71,2 [a]	73,2	82,0
7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1,30 (2023)	2,2	3,46
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
8	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77	6,95
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)[b]	13,2 (2023)	20	23
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
10	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48 (2022)	3,50	3,75
11	Kapasitas tampungan air (m^3/kapita) [b]	59,59	59,31	63,54
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)[b]	24 (2020)	39,20	51,36
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)[b]	10,21 (2023)	12,5	30
Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan				
14	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3 (2023)	3	1
15	Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI)	34,25 (2023)	38,76	50,73
16	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45 (2023)	43	40
Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau				
17	Indeks Ekonomi Hijau	60,08 (2023)	68,34	77,20
18	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)[b]	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
19	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)[b]	17,02 (2023)	18,37	21,12
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)[b]	23,48 (2023)	26,67	30,11
21	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44	0,55
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54 (2023)[c]	76,49	77,20
23	Indeks Kualitas Udara[b]	88,67 (2023)[c]	78,53	79,49
24	Indeks Kualitas Air[b]	54,59 (2023)	72,02	72,77
25	Indeks Kualitas Lahan[b]	61,79	77,97	78,19
26	Indeks Kualitas Air Laut[b]	78,84	81,02	81,22

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)
Keterangan: a) sangat sementara, b) indikator tingkat Program Prioritas, c) perhitungan menggunakan metode lama

3.2.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan

Isu

- **Dinamika geopolitik global** dan adanya **potensi eskalasi ketegangan** di Kawasan.
- **Dinamika geoekonomi di tingkat global**, termasuk fenomena *friendshoring* dan *nearshoring*.
- Masih **adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun luar negeri** yang berisiko terhadap keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia.
- **Ancaman pada wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)** yang menjadi jalur strategis perairan.
- **Perkembangan teknologi yang meningkat eksponensial** serta **tingginya trafik anomali** yang berpotensi **mengancam aktivitas ruang siber** Indonesia.
- **Keamanan Nasional belum mampu menjadi landasan transformasi** yang dapat diandalkan akibat kompleksitas ancaman dan gangguan keamanan.

Arah Kebijakan

- Pembangunan postur pertahanan
- Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
- Komponen cadangan dan komponen pendukung
- Intelijen dan keamanan dalam negeri
- Keamanan siber, sandi, dan sinyal
- Keamanan laut dan hidro-oseanografi
- Keamanan dan ketertiban masyarakat
- Profesionalisme pelayanan kepolisian
- Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi

Sasaran 2

Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus)

Isu

- **Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan** (baik untuk pangan, pakan, bioenergi, kesehatan, dan lain-lain);
- **Menurunnya Lahan Baku Sawah** (LBS), dari 7,46 juta ha tahun 2019 menjadi 7,38 juta ha tahun 2024 (Kementerian ATR/BPN);
- Sekitar **89,54% lahan pertanian, berstatus kurang berkelanjutan** (BPS, 2021);
- Terjadinya **stagnasi/penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan**, diantaranya penurunan produksi padi dari 54,60 juta ton GKG tahun 2019 menjadi 53,98 juta ton GKG tahun 2023 (BPS), produktivitas budidaya ikan <0,6 ton/ha/tahun (BPS);
- Relatif **tingginya ketergantungan terhadap impor pangan**, diantaranya beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi, susu, gula, dan garam (BPS);
- Sekitar **12,1% kabupaten/kota mengalami rentan rawan pangan** (Badan Pangan Nasional); *Aging farmer* (sekitar 70% petani dan nelayan berusia >43 tahun)
- Perlunya **penguatan cadangan pangan nasional** untuk menghadapi berbagai kondisi;
- **Berfluktuasinya harga pangan** antar musim dan antar wilayah (Badan Pangan Nasional);
- **Rendahnya kesejahteraan petani/nelayan dan nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian** (BPS);
- **Menurunnya proporsi petani/nelayan muda dan rendahnya adopsi teknologi pertanian** (BPS)

Arah Kebijakan

Swasembada pangan

Sasaran 3

Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

Isu

- ***Reserve to Production* Energi Fosil semakin menurun** (minyak bumi 10,92 tahun, gas bumi 14,57 tahun, dan batubara 41,32 tahun).
- **Impor migas semakin meningkat** selama 5 tahun terakhir (8 persen/tahun).
- **Cadangan Penyangga Energi (CPE) belum tersedia** (BBM 9,64 Juta Barrel, LPG 525,78 Ribu MTon, Minyak Bumi 10,17 Juta Barrel (Perpres 96/2024)).
- **Akses Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga masih minim** (<5% dari Total RT).
- **Pemanfaatan energi terbarukan masih sangat rendah** dibandingkan potensi yang ada (12,6 GW dari 3.687 GW).
- **Potensi Bahan Baku Bioethanol yang melimpah** (tebu 75 ton/ha/tahun, singkong 30 ton/ha/tahun, Jagung 8 ton/ha/tahun).
- **Kapasitas Pabrik Bioethanol masih minim** dibandingkan permintaan pasar (63.000 kL/tahun dari 119.748 kL/tahun).
- **Sektor energi masih menjadi penyumbang emisi terbesar** (43%).

Arah Kebijakan

Swasembada energi

Sasaran 4

Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

Isu

- **Kebutuhan Air** tahun 2045 diproyeksikan **meningkat 31%** dari kebutuhan air tahun 2020.
- **Kapasitas Tampung per Kapita Indonesia berada di bawah negara-negara dengan varibilitas musim yang serupa.**
- **Kapasitas *idle* SPAM dan NRW masih tinggi.**
- 80% dari **air yang digunakan masyarakat akan menjadi air limbah domestik.**
- Terdapat **hutan dan lahan kritis** seluas 12,7 juta ha.
- **Menurunnya kualitas dan kuantitas mata air.**
- **Rendahnya kinerja BUMD air minum** (34,60% BUMD berkinerja tidak sehat).
- **Hanya 25% kabupaten/kota yang memiliki operator layanan air limbah domestik.**
- **Hanya 10,21% (2023) rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi aman.**
- Masih ada **203 kabupaten/kota yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik** (IPLT atau IPAL).

Arah Kebijakan

Swasembada air

Sasaran 5

Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan

Isu

Ekonomi Syariah

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi pasar ekonomi syariah global yang besar **(Indonesia baru mencapai peringkat ketiga pada Global Islamic Economy Indicator** (GIEI) 2023/2024)
- **Masih rendahnya nilai ekspor produk** halal Indonesia ke negara OKI (baru mencapai sekitar 3,8% dari total impor produk halal negara-negara OKI)
- **Masih terbatasnya UMKM yang produknya tersertifikasi halal** (baru sekitar 0,2% dari total UMKM pada tahun 2022)
- **Terbatasnya kapasitas keuangan syariah Indonesia** (size aset keuangan syariah Indonesia masih berada di posisi ke-7 global, dan market share terhadap keuangan nasional baru sekitar 12% pada tahun 2023).
- Masih **belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial syariah** (zakat, infaq, sedekah, wakaf) dengan database yang belum terintegrasi.

Ekonomi Digital

- **Tingkat adopsi digital di sektor strategis belum optimal**, dan **tingkat maturitas digital** yang masih **terbatas**
- **Masih rendahnya akselerasi inovasi teknologi baru** untuk meningkatkan daya saing nasional
- **Belum terbangunnya ekosistem dan fasilitas bisnis digital**
- **Tingkat literasi digital di Indonesia paling rendah se-ASEAN** (Indonesia 62% di bawah rata-rata ASEAN 70%)
- *Link and match* **kesenjangan kualitas dan kuantitas SDM lokal belum sesuai** dengan kebutuhan industri

Ekonomi Biru

- **Kontribusi PDB maritim** hanya mencapai 7,93% (2022)
- **Rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan sebesar 49,56**
- **Produksi garam masih rendah** dan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dipenuhi melalui impor
- **Belum terintegrasinya riset maritim** dengan kebutuhan dunia industri

Arah Kebijakan

- Ekonomi syariah
- Ekonomi digital
- Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru

Sasaran 6

Terwujudnya transformasi ekonomi hijau

Isu

- Tiga krisis global yang terus meningkat: ***Triple Planetary Crisis***, terdiri dari perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
- **Penerapan Ekonomi Konvensional dan Eksploitatif** yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan daya dukung ekosistem.
- **Produksi sampah domestik nasional diproyeksikan akan meningkat** mencapai 67,8 juta ton per tahun di tahun 2029, dan kondisi pengelolaan sampah masih akan mengalami darurat sampai tahun 2029 (skenario BAU).
- **Kemampuan daya tampung dan daya dukung TPA Nasional diproyeksikan akan penuh** pada tahun 2028 atau bahkan lebih cepat.
- Sebanyak 1.074 **tumbuhan**, 1.274 **satwa liar**, dan 2 **spesies fungi** Indonesia tercatat dalam **kategori terancam** (*threatened species*).
- **Pengelolaan kawasan hutan Indonesia** yang mencakup 62% dari total daratan **masih belum optimal** meskipun potensi hutan sangat besar untuk mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan di 9.291 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam kategori miskin.
- **Penyiapan sumber daya manusia dalam menyongsong era pekerjaan baru yang ramah lingkungan** (*green jobs*) sebagai konsekuensi transisi ekonomi hijau dan transisi energi.
- **Penuntasan layanan dasar wajib sampah** mengingat pengumpulan sampah baru menjangkau 35% rumah tangga. Hanya 20% rumah tangga yang sudah mempunyai tempat sampah tertutup serta hanya 6% rumah tangga yang sudah melakukan pemilahan dan mendapatkan layanan persampahan.
- **Transformasi pengelolaan TPA dari *open dumping* ke *sanitary landfill***, di mana saat ini 40% TPA *open dumping* dan menyebabkan kebocoran sampah ke laut. Kebocoran sampah plastik ke laut diestimasikan mencapai 0,5 juta ton per tahun.

Arah Kebijakan

- Ekosistem ekonomi sirkular
- Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
- Pembangunan rendah karbon
- Pekerjaan hijau/*green jobs*
- Pengelolaan hutan lestari

3.2.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

(1) Pembangunan postur pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan multi domain untuk melindungi kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan kepentingan nasional, serta menjaga stabilitas kawasan dari segala bentuk ancaman dan gangguan dilaksanakan melalui (a) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep *optimum essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (c) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi dan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (d) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, dan (e) meningkatkan kesiapan alat peralatan pertahanan dan keamanan melalui pemeliharaan dan perawatan.

(2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam rangka mewujudkan industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing dilaksanakan melalui (a) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (b) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, dan (c) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*

(3) Komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian bangsa dilaksanakan melalui (a) penguatan konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat komponen cadangan, serta (b) pembinaan komponen pendukung untuk penguatan pertahanan negara.

(4) Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa baik dari dalam maupun luar negeri serta pencegahan ekstremisme berbasis ideologi dan kekerasan yang mengarah pada terorisme dilaksanakan melalui (a) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme; (b) penguatan kapabilitas penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan dalam negeri; (c) koordinasi sinergi antar-instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (d) penguatan kontra radikalisasi; (e) penguatan deradikalisasi terorisme; serta (f) penguatan pusat analisis dan pengendalian krisis.

(5) Keamanan siber, sandi, dan sinyal dalam rangka penguatan tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan *recovery* dilaksanakan melalui (a) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (b) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (c) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (d) operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.

(6) Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi dalam rangka penguatan *surveillance* dan penegakan hukum di laut serta penyediaan *update* data survei untuk keselamatan pelayaran dilaksanakan melalui (a) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut; (c) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, Alur Laut Kepulauan Indonesia, dan *choke point*; (d) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan laut; serta (e) pemetaan batimetri dan alur laut serta modernisasi peralatan dan sarana prasarana penyelenggaraan hidro-oseanografi.

(7) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui (a) melakukan peningkatan kemampuan penanganan konflik sosial dan pengamanan objek vital, dan (b) melakukan peningkatan efektivitas penyelesaian tindak pidana.

(8) Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui (a) melakukan peningkatan kesiapan peralatan material khusus dan sarana prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia, (b) melakukan peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan kepolisian, (c) melakukan peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita, serta (d) peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(9) Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi menjadi landasan dalam pemeliharaan hubungan internasional kondusif dan penjagaan kepentingan nasional yang diwujudkan melalui serangkaian intervensi kebijakan sebagai berikut (a) percepatan penyelesaian perjanjian batas maritim dan darat Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema *good neighbor policy*; (b) penguatan kepemimpinan di tingkat global melalui peran aktif dalam fora dan organisasi internasional, pembangunan postur diplomasi, serta pelibatan diaspora Indonesia. Peran aktif Indonesia di tingkat global di antaranya dilakukan dengan mendorong penjagaan perdamaian dunia, menjunjung hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*), dan penguatan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan Palestina; (c) penguatan kerja sama pembangunan internasional; (d) penguatan diplomasi ekonomi; (e) kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan tenaga kerja terampil; serta (f) proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development.

(10) Swasembada pangan menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, melalui pengembangan *eco-region* sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, yang sehat dan bergizi, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan tangguh, dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan untuk (a) memperkuat ketersediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri melalui Pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi pangan, wanatani (*agroforestry*), revitalisasi tambak, dan penguatan input dan sarana prasarana pendukung produksi; (b) peningkatan pengelolaan distribusi pangan dan penguatan Badan Urusan Logistik; (c) menjamin aksesibilitas pangan bagi seluruh rakyat agar dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif; (d) mendorong pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; (e) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan/pembudidaya ikan/petani hutan; serta (f) pembangunan sistem budi daya pertanian dan perikanan berkelanjutan melalui pendekatan *nature-based solutions*, pengelolaan bentang lahan terpadu, *piloting* bantuan langsung petani, kesehatan lahan (*soil health*), dan yurisdiksi berkelanjutan, termasuk pertanian organik dan pertanian regeneratif.

Beberapa intervensi kebijakan swasembada pangan, terutama (a) pengembangan kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan secara berkelanjutan, termasuk di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Selatan, dan daerah/kawasan lain yang berpotensi; (b) penguatan cadangan pangan; (c) pengembangan pangan akuatik (*blue food*), pangan hewani, pangan lokal, serta pangan nabati; (d) penganekaragaman konsumsi pangan; (e) pengendalian penyakit asal hewan, ikan, tumbuhan, serta penjaminan mutu dan keamanan pangan; (f) fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (g) penanganan kerawanan pangan; (h) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia pertanian dan perikanan, riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi dan bantuan langsung yang adaptif dan inklusif; (i) penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; serta (j) pengembangan sistem budi daya pertanian berkelanjutan.

(11) Swasembada Energi diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional. Upaya mewujudkan swasembada energi dilaksanakan melalui reformasi subsidi, intensifikasi produksi minyak bumi dan gas, akselerasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan termasuk nuklir, dekarbonisasi industri melalui penggunaan energi terbarukan, dan intensifikasi *biofuel*. Dalam rangka untuk mencapai swasembada energi tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan akan dilakukan melalui (a) peningkatan penyediaan energi, (b) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, serta (c) penguatan implementasi transisi energi berkeadilan.

(12) Swasembada air menjadi salah satu penerapan pendekatan *Food, Energi, Water* Nexus dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa terkait pemenuhan kebutuhan air berkelanjutan. Upaya mewujudkan swasembada air dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dengan konsep *source to sea* melalui penyelamatan mata air kritis; konservasi dan pengelolaan air tanah; konservasi daerah tangkapan air melalui rehabilitasi hutan dan lahan; pembangunan dan pengelolaan tampungan air untuk pemanfaatan pertanian, peternakan, air minum, dan energi terbarukan; penyediaan pasokan air berkelanjutan sebagai tumpuan pengembangan lumbung pangan dan pertumbuhan sektor produktif melalui penerapan *smart water management* dan prinsip *water accounting* untuk menjaga neraca air pada tingkat wilayah sungai tidak dalam kondisi defisit/kritis/tertekan; tindak lanjut pemanfaatan air baku dan irigasi dari bendungan terbangun; pengelolaan risiko daya rusak air yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana melalui integrasi pendekatan struktural dan non-struktural (seperti solusi berbasis alam), revitalisasi sungai, serta percepatan persiapan *giant sea wall* sebagai bentuk pengamanan terpadu wilayah perkotaan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan; serta penyediaan layanan air minum dan sanitasi (air limbah domestik) aman bagi masyarakat. Upaya tersebut perlu didukung dengan transformasi tata kelola yang mencakup perencanaan yang terpadu, penguatan fungsi dan kelembagaan regulator, pengelolaan aset yang terintegrasi, penetapan dan penerapan tarif/retribusi yang adil dan transparan, operasionalisasi yang efisien, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan *enabling environment* lainnya. Langkah-langkah ini diwujudkan melalui penerapan pendekatan pengelolaan peningkatan nilai kawasan (*Land Value Capture*), Program Percepatan Penyediaan Air Minum, dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan dan pembiayaan, serta masyarakat. Dalam rangka mencapai swasembada air tersebut beberapa arah kebijakan dan strategi pelaksanaan yaitu (a) pembangunan dan pengelolaan tampungan air, (b) penyediaan pasokan air berkelanjutan, (c) pengelolaan risiko daya rusak air, (d) konservasi sumber daya air, (e) pengembangan sistem penyediaan air minum terintegrasi hulu ke hilir, (f) penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis *Citi-Wide Inclusive Sanitation*, (g) penguatan tata kelola penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan, (h) penguatan peran masyarakat dan ekosistem air minum dan sanitasi berbasis inovasi dan kolaborasi, serta (i) pengembangan terpadu pesisir utara Jawa.

(13) Penguatan ekonomi syariah dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Penguatan industri halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah halal untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk halal dilakukan melalui penguatan *halal value chain* dan promosi industri halal dalam negeri untuk semua sektor

meliputi makanan dan minuman halal, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta pengembangan pariwisata untuk mengoptimalkan potensi jumlah kunjungan wisatawan muslim domestik dan mancanegara. Untuk penguatan industri halal, arah kebijakannya diselaraskan dengan strategi pengembangan industri halal nasional yang termuat dalam Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029. Selanjutnya, penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional bertujuan untuk meningkatkan ekspor halal berdaya saing global dan dilakukan melalui penguatan kerja sama jaminan produk halal global serta kerja sama dengan berbagai *stakeholders* internasional termasuk dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dan berbagai *standing committee* serta organ di bawahnya. Dalam rangka meningkatkan kapasitas ekosistem halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, penguatan ekosistem halal dilakukan melalui akselerasi fasilitasi sertifikasi halal, penguatan lembaga dan sumber daya manusia pendukung ekosistem halal, pengembangan kebijakan ekosistem halal, penguatan kemitraan ekosistem halal, pengembangan riset pendukung ekosistem halal dan penghitungan Pendapatan Domestik Bruto Syariah. Untuk meningkatkan peran dan kapasitas keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan, penguatan keuangan syariah dilakukan melalui penguatan perbankan syariah seperti dengan pengembangan ekosistem kegiatan usaha *bullion* dan diversifikasi produk berfokus pada pengembangan instrumen baru yang menonjolkan keunikan prinsip syariah; penguatan pasar modal syariah dengan inovasi pengembangan instrumen untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan (hijau dan biru); dan penguatan industri keuangan non-bank syariah, dengan pengembangan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, modal ventura, finansial teknologi, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan khusus syariah (seperti pegadaian syariah dan skema syariah lainnya). Untuk mendukung perlindungan sosial dan perekonomian nasional, penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) dilakukan melalui akselerasi bauran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta keuangan syariah, salah satunya dengan penyempurnaan bentuk kelembagaan dan skema bisnis bank wakaf serta penguatan tata kelola dan literasi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Keseluruhan upaya penguatan ekonomi syariah di atas didukung oleh penguatan regulasi dan kelembagaan, peningkatan literasi, peningkatan digitalisasi dan pengelolaan data, penyediaan insentif serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional. Dengan demikian, penguatan ekonomi syariah dilaksanakan melalui penguatan (a) industri halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah halal; (b) ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (c) ekosistem halal; (d) keuangan syariah; dan (e) dana sosial syariah.

(14) Ekonomi digital yang merupakan salah satu pilar transformasi digital diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini untuk mendorong transformasi di berbagai sektor-sektor strategis guna meningkatkan kualitas dan layanan digital serta meningkatkan pengembangan ekosistem ekonomi digital. Adapun pertumbuhan kontribusi ekonomi digital ini tetap akan didukung oleh peningkatan dan distribusi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas serta adopsi digital di berbagai sektor secara optimal yang dilaksanakan melalui kebijakan, yaitu (a) penguatan faktor pendukung ekonomi digital, dan (b) penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya.

(15) Ekosistem ekonomi sirkular mendorong transisi penerapan ekonomi linear ke sirkular, yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperpanjang daya guna sumber daya maupun usia pakai produk, serta memaksimalkan potensi daur ulang dan pemulihan sumber daya yang diselaraskan dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi

Nasional Ekonomi Sirkular 2045. Terdapat 5 (lima) sektor prioritas penerapan ekonomi sirkular, yaitu pangan, tekstil, konstruksi, elektronik, dan retail (fokus pada kemasan plastik). Pada ekonomi sirkular sektor pangan, pengelolaan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*) merupakan sebagai salah satu fokus pembangunan, termasuk pemanfaatan limbah pertanian menjadi *biochar*. Perubahan juga harus dilakukan dengan menargetkan adanya *recycle content* bagi produk dan industri tertentu. Arah kebijakan pengembangan ekosistem ekonomi sirkular terdiri dari empat kegiatan prioritas, yakni (a) penerapan efisiensi sumber daya dan peningkatan daur ulang, (b) pengelolaan susut dan sisa pangan, (c) pengembangan produk ramah lingkungan, dan (d) penguatan ekosistem daur ulang.

(16) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati, mengoptimalkan pemanfaatan berkelanjutan, dan memperkuat tata kelola keanekaragaman hayati yang diselaraskan dengan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025–2045. Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya dilakukan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, namun juga area preservasi. Potensi pengembangan area preservasi di Indonesia sangat besar, termasuk pada kawasan bentang alam karst, cagar alam geologi, dan *geopark* yang sejalan dengan upaya pelestarian keanekaragaman ekosistem. Pengembangan area preservasi dapat diwujudkan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi yang terintegrasi. Selain itu, potensi pemanfaatan keanekaragaman hayati juga masih perlu didorong dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan melalui pengembangan bioekonomi dan bioprospeksi. Rencana dan strategi yang dapat mendukung arah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati tersebut dalam lima tahun ke depan diwujudkan melalui (a) perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (b) pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (c) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (d) pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi; serta (e) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.

(17) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dilakukan untuk memastikan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, arah kebijakan ini juga akan memastikan penataan ruang yang berkeadilan untuk mencapai seluruh target pembangunan nasional. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (b) peningkatan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota; (c) peningkatan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (d) peningkatan kualitas lahan; (e) peningkatan kualitas ekosistem gambut; (f) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan limbah radioaktif; (g) penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan dan penataan ruang; serta (h) penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup.

(18) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, yang mencakup seluruh rantai layanan (pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan, dilakukan dengan menjadikan sampah sebagai arus utama di berbagai

tingkat dan fungsi pemerintahan dengan pembagian wewenang yang *clean and clear*, serta dengan memastikan tersedianya seluruh norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dibutuhkan dan dijalankan dengan koherensi dan konsisten dari mulai tahap perencanaan sampai dengan operasional dan pemeliharaan serta penguatan pengelolaan aset. Pengelolaan sampah harus menjadi standar pelayanan minimal yang didukung dengan penguatan kebijakan, perbaikan dalam tata kelola, kinerja kelembagaan dan keuangan daerah, serta komitmen kepala daerah, diawali dengan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang komprehensif dan layak secara finansial/*financially viable*, pemisahan operator dan regulator, penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penetapan standar *tipping fee*. Reformasi dilakukan sejak hulu yaitu melalui perubahan perilaku seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi sampah yang diawali dari pemicuan, pemilahan, dan pengurangan sampah yang harus konsisten dan terintegrasi dengan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang terpilah, dan serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna sesuai kondisi masing-masing daerah. Penerapan reformasi tata kelola persampahan harus menjadi indikator kunci kinerja kepala daerah sehingga penataan fungsi dan peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan, kapasitas regulator dan operator, pelaksanaan, pengawasan, maupun penegakan hukum berjalan seimbang dan optimal. Reformasi juga dilakukan melalui penyediaan insentif dan disinsentif berbasis kinerja serta pendanaan inovatif, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaku lainnya. Penguatan kinerja kepala daerah dan perangkatnya juga perlu diatur, dibina, dan diawasi oleh pemerintah provinsi. *Polluter pay principle* perlu ditegakkan melalui penerapan retribusi persampahan yang berkeadilan. Selain itu, biaya pengelolaan sampah juga bisa dimasukkan sebagai tambahan komponen pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu alternatif penerapan prinsip ini. Pemastian kelengkapan regulasi dan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk batas aman kesehatan dan lingkungan diperlukan untuk seluruh upaya pengelolaan sampah. Pengelolaan aset juga akan dilakukan, baik pada proses pengadaan barang, transfer, serta penataan aset di pusat dan daerah. Agar reformasi tersebut berjalan dengan baik, diperlukan koherensi kebijakan dan integrasi vertikal serta horizontal yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja di pusat dan daerah. Selain itu, di hilir dilakukan optimalisasi pengolahan sampah berupa penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*-Pusat Daur Ulang-Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, maggot/*black soldier fly*, *refuse derived fuel*, *waste to energy*, pirolisis, dan lain-lain), dan pengintegrasian sektor informal; optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan memastikan *off-taker* hasil olahan sampah, penataan sistem pengelolaan lindi dan gas metana, konservasi tempat pemrosesan akhir dengan *landfill mining* serta pembatasan tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu sehingga hanya residu masuk ke tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu yang menerapkan sistem *sanitary landfill*. Sebagai upaya penurunan sampah yang mencemari laut dan perairan, sarana dan prasarana penanganan sampah perairan yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan persampahan *land-based* di daerah akan ditingkatkan. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir tersebut akan dilakukan melalui arah kebijakan berikut (a) perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan, (b) peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu.

(19) Pembangunan rendah karbon diupayakan dalam kerangka kontribusi Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca guna menekan laju kenaikan suhu secara global beserta perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya. Aksi-aksi pembangunan rendah karbon terus diperkuat untuk dapat menurunkan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca melalui beberapa kebijakan, yakni (a) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi; (b) penurunan emisi gas rumah kaca sektor berbasis lahan; (c) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (d) peningkatan upaya dekarbonisasi industri; (e) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah; dan (f) penguatan tata kelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca serta nilai ekonomi karbon.

(20) Pekerjaan hijau/*green jobs* didorong untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan, efisiensi energi dan sumber daya alam, serta pembangunan rendah karbon melalui bisnis proses dan praktik industri yang ramah lingkungan. Pekerjaan hijau/*green jobs* juga didorong untuk memenuhi kriteria kerja layak, seperti kecukupan gaji, kondisi kerja yang aman, serta pelindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Keseimbangan permintaan tenaga kerja hijau untuk pekerjaan hijau/*green jobs* dan penyediaan tenaga kerja hijau yang berkualitas sangat penting diwujudkan untuk mendukung keberhasilan implementasi ekonomi hijau, termasuk visi *net zero emission* pada tahun 2060 melalui transisi energi yang berkeadilan. Penciptaan pekerjaan hijau/*green jobs* akan diwujudkan melalui (a) pengembangan ekosistem pekerjaan hijau/*green jobs*, dan (b) pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau.

(21) Pengelolaan hutan lestari perlu didorong karena Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat besar sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi. Namun demikian, hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perlu transformasi kebijakan melalui pengelolaan hutan lestari yang meliputi (a) peningkatan produktivitas hutan, (b) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri, (c) penguatan pengelolaan hutan lestari, (d) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari, (e) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan, dan (f) perlindungan dan pengamanan hutan.

(22) Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi secara berkelanjutan melalui (a) peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap dan akuakultur, pengelolaan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*ecofishing port*), pengembangan kluster komoditas unggulan akuakultur, termasuk ikan hias, tuna cakalang tongkol, dan budidaya lobster, tilapia, dan udang; (b) penguatan industri manufaktur berbasis sumber daya laut dan perairan yang berfokus pada pengembangan produk pangan, energi, dan farmasi yang bernilai tambah dan berteknologi tinggi; (c) penguatan industri transportasi dan logistik maritim utamanya industri pelayaran, pelabuhan, dan perkapalan; serta (d) pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan yang didukung penerapan standar, sumber daya manusia, investasi, dan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat; sekaligus (e) mempromosikan sektor-sektor baru yang mencakup inovasi energi laut terbarukan, pengembangan bioteknologi, *bioprospecting* dan bioekonomi kelautan, serta (f) pengelolaan konservasi dan jasa ekosistem. Upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi biru tersebut membutuhkan tata kelola yang lebih baik meliputi: kebijakan yang terintegrasi, regulasi yang kondusif, kelembagaan yang kompeten, infrastruktur yang berkualitas, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, akan

terus dilakukan pengelolaan kesehatan ekosistem pesisir dan laut (*ocean health*), neraca sumber daya laut (*ocean accounting*), penerapan *marine nature based solution*, inventarisasi potensi sumber daya kelautan, pengaturan tata ruang laut dan zonasi pesisir yang harmonis, penangkapan ikan terukur, dan peningkatan efektivitas pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan. Pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, secara garis besar mencakup (a) penguatan tata kelola ekonomi biru; (b) peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; (c) peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; (d) pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut; (e) penguatan industri transportasi laut; (f) pengembangan pariwisata bahari dan danau; dan (g) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia ekonomi biru.

Selain intervensi yang telah dijabarkan, terdapat juga dukungan program yang menjadi penekanan dan memiliki daya ungkit tinggi. Dalam merespons hal tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 2 didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui beberapa Kegiatan Prioritas yaitu: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan Sumatera Selatan, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan Papua Selatan, dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan Lainnya.

(1) Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional

Permasalahan dan tantangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara diamanatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi setiap individu agar dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif. Pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. Kebutuhan bahan pangan semakin meningkat, baik jumlah, kualitas, ragam, dan jenis peruntukannya. Di lain pihak, kapasitas produksi pangan dalam negeri menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (a) menurunnya kuantitas, kualitas, dan kapasitas faktor produksi pangan, terutama lahan dan air; (b) semakin tinggi dampak negatif dan tidak menentunya perubahan iklim; (c) rendahnya skala usaha tani; (d) relatif terbatasnya dukungan dan ketersediaan infrastruktur wilayah di pedesaan dan pertanian; serta (e) masih terdapatnya potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk pangan secara berkelanjutan.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam membangun kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, intervensi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan dalam negeri, dengan membangun kawasan sentra produksi/lumbung pangan, terutama di daerah-daerah yang mempunyai potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi pangan secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan produksi pangan. Intensifikasi terutama diarahkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman dan produktivitas komoditas pangan. Sedangkan, strategi ekstensifikasi diarahkan untuk menambah lahan pangan baru, dengan memperhatikan kesesuaian sumber daya alam, ketersediaan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup setempat secara berkelanjutan.

Sampai dengan tahun 2029, intervensi ini ditargetkan untuk menambah produksi pangan setara padi 20 juta ton gabah kering giling atau setara 10 juta ton beras, yang diperkirakan memerlukan penambahan luas panen sekitar 4 juta ha setara luas sawah. Adapun *highlight* intervensi dari mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional termuat dalam infografis di bawah ini.

KP Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan

Sasaran dan Indikator

Output
Tambahan luas panen setara 4 juta ha sawah

Outcome
Tambahan produksi pangan setara 20 juta ton GKG padi, atau setara 10 juta ton beras

Indikasi *Highlight* Intervensi

Geospasial dan Infrastruktur
- Penyiapan survei, investigasi, dan desain
- Penataan batas kawasan hutan untuk pemutakhiran penetapan kawasan hutan
- Pembangunan irigasi
- Jalan usaha tani
- Pembangunan sistem drainase
- Pembangunan jembatan

On-farm
- Cetak sawah
- Kawasan pertanian
- Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian
- Alat dan mesin pertanian
- Perbengkelan alat dan mesin pertanian

Off-farm
- Penguatan kelembagaan ekonomi petani, termasuk koperasi dan badan usaha milik petani
- Sarana pascapanen
- Asuransi pertanian
- Pelatihan pertanian

Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu
- Kementerian Pertanian
- BUMN/Lembaga yang ditunjuk lainnya

Institusi Kontributor
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Transmigrasi
- Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Badan Pusat Statistik

Indikasi Lokasi Prioritas

1. Kalimantan Tengah
2. Sumatera Selatan
3. Papua Selatan
4. Lokasi prioritas lainnya (Aceh, Jambi, Riau, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat)

3.2.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, mencakup sasaran yang luas dari berbagai sektor. Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung ketercapaian Prioritas Nasional 2 dijabarkan sebagai berikut:

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber didasari oleh salah satu cerminan dinamika ancaman keamanan nasional yaitu peningkatan jumlah serangan siber berbentuk *malware* ke Indonesia. Penggunaan dan pemanfaatan ruang siber di segala aktivitas saat ini dapat berpotensi buruk jika disalahgunakan oleh aktor

yang tidak bertanggung jawab. Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber ini akan mengisi kekosongan hukum terhadap kebutuhan pengaturan terkait pembangunan dan penjaminan sistem keamanan dan ketahanan siber di Indonesia yang saat ini masih bersifat sektoral.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Revisi Undang-undang akan mendukung penyelenggaraan Diplomasi Total dengan semakin memperkuat mekanisme pembuatan perjanjian internasional (*Treaty Making Power*) dan hubungan luar negeri. Hal ini akan memudahkan pemahaman kementerian/lembaga teknis terkait dalam proses pembuatan suatu perjanjian internasional, misalnya dengan adanya kejelasan kriteria perjanjian internasional yang perlu disahkan melalui undang-undang, diharapkan suatu perjanjian internasional dapat memberikan manfaat yang riil dan jangka panjang di tengah masyarakat, termasuk dalam mendukung investasi.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan diperlukan untuk pencapaian swasembada pangan. Hal ini guna menguatkan dan mengembangkan sektor pertanian dengan sistem penyuluhan yang terkoordinasi dari pusat sampai daerah. Lebih lanjut, hal ini juga mendukung pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanian dengan penguatan kelembagaan penyuluhan.

Selain itu, kerangka kelembagaan yang didesain untuk mendukung ketercapaian sasaran-sasaran dalam Prioritas Nasional 2 dijabarkan sebagai berikut:

(1) Pembentukan Badan Regulator Air Minum dan Sanitasi

Pembentukan Badan Regulator Air Minum dan Sanitasi memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, dan advisori yang selama ini terfragmentasi dan belum berjalan optimal, sekaligus menjadi langkah *debottlenecking* untuk menciptakan tata kelola lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan visi swasembada air, badan ini dirancang memiliki independensi operasional serta finansial untuk memastikan ketersediaan air yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, mencakup pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir mulai dari penyediaan air baku, penyediaan dan distribusi air minum, hingga pengolahan air limbah domestik. Badan ini memiliki peran utama yaitu: (1) penilaian kinerja layanan melalui sistem *benchmarking*; (2) pemberian rekomendasi tarif dan retribusi berbasis prinsip keadilan, efisiensi ekonomi, model pemulihan biaya, dan keterjangkauan; (3) pemantauan terhadap standar kuantitas dan kualitas layanan; serta (4) peningkatan transparansi melalui pelaporan publik dan pengelolaan data. Untuk mendukung peningkatan layanan, badan ini juga menjalankan mekanisme insentif dan disinsentif yang diharapkan dapat memacu kinerja operator, efisiensi biaya, dan optimalisasi sumber daya. Dengan langkah ini, mutu penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat diharapkan terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(2) Penataan Fungsi dan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Air Limbah Domestik

Penataan ini bertujuan untuk menciptakan pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan layanan air limbah domestik. Pertama, kerangka kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan layanan air limbah domestik. Provinsi akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kinerja layanan di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Provinsi juga diberikan kewenangan lebih untuk ikut serta dalam menyediakan layanan air limbah domestik pada kabupaten/kotanya yang kesulitan dalam penyediaan layanan air limbah domestik. Kedua, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, fungsi operasional akan didelegasikan kepada institusi di tingkat kabupaten/kota seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, atau Perusahaan Daerah Air Minum. Institusi-institusi ini diharapkan dapat fokus menyediakan layanan secara lebih efisien dan profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, penataan ini juga mencakup upaya untuk menutup gap fungsi serta penegakan regulasi yang belum diamanatkan secara jelas pada tingkat pusat seperti rekomendasi tarif/retribusi, pengawasan terhadap kualitas layanan, serta pengawasan terhadap baku mutu air limbah domestik.

(3) Penataan Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan *Platform* Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Tata kelola persampahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Lebih lanjut, pengaturan kelembagaan pengelolaan sampah juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam rangka mendukung tata kelola persampahan yang partisipatif, terintegrasi, serta tidak tumpang tindih, maka diperlukan penataan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah. Penataan kelembagaan ini lebih lanjut akan diatur pada Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(4) Pembentukan Kelembagaan Operator Layanan Persampahan yang Terpisah dari Regulator

Saat ini, baru terdapat 3 dari 38 pemerintah provinsi dan 3 dari 514 pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah Persampahan. Lebih lanjut, operator layanan swasta dan berbasis masyarakat yang berupa kelompok swadaya masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa masih terbatas secara kuantitas dan kualitas. Pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai jenis operator tersebut juga masih belum optimal, termasuk pendataan, registrasi, dan sistem perizinan operasi. Selain itu, potensi kerja sama antarpemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan swasta, ataupun antara Badan Layanan Umum Daerah dengan swasta juga belum digali sehingga ke depan diperlukan penguatan kebijakan dan ekosistem bagi operator dan kerja sama dalam layanan persampahan. Keberadaan unit khusus (operator) layanan persampahan dan kerja sama ini juga telah diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dan akan lebih lanjut diatur pada Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, berikut Peta Okupasi perlu untuk dilegalkan sehingga pembinaan dan pengembangan standar kompetensi untuk sumber daya manusia persampahan dapat diimplementasikan.

(5) Penataan dan Pengelolaan Aset Sarana dan Prasarana Persampahan

Penataan dan pengelolaan aset diperlukan untuk melindungi jaminan kepemilikan dan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sektor persampahan dan tata kelola aset. Lebih lanjut, penataan dan pengelolaan aset ini juga diatur pada Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(6) Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Berbasis Wakaf

Dalam rangka implementasi amanat asta cita terkait penyempurnaan "bank wakaf", diperlukan pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan berbasis wakaf sebagai *special mission vehicle* yang ditujukan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan wakaf dalam negeri dan memaksimalkan potensi penarikan dana wakaf global ke dalam negeri.

(7) Penguatan Kelembagaan Pangan, termasuk Tata Kelola Kebijakan Subsidi Pupuk, Perbenihan, Pemuliaan Tanaman, dan Penyuluhan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar rakyat dan salah satu unsur penting ketahanan nasional. Untuk melaksanakan dan mencapai swasembada pangan, diperlukan penguatan dan perbaikan kelembagaan pangan secara terpadu, dari hulu sampai hilir. Penguatan kelembagaan dan tata kelola tersebut mencakup, antara lain namun tidak terbatas pada aspek produksi pangan, aspek sarana dan prasarana produksi pangan (benih, pupuk, dan sebagainya), aspek manajemen logistik pangan, aspek perbenihan dan pemuliaan tanaman, aspek penyuluhan, aspek konsumsi pangan dan gizi, serta aspek pendukung penting lainnya. Penguatan tata kelola institusi-institusi terkait benih diperlukan untuk mendorong aktivitas inovasi dan penelitian dalam mendukung pengadaan benih unggul dan teknik budidaya, serta pengendalian hama terpadu melalui pemanfaatan pestisida nabati dan bio.

3.3 Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk memberi ruang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan dan peningkatan ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan dengan memperhatikan pendekatan solusi berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke depan (2025–2029), pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Keseluruhan upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan.

3.3.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 dan tahun 2029 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan				
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,0 (2019)	46,5	48,5
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB				
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	170,5 (2023)	188,5	213,6
3	Aset Perbankan/PDB (%)	57,2 (2023)	66,9	77,2
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,3 (2023)	8,0	11,2
5	Aset Asuransi/PDB (%)[a]	9,0 (2023)	9,1	10,5
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,9 (2023)	57,8	68,0
7	Total Kredit/PDB (%)	33,9 (2023)	37,8	46,8
8	Inklusi Keuangan (%)	88,7 (2023)	91,0	93,0
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas				
9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	23,96	35,00	46,00
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,10	1,20
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,06	3,10	3,30
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,08	3,10	3,60
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata				
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,6 (2022)	4,50–4,60	4,90–5,00
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	14,0 (2023)	19–22,1	32,0–39,4
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif				
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77 (2023)	7,3–7,9	8,0–8,4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan: a) Komponen perhitungan aset asuransi sudah mencakup asuransi sosial dan asuransi wajib.

3.3.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, disusun arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran 1

Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Isu

- **Waktu tempuh koridor utama jalan nasional di Indonesia (2,14 Jam/100 Km)** relatif lebih tinggi dibandingkan negara Asean lainnya seperti di Malaysia 1,09 Jam/100 km,Thailand 1,30 jam/100 km dan Vietnam 1,96 jam/100 km)
- **Rendahnya muatan balik dari Kawasan Timur (30% dari kapasitas)** disebabkan terbatasnya kawasan ekonomi dan belum adanya hub domestik di wilayah Timur
- **90% lalu lintas penerbangan masih terpusat di 5 Bandara Primer** (Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Kualanamu, dan Sultan Hasanuddin)
- **Terdapat lebih dari 100 *Airstrip* di Papua** yang kondisi prasarananya belum memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan
- **Skema layanan dan keterpaduan perencanaan** transportasi darat, kereta api, laut, dan udara **bersubsidi** belum optimal
- **Pangsa angkutan kereta api regional masih rendah**, di sisi lain memiliki keunggulan ekonomis pada jarak menengah (750-1.500 km) dengan *demand* besar dan menerus
- **Tingginya kerugian ekonomi karena kemacetan lalu lintas** (Rp65 triliun per tahun) yang diakibatkan **terbatasnya sistem angkutan massal perkotaan** (pangsa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih dibawah 20%)
- **Belum optimalnya tata kelola jalan daerah** yang menyebabkan kesenjangan kualitas antara jalan nasional dan daerah, dari 504.672 km jalan (nasional, provinsi, kab/kota) sebesar 28% mengalami kerusakan (77% di antaranya merupakan jalan daerah)
- **Terdapat *backlog*** antara kebutuhan dan pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM pencarian dan pertolongan (pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan masih sebesar 42%)
- **Tingginya pelanggaran kendaraan muatan berlebih akibat kendaraan *Over Dimension* & *Over Load* (ODOL)** menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Sebesar 40%-50% kendaraan di Lintas Utama Pulau Jawa dan 30%-40% kendaraan di Sumatera tergolong ODOL
- **Belum terpenuhinya** target jumlah lulusan diklat teknis pendidikan dan diklat pemberdayaan masyarakat keselamatan *safety and security* (persentase jumlah lulusan masih di bawah 50% pada tahun 2023)
- ***Coverage and usage gap fixed broadband* yang tinggi.** Hingga TW IV 2023, 53,01% wilayah Indonesia dan 97,44% permukiman telah terjangkau sinyal 4G, sementara cakupan 5G mencapai 0,15% wilayah dan 3,73% permukiman, serta 68,49% kecamatan telah memiliki *Optical Distribution Point* (ODP)
- **Kecepatan internet di Indonesia masih rendah di angka 24,96 Mbps** dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi nomor 9 di Kawasan Asia Tenggara (Speedtest Global Index, 2023)
- Kapasitas pusat data di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 200 MW, masih jauh di bawah kebutuhan ideal untuk melayani populasi sebesar 270 juta jiwa yang diprakirakan memerlukan kapasitas hingga 2.200 MW
- **Kerangka regulasi dalam menghadapi risiko global terkait teknologi,** termasuk kekurangan kerangka hukum yang memadai untuk mengatur inovasi digital dan dampaknya (*Global Risk Report*, 2023)
- **Tata kelola ruang digital Indonesia belum kondusif** dan belum *fair playing field* bagi industri
- **Kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan masih terbatas sehingga kualitas layanan ketenagalistrikan masih rendah, serta *lock-in* dan ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil masih tinggi** (Konsumsi listrik per kapita 1.337 kWh di tahun 2023)
- ***Supply-Demand dan Spatial Mismatch* terutama sumber daya energi terbarukan dan pusat beban/permintaan energi listrik** (Kapasitas pembangkit listrik 91 GW dan Panjang jaringan transmisi sebesar 87.691 kms kumulatif di tahun 2023)
- **Kebutuhan investasi yang besar dan ketergantungan terhadap pembiayaan dan teknologi dari luar negeri**
- **Masih tingginya alokasi subsidi dan kompensasi listrik serta penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran** (subsidi listrik tahun 2023 sebesar Rp68,64 triliun)

Arah Kebijakan

- Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda
- Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik

Sasaran 2

Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB

Isu

- **Dangkalnya kedalaman sektor keuangan,** terutama pada sektor keuangan nonbank (sektor keuangan masih didominasi perbankan)
- **Belum efisiennya struktur perbankan** yang mendorong tingginya *cost of fund*
- **Belum optimalnya fungsi intermediasi** (penyaluran kredit masih terpusat di Pulau Jawa dan belum optimal disalurkan kepada sektor prioritas)
- **Rendahnya penetrasi dan densitas industri dana pensiun dan asuransi, serta terbatasnya diversifikasi produk**
- **Rendahnya basis investor dan instrumen investasi pada pasar modal**
- **Rendahnya literasi** dan tingginya *gap* antara inklusi dan literasi keuangan

Arah Kebijakan

- Pendalaman Sektor Keuangan

Sasaran 3

Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas

Isu

- **Sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro** sehingga belum mampu menyediakan lapangan kerja yang baik
- **Rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi pada perekonomian**
- **Kurangnya penerapan standar, sertifikasi, teknologi dan inovasi** pada koperasi, wirausaha, dan UMKM
- **Rendahnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri**
- **Belum optimalnya ekosistem usaha,** termasuk pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM dalam mendukung pengembangan koperasi, wirausaha, dan UMKM

Arah Kebijakan

- Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi

Sasaran 4

Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata

Isu

- **Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal** akibat pariwisata yang tidak terkendali (*overtourism*) dan akulturasi budaya dari wisatawan
- **Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi** yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan
- **Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman**
- **Rendahnya pengeluaran wisatawan** akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
- **Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata** oleh masyarakat lokal

Arah Kebijakan

- Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Sasaran 5

Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif

Isu

- **Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal** terutama untuk mendukung komersialisasi kekayaan intelektual
- **Ketersediaan data ekonomi kreatif yang terbatas** berdampak terhadap minimnya investasi dan kesenjangan kebijakan di daerah
- **Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal** terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
- **Daya saing SDM ekonomi kreatif yang rendah** khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual
- **Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal** mengakibatkan kesenjangan pengembangan ekonomi kreatif di daerah

Arah Kebijakan

- Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

3.3.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

(1) Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda diarahkan pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang dan barang melalui intervensi kebijakan (a) pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan, (b) pengembangan kereta api penumpang antarkota dan penguatan kereta api angkutan barang, (c) pengembangan jaringan pelabuhan terpadu, (d) pengembangan jaringan bandara terpadu, (e) penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, (f) pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan, (g) pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja layanan transportasi, serta (h) peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan transportasi.

(2) Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik diarahkan untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur, antara lain infrastruktur digital dan ketenagalistrikan. Upaya mewujudkan konektivitas digital dan transisi energi listrik dilaksanakan melalui pembangunan TIK di tingkat nasional, peningkatan transformasi digital, dan peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan listrik secara merata dan berkualitas yang rendah karbon, efisien, dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai konektivitas digital dan transisi energi listrik tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan akan dilakukan melalui (a) penguatan infrastruktur telekomunikasi, pos, dan penyiaran; (b) pengembangan dan peningkatan ekosistem digital; (c) pembangunan pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel, termasuk sistem penyimpanan energi dan pengubahan bahan bakar pembangkit listrik yang rendah karbon; (d) pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya, seperti jaringan transmisi dan interkoneksi dalam dan antarpulau *(super grid)*, jaringan distribusi dan terisolasi, serta listrik pedesaan; dan (e) perluasan jangkauan infrastruktur tenaga listrik.

(3) Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dilaksanakan melalui (a) pengembangan koperasi sektor produksi; (b) peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; serta (c) pengembangan kewirausahaan. Pengembangan koperasi sektor produksi utamanya dilakukan melalui pengembangan usaha koperasi yang difokuskan pada koperasi yang bergerak di sektor agromaritim, peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan reputasi koperasi, serta penguatan sistem pengawasan koperasi. Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif utamanya dilakukan melalui perluasan akses ke perizinan usaha, penyediaan skema dan fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, akselerasi digitalisasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan mutu produk melalui standardisasi dan sertifikasi, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan kewirausahaan utamanya dilakukan melalui inkubasi usaha, penyediaan *platform* terintegrasi yang menghubungkan wirausaha dengan ekosistem usaha, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan, pemutakhiran regulasi terkait pengembangan kewirausahaan nasional, serta didukung dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah.

(4) Pendalaman sektor keuangan akan dilakukan melalui (a) penguatan peran perbankan, (b) penguatan peran sektor keuangan nonbank, dan (c) peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

(a) Pada sektor perbankan, arah pengembangan akan difokuskan pada berbagai aspek, mulai dari struktur, efisiensi *(cost of fund)*, keberagaman produk, jangkauan penyaluran kredit atau pembiayaan, cakupan aktivitas usaha, hingga pemanfaatan teknologi. Saat ini, struktur perbankan di Indonesia bersifat oligopoli, yang secara tidak langsung mendorong inefisiensi dan tingginya *cost* di Indonesia. Untuk itu, ke depan, didorong percepatan konsolidasi agar jumlah bank besar meningkat dan efisiensi perbankan pun lebih optimal, diiringi peningkatan transparansi suku bunga dan implementasi *good governance*. Dari aspek keberagaman produk, didorong diversifikasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, seperti kebutuhan pembiayaan perumahan, pembiayaan berkelanjutan (hijau dan biru), kebutuhan generasi milenial yang cenderung *internet-based* (misalnya pada bidang inovasi dan teknologi), produk responsif gender, serta produk yang lebih inklusif untuk masyarakat rentan, disabilitas, dan termarginalkan. Penyaluran kredit produktif ke sektor prioritas

(termasuk ke usaha mikro, kecil, dan menengah) ke depan akan didorong, dengan jangkauan wilayah penyaluran kredit akan diperhatikan untuk pemerataan pembangunan. Selanjutnya, dari sisi cakupan aktivitas usaha, perbankan perlu terus didorong untuk berinovasi melalui perluasan aktivitas usaha *(multiactivities)*, seperti *bullion*, *wealth management*, dan *digital banking*. Ke depan, akselerasi digitalisasi produk dan layanan juga akan ditingkatkan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

(b) Pada sektor keuangan nonbank, optimalisasi peran industri asuransi, dana pensiun, dan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang diperkuat melalui peningkatan literasi, perluasan kepesertaan, diversifikasi produk dan instrumen keuangan, optimalisasi portofolio investasi, perbaikan tata kelola, pemanfaatan digitalisasi, dan perlindungan konsumen. Pada industri asuransi, fokus utama pengembangan pada tahun 2025–2029 adalah peningkatan penetrasi dan densitas asuransi. Dari sisi permintaan, peningkatan literasi dan *awareness* masyarakat akan didorong dengan menjaga kepercayaan masyarakat atas industri asuransi melalui perbaikan tata kelola dan perlindungan konsumen. Dari sisi penawaran, diversifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat juga ditingkatkan, termasuk perluasan cakupan asuransi untuk segmen masyarakat *productive poor* seperti petani, peternak, dan nelayan. Diversifikasi produk juga menyesuaikan perkembangan zaman, seperti dukungan terhadap pembiayaan berkelanjutan *(green or blue business)*, misalnya asuransi untuk panel tenaga surya dan asuransi terumbu karang, serta penempatan investasi pada instrumen berkelanjutan seperti *green bond* dan *blue bond*. Perbaikan struktur pasar juga terus didorong melalui peningkatan efisiensi, kapasitas, dan permodalan melalui percepatan konsolidasi, serta didukung oleh penguatan peran reasuransi sebagai mitigasi risiko asuransi. Seiring dengan hal tersebut, perbaikan portofolio investasi (penempatan dana industri asuransi) ke depan juga akan didorong pada instrumen-instrumen jangka panjang. Pada industri dana pensiun, fokus penguatan dilakukan baik pada program pensiun wajib maupun sukarela, yaitu peningkatan penetrasi dan densitas melalui literasi dan edukasi masyarakat atas pentingnya dana pensiun (termasuk pada pekerja informal), pengembangan produk yang juga diperuntukkan bagi kalangan pekerja mandiri, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (pekerja informal), serta perbaikan tata kelola dan sistem pensiun. Salah satu penyebab rendahnya dana kelolaan adalah desain kebijakan (sistem pensiun) yang memungkinkan peserta menarik dananya jauh sebelum usia pensiun normal. Oleh karena itu, ke depan, perbaikan sistem pensiun dilakukan salah satunya melalui implementasi dua jenis akun program pensiun, yaitu akun yang tidak dapat dicairkan hingga usia pensiun dan akun simpanan darurat. Selanjutnya, perbaikan sistem pensiun juga diikuti dengan pengembangan portofolio investasi, melalui perbaikan regulasi yang membatasi industri dana pensiun untuk berinvestasi di instrumen jangka panjang. Pada pasar modal, arah pengembangan pada tahun 2025–2029 akan berfokus pada pendalaman pasar modal dengan perluasan instrumen investasi dan peningkatan basis investor (baik korporasi maupun ritel). Perluasan basis investor dilakukan melalui peningkatan literasi dan edukasi masyarakat, serta peningkatan *awareness* masyarakat atas pentingnya berinvestasi (mendorong *saving society* menjadi *investment society*). Diversifikasi produk ke depan juga akan didorong, seperti *coral bond* dan penambahan produk keuangan derivatif. Selain itu, pengembangan produk seperti obligasi/sukuk hijau, obligasi/sukuk biru, dan perdagangan karbon melalui infrastruktur pasar modal juga akan dioptimalkan. Keseluruhan upaya tersebut akan dilakukan dengan menjaga aspek perlindungan konsumen dan investor. Sementara itu, pada sektor keuangan nonbank lainnya seperti lembaga penjaminan akan didorong melalui peningkatan jumlah dan kapasitas lembaga penjamin, pembentukan lembaga

penjamin ulang, perluasan produk yang dijamin, dan perluasan jangkauan penjaminan dengan membentuk lembaga penjaminan di berbagai wilayah di Indonesia.

(c) Peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Dari sisi permintaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat akan dioptimalkan, didukung oleh edukasi dan sosialisasi produk keuangan secara lebih masif dan disesuaikan dengan segmen pasar, misalnya memanfaatkan teknologi digital untuk edukasi segmen milenial. Selain itu, edukasi dan sosialisasi produk keuangan pada masyarakat juga akan memanfaatkan peran pendamping Program Keluarga Harapan, bidan, dan tokoh masyarakat lain yang dekat dengan masyarakat. Bentuk edukasi lain seperti kampanye menabung dan penguatan substansi keuangan dalam kurikulum pendidikan (mulai dari pendidikan dasar) juga akan ditingkatkan. Dari sisi penawaran, peningkatan inklusi dan literasi akan diarahkan pada (1) perluasan akses dan penyediaan layanan keuangan, termasuk penambahan agen laku pandai dan agen layanan keuangan digital sebagai perpanjang tanganan lembaga keuangan formal khususnya di wilayah terpencil (*remote area*); (2) perluasan jangkauan fasilitas sistem pembayaran melalui pemerataan cakupan dan keterjangkauan layanan internet di seluruh Indonesia, serta peningkatan efisiensi operasional sistem pembayaran dengan menurunkan biaya transaksi agar lebih inklusif menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah; (3) penyediaan produk dan kemudahan layanan keuangan yang ramah bagi disabilitas, perempuan, usaha mikro, kecil, dan menengah, masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta segmen prioritas inklusi keuangan lainnya; dan (4) pengoptimalan program eksisting, seperti Kredit Usaha Rakyat, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, Kredit Ultra Mikro, dan program lainnya, dengan perluasan jangkauan penerima program dan didukung oleh perbaikan *database* agar penerima program lebih tepat sasaran. Keseluruhan upaya peningkatan inklusi dan literasi diiringi dengan penguatan perlindungan konsumen.

(5) Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan dengan serangkaian strategi (a) meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi; (b) meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif; (c) menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy*; (d) membangun infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata; (e) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata; (f) menguatkan pemasaran yang bertanggung jawab; (g) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebencanaan, keamanan, dan keselamatan; (h) mengembangkan mekanisme pembiayaan dan implementasi *Indonesia Quality Tourism Fund*; (i) diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada pengembangan *geopark* (terutama United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization *Global Geopark*), *diving* dan *snorkeling, surfing, island hopping, wellness, medical, adventure, culture, event, meeting, incentives, conventions and exhibitions, yacht and cruise*, gastronomi, pariwisata ramah muslim, dan *digital nomad*; (j) mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di destinasi pariwisata prioritas, serta (k) mengembangkan destinasi pariwisata bahari yang mendukung ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru dalam Prioritas Nasional 2. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan melalui sejumlah intervensi kebijakan, yaitu (a) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan; (b) penguatan destinasi regeneratif Bali; (c) penguatan destinasi regeneratif Kepulauan Riau, (d) penguatan destinasi regeneratif *greater* Jakarta; (e) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Lombok-Gili Tramena; (f) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Manado–Likupang; (g) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung; (h) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba; (i) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Raja Ampat; (j) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo; (k) pengembangan destinasi pariwisata

prioritas Bromo–Tengger–Semeru; (l) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Wakatobi; dan (m) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Morotai.

(6) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diarahkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui strategi (a) penguatan ekosistem kekayaan intelektual melalui aktivasi pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi yang didukung dengan forum kolaboratif pemangku kepentingan ekonomi kreatif, termasuk World Conference on Creative Economy; (b) penguatan data ekonomi kreatif serta integrasinya; (c) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global dengan aktivitas pemasaran melalui media digital dan fisik, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni; (d) penguatan aksi afirmasi produk kreatif lokal yang didukung forum sinergi dan insentif; (e) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, inkubasi produk, serta riset kolaboratif dengan institusi pendidikan tinggi; (f) pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, termasuk pembangunan *hub*/sentra kreatif yang didukung kelembagaan pengelola dan klaster kreatif sebagai ruang kreasi terutama di kota yang tergabung dalam provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization *Creative City Network*; (g) penguatan struktur dan skema pendanaan, pembiayaan, dan insentif, termasuk melalui dana pengembangan konten kreatif/Indonesia Creative Content Fund dan *matching fund co-production*; serta (h) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan strategi tersebut difokuskan pada provinsi prioritas yang meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, Maluku, dan Papua. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dilaksanakan melalui intervensi kebijakan (a) penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif; (b) penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; (c) penguatan ekosistem fesyen dan kriya; (d) penguatan ekosistem aplikasi dan gim; serta (e) penguatan ekosistem kuliner.

3.3.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Regulasi eksisting untuk memfasilitasi pelaksanaan Prioritas Nasional 3 dinilai telah memadai sehingga tidak ada kerangka regulasi yang diusulkan.

Kerangka kelembagaan sebagai pendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 "Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi", antara lain

(1) Penguatan Badan Pengelola (Badan Otorita Pariwisata) di Destinasi Pariwisata Prioritas;
(2) Penguatan tata kelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dalam rangka mengelola Dana Pariwisata Berkualitas/Indonesia Quality Tourism Fund; dan
(3) Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi.

3.4 Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Sumber daya manusia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing merupakan modal dasar pembangunan menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pembangunan harus diawali dengan pemenuhan pelayanan dasar dan pembentukan modal manusia sebagai aspek utama pembangunan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi transformasi pembangunan.

Pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu mendapatkan layanan publik pada seluruh siklus hidup, secara inklusif, dan menerapkan prinsip kesetaraan gender untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan agar setiap manusia dalam berbagai situasi dan kondisi mampu mengoptimalkan segenap potensi, berkembang maju, serta hidup sejahtera secara lahir dan batin. Pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memberikan setiap individu kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

3.4.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22[1)]	9,33	9,82
2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,21[1)]	13,32	13,58
3	Rata-rata nilai PISA			
	(a) Membaca	359 (2022)[3)]	396	409
	(b) Matematika	366 (2022)[3)]	404	416
	(c) Sains	383 (2022)[3)]	416	426

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			
	(a) Literasi Membaca	60,89 (2023)	62,89	66,89
	(b) Numerasi	51,36 (2023)	54,36	59,86
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)[c]	31,45 (2023)[2]	33,94	38,04
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,15 (2023)	11,11	12,68
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30 (2023)[2]	66,78	67,66
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua				
8	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,13 (2023)[2]	74,43	75,4
9	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,14 (2023)[4]	2,12	2,10
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)[c]	189 (2020)[2]	122	77
11	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)[c]	21,50 (2023)[5]	18,8	14,2
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)[c]	387 (2023)[6]	329	190
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)[c]	98,42 (2024)[7]	98,6	99
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	75,55
15	Indeks Perlindungan Anak[a]	68,29 (2023)	70,19	75,29
16	Indeks Pembangunan Pemuda[b]	60,59 (2023)	65,16	73,27
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,447 (2023)[2]	0,430	0,394
18	Indeks Pembangunan Gender	91,85 (2023)[2]	92,02–92,11	92,34–92,54
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94	96
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42 (2023)	69	71

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja				
21	Peringkat Indeks Inovasi Global	54	53	49
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50–5,00	4,00–4,71
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)[c]	0,28 (2020)	0,30	0,45
24	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)[c]	56,42	56,30–58,80	56,70–60,89
Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat				
25	Jumlah Perolehan Medali Emas pada *Olympic Games*	2	4–6 (2028)	
26	Jumlah Perolehan Medali Emas pada *Paralympic Games*	1	4–6 (2028)	
27	Peringkat pada *Asian Games*	13 (2023)	9–11 (2026)	
28	Peringkat pada *Asian Para Games*	6 (2023)	5–7 (2026)	
29	Peringkat pada *SEA Games*	3 (2023)	3	2–4
30	Peringkat pada *ASEAN Para Games*	1 (2023)	1–2 (2029)	
31	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	9,04[1]	10,36–11,45[1]	12,13–13,40[1]

Keterangan: a) merupakan indeks dengan pembaruan indikator penyusun; b) merupakan indeks dengan pembaharuan konsep dan indikator penyusun dan c) merupakan 45 indikator utama pembangunan dalam RPJPN yang bukan di level Prioritas Nasional 1) Susenas, BPS; 2) BPS; 3) OECD; 4) BKKBN; 5) Kemenkes; 6) WHO; 7) DJSN

3.4.2 Arah Kebijakan

Pembangunan dan pembentukan modal manusia bertujuan untuk memastikan setiap individu, terlepas dari karakteristik dan latar belakangnya, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi di setiap tahapan siklus kehidupan, dengan dukungan dari keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang kondusif. Tujuan ini dapat terwujud apabila setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk menikmati manfaat pembangunan, mengembangkan potensi diri secara optimal, serta berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata

Isu

- **Layanan pendidikan belum merata terutama jenjang PAUD** (APK: 36,36%) dan SMA/SMK/MA/Sederajat (APK: 86,34%); sementara tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA/Sederajat masih rendah (66,79%)
- **Akses terhadap listrik dan internet masih terbatas** sebanyak 2.458 satuan pendidikan belum memiliki akses listrik dan internet
- **Masih tingginya jumlah ruang kelas rusak** yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi satuan pendidikan dalam menampung peserta didik (23,33% ruang kelas rusak ringan dan 21,84% ruang kelas rusak sedang-berat-total)
- **Kualitas pendidikan masih rendah** (Rata-rata skor PISA Indonesia tahun 2022 368,99, tertinggal dari rata-rata negara OECD 477,53)
- **Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas** (<50% guru memiliki sertifikat pendidik; kekurangan 679 ribu guru)
- **Pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan belum optimal** kasus perundungan sangat tinggi, sebanyak 41,1% siswa mengalami *bullying*
- **Partisipasi pendidikan tinggi masih rendah**, terutama pada kelompok penduduk 20% termiskin, yaitu 17,51%
- **Kualitas lulusan pendidikan tinggi masih rendah** sehingga produktivitas & daya saingnya masih rendah
  - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan PT(Diploma & S1/S2/S3) mencapai 9,39%
  - 2,83% lulusan PT masih ada yang bekerja di bidang keahlian rendah
- **Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih rendah** (10,15% dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023)
- **Daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global masih belum optimal** yang tecermin dari peringkat 90 dari 133 negara untuk pilar *human capital and research* pada GII 2024
- **Masih rendahnya budaya literasi, kreativitas dan inovasi**, yang tecermin dengan nilai budaya literasi 60,49 di 2023

Arah Kebijakan

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
- Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
- Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
- Penguatan sistem tata kelola pendidikan
- Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic* (STEAM)
- Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi

Sasaran 2

Terwujudnya kesehatan untuk semua

Isu

- **Angka Kematian Ibu** masih tinggi (189/100.000)
- ***Stunting*** masih tinggi (21,50 persen)
- **Prevalensi obesitas** terus meningkat (23,4 persen)
- ***Wasting*** masih tinggi (8,5 persen)
- **Kasus baru tuberkulosis** peringkat ke-2 dunia (387 per 100.000 penduduk)
- **Kasus baru kusta** peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru)
- Masih terdapat 39,96 persen **puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes** sesuai standar
- Masih terdapat 27,9 persen **Rumah Sakit Umum Daerah kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis** dasar dan penunjang
- **Rumah sakit terakreditasi paripurna** masih belum optimal (37,0 persen)
- **Puskesmas** terakreditasi paripurna masih belum optimal (28,0 persen).

Arah Kebijakan

- Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
- Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi
- Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
- Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
- Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola

Sasaran 3

Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

Isu

- **Tingginya angka perceraian** di Indonesia, mencapai 408.347 kasus (per 6 Februari 2024)
- **Indeks Perlindungan Anak** (IPA) masih rendah (63,83)
- **18 dari 100 anak laki-laki/ perempuan 13-17 tahun** pernah mengalami kekerasan fisik (SNPHAR, 2024)
- **Proporsi perempuan usia 20-24** tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 6,92%
- **Indeks Pembangunan Gender** (IPG) cenderung stagnan (91,85)
- **Indeks Ketimpangan Gender** (IKG) masih tinggi (0,447)
- **6,6% perempuan 15-64 tahun** pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan/atau selain pasangan dalam 12 bulan terakhir (SPHPN, 2024)
- **46,3% anak perempuan 15-49 tahun** mengalami P2GP (sunat perempuan) (SPHPN, 2024)
- **Indeks Pembangunan Pemuda** belum optimal (60,59; 2023) persentase pemuda NEET masih tinggi (25,80%; Sakernas 2023)

Arah Kebijakan

- Peningkatan ketangguhan keluarga
- Peningkatan kualitas perlindungan anak
- Peningkatan kualitas pemuda
- Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
- Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia

Sasaran 4

Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja

Isu

- **Persentase lulusan SMK/MAK dan Perguruan Tinggi (PT) seni budaya yang bekerja di bidang seni budaya masih rendah**, ditandai dengan capaian 2023 hanya sebesar 3,57%
- **Kontribusi iptek dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah** (TFP hanya berkontribusi sebesar 0,3% dari total PDB)
- **Kapasitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi masih rendah** (peringkat 54 dari 133 negara dalam GII pada tahun 2024 dengan *pilar knowledge and technology outputs* yang masih rendah peringkat 73 dari 133 negara)
- **Anggaran riset yang masih rendah serta pemanfaatannya** belum dikelola dengan baik ditandai pengeluaran Iptek dan Inovasi Indonesia masih 0,28% dari PDB
- **Potensi *supply* iptek dan inovasi besar** (terdiri dari 320 ribu Dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang melakukan penelitian setiap tahun namun belum diorkestrasi secara nasional dan dipertemukan secara optimal)
- **Masih tingginya lulusan menengah-tinggi yang bekerja pada bidang keahlian rendah** (33,70% penduduk berkualifikasi pendidikan menengah-tinggi yang bekerja di bidang keahlian rendah)
- **Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah,** yaitu 19% dari tingkat produktivitas tenaga kerja Amerika Serikat (APO, 2024). Angka tersebut juga berada di bawah rerata Kawasan ASEAN (20%). Rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya angkatan kerja berpendidikan SMP/MTs ke bawah sebesar 52,32% (BPS, 2024), ketidaksesuaian keahlian (*skill-mismatch*) di pasar kerja, belum terbangunnya sistem informasi pasar kerja yang kredibel, tingginya kasus perselisihan Hubungan Industrial (HI), rendahnya kepatuhan norma ketenagakerjaan, serta terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan vokasi.

Arah Kebijakan

- Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
- Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
- Pengembangan Manajemen Talenta Nasional

Sasaran 5

Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat

Isu

- **Capaian prestasi olahraga di tingkat dunia masih minim** (2 emas pada Olimpiade dan 1 emas pada Paralimpiade 2024)
- **Peringkat prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional** saat tidak menjadi tuan rumah **menurun signifikan** (peringkat ke-13 pada Asian Games 2023 dan peringkat ke-6 pada Asian Para Games 2023)
- **Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi** di Tingkat Regional dan Internasional belum optimal (73,38%; 2023)
- **Keaktifan berolahraga sangat rendah** (9,04% penduduk >10 tahun minimal 3 kali atau 150 menit; 2021)
- **Budaya berolahraga masih rendah** (25,92% penduduk >10 tahun yang berolahraga seminggu terakhir, 8,24% kaum difabel, dan 48,71% usia sekolah; 2021)
- **Jumlah tenaga olahraga bersertifikat internasional yang timpang** (86 orang cabor olimpik sementara paralimpik belum ada; 2023)

Arah Kebijakan

- Peningkatan pembinaan prestasi olahraga
- Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif

3.4.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

(1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) diarahkan untuk mendukung pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah. Kebijakan ini untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dari berbagai latar belakang status sosial ekonomi dapat memperoleh layanan pendidikan berkualitas dengan afirmasi pada wilayah tertinggal dan kelompok keluarga termiskin. Percepatan wajib belajar 13 tahun dilakukan melalui (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini, (b) revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, (c) penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran, serta (d) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.

(2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran diarahkan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berfokus pada peserta didik sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Selain itu, kebijakan ini mendorong penciptaan iklim pembelajaran yang baik sehingga proses belajar diharapkan menjadi wahana membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dilakukan melalui (a) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (*pedagogical technology content knowledge*/PTCK); (b) penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran berkualitas, termasuk peningkatan kecakapan literasi kelas awal, serta penguatan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan pendidik; (c) pemantapan sistem asesmen komprehensif; (d) pengembangan anak usia dini holistik-integratif; (e) peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa; (f) penerapan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial; (g) pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul; serta (h) revitalisasi pendidikan nonformal.

(3) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan agama yang kuat serta akhlak mulia dan karakter positif yang berkontribusi dalam pembangunan.

Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan, (b) rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan, serta (c) penguatan penjaminan mutu pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan.

(4) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas diarahkan untuk memenuhi dan meningkatkan pemerataan pendidik di seluruh wilayah serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan ini memastikan bahwa pendidik berkualitas terdistribusi secara merata, termasuk di daerah afirmasi. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) reformasi pendidikan keguruan melalui penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan (b) restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja.

(5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan diarahkan untuk menyelenggarakan tata kelola yang efektif dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Kebijakan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, masyarakat, serta pemerintah. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan, (b) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pendidikan khususnya terkait pemanfaatan anggaran pendidikan, serta (c) penguatan sistem penjaminan mutu.

(6) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) untuk menjamin kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi secara utuh dari mulai mahasiswa (input), inovasi pembelajaran dan relevansi kurikulum (proses), dan lulusan yang produktif dan berdaya saing (*output*), serta didukung pengarusutamaan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) pada program studi, pembelajaran, maupun kompetensi lulusan. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi; (b) pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM); (c) penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah; serta (d) peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen.

(7) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja merupakan upaya melanjutkan kebijakan revitalisasi vokasi yang dilakukan secara holistik meliputi aspek *supply* (pendidikan dan pelatihan) dan upaya menghubungkan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Fokus penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi yaitu (a) penguatan infrastruktur esensial dan pembelajaran yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang selaras dengan perkembangan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA); (b) penguatan pengembangan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang pendidikan dan pelatihan vokasi (guru sekolah menengah kejuruan, dosen vokasi, dan instruktur). Selain itu, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, ekosistem ketenagakerjaan juga akan diperkuat untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang mendorong kualitas dan produktivitas tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) penguatan pendidikan menengah vokasi, (b) penguatan pendidikan tinggi vokasi, (c) penguatan pelatihan vokasi, serta (d) penguatan produktivitas berbasis iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

(8) Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi (iptekin) dalam pembangunan nasional dilakukan dengan pengembangan ekosistem terintegrasi hingga hilirisasi dan pemanfaatannya terutama di industri. Fokus utama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas iptekin, termasuk penguatan sumber daya manusia dan budaya ilmiah, perbaikan tata kelola dan proses bisnis iptekin, pembangunan dan pengembangan infrastruktur iptekin strategis, serta perluasan jejaring dan peningkatan kerja sama dengan industri. Optimalisasi hasil iptekin dilakukan dengan memperkuat intermediasi antara penghasil dan pemanfaat, khususnya di bidang pangan, energi, pertahanan, kesehatan, dan lingkungan, serta dukungan terhadap transformasi digital, ekonomi biru, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular. Peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), *science techno park* (STP), serta *hub* iptek dan inovasi di tingkat daerah dan sektoral akan diperkuat untuk mendukung kebijakan publik berbasis bukti dan ekonomi pengetahuan yang berkelanjutan, mempercepat inovasi dan kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi antarpemangku kepentingan. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) penguatan kapasitas iptek dan inovasi; (b) peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi; (c) optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang termasuk pengawasan ketenaganukliran; serta (d) penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing.

(9) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional diarahkan untuk memperluas kumpulan bakat (*talent pool*) dan memperbaiki mekanisme akuisisi Talenta, memperkuat intervensi pembinaan serta fasilitasi Talenta, menyediakan sarana dan prasarana esensial manajemen Talenta, meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan manajemen Talenta, serta memperkuat tata kelola untuk keberlanjutan siklus manajemen Talenta, melalui (a) pengembangan Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya; (b) pengembangan Manajemen Talenta Nasional Riset dan Inovasi, (c) pengembangan Manajemen Talenta Nasional Olahraga, dan (d) penguatan tata kelola Manajemen Talenta Nasional.

(10) Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan guna mendorong kreativitas dan inovasi yang mendukung daya cipta dan produktivitas. Kebijakan ini menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat secara inklusif dengan mengintegrasikan kegiatan literasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berperangai ilmiah, kreatif dan inovatif. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan (b) peningkatan budaya kegemaran membaca.

(11) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk berbasis siklus hidup mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia dengan penekanan pada penguatan edukasi, peningkatan cakupan, kualitas, dan tata laksana layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat, melalui (a) penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak; (b) pencegahan dan penurunan *stunting*, dengan meningkatkan cakupan dan kualitas serta integrasi intervensi kunci yang berfokus pada penguatan faktor determinan di masing-masing kelompok sasaran; (c) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; serta (d) penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis.

(12) Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi diarahkan untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, dengan akses pada asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam perbaikan gizi, melalui (a) pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; serta (b) penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi.

(13) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan deteksi dini faktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan, melalui (a) penuntasan tuberkulosis; (b) eliminasi penyakit kusta dan *schistosomiasis*; (c) pengendalian penyakit menular lainnya terutama *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya seperti malaria; (d) pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa; (e) pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat aktivitas fisik; serta (f) penyehatan lingkungan.

(14) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit *emerging* dan *re-emerging*, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui (a) penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara; (b) pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; serta (c) penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan.

(15) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah hingga tingkat desa, afirmasi bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk peran kader kesehatan, mendorong inovasi pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan, melalui (a) investasi pelayanan kesehatan primer; (b) pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses termasuk pengembangan layanan berbasis kompetensi terutama kanker, jantung, strok, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak; (c) produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan, antara lain melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; (d) penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan termasuk reaktivasi peserta non-aktif, penguatan kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional, serta pengembangan skema pendanaan inovatif untuk kesehatan; serta (e) penguatan tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi

kesehatan, termasuk peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan kesehatan.

(16) Peningkatan ketangguhan keluarga diarahkan untuk memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya secara optimal, menjadi wadah sosialisasi antar generasi dan kontrol sosial bagi seluruh anggotanya, serta memiliki resiliensi dalam menghadapi perubahan dan konflik, melalui (a) penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga; serta (c) pemenuhan hak sipil dan hukum, serta afirmasi bagi keluarga rentan.

(17) Peningkatan kualitas perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan sistem perlindungan anak dan pengasuhan yang layak untuk menjamin bahwa setiap anak, sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, menikmati hak-haknya, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan, melalui (a) pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak; serta (b) perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.

(18) Peningkatan kualitas pemuda diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan formal dan nonformal, penguasaan karakter dan kompetensi individu sebagai modal dasar ketahanan dari perilaku berisiko, kesehatan jiwa maupun raga, ketenagakerjaan yang layak, partisipasi aktif dan kepemimpinan dalam pembangunan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender, melalui (a) peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, dan pencegahan perilaku berisiko; (b) peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan; serta (c) peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik.

(19) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan diarahkan untuk menurunkan ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, memperkuat *agency* dan mendorong peran aktif perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta membangun tata kelola pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender yang efektif dan berkelanjutan, melalui (a) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan; (b) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (c) peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; (d) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; serta (e) penguatan tata kelola dan pelembagaan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan.

(20) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia diarahkan untuk menurunkan kesenjangan antara penduduk rentan lanjut usia dan penyandang disabilitas dengan penduduk lainnya, memberikan kesetaraan hak dan jaminan kehidupan yang layak, mengurangi ketimpangan kondisi sosio-ekonomi untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta mendorong peran aktif penduduk penyandang disabilitas dan penduduk lanjut usia untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan. Intervensi ini didukung dengan penguatan mekanisme pengukuran inklusivitas dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui penyusunan indeks inklusivitas. Selain itu, penguatan kerangka kebijakan juga sangat diperlukan untuk memastikan adanya pedoman yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif. Salah satu penyusunan kebijakan yang masih diperlukan dalam

implementasi pembangunan inklusif adalah Rancangan Undang-undang tentang Kelanjutusiaan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan kelanjutusiaan serta memberikan mekanisme koordinasi dan kelembagaan pelaksanaan program dan kegiatan kelanjutusiaan untuk memastikan kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia dilaksanakan melalui (a) penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; serta (b) penguatan prinsip dan pendekatan kesetaraan, partisipasi, dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.

(21) Peningkatan pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional yang didukung oleh pembinaan berjenjang dan berkelanjutan, serta tenaga olahraga, organisasi, sarana dan prasarana yang berstandar internasional sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional dan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga, melalui (a) pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul, (b) pengembangan tenaga dan organisasi olahraga berstandar internasional, (c) pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional yang ramah disabilitas, serta (d) peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan *event*/festival/kompetisi olahraga.

(22) Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif diarahkan untuk mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berolahraga, termasuk penyandang disabilitas, didukung oleh partisipasi berolahraga dan kebugaran siswa di satuan pendidikan formal, nonformal dan pendidikan khusus, serta industri olahraga sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional, melalui (a) pengembangan olahraga pendidikan dan penyandang disabilitas, dan (b) pengembangan olahraga masyarakat dan industri.

Berdasarkan perspektif siklus hidup manusia, dimensi kesehatan dan pendidikan merupakan kunci tumbuh kembang dan produktivitas manusia. Dalam merespons isu tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 4 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: (1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; (2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten; dan (3) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas.

(1) Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi

Gambaran Umum. Asupan gizi yang cukup merupakan aspek fundamental bagi pembentukan modal manusia. Namun demikian, keterbatasan akses kepada asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta pemahaman masyarakat menyebabkan berbagai permasalahan gizi. Program hasil terbaik cepat memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan modal manusia.

Program ini memiliki tujuan utama untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas tahun 2045 dengan tujuan khusus dan prinsip penyelenggaraan seperti pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Tujuan Utama Program Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita

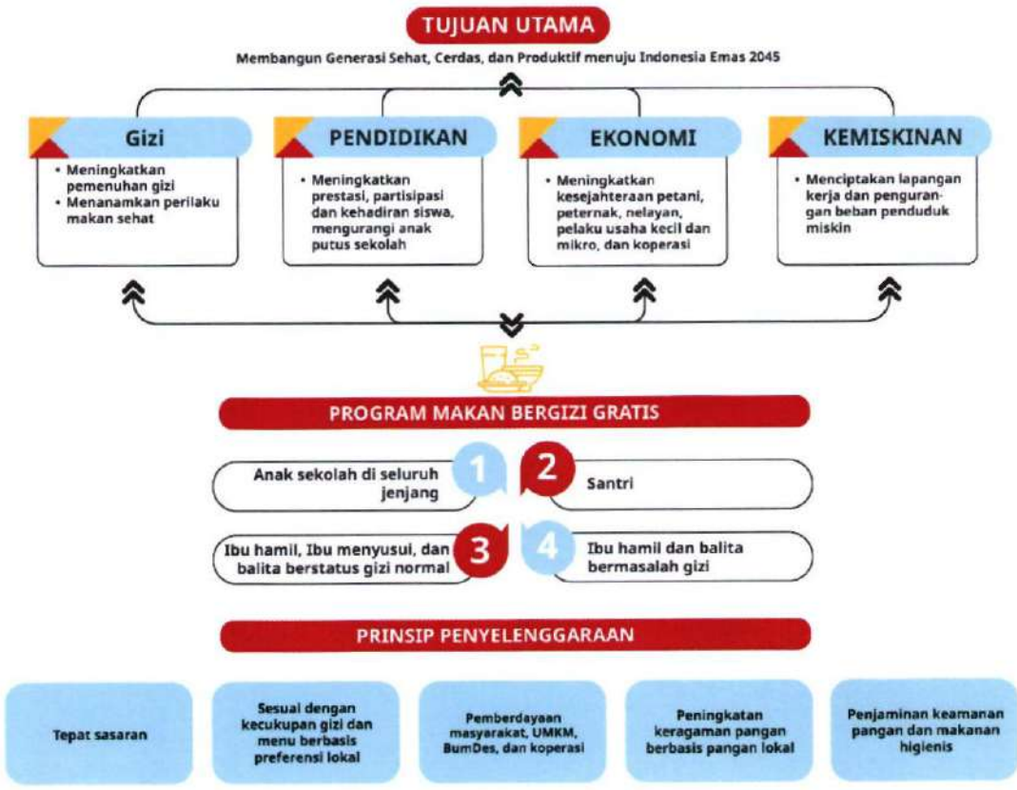

Permasalahan dan Tantangan. Kualitas asupan gizi dan pola makan menjadi faktor utama masalah gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, maupun anak sekolah, termasuk kurangnya konsumsi buah dan sayur. Pemberian makanan bergizi kepada sasaran harus sesuai dengan kecukupan gizi harian sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan agar permasalahan gizi kurang dapat teratasi dan tidak mendorong peningkatan prevalensi gizi lebih dan obesitas pada target sasaran. Selain itu, permasalahan gizi pada balita dan anak sekolah yang tidak diatasi dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak dan prestasi belajar siswa.

Lonjakan permintaan bahan pangan yang tinggi di setiap daerah dengan adanya penyelenggaraan program makan bergizi gratis dapat terjadi. Namun, kualitas pangan terutama susu dan sumber protein hewani dalam negeri yang tidak mencukupi membutuhkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, disparitas pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana, seperti fasilitas air bersih dan sanitasi di sekolah, transportasi, serta pembangunan jalan di daerah juga akan mempengaruhi proses distribusi bahan pangan maupun makanan ke sasaran.

Keragaman karakteristik demografi dan variasi geografis Indonesia juga memberikan tantangan dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Perubahan jumlah sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terjadi secara dinamis. Angka ini dapat berubah setiap hari dan mempengaruhi jumlah makanan yang akan disediakan oleh satuan pelaksana.

Kemudian, variasi geografis juga memengaruhi rantai pasok di daerah dan distribusi makanan kepada penerima manfaat untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program terpadu untuk menjamin penyediaan makanan yang berkualitas, serta manajemen pengendalian risiko di seluruh wilayah menjadi tantangan agar risiko kejadian luar biasa (KLB) dapat terhindari, tepat sasaran, dan tujuan program dapat tercapai. Sistem monitoring dan evaluasi yang terdigitalisasi dapat diperbaharui secara *real-time*, terpadu, dan tepat sasaran. Selain itu, untuk dapat mencapai tujuan, penyelenggaraan program pemberian makan bergizi gratis membutuhkan dukungan program lain yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Penyediaan makanan bergizi gratis diberikan kepada empat kategori target sasaran yaitu (1) anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal /sederajat) sampai sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat; (2) santri di pesantren dan sekolah keagamaan lain; serta (3) ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berstatus gizi normal; serta (4) ibu hamil dan anak balita bermasalah gizi. Oleh karena itu, standar gizi berdasarkan empat kategori tersebut harus ditetapkan sesuai angka kecukupan gizi harian yang dianjurkan. Makan bergizi gratis yang disediakan melalui program ini mengandung 20–25 persen (dalam bentuk sarapan) dan 30–35 persen (dalam bentuk makan siang) dari angka kecukupan gizi harian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Waktu pemberian makan bergizi menyesuaikan jadwal kegiatan belajar mengajar, terutama untuk anak pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal /sederajat) dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sederajat.

Program makan bergizi diberikan sesuai dengan prinsip gizi seimbang, beragam, aman, dan sesuai dengan preferensi lokal. Komposisi makanan lengkap yang diberikan kepada kelompok sasaran mencakup kebutuhan energi dan zat gizi per hari sesuai dengan kelompok umur dan jenis kelamin, yang terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, buah-buahan, serta susu sebagai pelengkap. Pengembangan menu pangan lokal didorong dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan, dan keterjangkauan makanan. Penggunaan sumber pangan lokal diutamakan dengan memperhatikan alternatif bahan penukar dan preferensi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengembangan pedoman bahan penukar makanan dan variasi menu tidak boleh luput dalam persiapan implementasi program.

Implementasi program dapat berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemantauan terhadap konsumsi sasaran dari makanan bergizi yang diberikan serta integrasi pelaksanaan program pendukung lainnya seperti edukasi gizi dan promosi perubahan perilaku hidup sehat, pengukuran antropometri, fortifikasi pangan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan, penjaminan keamanan pangan dan higienitas makanan, pengelolaan limbah dan sampah, penyediaan infrastruktur listrik, transportasi, dan telekomunikasi, serta pemberdayaan masyarakat, petani, dan peternak lokal. Selain itu, revitalisasi sekolah juga perlu dilakukan untuk mendukung program pemberian makan bergizi gratis melalui penyediaan fasilitas transit penyaluran makanan, penyediaan sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta penyediaan alat antropometri. Program pendukung pemberian makan bergizi gratis secara rinci terdapat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2
Program Pendukung yang Perlu Diintegrasikan dengan Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita

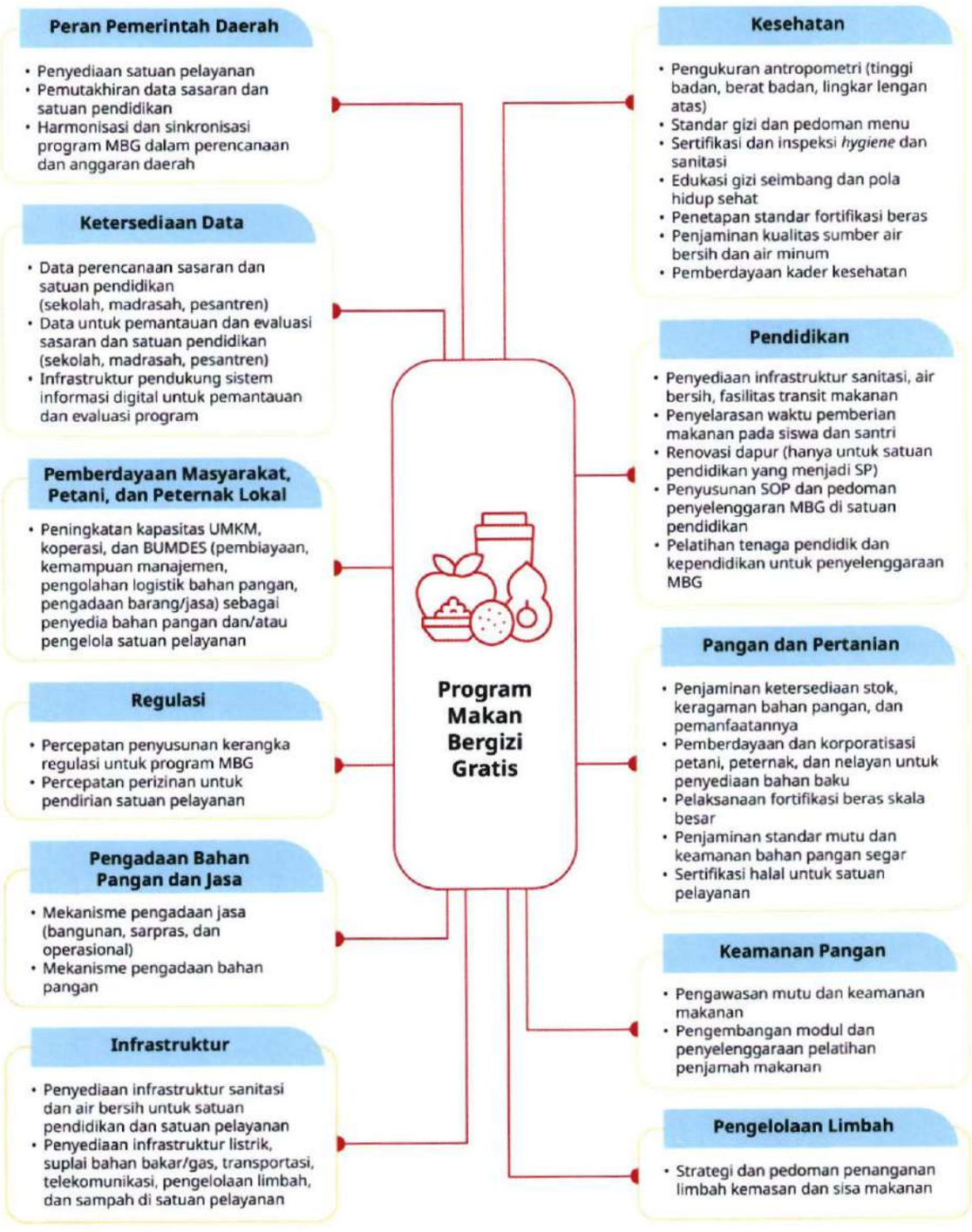

Penetapan regulasi yang mendukung penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis harus disusun segera sebagai dasar satuan pelaksanaan di daerah. Regulasi yang dimaksud perlu setingkat undang-undang atau peraturan presiden.

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bahan pangan di setiap wilayah, pelibatan petani, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi sangat diperlukan agar proses rantai pasok dapat lebih efisien dan kebutuhan bahan pangan dapat tersedia dengan cepat. Kondisi ini perlu didukung dengan sistem pengadaan yang sederhana, efektif, dan terstandar sehingga keterlibatan pelaku ekonomi lokal dapat terjadi dengan tetap menjamin kualitas bahan pangan yang diperoleh. Kontrak pengadaan lintas tahun dapat menjadi alternatif agar pemenuhan bahan pangan tidak terhambat oleh mekanisme pengadaan barang/jasa.

Untuk menjamin pemberian makanan bergizi yang tepat sasaran, pembaruan data sasaran harus dilakukan secara *real time* dengan dukungan sistem informasi. Selain itu, pengembangan modalitas dan mekanisme penyelenggaraan program untuk sasaran di wilayah perdesaan, terpencil, dan kepulauan juga perlu untuk dilakukan.

Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian harus disusun secara terencana untuk menjamin tujuan program tercapai. Pengembangan *assessment* status gizi pada awal penyelenggaraan program juga perlu dilakukan sebagai salah satu upaya penilaian keberhasilan program. Dukungan sistem informasi terpadu dengan *database* peserta didik serta status kesehatan dapat mendukung efektivitas proses *monitoring* dan evaluasi program. Selain itu, inspeksi, pembinaan, dan supervisi secara berkala harus terus berjalan sebagai upaya evaluasi *normative program*.

Gambar 3.3
Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita

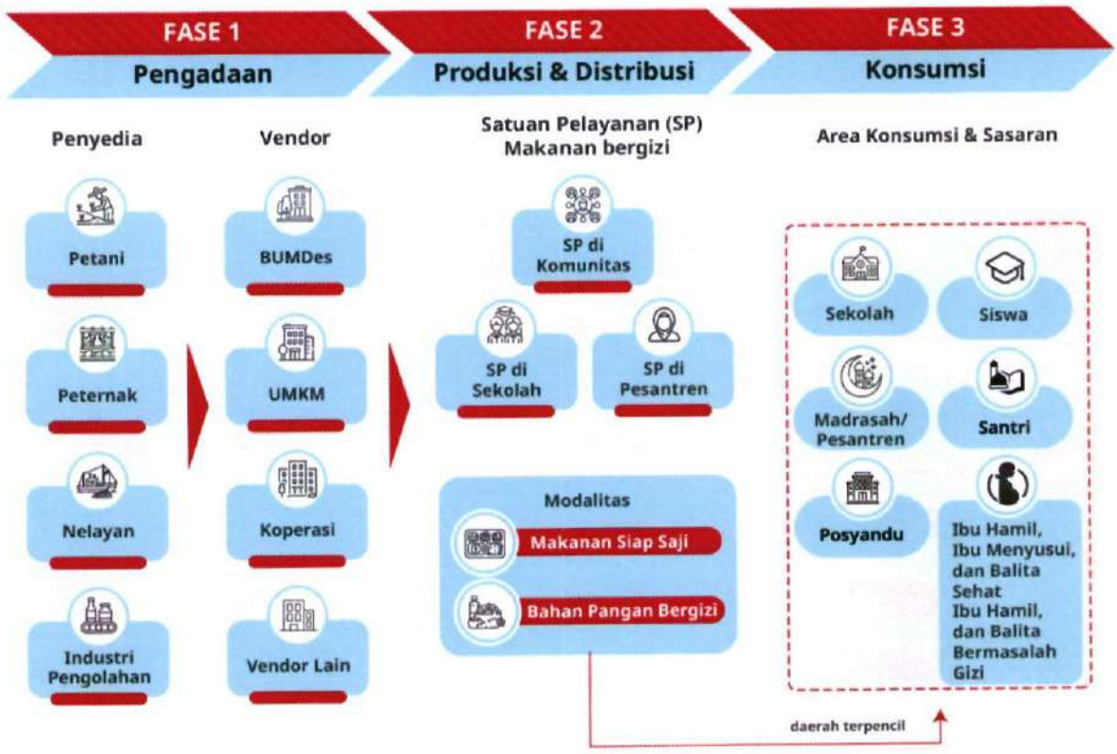

Dukungan lintas sektor, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat juga perlu diselaraskan dengan penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan rencana pengembangan yang komprehensif serta mekanisme kerja sama dan kemitraan yang transparan dan akuntabel. Penjabaran strategi tahunan program memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, terdapat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Strategi Tahunan Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita

Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
Target Sasaran	19%	50%	70%	80%	100%
Total Sasaran	17,89 juta jiwa	46,39 juta jiwa	64,94 juta jiwa	73,86 juta jiwa	92,78juta jiwa
Lokasi					
Kabupaten/Kota	514 kab/kota secara bertahap dan dikembangkan secara menyeluruh sampai tahun 2029				
Jumlah Satuan Pelayanan (SP)	5.000 SP	13.254 SP	18.555 SP	21.104 SP	26.508 SP
Modalitas Penyelenggaraan	Satuan Pelayanan	Satuan Pelayanan, Sekolah, Pesantren	Satuan Pelayanan, Sekolah, Pesantren, Daerah Terpencil	Satuan Pelayanan, Sekolah, Pesantren, Daerah Terpencil	Satuan Pelayanan, Sekolah, Pesantren, Daerah Terpencil
Kerangka Regulasi	Peraturan Presiden Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis			Penyusunan Undang-Undang Pemenuhan Gizi Nasional	

Adapun *highlight* intervensi dari memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita termuat dalam infografis di bawah ini.

KP
- **Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita**
- **Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi**

Sasaran dan Indikator

- **Terlaksananya pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi**
- **Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi**

Indikator:

1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
2. Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
3. Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
4. Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
5. Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
6. Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
7. Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
8. Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
9. Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)
10. Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik 90% (2029)
11. Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik 90% (2029)
12. Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional 1 sistem (2029)
13. Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar 26.508 (2029)
14. Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan 100% (2029)

Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu
1. Badan Gizi Nasional

Institusi Kontributor
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Kementerian Agama
4. Kementerian Pertanian
5. Badan Pangan Nasional
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Koperasi
8. Kementerian Usaha Kecil dan Menengah
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Lingkungan Hidup
12. Kementerian Desa PDT
13. Pemerintah Daerah

Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh kab/kota di seluruh provinsi
(Program dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota secara bertahap dan akan dikembangkan secara menyeluruh sampai tahun 2029)

Indikasi *Highlight* Intervensi

1. Bantuan makan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
2. Bantuan makan bergizi kepada peserta didik seluruh jenjang dan santri
3. Promosi dan edukasi tentang pemenuhan gizi
4. Satuan pendidikan yang melaksanakan program UKS
5. Standar tentang sistem, tata kelola, dan manajemen risiko pemenuhan gizi
6. Sistem informasi pemenuhan gizi nasional
7. Satuan pelayanan dapur makan bergizi
8. Penguatan intervensi pendukung pemberian makan bergizi seperti pengukuran antropometri, fortifikasi pangan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, penjaminan keamanan pangan dan higienitas makanan, manajemen limbah, pemanfaatan komoditas lokal, pemberdayaan masyarakat, UMKM lokal, dan BUMDes, serta pengembangan bahan pangan dalam negeri

(2) Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

(a) Penuntasan Kasus Tuberkulosis

Gambaran Umum. Tuberkulosis menjadi salah satu dari lima penyebab utama beban penyakit di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan masih belum optimalnya upaya yang dilakukan dalam pengendalian penyakit, termasuk lemahnya dukungan sistem kesehatan yang memadai. Jumlah kasus baru atau insidensi tuberkulosis masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-2 terbesar di dunia, setelah India. Insidensi

tuberkulosis meningkat dari 370 kasus per 100.000 penduduk di tahun 2000 menjadi 387 kasus per 100.000 penduduk di tahun 2023 (Global TB Report WHO, 2024). Tren capaian kinerja insidensi tuberkulosis tahun 2000–2023 dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4
Beban Kasus Tuberkulosis Tahun 2000–2023

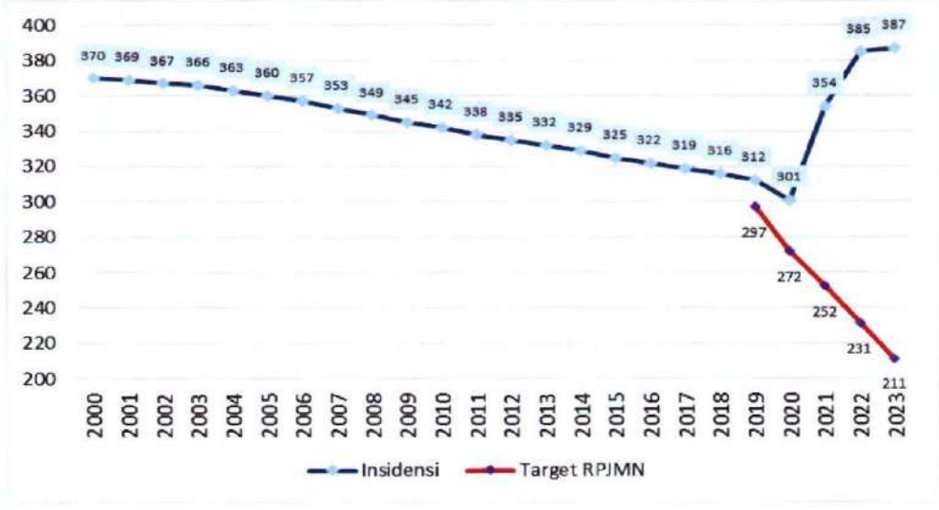

Permasalahan dan Tantangan. Penuntasan Tuberkulosis di Indonesia menghadapi tantangan serius, antara lain rendahnya cakupan penemuan kasus, keterbatasan sistem pelaporan kasus, rendahnya cakupan pemberian terapi pencegahan, lamanya jangka waktu pengobatan, serta kepatuhan pengobatan yang masih rendah. Meningkatnya kasus tuberkulosis resistan obat (*Multidrug Resistant Tuberculosis*/MDR-TB) memperburuk situasi, memerlukan pengobatan yang lebih mahal dan kompleks. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur dan tenaga medis, khususnya di daerah terpencil, memperlambat deteksi dini dan penanganan tepat waktu. Kondisi lingkungan yang mendukung penularan, serta rendahnya kesadaran dan edukasi publik, semakin memperkuat tantangan ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan intervensi terpadu yang berfokus pada peningkatan penemuan kasus, peningkatan kepatuhan pengobatan, penguatan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan dan edukasi salah satunya melalui perbaikan kondisi lingkungan.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan insidensi tuberkulosis di Indonesia, diperlukan (i) peningkatan penemuan kasus tuberkulosis melalui perluasan skrining aktif di komunitas berisiko tinggi, investigasi kontak, pemanfaatan teknologi diagnostik secara lebih luas, peningkatan kapasitas deteksi dini, peningkatan infrastruktur kesehatan dengan menyediakan alat diagnostik dan memperkuat kapasitas tenaga medis terutama di daerah terpencil, optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital untuk memastikan pelacakan kasus secara *real-time*, integrasi data antara sektor publik dan swasta, dan integrasi layanan kesehatan tuberkulosis dengan penyakit lain; (ii) peningkatan kepatuhan pengobatan tuberkulosis dengan memperkuat pendampingan pasien, penggunaan regimen pengobatan yang lebih efektif, edukasi berkelanjutan untuk mengurangi angka putus obat, dan penguatan upaya penanganan *Multidrug Resistant Tuberculosis* melalui pengembangan obat baru dan pendekatan komunitas untuk mendukung pengobatan jangka panjang, serta (iii) peningkatan upaya pencegahan dan edukasi melalui pengembangan dan perluasan vaksinasi tuberkulosis pada

usia dewasa, peningkatan cakupan terapi pencegahan tuberkulosis, optimalisasi peta jalan riset tuberkulosis, dan upaya lintas sektor, seperti pemberian nutrisi tambahan dan perbaikan lingkungan melalui intervensi sanitasi, peningkatan akses air bersih, dan edukasi mengenai pola hidup sehat guna mengurangi penyebaran tuberkulosis di komunitas berisiko.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis telah mengatur tentang tugas dan tanggung jawab kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan tuberkulosis, di mana salah satunya mengamanatkan pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat pusat dan daerah. Diperlukan upaya penguatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden untuk memastikan program berjalan sesuai dengan target. Selain itu, *monitoring* dan evaluasi harus diperkuat dengan pendekatan berbasis data *real-time* yang memungkinkan pemantauan capaian program secara akurat. Penggunaan *dashboard digital* yang terintegrasi antara pusat dan daerah akan mempermudah pengawasan, pelaporan, dan penilaian kinerja. Evaluasi berkala yang terstruktur dengan indikator keberhasilan yang jelas juga diperlukan untuk memastikan efektivitas intervensi dan mempercepat penyesuaian yang dibutuhkan.

Selain itu, keterlibatan aktif komunitas, seperti kader kesehatan dan organisasi masyarakat, dapat meningkatkan deteksi dini dan kepatuhan pengobatan melalui pendekatan berbasis lokal. Pemberdayaan masyarakat juga dapat mendukung edukasi yang lebih efektif, mengurangi stigma, serta memperkuat pelacakan kontak dalam komunitas berisiko tinggi. Program ini perlu diintegrasikan dengan inisiatif kesehatan desa dan didukung oleh insentif untuk memperluas partisipasi.

Gambar 3.5
Estimasi Insiden Kasus Tuberkulosis per Provinsi, 2023

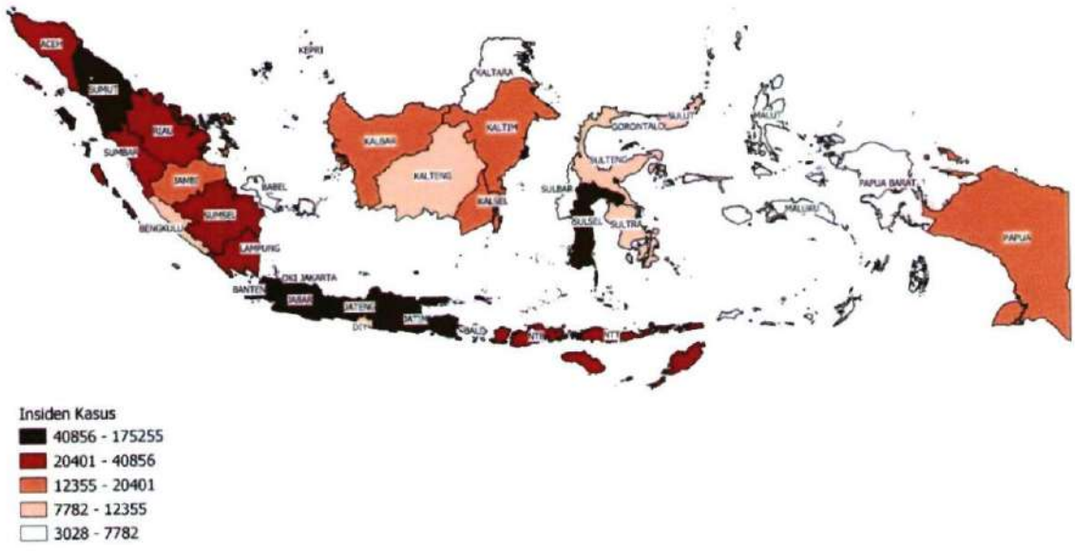

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024

Gambar 3.5 merupakan peta yang menunjukkan daerah dengan beban tuberkulosis tinggi sebagai prioritas utama program. Meskipun program penuntasan tuberkulosis dilakukan di seluruh kabupaten/kota di 38 provinsi. Terdapat 359 kabupaten/kota prioritas (70 persen dari total 514 kabupaten/kota) yang akan menerima intervensi komprehensif, sedangkan 155 kabupaten/kota lainnya akan menerima intervensi esensial. Kabupaten/kota yang menerima intervensi komprehensif termasuk 193 kabupaten/kota di delapan provinsi

prioritas, yaitu daerah dengan beban kasus tuberkulosis, *human immunodeficiency virus*, diabetes melitus tinggi, serta merupakan daerah prioritas program tuberkulosis resisten obat dan *district-based public-private mix*. Sedangkan kabupaten/kota yang menerima intervensi esensial merupakan kabupaten/kota dengan estimasi beban kasus tuberkulosis <1.000 dan prevalensi diabetes melitus rendah. Adapun *highlight* intervensi dari penuntasan tuberkulosis termuat dalam infografis di bawah ini.

KP Penuntasan TBC

Sasaran dan Indikator

Tercapainya penuntasan TBC melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan pengobatan TBC sampai tuntas

Impact
1. Insidensi Tuberkulosis sebanyak 190 orang per 100.000 penduduk pada 2029

Outcome
1. Cakupan pemberian terapi pencegahan TBC pada orang kontak serumah mencapai 80% pada tahun 2029
2. Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi kasus TBC) mencapai 90% pada tahun 2029
3. Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (*Enrollment TBC*) mencapai 95% pada tahun 2029
4. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (*TB Succes Rate*) mencapai 90% pada tahun 2029

Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu
Kementerian Kesehatan
Institusi Kontributor
Kemendagri, KemenkoPMK, KemenkoPM, Kemenag, Kemendikdasmen, Kemenaker, Kemenimipas, KemenBUMN, Kemensos, Kemenkomdigi, KemenPKP, KemendesPDT, KemenPPN/Bappenas, BPOM, BRIN, BPJS Kesehatan, Pemda

Indikasi Lokasi Prioritas

Wilayah prioritas program pada 359 Kab/Kota di 38 Provinsi dengan 91% kasus nasional (*high burden* TB)

Indikasi *Highlight* Intervensi

1. Masyarakat yang mendapatkan layanan skrining *mobile* TBC (Kemkes)
2. Riset vaksin TBC yang dihasilkan (Kemkes)
3. Lembaga yang didampingi dalam pelaksanaan uji klinis TB (Kemkes)
4. Tenaga kesehatan tenaga terlatih pencegahan dan pengendalian TBC (Kemkes)
5. Masyarakat yang mendapatkan layanan pengobatan TBC (Kemkes)
6. Penyediaan obat dan perbekalan TBC (Kemkes)
7. Riset regimen pengobatan yang pendek untuk TBC (Kemkes)
8. Layanan penanggulangan Tuberkulosis di tempat kerja (Kemnaker)
9. Koordinasi penanggulangan Tuberkulosis (KemenkoPMK)
10. Bantuan pembangunan rumah swadaya (KemenPKP)
11. Penyediaan informasi pelaksanaan deteksi dini, penemuan dan pengobatan (Kemkes)
12. Alat pencegahan dan pengendalian TBC (Kemkes)
13. Masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC (LP-6) (Kemkes)
14. NSPK percepatan target eliminasi TBC (LP-6) (Kemkes)
15. Daerah mendapat pembinaan program P2 TBC di daerah (Kemkes)
16. Data dan informasi TBC (Kemkes)
17. Bahan pencegahan dan pengendalian TBC (Kemkes)
18. Purwarupa hasil riset dan inovasi obat dan vaksin (Kemkes)
19. Obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB (Kemkes)

(b) Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Gambaran Umum. Program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan deteksi dini dan pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran pengendalian penyakit kronis dan katastropik. Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan dengan pelaksanaan paket skrining sesuai siklus hidup di seluruh wilayah, yakni bagi kelompok usia bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Penyelenggaraan pemeriksaan

kesehatan gratis yang dapat diakses bagi semua kelompok masyarakat, diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Permasalahan dan Tantangan. Gangguan kesehatan dapat menyebabkan berkurangnya kualitas hidup dan potensi produktivitas. Secara global telah terjadi transisi epidemiologi, yaitu perubahan kelompok penyakit penyebab mortalitas dan morbiditas yang mendominasi dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Transisi tersebut didorong peningkatan kondisi sosial ekonomi, pengetahuan, dan teknologi baru kesehatan. Perkembangan ini disertai peningkatan populasi penduduk lanjut usia dan permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan beban penyakit, baik menular maupun tidak menular menyebabkan kebutuhan pembiayaan kesehatan juga meningkat.

Penyakit kronis dan katastropik seperti strok, jantung, diabetes, dan kanker memerlukan biaya perawatan yang mahal. Tingkat pertumbuhan total pengeluaran kesehatan atau *total health expenditure* dalam 20 tahun terakhir sudah melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan produk domestik bruto (NHA Indonesia 2021). Selain itu, *total health expenditure* Indonesia meningkat 16 kali lipat dari Rp28 Triliun (2000) menjadi Rp459 Triliun (2019). Jika pola tersebut tidak dikendalikan, maka diperkirakan proporsi pembiayaan kesehatan oleh pemerintah pada tahun 2045 akan mencapai 19 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NHA Indonesia 2021, diolah Bappenas). Tanpa modifikasi pada postur pembiayaan atau intervensi dalam upaya kesehatan, maka pembiayaan kesehatan ke depan akan tidak berkelanjutan.

Gambar 3.6
Pergeseran Beban Penyakit di Indonesia Tahun 1990–2021

Tingginya beban penyakit dan pembiayaan kesehatan dapat dicegah melalui upaya promotif dan preventif kesehatan. Salah satu bagian dari upaya preventif adalah dengan deteksi dini penyakit. Semakin awal suatu kondisi penyakit diketahui, maka semakin minim biaya yang diperlukan, serta semakin baik prognosis untuk sembuh total. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan aksesibel bagi semua kelompok usia masyarakat, perlu dijamin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Pemeriksaan kesehatan merupakan upaya deteksi dini penyakit untuk mencegah dan mengendalikan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup serta menyebabkan kecacatan dan kematian.

Gambar 3.7
Paket Skrining Pemeriksaan Kesehatan Gratis Tahun 2025

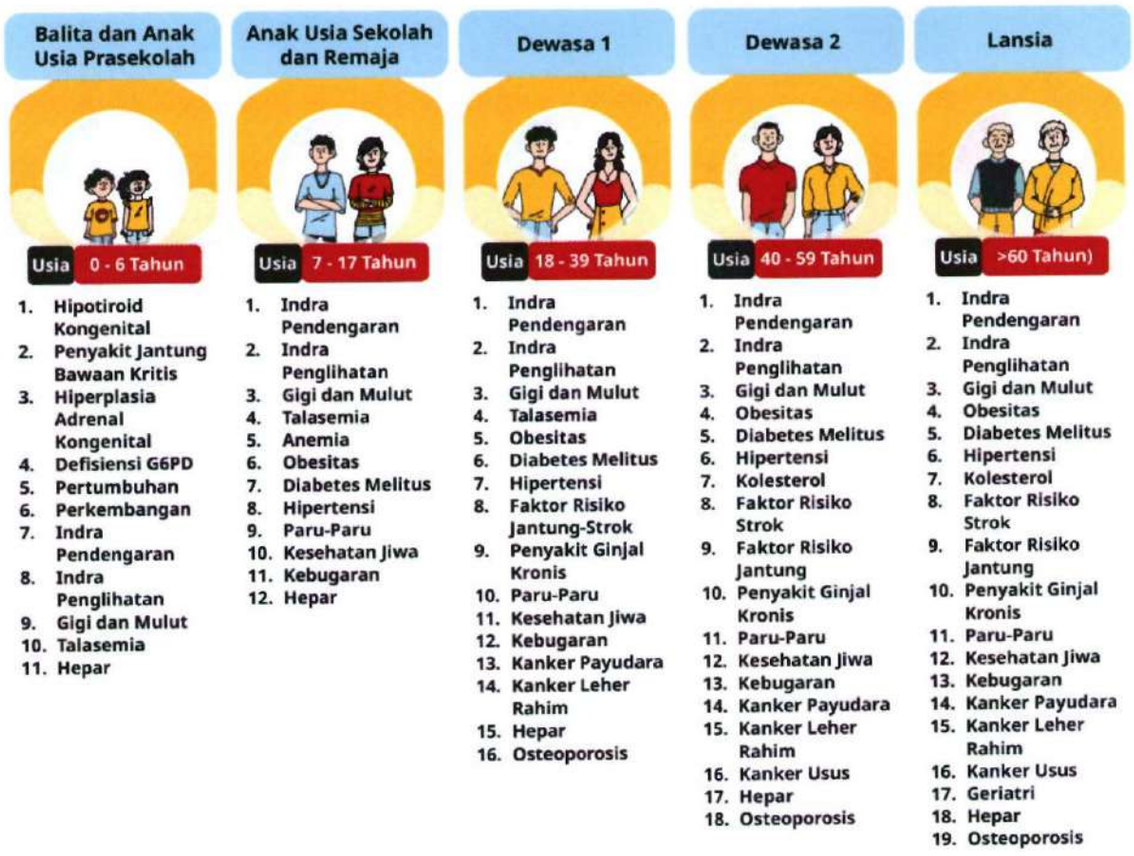

Program pemeriksaan kesehatan gratis juga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat, deteksi dini, dan pencegahan penyakit, serta mengurangi potensi beban anggaran pengendalian penyakit, terutama dari risiko penyakit katastropik seperti diabetes melitus, jantung koroner, kanker, dan strok. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis yang dapat diakses bagi semua kelompok masyarakat berperan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan dengan pemberian layanan paket skrining sesuai siklus hidup (kelompok usia) dan faktor risiko penyakit. Penyediaan paket skrining mencakup pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) dan biaya pemeriksaan, pengiriman sampel, dan tes konfirmasi. Untuk memastikan program ini berjalan optimal, diperlukan pula upaya penguatan sistem dan tata kelola pemeriksaan kesehatan gratis, antara lain melalui pembinaan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, pengembangan sistem data rutin terintegrasi, dan tata laksana untuk tindak lanjut kasus kesehatan dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis. Adapun *highlight* intervensi dari Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis termuat dalam infografis di bawah ini.

KP **Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis**

Sasaran dan Indikator

Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit

Impact:

1. Cakupan penerima pemeriksaan Kesehatan gratis (PKG) mencapai 70% (2029)

Outcome

1. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir mencapai 80% (2029)
2. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia prasekolah mencapai 70% (2029)
3. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja mencapai 70% (2029)
4. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa mencapai 70% (2029)
5. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia mencapai 70% (2029)
6. Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80% mencapai 90% (2029)

Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu	Institusi Kontributor
Kementerian Kesehatan	KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemenag, BPJSK, Kemendes PDT, Kemen Komdigi, TNI, Polri, Pemda

Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh provinsi

Indikasi *Highlight* Intervensi

Skrining kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia

- BMHP untuk Skrining Kesehatan
- Sampel skrining bayi baru lahir yang diperiksa
- Sampel tes konfirmasi skrining bayi baru lahir
- Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher Rahim dengan HPV DNA

Penguatan sistem dan tata kelola pemeriksaan kesehatan gratis

- Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis
- Sistem data yang terintegrasi untuk semua sasaran pemeriksaan kesehatan gratis
- SDMK yang ditingkatkan kapasitasnya untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis
- Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis
- NSPK pemeriksaan kesehatan gratis
- Rekomendasi kebijakan hasil pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis

(c) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

Gambaran Umum. Program pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten diterjemahkan sebagai peningkatan kapasitas rumah sakit daerah di kabupaten/kota untuk pemenuhan standar nasional serta dapat memberikan layanan berkualitas yang digambarkan berdasarkan kriteria berkualitas, antara lain (i) tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar minimal 80 persen; (ii) mampu menyediakan layanan unggulan kanker, jantung, strok, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak; (iii) tersedianya tenaga kesehatan spesialis dasar dan spesialis penunjang untuk layanan unggulan; (iv) telah mencapai standar akreditasi paripurna; serta (v) meningkatnya tata kelola kemandirian keuangan khususnya bagi rumah sakit pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, hasil akhir yang akan dituju (*outcome*) yaitu pemenuhan rumah sakit berkualitas di kabupaten/kota dengan capaian yang diharapkan sebanyak 85 persen rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna dalam periode lima tahun.

Permasalahan dan tantangan. Ketersediaan layanan kesehatan di rumah sakit digambarkan melalui rasio tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk. Rasio tempat tidur rumah sakit Indonesia saat ini sudah mencapai 1,4 tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk sehingga sudah melebihi rasio minimal rekomendasi *World Health Organization* yaitu satu tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk.

Kondisi rasio ini masih menunjukkan adanya kesenjangan apabila ditelaah hingga ke tingkat daerah. Ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit disebut memenuhi standar minimal apabila terpenuhi data minimal 80 persen kondisi baik yang diukur dalam laporan Kementerian Kesehatan.

Tabel 3.6
Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Belum Memenuhi Standar di RS Kab/Kota

Aspek Standar	Jumlah RS Kab/Kota	Persentase (%)
Belum memenuhi standar sarana (gedung dan bangunan) minimal 80%	279	37
Belum memenuhi standar prasarana (air bersih, limbah, listrik, ambulans, dll) minimal 80%	466	61
Belum memenuhi standar alat kesehatan minimal 80%	733	96

Sumber : ASPAK Kementerian Kesehatan, Jan 2024

Dari aspek tenaga kesehatan, ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut disebabkan salah satunya waktu produksi dokter spesialis yang tergolong lama dengan *range* estimasi pemenuhan hingga mencapai 13 dan 27 tahun.

Kualitas tata kelola rumah sakit dapat dilihat dari capaian akreditasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas rumah sakit. Berdasarkan data awal Kementerian Kesehatan, 78 persen rumah sakit sudah mencapai status akreditasi tertinggi, yaitu paripurna. Namun, pasca dilakukan reviu dan peninjauan kembali terhadap hasil akreditasi dan serta rekalibrasi capaian berdasarkan rancangan standar baru yang dikembangkan Kementerian Kesehatan, hanya terdapat 37 persen rumah sakit yang terakreditasi paripurna (Kemkes, 2024). Selain akreditasi, tipe rumah sakit juga dapat menggambarkan kapasitas dan kemampuan layanan rumah sakit dengan tipe terendah rumah sakit, yaitu tipe D.

Saat ini, pemerintah sedang mengembangkan sistem layanan unggulan rumah sakit untuk isu kanker, jantung, strok, uronefrologi, dan kesehatan ibu-anak dengan sasaran 514 kabupaten/kota. Rencana tersebut didasarkan pada fakta adanya ketimpangan layanan yang dijelaskan dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Kapasitas Sistem Kesehatan berdasarkan Layanan

Layanan	Kapasitas Sistem Kesehatan
Jantung	• Baru 153 RS (134 kab/kota) yang mampu melayani kateterisasi jantung (mampu *cathlab*) • Baru 21 Provinsi yang mampu layanan bedah pintas arteri • Rata-rata waktu tunggu layanan bedah jantung anak > 6 bulan di setiap RS
Kanker	• Baru 196 RS (169 kab/kota) yang mampu layani Mammografi (Rontgen Payudara) • 18 provinsi yang mampu layanan radioterapi (Linac) • Baru 2 provinsi yang mampu layanan PEC CT
Ginjal	• Terdapat 93 RS (29 provinsi) yang mampu layanan nefropati obstruksi (batu) • Baru 7 RS di 7 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali yang mampu transplantasi ginjal • Baru 229 RS (201 kab/kota) dengan RS mampu pelayanan hemodialisis

Dalam pola pengelolaan keuangan rumah sakit masih banyak rumah sakit pemerintah yang belum memenuhi status sebagai Badan Layanan Umum dan masih adanya ketergantungan terhadap anggaran pemerintah baik dalam operasional layanan maupun investasi pengembangan kapasitas rumah sakitnya. Ketergantungan ini berpotensi meningkatnya kebutuhan dukungan anggaran Pemerintah serta melambatnya upaya percepatan peningkatan kapasitas rumah sakit pemerintah di Indonesia karena tidak mampu memenuhi secara mandiri dari penerimaan layanannya.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Berdasarkan kondisi di atas, rencana program pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten diterjemahkan sebagai peningkatan kapasitas rumah sakit daerah digambarkan berdasarkan kriteria berikut:

(i) Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar minimal 80 persen;

(ii) Mampu menyediakan layanan unggulan kanker, jantung, strok, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak;

(iii) Tersedianya tenaga kesehatan spesialis dasar dan spesialis penunjang untuk layanan unggulan;

(iv) Telah mencapai standar akreditasi paripurna;

(v) Meningkatnya tata kelola kemandirian keuangan rumah sakit.

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat diturunkan ke dalam kerangka pikir dalam periode lima tahun ke depan seperti pada bagan kerangka pikir berikut.

Gambar 3.8
Kerangka Pikir Pemenuhan Rumah Sakit Berkualitas di Kabupaten/Kota

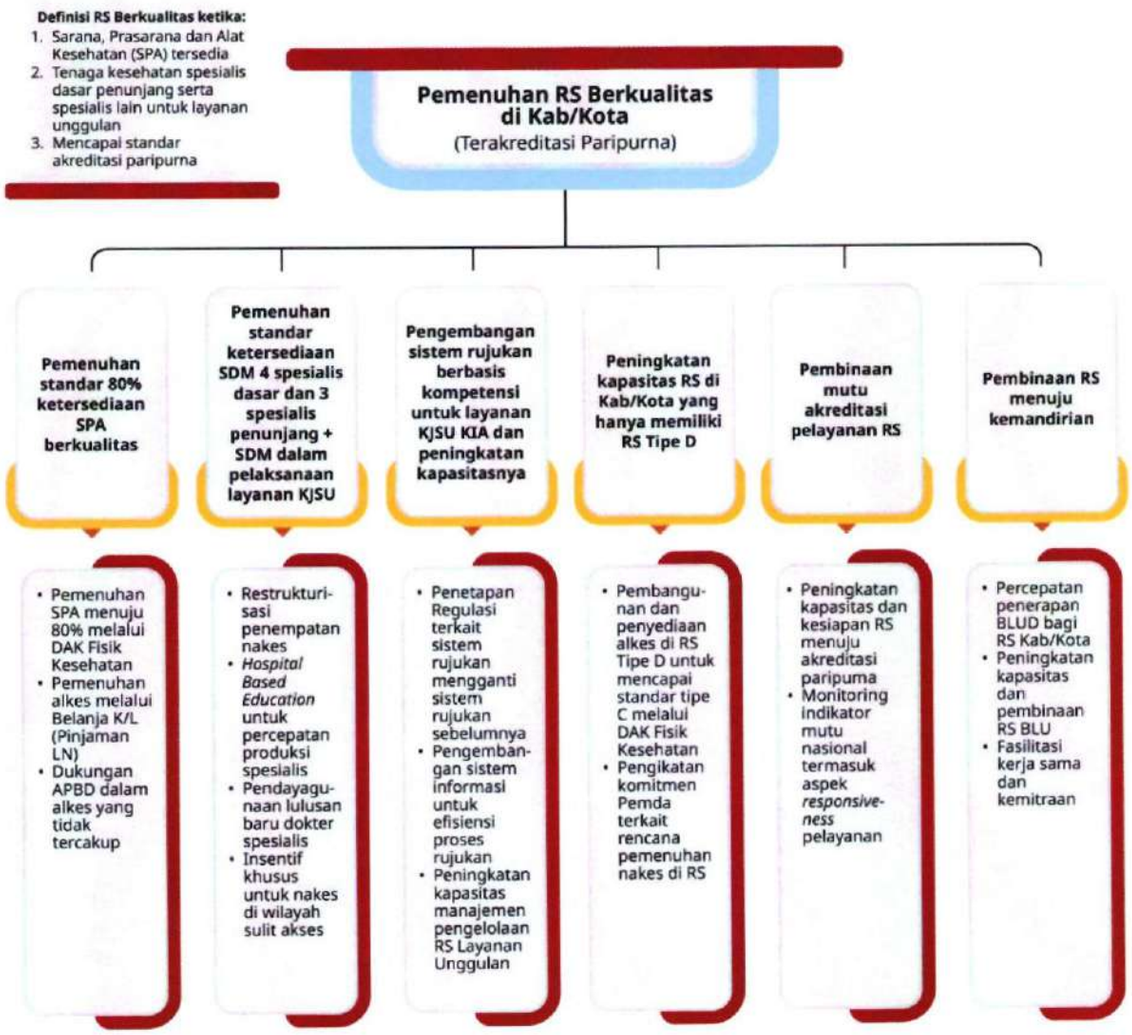

Pentahapan pelaksanaan langkah-langkah di atas dipetakan berdasarkan kebutuhan dan kesiapan daerah terutama dari sisi sumber daya manusia serta kondisi epidemiologi yang dapat mencerminkan *demand* pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, dengan gambaran pentahapan sebagai berikut:

(i) Pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan 80 persen di rumah sakit. Saat ini, terdapat rumah sakit yang belum memenuhi standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Intervensi awal diprioritaskan untuk daerah dengan kriteria sulit akses dan rasio tempat tidur kurang dari 1 per 1000 penduduk.

(ii) Pemerataan layanan rujukan (optimalisasi kapasitas) rumah sakit kanker, jantung, strok, uronefrologi, dan kesehatan ibu-anak.

Stakeholders utama dalam program ini adalah Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah yang didukung kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peran pemerintah daerah juga butuh dilibatkan terutama dalam menyiapkan ketersediaan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Selain pelibatan *stakeholders* lintas sektor, program ini juga membutuhkan pemutakhiran regulasi teknis tentang rumah sakit yang akan mengatur terkait standar tipe rumah sakit berbasis kompetensi layanan (termasuk standar sumber daya manusia yang perlu tersedia), serta sistem rujukan yang saat ini sedang dikembangkan (layanan kanker, jantung, strok, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak). Adapun *highlight* intervensi dari Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses termuat dalam infografis di bawah ini.

KP **Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses**

Sasaran dan Indikator

Terbangunnya RS lengkap berkualitas di kab/kota dan meningkatnya kapasitas layanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses

Impact

1. Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna sebesar 85% (2029)

Outcome

1. Persentase RS yang mencapai target Indikator Nasional Mutu RS sebesar 40% (2029)
2. Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar sebesar 80% (2029)
3. Persentase Provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar sebesar 90% (2029)
4. Persentase Kab/Kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar sebesar sebesar 80% (2029)
5. Kab/Kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS Kapal sesuai standar sebesar 40 kab/kota (2029)
6. Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C sebesar 66 Kab/Kota (2029)
7. Kabupaten/Kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas 150 Kab/Kota (2029)
8. RS Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian sebanyak 30 RS (2029)

Indikasi *Highlight* Intervensi

1. Peningkatan RS Berkualitas di Kab/Kota
2. RS Pemerintah yang dibina teknis dalam pemenuhan sarana prasarana
3. Pembinaan kesiapan akreditasi RS
4. Pemenuhan Sarpras dan Alkes untuk layanan unggulan RS di seluruh Kab/Kota
5. Peningkatan kapasitas sarpras dan alkes RS Daerah melalui DAK untuk mencapai standar minimal 80%
6. Peningkatan RS Kelas D menjadi Kelas C
7. Jejaring pengampuan dan sistem rujukan berbasis kompetensi untuk layanan unggulan RS
8. Bantuan Operasional RS Kapal (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)
9. Pembinaan RS BLU Pemerintah yang ditingkatkan kemandiriannya

Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu
1. Kementerian Kesehatan

Institusi Kontributor
1. Kementerian PPN/Bappenas
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian BUMN
5. BPKP
6. Bapeten
7. LKPP
8. Pemda

Indikasi Lokasi Prioritas

38 Provinsi dan 514 Kab/Kota

Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan setiap tahun pada RKP.

(3) Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

(a) Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

Gambaran umum. Ekosistem sekolah unggul bertujuan untuk memberikan wadah bagi peserta didik yang memiliki kualitas unggul dan daya saing tinggi, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam mencetak pemimpin masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Pengembangan ekosistem sekolah unggul memiliki tiga pilar utama yaitu penyeimbang, inkubator pemimpin, serta akademik dan pengabdian masyarakat. Pilar penyeimbang bertujuan untuk pemerataan kesempatan untuk berprestasi. Pilar inkubator pemimpin bertujuan untuk pembentukan karakter kepemimpinan Indonesia Emas 2045. Pilar akademik dan pengabdian masyarakat bertujuan untuk pendidikan yang berkualitas tinggi dan pembinaan jiwa kesukarelawanan bagi peserta didik. Dalam mengembangkan ekosistem sekolah unggul, pemerintah akan melaksanakannya melalui dua intervensi yaitu pembangunan sekolah unggul baru dan penyelenggaraan sekolah unggul *existing* (sekolah unggul transformasi).

Pembangunan sekolah unggul baru ditujukan untuk membuka akses yang lebih luas bagi talenta-talenta unggul untuk dapat meningkatkan prestasi peserta didik di tingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan daya saing peserta didik untuk dapat diterima di perguruan tinggi terbaik dunia pada bidang-bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Sedangkan, sekolah unggul transformasi bertujuan untuk memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah *existing* yang memiliki peserta didik bertalenta unggul untuk dapat diterima perguruan tinggi terbaik dunia di bidang-bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Di samping itu, kedua intervensi tersebut juga menekankan terhadap pengembangan kepemimpinan dan kesukarelawanan peserta didik.

Permasalahan dan tantangan. Penyiapan sumber daya manusia unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas masih menghadapi tantangan kurangnya wadah bagi peserta didik berprestasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan daya saing pada level lanjut, masih sedikitnya peserta didik yang berpartisipasi pada ajang prestasi di tingkat global, belum tersedianya sistem yang memadai untuk mempersiapkan peserta didik bersaing di tingkat global, serta masih terbatasnya implementasi pendidikan menengah berbasis *Science, Technology, Engineering, and Mathematics*.

Pada tahun 2023, hanya 0,004 persen atau 2.122 peserta didik Indonesia dari seluruh jenjang yang pernah mengikuti kompetisi di tingkat internasional, 82 persen di antaranya menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Manajemen Talenta, terdapat beberapa provinsi yang peserta didiknya belum pernah mengikuti kompetisi tingkat internasional, yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.

Gambar 3.9
Peta Persebaran Peserta Didik Indonesia yang Mengikuti Kompetisi di Tingkat Internasional

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Talenta, Kemendikbudristek, 2024

Berdasarkan data penyaluran Beasiswa Indonesia Maju tahun 2021–2024, Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah yang mengirimkan peserta didiknya ke perguruan tinggi luar negeri melalui program Beasiswa Indonesia Maju masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia, yaitu sebesar 65 persen peserta didik berasal dari Pulau Jawa. Sementara itu, peserta didik penerima Beasiswa Indonesia Maju yang berasal dari pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua hanya sebanyak 3 persen dari total penerima.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam rangka meningkatkan pemerataan keunggulan peserta didik, serta meningkatkan peluang penerimaan peserta didik asal wilayah afirmasi di perguruan tinggi terbaik dalam dan luar negeri pada bidang-bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, perlu dikembangkan katalisator untuk mendorong peningkatan prestasi peserta didik melalui pengembangan ekosistem sekolah unggul yang afirmatif secara sosial-ekonomi dan geografis.

Dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara, pembangunan sekolah unggul tahun 2025–2029 diprioritaskan pada daerah dengan perolehan prestasi sains dan teknologi di tingkat nasional dan internasional yang rendah, serta jumlah lulusan pendidikan menengah di perguruan tinggi terbaik dunia yang rendah. Sedangkan, intervensi sekolah unggul transformasi diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang memiliki talenta potensial, namun masih memerlukan pembinaan untuk berdaya saing di tingkat global.

Sekolah unggul baru dibangun pada jenjang pendidikan menengah yang akan menampung lebih kurang lima rombongan belajar sekolah menengah atas per tahun. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun beserta dengan penyediaan sarana penunjang, sehingga dapat segera beroperasi pada tahun berikutnya. Pembangunan tersebut mencakup asrama peserta didik untuk menjaga kemudahan akses peserta didik ke sekolah serta menjaga ciri unggul peserta didik melalui desain *boarding school*. Untuk menunjang pembelajaran yang optimal, satuan pendidikan dilengkapi dengan ruang kelas, laboratorium ilmu pengetahuan alam dan multimedia terpadu, perpustakaan terpadu dengan koleksi buku lengkap, lapangan olahraga, ruang penunjang lain (unit kesehatan sekolah, perkantoran, dan lainnya), serta bus transportasi untuk operasional peserta didik di lingkungan sekolah.

Di samping aspek fisik, penyelenggaraan sekolah unggul baru juga mempertimbangkan aspek nonfisik salah satunya adalah penyediaan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas. Penyediaan guru berkualitas dilakukan melalui seleksi ketat yang

menjamin kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme. Untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran dan tata laksana satuan pendidikan yang efektif, sekolah unggul akan dilengkapi dengan tenaga kependidikan yang berkompeten, seperti tata usaha, operator, pustakawan, kepala laboratorium, pembina asrama, pembina ekstrakurikuler, petugas keamanan, dan lain sebagainya. Hanya dengan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sekolah unggul akan mampu menciptakan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran berkualitas dan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesentosaan (*wellbeing*) civitas sekolah. Insentif perlu diberikan sebagai apresiasi kepada para guru dan tenaga pendidik yang bertugas.

Gambar 3.10
Logical Framework Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

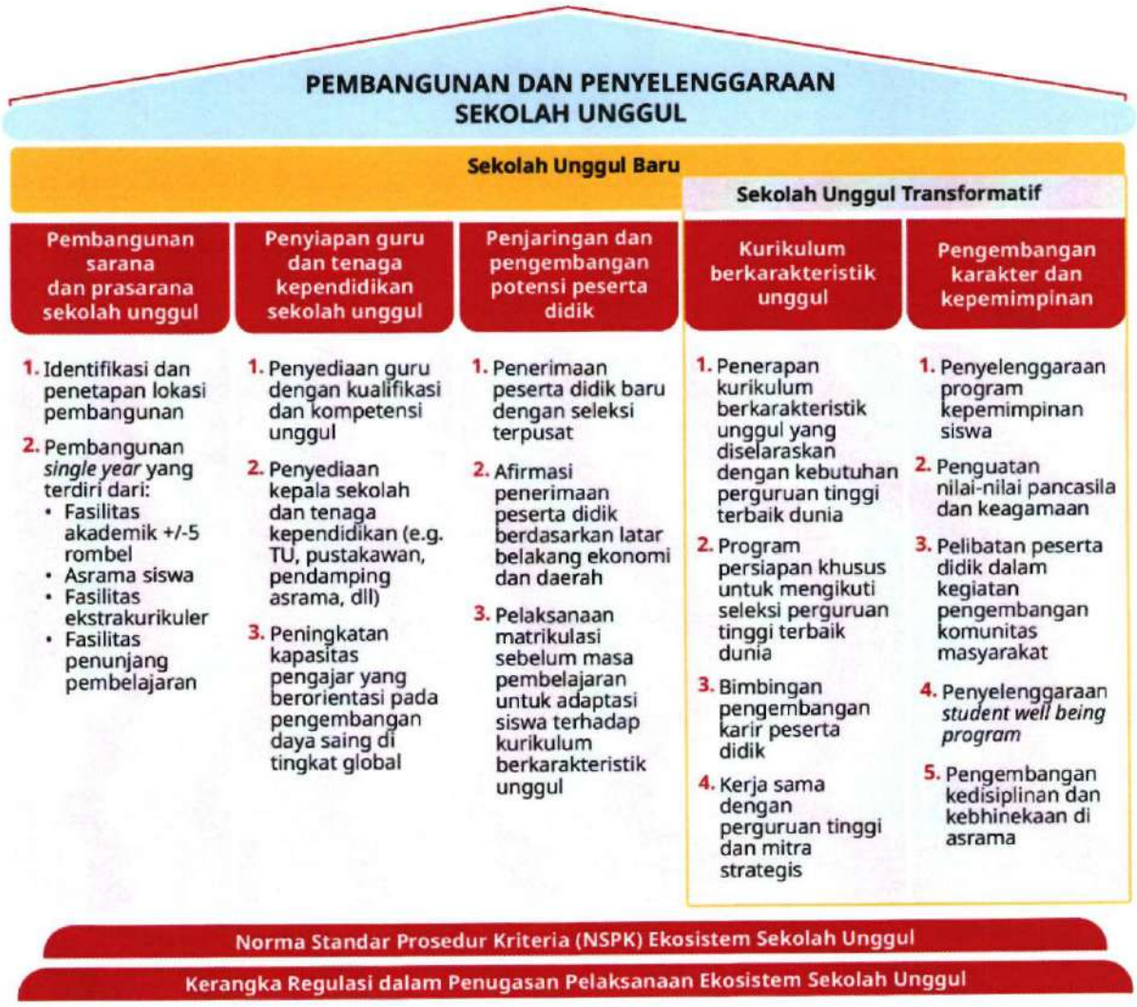

Operasional. Pembangunan prasarana dan penyediaan sarana sekolah unggul baru diharapkan dapat selesai dalam waktu satu tahun anggaran, sehingga proses pembelajaran dapat langsung dilaksanakan secara optimal pada tahun berikutnya. Sedangkan, sekolah unggul transformasi akan mendapatkan intervensi berupa pembinaan peserta didik, pelatihan guru, dan pelatihan manajemen sekolah. Ketiga intervensi diharapkan akan

meningkatkan peluang lulusan diterima di perguruan tinggi terbaik dunia pada bidang-bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, melalui penguatan lima aspek utama yaitu penjalinan kerja sama langsung dengan perguruan tinggi, persiapan akademik, pengemasan citra diri dan pemilihan perguruan tinggi, pemenuhan komponen persyaratan pendaftaran, serta persiapan keberangkatan.

Sekolah unggul tidak dimaksudkan untuk menciptakan favoritisme dan eksklusivisme dalam pendidikan. Oleh karena itu, penerimaan peserta didik di sekolah unggul memberikan pemihakan pada peserta didik berprestasi yang berasal dari keluarga kelompok ekonomi menengah ke bawah.

KP Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

Sasaran dan Indikator

Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global

1. Jumlah sekolah unggul baru yang beroperasi : 20 unit sekolah unggul baru (17 unit beroperasi dan 3 unit dibangun di tahun 2029)
2. Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina: 20 unit sekolah unggul transformasi (2029)

Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

1. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Institusi Kontributor

1. Pemerintah Daerah

Indikasi *Highlight* Intervensi

1. Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
2. Pembangunan Sekolah Unggul
3. Pembinaan Sekolah Unggul Transformasi
4. Pendampingan Sekolah Unggul untuk Menjalin Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Mitra Strategis

Indikasi Lokasi Prioritas

Kriteria Lokasi Prioritas

- Daerah dengan jumlah siswa yang diterima di 100 Perguruan Tinggi Terbaik di Dunia melalui Beasiswa Indonesia Maju (BIM) masih rendah
- Daerah dengan jumlah siswa yang pernah mengikuti kompetisi di tingkat internasional masih rendah

(b) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

Gambaran umum. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif serta memastikan satuan pendidikan dari jenjang Pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah memiliki fasilitas yang memadai guna mendukung proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan efektif, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari kualitas pengajaran. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah dan madrasah menjadi pendorong untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta memastikan setiap peserta didik di seluruh wilayah mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara.

Fokus utama revitalisasi adalah memperbaiki ruang kelas dan ruang nonkelas yang rusak serta memenuhi sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan, ruang kelas, toilet, ruang administrasi, ruang usaha kesehatan sekolah, laboratorium, asrama peserta didik, rumah dinas guru, perpustakaan, tempat ibadah, ruang praktik siswa, lapangan

olahraga, ruang Bimbingan dan Konseling, dan ruang Organisasi Siswa Intra Sekolah. Pelaksanaan revitalisasi mengikuti prinsip ketuntasan untuk memastikan seluruh kegiatan pembelajaran memiliki sarana dan prasarana yang memadai di satuan pendidikan, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan dan tantangan. Aspek geografis Indonesia menjadi salah satu tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, di antaranya penyediaan satuan pendidikan, akses jalan, jembatan, ketersediaan listrik, dan internet. Masih terdapat 29.830 desa/kelurahan yang tidak memiliki taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal, 302 kecamatan tidak memiliki sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan 727 kecamatan tidak memiliki sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah (Potensi Desa, 2021). Dari 415.189 sekolah, sebanyak 3.153 sekolah tidak memiliki listrik, 22.373 sekolah tidak memiliki internet, dan 2.458 tidak memiliki listrik dan internet (Data Pokok Pendidikan, 2023).

Di samping itu, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan dapat dimanfaatkan dengan aman dan nyaman. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan tahun 2023, 25,67 persen atau 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172 ruang kelas berada pada kondisi rusak sedang dan berat. Masih terdapat satuan pendidikan yang memiliki jumlah peserta didik melebihi daya tampung. Kondisi prasarana pendidikan yang kurang memadai berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan, kualitas pengajaran dan pembelajaran, serta keamanan dan kenyamanan peserta didik.

Gambar 3.11
Persentase Kondisi Ruang Kelas

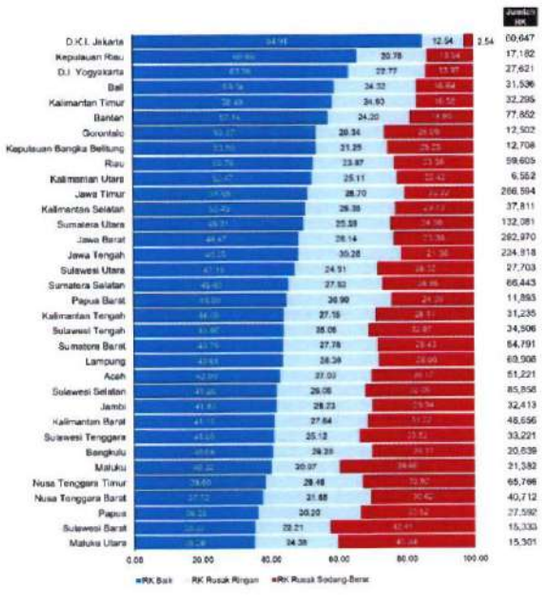

Sekolah

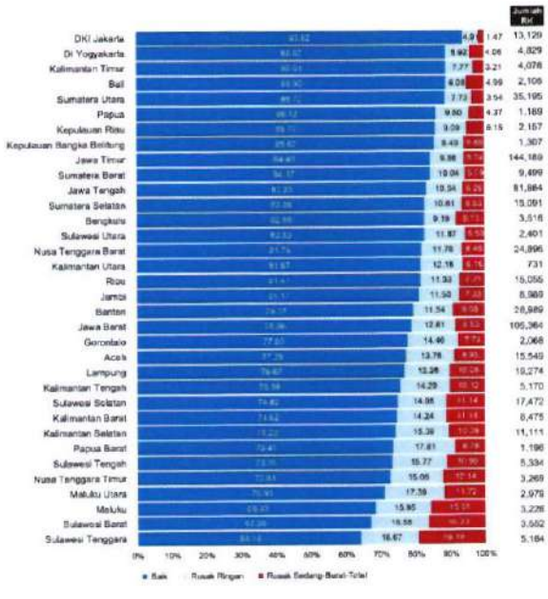

Madrasah

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Revitalisasi sekolah ditujukan untuk menciptakan ekosistem lingkungan belajar yang kondusif serta menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik selama belajar di sekolah. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

Gambar 3.12
Logical Framework Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

Penentuan lokasi revitalisasi sekolah/madrasah mempertimbangkan satuan pendidikan dengan kondisi terdapat minimal satu massa bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang untuk memenuhi prinsip ketuntasan sesuai dengan SNP Sarana dan Prasarana, dengan memberi keberpihakan kepada daerah afirmasi yang terdiri dari daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, dan wilayah Papua. Penentuan sasaran prioritas bersumber dari Data Pokok Pendidikan dan *Education Management Information System* yang telah diverifikasi dan divalidasi.

Pascarevitalisasi, diharapkan ruang kelas, ruang pembelajaran, dan ruang penunjang lainnya yang direnovasi dapat langsung dimanfaatkan secara efektif. Selanjutnya, diperlukan komitmen sekolah dan pemerintah daerah mengenai penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan sehingga sarana dan prasarana dapat digunakan selama jangka waktu yang lebih panjang untuk penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar yang berkelanjutan.

KP **Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas**

Sasaran dan Indikator

Tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas

- Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras mencapai 49,00 pada tahun 2029
- Persentase madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang memenuhi SNP sarpras mencapai 62,04 pada tahun 2029

Instansi Pelaksana

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Agama
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Pemda

Indikasi *Highlight* Intervensi

1. Prasarana Lembaga Pendidikan Kristen Dasar dan Menengah Negeri
2. Prasarana SMAKN
3. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan
4. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah
5. Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)
6. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah
7. PAUD-SD Satu Atap yang dikembangkan
8. PAUD baru yang dibangun
9. Revitalisasi Sarana Pendidikan (PHTC)
10. Sarana Madrasah Menunjang Pembelajaran

Indikasi Lokasi Prioritas

38 Provinsi

- Satuan pendidikan dengan kondisi terdapat minimal satu massa bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang untuk memenuhi prinsip ketuntasan (berdasarkan ketersediaan menu/rincian menu revitalisasi sekolah dan madrasah) dengan memberi keberpihakan kepada daerah afirmasi yang terdiri dari daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, dan wilayah Papua, atau
- SD Negeri di desa/kelurahan yang belum tersedia pelayanan PAUD (TK/RA/BA) untuk pembangunan pelayanan Satu Atap (SATAP) PAUD-SD.

Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada RKP setiap tahunnya.

3.5 Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sebuah negara yang maju harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi, yang juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Dengan demikian, tidak hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, Indonesia dapat menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional. Prioritas Nasional ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Karena itu pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program industrialisasi dan hilirisasi.

3.5.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan jangka menengah pada tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 3.8
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan				
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,67 (2023)	20,80	21,90
Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
2	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	12,50
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3 (2023)	29,4	29,9
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7 (2023)	21,7	22,6

3.5.2 Arah Kebijakan

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Arah Kebijakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan

Isu

- **Penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB** dari 20,99% (2015) **menjadi 18,67% (2023)**
- Peringkat ***Competitive Industrial Performance Index* Indonesia pada tahun 2021 (ke-39)** masih berada **di bawah Vietnam (ke-30), Thailand (ke-25),** dan **Malaysia (ke-20)**
- Struktur Industri Pengolahan Indonesia masih **didominasi oleh *Resource Based* dan *Low-Technology Industry***
- **Peringkat dalam *Economic Complexity Index* Indonesia pada tahun 2021 (ke-64)** masih dibawah Vietnam (ke-61), India (ke-42), Malaysia (ke-28), Thailand (ke-23), dan China (ke-18)
- **Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tidak menunjukkan perubahan** signifikan dalam 4 dekade terakhir
- **88,7% Tenaga Kerja Indonesia** masih **didominasi** oleh ***unskilled labor*** dan **hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi STEAM**
- **Tuntutan dekarbonisasi** serta penggunaan energi bersih dan terbarukan semakin tinggi
- Indonesia **hanya mampu menambah (diversifikasi) 11 produk baru dengan tingkat kompleksitas tinggi dalam 15 tahun terakhir** (hanya berada di *Grade* C). Sementara Vietnam mampu melakukan diversifikasi sampai 41 produk baru (*Grade* A+)
- **Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam sebagai modalitas hilirisasi** namun belum banyak yang diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri, seperti:
  1. **Di tahun 2023 Indonesia berkontribusi terhadap 50% total produksi nikel global,** namun produk yang diekspor sebagian besar masih berupa *intermediate product* (seperti feronikel, nikel *matte*) karena investasi di industri hilir nikel (seperti *stainless steel* dan baterai) relatif lebih sedikit.
  2. **Pada tahun 2023, *supply* minyak sawit Indonesia mencapai 53,6 juta ton** namun 51,6% diantaranya langsung diekspor dalam bentuk CPO dan hanya 24,0% yang diolah lebih lanjut sebagai bahan baku untuk industri dalam negeri.
  3. **Pada tahun 2023, produksi rumput Laut mencapai 9,75 juta ton**, namun ekspor rumput laut baru mencapai USD 433,71 juta. Saat ini, diversifikasi rumput laut Indonesia masih terbatas pada rumput laut kering (*raw material*), karagenan dan tepung agar-agar. Sementara itu, masih terdapat potensi diversifikasi rumput laut bernilai tinggi yang dapat dikembangkan, seperti biostimulan, *biofuel*, dan bioplastik.

Arah Kebijakan

- Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor
- Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi

Sasaran 2

Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Isu

- **Belum optimalnya infrastruktur dan layanan konektivitas**, di antaranya **simpul utama** dan jaringan transportasi **multimoda** yang belum terintegrasi dengan **pusat-pusat pertumbuhan**
- **Daya saing SDM** dan **pelaku usaha** dalam negeri **di bidang logistik** masih **perlu ditingkatkan**, salah satunya terkait pemanfaatan teknologi digital.
- **Keterbatasan infrastruktur** dan **rendahnya kualitas investasi** yang menghambat ekonomi tumbuh lebih tinggi
- **Stagnasi kinerja ekspor** Indonesia selama 20 tahun terakhir dan **rendahnya partisipasi dalam rantai nilai global**
- **Kompleksitas produk ekspor rendah** serta **daya saing ekspor masih didominasi oleh komoditas**
- **Peningkatan hambatan perdagangan tarif dan nontarif termasuk kebijakan *green trade*** berpotensi menurunkan daya saing produk
- **Belum terbangunnya ekosistem perdagangan sektor jasa**
- **Ketimpangan dalam aktivitas perdagangan antarwilayah**
- **Kerja sama bilateral, regional, dan global** terkait penciptaan tata kelola maritim
- **Potensi peningkatan ekspor:**
  1. **Produk Turunan Minyak Kelapa Sawit** sebesar **US$ 12 Miliar**
  2. **Produk Kendaraan Bermotor** sebesar **US$ 4,8 Miliar**
  3. **Produk Komponen Elektronik** sebesar **US$ 2 Miliar**
- **Sumatera Selatan penghasil kopi terbesar.** Ekspor kopi nasional mencapai US$ 929 juta pada 2023
- **Sulawesi Selatan penghasil rumput laut terbesar.** Ekspor rumput laut nasional mencapai USD 433,71 juta pada tahun 2023
- **Riau penghasil kelapa terbesar.** Ekspor olahan kelapa nasional mencapai US$ 892 juta pada 2023

Arah Kebijakan

- Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
- Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
- Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
- Optimalisasi Investasi strategis negara

3.5.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 5, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

(1) Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan akan difokuskan pada komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto serta memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri, peluang investasi, ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan. Oleh karena itu, fokus prioritas hilirisasi tahun 2025–2029 adalah (a) hilirisasi nikel, (b) hilirisasi tembaga, (c) hilirisasi bauksit, (d) hilirisasi timah, (e) hilirisasi kelapa sawit, (f) hilirisasi kelapa, (g) hilirisasi rumput laut, serta (h) hilirisasi sagu dan singkong. Sementara, pengembangan industri nasional yang berorientasi ekspor mencakup (a) pengembangan industri *medium-high technology* (industri semikonduktor yang merupakan salah satu produk prioritas hasil hilirisasi silika, industri kosmetik dan farmasi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri dirgantara, serta industri mesin dan perlengkapan); (b) penguatan produktivitas industri padat karya

terampil (industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki); (c) penguatan industri dasar (industri kimia mencakup hilirisasi komoditas minyak bumi, gas bumi, dan batu bara serta industri logam dasar besi dan baja mencakup hilirisasi komoditas besi dan baja); serta (d) pengembangan sektor jasa industri sebagai *enabler* bagi pengembangan industri nasional.

Upaya yang dilakukan untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pengembangan industri prioritas nasional yang telah disebutkan di atas adalah melalui (i) fasilitasi investasi dan iklim usaha yang kondusif untuk pendalaman struktur industri; (ii) tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku yang diiringi oleh peningkatan produktivitas sektor hulu; (iii) penyiapan tenaga kerja terampil; (iv) jaminan ketersediaan energi yang andal dan bersaing; (v) peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses produksi serta diversifikasi produk industri; (vi) optimalisasi penerapan standar dan sertifikasi yang diakui pasar global; (vii) perluasan pasar dalam dan luar negeri untuk peningkatan skala ekonomi melalui penguatan *branding*, optimalisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta (viii) didukung dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan secara terarah, sistematis dan efektif, termasuk melalui pembentukan komite kebijakan industri kedirgantaraan dan lembaga pengelola kelapa sawit. Selain itu, pengembangan industri akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan upaya dekarbonisasi dan penerapan sirkular ekonomi di industri.

(2) Aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dilakukan dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi, terutama di luar Jawa. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri maka pelaksanaan kegiatan industri ke depannya wajib berlokasi di kawasan industri. Oleh karena itu diperlukan akselerasi investasi di dalam kawasan industri/kawasan ekonomi khusus untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.

Pada tahun 2025–2029, aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus akan difokuskan pada 23 kawasan industri/kawasan ekonomi khusus yaitu (a) Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe; (b) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei; (c) Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang; (d) Kawasan Ekonomi Khusus Gresik; (e) Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate; (f) Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon; (g) Kawasan Industri Terpadu Wilmar; (h) Kawasan Industri Seafer; (i) Kawasan Industri Terpadu Batang; (j) Kawasan Industri Ngawi; (k) Kawasan Industri iSentra @Lamongan; (l) Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana; (m) Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia; (n) Kawasan Industri Sumbawa Barat; (o) Kawasan Industri Indonesia Huabao Industrial Park; (p) Kawasan Industri Takalar; (q) Kawasan Industri Stardust; (r) Kawasan Industri Morowali; (s) Kawasan Industri Konawe; (t) Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park; (u) Kawasan Industri Buli; (v) Kawasan Industri Weda Bay; (w) Kawasan Industri Pulau Obi; dan (x) Kawasan Industri Fakfak. Upaya akselerasi investasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus akan difokuskan pada (i) fasilitasi perizinan dan tata ruang kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas; (ii) pembangunan sarana dan prasarana dalam dan luar kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sesuai dengan perencanaan (masterplan) serta kebutuhan pengembangan kawasan prioritas (kawasan industri/kawasan ekonomi khusus) yang di antaranya mencakup (1)

pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan/jembatan untuk pemenuhan aksesibilitas serta rantai pasok penunjang aktivitas di luar kawasan melalui pembangunan jalan tol, jalan nasional serta dukungan peningkatan jalan daerah melalui sinkronisasi program hibah berbasis kinerja maupun dukungan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan kriteria berbasis kawasan; dan (2) pengembangan konektivitas simpul transportasi multimoda untuk efisiensi logistik yang terpadu meliputi pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama, *dryport*, bandara utama, serta sarana dan prasarana kereta api melalui sinkronisasi program pemerintah dan badan usaha; (3) penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja bagi kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas; serta (4) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok untuk kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas. Fasilitasi kelengkapan ekosistem pendukung kawasan industri/kawasan ekonomi khusus tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sesuai dengan penahapannya masing-masing.

(3) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional diarahkan untuk mendorong layanan logistik yang lebih efisien dan merata, serta meningkatkan kinerja sektor logistik yang lebih optimal, melalui (a) penguatan infrastruktur konektivitas, layanan *backbone,* dan sarana penunjang logistik, (b) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik, serta (c) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

(4) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, memerlukan prasyarat (*prerequisite*) meliputi sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan serta regulasi investasi yang kondusif, iklim investasi dan kepastian berusaha, pemberian insentif dan kemudahan investasi yang efektif, dan fasilitasi investasi Indonesia di luar negeri agar Indonesia tetap menjadi destinasi yang menarik sehingga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Pada tahap pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029, *prerequisite* ini harus terinternalisasi pada sektor dan aktivitas yang produktif, serta memiliki *multiplier effect* paling besar terhadap perekonomian. Intervensi yang dilakukan untuk menindaklanjuti arah kebijakan tersebut antara lain (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik.

(5) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dapat dilakukan dengan (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan dengan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam melalui penguatan kebijakan, promosi, dan kerja sama internasional dalam rangka membuka dan memperluas pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan dengan negara lain; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle*; (g) peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement/ Comprehensive Economic Partnership Agreement* untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; serta (h) peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

Sektor perdagangan difokuskan untuk mendorong ekspor tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan penguasaan pangsa ekspor Indonesia terhadap dunia melalui optimalisasi kinerja perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah dan pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang dikompetisikan secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat partisipasi dalam rantai nilai global.

(6) Optimalisasi investasi strategis negara dilakukan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mencapai target pembangunan nasional, dengan mengoptimalkan daya tarik investasi domestik. Upaya ini diwujudkan melalui dua fokus utama, yaitu (a) pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis negara, serta (b) peningkatan investasi strategis negara pada sektor prioritas.

Pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis negara perlu dioptimalkan dengan mencakup strategi transformasi, diversifikasi portofolio dan upaya pengendalian risiko. Hal ini dilakukan untuk memperoleh *expected return* yang optimal dengan akumulasi risiko yang lebih terukur, mengingat saat ini kondisi portofolio investasi di Indonesia masih terbatas dan tidak cukup terdiversifikasi. Optimalisasi portofolio *within investment* ke depan perlu diiringi dengan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dan memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif, mulai dari perumusan kebijakan yang *prudent*, pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, pengendalian berkelanjutan, evaluasi yang objektif, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel di bidang (a) portofolio dan (b) tujuan investasi.

Pembangunan pada sektor prioritas saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut bisa terlihat dari ketahanan energi, pangan, dan air yang belum memadai, hilirisasi pertambangan yang belum optimal, infrastruktur untuk mendukung konektivitas yang masih perlu ditingkatkan, penyediaan perumahan yang masih terbatas, kesenjangan digital di berbagai daerah, serta berbagai permasalahan industri strategis dan kesehatan yang masih menjadi isu utama pembangunan. Oleh sebab itu, investasi strategis negara difokuskan pada sektor prioritas diantaranya (a) pertambangan, energi, pangan, dan air; (b) infrastruktur dan perumahan; serta (c) teknologi, industri strategis, dan kesehatan. Selanjutnya investasi strategis negara juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor lain yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

3.5.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan Regulasi pada Prioritas Nasional 5 "Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri" sebagai berikut:

(1) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Perubahan Undang-undang Perindustrian merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pengembangan industri yang lebih kondusif dan relevan dengan kondisi terkini. Beberapa ketentuan yang dilakukan penyesuaian dengan perkembangan terkini di sektor industri pengolahan, antara lain ketentuan mengenai (a) jasa industri, (b) pabrik cerdas, (c) industri cerdas, (d) standar digital industri, (e) percepatan pertumbuhan

industri pengolahan bahan baku sumber daya alam, (f) sistem manajemen untuk standar industri hijau, serta (g) bentuk-bentuk kerja sama internasional yang dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk fasilitasi industri.

(2) Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Danantara sebagai Lembaga *Sui Generis* yang Bertugas Mengelola Investasi, Mengelola Badan Usaha Milik Negara, dan Mengelola Badan Usaha dan/atau Badan Hukum Lainnya

Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Danantara sebagai lembaga *sui generis* yang bertugas mengelola investasi, mengelola Badan Usaha Milik Negara, dan mengelola badan usaha dan/atau badan hukum lainnya merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola investasi yang optimal dan terpadu. Undang-undang ini akan mendorong sinergi dan kolaborasi antar Badan Usaha Milik Negara, badan usaha, dan lembaga pemerintah dalam pengelolaan aset negara. Lembaga *sui generis* ini akan mengoptimalkan potensi dan sumber daya nasional, sehingga mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045.

Kebutuhan Kelembagaan pada Prioritas Nasional 5 "Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri" sebagai berikut:

(1) Pembentukan/Penataan Kelembagaan yang Bertugas Mengelola Investasi, Mengelola Badan Usaha Milik Negara, dan Mengelola Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya

Pembentukan/penataan kelembagaan yang bertugas mengelola investasi, mengelola Badan Usaha Milik Negara, mengelola badan usaha dan/atau badan hukum lainnya merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola investasi yang optimal dan terpadu. Lembaga ini akan berperan sebagai *central hub* yang mengonsolidasikan, melaksanakan transformasi Badan Usaha Milik Negara, dan *me-leverage* seluruh kegiatan investasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha, lembaga pemerintah, dan badan hukum lainnya yang mengelola aset negara. Dengan demikian, *overlapping* kewenangan dan *potential conflict of interest* dapat diminimalisir, efisiensi dan sinergi dapat ditingkatkan, serta tata kelola investasi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Penguatan kelembagaan ini juga akan mendorong optimalisasi potensi dan sumber daya nasional melalui *unlock value* aset-aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Lembaga ini akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045.

3.6 Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh distribusi hasil pembangunan dan keseimbangan alokasi sumber daya pada setiap wilayah. Membangun dari desa dan dari bawah adalah strategi yang berorientasi pada penguatan akar perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat lokal serta memperhatikan pemenuhan hak dasar warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan inklusif. Desa, sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan dan ekonomi, memegang potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, negara mengakui peran penting komunitas desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, dan ketahanan sosial-budaya. Membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan tata kelola yang menggambarkan kemandirian desa, namun juga meliputi pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. Melalui strategi yang berfokus pada pendekatan dari desa dan dari bawah, negara berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi pendekatan utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Penduduk miskin dan rentan menjadi fokus dalam pelaksanaan perlindungan sosial, untuk membantu mengurangi beban kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, energi, pengasuhan, layanan sosial, perumahan dan sanitasi yang layak, serta kebutuhan individu maupun keluarga lainnya sesuai dengan hambatan yang dihadapi. Pendekatan untuk meningkatkan kemandirian penduduk miskin dan rentan dilakukan dengan mengedepankan potensi, kapasitas, motivasi, dan akses bagi mereka untuk dapat berdaya mendapatkan ruang untuk berpartisipasi pada sektor-sektor ekonomi utama. Kesempatan yang setara menjadi kebijakan kunci untuk memastikan infrastruktur dan layanan dasar, serta kondisi pemampu lainnya, tersedia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera.

Upaya holistik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas penduduk miskin dan rentan diarahkan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan secara berkesinambungan. Kebijakan pemberantasan kemiskinan dikembangkan sebagai bagian dari agenda pembangunan utama untuk memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Penduduk miskin, rentan, dan menuju kelas menengah didorong untuk menjadi aktor dan rantai pasok utama yang berperan dalam kegiatan ekonomi utama yang dapat mengeluarkan mereka dari kondisi miskin dan rentan. Penguatan dan perbaikan tata kelola program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi agenda utama untuk mendukung kebijakan ini, termasuk integrasi program lintas lembaga dan sektor, peningkatan adaptabilitas dan inklusivitas, pemanfaatan dan peningkatan akses terhadap teknologi, penggunaan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi sebagai sumber rujukan dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penargetan program, serta pemantauan yang intensif dan berkala dalam mengidentifikasi kebutuhan kelompok yang paling rentan dan mengakselerasi graduasi penduduk menuju sejahtera secara berkesinambungan.

Perlindungan dan pemberdayaan penduduk didukung dengan kebijakan kewilayahan yang bersifat afirmatif. Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, perencanaan regional yang terintegrasi menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan yang merata. Hubungan desa-kota yang saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi wilayah berperan sebagai kunci pemerataan ekonomi. Desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk mendukung ekosistem ekonomi kota, sementara kota menyediakan akses pasar, teknologi, dan inovasi. Kota-kota dirancang sebagai simpul pertumbuhan yang mendukung pembangunan wilayah sekitar. Selain itu, pembangunan di desa dan kota harus memastikan akses yang setara bagi kelompok rentan di daerah miskin perkotaan dan perdesaan terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Pembangunan perkotaan yang inklusif tidak hanya memperkuat perekonomian lokal tetapi juga mendorong pemerataan peluang ekonomi di wilayah tertinggal. Investasi pada kawasan strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, diarahkan untuk memanfaatkan potensi wilayah tertinggal dan mempercepat pengurangan kesenjangan. Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, Ibu Kota Nusantara dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa, sehingga mendukung penurunan kemiskinan secara lebih merata.

Pelaksanaan pembangunan dirancang dengan pendekatan afirmatif, yang berfokus pada keberpihakan terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk paling rentan, dimulai dari tingkat komunitas. Pendekatan ini memastikan bahwa kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan komunitas terpencil serta kelompok rentan lainnya, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan perlindungan sosial.

Pendekatan "membangun dari desa dan dari bawah" bertujuan memberdayakan desa sebagai penggerak utama dalam rantai pasok ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan potensi lokal, pemerintah juga berupaya meningkatkan kontribusi desa dalam mendukung ekosistem ekonomi kota. Strategi ini tidak hanya menciptakan sinergi antara desa dan kota, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah untuk memastikan pemerataan pembangunan.

3.6.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Untuk mengawal keberhasilan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan maka proses membangun dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat dan struktur kelembagaan tingkat terbawah yang paling dekat dengan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan pemenuhan akses masyarakat terhadap hunian layak, bukan hanya sebagai tempat tinggal melainkan juga tempat bekerja bagi beberapa segmentasi masyarakat. Maka dari itu, kebijakan ke depan dilakukan dengan memastikan perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan program-program bantuan, jaminan, layanan, dan kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa.

Pembangunan dari desa mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Pembangunan tersebut menekankan keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*). Tujuannya untuk memastikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan didukung dengan penguatan pusat aktivitas dan ekonomi melalui sinergi aliran sumber daya, tenaga kerja, serta akses pasar inklusif.

Bersamaan dengan pembangunan di wilayah perdesaan, pembangunan kawasan perkotaan dilakukan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan. Pembangunan perkotaan berkelanjutan perlu didukung dengan pendekatan kota cerdas, kelembagaan yang adaptif-dinamis serta komitmen pemerintah daerah dan regulasi yang memadai guna menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pembangunan perkotaan.

Sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6 tahun 2025 dan 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan				
1	Tingkat kemiskinan (%)	9,03	7,0–8,0	4,5–5,0
2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)[a]	1,47	0,5 –1	0
3	Proporsi penduduk kelas menengah (%)	17,13	17,50	20,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)[b]	29,77 (Semester I)	32,15	43,92
5	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	9,07 (2023)	10	12
Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan				
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	65,25	67,00	74,00
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan				
7	Persentase desa mandiri (%)[c]	22,85	23,29	25,79
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				
8	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	56,56 (2022)	57,29	59,25
9	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)[b]	44,13 (2022)	44,35	45,60

Keterangan: a) menggunakan US$ 2,15 PPP tahun 2017; b) indikator merupakan 45 indikator RPJPN Tahun 2025–2045, namun tidak menjadi indikator pada level Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025–2029; dan c) sesuai perhitungan dan proyeksi Indeks Desa 2024.

3.6.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1

Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan

Isu

- **Rendahnya akurasi sasaran program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat**
- Program **perlindungan sosial** yang **belum komprehensif dan belum menjawab** sepenuhnya **kebutuhan** seluruh masyarakat miskin dan rentan
- **Program pemberdayaan** yang **belum terintegrasi dan terstandar** untuk peningkatan kemandirian masyarakat
- **Jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum mencakup seluruh pekerja,** terutama pekerja informal
- **Akses penduduk miskin dan rentan** terhadap layanan infrastruktur dasar masih perlu ditingkatkan

Arah Kebijakan

- Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi
- Perlindungan sosial adaptif dan inklusif
- Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif

Sasaran 2

Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Isu

- **Intervensi perumahan eksisting belum menjangkau seluruh segmentasi masyarakat** termasuk pekerja informal, terutama dari aspek pembiayaan perumahan
- **Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan MBR** berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- **Belum optimalnya keterhunian dan pengelolaan rumah** sehingga berpotensi pada menurunnya kualitas bangunan beserta lingkungan
- **Belum optimalnya integrasi** antara **intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik** yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru

Arah Kebijakan

Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman

Sasaran 3

Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Isu

- **Angka kemiskinan perdesaan masih tinggi** 12,22 persen (BPS, 2023)
- Pemenuhan layanan dasar desa masih bervariasi. Terdapat desa yang layanan dasar sudah terpenuhi namun masih terdapat desa yang layanan dasarnya belum baik. Secara agregat **kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan layanan perkotaan**
- Aktivitas ekonomi desa dalam posisi rentan karena 96 persen ekonomi masyarakat desa didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki **nilai ekonomi dan daya saing lemah** sehingga membutuhkan penguatan dan diversifikasi
- Produktivitas dan **pendapatan asli desa PADes terhadap ABPDesa masih sangat rendah** (Proporsi PADes 2,1 persen dari total APBDes, 2023)
- Tata Kelola pemerintahan desa masih belum baik dan **kualitas belanja desa (*quality of spending*) perlu ditingkatkan**
- Belum optimalnya **konsolidasi berbagai pendanaan K/L/D** dalam pembangunan desa
- **Desa berketahanan iklim masih rendah** (33,73 persen dari 75.259 desa) sementara bencana dan dampak perubahan iklim di desa semakin sering terjadi.

Arah Kebijakan

Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

Sasaran 4

Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Isu

- Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia hanya meningkatkan 1,4 persen PDB perkapita, **kontribusi ekonomi yang tergolong rendah** jika dibandingkan dengan Cina dan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik (Bank Dunia, 2019)
- **Pemanfaatan lahan perkotaan yang belum efisien** dan **pengendalian ruang yang kurang efektif** telah mendorong laju urbanisasi lebih tinggi di pinggiran kota yang menyebabkan permukiman tumbuh menyerak dan keluar dari kontrol
- **Ketersediaan dan akses layanan perkotaan** berupa rumah layak huni, layanan air minum, sanitasi, dan infrastruktur perkotaan **masih terbatas,** sementara pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta sarana pendidikan dan kesehatan **belum inklusif dan memadai**
- Pembangunan dan penyediaan **infrastruktur khusus di wilayah metropolitan belum merata,** memiliki **kualitas yang terbatas**, serta **tidak terintegrasi secara kewilayahan.**
- Rendahnya kesempatan kerja, penanganan sektor ekonomi informal yang belum optimal, serta tingginya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kriminalitas masih menjadi **tantangan utama perkotaan** pada **bidang sosial-ekonomi**
- Tingkat pencemaran dan **degradasi lingkungan yang semakin tinggi** di perkotaan, ditambah dengan **rendahnya ketangguhan perkotaan** terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan hidup di perkotaan
- **Belum ada regulasi** yang mengatur perkotaan secara terpadu, kurang **dinamisnya kelembagaan**, serta **belum inovatifnya pembiayaan** pengelolaan perkotaan untuk mengatasi kompleksitas perkotaan di 2045
- **Tingginya konsentrasi penduduk Indonesia di Pulau Jawa** (sebesar 56,10 persen) utamanya di **Wilayah Metropolitan Jakarta** menyebabkan **beban Jakarta dan daerah sekitarnya meningkat,** sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan peningkatan dampak kerugian ekonomi.

Arah Kebijakan

- Pembangunan perkotaan berkelanjutan
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara

3.6.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

(1) Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi untuk peningkatan kualitas perencanaan program pemerintah berbasis data kondisi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia yang terintegrasi, yang dilaksanakan melalui (a) tata kelola Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk menghasilkan data tunggal sosial ekonomi dan (b) pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi;

(2) Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, pendekatan ini dilakukan melalui

(a) penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi yang tepat sasaran dan inklusif melalui kartu kesejahteraan, dengan (i) peningkatan cakupan dan kualitas bantuan sosial yang sesuai dengan kondisi kerentanan; (ii) perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi dan terdigitalisasi; (iii) penguatan adaptabilitas program dalam kondisi bencana alam dan non-alam, serta perubahan iklim; (iv) penguatan perencanaan, layanan, dan rujukan terpadu dari tingkat desa mempergunakan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT) untuk memastikan integrasi bantuan sosial dengan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur layanan dasar; serta (v) pengembangan mekanisme graduasi masyarakat miskin dan rentan menuju sejahtera;

(b) reformasi sistem Jaminan Sosial Nasional, melalui peningkatan literasi Jaminan Sosial, penjangkauan aktif kepesertaan, penguatan program dan kelembagaan jaminan sosial, pengembangan jaminan sosial adaptif, penyediaan skema jaminan sosial bagi pekerja miskin dan tidak mampu, perumusan keseimbangan iuran dan manfaat program, penguatan tata kelola dan data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan; dan

(c) pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*) melalui pengembangan layanan pengasuhan, penguatan kapasitas keluarga, komunitas, dan institusi, peningkatan akses terhadap fasilitas pelayanan pengasuhan bagi kelompok rentan termasuk anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, yang terjangkau, terstandar, dan berkualitas, serta pengembangan mekanisme pendanaannya secara berkesinambungan, guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan kesempatan ekonomi secara holistik.

Untuk mencapai perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, pemerintah memastikan program yang terintegrasi dan saling melengkapi. Salah satu upaya agar perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan terintegrasi dapat terbangun dan terlaksana, dilakukan penyusunan payung hukum pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial, untuk memastikan kebijakan yang harmonis, komprehensif, dan berkesinambungan, program yang tersinkronisasi, pembagian peran dan kewenangan lintas sektor yang konsisten, serta penguatan kondisi perlu yang dibutuhkan untuk memastikan program yang tepat manfaat dan tepat sasaran. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Sosial ditujukan untuk memberikan panduan yang lebih komprehensif dan menyeluruh terkait dengan konsep dan mekanisme pelaksanaan perlindungan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah.

(3) Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif bertujuan untuk menyinergikan program-program pengembangan kewirausahaan dan kesempatan bekerja kepada para penerima manfaat yang dilaksanakan melalui (a) peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif untuk penguatan kelompok masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah; (b) peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif untuk pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan rentan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan mengakselerasi graduasi menuju kesejahteraan; dan (c) reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, serta meningkatkan kemandirian masyarakat penerima Tanah Obyek Reforma Agraria. Hal tersebut dilakukan melalui penataan aset yaitu pemberian tanah sekaligus sertipikat tanah dan pelaksanaan penataan akses yaitu pemberian bantuan fasilitasi pendampingan usaha bagi penerima Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk dapat mengolah tanah yang sudah diberikan. Dengan adanya pemberian aset disertai akses untuk subyek Tanah Obyek Reforma Agraria yang sama maka diharapkan penerima reforma agraria dapat meningkat kesejahteraannya.

(4) Pembangunan perkotaan berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju dan menyejahterakan. Pembangunan perkotaan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan sistem perkotaan nasional dengan didukung oleh tata kelola dan kelembagaan yang transparan dan akuntabel, serta pengarusutamaan pendekatan perkotaan cerdas dengan 50 indikasi lokasi prioritas, difokuskan kepada

(a) pembangunan Wilayah Metropolitan di 10 lokasi prioritas dengan strategi pembangunan berupa (i) peningkatan konektivitas antara lain berupa pembangunan transportasi perkotaan dan pengembangan kawasan berorientasi transit; (ii) penataan kawasan perkotaan antara lain berupa revitalisasi kawasan permukiman kumuh dan pembangunan hunian vertikal publik; (iii) peningkatan ketangguhan bencana dan adaptasi perubahan iklim antara lain berupa penanganan banjir perkotaan dan penerapan solusi berbasis alam; (iv) pengelolaan urbanisasi antara lain berupa penguatan keterkaitan perdesaan-perkotaan dalam bentuk kerja sama desa-kota; dan (v) peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan antara lain berupa penguatan kerja sama multipihak dan lintas wilayah serta pengembangan pendanaan inovatif.

(b) pembangunan perkotaan Non-Wilayah Metropolitan di 40 indikasi lokasi prioritas, khususnya perkotaan yang berkembang dengan cepat, dengan strategi pembangunan berupa (i) pengembangan rencana spasial dan data fungsional perkotaan antara lain berupa materi teknis Rencana Tata Ruang, Metropolitan *Statistical Area*, masterplan pengembangan dan penataan perkotaan, serta rencana mobilitas perkotaan; (ii) penyediaan serta peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar antara lain berupa penyediaan layanan transportasi umum, pengelolaan persampahan dan sanitasi, serta perluasan sambungan air minum perpipaan; (iii) peningkatan kualitas lingkungan antara lain melalui penyediaan ruang terbuka hijau dan biru publik serta penanganan limbah dan sampah; (iv) penguatan ekonomi perkotaan antara lain melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan terintegrasi dengan ketenagakerjaan.

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan, perlu didukung dengan penyempurnaan regulasi tentang perkotaan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan Berkelanjutan. Rancangan Undang-Undang ini bertujuan untuk mentransformasi pendekatan pembangunan perkotaan agar tidak sektoral, dapat memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan perkotaan yang layak, adaptif terhadap pengelolaan perkotaan lintas batas wilayah, didukung peran serta warga kota yang memadai dan tanggap terhadap tantangan masa depan.

(5) Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan dengan fokus utama pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memantapkan posisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui (a) perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dan (b) pembangunan sosial, *superhub* ekonomi, dan pengelolaan lingkungan Ibu Kota Nusantara;

(6) Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman dengan segmentasi yang perlu dilayani, serta target khusus antara lain untuk generasi milenial dan generasi Z dan masyarakat miskin dan rentan. Penyediaan perumahan juga perlu dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman (air minum aman, air limbah, persampahan, jalan, drainase lingkungan, dan lainnya), akses konektivitas, serta sesuai dengan tata ruang dan keamanan bermukim yang sensitif terhadap isu ketahanan bencana dan iklim. Hal ini dapat dilaksanakan melalui (a) fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas, (b) pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu, (c) pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan, (d) penguatan ekosistem perumahan, serta (e) peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu;

(7) Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan dilaksanakan melalui intervensi lintas sektor dengan fokus pada beberapa aspek (a) pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur, termasuk perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi, persampahan, layanan kesehatan, dan konektivitas; (b) transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan perdesaan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi skala lokal, pengembangan indikasi 30 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), penguatan lembaga ekonomi desa, pengelolaan dampak perubahan iklim, serta pengelolaan urbanisasi untuk memastikan terciptanya sinergi desa dan kota dalam pertukaran sumber daya, tenaga kerja, dan akses pasar sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan; (c) penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; (d) pembangunan 30 daerah tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengurangan risiko bencana; (e) pembangunan kawasan perbatasan melalui pemenuhan layanan dasar, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, penataan ruang dan penanggulangan bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan; (f) pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal, melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil; dan (g) tata kelola pendampingan/penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui integrasi pelaksanaan dan pengendalian berbagai program di tingkat masyarakat, penguatan kualitas pendamping/penyuluh dengan lebih terstandar, penguatan motivasi dan

kapasitas masyarakat untuk berdaya, peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap layanan sosial dan dasar, perluasan akses masyarakat terhadap pengembangan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama penduduk miskin dan rentan;

Dalam memastikan keberhasilan pembangunan dari desa dan dari bawah dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, serta pengentasan kemiskinan, maka dirumuskan Program Hasil Terbaik Cepat yang memiliki daya ungkit terhadap keberhasilan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6 yaitu (1) Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut dan (2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas.

(1) Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 5 berperan penting dalam mendukung Prioritas Nasional 6 untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5,0 persen dan meningkatkan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59. Program ini bertujuan untuk menghilangkan dan mencegah kemiskinan absolut melalui perluasan dan penguatan program kesejahteraan sosial serta pemberian dukungan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas dan pembukaan akses kepada aset produktif dan pasar. Program ini mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial maupun pemberdayaan di sektor sosial, pendidikan, kesehatan, kebekerjaan, infrastruktur dasar, layanan dasar dan sektor-sektor perekonomian seperti pertanian, perkebunan, jasa pariwisata, perikanan dan perdagangan yang kemudian dikelompokkan menjadi Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, dan Kartu Usaha Produktif.

Kartu Kesejahteraan adalah upaya integrasi program perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, mencakup berbagai program subsidi dan bantuan sosial yang komprehensif dari berbagai sektor dan berbasis individu dan keluarga, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sesuai kondisi dan sasaran program dengan pendekatan ketepatan sasaran melalui satu basis data terpadu, tata kelola dan pengendalian program lintas sektor yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi layanan keuangan, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penerima manfaat.

Adapun Kartu Usaha merupakan wujud dari strategi peningkatan pendapatan melalui peningkatan kemampuan bekerja dan berwirausaha. Program ini dirancang untuk memberikan solusi nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan peluang kerja baru yang berkelanjutan. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha, menciptakan tenaga kerja mandiri, memperkuat daya saing usaha, serta mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan program Kartu Usaha ini terbagi menjadi Kartu Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, serta Kartu Usaha Produktif yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah.

(a) Kartu Kesejahteraan

Permasalahan dan tantangan. Program perlindungan sosial yang saat ini berjalan masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mencakup (i) akurasi penyaluran bantuan sosial masih rendah; (ii) program belum komprehensif dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat; (iii) terbatasnya responsivitas bantuan sosial pada kondisi darurat, kebencanaan, dan perubahan iklim; (iv) program masih terfragmentasi dan belum optimal dalam menjangkau penduduk yang paling rentan; (v) proses penyaluran bantuan sosial yang belum terdigitalisasi dan berorientasi pada kebutuhan penduduk miskin dan rentan; (vi) belum ada mekanisme graduasi atau terminasi untuk setiap program; (vii) akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar berkualitas yang belum merata; (viii) belum inklusifnya lingkungan dan pertumbuhan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan; serta (ix) pengendalian, pendampingan, dan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan sosial yang belum optimal.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Untuk memperluas dan meningkatkan manfaat program perlindungan sosial, dilakukan pendekatan terintegrasi melalui kartu kesejahteraan dengan tujuan memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Pendekatan ini mencakup (i) perencanaan, penargetan, dan pelaksanaan bantuan sosial yang terpadu menggunakan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi yang terbangun dari berbagai basis data dan berperan sebagai data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk akurasi sasaran penduduk miskin; (ii) penyesuaian manfaat dan mekanisme program yang lebih komprehensif untuk memenuhi kebutuhan dan kerentanan spesifik berbagai kelompok sasaran, termasuk bantuan pengurangan beban yang dibutuhkan penduduk miskin dan rentan, serta layanan dan rehabilitasi sosial yang diperlukan anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; (iii) perluasan sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penguatan kapasitas dan ketahanan komunitas dari tingkat desa dalam menghadapi berbagai kerentanan, yang berbasis pemanfaatan data melalui SEPAKAT dan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi, serta peningkatan adaptabilitas bantuan sosial untuk memastikan responsivitas layanan dan bantuan sosial terhadap transisi besar dan risiko katastropik, seperti bencana dan perubahan iklim; (iv) pelaksanaan Kartu Kesejahteraan dengan mekanisme yang terintegrasi, di antaranya dengan penggunaan satu data dalam pensasaran, tata kelola kepesertaan melalui *dashboard* bersama Kartu Kesejahteraan, penyaluran yang terintegrasi menggunakan *central mapper*, serta mekanisme graduasi terpadu lintas program bantuan sosial untuk mendorong kemandirian penerima manfaat Kartu Kesejahteraan; (v) transformasi penyaluran bantuan sosial yang terdigitalisasi dan berorientasi pada kebutuhan penduduk miskin dan rentan, dengan perluasan metode, kanal, dan instrumen penyaluran; (vi) pengembangan dan pelaksanaan graduasi dengan proses dan kriteria kelayakan yang jelas, konsisten, dan terstandar berbasis satu data terpadu; (vii) pengembangan sarana dan prasarana, infrastruktur jaringan telekomunikasi, serta teknologi guna memperluas aksesibilitas terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar; (viii) penguatan inklusivitas dan afirmasi bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia, terutama dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan beban; serta (ix) pengembangan mekanisme pemantauan distribusi serta pemanfaatan bantuan sosial agar dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari konsumsi yang tidak produktif seperti rokok, minuman keras, dan perjudian, serta memastikan keterkaitan antara program kartu kesejahteraan, kartu usaha, dan layanan dasar yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga untuk menciptakan intervensi yang holistik dan optimal.

KP **Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan**

Sasaran dan Indikator

Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi

1. Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai sebesar 80% pada 2029;
2. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan sebesar 25% pada 2029;
3. Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera sebanyak 1,5 juta jiwa/tahun pada 2029.

Indikasi *Highlight* Intervensi

- Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat;
- Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN;
- Penerima program indonesia pintar;
- KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako.

Instansi Pelaksana

Instansi Pengampu:
Kemen Sosial.

Institusi Kontributor:
- Kemen Dalam Negeri;
- Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Kemen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Kemen Pertanian;
- Kemen Kesehatan;
- Kemen Agama;
- Kemen Lingkungan Hidup;
- Kemen Kehutanan;
- Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Kemen Transmigrasi;
- Kemen PPPA;
- Kemen ESDM;
- Badan Pangan Nasional;
- BNPB;
- Pemerintah daerah;
- Badan Usaha

Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh Indonesia

(b) Kartu Usaha Afirmatif

Permasalahan dan tantangan. Kartu Usaha Afirmatif (KUA) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, masih terdapat sejumlah tantangan yaitu (i) intervensi pemberdayaan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (ii) pelaksanaan program pemberdayaan belum terstandar antar Kementerian/Lembaga; (iii) penargetan program belum tepat sasaran dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan; (iv) penduduk miskin dan rentan belum termotivasi dan teroptimalkan kompetensi berwirausahanya; (v) kapasitas program dalam meningkatkan kemampuan kerja masih belum optimal; serta (vi) rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pemberdayaan.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan dampak program pemberdayaan ekonomi, implementasi Kartu Usaha Afirmatif difokuskan pada strategi antara lain (i) memperkuat proses asesmen terhadap kebutuhan pemberdayaan penduduk miskin dan rentan, serta mengembangkan mekanisme pemberdayaan ekonomi afirmatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan; (ii) menyusun dan mengimplementasikan standar dan tahapan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang afirmatif sebagai pedoman dan acuan program pemberdayaan dalam Kartu Usaha Afirmatif, termasuk mekanisme graduasi yang terstandar untuk mendorong dan menjaga kesinambungan kesejahteraan penerima manfaat; (iii) menentukan target penerima program dan menilai potensi penerima Kartu Usaha Afirmatif dari penduduk miskin dan rentan berdasarkan satu data yang akurat dan termutakhirkan melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi, termasuk memperkuat kapasitas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penargetan tepat sasaran menggunakan SEPAKAT; (iv) mengembangkan

mekanisme untuk peningkatan motivasi dan kapasitas pelaku usaha miskin dan rentan, melalui pelatihan inklusif dan berbasis kompetensi, penguatan kemampuan manajemen dan wirausaha, serta pendampingan intensif dalam mengakses pasar dan pembiayaan; (v) mengembangkan kualitas program vokasi dan pelatihan kerja agar sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja, inklusif terhadap pencari kerja miskin dan rentan, serta terhubung ke layanan pencari kerja yang inklusif dan afirmatif, khususnya bagi penduduk miskin, penduduk di yang tinggal di kawasan 3T, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, serta kelompok marginal dan rentan lainnya; serta (vi) meningkatkan integrasi dan keterkaitan program-program dalam Kartu Usaha Afirmatif untuk dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan swasta dalam peningkatan kesinambungan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

KP **Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif**

Sasaran dan Indikator

Meningkatnya kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif
Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak 3 juta jiwa/tahun pada 2029.

Indikasi *Highlight* Intervensi

- Peningkatan Kemandirian Usaha KUPS;
- KPM Kewirausahaan Sosial yang Mendapatkan Pendampingan Usaha;
- Warga KAT yang Diberdayakan;
- Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
- Layanan Validasi dan Diverifikasi Pupuk;
- Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi.

Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu
Kementerian Sosial

Institusi Kontributor

- Kemen UMKM;
- Kemen Keuangan;
- Kemen Kehutanan;
- Kemen Kelautan dan Perikanan;
- Kemen Ketenagakerjaan;
- Kemen Pemuda dan Olahraga;
- Kemen Pertanian;
- Kemen P2MI/BP2MI;
- Kemen PPPA;
- Badan Usaha

Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh Indonesia

(c) Kartu Usaha Produktif

Kartu Usaha Produktif (KUP) diharapkan menjadi solusi strategis untuk memastikan keberlanjutan peningkatan ekonomi masyarakat miskin dan rentan yang telah berhasil naik kelas menjadi kelompok menuju kelas menengah (*aspiring middle class*) dan kelas menengah (*middle class*). Melalui dukungan yang lebih terfokus pada usaha produktif, program ini bertujuan mendorong usaha mereka agar dapat bertahan, berkembang, dan memiliki daya saing, sehingga mengurangi risiko kembali jatuh ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Kartu Usaha Produktif juga dirancang untuk memperkuat usaha bagi kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah agar menciptakan wirausaha produktif yang inovatif, memiliki daya saing tinggi, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi dalam menekan angka pengangguran tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan dan tantangan. Kartu Usaha Produktif dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Tantangan tersebut dari sisi tata kelola mencakup (i) tidak adanya pedoman yang menjadi standar dalam pelaksanaan program kewirausahaan; (ii) belum optimalnya pemanfaatan Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai rujukan penyaluran program berbasis data, khususnya yang ditargetkan untuk meningkatkan proporsi penduduk kelas menengah; serta (iii) kurangnya koordinasi antara program pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, terdapat juga tantangan dari sisi kapasitas dan daya saing usaha antara lain (i) kurangnya program pendampingan yang terarah membuat usaha mikro, kecil, dan menengah sulit mendapat sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, dan teknologi; dan (ii) minimnya pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing usaha.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam rangka penguatan usaha bagi kelompok masyarakat kelas menengah dan menuju kelas menengah, dua langkah penyelesaian yang dilakukan adalah (i) penatakelolaan kartu usaha; dan (ii) peningkatan kapasitas dan daya saing usaha. Pelaksanaan penatakelolaan kartu usaha dilakukan melalui strategi (i) penyusunan standardisasi program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk pelaku usaha dari kalangan menuju kelas menengah dan kelas menengah; (ii) pemanfaatan Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terintegrasi dalam Sistem Registrasi Sosial Ekonomi sebagai basis data rujukan pelaku usaha penerima manfaat program untuk meningkatkan ketepatan sasaran; (iii) pengembangan sistem informasi Kartu Usaha sebagai alat untuk mengkurasi penerima Kartu Usaha Produktif dan memantau perkembangan usaha penerima manfaat; dan (iv) koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan optimalisasi program Kartu Usaha Produktif lintas pemangku kepentingan. Adapun pelaksanaan peningkatan kapasitas dan daya saing usaha dilakukan melalui strategi (i) pelaksanaan pendampingan usaha, seperti sertifikasi dan standardisasi, akses pasar dan pembiayaan, serta penerapan inovasi dan teknologi, yang terstruktur dan berjenjang; serta (ii) pelatihan untuk penguatan kapasitas bagi tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah.

KP Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif

Sasaran dan Indikator

Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah

- Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap target mencapai 6,3% pada tahun 2029

Indikasi *Highlight* Intervensi

- Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Produktif;
- Pelatihan Vokasi Bidang Industri dan Jasa;
- Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual produk kreatif;
- Penyedia UMK yang On Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital;
- Inisiatif Baru Fasilitasi Kemitraan Pemasaran.

Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh Indonesia

Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu
Kementerian UMKM

Institusi Kontributor

- Kemenko Pemberdayaan Masyarakat;
- Kemen Koperasi;
- Kemen Perindustrian;
- Kemen Ketenagakerjaan;
- Kemen Perdagangan;
- Kemen Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
- Kemen Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
- Kemen Keuangan;
- Kemen Komunikasi dan Digital;
- Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Kemen Kelautan dan Perikanan;
- Kemen ESDM;
- Badan Standardisasi Nasional;
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pemerintah Daerah.

(2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

(a) Pembangunan infrastruktur desa

Permasalahan dan tantangan. Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan terkait penyediaan infrastruktur hingga skala desa dibandingkan dengan negara lainnya. Tantangan penyediaan infrastruktur di desa adalah bervariasinya pemenuhan layanan dasar tingkat desa seperti dalam sektor air minum aman, sanitasi aman, hunian layak, dan kesehatan. Secara agregat kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan layanan dasar perkotaan, dengan data persentase desa dengan (i) akses air minum aman 18,9 persen; (ii) sanitasi aman 4,77 persen; (iii) layanan kesehatan 25,99 persen; (iv) rumah layak huni 24,62 persen. Oleh karena itu, terdapat urgensi mempercepat pemenuhan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur desa di seluruh desa, termasuk desa pada 30 indikasi kawasan perdesaan prioritas, sesuai kebutuhan, prioritas dan status masing-masing desa (pengukuran berdasarkan Indeks Desa).

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam mengatasi permasalahan dan tantangan pada pembangunan infrastruktur di desa, disusun skema penyelesaian permasalahan sebagai berikut (i) pembinaan pemerintah desa tentang prioritas pemanfaatan Dana Desa yang digunakan untuk pemenuhan infrastruktur perdesaan; (ii) memfasilitasi peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik

kewilayahan serta peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa; (iii) penyediaan infrastruktur desa yang terintegrasi dengan infrastruktur supra desa dalam pemenuhan layanan dasar maupun aktivitas ekonomi di desa; (iv) peningkatan komitmen supra desa (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota) serta pemangku kepentingan terkait lainnya mengenai urgensi pembangunan/pengelolaan infrastruktur desa secara terintegrasi dan komprehensif; (v) penguatan fungsi pemerintah daerah melalui pembinaan dan pengawasan pembangunan desa, penetapan peraturan daerah/ keputusan kepala daerah terkait pembangunan desa, serta konsolidasi kebutuhan dan intervensi pembangunan desa. Seluruh langkah pemenuhan infrastruktur desa dilaksanakan di seluruh desa di Indonesia, dengan berbagai sumber pendanaan.

KP Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa

Sasaran dan Indikator

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa

1. Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman sebesar 30% pada 2029
2. Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman sebesar 12% pada 2029
3. Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 26,65% pada 2029
4. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni sebesar 25,61% pada 2029

Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

- Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Institusi Kontributor

- Kemen Pekerjaan Umum;
- Kemen Komunikasi dan Digital;
- Kemen ESDM;
- Kemen Kesehatan;
- Kemen Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- Pemerintah Desa.

Indikasi *Highlight* Intervensi

- Infrastruktur air minum berbasis masyarakat;
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 50-100 SR;
- Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
- Sarana Puskesmas, Pustu dan Posyandu (SOPHI);
- OM akses internet& OM BTS 4G /lastmile;
- Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan
- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan
- Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi Listrik

Indikasi Lokasi Prioritas

Lokasi pembangunan infrastruktur desa termasuk penyediaan/revitalisasi hunian dilakukan pada 75.265 desa dengan prioritas pada kabupaten dan kota yang termasuk ke dalam:

1. Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN;
2. Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan;
3. 30 Kawasan Perdesaan Prioritas;
4. Desa-desa sangat tertinggal dan tertinggal prioritas.

(b) Penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi Z

Permasalahan dan tantangan. Permasalahan dan tantangan dalam penyediaan rumah bersanitasi baik dihadapkan pada pemenuhan 100 persen akses rumah tangga terhadap rumah yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman (air minum aman, air limbah, dan persampahan) pada tahun 2045. Akses rumah layak huni secara nasional hanya sebanyak 65,25 persen, dengan sebaran 63,83 persen berada di perdesaan dan 66,26 persen berada di perkotaan (BPS, 2024). Dengan demikian, masih terdapat 34,75 persen rumah

tangga yang tinggal di hunian tidak layak. Dengan kondisi sebanyak 82,47 persen rumah dibangun secara mandiri yang mana sebanyak 37,10 persen diantaranya tidak layak huni (BPS, 2022). Lebih lanjut, aspek ketahanan bangunan dan kondisi sanitasi yang buruk menjadi faktor utama penyebab ketidaklayakan hunian tersebut. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara komprehensif maka akan menyebabkan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh yang mana berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024 diperkirakan mencapai 77 ribu hektar. Sementara itu, masih terdapat kebutuhan rumah milik untuk sekitar 13,5 persen rumah tangga, termasuk diantaranya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan harga rumah yang tidak sebanding dengan peningkatan kemampuan finansial masyarakat juga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses rumah layak huni.

Tantangan ke depan dalam penyediaan rumah adalah memastikan ketercapaian target pemenuhan akses rumah layak huni, baik di perdesaan maupun di perkotaan dengan intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Pada tahun 2029, penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan akan diupayakan untuk mencapai target 74 persen. Namun, dalam pelaksanaan program perumahan terdapat tantangan diantaranya (i) masih rendahnya penyediaan akses rumah layak huni yang terjangkau dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar permukiman dan konektivitas sehingga berpotensi menimbulkan kawasan permukiman kumuh; (ii) terbatasnya kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam penyelenggaraan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah; dan (iii) terbatasnya fasilitas pembiayaan perumahan yang disertai penjaminan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap untuk pembelian rumah pertama serta pembiayaan bagi masyarakat yang membangun maupun meningkatkan kualitas rumahnya secara mandiri.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Upaya meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas hunian yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan, jalan, drainase dan transportasi publik). Setiap intervensi akan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang didukung oleh basis data perumahan. Pendekatan berbasis kinerja akan menjadi landasan pelaksanaan program bersama dengan Pemerintah Daerah dan mitra pembangunan lainnya. Untuk itu, perluasan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi aspek krusial dalam pengembangan skema kolaborasi program nasional dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa.

Skenario pelaksanaan penyediaan rumah akan dipenuhi dengan skema sebagai berikut

(i) Perkotaan, meliputi (1) penyediaan hunian tapak dan vertikal untuk kepemilikan rumah pertama yang didukung dengan fasilitasi kemudahan pembiayaan perumahan; (2) penyediaan hunian sewa terutama vertikal melalui skema pembiayaan alternatif (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Land Value Capture, dan sebagainya) yang disertai dengan subsidi sewa; (3) penyediaan maupun optimalisasi lahan melalui konsolidasi tanah vertikal dan pengembangan kawasan permukiman berbasis *transit oriented development*; dan (4) penanganan permukiman kumuh secara terpadu, diutamakan peremajaan permukiman kumuh;

(ii) Perdesaan, meliputi (1) pembangunan hunian baru, termasuk pengembangan perumahan berkelompok; (2) peningkatan kualitas hunian; (3) stimulan pembiayaan dan bantuan konsultasi teknis melalui klinik rumah untuk pembangunan atau peningkatan kualitas hunian yang dilakukan secara mandiri; (4) penyediaan skema kemudahan

pembiayaan secara bertahap diantaranya melalui mikro kredit dan Kredit Pemilikan Rumah Swadaya; serta (5) penanganan permukiman kumuh mencakup pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa akan diposisikan sebagai pemangku kepentingan utama;

(iii) Penguatan ekosistem perumahan dan perbaikan tata kelola perumahan untuk memastikan intervensi perumahan berujung menjadi akses, meliputi (1) penegakan aspek tata ruang dan keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim; (2) kemudahan perizinan; (3) perlindungan konsumen; (4) peningkatan kepastian bermukim; (5) pengembangan pendanaan alternatif; (6) penegakan kebijakan hunian berimbang; dan (7) insentif fiskal dengan kondisi tertentu;

(iv) Optimalisasi peran setiap pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan perumahan seperti pelaksana dan pengelola program pemerintah terkait perumahan, pengelola dana Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta berperan dalam membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan.

KP Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)

Sasaran dan Indikator

Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU*:

1. Jumlah rumah baru yang terbangun yaitu 1,7 juta unit pada tahun 2029
2. Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya yaitu 5,3 juta unit pada tahun 2029
3. Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU yaitu 2 juta unit pada tahun 2029**

*target didukung oleh pendanaan APBN dan Non-APBN
**mendukung target pembangunan baru dan peningkatan kualitas hunian

Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Institusi Kontributor
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Sosial
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Transmigrasi
- Pemerintah daerah
- Badan Usaha

Indikasi *Highlight* Intervensi

1. Pembangunan Baru
- Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Miskin dan Rentan;
- Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Rumah Khusus.

2. Peningkatan Kualitas
- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan;
- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Pengembangan Kawasan Permukiman.

3. PSU Rumah Umum
- Bantuan PSU Bidang Perumahan

Indikasi Lokasi Prioritas

Intervensi dilaksanakan pada seluruh provinsi dan diutamakan pada provinsi dengan kategori akses Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sedang sampai dengan sangat tinggi menurut data Regsosek yang memerlukan pembangunan baru dan peningkatan kualitas:
- Pembangunan baru pada16 provinsi dengan kategori RTLH sedang-sangat tinggi: Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta, Sumut, Sumsel, Lampung, Jambi, Banten, NTT, Sulsel, Aceh, Sumbar, Riau, NTB, Kalsel
- Peningkatan kualitas pada16 provinsi dengan kategori RTLH sedang-sangat tinggi: Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Banten, NTT, Sulsel, Aceh, Sumbar, Riau, NTB, Kalbar, Kalsel

3.7 Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi potensi yang dimiliki oleh generasi penerus dari berbagai hambatan dan ancaman.

Langkah-langkah reformasi ini diharapkan dapat menjamin terciptanya situasi yang kondusif bagi jalannya pembangunan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

3.7.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 3.10
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional				
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,73
2	Indeks Persepsi Korupsi	34 (2023)	38	43,7
3	Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)	0,51	0,55
4	Indeks Integritas Nasional	70,97 (2023)	74,52	77,57
5	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00—64,99	71,00—72,99
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani				
6	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98	71,38	77,26
7	Indeks Pelayanan Publik	3,78 (2023)	3,68[a)]	3,80
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79 (2023)	3,00	2,00 [b)]
9	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93	93,5	95,5

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba				
10	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73 (2023)	1,70	1,60
Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan				
11	*Return on Asset* (ROA) BUMN (%)	3,14 (2023)	3,21	3,42
Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan				
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	12,82	12,36	13,75—18,00
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,07	10,24	11,52—15,00
Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan				
14	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,5±1,0	2,5±1,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

Keterangan: a) Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan sehingga target nasional disesuaikan, b) instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target nasional disesuaikan.

3.7.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional

Isu

- Meningkatnya tren kasus korupsi yang didominasi pada sektor PBJ (kenaikan mencapai **90%** dari tahun 2022 ke tahun 2023)
- Kondisi hiper-regulasi, sepanjang tahun 2019-2023 terdapat **5.267 Peraturan Menteri** yang diterbitkan.
- Belum optimalnya proses **penanganan perkara**
- **Rendahnya kepatutan hukum** masyarakat dan penyelenggara negara
- **Biaya politik tinggi, pendanaan parpol** belum memadai, dan **tata kelola parpol** belum optimal
- Penyatuan **pengaturan terkait pemilu** dan pemilihan dalam satu buku yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum dalam kontestasi elektoral serta amanat MK yang final dan mengikat
- Skor **Indeks Akses terhadap Keadilan** mengalami penurunan pada tahun 2021 (53,6)

Arah Kebijakan

- Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu
- Reformasi Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum
- Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal*

Sasaran 2

Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani

Isu

- **Disparitas kesejahteraan** ASN;
- **Keterpaduan antara layanan publik belum optimal**
- **Akses pelayanan publik** belum memadai;
- Penerapan **sistem merit belum optimal**;
- Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih **terfragmentasi dan tidak efektif**
- **Tata kelola pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri, termasuk PMI, yang belum terintegrasi**
- Belum optimalnya **hubungan pemerintah pusat dan daerah**
- **Kesenjangan kapasitas pemerintah daerah** dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan daerah
- **Tingginya ketergantungan daerah terhadap TKD** dengan rata-rata proporsi TKD terhadap total pendapatan daerah mencapai 83% (2018-2024)
- **Rendahnya belanja modal pemerintah daerah**, dengan rata-rata proporsi belanja modal hanya mencapai 17,04% dari total belanja daerah (2018-2024)

Arah Kebijakan

- Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN
- Pemerintah Digital
- Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
- Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia

Sasaran 3

Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

Isu

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 sebesar **1,73%** atau sekitar **3,33 juta jiwa**, angka relapse mencapai lebih dari 70%, ditambah dengan munculnya banyak NPS serta motif baru peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Arah Kebijakan

Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Sasaran 4

Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan

Isu

- **Rendahnya daya saing BUMN** (Jumlah BUMN yang masuk peringkat dunia masih di bawah 10)
- **Rasio BUMN dengan kategori sehat masih perlu ditingkatkan** (rasio BUMN dengan kategori sehat 77,10% pada tahun 2023)
- Belum meratanya **kemampuan BUMN dalam menghasilkan dividen**
- Masih banyaknya BUMN yang **merugi** dalam menjalankan penugasan

Arah Kebijakan

Peningkatan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara

Sasaran 5

Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan

Isu

Kompleksnya tantangan kebijakan fiskal di Indonesia dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan

- Rendahnya pendapatan negara disebabkan masih terdapatnya kesenjangan, mencakup *administrasi gap* maupun *policy gap*
- Kualitas dan *size* belanja negara belum optimal
- Belum optimalnya dukungan pembiayaan utang dan non-utang untuk mendorong sasaran pembangunan

Arah Kebijakan

- Optimalisasi Pendapatan Negara
- Optimalisasi Belanja Negara
- Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan

Sasaran 6

Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Isu

Fluktuasi inflasi dari sisi domestik banyak dipengaruhi oleh **fluktuasi komponen Inflasi Harga Bergejolak** yang secara historis tercermin dari realisasi tahun 2020-2023 secara berturut-turut yaitu 3,62%, 3,20%, 5,61%, dan 6,37%. Kondisi tersebut disebabkan permasalahan struktural penyebab inflasi di Indonesia yang banyak terjadi di sisi hulu dan sifatnya multi-sektor (pasokan, teknologi manajemen pasca panen, infrastruktur perdagangan dan distribusi, serta dan kualitas data).

Arah Kebijakan

Pengendalian Inflasi

3.7.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 7, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

(1) Reformasi politik dan tata kelola pemilu diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (i) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (ii) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

(2) Reformasi hukum diarahkan untuk mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas, akses keadilan yang merata, serta masyarakat yang patut hukum yang dilakukan melalui (a) mendirikan Pusat Legislasi Nasional, (b) transformasi akses terhadap keadilan, (c) penguatan budaya hukum, serta (d) pembangunan hukum sektor strategis.

(3) Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang diarahkan untuk mewujudkan sistem anti korupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang dilakukan melalui (a) penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis, (b) pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya anti korupsi, (c) pencegahan tindak pidana korupsi, serta (d) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(4) Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum diarahkan untuk mewujudkan lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel dilakukan melalui (a) penguatan kelembagaan hukum serta (b) penerapan dan penegakan hukum.

(5) Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal* diarahkan untuk mewujudkan efektivitas dan integrasi kebijakan bidang penuntutan di Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung sebagai pengacara negara melalui (a) penguatan kelembagaan Kejaksaan serta (b) peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

(6) Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar terciptanya upaya holistik dan terintegratif dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dilaksanakan melalui (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah; (b) optimalisasi layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika; (c) meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa; (d) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba; (e) meningkatkan kemampuan penyelidikan intelijen pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta (f) optimalisasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

(7) Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara sesuai prinsip meritokrasi melalui (a) peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja aparatur sipil negara, (b) penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara, (c) penerapan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang mendorong kemudahan akses belajar, (d) digitalisasi manajemen aparatur sipil negara, (e) penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara, serta (f) penerapan dan evaluasi kebijakan manajemen aparatur sipil negara.

(8) Pemerintah digital diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien melalui (a) penguatan tata kelola pemerintah digital, (b) penguatan teknologi pemerintah digital, (c) pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, (d) transformasi digital layanan publik prioritas, serta (e) penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.

(9) Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui (a) tata kelola pelayanan publik, (b) penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta (c) sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional.

(10) Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah yang dilakukan melalui (a) harmonisasi hubungan pusat dan daerah, (b) penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah daerah, serta (c) penguatan fondasi keuangan daerah.

(11) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara dilakukan melalui (a) peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara dan (b) peningkatan efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penugasan Pemerintah. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Badan Usaha Milik Negara perlu memperkuat kolaborasi baik antar Badan Usaha Milik Negara maupun dengan pihak swasta.

Peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara akan difokuskan pada peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan penguatan peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis pembangunan. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dilakukan melalui penggabungan Badan Usaha Milik Negara dalam sebuah *superholding*, restrukturisasi, pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi penggunaan infrastruktur digital. Penguatan peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis pembangunan difokuskan pada

ekonomi berkelanjutan, ketersediaan pangan, swasembada energi, transformasi digital termasuk dukungan pengembangan super platform digital, infrastruktur pendukung konektivitas, pariwisata dan budaya, serta pembiayaan sektor strategis. Badan Usaha Milik Negara juga diarahkan untuk mendukung penciptaan sektor keuangan yang kondusif, serta meningkatkan profesionalisme.

Peningkatan efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam penugasan pemerintah dilakukan melalui efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara pada program perintis dan penguatan peran Badan Usaha Milik Negara dalam tanggung jawab sosial lingkungan termasuk penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih, dukungan penyediaan layanan dasar, serta membangun kemitraan dengan swasta untuk membuka program beasiswa dan magang bagi lulusan di perguruan tinggi dan sekolah kejuruan. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara juga didorong untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas untuk mendukung pembangunan yang inklusif.

(12) Optimalisasi pendapatan negara diarahkan untuk mewujudkan (a) tercapainya peningkatan penerimaan perpajakan yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi dan (b) terwujudnya peningkatan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dan tidak bergantung pada sumber daya alam. Kegiatan prioritas untuk mendukung sasaran tersebut meliputi (i) ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan (ii) intensifikasi penerimaan negara bukan pajak.

(13) Optimalisasi belanja negara diarahkan untuk mewujudkan dukungan belanja negara yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan. Kegiatan prioritas untuk mendukung sasaran tersebut meliputi (a) peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat dan (b) optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah.

(14) Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan untuk mewujudkan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Kegiatan prioritas untuk mendukung sasaran tersebut meliputi (a) optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang yang menjaga kesinambungan fiskal serta (b) ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan non-utang yang inovatif.

(15) Pengendalian inflasi difokuskan pada upaya pengendalian komponen inflasi harga bergejolak melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

(16) Pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia, diwujudkan melalui (a) penguatan pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia dan (b) pelindungan dan pelayanan Warga Negara Indonesia, termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri yang integratif.

Pencapaian Prioritas Nasional 7 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: (1) menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara; dan (2) mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23 persen. Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui kegiatan prioritas:

(1) Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total *Reward* Berbasis Kinerja ASN

Aparatur sipil negara merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur sipil negara bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Pelayanan publik yang baik akan terlaksana apabila seluruh aparatur sipil negara, termasuk yang membidangi pelayanan dasar seperti guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam kondisi sejahtera.

Permasalahan dan tantangan. Beberapa persoalan terkait kesejahteraan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, antara lain (a) besaran gaji pokok belum didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kebutuhan hidup layak, serta bobot jabatan dan kompetensi. Besaran gaji pokok hanya didasarkan atas level kepangkatan dan masa kerja. Hal ini menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang diterima pegawai; (b) disparitas tunjangan kinerja antar aparatur sipil negara di berbagai instansi/lembaga, yang disebabkan karena ketiadaan standar dalam pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan yang berakibat prinsip keadilan internal tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga menghambat mobilitas talenta; dan (c) sistem remunerasi aparatur sipil negara belum memenuhi prinsip *competitiveness* dengan sektor swasta.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam jangka pendek, perbaikan kesejahteraan dapat dilakukan dengan menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama untuk guru-dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dalam jangka menengah, kesejahteraan aparatur sipil negara akan diarahkan pada konsep total *reward* yang mengedepankan prinsip keadilan, kelayakan, dan kompetitif.

Upaya peningkatan kesejahteraan yang layak bagi pegawai aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia perlu dilakukan secara bertahap. Pertama, penyelesaian proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghargaan dan Pengakuan Aparatur Sipil Negara serta evaluasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kedua, penataan dan konsolidasi data aparatur sipil negara serta pengayaan data yang meliputi data kelas jabatan, data gaji, dan tunjangan untuk dapat digunakan dalam perumusan kebijakan kesejahteraan aparatur sipil negara. Ketiga, efisiensi belanja barang dan belanja modal untuk memastikan alokasi anggaran yang berkualitas (*spending better*) dan meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien. Keempat, asesmen kepegawaian melalui survei penggajian, evaluasi jabatan, penataan sistem kepangkatan, dan evaluasi sistem penilaian kinerja pegawai sebagai prasyarat agar perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan rasional, berlandaskan sistem merit, serta memastikan adanya keadilan internal (*internal equity*).

Adapun *highlight* intervensi dari menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara termuat dalam infografis di bawah ini.

KP **Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep *Total Reward* Berbasis Kinerja ASN**

Sasaran dan Indikator

Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif

- Persentase Instansi pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "Menengah" 54% pada 2029

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi
2. Kementerian Keuangan
3. Badan Kepegawaian Negara

Indikasi Lokasi Prioritas

Nasional

Indikasi *Highlight* Intervensi

- Penerapan Manajemen Penghargaan dan Pengakuan bagi ASN
- Penerapan Sistem Manajemen Kinerja ASN

(2) Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal memadai yang dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Salah satu kunci untuk meningkatkan ruang fiskal memadai adalah peningkatan pendapatan negara. Studi komparatif dengan beberapa negara memperlihatkan bahwa untuk menjadi negara maju, dukungan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara sangat diperlukan, baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak.

Rendahnya pendapatan negara di Indonesia saat ini disebabkan masih terdapatnya kesenjangan mencakup aspek administrasi (*administration gap*) maupun kebijakan (*policy gap*) yang memerlukan transformasi tata kelola kelembagaan sebagai *enabler* untuk optimalisasi pendapatan negara.

Dalam konteks perpajakan, pembenahan tata kelola kelembagaan diperlukan untuk dapat mengimplementasikan *core tax* secara terintegrasi, meningkatkan pelayanan dan kepatuhan perpajakan, serta mewujudkan inisiatif berbagai kebijakan penerimaan perpajakan yang adil, berdaya saing, efisien, dan optimal. Terkait penerimaan negara bukan pajak, pembenahan tata kelola diperlukan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dengan tetap menjaga kualitas layanan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas, mendorong pendapatan dari dividen Badan Usaha Milik Negara, optimalisasi aset, serta optimalisasi sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam lima tahun ke depan, tahapan penataan kelembagaan pendapatan negara akan dilaksanakan melalui (a) perencanaan dan persiapan, yang mencakup reformasi administrasi dan penyempurnaan proses bisnis; (b) internalisasi tata kelola/sistem baru untuk efektivitas administrasi dan kelembagaan; serta (c) implementasi secara menyeluruh disertai reviu atas efektivitas tata kelola/sistem pengumpulan pendapatan negara terhadap pencapaian target rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.

Adapun *highlight* intervensi dari Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen termuat dalam infografis di bawah ini.

KP **Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan**

Sasaran dan Indikator

Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak

- Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi 90%% pada 2029
- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi 100% pada 2029
- Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara 100% pada 2029

Instansi Pelaksana

Kementerian Keuangan

Indikasi Lokasi Prioritas

Nasional

Indikasi *Highlight* Intervensi

- Implementasi sistem informasi inti perpajakan (*core tax*) dan interoperabilitas dengan sistem informasi *stakeholder* terkait, menuju *data-driven*
- Simplifikasi proses bisnis dan kelembagaan serta penguatan kebijakan
- Pembenahan tata kelola ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan (termasuk *sin tax)*
- Peningkatan kepatuhan perpajakan

KP **Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Sasaran dan Indikator

Terciptanya dukungan PNBP yang optimal
- Rasio capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan 90-100% pada 2029

Instansi Pelaksana

1. Kementerian Keuangan
2. K/L terkait lainnya

Indikasi *Highlight* Intervensi

- Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Migas
- Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Nonmigas yang Bernilai Tambah Tinggi
- Pembenahan Tata Kelola Penerimaan Non-SDA
- Pembenahan Tata Kelola Pengelolaan Aset
- Inovasi Layanan Berbasis IT untuk Meningkatkan Kepatuhan

Indikasi Lokasi Prioritas

Nasional

3.7.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan" sebagai berikut:

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan mengatur terkait pembaharuan substansi terhadap proses bisnis pailit khususnya penataan terhadap aspek-aspek hubungan perikatan dalam hal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Rancangan Undang-Undang ini mendukung sasaran pembangunan guna meningkatkan kepercayaan investor.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Penyusunan Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum bertujuan untuk mengatur kembali terkait ruang lingkup penerima bantuan hukum, pendanaan, serta pengaturan pemberian bantuan hukum dalam bentuk penyuluhan hukum. Rancangan Undang-Undang ini juga akan mengatur terkait persyaratan yang belum memadai untuk mendorong keberadaan pemberi bantuan hukum yang efektif, serta fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan orang atau kelompok rentan yang menghadapi masalah hukum.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada Undang-Undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan diantaranya: (a) masih terdapat ketentuan United Nations Convention Against Corruption yang belum di adopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, dan (d) prosedur ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

(4) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha bertujuan untuk menyatukan pengaturan pembentukan badan usaha yang saat ini tersebar di beberapa undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan lainnya. Selain itu, Rancangan Undang-Undang ini juga bertujuan untuk memodernisasi pembentukan badan usaha guna mengakomodasi perkembangan bisnis digital dan aktivitas ekonomi lintas batas.

(5) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sangat penting mengingat adanya kebutuhan masyarakat akan jaminan atas benda bergerak yang efisien, serta belum adanya produk hukum terintegrasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait penjaminan benda bergerak. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak bertujuan mengintegrasikan berbagai jenis jaminan kebendaan yang saat ini tersebar pengaturannya seperti jaminan fidusia, gadai, dan resi gudang.

(6) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan regulasi ini diperlukan untuk mendukung upaya transformasi tata kelola regulasi. Beberapa hal yang perlu diatur yaitu (a) penguatan sinergisitas tata kelola regulasi di tingkat pusat dan daerah; (b) penguatan pemantauan dan evaluasi regulasi melalui *self assessment* oleh kementerian/lembaga; (c) penguatan tata kelola peraturan menteri, peraturan lembaga, dan sejenisnya; serta (d) pengaturan komprehensif mengenai metode omnibus.

(7) Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional sangat diperlukan untuk menetapkan arah pembinaan hukum nasional yang mampu mengantisipasi tantangan global di masyarakat secara efektif. Rancangan Undang-Undang ini akan mencakup program pembinaan hukum nasional yang komprehensif, baik pada tahap pembentukan maupun pelaksanaan hukum, serta bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan setiap individu, badan hukum, atau badan publik yang melakukan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

(8) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diperlukan untuk perbaikan regulasi dan tata kelola penyelesaian sengketa nonlitigasi yang dapat mengakomodasi perkembangan bisnis lintas batas untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dengan penegakan hukum yang cepat dan berkepastian hukum.

Kebutuhan kelembagaan pada Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan" sebagai berikut:

(1) Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi

Kerangka kelembagaan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi mendukung sasaran pembangunan nasional melalui (a) menghilangkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga serta memastikan koordinasi yang efektif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; (b) menyederhanakan birokrasi dan penyempurnaan proses bisnis pembentukan regulasi mulai dari perencanaan hingga publikasi, *monitoring*, dan evaluasi; serta (c) mencegah terjadinya over regulasi akibat pembentukan regulasi di tiap sektor tanpa penajaman yang memadai.

3.8 Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan nilai dan warisan budaya sebagai landasan transformasi pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Toleransi antarumat beragama diwujudkan dalam tindakan nyata dengan menghargai perbedaan serta menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kekayaan alam dan budaya yang melimpah merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, nilai dan warisan budaya perlu dikembangkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029 Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan selaras dengan lingkungan alam dan budaya, serta memperkukuh toleransi antarumat beragama guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.8.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025–2029 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel 3.11
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
1.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	65,49	68,13
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13 (2023)	58,39	60,70
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77	78,25
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
4.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137	0,135

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

3.8.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Isu

- **Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama**, ditunjukkan dengan potensi zakat di Indonesia yang besar (Rp327,6 Triliun, 2023), namun realisasi pengumpulan zakat masih belum optimal (Rp32,32 Triliun, 2023).
- **Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang tecermin dari masih maraknya praktik korupsi [Indonesia peringkat ke-115 dari 180 negara dengan skor 34 (Indeks Persepsi Korupsi, 2023)].
- **Kurangnya perhatian terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan**, khususnya dalam aspek kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil [Indeks Pembangunan Masyarakat 62,85 (2021)].
- **Masih kurangnya jaminan pelindungan terhadap wilayah adat dan hutan adat**, ditunjukkan dengan masih terbatasnya wilayah adat yang tersertifikasi (5,99 persen dari total 7,51 juta hektare wilayah adat) dan pengakuan hutan adat [8 persen dari total 3,4 juta hektare potensi hutan adat (BRWA, 2024)].
- **Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global**, ditandai dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba (3,3 juta jiwa, 2023), 36 persen siswa pernah mengalami perundungan (Asesmen Nasional, 2022), serta maraknya praktik judi online [terdapat 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 Triliun (PPATK, 2023)].
- **Wawasan dan identitas nasional** sebagai bangsa majemuk **tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif**, tecermin dari masih adanya sikap intoleransi pada sebagian kelompok masyarakat [Indeks Kerukunan Umat Beragama 76,02 (2023)].
- **Kebudayaan belum sepenuhnya dipertimbangkan** sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi sosial [Indeks Pembangunan Kebudayaan 57,13 (2023)].
- **Khazanah kearsipan nusantara belum optimal dikembangkan** untuk memperkuat memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan [Indeks Memori Kolektif Bangsa 69,10 (2024)].

Arah Kebijakan

- Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
- Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa

Sasaran 2

Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Isu

- **Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi,** Indonesia berada di pertemuan **tiga lempeng besar** (Indo-Australia, Pasifik, Eurasia) dan memiliki **enam zona subduksi** serta **13 segmen megathrust** dan **295 segmen sesar aktif** (Pusat Gempa Nasional, 2017)
- **53.000 desa terletak di daerah rawan bencana** dan menjadi tempat tinggal bagi lebih dari **51 juta keluarga** (Katalog Desa Rawan Bencana BNPB, 2019)
- **Tingginya tingkat kerentanan bencana,** yang disebabkan **75 persen infrastruktur dasar** berada di **zona rawan bencana** (BMKG, 2021)
- **Terbatasnya kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana,** dengan rata-rata nilai **Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,46** yang tergolong dalam **kategori sedang** (BNPB, 2024)
- **Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana akibat perubahan iklim,** dengan **kenaikan muka air laut** 0,8-1,2 cm/tahun dan jumlah **pesisir rentan** sebanyak 313 kab/kota, **gelombang ekstrem** >1,5 m, dan **perubahan curah hujan** +/-2,5 mm/hari
- **Aspek penanggulangan bencana belum terintegrasi** secara penuh dalam **dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang**
- **Rendahnya persentase cakupan peringatan dini bencana,** sampai dengan saat ini **tingkat keterpenuhan sistem peringatan dini bencana baru mencapai 6,00 persen** dari total potensi masyarakat yang terpapar di kawasan berisiko bencana tinggi (BNPB, 2024)

Arah Kebijakan

- Pembangunan berketahanan iklim
- Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

3.8.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 8, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

(1) Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat. Agama memiliki peran penting dan strategis sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara itu, layanan keagamaan diarahkan untuk dapat memberikan dampak signifikan bagi perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) penguatan moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (b) jaminan hak beragama serta kehidupan beragama yang harmonis dan rukun; (c) peningkatan peran tokoh agama, lembaga agama, dan lembaga sosial keagamaan; (d) peningkatan sarana dan prasarana peribadatan; (e) transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif di Kantor Urusan Agama (KUA); (f) transformasi penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman; (g) transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal; serta (h) pengembangan dana sosial keagamaan produktif.

(2) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa diarahkan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Kekayaan sumber daya alam dan warisan budaya, baik warisan budaya benda (*tangible cultural heritage*) maupun warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*) yang melimpah menjadi modal penting

untuk meningkatkan produktivitas dan kemajuan bangsa. Penguatan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa perlu dijadikan haluan dalam pembangunan nasional dengan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kebudayaan. Penguatan peran masyarakat adat juga perlu dilakukan melalui pengaturan hak akses pengelolaan sumber daya alam. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) penguatan karakter dan jati diri bangsa; (b) pelindungan dan pelestarian warisan budaya; (c) pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan; (d) jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (e) pengembangan bahasa dan sastra Indonesia; (f) transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan; serta (g) pengembangan diplomasi kebudayaan.

(3) Pembangunan berketahanan iklim diimplementasikan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim diterjemahkan sebagai tindakan yang mengurangi nilai potensi kerugian ekonomi akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim yang difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir *(ocean climate)*, air, pertanian, serta kesehatan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (b) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, (c) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (d) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, serta (e) penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim.

(4) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna berperan penting dalam mewujudkan resiliensi terhadap bencana serta melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal tersebut ditopang melalui penataan ruang, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kemampuan untuk merespons saat kejadian bencana dan pemulihan pascabencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana. Selain itu, pengelolaan risiko bencana juga difokuskan pada penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan dan pendanaan, peningkatan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana, serta penguatan investasi pengelolaan risiko bencana untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, (b) peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, (c) pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, (d) peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana, serta (e) peningkatan infrastruktur berketahanan bencana.

BAB IV
Arah Pembangunan Wilayah

4.1 Sasaran, Tema, dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan wadah dan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan wilayah ditujukan juga untuk mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia–Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

	2025	2029
Kontribusi PDRB KBI (%)	78,6	77,6
Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	22,4

KBI: Kawasan Barat Indonesia | KTI: Kawasan Timur Indonesia

Tema Wilayah Tahun 2025–2029

4.1.1 Peran Pembangunan Wilayah dalam Mendukung Pencapaian Visi-Misi, Program Prioritas, dan PHTC

Pembangunan wilayah memiliki peran sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung target di tahun 2029 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan Indeks Modal Manusia mencapai 0,59, penurunan kemiskinan mencapai 4,5 persen dan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.

4.1.2 *Highlight* Intervensi Pembangunan Kewilayahan

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah, ditetapkan *highlight* intervensi umum. Sedangkan, untuk intervensi khusus pembangunan wilayah tahun 2025–2029 perprovinsi tercantum dalam lampiran IV Peraturan Presiden tentang RPJMN Tahun 2025–2029.

(1) Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah akan berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

<table>
<tr><td colspan="3">Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah</td></tr>
<tr><td>Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang dengan sistem OSS, serta pengendalian pemanfaatan ruang</td><td colspan="2">Penataan otonomi daerah yang mewujudkan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah, kebijakan kerja sama antar multiaktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)</td></tr>
<tr><td>Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik, didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya serta pengembangan sumber daya manusia bidang informasi geospasial</td><td>Penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pendanaan alternatif di daerah</td><td>Percepatan pelaksanaan reforma agraria, sertipikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah publikasi/stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital</td></tr>
<tr><td>Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun termasuk pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul</td><td>Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat</td><td>Pemenuhan akses air minum dan sanitasi</td></tr>
<tr><td>Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, termasuk generasi milenial dan generasi Z</td><td>Pemenuhan kebutuhan listrik dan transisi energi listrik yang rendah karbon, serta penguatan infrastruktur digital</td><td>Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pengembangan konektivitas pendukung layanan dasar serta pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi termasuk peningkatan SDM Transportasi</td><td>Pemantapan fondasi keberlanjutan dan produktivitas sumber daya air</td></tr>
<tr><td colspan="3">Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan, peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif, dan peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif</td></tr>
</table>

(2) Pendekatan Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan didorong untuk mendukung pertumbuhan berkualitas berkelanjutan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan. Untuk itu, didorong pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi wilayah serta pembangunan di daerah afirmasi. Selain itu terdapat wilayah otonomi khusus yang menggambarkan kebijakan kewilayahan asimetris.

Prioritas intervensi Kebijakan pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan. Selain itu, Peningkatan Pengelolaan Urbanisasi, Perkotaan, dan Pusat Pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selanjutnya, percepatan pembangunan Papua juga menjadi perhatian khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pembangunan Daerah Afirmasi dan Perdesaan	
Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, penguatan kualitas perencanaan desa dan koordinasi supra-desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan kawasan perdesaan prioritas	
Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian, pengembangan tenaga terampil, dan pengembangan sistem permukiman yang memiliki kemampuan saling belajar untuk berkembang dan hidup bersama	Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan
Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang melalui pemenuhan dan peningkatan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah; penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, serta penataan pariwisata rintisan; pemerataan penyediaan infrastruktur dasar sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah; serta pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna	

Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Wilayah Papua:		
Papua Sehat, melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta pembudayaan hidup sehat dan bersih di masyarakat	Papua Cerdas, melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama	Papua Produktif, melalui peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing

Pengembangan Pusat Pertumbuhan	
Pengelolaan urbanisasi melalui penataan wilayah metropolitan, pembangunan kota otonom dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang layak huni, inklusif dan berbudaya, hijau dan berketahanan, serta maju menyejahterakan utamanya melalui percepatan penyelesaian rencana pembangunan dan rencana spasial, penyediaan konektivitas transportasi dan komunikasi yang memadai, serta pembentukan kelembagaan yang adaptif	Pengembangan pusat pertumbuhan baru dilakukan dengan fokus pada pengembangan pusat pertumbuhan baru serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting melalui pengembangan potensi keunggulan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, penyediaan SDM berkualitas, serta penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan
Penuntasan dan pemanfaatan PSN melalui percepatan pelaksanaan PSN, evaluasi dan penyiapan *carry over* PSN selanjutnya serta penguatan kerja sama pengelolaan PSN.	
Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana	
Pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sebagai upaya mitigasi *Triple Planetary Crisis* dalam menjamin keberlanjutan pembangunan	Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna melalui sarana dan prasarana publik berketahanan bencana

4.2 Wilayah Sumatera

4.2.1 Isu dan Potensi Wilayah Sumatera

Isu Wilayah
• Dominasi ekonomi pada komoditas primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan) mencapai hampir 50 persen dari PDRB (2023), dengan nilai tambah yang masih relatif rendah dan memiliki karakteristik yang rentan terhadap fluktuasi pasar global. • Diversifikasi dan hilirisasi industri belum optimal, baru mencapai 20 persen dari PDRB (2023), investasi masih lebih banyak terjadi pada sektor ekstraktif dan industri hulu. • Stok infrastruktur masih terbatas, masih cukup banyak wilayah di Sumatera yang masih mengalami kesenjangan infrastruktur dan memiliki infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. • Masih relatif tingginya kerentanan dan potensi bencana di Wilayah Sumatera terutama di pesisir barat yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan. • Degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan, serta pertambangan.

Isu Wilayah	
	• Disparitas kualitas sumber daya manusia dan *brain/talent drain*, angka partisipasi sekolah jenjang menengah atas/kejuruan (70 persen) dan pendidikan tinggi (25 persen) di Sumatera masih relatif senjang, ditambah terjadinya *brain/talent drain* pada tenaga kerja ahli dan terampil (30 persen) (2023). • Prevalensi *stunting* masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Sumatera dapat mencapai hampir 20 persen (2023).
	• Tingkat kemiskinan rata-rata Sumatera masih 9 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi Aceh mencapai sekitar 14 persen. • Pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi unggulan belum bernilai tambah tinggi, serta infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan digital masih terbatas.

Potensi Wilayah	
	• Kelapa sawit: Sumatera memiliki perkebunan sawit seluas 10,2 juta hektare dan menghasilkan 67 persen produksi sawit nasional. • Komoditas perkebunan potensial lainnya: - karet (70 persen produksi nasional) - kopi (62 persen produksi nasional) - tebu (36 persen produksi nasional) - kelapa (32 persen produksi nasional) • Ketahanan pangan: Sumatera berkontribusi 27 persen dalam produksi beras nasional, serta berkontribusi sekitar 16 persen dalam produksi perikanan nasional.
	• Potensi ketahanan energi: - Cadangan terbukti batu bara mencapai 12,6 miliar ton - Gas bumi 10.729,9 TSCF, dan minyak bumi 2.313,93 MMSTB - Potensi *clean energy* berupa EBT air (6,8 GW), EBT panas bumi (9,48 GW) EBT surya terapung (4,5 GWp), EBT bioenergi (29,5 GW), EBT arus laut (10 GW) • Bahan Tambang: terdapat *resource* logam bauksit sebanyak 109 juta ton dan *resource* bijih timah sebanyak 2,2 miliar ton, serta logam tanah jarang (REE).
	• *Geographical gift*: dekat dengan *main line* dalam *global maritime trade route*, yaitu Selat Malaka, yang memberikan *comparative advantage*, terutama dalam sektor perdagangan dan logistik. • Potensi dari perairan laut yang luas, yaitu perairan Selat Malaka, Laut Natuna, dan Samudera Hindia, memberikan potensi besar untuk sektor perikanan tangkap.

4.2.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Sumatera

Wilayah Sumatera diarahkan menjadi "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan", untuk itu sasaran pembangunan wilayah Sumatera dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

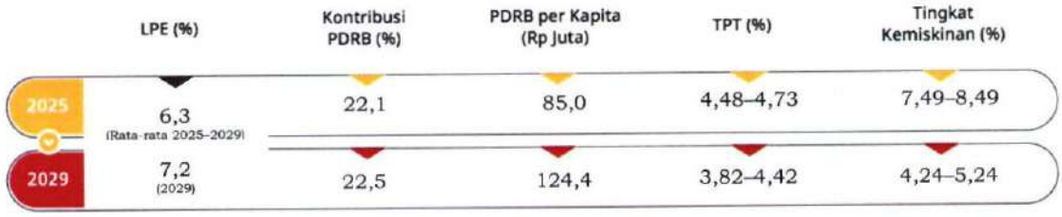

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Sumatera

Provinsi		Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Kepulauan Riau
Rata-rata LPE (%)	2025–2029	5,8	6,8	6,4	5,2	7,1
LPE (%)	2029	6,6	7,6	7,3	5,9	8,1
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	46,8	78,4	61,8	174,8	177,3
	2029	65,2	115,3	90,2	249,7	266,0
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	1,1	5,2	1,5	5,0	1,6
	2029	1,1	5,3	1,6	4,9	1,7
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	12,00 –13,00	6,96–7,46	4,50–5,10	5,19–6,19	4,40–4,90
	2029	6,39–7,39	2,82–3,82	2,40–3,40	3,25–4,25	2,26–3,26
Rasio Gini	2025	0,290–0,293	0,303–0,305	0,274–0,279	0,318–0,324	0,321–0,324
	2029	0,254–0,258	0,287–0,291	0,243–0,247	0,279–0,283	0,314–0,317
Indeks Modal Manusia	2025	0,57	0,54	0,59	0,57	0,62
	2029	0,60	0,57	0,63	0,60	0,66
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	36,08	1,00	52,62	46,88	1,00
	2029	53,63	18,52	65,89	83,68	3,13
IKLH Daerah	2025	82,89	77,20	77,95	71,85	73,28
	2029	83,56	77,87	78,79	72,69	74,13
TPT (%)	2025	4,60–5,28	5,27–5,56	5,37–5,76	3,55–3,66	6,08–6,47
	2029	4,07–4,94	4,74–5,20	4,51–5,37	2,94–3,42	5,57–6,06

Tabel 4.2
Lanjutan Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Sumatera

Provinsi		Jambi	Sumatera Selatan	Bengkulu	Lampung	Kep. Bangka Belitung
Rata-Rata LPE (%)	2025-2029	6,1	7,1	6,5	6,3	4,6
LPE (%)	2029	7,0	8,1	7,4	7,2	5,5
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	90,8	83,4	53,2	55,1	73,7
	2029	132,7	127,1	79,3	80,6	101,9
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	1,4	3,1	0,5	2,2	0,5
	2029	1,4	3,3	0,5	2,2	0,5
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	6,30–6,80	9,37–10,37	13,10–13,60	9,50–10,00	2,92–3,92
	2029	3,66–4,66	6,05–7,05	7,99–8,99	5,79–6,79	1,79–2,79
Rasio Gini	2025	0,337–0,341	0,316–0,320	0,327–0,332	0,318–0,321	0,239–0,242
	2029	0,311–0,315	0,294–0,298	0,305–0,309	0,271–0,275	0,204–0,208
Indeks Modal Manusia	2025	0,56	0,54	0,54	0,55	0,56
	2029	0,59	0,57	0,57	0,58	0,59
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	78,50	69,97	57,74	62,79	54,55
	2029	86,55	80,74	67,60	72,13	62,21
IKLH Daerah	2025	73,71	68,19	71,27	70,99	76,66
	2029	74,56	69,20	72,12	71,84	77,32
TPT (%)	2025	4,27–4,38	3,82–3,93	3,30–3,41	3,86–4,00	3,98–4,33
	2029	2,78–4,07	3,29–3,67	2,56–3,13	3,25–3,73	2,84–3,94

4.2.3 Arah Pembangunan Wilayah Sumatera

Gambar 4.1
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Sumatera dalam Mencapai Visi Presiden 2029:
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen

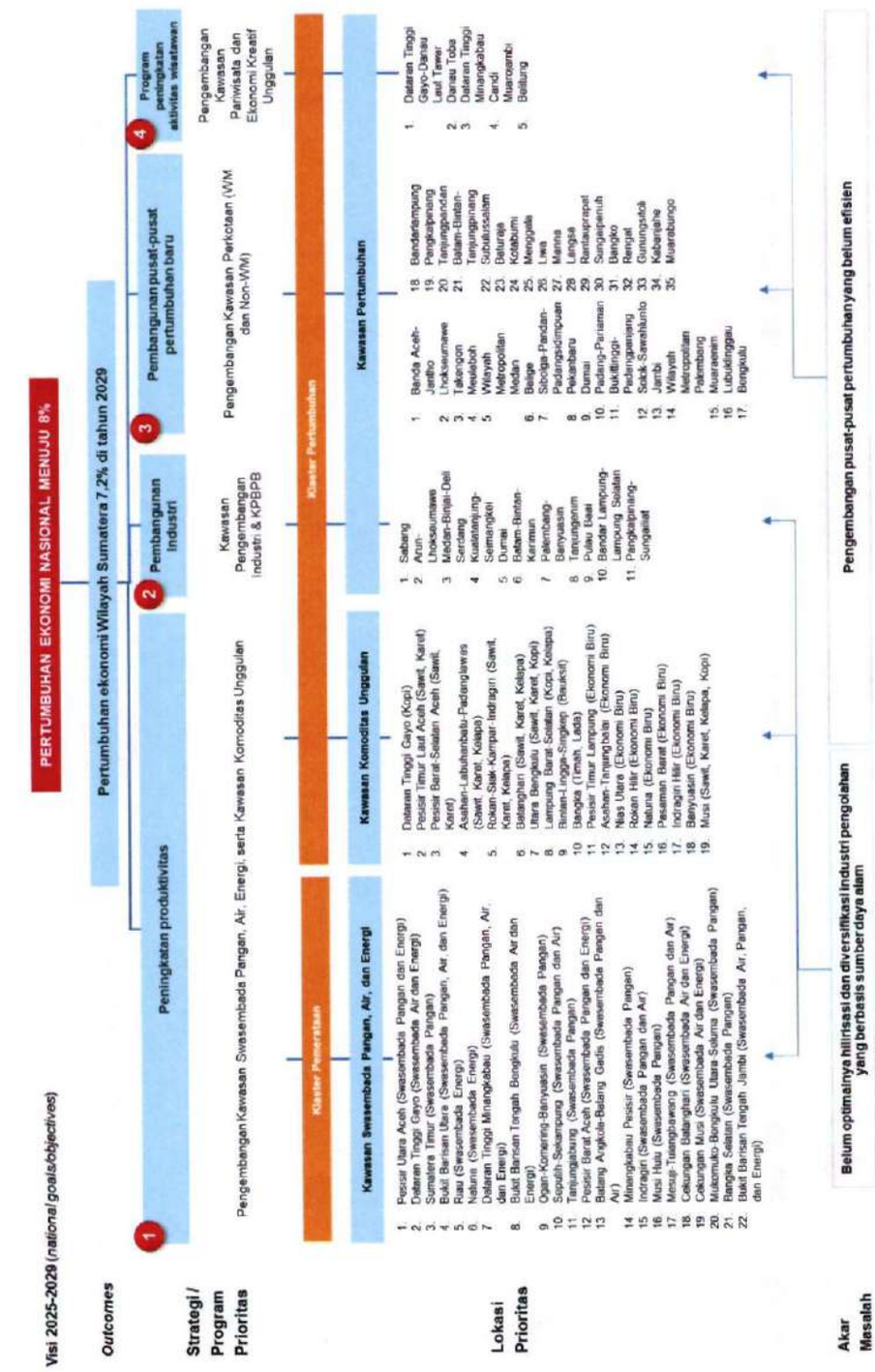

SK No 252242 A

Gambar 4.2
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Sumatera dalam Mencapai Visi Presiden 2029:
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM

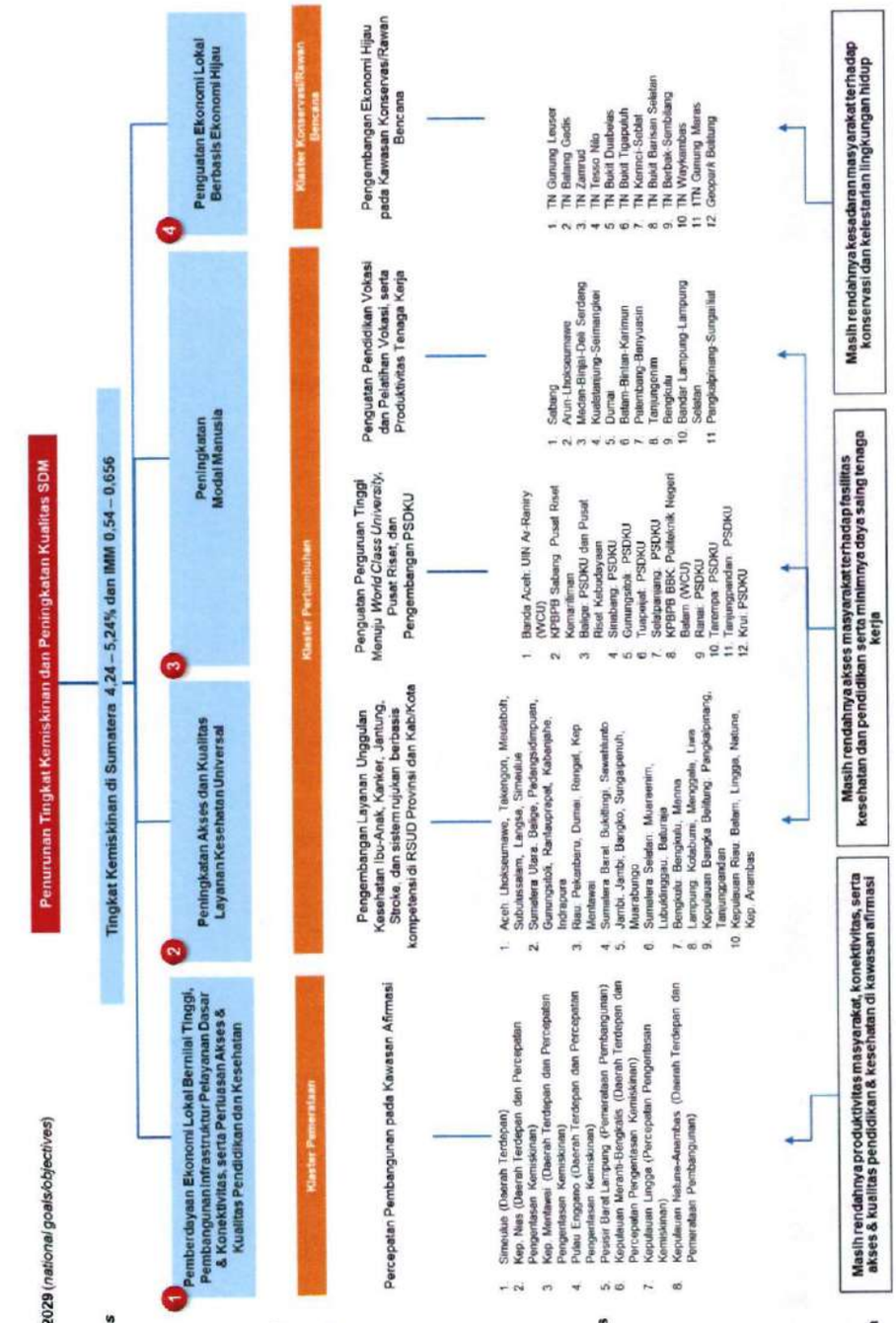

SK No 252243 A

Gambar 4.3
Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Sumatera

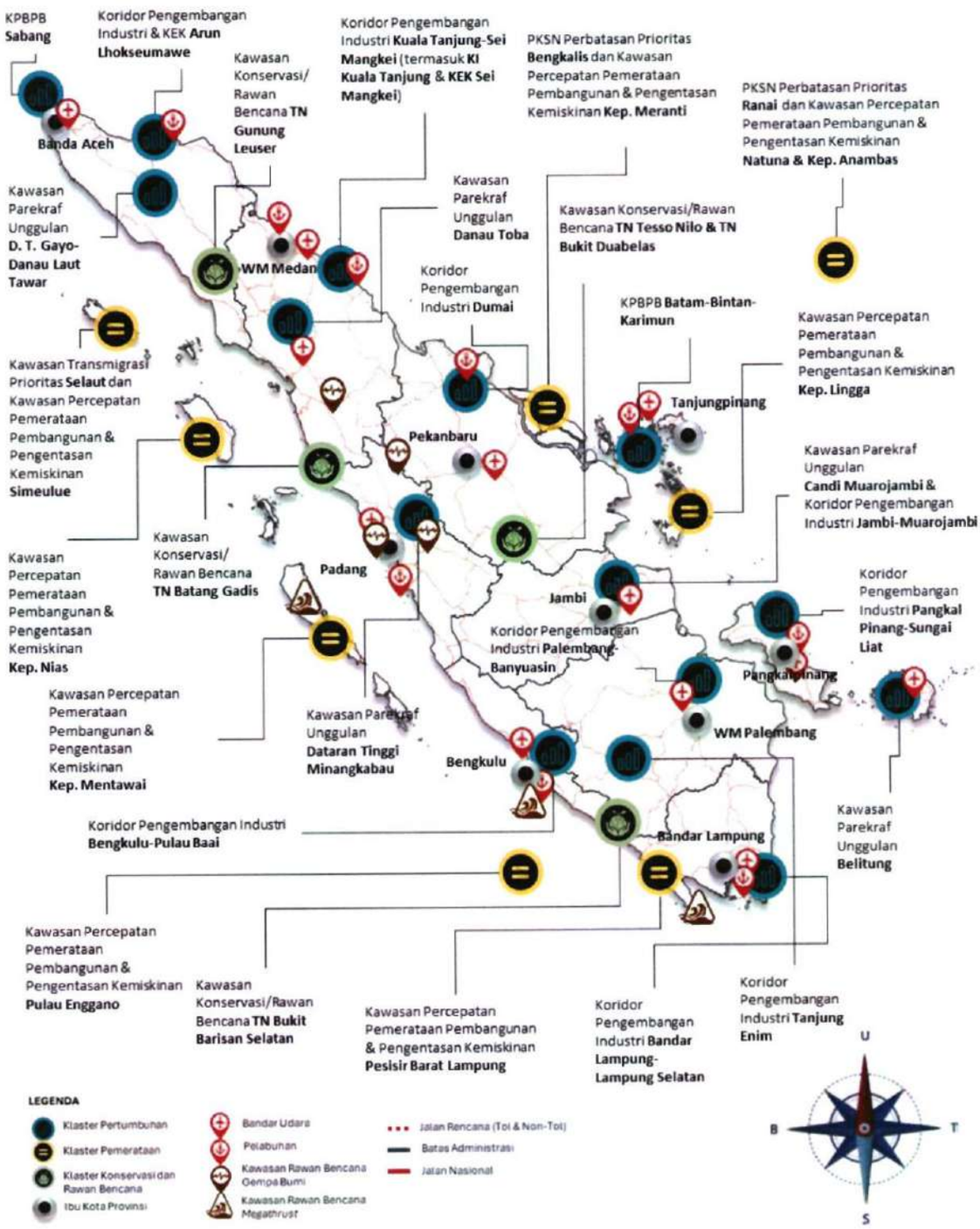

4.3 Wilayah Jawa

4.3.1 Isu dan Potensi Wilayah Jawa

Isu Wilayah
• Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai *Metropolitan Performance Index* di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen. • Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio robot *density* 5:10.000, bandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan 1.000:10.000). • Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan. • Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.
• Kesenjangan keterampilan dan *mismatch* pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen. • Prevalensi *stunting*, *wasting*, dan *underweight* masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023). • Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk.
• Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi.

Potensi Wilayah
• Pertanian dan ketahanan pangan: Jawa berkontribusi 54,22 persen dalam produksi beras nasional, berkontribusi sekitar 36 persen dalam produksi tebu nasional, berkontribusi sekitar 51,86 persen dalam produksi jagung nasional, serta berkontribusi sekitar 21 persen dalam produksi perikanan nasional. • Potensi ketahanan energi: - Cadangan gas bumi 5.846,8 TSCF, dan minyak bumi 1.582,32 MMSTB. - Potensi *clean energy* berupa energi surya (640,3 GWp), hidro (2 GW), panas bumi (7,9 GW), bioenergi (9,4 GW), bayu (39,05 GW), dan arus laut (0,4 GW). • Industri pengolahan: lebih dari 52 persen industri pengolahan di Indonesia terdapat di Pulau Jawa, yang telah membentuk rantai nilai dan pasokan industri yang cukup lengkap.
• SDM terampil: terdapat ratusan perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan ribuan lulusan tenaga kerja berkualitas. • Perkotaan: sebanyak 56 persen penduduk Pulau Jawa tinggal di perkotaan, yang dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, baik melalui penciptaan *demand* & *supply*, serta penyediaan *labor/ talent pool.*
• Sebagian besar wilayah telah terhubung dengan jaringan jalan (nasional dan tol) dan jalur kereta api, serta memiliki beberapa pelabuhan dan bandara utama. • Jangkauan jaringan seluler 4G telah mencapai sekitar 99,95 persen dari area wilayah permukiman di Pulau Jawa. • Sistem Jamali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia berkontribusi terhadap 70 persen produksi energi listrik di Indonesia.

4.3.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Jawa

Wilayah Jawa diarahkan menjadi "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan", untuk itu sasaran pembangunan wilayah Jawa dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025	6,9 (Rata-rata 2025–2029)	56,5	85,4	5,09–5,62	6,68–7,68
2029	7,9 (2029)	55,1	122,4	4,51–5,27	3,79–4,79

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 4.3
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Jawa

Provinsi		DKI Jakarta	Jawa Barat	D.I Yogyakarta	Jawa Tengah	Jawa Timur	Banten
Rata-rata LPE (%)	2025-2029	6,8	6,9	7,0	6,7	6,9	6,8
LPE (%)	2029	7,9	7,9	8,0	7,7	8,0	7,9
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	373,4	59,6	55,1	51,1	80,7	74,6
	2029	560,8	84,9	78,6	71,8	114,8	106,4
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	16,7	12,7	0,9	8,2	14,2	3,9
	2029	16,5	12,3	0,8	7,9	13,7	3,8
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	3,55–3,85	5,85–6,46	10,00–10,50	9,00–9,66	7,58–8,08	4,50–5,50
	2029	2,08–3,08	2,86–3,86	6,11–7,11	5,21–6,21	4,31–5,31	2,42–3,42
Rasio Gini	2025	0,425–0,430	0,383–0,390	0,443–0,447	0,362–0,367	0,381–0,386	0,344–0,365
	2029	0,417–0,421	0,381–0,383	0,436–0,440	0,355–0,360	0,369–0,373	0,326–0,330
Indeks Modal Manusia	2025	0,65	0,57	0,75	0,62	0,64	0,56
	2029	0,69	0,60	0,79	0,65	0,68	0,59
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	14,65	6,61	62,14	0,32	1,00	43,56
	2029	22,01	8,95	74,36	27,57	2,52	56,65
IKLH Daerah	2025	51,34	64,06	70,49	75,68	74,17	66,92
	2029	51,98	65,07	71,33	75,87	74,50	67,93
TPT (%)	2025	5,54–6,40	6,42–6,99	3,12–3,51	4,42–4,81	3,90–4,49	6,87–7,24
	2029	4,93–5,99	5,94–6,56	2,83–3,27	3,73–4,49	3,26–4,21	6,39–6,82

4.3.3 Arah Pembangunan Wilayah Jawa

Gambar 4.4
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Jawa dalam Mencapai Visi Presiden 2029:
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen

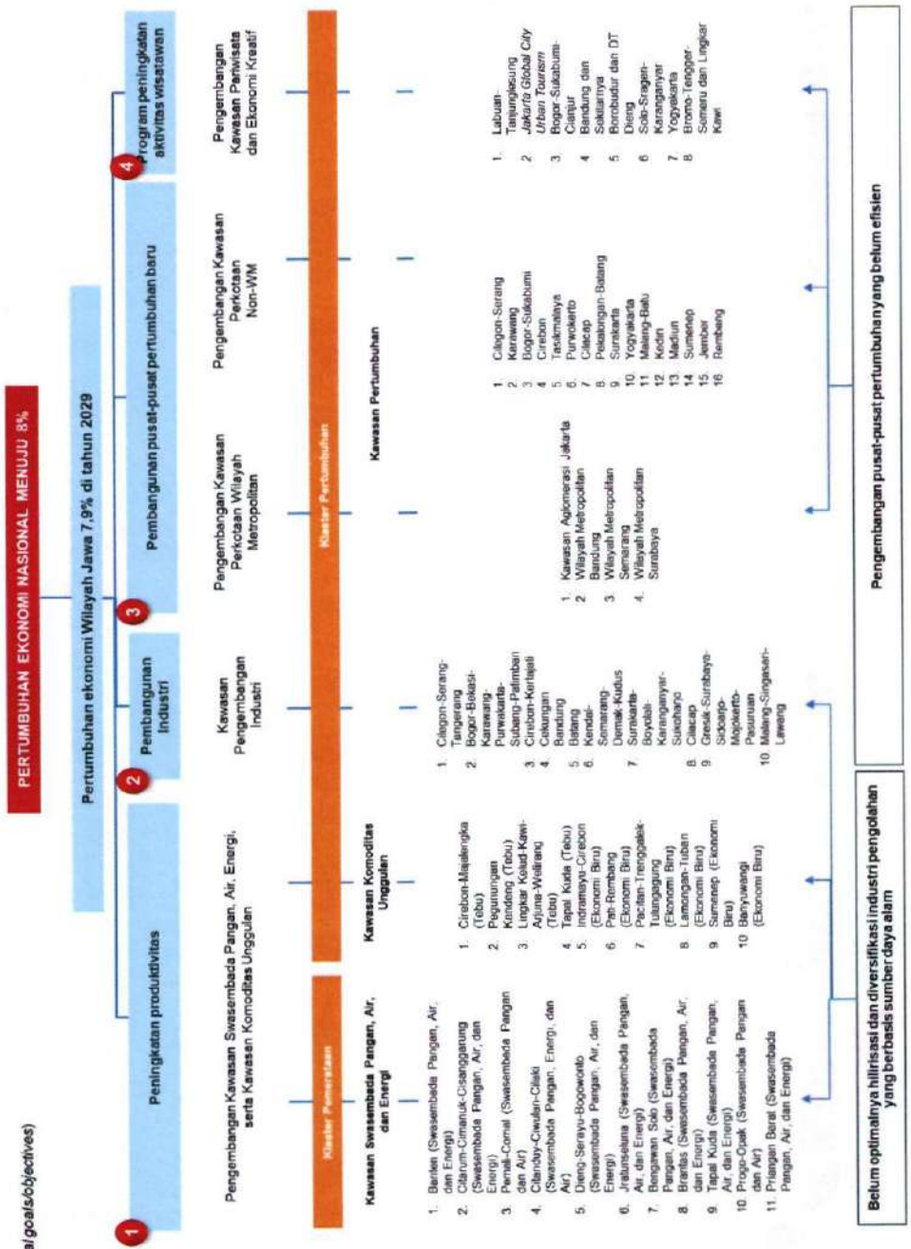

Gambar 4.5
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Jawa dalam Mencapai Visi Presiden 2029:
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM

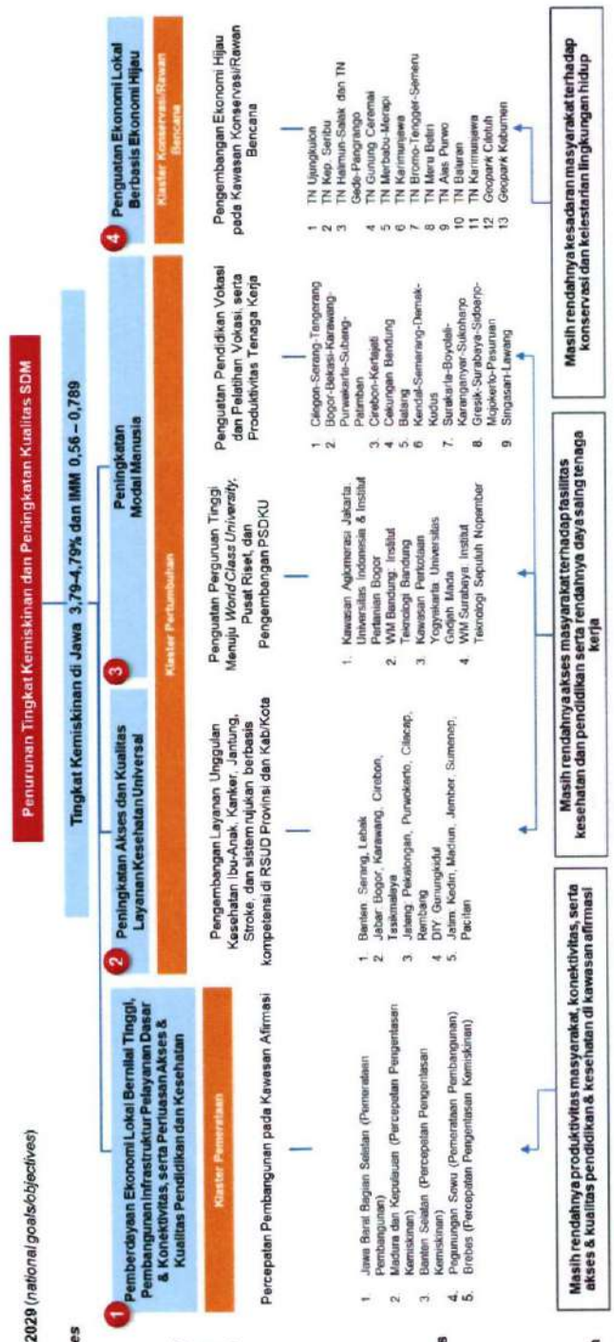

Gambar 4.6
Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Jawa

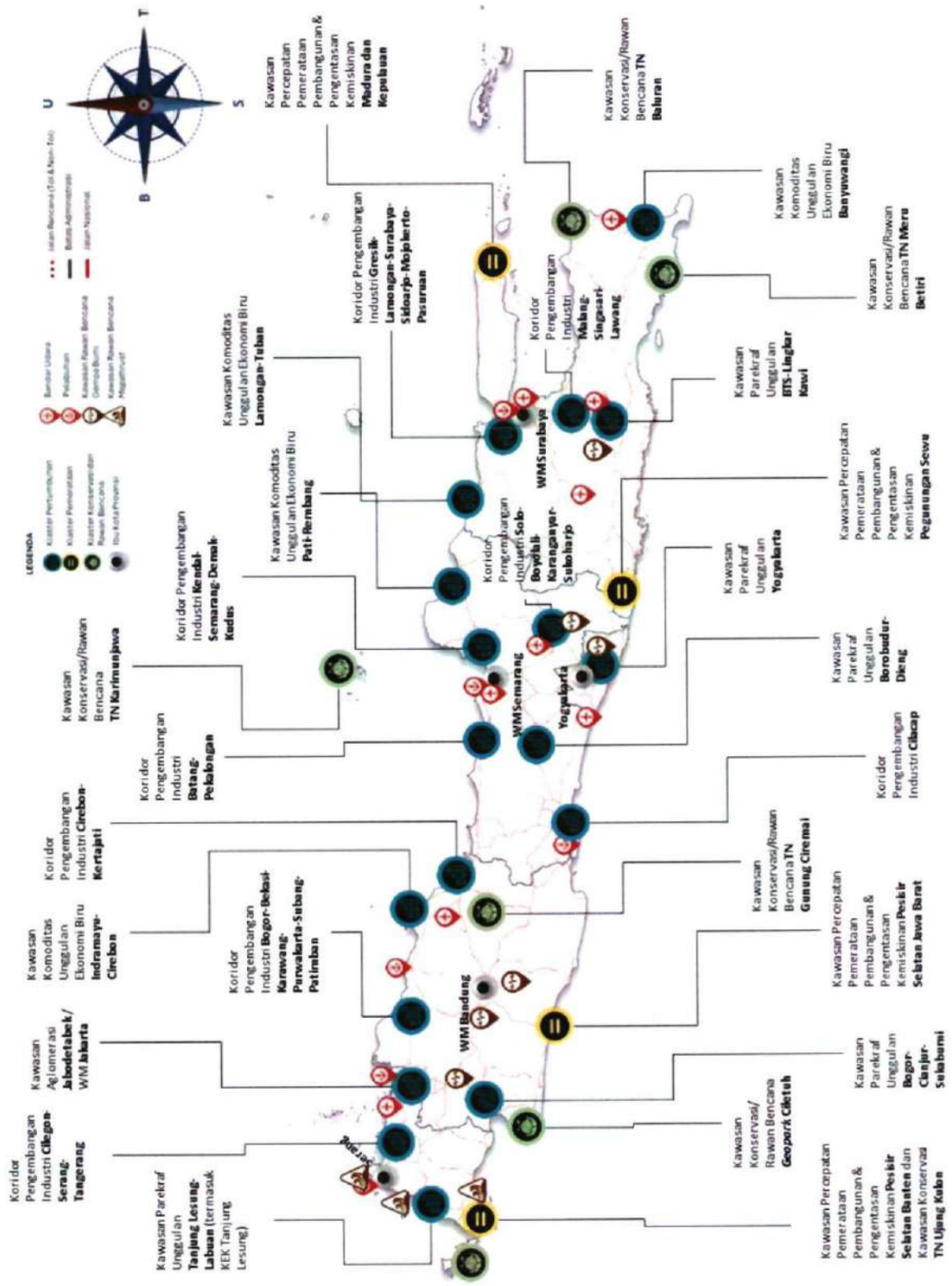

4.4 Wilayah Bali–Nusa Tenggara

4.4.1 Isu dan Potensi Wilayah Bali–Nusa Tenggara

Isu Wilayah
• Perekonomian Wilayah Bali–Nusa Tenggara mengalami perlambatan dari 5,08 persen (2022) menjadi 4,00 persen (2023), disebabkan salah satunya oleh kecilnya pertumbuhan sektor pertanian yang berperan cukup besar pada Provinsi NTB dari 2,2 persen (2022) menjadi 2,1 persen (2023) dan NTT dari 3,8 persen (2022) menjadi 2,5 persen (2023), sementara Provinsi Bali masih mengalami kontraksi namun telah lebih kecil dari -0,9 persen (2022) menjadi -0,6 persen (2023) (BPS, 2023). Selain itu, diversifikasi ekonomi masih belum optimal, ditunjukkan melalui rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan di NTB (3,86 persen) dan NTT (1,31 persen), serta masih rendahnya capaian indeks *Quality Tourism* pada destinasi wisata di Provinsi NTB dan NTT dibandingkan di Provinsi Bali dan angka nasional (BI Institute, 2023). • TPT seluruh provinsi telah lebih rendah dari capaian nasional, namun tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas pendidikan dasar (NTB: 4,73 (SMK); NTT: 5,66 (SMA); Bali: 3,4 (Diploma)) (BPS, 2024) dan masih rendahnya *link and match* dengan lapangan kerja yang tersedia. • Isu kesenjangan antarwilayah masih terjadi di Provinsi NTB dan NTT, seiring dengan terkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada kabupaten/kota tertentu, di mana 54 persen *share* PDRB NTB 2023 berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram, sementara 20 persen *share* PDRB NTT 2023 berasal dari 1 dari 22 kabupaten/kota di Provinsi. NTT, yaitu Kota Kupang (BPS, 2023). Hal tersebut disebabkan beberapa di antaranya, belum meratanya pengembangan infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi yang mendukung konektivitas antarwilayah dan antarpulau.
• NTB dan NTT memiliki IPM lebih rendah dari Nasional (NTB: 73,10; NTT: 69,14; Nasional: 75,02), hal ini terutama disebabkan oleh kondisi kesehatan yang masih rendah (BPS, 2024). Capaian HLS (Harapan Lama Sekolah) telah lebih tinggi dari nasional (NTB: 13,98; NTT: 13,23; Nasional: 13,21), namun capaian UHH (Umur Harapan Hidup) masih lebih rendah dari nasional (NTB: 72,25; NTT: 71,83; Nasional: 74,15) (BPS, 2024). Hal ini disebabkan di antaranya oleh tingginya *unmeet need* pelayanan kesehatan (NTB: 8,24 persen; NTT: 7,06 persen; Nasional: 5,18 persen (BPS, 2024)), rendahnya akses air minum layak (NTT: 88,35 persen; Nasional: 91,72 persen), serta rendahnya akses sanitasi layak (NTT: 75,67 persen; Nasional: 82,36 persen) (BPS, 2023). • Kualitas SDM yang rendah juga disebabkan oleh tingginya prevalensi *stunting* dibandingkan nasional (NTB: 19,9 persen; NTT: 31 persen; Nasional: 18,3 persen), rendahnya cakupan penemuan kasus TBC di Provinsi NTB (52,6 persen), Provinsi NTT (44,1 persen), termasuk di Provinsi Bali (50,2 persen) yang masih lebih rendah dibandingkan angka nasional (77,5 persen), serta prevalensi beberapa penyakit yang masih tinggi seperti Hepatitis (Bali: 0,08; NTB: 0,33; NTT: 0,22; Nasional: 0,12), ISPA (Bali: 2,1; NTB: 1,9; NTT: 3,1; Nasional: 2,2), Pneumonia (Bali: 0,44; NTB: 0,43; NTT: 0,68; Nasional: 0,48) (Kementerian Kesehatan, 2023). Selain itu, Bali, NTB dan NTT merupakan wilayah endemis rabies yang telah menjadi KLB selama 2 tahun terakhir.

Isu Wilayah

- Kesejahteraan Bali lebih baik dibandingkan Wilayah Nusa Tenggara yang angka kemiskinannya masih tinggi (Bali: 4 persen; NTB: 12,91 persen; NTT: 19,48 persen; Nasional: 9,03 persen (BPS, 2024)). Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di NTB dan NTT adalah tingginya lapangan pekerjaan di sektor informal (Bali: 50,68 persen; NTB: 70,51 persen; NTT: 73,32 persen; Nasional: 57,95 persen) (BPS, 2024). Selain itu, sektor pertanian yang menyerap 49,91 persen pekerja di NTT dan 36,16 persen pekerja di NTB (BPS, 2024), memiliki nilai tambah yang paling rendah dibandingkan provinsi lain (NTB: Ke-3 terendah; NTT: Ke-2 terendah) (BPS, 2023).
- Selain itu, kondisi kemiskinan yang masih tinggi di NTB dan NTT juga disebabkan oleh tingginya status pekerja buruh tidak tetap (Bali: 13,19 persen; NTB: 19,78 persen; NTT: 21,01 persen; Nasional: 13,83 persen), pekerja keluarga/tidak dibayar (Bali; 12,93 persen; NTB: 17,59 persen; NTT: 26,03 persen; Nasional: 13,34 persen), serta masih rendahnya cakupan pekerja dengan jam kerja penuh (Bali: 74,48 persen; NTB: 59,46 persen; NTT: 49,66 persen; Nasional: 68,06 persen). Ditinjau dari kualitas pekerja yang tersedia, sebagian besar pekerja di Provinsi NTB dan NTT masih didominasi oleh capaian pendidikan di bawah SD (Bali: 31,22 persen; NTB: 41,49 persen; NTT: 43,96 persen; Nasional: 35,80 persen) (BPS, 2024).

- Wilayah Bali–Nusa Tenggara memiliki indeks risiko bencana kategori sedang, namun terdapat potensi bencana karena dilewati beberapa patahan sesar seperti Flores *Back Arc Thrust*, Lombok *Strait Strike-slip Fault*, Teluk Panas *Fault*, Sape *Strike-slip Fault*, *Bondowatu Fault*, Sumba *Ridge Thrust*, *Savu Thrust*, *Semau Fault*, Sape *Strike-slip Fault, dan* Sumba *Strike-slip Fault*. Beberapa ancaman bencana yang perlu diperhatikan di antaranya gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, gelombang ekstrem, gunung berapi, serta kebakaran hutan dan lahan.
- Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan.

Potensi Wilayah

- Wilayah Bali–Nusa Tenggara memiliki keindahan alam, ekosistem bahari, serta kekayaan adat dan budaya yang menjadi magnet wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2023, Pulau Bali (Bandara Ngurah Rai) masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. NTB dan NTT juga memiliki pesona pariwisata kelas dunia seperti Sirkuit Mandalika, Pulau Gili, Satwa Komodo, hingga Taman Nasional Komodo. Selain pesona pariwisata, juga terdapat potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal.

Potensi Wilayah	
	• Terdapat 2 lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas padi dan jagung yang menjadi potensi mendukung ketahanan pangan dengan produksi di Kabupaten Sumba Tengah pada 2021 sebesar 20.852 ton untuk padi dan 13.322 ton. Sementara itu untuk Kabupaten Belu pada 2021 sebesar 24.427 ton untuk padi dan 49.127 ton untuk jagung. • Provinsi NTB juga memiliki potensi berupa tanaman pangan berupa padi dengan produktivitas yang tinggi (Peringkat ke-8 Nasional dan ke-2 di Wilayah KTI).
	• Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki beragam komoditas unggulan. NTT memiliki produksi rumput laut tertinggi ke-2 nasional (1,56 juta ton pada tahun 2023) yang telah mampu menembus pasar internasional. • Selain komoditas tersebut, NTB dan NTT merupakan produsen garam tertinggi ke-4 dan ke-5 nasional dengan produksi masing-masing mencapai 205.535 ton dan 22.983 ton pada tahun 2023.
	• NTB memiliki potensi sumber daya alam berupa pertambangan tembaga dan emas. Hal ini didukung dengan keberadaan Kawasan Industri (KI) Sumbawa Barat yang diharapkan mampu mendukung Indonesia sebagai *economic powerhouse*.
	• Wilayah Bali–Nusa Tenggara memiliki potensi energi terbarukan (EBT) hingga mencapai 457,42 GW. Potensi ini meliputi energi surya (414,5 GWp), hidro (0,13 GW), panas bumi (1,62 GW), bioenergi (1,4 GW), bayu (17,57 GW), dan arus laut (22,2 GW).

4.4.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Bali–Nusa Tenggara

Wilayah Bali-Nusa Tenggara diarahkan menjadi "*Superhub* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional", untuk itu sasaran pembangunan wilayah Bali–Nusa Tenggara dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025	7,4 (Rata-rata 2025–2029)	2,8	42,3	2,20–2,72	10,35–11,35
2029	8,4 (2029)	2,9	62,6	1,86–2,53	7,02–8,02

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 4.4
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Bali–Nusa Tenggara

Provinsi		Bali	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
Rata-rata LPE (%)	2025–2029	7,5	8,4	5,7
LPE (%)	2029	8,5	9,3	6,6
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	72,7	35,2	25,7
	2029	110,9	53,9	35,1
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	1,4	0,8	0,6
	2029	1,4	0,9	0,6
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	3,57–3,93	11,68–12,18	15,32–15,82
	2029	1,79–2,79	8,12–9,12	10,21–11,21
Rasio Gini	2025	0,355–0,359	0,369–0,373	0,319–0,324
	2029	0,331–0,335	0,324–0,328	0,314–0,319
Indeks Modal Manusia	2025	0,61	0,56	0,48
	2029	0,64	0,60	0,51
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	5,36	25,99	61,82
	2029	26,88	51,70	77,71
IKLH Daerah	2025	76,19	76,19	80,02
	2029	76,89	77,03	80,69
TPT (%)	2025	1,87–2,35	2,19–2,79	2,49–2,99
	2029	1,63–2,17	1,81–2,59	2,10–2,79

4.4.3 Arah Pembangunan Wilayah Bali–Nusa Tenggara

Gambar 4.7
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Bali–Nusa Tenggara dalam Mencapai Visi Presiden 2029: Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen

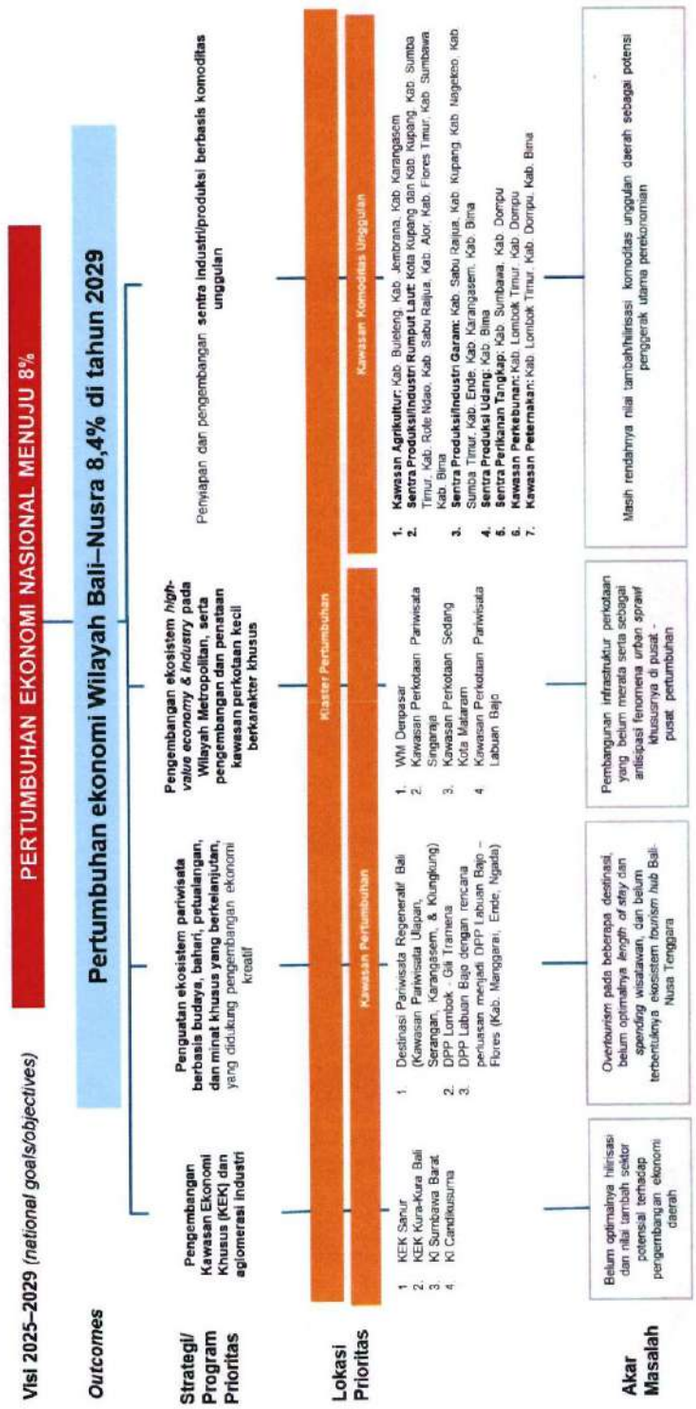

Gambar 4.8
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Bali–Nusa Tenggara dalam Mencapai Visi Presiden 2029: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM

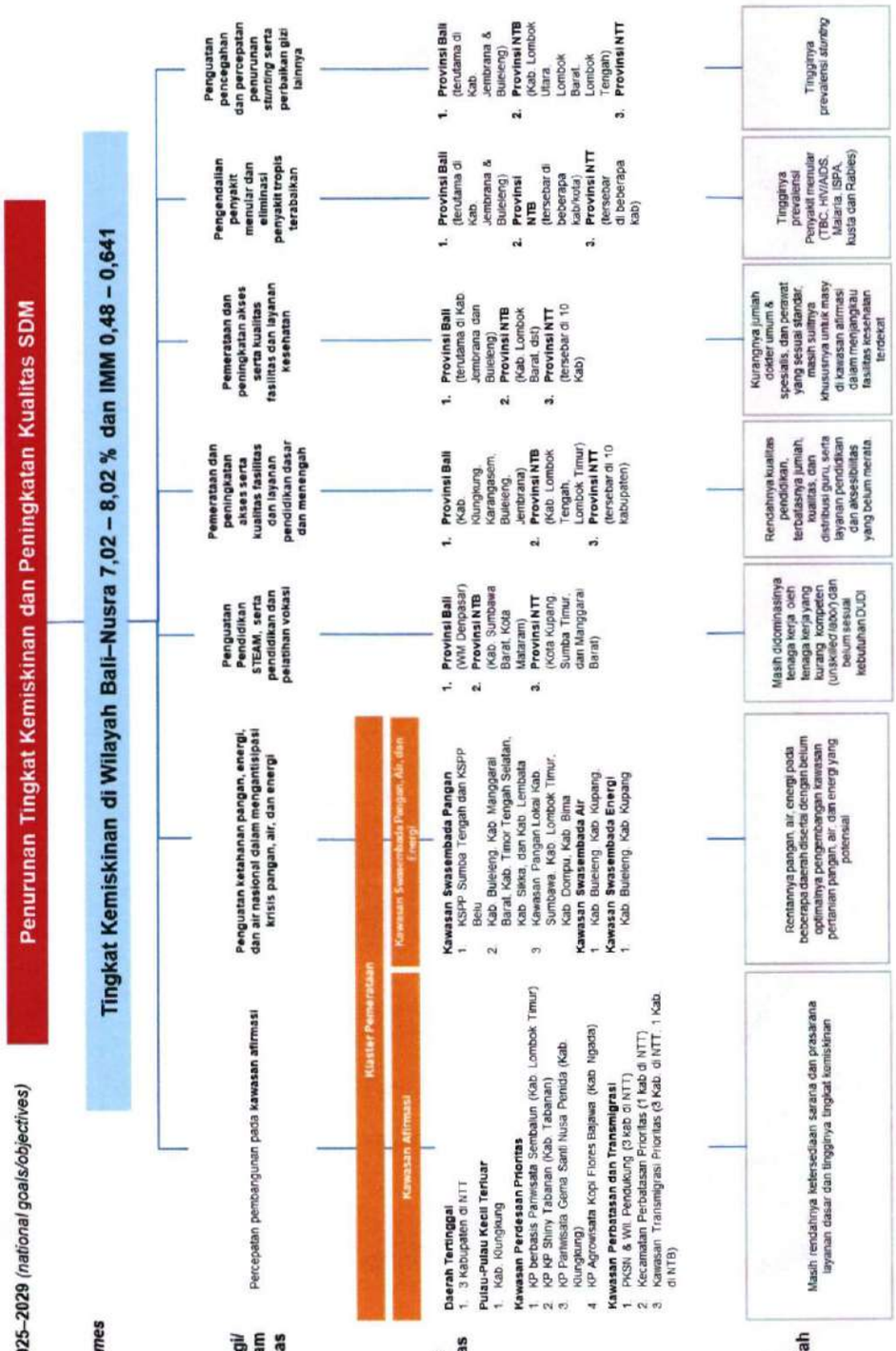

Gambar 4.9
Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Bali–Nusa Tenggara

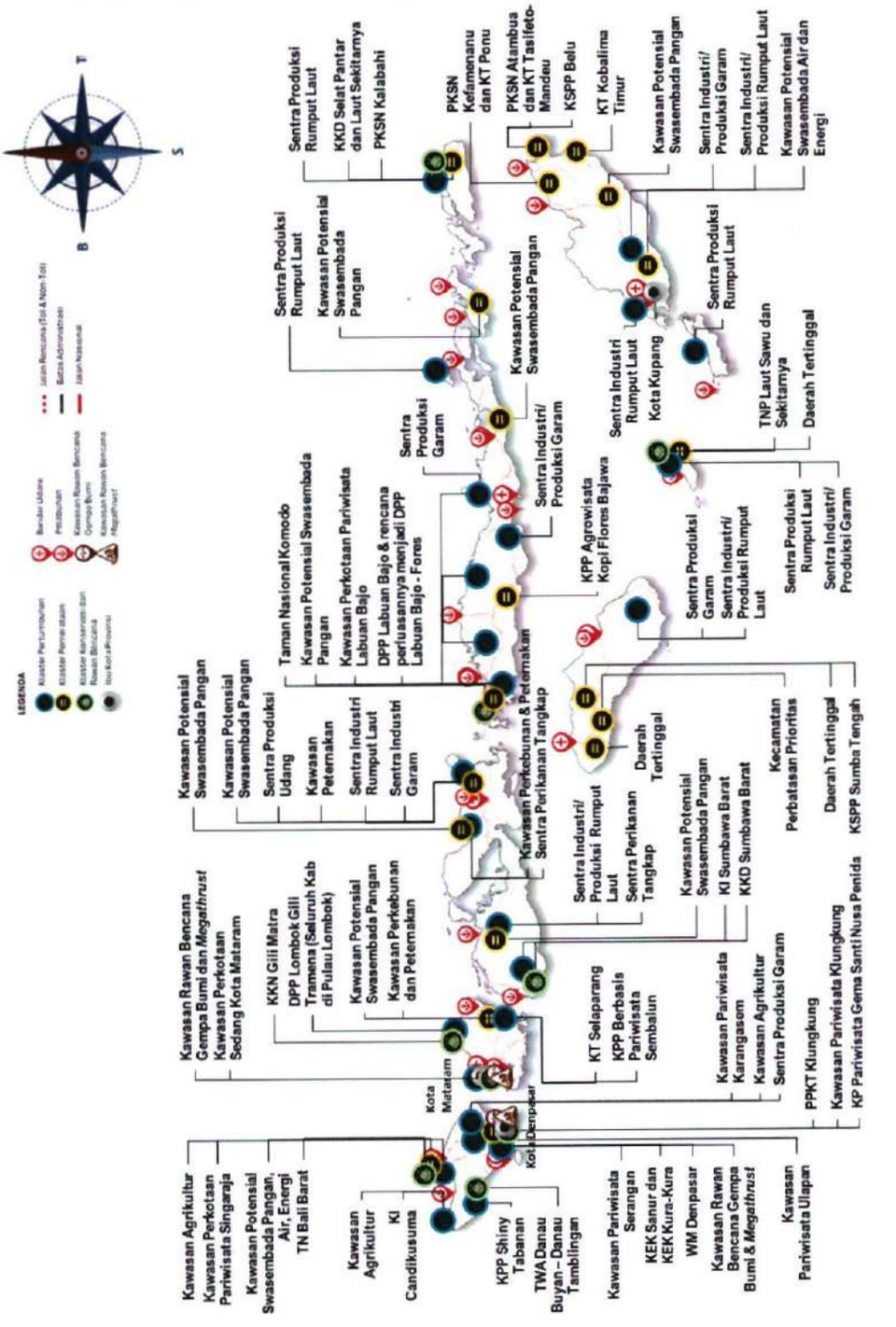

4.5 Wilayah Kalimantan

4.5.1 Isu dan Potensi Wilayah Kalimantan

Isu Wilayah
• Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.
• Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya.
• Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM). • Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara. • Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan disertai kondisi geografis hutan dan rawa menyebabkan masih tingginya kasus penyakit menular tropis seperti malaria (tertinggi di Kalimantan Timur). • Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta sarana pengembangan *talenta* tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
• Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif dapat mengancam kerusakan ekosistem alami seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan fauna endemik seperti orangutan dan bekantan serta warisan geologi dan keanekaragaman geologi lainnya.

Potensi Wilayah
• Masih memiliki ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dengan potensi pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri dan smelter, serta menciptakan sektor-sektor ekonomi baru yang berkelanjutan (transformasi ekonomi hijau). • Termasuk salah satu produsen terbesar di Indonesia pada komoditas rumput laut di Kalimantan Utara dan komoditas udang di Kalimantan Timur. • Kondisi geografis terletak di garis khatulistiwa dan dekat wilayah cincin api (*ring of fire*) dengan bentang alam yang didominasi sungai-sungai sehingga berpotensi menjadi pusat pengembangan energi baru terbarukan seperti energi panas bumi dan bayu, serta energi listrik tenaga surya dan air.

Potensi Wilayah
• Terdapat potensi energi terbarukan mencapai 517,48 GW, meliputi energi surya (430,1 GWp), hidro (48,5 GW), panas bumi (0,18 GW), bioenergi (12,7 GW), bayu (25,99 GW), dan arus laut (0,01 GW). • Terdapat potensi cadangan minyak bumi: 263,06 MMSTB dan potensi cadangan gas bumi: 5.730,4 TSCF.
• Memiliki risiko bencana yang rendah sehingga relatif lebih aman untuk membangun dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan perkotaan, serta kawasan ekonomi, industri, pariwisata, maupun sektor strategis lainnya. • Terhubung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ALKI II sebagai potensi untuk pengembangan sistem jaringan sarana prasarana transportasi berbasis laut dan kemudahan akses dalam sistem pelayaran dan perdagangan yang dapat mendukung peran Kalimantan sebagai gerbang logistik (Kalimantan Selatan).
• Melimpahnya sumber daya alam di sektor primer menunjukkan potensi adanya sumber daya manusia yang sudah terbiasa beradaptasi dengan kondisi alam. Potensi ini dapat dikembangkan dengan memunculkan *talent*a tenaga kerja baru yang tidak hanya mendukung kebutuhan industri, tetapi juga tetap mengedepankan teknik kearifan lokal yang ramah lingkungan. • Adanya keanekaragaman hayati yang luar biasa dan ekosistem yang kaya di Kalimantan juga dapat dimanfaatkan sebagai ekowisata dan lokasi yang sangat potensial untuk pengembangan pusat penelitian berbasis alam.
• Masih didominasi oleh rawa dan sungai sehingga terdapat potensi pengembangan moda angkutan air/sungai sebagai sarana mobilitas masyarakat yang ada di daerah terisolir sebagai upaya dalam mendorong meratanya akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. • Memiliki lahan gambut seluas 4,5 juta hektare dan hampir 57 persen wilayah masih tertutupi hutan dalam kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) yang berfungsi sebagai salah satu dari tiga paru-paru dunia (selain Brazil dan Kongo) sehingga perlu upaya pelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, warisan geologi dan keanekaragaman geologi, serta kekayaan ekologi menjadi penting untuk menjaga keberadaan hutan Kalimantan.

4.5.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Kalimantan

Wilayah Kalimantan diarahkan menjadi "*Superhub* Ekonomi Nusantara", untuk itu sasaran pembangunan wilayah Kalimantan dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025	7,3 (Rata-rata 2025–2029)	8,6	114,7	4,23–4,58	4,24–5,24
2029	8,2 (2029)	9,0	167,5	3,45–4,25	2,52–3,52

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Kalimantan

Provinsi		Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
Rata-rata LPE (%)	2025–2029	6,9	6,4	7,1	7,8	6,2
LPE (%)	2029	7,9	7,3	8,1	8,6	7,0
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	55,5	85,3	72,7	237,1	227,1
	2029	81,2	124,0	106,3	326,9	323,3
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	1,3	1,0	1,3	4,2	0,7
	2029	1,4	1,0	1,3	4,6	0,7
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	5,65–6,15	4,11–4,61	3,44–3,94	4,24–5,05	4,33–5,07
	2029	3,45–4,45	2,43–3,43	1,64–2,64	2,37–3,37	2,33–3,33
Rasio Gini	2025	0,315–0,321	0,311–0,315	0,307–0,311	0,310–0,321	0,263
	2029	0,271–0,275	0,242–0,246	0,274–0,278	0,309–0,313	0,257–0,261
Indeks Modal Manusia	2025	0,51	0,55	0,57	0,59	0,56
	2029	0,54	0,58	0,61	0,62	0,59
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	67,73	76,00	75,97	40,82	55,77
	2029	85,43	90,18	80,99	67,46	81,05
IKLH Daerah	2025	77,51	76,34	72,32	80,20	77,77
	2029	78,07	77,01	73,10	80,87	78,57
TPT (%)	2025	4,73–4,86	3,32–3,91	3,86–4,25	4,60–5,14	3,90–3,94
	2029	3,46–4,52	2,92–3,61	3,29–3,97	4,14–4,77	2,70–3,45

4.5.3 Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan

Gambar 4.10
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam Mencapai Visi Presiden 2029: Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen

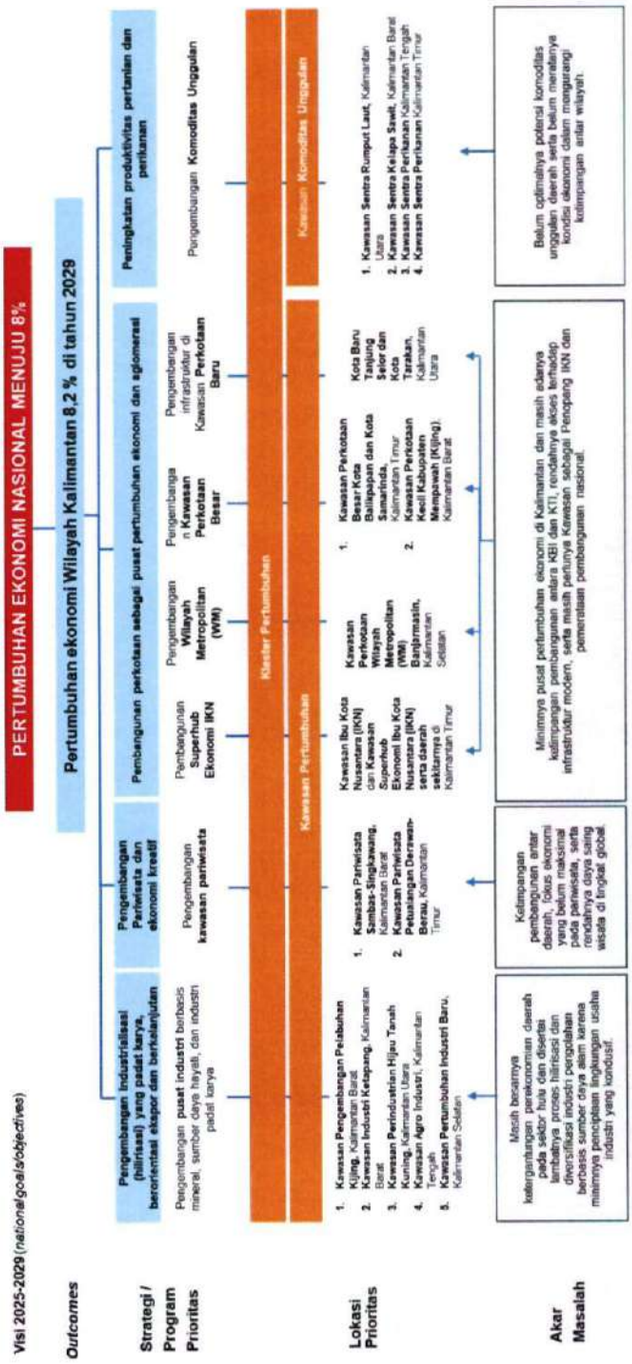

Gambar 4.11
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam Mencapai Visi Presiden 2029:
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM

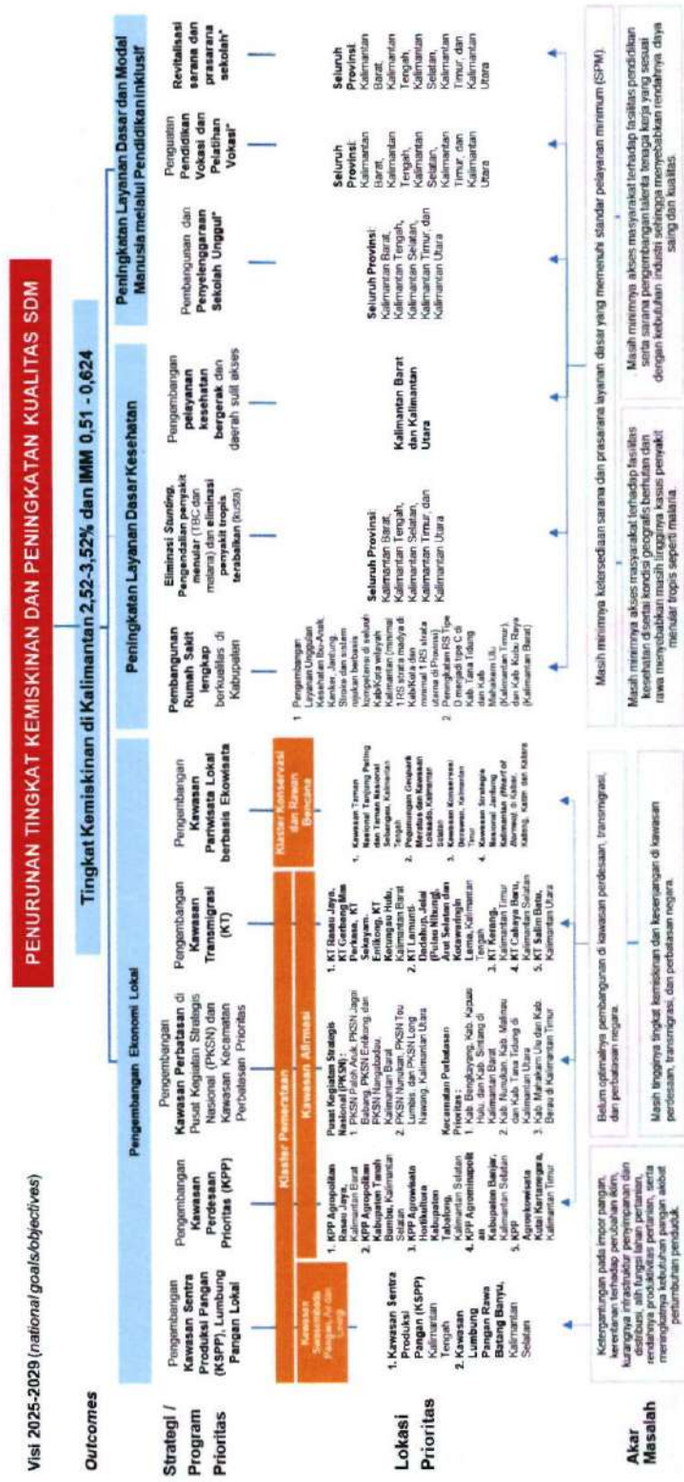

Gambar 4.12
Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Kalimantan

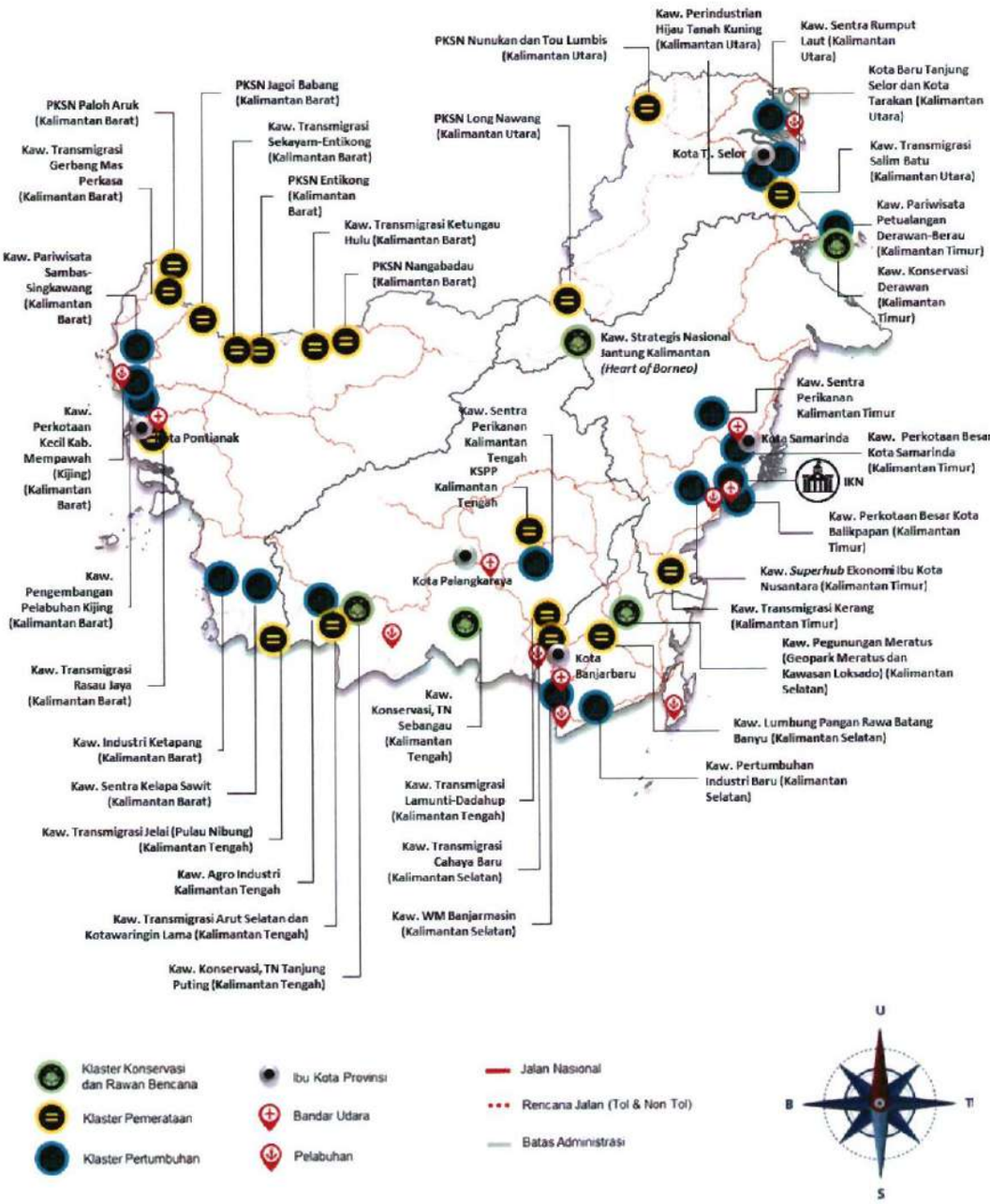

4.6 Wilayah Sulawesi

4.6.1 Isu dan Potensi Wilayah Sulawesi

Isu Wilayah	
	• Nilai tambah dari produktivitas sektor primer masih rendah seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang menghadapi daya saing rendah serta sektor pertambangan dan industri pengolahan tumbuh pesat belum dapat memberikan dampak yang optimal terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.
	• Pusat-pusat pertumbuhan seperti Wilayah Metropolitan (WM), Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Destinasi Pariwisata (DPP) belum dapat memberikan dampak optimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan terjadi kesenjangan ekonomi antara wilayah kepulauan dengan daratan. • Masih kurang memadainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kawasan perkotaan dan belum meratanya konektivitas serta sarana dan prasarana antardaerah sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah sementara kawasan perdesaan dan afirmasi belum dapat dioptimalkan sebagai penyangga ekonomi.
	• Tingkat kemiskinan yang masih tinggi disebabkan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi oleh sektor pertanian. • Masih rendahnya akses fasilitas dan mutu pendidikan menyebabkan belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja karena ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan lapangan kerja. Terdapat TPT yang masih rendah dari rata-rata nasional (Sulawesi Barat). • Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di Sulawesi menjadi salah satu penyebab tingkat kesehatan masyarakat masih di bawah rata-rata nasional yang ditandai dengan rendahnya usia harapan hidup (UHH). Selain itu, kasus *schistosomiasis* masih ditemukan di Sulawesi Tengah sedangkan prevalensi *stunting* tinggi (Sulawesi Barat) juga masih lebih tinggi dari rata-rata nasional.
	• Tingginya laju deforestasi yang berdampak pada meningkatnya ancaman kepunahan dan kehilangan jasa ekosistem esensial terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. • Masih adanya risiko bencana yang cukup tinggi terutama terkait bencana hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir, longsor, dan likuefaksi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan).

Potensi Wilayah
 • Adanya komoditas dan sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung arah pengembangan Wilayah Sulawesi di masa mendatang adalah komoditas pertanian, perkebunan (kakao, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, dan pala), perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar, teri), industri logam dasar (nikel, tembaga, dan emas-perak), mineral aspal, serta pariwisata. • Potensi nikel dan tembaga di Wilayah Sulawesi dapat mendukung pengembangan dan implementasi EBT dan potensi ekspor. Hal ini didukung dengan adanya kawasan industri dan tambang yang berada di Konawe, Morowali, dan Luwu Timur serta IUP lain yang akan ekspansi dan berkembang di wilayah Sulawesi ke depan, serta sumberdaya nikel yang masih belum dieksplorasi. • Potensi energi terbarukan mencapai 259,68 GW, meliputi energi surya (223,1 GWp), hidro (3,1 GW), panas bumi (2,99 GW), bioenergi (3,5 GW), bayu (14,85 GW), dan arus laut (12,1 GW). • Memiliki Cadangan Minyak Bumi: 63,83 MMSTB dan Cadangan Gas Bumi: 5.250 TSCF.
 • Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan membuka peluang besar bagi Wilayah Sulawesi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sebagai daerah penyangga. Dengan posisinya yang strategis, Sulawesi dapat berperan penting dalam menyuplai kebutuhan logistik, bahan pangan, dan tenaga kerja untuk mendukung pembangunan IKN. • Posisi geografis Wilayah Sulawesi yang strategis, terletak di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III, memberikan potensi besar untuk mendukung perannya sebagai *hub* dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dengan akses yang menghubungkan rute perdagangan global, wilayah ini memiliki peluang untuk meningkatkan konektivitas maritim, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan industri logistik serta pariwisata. Selain itu, terdapat pula Sulawesi Utara juga berperan sebagai Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik.
 • Pengembangan Sekolah Unggul di Sulawesi (Sulawesi Utara) yang didorong dalam rangka meningkatkan pemerataan keunggulan siswa dan katalisator untuk mendorong peningkatan prestasi siswa yang memberikan keberpihakan pada wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
 • Wilayah Sulawesi terdiri dari Kawasan Pesisir dan Kepulauan di mana merupakan tempat tinggal bagi banyak masyarakat adat dan nelayan tradisional yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis alam, seperti ekowisata dan produk perikanan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara langsung.

4.6.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi

Wilayah Sulawesi diarahkan menjadi "Penunjang *Superhub* Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA", untuk itu sasaran pembangunan Wilayah Sulawesi dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

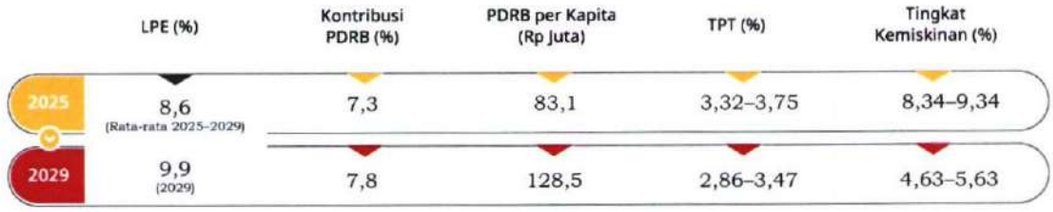

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 4.6
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Sulawesi

Provinsi		Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Rata-rata LPE (%)	2025–2029	7,4	12,9	7,2	7,9	5,8	5,5
LPE (%)	2029	8,5	14,2	8,2	9,1	6,7	6,3
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	74,4	141,8	80,1	73,1	47,6	43,8
	2029	109,2	258,7	117,1	106,4	65,2	58,7
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	0,8	1,9	3,2	0,9	0,2	0,3
	2029	0,8	2,4	3,2	0,9	0,2	0,3
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	5,59–6,19	11,06–11,56	7,30–7,89	10,04–10,54	14,21–14,50	9,00–9,73
	2029	2,30–3,30	6,20–7,20	3,49–4,49	6,60–7,60	9,50–10,50	4,97–5,97
Rasio Gini	2025	0,339–0,352	0,298–0,302	0,371–0,376	0,365–0,371	0,394–0,400	0,345–0,349
	2029	0,332–0,336	0,280–0,284	0,320–0,324	0,343–0,347	0,384–0,393	0,332–0,336
Indeks Modal Manusia	2025	0,52	0,51	0,53	0,53	0,50	0,51
	2029	0,55	0,55	0,56	0,56	0,54	0,54
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	54,90	77,96	37,00	28,93	59,98	61,65
	2029	68,65	85,77	52,05	55,12	81,44	76,22
IKLH Daerah	2025	78,71	81,75	77,60	82,39	81,48	84,82
	2029	79,39	82,60	78,44	83,06	82,15	85,32
TPT (%)	2025	5,01–5,56	2,25–2,94	3,80–4,10	2,54–3,04	2,87–3,08	1,41–2,00
	2029	4,66–5,14	2,09–2,72	3,18–3,83	2,32–2,80	2,00–2,74	1,07–1,76

4.6.3 Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi

Gambar 4.13
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Sulawesi dalam Mencapai Visi Presiden 2029:
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen

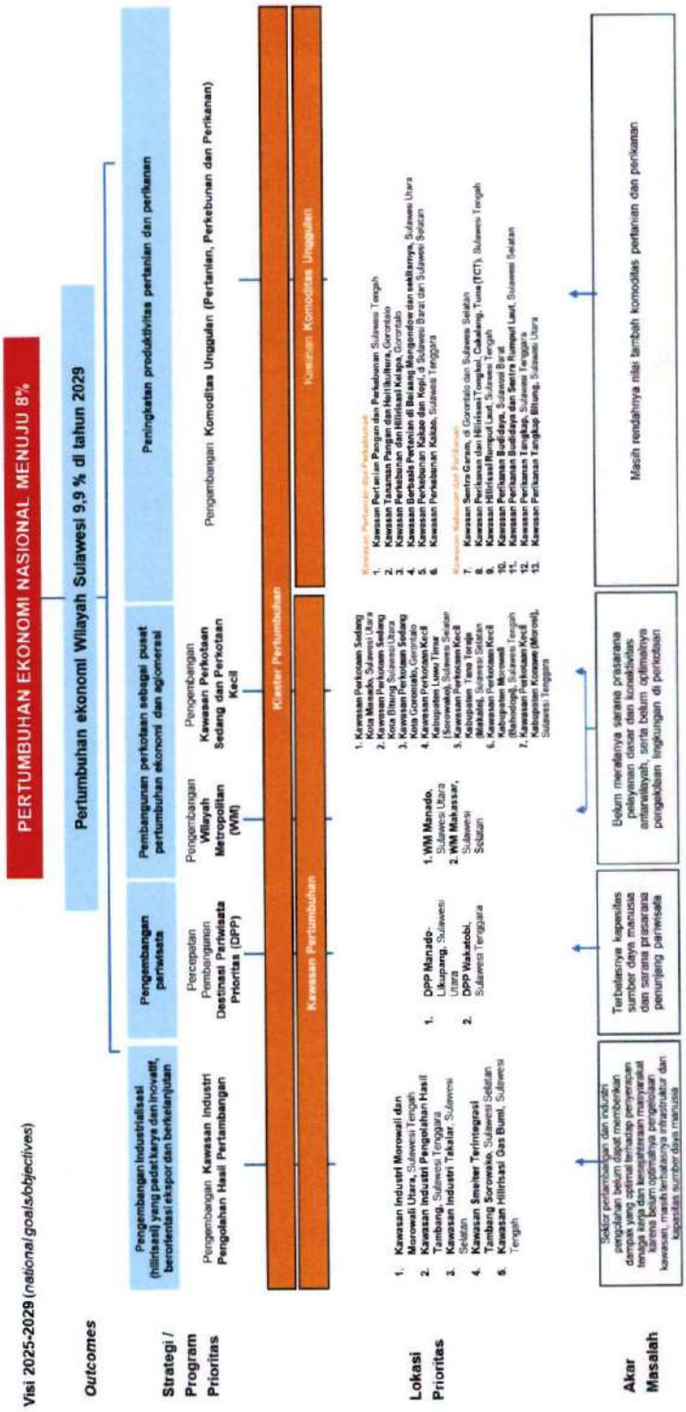

Gambar 4.14
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Sulawesi dalam Mencapai Visi Presiden 2029:
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM

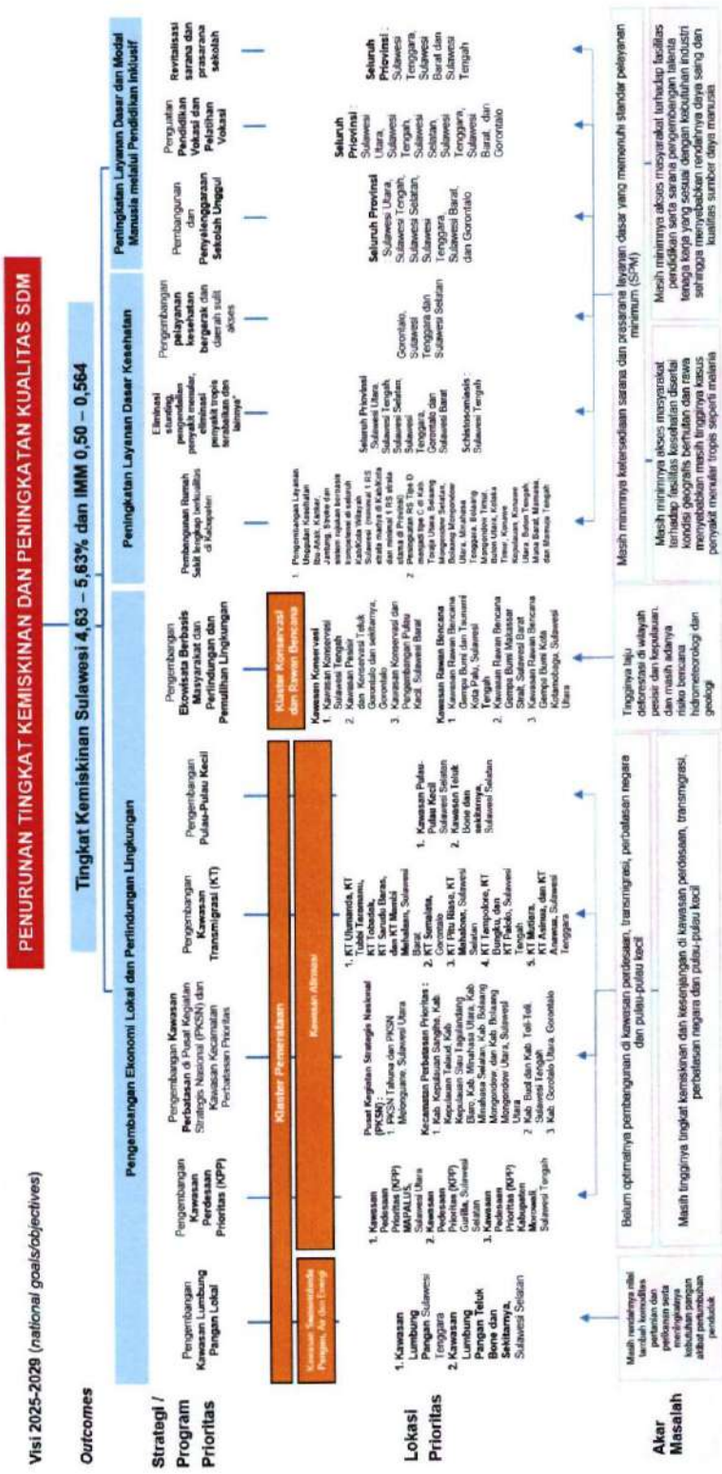

Gambar 4.15
Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Sulawesi

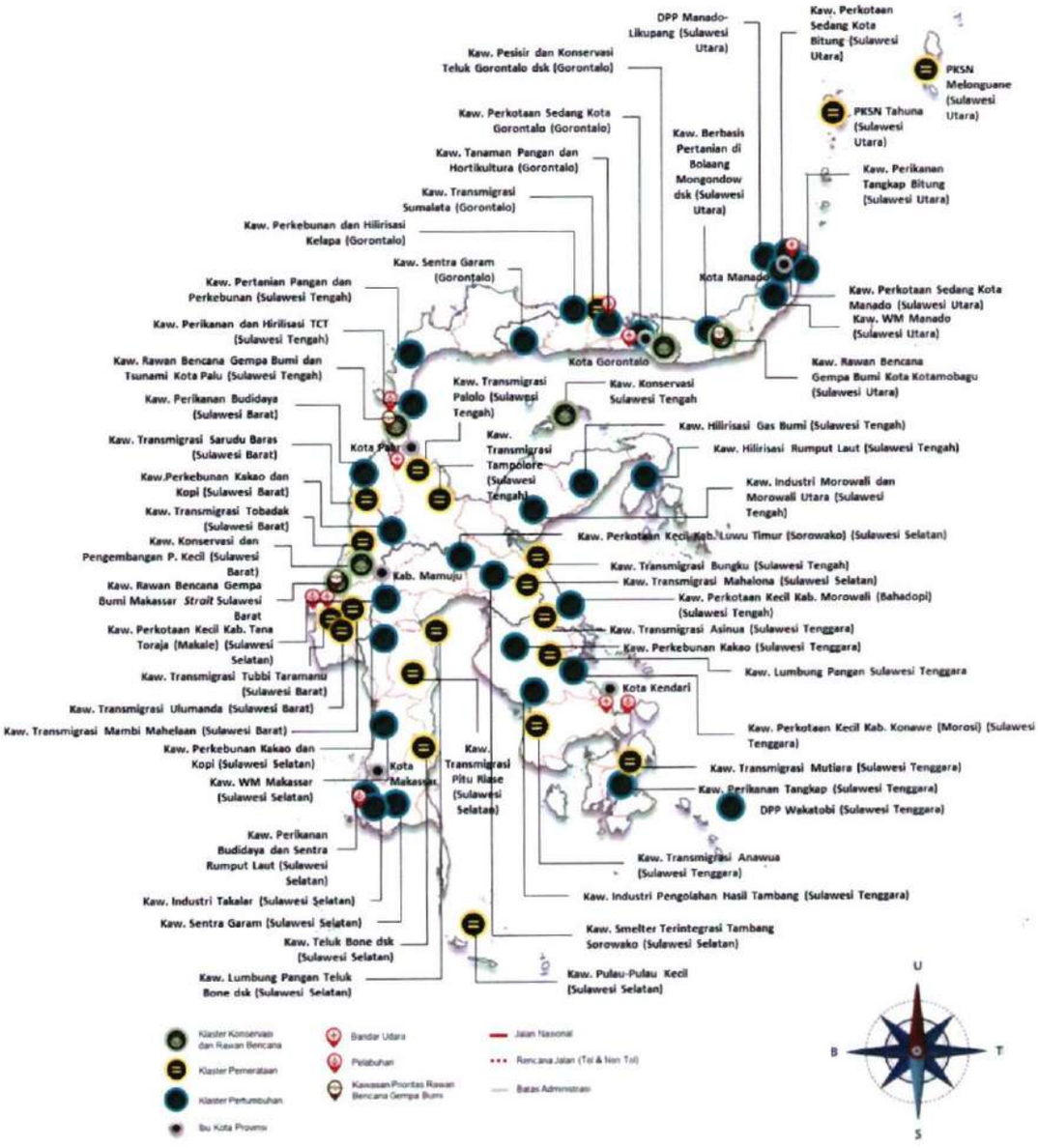

4.7 Wilayah Maluku

4.7.1 Isu dan Potensi Wilayah Maluku

Isu Wilayah
• Pertumbuhan ekonomi wilayah melambat setelah tumbuh 14,2 persen (2022) menjadi 13,5 persen (2023), terutama disebabkan oleh pertumbuhan lebih kecil pada sektor dominan, Industri Pengolahan dari tumbuh sebesar 77 persen (2022) menjadi 41 persen (2023) di Provinsi Maluku Utara dan Pertanian dari 5,7 persen (2022) menjadi 5,6 persen (2023) di Provinsi Maluku (BPS, 2023). • TPT di Provinsi Maluku lebih tinggi dari capaian nasional (Maluku: 6,11; Malut: 4,03; Nasional: 4,91) dan tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas pendidikan dasar (TPT pada lulusan SD: 2,69; SMP: 4,35; SMA: 8,94; Sarjana:7,09) (BPS, 2024). • Masih terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada kabupaten/kota tertentu ditunjukkan oleh 49 persen *share* PDRB Provinsi Maluku 2023 berasal dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, sementara 70 persen *share* PDRB Provinsi Maluku Utara 2023 berasal dari Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Ternate (BPS, 2023). Hal ini disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur, konektivitas intra dan antar pulau, dan belum optimalnya pengembangan komoditas lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
• IPM masih lebih rendah dari nasional (Maluku: 73,40; Malut: 71,84 ; Nasional: 75,02 (2024)), disebabkan oleh: - Umur Harapan Hidup (UHH) yang masih rendah (Maluku: 70,68; Malut: 71,05; Nasional: 74,15 (BPS, 2024). Hal ini terjadi seiring dengan masih rendahnya akses air minum layak di Provinsi Maluku Utara (89,01 persen) dibandingkan angka nasional (91,72 persen), serta masih rendahnya akses sanitasi layak (Maluku: 78,17 persen; Malut: 80,64 persen; Nasional: 82,36 persen) (BPS, 2023). Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya prevalensi imunisasi dasar lengkap pada anak (Maluku: 54,05 persen; Malut: 53,31 persen; Nasional: 57,78 persen). - RLS di 1 dari 11 kabupaten/kota di Maluku dan 5 dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara masih lebih rendah dari capaian nasional. Selain itu, HLS di 6 dari 11 kabupaten/kota di Maluku dan 5 dari 10 kabupaten /kota di Maluku Utara masih lebih rendah dari capaian nasional (BPS, 2024). Kondisi ini disebabkan diantaranya adalah masih tingginya proporsi desa dengan akses yang sulit/sangat sulit terhadap fasilitas pendidikan SMA/Sederajat pada kabupaten/kota dengan capaian yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota dengan capaian yang telah lebih tinggi dari angka nasional (Maluku: 24,7 persen dibandingkan dengan 18,8 persen; Malut: 9,4 persen dibandingkan dengan 9 persen) (Indeks Desa, diolah Bappenas, 2024). • Masih tingginya prevalensi *stunting* di Provinsi Maluku (28,4 persen) dan Provinsi Maluku Utara (23,7 persen), dengan prevalensi tertinggi pada beberapa kabupaten masih jauh di atas angka nasional, seperti di Kabupaten Kepulauan Aru (40,6 persen) dan Kabupaten Pulau Taliabu (30,6 persen). • Masih belum tuntasnya penyakit Malaria pada 12 kabupaten/kota di Wilayah Maluku, diiringi dengan masih rendahnya angka penemuan kasus TBC (Maluku: 70,6 persen; Malut: 71,6; Nasional: 77,5 persen), serta masih rendahnya prevalensi imunisasi dasar lengkap pada anak (Maluku: 54,05 persen; Malut: 53,31 persen; Nasional: 57,78 persen) (Kemenkes, 2023).

	Isu Wilayah
	• Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku lebih tinggi dibanding nasional, dengan 9 dari 11 kabupaten/kota memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional. Sementara di Provinsi Maluku Utara, tingkat kemiskinan telah lebih rendah dari nasional meskipun masih terdapat 2 dari 10 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di atas angka nasional (BPS, 2024). • Belum inklusifnya dampak pengembangan kawasan industri bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara, ditunjukkan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah (10,71 persen) dan Halmahera Timur (11,91 persen) sebagai lokasi pengembangan Kawasan Industri (BPS, 2024). • Masih rendahnya nilai tambah pada sektor pertanian yang menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja (Maluku: 31,77 persen; Malut: 25,93 persen), serta nilai tukar petani yang masih di bawah nasional (Maluku: 104,41; Malut: 103,37; Nasional: 112,46) (BPS, 2023). • Pekerja di sektor Industri belum sepenuhnya lebih sejahtera dengan rata-rata upah buruh yang lebih rendah dibandingkan angka nasional (Maluku: Rp2,3 juta; Nasional: Rp3,02 juta), yang disebabkan diantaranya oleh kualitas SDM pekerja di Sektor Industri yang masih rendah (Proporsi Lulusan SD/Tidak Lulus SD/Tidak Sekolah Maluku: 32,43 persen; Malut: 44,8 persen) (BPS, Sakernas Februari 2024).
	• Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi, terutama untuk ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi. • Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan.

	Potensi Wilayah
	• Wilayah Maluku terdiri dari >80 persen lautan sehingga memiliki potensi perikanan yang tinggi yang berasal dari 5 WPP RI (714, 715, 716, 717, dan 718). Produksi Tuna-Cakalang-Tongkol Provinsi Maluku tertinggi ke-2 di Indonesia yaitu sebesar 155.911 ton (KKP, 2023). • Provinsi Maluku Utara memiliki potensi perkebunan pala dan kelapa yang tinggi. Produksi komoditas pala provinsi ini menempati posisi tertinggi ke-2 secara nasional (8.336,6 ton) dengan luas area perkebunan sebesar 25,9 persen dari nasional. Sementara produksi kelapanya memiliki tertinggi ke-4 secara nasional, yaitu sebesar 212.845 ton (Kementan, 2023).
	• Adanya potensi produksi padi di beberapa kabupaten/kota di Wilayah Maluku untuk mendukung ketahanan pangan wilayah yaitu di Kabupaten Buru (40.184 ton), Kab Maluku Tengah (29.397 ton), Kabupaten Halmahera Timur (15.285,65 ton), dan Kabupaten Halmahera Utara (6.893,28 ton). sehingga potensial untuk mendukung ketahanan pangan wilayah. • Terdapat potensi diversifikasi pangan untuk komoditas sagu (952,07 ton), kedelai (63,2 ton) di Provinsi Maluku serta jagung (5.267,39 ton) dan kedelai (103,6 ton) di Provinsi Maluku Utara. Terdapat pula potensi komoditas ubi di Provinsi Maluku sebesar (79.410 ton) (Kementan, 2022). Selain itu terdapat potensi pangan akuatik terutama untuk perikanan budidaya (Maluku: 10.503 ton dan Maluku Utara: 3.245 ton).

Potensi Wilayah
• Wilayah Maluku memiliki ekosistem bahari serta kekayaan sejarah dan budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata, seperti pada DPP Morotai dan KSPN Banda Neira dan sekitarnya.
• Terdapat potensi pertambangan nikel dengan 1,9 juta ton dari 5,03 juta ton cadangan bijih nikel terletak di Wilayah Maluku (KESDM, 2022). Selain itu, terdapat potensi pertambangan gas alam sebesar 15.783,7 TSCF (*Trillion Standard Cubic Feet*) dari total cadangan gas alam nasional yang mencapai 54.762,7 TSCF terdapat di Wilayah Maluku (KESDM, 2023). Pengembangan potensi ini didukung dengan keberadaan Kawasan Industri (KI) Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli, serta Blok Masela • Terdapat cadangan minyak bumi sebesar 373,12 MMSTB (*Million Metric Stock Tank Barrels*) dari total cadangan minyak bumi nasional sebesar 4.700,28 MMSTB (KESDM, 2023).
• Potensi energi terbarukan Wilayah Maluku mencapai 136,23 GW, dengan energi surya (94,7 GWp), hidro (0,2) GW), panas bumi (1,15 GW), bioenergi (0,14 GW), bayu (23,04 GW), dan arus laut (17 GW).

4.7.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Maluku

Pembangunan Wilayah Maluku diarahkan untuk menjadi "*Hub* Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia", untuk itu sasaran pembangunan Wilayah Maluku dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut:

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025	9,8 (Rata-rata 2025-2029)	0,7	52,5	4,82–5,18	9,40–10,40
2029	11,1 (2029)	0,8	84,6	4,13–4,75	5,12–6,12

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 4.7
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Maluku

Provinsi		Maluku	Maluku Utara
Rata-rata LPE (%)	2025–2029	7,3	11,4
LPE (%)	2029	8,4	12,7
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	34,8	77,9
	2029	50,5	133,4
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	0,3	0,4
	2029	0,3	0,5
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	13,01–13,51	4,95–5,15
	2029	8,03–9,03	0,92–1,92
Rasio Gini	2025	0,282–0,287	0,280–0,297
	2029	0,239–0,243	0,273–0,290
Indeks Modal Manusia	2025	0,49	0,48
	2029	0,52	0,50
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	42,88	86,35
	2029	100	94,12
IKLH Daerah	2025	82,43	80,36
	2029	83,10	81,03
TPT (%)	2025	5,55–6,03	3,80–4,00
	2029	5,07–5,57	2,82–3,60

4.7.3 Arah Pembangunan Wilayah Maluku

Gambar 4.16
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Maluku dalam Mencapai Visi Presiden 2029:
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen

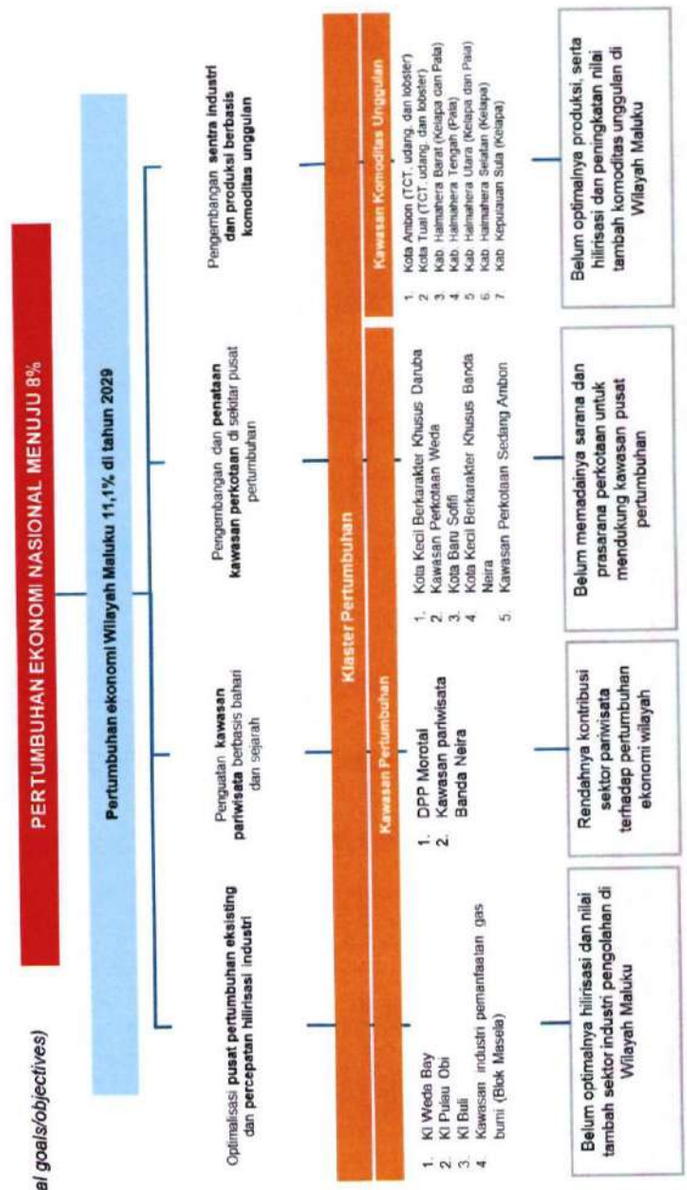

Gambar 4.17
Alur Kerja Pembangunan Wilayah Maluku dalam Mencapai Visi Presiden 2029
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM

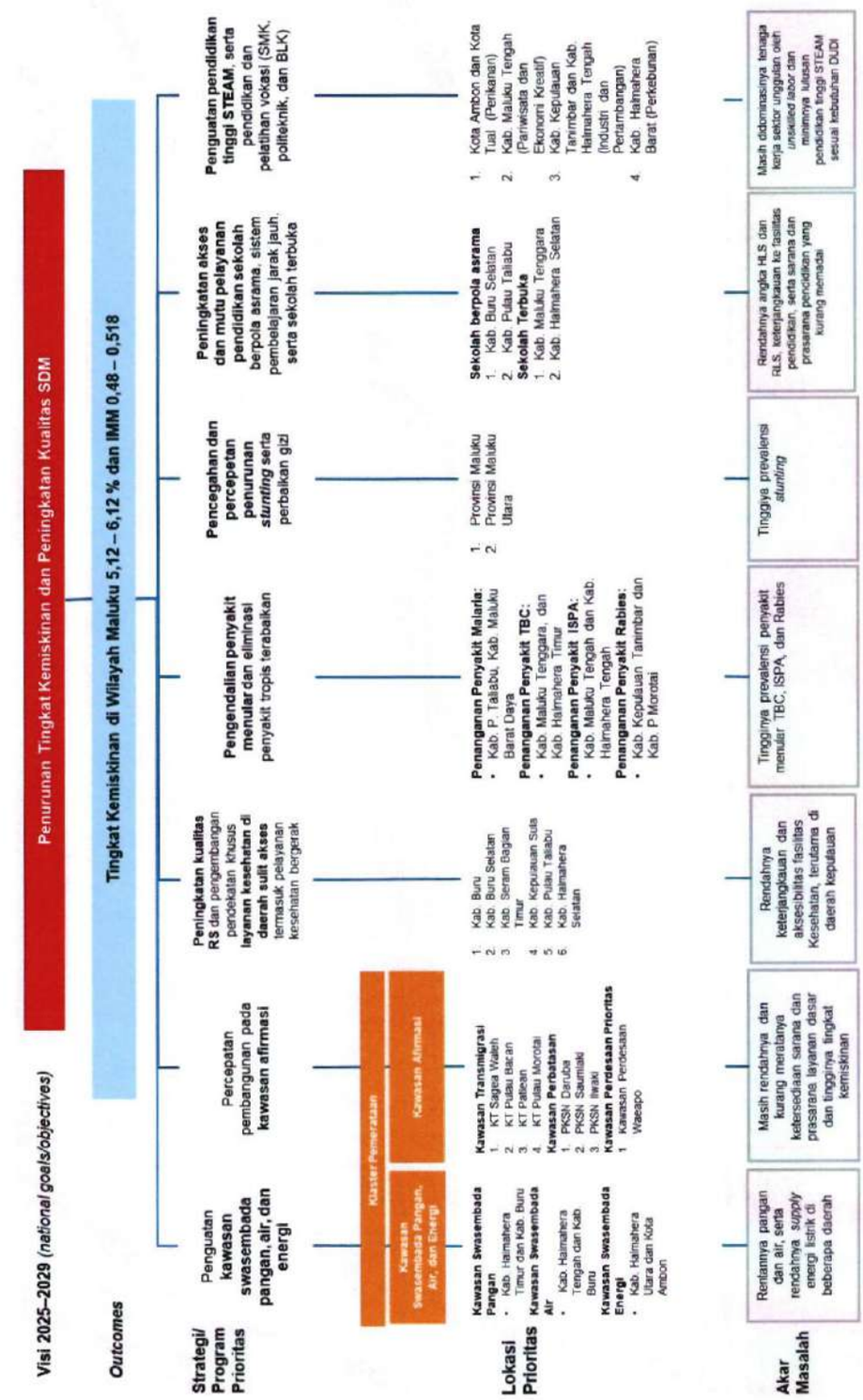

Gambar 4.18
Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Maluku

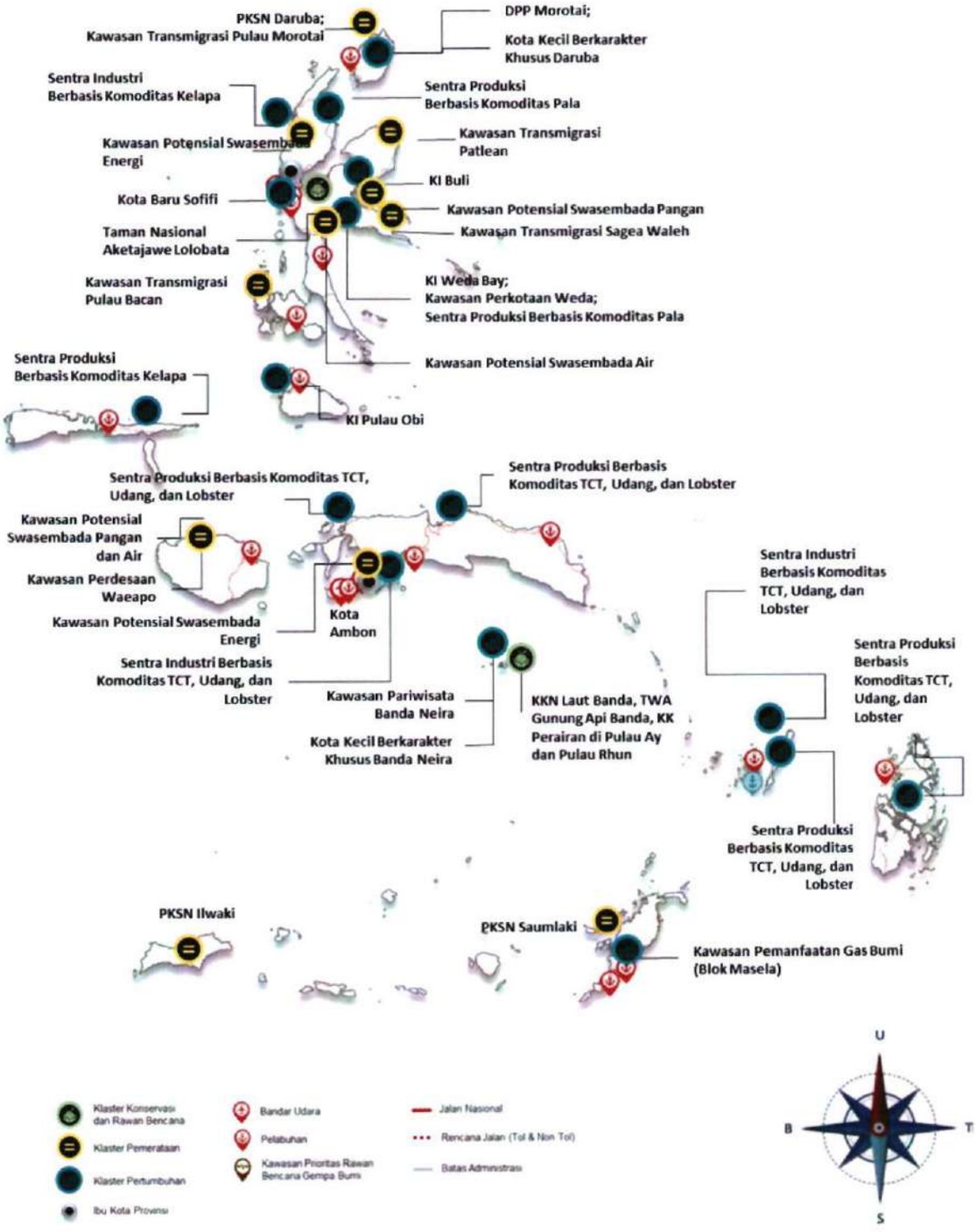

4.8 Wilayah Papua

4.8.1 Isu dan Potensi Wilayah Papua

Isu Wilayah
• Pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua melambat, dari 7,03 persen di tahun 2022 menjadi 4,87 persen di tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh melambatnya sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang *share* terbesar (37 persen) pada PDRB Wilayah Papua (BPS, 2023). Sektor ini mengalami perlambatan pertumbuhan dari 14,21 persen di tahun 2022 menjadi 6,45 persen di tahun 2023. Di sisi lain, sektor industri pengolahan yang tumbuh lebih besar (2022: 2,54 persen; 2023: 8,14 persen) belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua secara signifikan. Disparitas antarwilayah dan antargolongan juga masih tinggi, dengan sebaran kontribusi PDRB Wilayah Papua pada tahun 2023 didominasi oleh Provinsi Papua Tengah (41 persen), disusul oleh Provinsi Papua (20 persen), Provinsi Papua Barat (16 persen), Provinsi Papua Barat Daya (9 persen), Provinsi Papua Selatan (7 persen), dan Provinsi Papua Pegunungan (5 persen) (BPS, 2023). Hal ini disebabkan belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Wilayah Papua, serta belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi wilayah
• Sebagian besar IPM di Wilayah Papua tergolong dalam kategori sedang di Indonesia (Provinsi Papua: 73,83; Provinsi Papua Barat Daya: 69,65; Provinsi Papua Selatan: 68,86; Provinsi Papua Barat: 67,69; Provinsi Papua Tengah: 60,25; Provinsi Papua Pegunungan: 54,43; Nasional: 75,02) (BPS, 2024). Pada komponen pendidikan, hanya Provinsi Papua yang memiliki capaian HLS dan RLS lebih tinggi dari nasional. Sementara pada komponen kesehatan, seluruh Provinsi di Wilayah Papua memiliki capaian UHH yang lebih rendah dari angka nasional. Capaian pendidikan yang rendah disebabkan diantaranya oleh masih tingginya proporsi desa dengan akses yang sulit hingga sangat sulit ke fasilitas pendidikan tingkat SMP/sederajat (Wilayah Papua: 27,9 persen; nasional: 11,8 persen) dan SMA/sederajat (Wilayah Papua: 27,7 persen; nasional: 16,6 persen) (Indeks Desa, diolah Bappenas, 2024). Di sisi lain, kondisi kesehatan yang rendah disebabkan oleh masih rendahnya akses terhadap air minum layak (Provinsi Papua*: 66,49 persen, Provinsi Papua Barat*: 81,57 persen, nasional: 91,72 persen), masih rendahnya akses terhadap sanitasi layak (Provinsi Papua*: 43,00 persen, Provinsi Papua Barat*: 76,30 persen, nasional: 82,36 persen), serta masih tingginya prevalensi *stunting* (Provinsi Papua: 28,6 persen, Provinsi Papua Barat: 24,8 persen, Provinsi Papua Selatan: 25,0 persen, Provinsi Papua Tengah: 39,4 persen, Provinsi Papua Pegunungan: 37,3 persen, Provinsi Papua Barat Daya: 31,0 persen, nasional: 21,5 persen), serta baru 1 kabupaten/kota (Kabupaten Sorong Selatan) yang telah berhasil eliminasi malaria (Kementerian Kesehatan, 2023)
• Wilayah Papua memiliki persentase penduduk miskin (PPM) dan ketertinggalan daerah yang masih tinggi. Tingkat kemiskinan pada seluruh provinsi di Wilayah Papua jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional (Provinsi. Papua Barat: 21,66 persen; Provinsi Papua Barat Daya: 18,13 persen; Provinsi Papua: 17,26 persen; Provinsi Papua Selatan: 17,44 persen; Provinsi Papua Tengah: 29,76 persen; Provinsi Papua Pegunungan: 32,97 persen; Nasional: 9,03 persen) (BPS, 2024). Selain itu, sebanyak 61 persen kabupaten/kota di Wilayah Papua termasuk daerah tertinggal pada RPJMN Tahun 2025–2029. Hal ini disebabkan diantaranya oleh rendahnya tingkat pendidikan para pekerja, yang didominasi

Isu Wilayah
pekerja lulusan SD ke bawah sebesar 52,19 persen (BPS, 2024) serta rendahnya nilai tukar petani di Provinsi Papua* (99) dan Provinsi Papua Barat* (100,19) dibandingkan dengan nasional (112,46) (BPS, 2023). Selain itu, masih terdapat keterbatasan akses permodalan untuk membuka/mengembangkan UMKM, dengan proporsi rumah tangga penerima kredit di Provinsi Papua* hanya sebesar 6,16 persen dan di Provinsi Papua Barat* hanya sebesar 12,29 persen (nasional: 23,24 persen) (BPS, 2023). Di sisi lain, infrastruktur dasar pendukung aktivitas ekonomi yang belum berkembang juga menyebabkan terbatasnya kapasitas daerah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) pada sub pilar infrastruktur ekonomi pada Provinsi Papua* (2,46) dan Provinsi Papua Barat* (5,64) yang masih lebih rendah dibanding nasional (6,57) (Bappenas, 2023) *Data capaian provinsi induk
• Wilayah Papua memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi terutama dari banjir, longsor, tsunami, dan gempa bumi yang bersumber dari sesar-sesar normal antara lain Sesar Sorong, Koor, Taminabun, Wandamen, Ransiki, serta Tarera-Aiduna • Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan

Potensi Wilayah
• Wilayah Papua memiliki tingkat produksi komoditas tuna-cakalang-tongkol yang tinggi, sebesar 133.039 ton pada tahun 2023, yang didukung SKPT Biak dan rumah tangga usaha sub sektor perikanan tangkap laut berjumlah 22.948 unit.
• Keunggulan sektor perkebunan salah satunya terdapat di Provinsi Papua Barat dengan komoditas unggulan kakao Ransiki yang dikelola secara organik dan telah memiliki pangsa pasar internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya permintaan hasil produk dari negara Jepang, Inggris, dan Belanda. Kakao Ransiki juga menjadi salah satu penerima penghargaan *gold* dalam Cacao of Excellence Award tahun 2023 (Cacao of Excellence, 2023).
• Adanya potensi produksi padi di beberapa kabupaten/kota di Wilayah Papua untuk mendukung ketahanan pangan wilayah, diantaranya di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Jayawijaya, sehingga potensial untuk mendukung ketahanan pangan wilayah. • Terdapat potensi diversifikasi pangan untuk komoditas sagu dan ubi di Wilayah Papua. Selain itu terdapat potensi hortikultura, pangan akuatik terutama perikanan laut dalam, dan peternakan babi.

Potensi Wilayah	
	• Wilayah Papua memiliki ekosistem bahari serta tradisi lokal yang dapat dikembangkan untuk destinasi pariwisata, seperti pada DPP Raja Ampat, TN Teluk Cenderawasih, dan Teluk Triton, serta pariwisata budaya Asmat, Danau Anggi Giji dan Anggi Gida, dan Lembah Baliem.
	• Terdapat potensi pertambangan minyak dan gas bumi di Wilayah Papua (cadangan minyak bumi: 104,04 MMSTB (*million stock tank barrels*); cadangan gas bumi: 11.421,9 TSCF (*trillion standard cubic feet*), salah satunya di Kabupaten Teluk Bintuni yang akan menopang kebutuhan produksi industri pupuk di KI Fakfak. Selain itu, terdapat potensi pertambangan tembaga, emas, dan perak di Kabupaten Mimika, dengan cadangan mineral lebih dari 2 miliar ton biji.
	• Potensi energi terbarukan mencapai 126,49 GW dengan potensi energi surya (65,8 GWp), hidro (35,9 GW), panas bumi (0,08 GW), bioenergi (0,1 GW), bayu (21,31 GW), dan arus laut (3,3 GW).

4.8.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Papua

Pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk "Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif" untuk itu sasaran pembangunan wilayah Papua dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025	6,8 (Rata-rata 2025-2029)	1,9	77,2	3,20–3,59	21,58–22,58
2029	7,7 (2029)	1,9	111,7	2,82–3,20	14,30–15,30

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 4.8
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Papua

Provinsi		Papua Barat	Papua	Papua Pegunungan	Papua Tengah	Papua Selatan	Papua Barat Daya
Rata-rata LPE (%)	2025–2029	5,7	6,4	7,0	7,7	5,8	5,8
LPE (%)	2029	6,6	7,3	8,0	8,6	6,7	6,6
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	120,6	88,0	19,1	119,5	65,5	64,9
	2029	164,0	126,9	28,6	179,4	91,9	89,4
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	0,3	0,4	0,1	0,7	0,2	0,2
	2029	0,3	0,4	0,1	0,8	0,1	0,2
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	19,62- 20,12	16,00–16,50	30,00–31,00	26,50–27,00	16,50–17,00	17,60–18,00
	2029	13,76–14,76	12,65–13,65	17,50–18,50	15,50–16,50	12,50–13,50	11,76–12,76
Rasio Gini	2025	0,370–0,380	0,380–0,383	0,377–0,383	0,380–0,383	0,372	0,300
	2029	0,331–0,335	0,355–0,359	0,339–0,343	0,374–0,380	0,367–0,372	0,295–0,300
Indeks Modal Manusia	2025	0,47	0,44	0,43	0,42	0,44	0,49
	2029	0,49	0,47	0,45	0,45	0,47	0,52
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	1,08	59,28	59,28	59,28	59,28	1,08
	2029	23,09	78,99	78,99	78,99	78,99	23,09
IKLH Daerah	2025	82,89	82,19	83,53	82,56	80,63	82,89
	2029	83,53	82,83	84,15	83,20	81,30	83,52
TPT (%)	2025	3,75–4,06	6,00–6,40	1,75–2,10	2,65–3,12	0,84–1,00	6,30–6,80
	2029	3,68–4,00	5,48–6,00	1,68–2,00	2,00–2,40	0,69–0,84	5,32–5,92

4.8.3 Arah Pembangunan Wilayah Papua

Gambar 4.19
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Papua dalam Mencapai Visi Presiden 2029:
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen

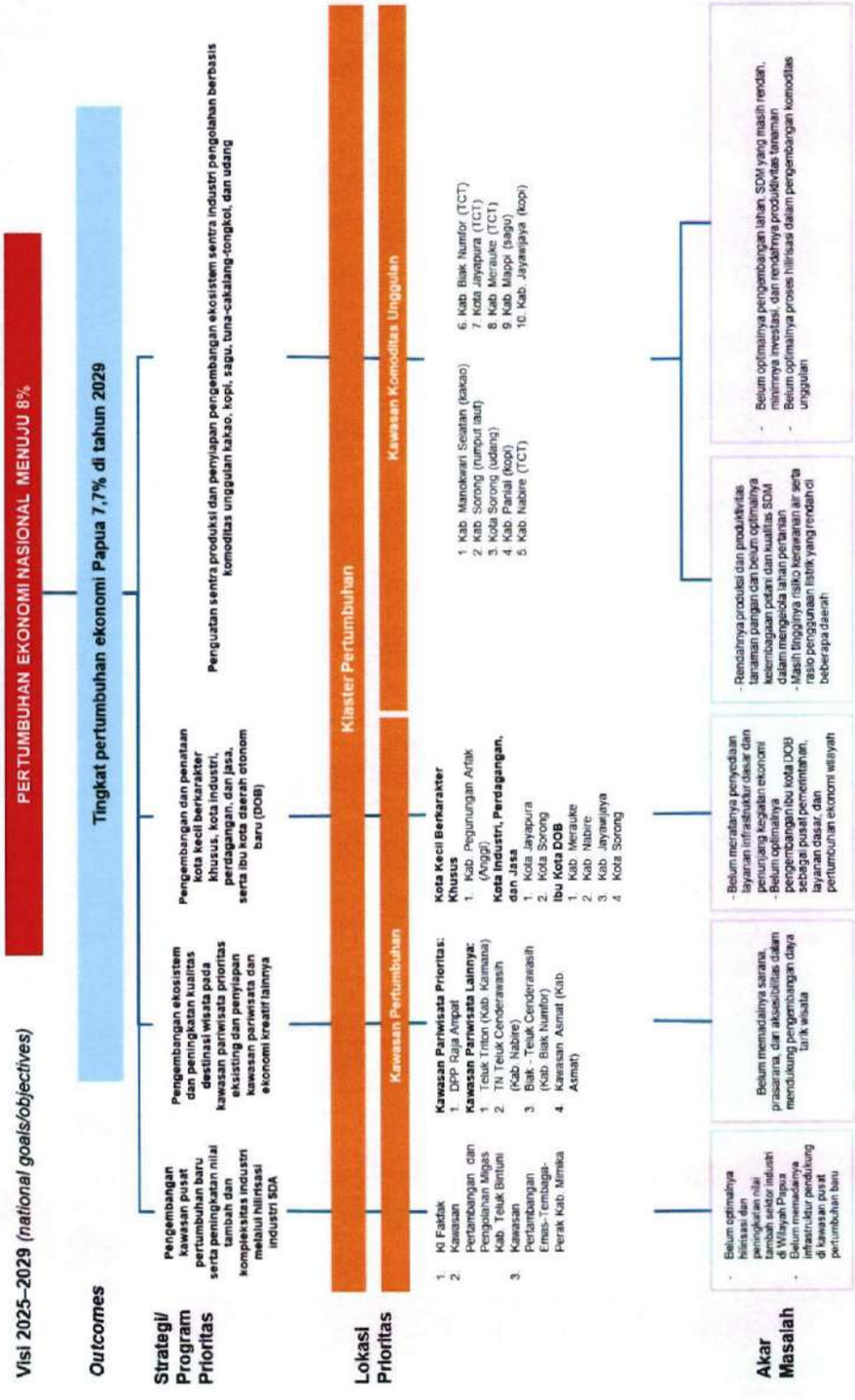

Gambar 4.20
Alur Kerja Wilayah Pembangunan Papua dalam Mencapai Visi Presiden 2029
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM

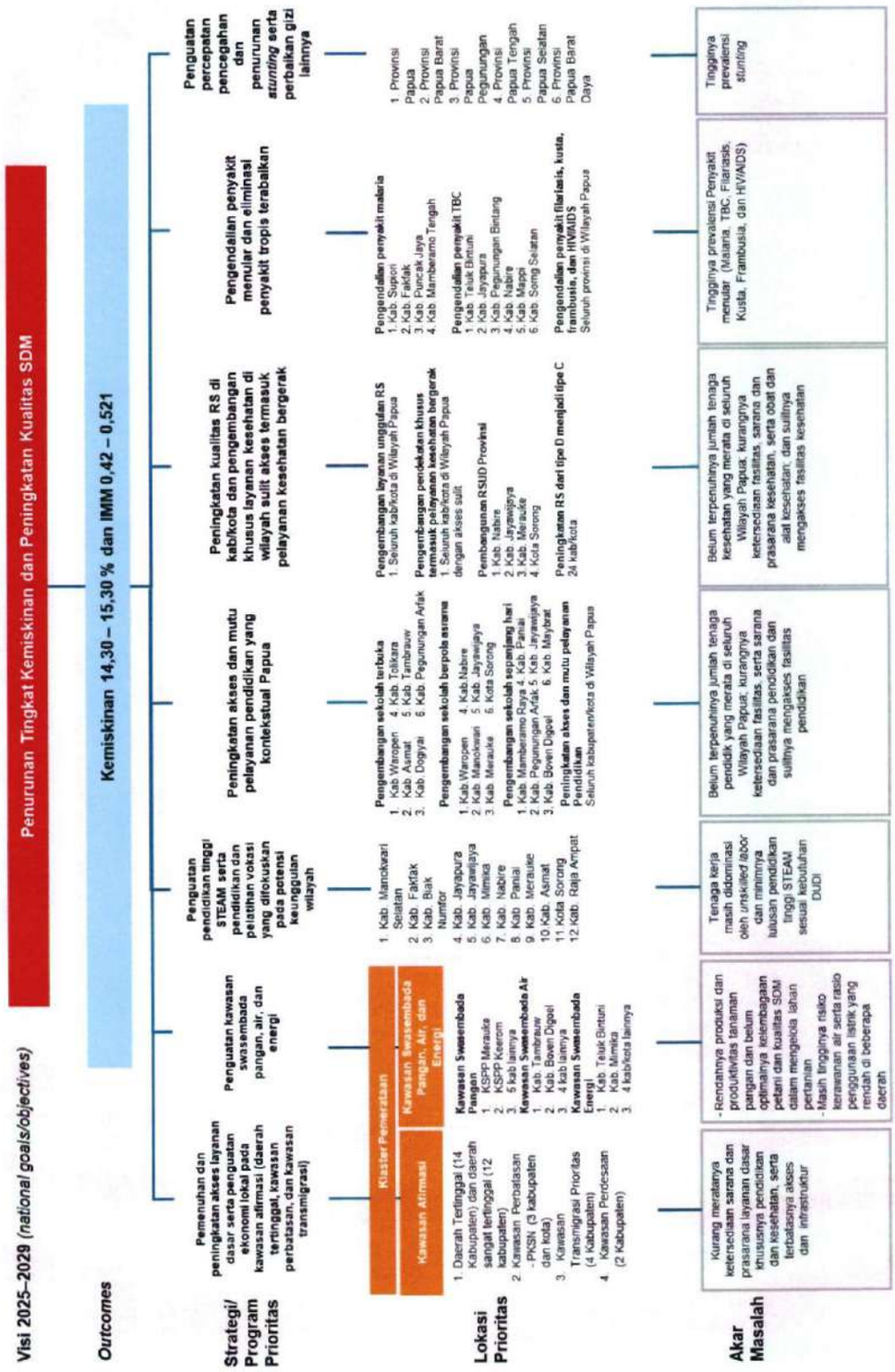

Gambar 4.21
Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Papua

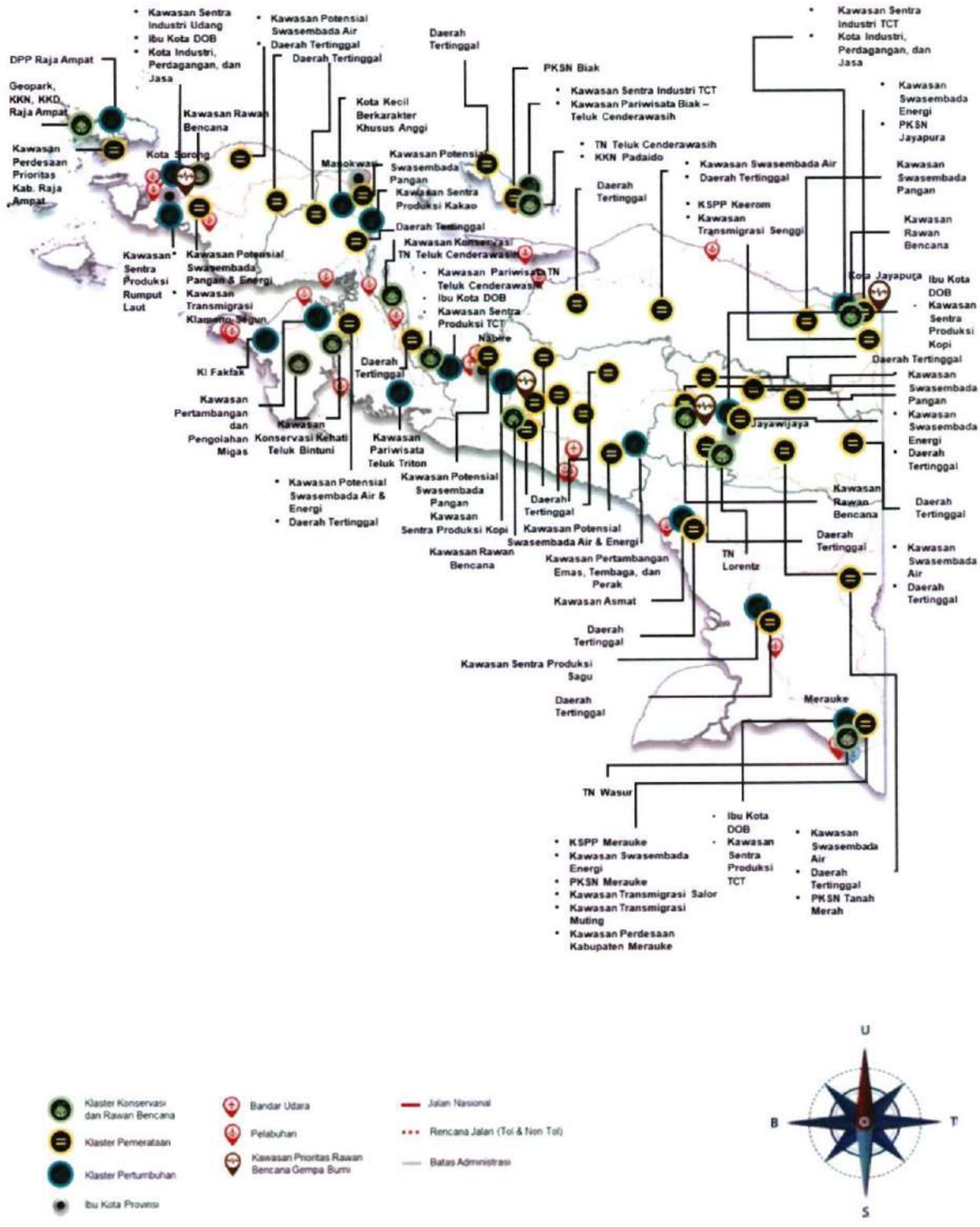

BAB V
Pendanaan Pembangunan

5.1 Prioritas Pendanaan dan Investasi Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2025–2029 merupakan tahap awal penguatan fondasi transformasi menuju pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045. Pendanaan RPJMN Tahun 2025–2029 diutamakan untuk pelaksanaan 8 (delapan) Prioritas Nasional, dengan indikasi total kebutuhan pendanaan sebagai berikut.

Tabel 5.1
Indikasi Total Kebutuhan Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2025–2029

Prioritas Nasional (PN)	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)	
	APBN	Non APBN
Prioritas Nasional 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	18.743,7	
Prioritas Nasional 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1.698.953,5	6.258.157,9
Prioritas Nasional 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	433.825,8	2.235.709,4
Prioritas Nasional 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3.147.395,5	5.972.182,3
Prioritas Nasional 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	228.047,3	1.412.112,4
Prioritas Nasional 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.395.926,2	890.634,4

Prioritas Nasional (PN)	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)	
	APBN	Non APBN
Prioritas Nasional 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	143.506,7	
Prioritas Nasional 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	613.828,3	

Catatan:

- Pendanaan Non APBN merupakan indikasi kebutuhan investasi yang antara lain bersumber dari BUMN dan Swasta

Kebutuhan Pendanaan Prioritas Nasional dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencakup rincian kebutuhan belanja kementerian/lembaga dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, namun belum termasuk rincian kebutuhan Transfer ke Daerah. Kebutuhan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencakup dukungan investasi dan pembiayaan dari Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara/Swasta) yang masih bersifat indikasi.

Adapun ilustrasi indikasi kebutuhan pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2025–2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Prioritas Nasional (PN) 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Program Prioritas (PP) 11: Swasembada Energi

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2025–2029 (Rp Juta)			
						APBN		Non APBN	
				2025	2029	Belanja K/L	Belanja Non K/L	BUMN	Swasta
KP 03: Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	01 - Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan	01 – Konsumsi biofuel	juta KL	13,50	17,11	25.995.981,9	-	104.308.000,0	85.027.000,0
		02 - Produksi listrik energi terbarukan	GWH	50.739	62.063				
	02 - Meningkatnya efisiensi energi	01 - Penurunan intensitas energi final	SBM/miliar rupiah	0,97	1,84				

Instansi Pengampu:
Kementerian ESDM, BUMN, Swasta

Keterangan:
- Indikasi Pendanaan Belanja K/L dalam APBN berdasarkan KRISNA RPJMN.
- Indikasi Pendanaan Non APBN berdasarkan usulan proyek-proyek strategis nasional seperti:

1. Pengembangan Bioethanol
2. Pengembangan Biofuel
3. Pembangunan Bahan Bakar Hijau
4. Gasifikasi Batubara

1. Pengembangan PLTP
2. Pembangunan PLT Surya
3. Pembangunan PLT Bayu

Ilustrasi Indikasi Kebutuhan Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2025–2029

Kebutuhan pendanaan pembangunan yang memiliki keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu didukung dengan sumber pendanaan non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lainnya. Untuk itu, kebutuhan pendanaan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 difokuskan pada bauran sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun ilustrasi indikasi kebutuhan pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2025–2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Prioritas Nasional 2:

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Program Prioritas (PP) 11: Swasembada Energi

Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan menjadi salah satu Kegiatan Prioritas (KP) dalam PP ini yang diampu oleh Kementerian ESDM. Kegiatan Prioritas ini memiliki sasaran dan target yang akan dicapai selama kurun waktu 2025–2029 berupa (i) meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan sekitar 13,5 juta KL dan 50.739 GWH pada tahun 2025 serta diharapkan mengalami peningkatan pada tahun 2029 menjadi sekitar 17,11 juta KL dan 62.063 GWH; dan (ii) meningkatnya efisiensi energi 0,97 SBM/miliar rupiah pada tahun 2025 menjadi 1,84 SBM/miliar rupiah pada tahun 2029, untuk mencapai sasaran dan target tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2025–2029 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp25,99 triliun. Pemerintah juga berharap agar pelaksanaan Kegiatan Prioritas ini dapat didukung oleh sumber pendanaan non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lainnya dengan indikasi berasal dari BUMN sebesar Rp104,31 Triliun dan swasta sebesar Rp85,03 Triliun. Indikasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara difokuskan untuk pembentukan ekosistem yang kondusif serta penyusunan regulasi serta kegiatan teknis lainnya. Sementara itu, sumber pendanaan yang berasal dari BUMN dan Swasta akan difokuskan untuk pengembangan Bioethanol, pengembangan Biofuel, pembangunan Bahan Bakar Hijau, gasifikasi batubara, pengembangan PLTP, serta pembangunan PLT Surya dan PLT Bayu.

5.2 Pengelolaan Belanja Pemerintah

5.2.1 Belanja Kementerian/Lembaga

Belanja kementerian/lembaga 2025–2029 difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat seperti, antara lain, membangun sekolah unggul dan revitalisasi sekolah; menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas; jaminan kesehatan dan perlindungan sosial; penyediaan rumah murah bersanitasi baik; penegakan hukum, serta kemudahan berusaha.

Pemanfaatan belanja kementerian/lembaga juga difokuskan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, energi dan digital, khususnya yang mendukung pelaksanaan hilirisasi industri, swasembada pangan, swasembada air serta pelaksanaan proyek bersifat strategis yang masih perlu dilanjutkan keberlangsungannya, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemanfaatan belanja pada sektor-sektor tersebut juga dilengkapi dengan penguatan belanja kementerian/lembaga pada sektor riset dan inovasi sehingga terwujud intervensi pemerintah yang produktif dan tepat sasaran namun tetap efisien.

Selain itu, guna mendukung pemanfaatan belanja pemerintah yang berkualitas, optimalisasi pemanfaatan belanja kementerian/lembaga perlu dilakukan melalui penyempurnaan proses penyiapan usulan bentuk, cakupan, dan lokasi intervensi pemerintah melalui *output* prioritas dan penajaman proses pengalokasian pendanaannya agar lebih tepat sasaran. Optimalisasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tetap mempertahankan dan melanjutkan pemerataan kualitas pelayanan yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata di masyarakat. Oleh karena itu, diupayakan intervensi yang solutif dan implementatif untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, serta memperhatikan kesiapan dan kapasitas kementerian/lembaga dalam melaksanakan upaya intervensi tersebut.

Pemanfaatan belanja kementerian/lembaga senantiasa dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip *money follow programs* dengan mempertimbangkan keterbatasan dan ketersediaan anggaran. Pemanfaatan sumber pendanaan Rupiah Murni pada belanja kementerian/lembaga difokuskan untuk mendanai kegiatan operasional, wajib, dan reguler. Integrasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan selain Rupiah Murni seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Surat Berharga Syariah Negara dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha perlu diperkuat guna mengurangi dependensi kementerian/lembaga hanya pada sumber pendanaan Rupiah Murni. Selain itu, pemanfaatan belanja kementerian/lembaga juga perlu didukung dengan perluasan kapasitas pendanaan secara inovatif, optimalisasi manajemen investasi publik serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja kementerian/lembaga.

5.2.2 Belanja NonKementerian/Lembaga melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Kebijakan belanja nonkementerian/lembaga jangka menengah 2025–2029 diarahkan untuk mendukung arah kebijakan fiskal secara umum yaitu untuk penguatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui akselerasi reformasi struktural. Kebijakan belanja nonkementerian/lembaga diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat (*well-being*), dan pemerataan pembangunan. Dalam kerangka tersebut, kebijakan belanja nonkementerian/lembaga akan tetap berada pada koridor optimalisasi belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja (*spending better*).

5.2.3 Transfer ke Daerah

Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara umum diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai Misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional.

Arah kebijakan Dana Transfer ke Daerah adalah sebagai berikut:

(1) mengarahkan pemanfaatan Transfer ke Daerah yang didasarkan pada perencanaan berbasis Tematik Holistik Integratif dan Spasial (THIS);

(2) mengarahkan kebijakan Transfer ke Daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan kemiskinan absolut, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

(3) mendorong pemanfaatan Transfer ke Daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah yang difokuskan pada penyediaan pelayanan dasar dan optimalisasi sektor unggulan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah;

(4) mengarahkan kebijakan serta pengalokasian Transfer ke Daerah yang bersifat asimetris sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

(5) meningkatkan kualitas tata kelola Transfer ke Daerah mulai dari perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan hingga pengendalian dan evaluasi dalam mendukung sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah.

5.2.3.1 Dana Bagi Hasil

Arah kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

(1) melakukan pendampingan pemanfaatan Dana Bagi Hasil, khususnya bagi daerah yang memiliki alokasi Dana Bagi Hasil tinggi;

(2) mengarahkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil yang ditentukan penggunaannya *(earmarked)* dalam rangka pencapaian program kerja Asta Cita 2, 3, 4, dan 5 antara lain: menjaga kualitas lingkungan hidup; meningkatkan kualitas layanan kesehatan; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;

(3) mendorong tata kelola Dana Bagi Hasil yang lebih akuntabel dan transparan melalui perluasan kertas kerja perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil bersama pemerintah daerah, penetapan alokasi Dana Bagi Hasil yang tepat waktu dan tepat jumlah serta percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar Dana Bagi Hasil;

(4) mendorong pengalokasian Dana Bagi Hasil dengan mempertimbangkan dampak eksternalitas negatif melalui penguatan kolaborasi kementerian/lembaga terkait;

(5) meningkatkan sinkronisasi alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil dengan berbagai sumber pendanaan lainnya dalam mendukung prioritas nasional.

5.2.3.2 Dana Alokasi Umum

Arah kebijakan Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut:

(1) melanjutkan kebijakan *hold harmless* dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum sampai dengan tahun 2027 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

(2) menajamkan pengelompokan dan perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan karakteristik kewilayahan dalam rangka pencapaian pemerataan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah;

(3) memperkuat sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum dengan sumber pendanaan lainnya dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional;

Arah kebijakan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya adalah sebagai berikut:

(1) memfokuskan menu-menu dalam rangka mendorong pemerintah daerah menyelesaikan gap capaian standar pelayanan minimal sehingga proporsi Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya menurun;

(2) mendukung program kerja Asta Cita 2, 3, 4, 5, dan 6 antara lain penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

(3) menyediakan sumber data berkualitas untuk perhitungan Dana Alokasi Umum yang selaras dengan indikator standar pelayanan minimal;

(4) melaksanakan *monitoring* dan evaluasi efektivitas Dana Alokasi Umum dalam pencapaian indikator standar pelayanan minimal.

5.2.3.3 Dana Alokasi Khusus

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas perencanaan Dana Alokasi Khusus dan sejalan dengan amanat Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, maka disusun kebijakan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah. Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah merupakan bagian Transfer ke Daerah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus Tahunan. Berikut adalah arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah yang meliputi:

(1) mendorong pemanfaatan skema pendanaan yang tepat sesuai kategori kapasitas fiskal daerah;

(2) menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) sinkronisasi berbagai sumber pendanaan dalam mendukung prioritas nasional;

(3) menerapkan konsep asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik daerah melalui mekanisme usulan peminatan;

(4) menerapkan konsep ketuntasan melalui pendekatan penyelesaian target spesifik dan cakupan daerah prioritas;

(5) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi Dana Alokasi Khusus melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi;

(6) mendorong komitmen Pemerintah Daerah dalam pengusulan, persiapan, pelaksanaan, dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus melalui penyelarasan dan kolaborasi kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(7) mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari dana transfer khusus.

Desain kebijakan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah terdiri atas Tematik, Bidang, dan jenis Dana Alokasi Khusus sebagai berikut.

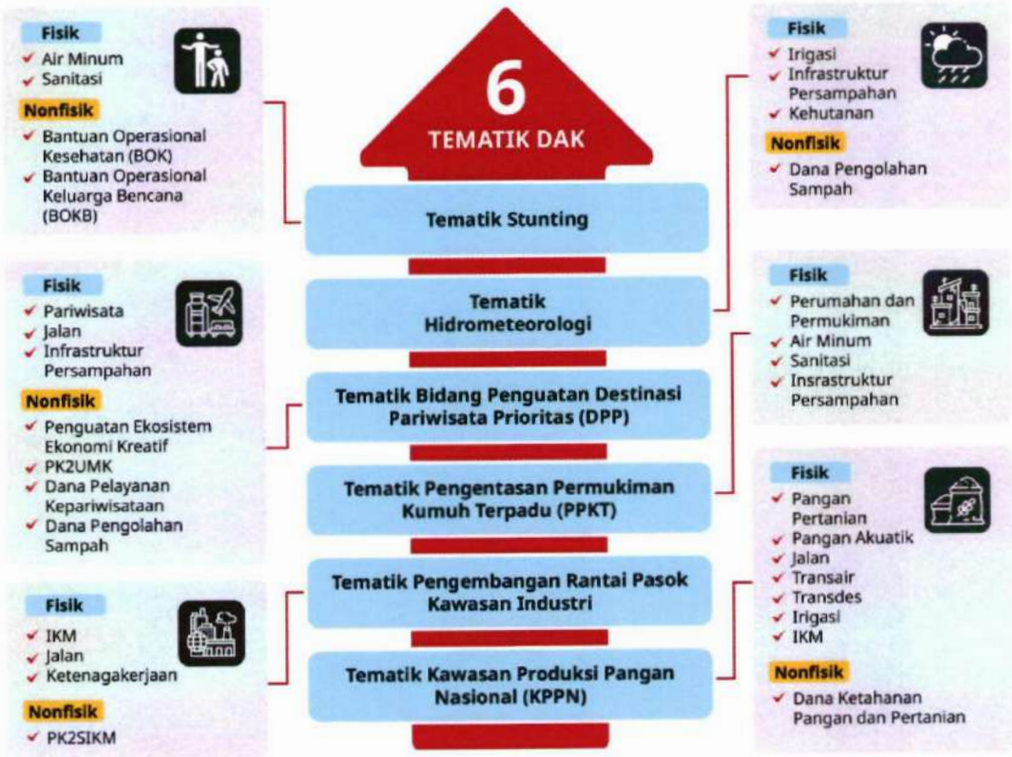

Adapun lima bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan empat jenis Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sebagai berikut

Hibah ke Daerah

Hibah ke Daerah diberikan kepada daerah dalam meningkatkan kinerjanya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan/Proyek Strategis Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas terpilih. Perencanaan Hibah ke Daerah yang bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan arah kebijakan Hibah ke Daerah yang bersumber dari Rupiah murni ditujukan untuk (1) sebagai *matching grant* dengan kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik, Nonfisik, atau sumber pendanaan alternatif lain seperti pinjaman daerah dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, (2) kebencanaan, (3) arahan Presiden lainnya.

Adapun kebijakan bidang/jenis Dana Alokasi Khusus akan dimutakhirkan setiap tahunnya dalam RKP dengan memperhatikan dinamika prioritas pembangunan tahunan. Desain tersebut akan di detailkan dalam forum *Multilateral Meeting* tingkat pemerintah pusat sebagai bagian dari konsep perencanaan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah. Adapun pendetailan desain Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah minimal meliputi sasaran tematik/bidang/jenis, kriteria lokasi prioritas, indikasi pendanaan minimal 3 tahun kedepan.

Desain Dana Alokasi Khusus ini menjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus tahunan 2026–2029. Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 yang sudah dirumuskan dalam RKP Tahun 2025 tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan berlaku. Adapun penyusunan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2030 dapat mengacu pada arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah ini apabila belum terdapat arah kebijakan yang baru atau arahan lain.

5.2.3.4 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus. Arah kebijakan dana otonomi khusus adalah sebagai berikut

(1) mendorong prioritas penggunaan dana otonomi khusus untuk
    (a) melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan infrastruktur dasar;
    (b) meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, dan ketenagalistrikan guna mendorong iklim investasi daerah;
    (c) mendukung capaian pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029 untuk mewujudkan misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
(2) meningkatkan efektivitas penggunaan dana otonomi khusus melalui sinergi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi pendanaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan;
(3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah pengelola dana otonomi khusus, terutama di daerah otonom baru melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, serta pengawasan yang intensif dan berkesinambungan;

(4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus dengan penajaman pemantauan dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

Dana otonomi khusus terdiri atas dana otonomi khusus Aceh dan dana otonomi khusus Papua. Arah kebijakan untuk masing-masing dana otonomi khusus sebagai berikut

(1) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Tingkat belanja pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) yang relatif besar di Aceh yaitu di level rata-rata 32 persen terhadap PDRB perlu dipertahankan kestabilannya terutama untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh. Namun disisi lain, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, terdapat kecenderungan penurunan Dana Otsus sebesar satu persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional sejak tahun 2023 dan berakhir di tahun 2028, diprakirakan akan menurunkan belanja pemerintah sebesar dua persen PDRB di tahun 2023 dan empat persen PDRB di tahun 2028.

Penurunan Dana Otsus pada tahun 2023 diantisipasi sebelumnya dengan mengupayakan pengembangan berbagai pusat pertumbuhan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) agar peranan investor semakin meningkat di Aceh, namun hasilnya belum sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini akan berdampak negatif pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, layanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Selain itu, dengan menurunnya transfer Dana Otonomi Khusus Aceh dapat menghambat pencapaian target-target RPJP Provinsi Aceh 2025–2045. Berikut merupakan alternatif rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan

(a) melakukan revisi amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam perpanjangan pengalokasian Dana Otsus (*injury time*) hingga minimal periode RPJMN Tahun 2025–2029 berakhir dan/atau penyesuaian besaran alokasi Dana Otsus Aceh. Hal ini dapat merujuk pada besaran otsus sebesar satu persen dari plafon Dana Alokasi Nasional sampai dengan periode RPJMN Tahun 2025–2029 berakhir. Hal ini dilakukan agar proses perencanaan pada prioritas kegiatan lebih tepat sasaran dalam upaya menurunkan kemiskinan, peningkatan iklim investasi berusaha, peningkatan layanan dasar, serta efektivitas pelaksanaan keistimewaan Aceh;

(b) peningkatan/pertumbuhan peran dunia usaha/swasta bergantung kepada iklim investasi/berusaha di Aceh. Berbagai insentif untuk peningkatan peran dunia usaha perlu disiapkan di Aceh dari berbagai level pemerintahan sesuai kewenangan. Selain itu, mendorong ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu dilakukan melalui program pemberdayaan yang masif dan terpadu serta penyediaan skema pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung ekonomi kerakyatan melalui penguatan kemandirian pangan dapat dilakukan dengan hilirisasi produk sumber daya alam seperti pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan serta diperkuat dengan pembangunan industri pengolahan;

(c) membangun fondasi yang kukuh dalam peningkatan Penerimaan Asli Aceh (PAA) melalui penguatan sektor-sektor tertentu agar berbagai masalah yang berpotensi muncul dari dampak penurunan dana otonomi khusus dapat terselesaikan. Penguatan Penerimaan Asli Aceh dapat difokuskan pada pengembangan kawasan *high value economy* sesuai

dengan tema pembangunan Aceh sebagai Serambi Barat Indonesia yang mengedepankan pengembangan agrikultur dan agroindustri, ekonomi hijau dan syariah, serta menjadi rujukan pendidikan Islam global.

(2) Dana Otonomi Khusus Papua

Arah kebijakan umum dana otonomi khusus Papua diarahkan pada hal-hal sebagai berikut

(a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (satu persen dari plafon dana alokasi umum nasional) diarahkan untuk mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik terutama pada Orang Asli Papua hingga ke tingkat kampung, peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua, penguatan lembaga keagamaan dan adat, perlindungan masyarakat hukum adat dan penataan tanah adat/ulayat, penguatan sosial budaya, dan hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah;

(b) Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan (1,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional) diarahkan untuk

(i) belanja pendidikan (minimal 30 persen), terutama untuk mendukung akselerasi akses dan mutu layanan pendidikan yang kontekstual Papua, seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua; pemberian intensif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik; pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik; peningkatan tata kelola pendidikan; penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan; peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan; peningkatan literasi; penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua; serta penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;

(ii) belanja kesehatan (minimal 20 persen), terutama untuk mendukung peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, melalui pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua; penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*) dan *telemedicine*, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan; pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan; penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta pemenuhan makanan bergizi seimbang; penurunan kematian ibu dan bayi; serta pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (*Tuberkulosis*, malaria, kusta, filariasis, frambusia, dan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*); dan

(iii) pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk mendukung penguatan sentra produksi dan penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas unggulan; pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata prioritas dan rintisan; penguatan ketahanan pangan berbasis pangan lokal; pemberdayaan masyarakat kampung termasuk melalui pengembangan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Industril Kecil Menengah, dan Badan Usaha Milik Kampung; peningkatan wirausaha produktif yang memprioritaskan Orang Asli Papua; dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal;

(c) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), diarahkan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi, listrik, air minum, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, terutama yang mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, serta pengembangan kawasan perkotaan prioritas, ibu kota daerah otonom baru, dan kawasan lainnya;

(d) Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus diarahkan untuk belanja pendidikan (35 persen), belanja kesehatan dan perbaikan gizi (25 persen), belanja infrastruktur (30 persen), serta belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat (10 persen), terutama dalam rangka penguatan budaya lokal dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat adat.

Mengingat arahan penggunaan dana otonomi khusus akan mempertimbangkan aspek kinerja, pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Wilayah Papua dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029, dengan dukungan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua.

5.2.3.5 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut arah kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta Tahun 2025–2029:

(1) memastikan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan pada kelima urusan Keistimewaan (tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan pemerintah; kebudayaan; pertanahan; serta tata ruang) yang berpedoman pada Rencana Induk Dana Keistimewaan serta dokumen perencanaan pusat dan daerah;

(2) mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang difokuskan untuk penuntasan isu strategis, utamanya dalam (a) penurunan tingkat kemiskinan; (b) pengurangan ketimpangan antarkelas sosial (pendapatan) dan antarwilayah; (c) pemberdayaan masyarakat; (d) peningkatan konektivitas ruang strategis keistimewaan dan kualitas layanan dasar publik; serta (e) pelestarian dan pengembangan kebudayaan;

(3) meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan belanja kementerian/lembaga untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah;

(4) meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Keistimewaan melalui pengurangan penggunaan untuk belanja birokrasi penunjang, administrasi, dan pengawasan;

(5) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.

5.2.3.6 Dana Desa

Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi desa dengan tujuan mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Arah kebijakan Dana Desa selama periode 2025–2029 sebagai berikut

(1) mendukung kemandirian desa berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan, potensi, dan karakteristik desa melalui
   (a) perencanaan, pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur dasar desa dalam penyediaan air minum, sanitasi, persampahan, perumahan, dan konektivitas;
   (b) penyediaan pelayanan dasar skala desa, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, dan elektrifikasi;
   (c) penanganan kemiskinan perdesaan melalui penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
   (d) penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim melalui pelestarian lingkungan serta mitigasi dan adaptasi bencana;
   (e) percepatan implementasi desa digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal dan lainnya;
   (f) mendorong transformasi ekonomi desa serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa Bersama;
   (g) mendukung program ketahanan pangan.
(2) mengalokasikan Dana Desa dengan memperhatikan keadilan dan keberpihakan serta pemberian insentif bagi kinerja desa;
(3) mengoptimalkan sinergitas dukungan pendanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan sumber pendanaan lainnya;
(4) meningkatkan strategi dan kualitas perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa melalui penguatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga;
(5) mendukung implementasi sistem informasi berbasis elektronik yang saling terkoneksi sesuai dengan kewenangan untuk mendukung:
   (a) peningkatan kualitas data keuangan desa yang mencerminkan akuntabilitas dan tata kelola yang efektif, efisien, dan ekonomis; serta
   (b) peningkatan kualitas data non-keuangan desa yang mencerminkan kinerja desa.

5.3 Optimasi dan Sinergi Sumber-Sumber Pendanaan Pembangunan

Pendanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dipenuhi dari sumber-sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah yang harus digunakan secara efektif, efisien, dan bersinergi melalui integrasi pendanaan untuk memaksimalkan dampak pembangunan, mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta dan non-pemerintah lainnya.

Pendanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dipenuhi dari sumber-sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah yang harus digunakan secara efektif, efisien, dan bersinergi.

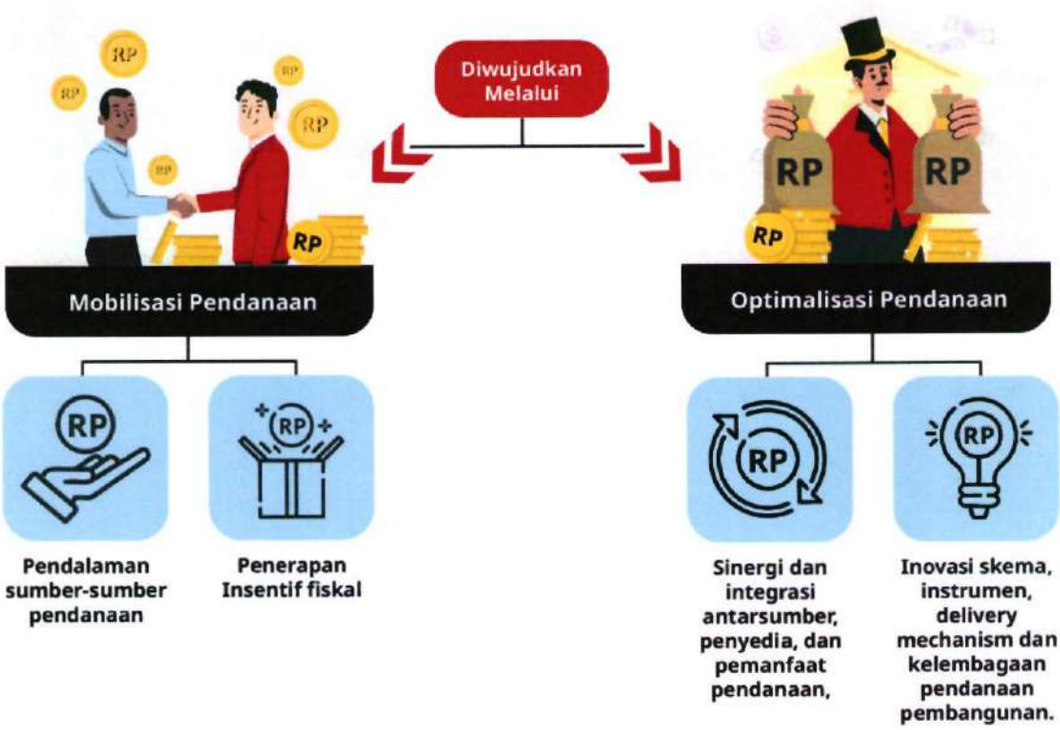

Mobilisasi pendanaan dilakukan melalui (1) pendalaman serta perluasan sumber-sumber pendanaan; dan (2) penerapan insentif fiskal. Optimalisasi pendanaan dilakukan melalui (1) sinergi dan integrasi antarsumber, penyedia, dan pemanfaat pendanaan; serta (2) inovasi skema, instrumen, *delivery mechanism* dan kelembagaan pendanaan pembangunan.

Sumber-sumber pendanaan pemerintah berasal dari penerimaan dari pajak, nonpajak, penerimaan hibah, dan dari instrumen pembiayaan, baik luar negeri maupun dalam negeri berupa pinjaman dan surat berharga. Sumber-sumber pendanaan non-pemerintah mencakup pendanaan dari investasi swasta, masyarakat, dan BUMN dalam berbagai bentuk skema dan instrumennya.

Sumber-sumber pendanaan pemerintah tersebut digunakan sebagai instrumen untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah sebagaimana poin 5.2 tersebut di atas. Penyusunan kebutuhan belanja pemerintah kementerian/lembaga disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Sumber-sumber pendanaan pemerintah berupa pajak dan non-pajak yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rupiah Murni diprioritaskan pemanfaatannya untuk (1) pembiayaan operasional pemerintah, (2) pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan minimal, (3) transfer ke daerah, serta (4) program-program prioritas yang sebagian besar atau seluruhnya menggunakan produk nasional/lokal. Sumber-sumber pembiayaan dalam negeri yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berupa pinjaman dalam negeri diprioritaskan untuk mendukung pengembangan industri nasional dalam negeri sementara surat berharga negara digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek/kegiatan penyediaan layanan umum dan layanan dasar pada berbagai prioritas. Sumber pendanaan dalam bentuk penerimaan hibah dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta pengembangan kebijakan dan untuk mendukung inovasi pembangunan.

Instrumen pembiayaan dari luar negeri berupa pinjaman proyek akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi, peluang alih teknologi dan praktik baik internasional, penyiapan konsep baru (*piloting*), serta sebagai pengungkit pemanfaatan sumber dan skema pendanaan lainnya. Instrumen pembiayaan dari luar negeri berupa pinjaman program akan dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan program-program

prioritas, menjaga arus kas pemerintah, serta cadangan devisa. Surat utang negara dalam bentuk valas akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas dan menjaga keseimbangan cadangan devisa pemerintah. Pemanfaatan instrumen pembiayaan luar negeri dilakukan dengan *prudent* serta memperhatikan keberlanjutan fiskal yang terkait dengan besaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan stok utang luar negeri pemerintah.

Dukungan pembiayaan dari investasi swasta dan penugasan Badan Usaha Milik Negara dimanfaatkan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur ataupun proyek prioritas pemerintah lainnya melalui skema investasi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), skema akuisisi, skema *spending to invest* dan/atau skema penugasan pemerintah. Investasi Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk infrastruktur sosial ekonomi juga perlu disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional. Sementara itu, pendanaan dari masyarakat diarahkan pemanfaatannya untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur sosial serta dikembangkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur ekonomi yang dibaurkan dengan sumber pendanaan lainnya.

Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, langkah-langkah inovasi yang akan dilakukan dalam meningkatkan kapasitas pendanaan meliputi hal-hal sebagai berikut.

(1) Mobilisasi Pendanaan

(a) perluasan sumber-sumber pendanaan

(i) pemanfaatan pendanaan syariah dan mengoptimalkan nilai finansial dan ekonomi aset-aset pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta mengoptimalkan nilai manfaat kawasan melalui penerbitan berbagai regulasi teknis dari sejumlah modalitas seperti skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) dan Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK), serta pengembangan modalitas terkait utilisasi aset lainnya;

(ii) meningkatkan optimalisasi pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang melalui konsolidasi lembaga-lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah;

(iii) memperkuat sinergi pendanaan dari masyarakat, antara lain dalam bentuk dana tanggung jawab sosial perusahaan dan dana filantropi. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan-kebijakan operasional yang kondusif untuk peningkatan kontribusi tanggung jawab sosial lingkungan dari perusahaan (TJSL) dan dana filantropi, serta mengarahkan agar proyek-proyek tersebut mendukung program-program prioritas pemerintah dan perlu memastikan keberlanjutan pengelolaan proyek;

(iv) dana keagamaan seperti zakat, diarahkan untuk mendukung prioritas pemerintah dan mendukung penanganan masalah sosial serta bencana. Pemanfaatan dana keagamaan Islam dilaksanakan sejalan dengan kebijakan pengembangan ekonomi syariah.

(b) Penerapan insentif

Mobilisasi dana publik untuk menarik investasi pembiayaan nonpemerintah melalui fasilitasi skema-skema pendanaan inovatif yang dilakukan oleh swasta, antara lain berupa penyiapan struktur pendanaan, dukungan konstruksi untuk mengoptimalkan nilai manfaat *output* pendanaan inovatif, dan pengaturan tarif.

(2) Optimalisasi Pendanaan

(a) Strategi, sinergi, dan integrasi antar-sumber penyedia dan pemanfaat pendanaan

(i) memperkokoh kolaborasi lintas sektor pada skala global dalam kerangka *Global Blended Finance Alliance* (GBFA) untuk menarik lebih banyak investasi swasta yang berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan;

(ii) memperkuat sinergi pendanaan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah akan memberikan dukungan pendanaan untuk proyek-proyek yang dibiayai dengan sinergi pendanaan APBD dengan sumber pendanaan lain.

(b) inovasi skema, instrumen, *delivery mechanism*, dan kelembagaan pendanaan pembangunan

(i) mengoptimalkan sumber pendanaan luar negeri dengan mengembangkan skema-skema baru seiring dengan naiknya posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas. Sumber pendanaan luar negeri diarahkan untuk mengembangkan skema *consolidated/collaborative financing* yaitu memanfaatkan sumber pendanaan luar negeri sebagai katalis untuk mengkonsolidasikan sumber-sumber pendanaan lainnya termasuk sumber pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN, BUMD, dan masyarakat. Selain itu, sumber pembiayaan luar negeri akan diarahkan untuk investasi dalam bentuk skema *spend to invest*. Dalam kerangka skema *spend to invest*, penyedia barang dari luar negeri yang berpartisipasi dalam pengadaan barang dengan pinjaman luar negeri dalam jumlah yang banyak dan berulang perlu didorong dan difasilitasi untuk melakukan investasi di Indonesia. Untuk maksud tersebut, diperlukan harmonisasi dan sinergi kebijakan pengadaan pinjaman luar negeri dan kebijakan investasi;

(ii) mengembangkan strategi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dengan mengembangkan model-model bisnis kerjasama pemerintah dengan badan usaha/swasta, mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha skala kecil, serta mengembangkan instrumen *de-risking;*

(iii) mengoptimalkan pemanfaatan instrumen *blended finance* bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan melalui strategi penguatan sistem keuangan domestik dan pasar lokal, mobilisasi sumber pendanaan luar negeri, serta penguatan *development facility* yang membantu meningkatkan proses persiapan, strukturisasi, pengadaan, dan pengawasan proyek pembangunan

(iv) memperkuat kerangka perencanaan dan kerangka kerja sama kelembagaan untuk mengembangkan strategi dan skema bauran pendanaan (*blended financing*) bagi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur skala menengah dan besar;

(v) pembentukan dan pemantapan kerangka kerja sama dan kelembagaan sebagai wadah kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan mitra pembangunan serta pengembangan instrumen-instrumen pemanfaatan dan pengembangan pendanaan hijau, pendanaan biru, dan pendanaan sirkular seperti (i) mekanisme ekonomi karbon, baik melalui skema perdagangan (perdagangan langsung maupun bursa karbon) maupun skema non-perdagangan dalam

bentuk pembayaran berbasis kinerja (*result based payment*) dan pajak atau pungutan karbon; (ii) instrumen transfer fiskal ekologis, asuransi, pertukaran utang untuk alam (*debt for nature swap*), pembiayaan campuran yang bersumber dari filantropi mitra pembangunan dan investasi berdampak, dana perwalian, pasar modal, obligasi termasuk *blue bond* atau *coral bond*, dan pembiayaan berbasis utang; serta (iii) *extended producers responsibility* dan *ecomodulation fee* yang didukung dengan kerangka regulasi yang kondusif serta kerangka kerja pemantauan dan pelaporan.

Selanjutnya, langkah inovasi tersebut perlu didukung dengan perbaikan pengelolaan investasi publik. Pengelolaan investasi publik masih menjadi isu dalam pengelolaan pendanaan di Indonesia. Dari sisi regulasi, peraturan yang rumit dan sering kali tidak konsisten. Selan itu, kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab di sektor pemerintahan mengakibatkan kesenjangan dalam implementasi, audit, dan alokasi sumber daya. Sementara itu, masalah klasik tentang alokasi pendanaan publik yang langka dan tidak efisien mengakibatkan dana publik tidak selalu diarahkan pada proyek-proyek yang menawarkan manfaat ekonomi dan sosial tertinggi.

Prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan dalam investasi publik meliputi

(1) cakupan investasi publik yang meliputi investasi fisik (infrastruktur), investasi dalam bentuk SDM (pendidikan/keterampilan), atau investasi barang/jasa;

(2) perlunya perencanaan yang saksama dan matang. Semua sektor harus memiliki rencana induk yang menghubungkan tujuan pembangunan nasional dengan strategi regional dan sektoral yang disusun melalui berbagai tahapan analisis dan didukung dengan persiapan yang lengkap dan mendalam. Prioritas anggaran harus didasarkan pada evaluasi yang transparan dan berbasis bukti, untuk memastikan sumber daya dialokasikan untuk proyek-proyek dengan tingkat pengembalian sosial ekonomi tertinggi;

(3) regulasi khususnya undang-undang dan peraturan harus relevan, sesederhana mungkin, konsisten di semua sektor dan tingkat pemerintahan, serta disajikan dengan jelas;

(4) pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di semua tingkat pemerintahan, dan antar sektor dan lembaga, serta harus mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan, implementasi, dan audit;

(5) proses pengadaan dan implementasi yang efektif;

(6) alokasi pendanaan menggunakan kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk memastikan bahwa sumber daya publik yang terbatas difokuskan pada proyek dan sektor yang paling bermanfaat;

(7) penilaian proyek berkualitas dimana semua proyek yang diterima untuk investasi publik harus memiliki manfaat bersih (*net benefit*) bagi Indonesia, dengan spesifikasi yang jelas tentang pengembalian yang diperlukan;

(8) penyiapan proyek dilakukan sesuai dengan standar kepatuhan sosial untuk meningkatkan kualitas implementasi dan pencapaian manfaat sosial yang optimal dan berkelanjutan;

(9) kepatuhan terhadap standar lingkungan, *Gender and Social Inclusion* (GSI), dan tata kelola;

(10) proses manajemen aset dan evaluasi yang kuat; serta

(11) pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa proyek yang sedang berjalan selaras dengan tujuan sektoral dan regional.

5.4 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

Kerangka pendanaan jangka menengah merupakan rencana atau strategi yang digunakan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan dalam periode waktu tertentu, yang mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta sumber-sumber pendanaan yang diperlukan. Kerangka pendanaan jangka menengah disusun untuk mengoptimalkan dan menyinergikan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan dalam kerangka waktu lima tahun. Dengan demikian diharapkan target pembangunan nasional dapat selaras dengan kemampuan pendanaan.

Tabel 5.2
Perkiraan Perhitungan Ruang Gerak RPJMN Tahun 2025–2029 (Triliun Rupiah)

Rincian	APBN 2025	2026–2029 *(Range)*	
(1) Belanja negara	3.621,3	18.852,7	24.191,8
(2) Belanja mengikat dan kewajiban lainnya	1.782,8	9.281,8	11.910,4
Anggaran Pendidikan	724,3	3.770,7	4.838,6
Anggaran Kesehatan	197,8	1.029,8	1.321,4
Program Pengelolaan Utang	552,8	2.878,2	3.693,3
Program Pengelolaan Subsidi	307,9	1.603,1	2.057,1
(3) Transfer ke Daerah	919,9	5.180,6	6.692,6
(4) Belanja Operasional K/L, Non K/L, dan Prioritas (termasuk ruang gerak)	918,5	4.390,3	5.588,8

Pada tahun 2025, belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, sedangkan 2026–2029 diperkirakan sebesar Rp18.852,7–Rp24.191,8 triliun. Jika mengikuti proporsi 2025, belanja mengikat dan pembayaran kewajiban lainnya tahun 2026–2029 membutuhkan anggaran sebesar Rp9.281,8–Rp11.901,4 triliun. Dengan demikian untuk belanja operasional K/L, belanja Non K/L, pendanaan prioritas, termasuk untuk ruang gerak Presiden sebesar Rp4.390,3–Rp5.588,8 triliun. Pemanfaatan ruang gerak jangka menengah akan digunakan untuk mendanai prioritas Presiden, menuntaskan proyek tahun 2020–2024 yang masih sesuai dengan prioritas RPJMN Tahun 2025–2029, serta untuk prioritas RPJMN Tahun 2025–2029.

BAB VI
Pengendalian, Evaluasi, dan Tata Kelola Data Pembangunan

6.1 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Dalam rangka mengawal implementasi RPJMN Tahun 2025–2029 dilaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi *ex-ante* dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan kecukupan desain kebijakan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan mencakup penelaahan konsistensi dokumen perencanaan, pemenuhan kaidah kerangka kerja logis, kesiapan pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi risiko. Pengendalian dan evaluasi dalam tahap perencanaan memperhatikan kedudukan RPJMN sebagai (1) instrumen operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang; (2) pedoman bagi penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta (3) pedoman perumusan rencana pembangunan sektoral (pusat/daerah) seperti rencana induk/*masterplan*/*grand design* atau sebutan lainnya.

Sementara pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan untuk memastikan pelaksanaan intervensi dan ketercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat dilakukan sepanjang periode pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat periode pelaksanaan rencana dan tahun terakhir periode pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN menjadi penekanan dalam mengawal pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 secara intensif.

Gambar 6.1
Ruang Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Transformasi pengendalian dan evaluasi pembangunan, didukung dengan sistem informasi terpadu, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, dan tata kelola data pembangunan. Dengan demikian, transformasi pengendalian dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pembangunan, sehingga pembangunan yang dijalankan tidak hanya sebatas terselenggaranya program dan kegiatan (*sent*), tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*delivered*).

6.1.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 sangat krusial dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan. Sebagai bagian dari implementasi aktivitas tersebut, dilakukan pengendalian Program Prioritas Presiden yang secara spesifik mengawal fokus kebijakan Presiden. Pengendalian dan evaluasi akan menjadi salah satu sistem yang mendorong partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung RPJMN.

6.1.1.1 Pengendalian Pelaksanaan RPJMN

Pengendalian pada tahap pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dilakukan untuk mengawal ketercapaian sasaran pembangunan nasional dengan memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, termasuk menyusun rekomendasi penyesuaian kebijakan. Pengendalian tahap pelaksanaan dilakukan secara menyeluruh baik sektoral dan daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pembangunan nasional. Implementasi pengendalian tersebut melalui aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem berbasis digital dalam periode pembangunan 2025–2029. Pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui sinergi dengan Kementerian Koordinator Pelaksana Prioritas Pembangunan beserta kementerian/lembaga/daerah pelaksana.

Kerangka pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional menyebutkan bahwa sinergi pengendalian pembangunan baik di pusat maupun di daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah tidak hanya melihat dari kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran atau rencana yang telah ditetapkan, namun juga menilai dukungan intervensi nasional di daerah maupun intervensi-intervensi lain yang dilaksanakan di daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Pengendalian pelaksanaan RPJMN juga dilakukan dengan berbasis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional pada proses pengendalian tahunan. Hal ini memperkuat pendekatan *problem-oriented* yang selama ini dilakukan (*backward looking*) melalui antisipasi risiko ke depan (*forward looking*). Level risiko yang telah diidentifikasi dan upaya mitigasinya perlu terus dipantau agar kebijakan pembangunan berjalan dengan baik. Identifikasi risiko perlu dilakukan agar antisipasi kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat. Dengan demikian, pengendalian berbasis manajemen risiko akan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Secara umum, untuk pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menghasilkan tindakan korektif berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam periode RPJMN dimaksud.

(1) Pertama, tindakan konstruktif untuk penyesuaian operasional tahunan dalam rangka memastikan pelaksanaan intervensi pemerintah sesuai dengan rencana. Penyesuaian operasional ini meliputi dan tidak terbatas pada perbaikan strategi percepatan pelaksanaan dan penyesuaian teknis lainnya.

(2) Kedua, tindakan korektif dilakukan dalam konteks kebijakan yakni dalam kerangka perencanaan antartahun dalam periode RPJMN untuk memastikan sasaran pembangunan pada akhir periode RPJMN dapat tercapai. Penyesuaian kebijakan dalam kerangka pengendalian RPJMN ini fokus pada perencanaan kebijakan antartahun yang meliputi dan tidak terbatas pada terminasi program/proyek, penajaman lokus, penyesuaian strategi, desain dan sasaran, serta penyesuaian tata kelola pelaksanaan (regulasi dan kelembagaan). Mekanisme terminasi program dan kegiatan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga pelaksana, dan lembaga terkait lainnya yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Tindak lanjut pengendalian tersebut ditentukan atas dasar hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMN. Peta ekosistem pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 sebagaimana terdapat pada Gambar 6.2 memberikan gambaran secara keseluruhan keterkaitan antar-aktivitas pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sepanjang periode jangka menengah. Gambaran umum untuk masing-masing aktivitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Pemantauan Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029

Pemantauan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 mencakup dua hal, yaitu (a) pemantauan atas perkembangan pelaksanaan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dan (b) pemantauan atas perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko pembangunan nasional. Pemantauan pelaksanaan RPJMN dilakukan secara rutin dan berkala sesuai kebutuhan selama periode pelaksanaan RPJMN yang dilaksanakan melalui pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah. Hasil pemantauan akan menjadi dasar pengendalian operasional pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.

(2) Evaluasi Saat Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029

Evaluasi saat pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 mencakup dua hal, yaitu (a) evaluasi tahunan melalui evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan evaluasi kinerja kementerian/lembaga/daerah, serta pelaksanaan program/kegiatan/proyek (kementerian/lembaga/daerah) dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan nasional; dan (b) evaluasi paruh waktu pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 yang akan memberikan *feedback* bagi penyesuaian kebijakan dalam periode RPJMN.

Evaluasi RPJMN dilakukan dengan mengedepankan koordinasi terpadu yang dilakukan seluruh *stakeholders* pelaksana RPJMN dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai koordinator dan penanggung jawab. Kontekstual terpadu dalam hal ini adalah dalam kerangka berjenjang serta terkoneksi antara pemerintah pusat dan daerah.

6.1.1.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN

Evaluasi akhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dilakukan pada tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMN, dan dapat dimutakhirkan satu tahun setelah periode pelaksanaan RPJMN berakhir pada triwulan pertama. Evaluasi akhir RPJMN dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan nasional selama periode 5 tahun.

Mekanisme evaluasi akhir pelaksanaan RPJMN disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang dapat mencakup evaluasi kinerja pembangunan serta evaluasi kebijakan/program strategis. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan dalam penyusunan RPJMN periode berikutnya dalam kerangka RPJPN 2025–2045. Evaluasi akhir dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gambar 6.2
Peta Ekosistem Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029

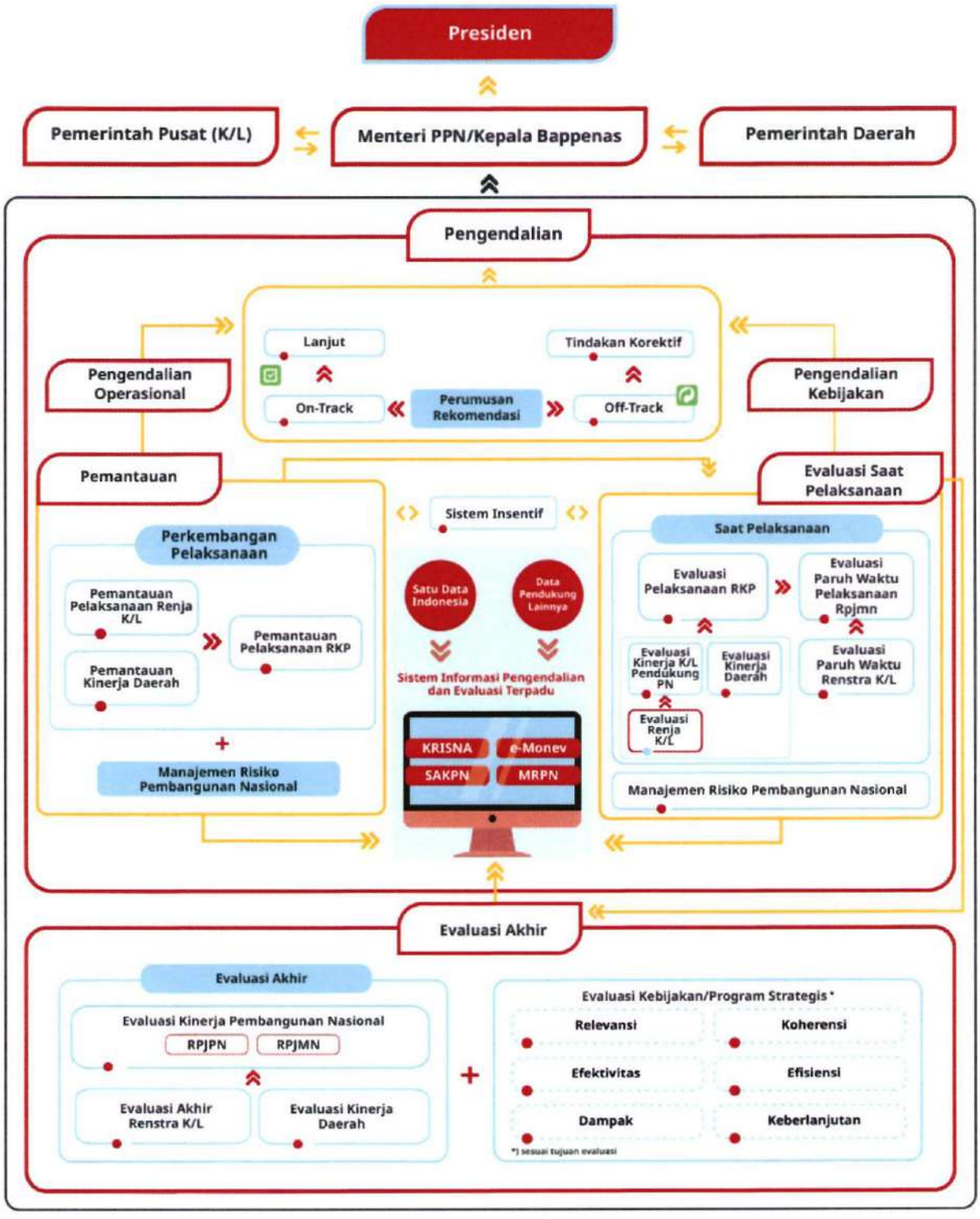

6.1.1.3 Pengendalian Program Prioritas Presiden

Sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional, pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dirancang dengan pendekatan yang lebih terarah dan terstruktur dalam mendukung keberhasilan Program Prioritas Presiden secara efektif dan efisien. Pengendalian Program Prioritas Presiden menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alur pemantauan dan evaluasi RPJMN Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan secara tahunan. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah sepanjang periode 2025–2029 yang dirancang menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) serta pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Oleh karena itu, pengendalian diperlukan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama dalam kaitannya dengan pencapaian Prioritas Nasional, agar selaras dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dan mendukung pencapaian hasil pembangunan secara optimal.

Penekanan pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 yang bersifat spesifik akan difokuskan pada pencapaian Program Prioritas Presiden yang mencakup Kegiatan Prioritas terpilih, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Pengendalian Program Prioritas Presiden dilaksanakan secara kontinyu, terpadu, dan terintegrasi melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi (e-Monev). Pengendalian ini akan mengikuti kerangka pengendalian RPJMN Tahun 2025–2029 dengan penguatan pengendalian tahunan. Mekanisme pengendalian Program Prioritas Presiden dilaksanakan melalui kegiatan (1) pemantauan program secara rutin untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana, dan (2) evaluasi/reviu tahunan program bertujuan untuk penyesuaian desain dan alokasi program, serta pengalaman sukses. Hasil pengendalian tersebut juga menjadi dasar dalam penerapan insentif dan disinsentif.

Gambar 6.3
Lingkup Pengendalian Program Prioritas Presiden

6.1.1.4 Sistem Insentif

Hasil pengendalian berdasarkan pemantauan dan evaluasi menjadi dasar insentif bagi pelaksana prioritas pembangunan nasional. Secara umum, sistem insentif diuraikan sebagai berikut.

(1) Jenis Insentif

Untuk mendorong kinerja yang optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, berbagai bentuk insentif dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi pihak terkait. Bentuk insentif diberikan dapat mencakup (a) pengalokasian program/kegiatan prioritas kementerian/lembaga/daerah serta insentif kinerja sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku; (b) insentif nonfinansial yang dapat berupa penghargaan, manajemen talenta nasional, pengembangan kompetensi, modifikasi/fleksibilitas sistem, dan lainnya. Adapun untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, bentuk insentif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi, dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ruang Lingkup Penilaian sebagai Dasar Insentif

Sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, pemberian insentif memerlukan mekanisme penilaian yang terukur dan sesuai dengan jenis insentif yang akan diberikan. Sistem insentif antara lain didasarkan pada penilaian keberhasilan implementasi, pencapaian manajemen kinerja, dan pengelolaan risiko pembangunan nasional. Penilaian dilakukan atas dasar dan tidak terbatas pada (a) konsistensi perencanaan dan pendanaan kementerian/lembaga/daerah dalam menjabarkan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah; serta (b) kontribusi kementerian/lembaga/daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan pengelolaan risiko pembangunan nasional.

(3) Pembagian Peran dalam Penilaian/Pemberian Insentif

Untuk memastikan pelaksanaan insentif dan disinsentif berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait. Pemberian insentif dan disinsentif dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta pihak lainnya.

6.1.2 Sistem Informasi Pengendalian Terpadu RPJMN

Pengendalian yang berkesinambungan dan partisipatif bertujuan untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan nasional melalui mekanisme korektif sepanjang masa implementasi, yang dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Transformasi pengendalian dalam RPJMN Tahun 2025–2029 didorong dengan sistem informasi yang terpadu.

Sejalan dengan pengembangan ekosistem layanan terpadu bidang perencanaan pembangunan nasional, pada tahun 2024 dilakukan pengintegrasian aplikasi KRISNA yang merupakan sistem informasi perencanaan dengan aplikasi e-Monev yang merupakan sistem informasi pengendalian pembangunan. Kedua aplikasi ini telah ditetapkan menjadi aplikasi umum bidang perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penetapan ini diharapkan dapat memperkuat implementasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran agar dapat berjalan dengan baik, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan pelaporan. Aplikasi e-Monev memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan oleh para pelaksana pembangunan. Dengan mengedepankan semangat interkoneksi dan interoperabilitas antarlayanan pemerintah, fungsi pengendalian diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Gambar 6.4
Integrasi Antaraplikasi Perencanaan dan Pengendalian

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan, aplikasi e-Monev telah dan akan diintegrasikan dengan beberapa sistem lainnya, yaitu KRISNA, SAKTI, dan SIPD. Interkoneksi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi antarlembaga. Integrasi antara aplikasi e-Monev dengan KRISNA berfungsi sebagai basis data perencanaan dan mengelola inovasi pembangunan. Integrasi antara aplikasi e-Monev dengan SAKTI berperan dalam pengelolaan anggaran dan kinerja instansi pemerintah. Integrasi dengan e-Monev memungkinkan data kinerja dan anggaran dari SAKTI dapat diakses secara *real-time* untuk mendukung evaluasi pencapaian program. Sementara itu integrasi antara e-Monev dengan SIPD diharapkan dapat menciptakan tata kelola data pembangunan di tingkat daerah dengan lebih baik. Selain itu, penting juga dilakukan integrasi antara SAKTI dengan SIPD, terutama dalam rangka penyelarasan badan akun standar pusat dan badan akun standar daerah. Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih menyeluruh dan memberikan gambaran tentang kontribusi daerah dalam mencapai prioritas nasional, sekaligus memperkuat koordinasi

antara pusat dan daerah. Dengan adanya interkoneksi antara e-Monev, KRISNA, SAKTI, dan SIPD, proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian diharapkan dapat berjalan dengan lebih terintegrasi serta komprehensif.

Melalui kolaborasi dan interkoneksi antaraplikasi sebagaimana disebut di atas, perencanaan dan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 diharapkan dapat dilakukan berdasarkan tata kelola data yang akurat, *real-time*, dan berbasis bukti terukur (*evidence-based policy*) sehingga mampu mendorong transformasi pembangunan menjadi lebih cepat. Penguatan tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui Satu Data Indonesia, sementara penguatan mekanisme dan metode pengendalian dilakukan melalui internalisasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagai instrumen pengendalian.

Dalam pengendalian RPJMN, aplikasi e-Monev berfokus pada pengendalian langsung (yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja pelaksana) dan pengendalian berjenjang (yang dilakukan oleh unit kerja pelaksana di atasnya). Dengan pendekatan berjenjang, aplikasi e-Monev memungkinkan setiap unit kerja untuk melaporkan progres pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dievaluasi di tingkat yang lebih tinggi, sehingga memudahkan identifikasi masalah dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, aplikasi e-Monev dalam pengendalian RPJMN Tahun 2025–2029 berfokus pada pengendalian operasional atau pengendalian dalam konteks manajemen pembangunan. Aplikasi e-Monev berperan penting dalam pengendalian pelaksanaan RPJMN dengan membagi peran antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kementerian/lembaga/daerah. Pembagian peran ini dilakukan untuk menjamin setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mencapai target pembangunan.

6.1.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antarjenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program/kegiatan prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional diwujudkan melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagaimana dijabarkan pada Gambar 6.5. Kebijakan tersebut terdiri atas Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Organisasi. Sebagai upaya untuk mengawal ketercapaian sasaran RPJMN, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor diterapkan dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya dalam mengelola risiko secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam pencapaian sasaran RPJMN.

Gambar 6.5
Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

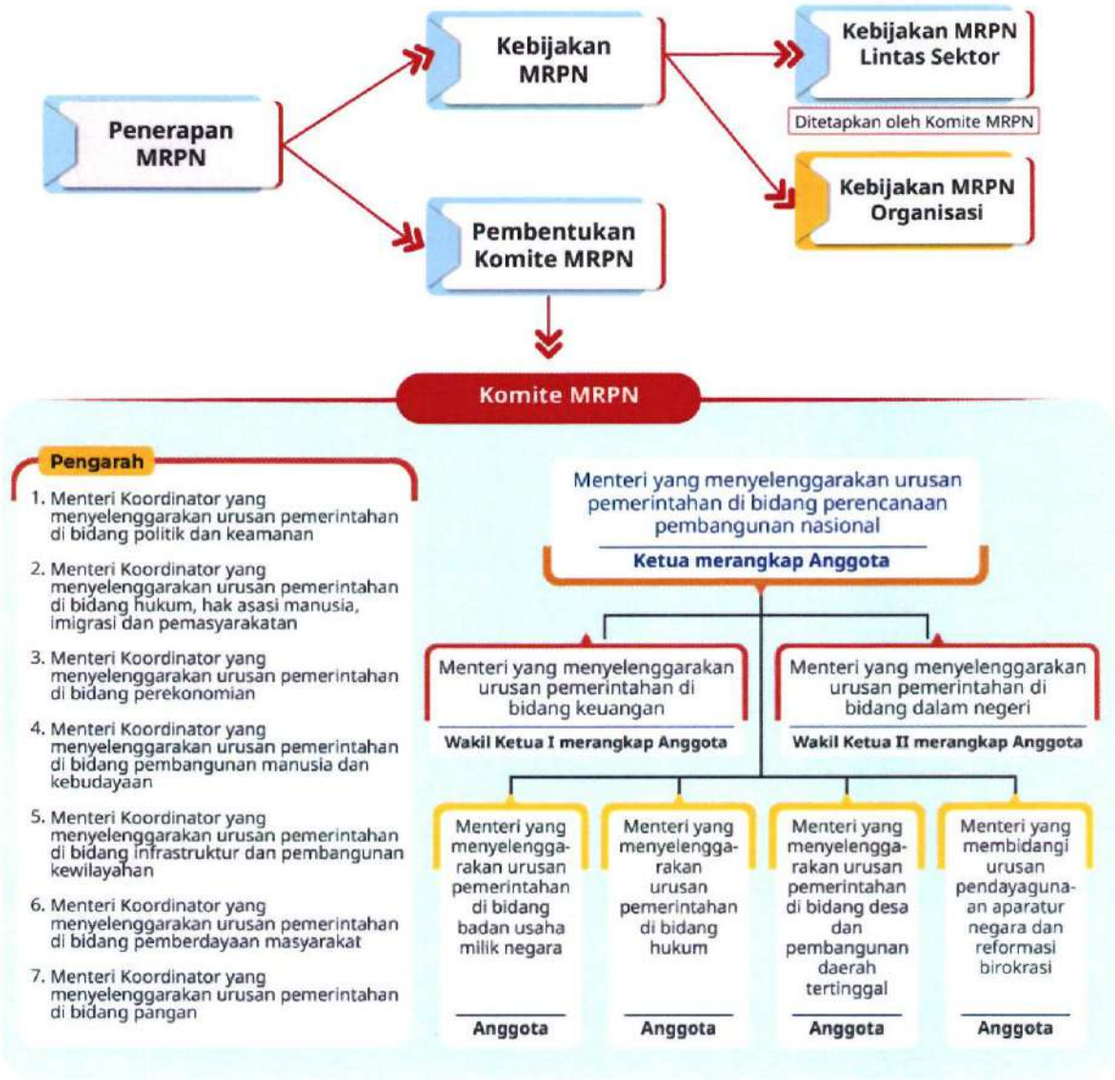

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Untuk mengakselerasi implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor, beberapa kunci penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional perlu dilakukan sebagaimana yang dijabarkan pada Gambar 6.6. Integrasi proses bisnis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dengan proses perencanaan perlu dilakukan melalui integrasi pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam siklus perencanaan pembangunan. Selain itu, sistem informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor harus terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan agar pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor berjalan efektif. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal ini mengoordinasikan sistem informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dan Organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga harus dilakukan secara

berkelanjutan melalui pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional kepada sumber daya manusia yang mengelola risiko pembangunan nasional di kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dilakukan oleh para Pembina Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Organisasi dengan berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Adapun dalam rangka untuk mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam pengelolaan risiko, diperlukan penyusunan regulasi terkait sistem insentif. Sistem insentif tersebut sejalan dengan sistem insentif dalam penerapan manajemen kinerja pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan juga penting untuk dilakukan terutama bagi kementerian/lembaga/daerah pengelola risiko pembangunan nasional. Secara khusus, penguatan kelembagaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor diwujudkan dengan penunjukan kementerian yang menjadi pengampu utama, serta kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya yang berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan.

Gambar 6.6
Kunci Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Pada tahun 2024, implementasi awal Manajemen Risiko Pembangunan Nasional pada tahap transisi RPJMN Tahun 2025–2029 akan berfokus pada Program Strategis Presiden di level Kegiatan Prioritas Utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikasi dan mitigasi risiko Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN Tahun 2025–2029 akan menjadi acuan awal dalam penyusunan profil risiko objek oleh unit pemilik risiko. Hal tersebut akan menjadi acuan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor yang bersifat tahunan dengan tahapan antara lain: (1) penetapan objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor dan unit pemilik risiko lintas sektor oleh Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, (2) penetapan selera dan profil risiko objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor oleh unit pemilik risiko yang pada tahap awal implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dapat didukung dengan penyusunan indikasi dan mitigasi risiko objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) pemantauan secara berkala dan berkelanjutan, serta (4) pelaporan penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025.

6.2 Tata Kelola Data Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi perlu didukung dengan ketersediaan data akurat dan mutakhir. Tanpa data yang berkualitas, rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi menjadi kurang akurat. Hal tersebut menyebabkan perbaikan program dan kegiatan berpotensi tidak tepat sasaran yang mengakibatkan sumber daya terbuang dan sasaran tidak tercapai. Data menjadi dasar pengendalian dan evaluasi berjalan dengan baik dan mendorong penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Data yang dikumpulkan digunakan untuk memantau pembangunan nasional secara langsung sehingga dapat segera mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan (meminimalisasi risiko). Pengendalian membutuhkan data untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan diikuti sesuai standar yang telah ditetapkan. Data membantu mengukur sejauh mana indikator sasaran pembangunan yang telah ditetapkan tercapai sehingga dapat dinilai dampak dari suatu kebijakan, program, atau kegiatan terhadap sasaran yang ingin dicapai.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan kebijakan tata kelola data melalui Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai langkah pasti untuk meningkatkan akurasi, kualitas, kemutakhiran, serta menjamin berbagi pakai data yang diproduksi oleh instansi pusat maupun daerah. Kebijakan Satu Data Indonesia berfokus pada implementasi prinsip Satu Data Indonesia, yaitu penggunaan standar data, mengikuti format baku metadata, menggunakan kode referensi/data induk yang telah disepakati, serta memastikan kemampuan interoperabilitas pada data yang telah dikumpulkan.

Gambar 6.7
Jumlah Data dan Instansi Terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia

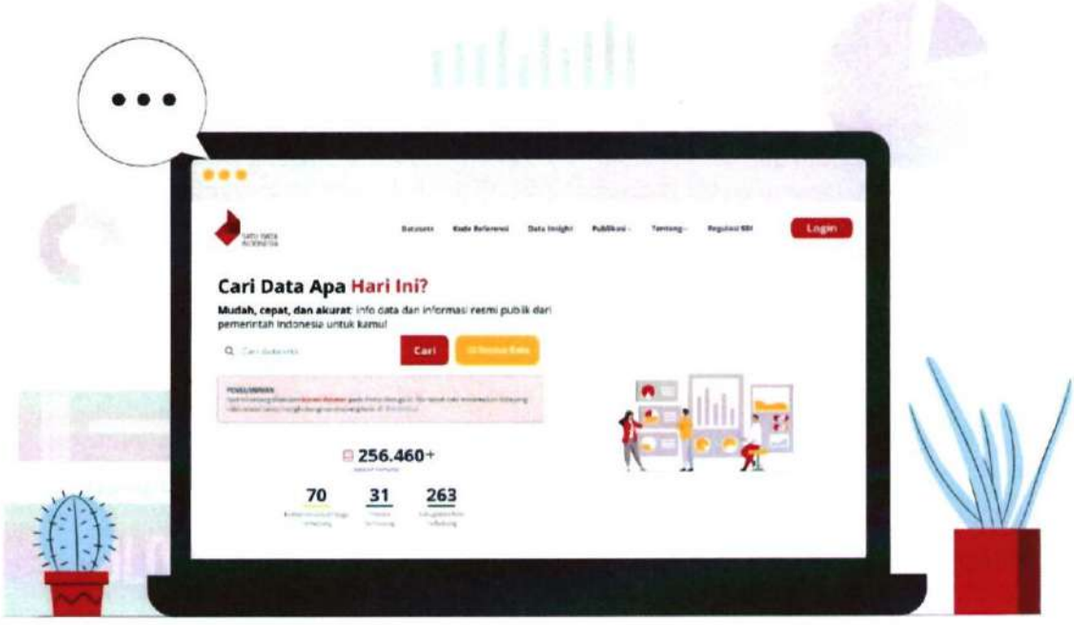

Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) merupakan sumber data tunggal yang terintegrasi dengan portal data instansi pusat dan pemerintah daerah, serta dapat diakses secara cepat, efektif, dan efisien (*single source of truth).* Satu Data didukung oleh interoperabilitas portal kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. Interoperabilitas antar portal Satu Data Indonesia juga mendorong penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah, sebagai infrastruktur digital untuk pertukaran data yang dirancang untuk mengintegrasikan dan menghubungkan berbagai layanan pemerintah secara terpadu, sehingga tercipta ekosistem layanan publik yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung agenda transformasi digital di Indonesia.

6.2.1 Satu Data Indonesia Mendukung Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Keberadaan Satu Data Indonesia memberikan kontribusi dalam tata kelola data pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tata kelola data dapat meningkatkan kualitas, integrasi, koordinasi, transparansi, dan interoperabilitas data. Selain itu, dengan tata kelola data yang baik, duplikasi data dan silo antar-instansi juga berkurang. Adanya Satu Data Indonesia secara langsung dapat mendukung kebijakan pemerintah yang lebih efektif serta menciptakan evaluasi dan pengendalian pembangunan yang lebih baik, sehingga penggunaan anggaran akan lebih efisien dan hasil pembangunan menjadi lebih optimal.

Gambar 6.8
Peran Tata Kelola Satu Data Indonesia

6.2.2 Satu Data Indonesia Mendukung Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Percepatan Transformasi Digital

Dalam rangka mendukung reformasi tata kelola pemerintahan dan percepatan transformasi digital, Satu Data Indonesia memiliki peran sangat signifikan dan penting dalam melakukan tata kelola data. Dukungan Satu Data Indonesia akan semakin menguatkan reformasi tata kelola pemerintahan, guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dipercaya publik. Sementara itu, tata kelola data yang baik akan mendukung akselerasi transformasi digital nasional. Ke depan, melalui reformasi tata kelola pemerintahan dan transformasi digital nasional, kebijakan pembangunan harus bertransformasi dari *government centric* menuju *citizen centric*. Kebijakan Satu Data Indonesia menjadi pusat koordinasi dan integrasi data dari berbagai instansi, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem data yang terstandardisasi, terbuka, dan terhubung.

Gambar 6.9
Peran Satu Data Indonesia dalam Tata Kelola Pemerintahan
dan Percepatan Transformasi Digital

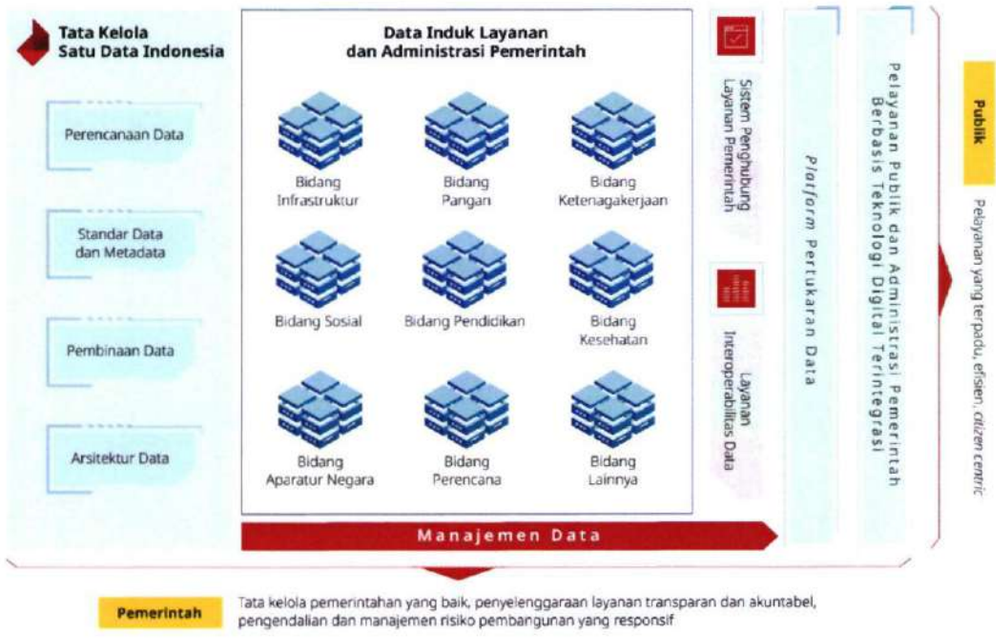

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS UTAMA

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
01.02.01 KP: Penguatan Pers Dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Terwujudnya kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri	• Belanja K/L	Antara Lain: • Kementerian Komunikasi dan Digital • Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia • Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
02.02.03 KP: Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema *Spend To Invest*	Terwujudnya transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*	• Belanja K/L	Antara Lain: • Kementerian Pertahanan
02.10.01 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Kalimantan Tengah	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pertanian • Kementerian Transmigrasi • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Pekerjaan Umum • Pemerintah Daerah
02.10.03 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Sumatera Selatan	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pertanian • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Transmigrasi • Pemerintah Daerah
02.10.06 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Papua Selatan	• Belanja K/L • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Pertanian • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Transmigrasi • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
02.10.07 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Peningkatan produksi bahan pangan utama	• Belanja K/L • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Pertanian • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Kehutanan • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
02.10.09 KP: Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)	Meningkatnya penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat	• Belanja K/L • DAK • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Pekerjaan Umum • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
02.10.10 KP: Pengembangan Pangan Hewani	Meningkatnya produksi bahan pangan hewani Meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan	• Belanja K/L • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Pertanian • Badan Karantina Indonesia • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal • Kementerian Perdagangan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Pekerjaan Umum • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
02.10.11 KP: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pertanian • Badan Gizi Nasional • Badan Pangan Nasional • Kementerian Kehutanan • Kementerian Koordinator Bidang Pangan • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas • Pemerintah Daerah
02.10.14 KP: Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Pertanian • Badan Pangan Nasional • Badan Pengawas Obat dan Makanan • Kementerian Perindustrian • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
02.11.01 KP: Peningkatan Penyediaan Energi	Meningkatnya pasokan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energi Meningkatnya pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi Meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Badan Usaha (BUMN/Swasta)

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
02.11.02 KP: Perluasan Akses Dan Jangkauan Pelayanan Energi	Meningkatnya akses terhadap gas bumi Meningkatnya akses terhadap BBM Meningkatnya akses terhadap listrik Meningkatnya keterjangkauan energi	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
02.11.03 KP: Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan Meningkatnya efisiensi energi	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • Kementerian Perindustrian • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Keuangan • Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) • Kementerian Dalam Negeri • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Kementerian Pertanian • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
02.12.04 KP: Konservasi Sumber Daya Air	Terwujudnya kuantitas air secara berkelanjutan melalui peningkatan tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Meningkatnya kualitas ekosistem perairan darat	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Kementerian Kehutanan • Kementerian Kesehatan • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas • Kementerian Pertanian • Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Kelautan Dan Perikanan • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
02.12.05 KP: Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir	Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir Meningkatnya jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin dan berkala	• Belanja K/L • DAK • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN /Swasta)

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
02.12.06 KP: Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SPALD Meningkatnya keberfungsian dan kualitas infrastruktur SPALD	• BELANJA K/L • DAK • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Pemerintah Daerah
02.12.09 KP: Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	Meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di pesisir utara Jawa Meningkatnya layanan air minum dan sanitasi di pesisir utara Jawa	• Belanja K/L • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Perhubungan • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN /Swasta)
02.14.01 KP: Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Meningkatnya jumlah SDM digital dan terjaganya keamanan data	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Perdagangan • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Pemerintah Daerah
02.14.02 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital Serta Sektor Strategis Lainnya	Meningkatnya pengembangan ekonomi dan industri digital	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Komunikasi Dan Digital • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi • Kementerian Pariwisata • Kementerian Kesehatan • Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif • Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia • Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia • Kementerian Keuangan • Kementerian Pertanian • Kementerian Perindustrian • Badan Standarisasi Nasional (BSN) • Kementerian Perdagangan • Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
02.15.02 KP: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Mengurangi susut pangan pada rantai pasok pangan Mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali	• Belanja K/L	Antara Lain: • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Pertanian • Badan Pangan Nasional • Kementerian Pariwisata • Badan Gizi Nasional • Badan Pengawas Obat Dan Makanan
02.16.05 KP: Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, Serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan Meningkatnya pengelolaan keamanan hayati (*biosafety* dan *biosecurity*)	• Belanja K/L	Antara Lain: • Kementerian Pertanian • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Badan Pengawas Obat dan Makanan • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Badan Pangan Nasional • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Kehutanan
02.17.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	Meningkatnya ketersediaan data kualitas air sungai dan danau Meningkatnya kualitas air permukaan Meningkatnya kualitas pengujian parameter lingkungan Meningkatnya pengendalian pencemaran air di sektor industri	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Kementerian Pekerjaan Umum • Pemerintah Daerah
02.17.05 KP: Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi karakteristik ekosistem gambut Meningkatnya pemulihan ekosistem gambut	• Belanja K/L	Antara Lain: • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.18.01 KP: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Meningkatnya sampah yang dikelola Meningkatnya Jumlah Kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Kesehatan • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Kementerian Dalam Negeri • Pemerintah Daerah

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
02.18.02 KP: Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Menurunnya sampah residu yang masuk di TPA/LUR	• Belanja K/L • DAK • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas • Kementerian Kesehatan • Pemerintah Daerah
02.22.04 KP: Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Perindustrian • Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Usaha (BUMN/Swasta)
03.02.02 KP: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Meningkatnya ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan masyarakat digital	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi • Penanaman Modal • Badan Pusat Statistik • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas • Badan Siber dan Sandi Negara • Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
03.02.04 KP: Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Meningkatnya kapasitas infrastruktur jaringan tenaga listrik	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Badan Siber dan Sandi Negara • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
03.03.01 KP: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Meningkatnya kontribusi koperasi sektor produksi terhadap total kontribusi koperasi	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta) • APBD	Antara Lain: • Kementerian Koperasi • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Pertanian • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
03.05.01 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	• Belanja K/L • DAK • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Pariwisata • Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan SAR Nasional • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Dalam Negeri • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Ketenagakerjaan • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
03.05.05 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Lombok-Gili Tramena	• Belanja K/L • DAK • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Badan SAR Nasional • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Pariwisata • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perhubungan • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas • Kementerian Dalam Negeri • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
03.05.08 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Danau Toba	• Belanja K/L • DAK • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Pariwisata • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan SAR Nasional • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
03.05.10 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Labuan Bajo	• Belanja K/L • DAK • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Pariwisata • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan SAR Nasional • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
03.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Meningkatnya kinerja subsektor aplikasi dan gim	• Belanja K/L • APBD Murni • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif • Kementerian Kebudayaan • Kementerian Perdagangan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Perindustrian • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
04.01.01 KP: Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan pra sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Agama • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Pemerintah Daerah
04.01.02 KP: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Yang Berkualitas (PHTC)	Tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Agama • Kementerian Pekerjaan Umum • Pemerintah Daerah
04.01.04 KP: Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Tercapainya penurunan kasus anak putus sekolah dan anak tidak sekolah	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Sosial • Pemerintah Daerah
04.02.07 KP: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Pemerintah Daerah
04.04.02 KP: Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, *In-Service Training*), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	Terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan mata pelajaran	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Agama • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Pemerintah Daerah

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
04.06.01 KP: Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Meningkatnya relevansi dan partisipasi pendidikan tinggi	• Belanja K/L	Antara Lain: • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Agama
04.08.02 KP: Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Meningkatnya peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Pemerintah Daerah
	Meningkatnya peran BRIDA dalam Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi		
	Meningkatnya peran sektor (K/L) terkait dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di sektor-sektor prioritas		
	Meningkatnya peran Science Techno Park (STP) dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi		
04.09.01 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Meningkatnya rekognisi internasional terhadap talenta seni budaya serta penyelenggaraan ajang dan non ajang seni budaya berkelas internasional di Indonesia	• Belanja K/L	Antara Lain: • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Kebudayaan • Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif • Kementerian Agama
04.09.02 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Terciptanya SDM Iptek yang memiliki kompetensi tingkat internasional	• Belanja K/L	Antara Lain: • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Kementerian Perindustrian • Kementerian Agama
04.09.03 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Terbinanya olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pendidikan, • Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Dalam Negeri • Pemerintah Daerah

SK No 252338 A

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
04.11.01 KP: Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar dengan persalinan di fasyankes, memperkuat deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan emergensi, pelayanan darah, tata laksana balita sakit, serta imunisasi	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional • Kementerian Agama • Pemerintah Daerah
04.11.02 KP: Pencegahan dan Penurunan *Stunting*	Pencegahan dan Penurunan *Stunting* melalui pendekatan spesifik dan sensitif	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pekerjaan Umum • Badan Pangan Nasional • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional • Kementerian Kesehatan • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Sosial • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Dalam Negeri • Pemerintah Daerah
04.11.04 KP: Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Kesehatan • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan • Kementerian Keuangan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Agama • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Komunikasi dan Digital • Tentara Nasional Indonesia • Polisi Republik Indonesia • Pemerintah Daerah
04.12.01 KP: Pemberian Makan Bergizi Untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Terlaksananya pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	• Belanja K/L	Antara Lain: • Badan Gizi Nasional • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Agama • Kementerian Pertanian • Badan Pangan Nasional • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Koperasi
04.12.02 KP: Penguatan Ekosistem	Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian		

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
Pendukung Pemberian Makan Bergizi	makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi		• Kementerian Usaha Kecil dan Menengah • Badan Pengawas Obat dan Makanan • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Pemerintah Daerah
04.13.01 KP: Penuntasan TBC	Tercapainya penuntasan TBC melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan pengobatan TBC sampai tuntas	• Belanja K/L • Subsidi dan APBD	Antara Lain: • Kementerian Kesehatan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman • Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Agama • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian BUMN • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Badan Pengawasan Obat dan Makanan • BPJS Kesehatan • Pemerintah Daerah
04.13.02 KP: Eliminasi Penyakit Kusta & *Schistosomiasis*	Meningkatnya pengendalian penyakit Kusta & *Schistosomiasis*	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pertanian • Pemerintah Daerah
04.15.01 KP: Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Kesehatan • Kementerian Dalam Negeri • Pemerintah Daerah

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
04.15.02 KP: Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh Indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses sulit termasuk layanan kesehatan bergerak	• Belanja K/L • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Kesehatan • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Kementerian Keuangan • Kementerian Dalam Negeri • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan • Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
04.15.03 KP: Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Meningkatnya pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan dengan mendorong peningkatan, pemenuhan, dan pemerataan dari sisi produksi, kompetensi, jumlah, maupun jenis dari SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi • Kementerian Kesehatan • Kementerian Keuangan • Pemerintah Daerah
05.01.01 KP: Pengembangan Hilirisasi Nikel	Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri nikel	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Kementerian Perindustrian • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Badan Standarisasi Nasional (BSN) • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.01.02 KP: Pengembangan Hilirisasi Tembaga	Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri tembaga	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Perindustrian • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Badan Usaha (BUMN/Swasta)

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
05.01.03 KP: Pengembangan Hilirisasi Bauksit	Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri bauksit	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Perindustrian • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
05.01.04 KP: Pengembangan Hilirisasi Timah	Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri timah	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Perindustrian • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
05.01.05 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Terwujudnya peningkatan produktivitas dan diversifikasi kelapa sawit	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Badan Standarisasi Nasional (BSN) • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) • Kementerian Koperasi • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
05.01.06 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Terwujudnya peningkatan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Pertanian • Kementerian Perindustrian • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Kementerian Perdagangan • Badan Standarisasi Nasional (BSN) • Kementerian Koperasi • Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Badan Usaha (BUMN/Swasta)

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
05.01.07 KP: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri rumput laut	• Belanja K/L • DAK • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Perindustrian • Badan Standarisasi Nasional (BSN) • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Kementerian Perdagangan • Kementerian Keuangan • Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
05.01.09 KP: Pengembangan Industri Kimia	Terwujudnya peningkatan nilai tambah industri kimia	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Perindustrian • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
05.01.10 KP: Pembangunan Industri Semikonduktor	Terwujudnya pertumbuhan industri semikonduktor	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Perindustrian • Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
05.01.13 KP: Pengembangan Industri Dirgantara	Terwujudnya Pertumbuhan Industri Dirgantara	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Perindustrian • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Kementerian Perhubungan • Kementerian Pertahanan • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
05.01.16 KP: Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri tekstil dan produk tekstil	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Perdagangan • Kementerian Keuangan • Kementerian Perindustrian • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Badan Standarisasi Nasional (BSN) • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
			• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
05.01.18 KP: Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	Terwujudnya peningkatan produktivitas dan daya saing industri logam dasar besi dan baja	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Badan Standarisasi Nasional (BSN) • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
05.02.02 KP: Pengembangan Kek Sei Mangkei	Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI/KEK Sei Mangkei	• Belanja K/L • DAK • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Perindustrian • Kementerian Pekerjaan Umum • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
05.02.09 KP: Pengembangan KIT Batang	Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KIT Batang	• Belanja K/L • DAK • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Perindustrian • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Kementerian Keuangan • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
05.02.22 KP: Pengembangan KI Weda Bay	Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KEK/KI Weda Bay	• Belanja K/L • DAK • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: • Kementerian Perindustrian • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) • Kementerian Perdagangan • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kementerian Pekerjaan Umum

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
			• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN • Pemerintah Daerah • Badan Usaha (BUMN/Swasta)
06.02.01 KP: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi	• Belanja K/L • DAK • Badan Usaha	Antara Lain: • Kementerian Sosial • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) • Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian Kehutanan • Badan Pangan Nasional • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Agama • Kementerian Kesehatan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pertanian • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Transmigrasi • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Pemerintah Daerah • Badan Usaha
06.03.01 KP: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah	• Belanja K/L • DAK	Antara Lain: • Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat • Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Koperasi • Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Perdagangan • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) • Badan Pengawas Obat dan Makanan • Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal • Kementerian Perindustrian • Kementerian Keuangan • Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
			• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi • Pemerintah Daerah
06.03.02 KP: Peningkatan Kemandirian Melalui Kartu Usaha Afirmatif	Meningkatnya kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif	• Belanja K/L • Badan Usaha	Antara Lain: • Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) • Kementerian Keuangan • Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pertanian • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Sosial • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Kehutanan • Badan Usaha
06.05.01 KP: Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara	Terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya	• Belanja K/L • Badan Usaha	Antara Lain: • Otorita Ibu Kota Nusantara • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Perhubungan • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas • Badan Usaha
	Terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	• Belanja K/L • Badan Usaha	Antara Lain: • Badan Siber dan Sandi Negara • Otorita Ibu Kota Nusantara • Kementerian Keuangan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Badan Usaha
06.06.01 KP: Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU	• BELANJA K/L • APBD • Badan Usaha	Antara Lain: • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kementerian Sosial • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Transmigrasi • Pemerintah Daerah • Badan Usaha

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
06.07.01 KP: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa	• Belanja K/L • DAK • APBD • Dana Desa	Antara Lain: • Kementerian Kesehatan • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Komunikasi dan Digital • Pemerintah Daerah • Pemerintah Desa
07.05.03 KP: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Terwujudnya strategi pencegahan korupsi di sektor pemerintah dan masyarakat	• Belanja K/L	Antara Lain: • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) • Kejaksaan Republik Indonesia
07.07.01 KP: Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep *Total Reward* Berbasis Kinerja ASN	Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi • Kementerian Keuangan • Badan Kepegawaian Negara • Pemerintah Daerah
07.10.04 KP: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi • Kementerian Komunikasi Dan Digital • Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN • Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi • Penanaman Modal • Pemerintah Daerah
07.12.01KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak	• Belanja K/L	Kementerian Keuangan
07.12.02 KP: Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Terciptanya dukungan PNBP yang optimal	• Belanja K/L	Antara Lain: • Kementerian Keuangan • K/L Terkait Lainnya

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
08.02.01 KP: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Terwujudnya kawasan pemajuan kebudayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM kebudayaan	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kejaksaan Republik Indonesia • Komisi Yudisial Republik Indonesia • Mahkamah Agung • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Dalam Negeri • Perpustakaan Nasional Republik Indonesia • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Kementerian Perdagangan • Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif • Kementerian Koperasi • Badan Pengawas Obat dan Makanan • Lembaga Ketahanan Nasional • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Kementerian Agama • Kementerian Kebudayaan • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Pemerintah Daerah
08.02.03 KP: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Terwujudnya ekosistem kebudayaan yang menumbuhkan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan dalam berkarya	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: • Kementerian Kebudayaan • Kementerian Pekerjaan Umum • Pemerintah Daerah

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
08.03.01 KP: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	Peningkatan nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	• Belanja K/L	Antara Lain: • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Perhubungan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025—2029

MATRIKS PEMBANGUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2025—2029

SK No 149746 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS PEMBANGUNAN

SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2025–2029

Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Koordinator/ Pengampu
01 - Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Menuju Setara Negara Maju	01 - Pertumbuhan ekonomi	persen	5,05	5,3	8,0	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	02 - GNI Per Kapita	USD	4.870 (2023)	5.410	8.000	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	03 - Kontribusi PDB Maritim	persen	7,9 (2022)	8,1	9,1	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	04 - Kontribusi PDB manufaktur	persen	18,67 (2023)	20,8	21,9	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02 - Kemiskinan menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	01 - Tingkat kemiskinan	persen	9,03	7,0 - 8,0	4,5 - 5,0	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	02 - Rasio gini		0,379	0,378 - 0,382	0,372 - 0,375	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	03 - Kontribusi PDRB KTI	persen	20,9 (2023)	21,4	22,4	132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Koordinator/ Pengampu
03 - Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	01 - *Global Power Index*	peringkat	34 (2023)	33	29	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	01 - Indeks Modal Manusia		0,54 (2020)	0,56	0,59	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*	01 - Penurunan intensitas emisi GRK	persen	34,09 (2022)	35,53	45,17	131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72,54 (2023)	76,49	77,20	131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 1: MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
01 PN: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	01 - Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	01 - Indeks Demokrasi Indonesia		79,51 (2023)	81,69–85,23	83,42–86,96		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Hak Asasi Manusia		2,70 (2023)	2,75	2,85		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	01 - Menguatnya Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan		77,46 (2023)	84,12–87,76	85,90–89,54		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Aktualisasi Pancasila		77,73 (2023)	79,37	82,30		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
01.01.01 KP: Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di Kalangan Penyelenggara Negara	01 - Terwujudnya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara	01 - Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara		84,87 (2023)	82,33–87,01	84,61–89,29	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Persentase implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	persen	- (indikator baru)	40	80		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
01.01.01.01 PRO-P: Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila								
01.01.01.02 PRO-P: Aktualisasi Pancasila								
01.01.01.03 PRO-P: Pemantapan Kebijakan Pelaksanaan Pancasila pada Penyelenggaraan Negara								
01.01.02 KP: Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA	01 - Meningkatnya kohesivitas sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat multikultural yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila	01 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa		78,32 (2023)	80	84	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		02 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab		81,46 (2023)	83	87		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		03 - Indeks Aktualisasi Pancasila – Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia		81,18 (2023)	83	87		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan		79,35 (2023)	81	85		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		05 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia		68,33 (2023)	70	74		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		06 - Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila	persen	- (indikator baru)	70	100		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.01.02.01 PRO-P: Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Penyelenggara Negara dan Masyarakat								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
01.01.02.02 PRO-P: Penguatan Kohesivitas Sosial melalui Pengembangan Ekosistem Teknologi Informasi Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila								
01.01.02.03 PRO-P: Peningkatan Semangat Persatuan, Kesatuan, dan Kebangsaan pada Generasi Muda								
01.01.03 KP: Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah	01 - Meningkatnya kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga tingkat daerah	01 - Performa pimpinan tingkat pusat dan daerah dalam membina ketahanan nasional		82,88 (2023)	85,34–89,87	87,55–92,08		064 - Lembaga Ketahanan Nasional
01.01.03.01 PRO-P: Penyelenggaraan Pendidikan Pengkaderan Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Tingkat Daerah								
01.01.03.02 PRO-P: Penyelenggaraan *Training of Trainners* Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan								
01.02 PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	01 - Terciptanya ekosistem komunikasi, kebebasan pers dan media massa yang berintegritas	01 - Indeks Kemerdekaan Pers		69,36	70,00	72,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik		75,65	76,00	77,25		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik		69,80 (2023)	71	75		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.02.01 KP: Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	01 - Terwujudnya kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri	01 - Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku		3,15	3,18	3,35		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers	persen	65,80	66,00	68,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03 - Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat	persen	65,69	66,00	68,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		04 - Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola baik	persen	63,74	64,00	66,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		05 - Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers	persen	70,12	70,50	72,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		06 - Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan	persen	69,08	69,50	71,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		07 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers	orang	2.015	690	2.384		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.02.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers								
01.02.01.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers								
01.02.01.03 PRO-P: Penyehatan Media Arus Utama								
01.02.02 KP: Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik	01 - Terbangunnya sistem komunikasi dan jaminan kesetaraan hak masyarakat atas informasi publik	01 - Jumlah kebijakan yang mendukung implementasi SKPN	dokumen	11	1	3		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital	orang	141.300	40.100	200.300		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03 - Persentase akses & diseminasi informasi publik kepada masyarakat	persen	77,48	77,73	78,73		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik	persen	75,68	77,73	78,73		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		05 - Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik	persen	76,25	76,50	77,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		06 - Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik	persen	79,92	80,17	81,17		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		07 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik	persen	76,33	76,58	77,58		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.02.02.01 PRO-P: Penguatan Kelembagaan dan Sistem Komunikasi Publik dan Pembangunan Nasional								
01.02.02.02 PRO-P: Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik								
01.02.02.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bertalenta Digital								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
01.03 PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	01 - Terwujudnya lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial	01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		76,46 (2023)	79,46–82,90	81,14–84,59		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
01.03.01 KP: Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif	01 - Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang semakin meningkat sebagai pilar demokrasi	01 - Kinerja lembaga legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi		53,92 (2023)	55,59–58,84	57,18–60,43		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
01.03.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Organisasi Lembaga Legislatif								
01.03.01.02 PRO-P: Penguatan Lembaga dan Proses Demokrasi di Daerah								
01.03.02 KP: Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu	01 - Terwujudnya kinerja penyelenggara pemilu yang semakin meningkat dalam mendukung demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial	01 – Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel	persen	- (indikator baru)	0	100		115 – Badan Pengawas Pemilihan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
01.03.02.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu								
01.03.02.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Pengawas Pemilu								
01.04 PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	01 - Terwujudnya partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat	01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan		83,74 (2023)	81,55–85,08	83,28–86,81		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
01.04.01 KP: Penyediaan Dana Abadi dan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	01 - Terwujudnya penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan peran advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial	01 – Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik	daerah	- (indikator baru)	12	20	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	010 - Kementerian Dalam Negeri
01.04.01.01 PRO-P: Penyusunan Regulasi Dana Abadi Organisasi Kemasyarakatan								
01.04.01.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Lingkungan Pendukung Masyarakat Sipil								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
01.04.02 KP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik	01 - Terwujudnya Penguatan jaminan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik untuk menjalankan peran pemberdayaan dan kontrol sosial	01 - Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih	orang	- (indikator baru)	55.300	110.600	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	076 - Komisi Pemilihan Umum
		02 - Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	orang	900	16.590	27.650		115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum
01.04.02.01 PRO-P: Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik								
01.04.02.02 PRO-P: Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pemilu								
01.05 PP: Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	01 - Terwujudnya regulasi dan kelembagaan berperspektif HAM serta perlindungan HAM terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan	01 - Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik		2,60 (2023)	2,65	2,75		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
		02 - Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya		2,80 (2023)	2,85	2,95		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
01.05.01 KP: Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif, dan Berperspektif Gender	01 - Terwujudnya kebijakan dan kelembagaan yang berperspektif hak asasi manusia, humanis, inklusif, dan gender	01 - Persentase K/L/D dan masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM	persen	- (indikator baru)	50,05	62,21	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
		02 - Jumlah kebijakan diskriminatif yang ditindaklanjuti	kebijakan	10	10	10		074 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
01.05.01.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia, Humanis, Inklusif, dan Gender								
01.05.01.02 PRO-P: Pendidikan HAM bagi Aktor Negara dan Nonnegara								
01.05.02 KP: Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penghapusan Praktik Diskriminasi	01 - Terwujudnya perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan	01 - Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	37,6 (2023)	39,6	43,6	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	074 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
		03 - Persentase capaian aksi RANHAM	persen	81,7	75	75 (penyesuaian Perpres RANHAM Gen VI)		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
01.05.02.01 PRO-P: Pelaksanaan Perlindungan HAM dan Penghapusan Praktik Diskriminasi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
01.05.02.02 PRO-P: Penguatan Mekanisme Penanganan Pengaduan HAM pada K/L/D								

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

PRIORITAS NASIONAL 2: MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02 PN: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01 - Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	01 - *Asia Power Index (Diplomatic Influence)*		65,6	65,7	66,1		011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - *Asia Power Index (Military Capability)*		15,7	16	20		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		03 - Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	persen	62,8 (2020)	67,5	68,5		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		04 - *Global Cybersecurity Index*		100	100	98		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		05 - Indeks Keamanan Laut Nasional		59	60	64		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)	01 - Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		71,2	73,2	82		131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
		02 - Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan	persen	1,30 (2023)	2,20	3,46		131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	03 - Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)	01 - Indeks Ketahanan Energi		6,64	6,77	6,95		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	04 - Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)	01 - Indeks Ketahanan Air Nasional		3,48 (2022)	3,50	3,75		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	05 - Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (Peringkat GIEI)	peringkat	3	3	1		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
		02 - Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI)		34,25 (2023)	38,76	50,73		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
		03 - Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	peringkat	45 (2023)	43	40		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	06 - Terwujudnya transformasi ekonomi hijau	01 - Indeks Ekonomi Hijau		60,08 (2023)	68,34	77,20		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
		02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72,54 (2023)	76,49	77,20		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,35 (2020)	0,44	0,55		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.01 PP: Pembangunan Postur Pertahanan	01 - Terwujudnya pondasi kemampuan pertahanan berdaya gentar kawasan	01 - Persentase pemenuhan pembangunan kekuatan pokok TNI	persen	30,3	30,3	100		012 - Kementerian Pertahanan
02.01.01 KP: Melanjutkan Program Penguatan Postur Pertahanan dengan Konsep Optimum *Essential Force* dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Menjaga Kedaulatan NKRI	01 - Terwujudnya kelanjutan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI	01 - Persentase pemenuhan alutsista	persen	30,3	30,3	100		012 - Kementerian Pertahanan
02.01.01.01 PRO-P: Pengadaan Alutsista Strategis Luar Negeri								
02.01.01.02 PRO-P: Pengadaan Alutsista Integratif								
02.01.01.03 PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Darat								
02.01.01.04 PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Laut								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.01.01.05 PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Udara								
02.01.01.06 PRO-P: Pembangunan Sarpras Pertahanan								
02.01.02 KP: Meningkatkan Kekuatan TNI di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar	01 - Terwujudnya peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar	01 - Persentase penurunan pelanggaran terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa	persen	51,3	40	15		012 - Kementerian Pertahanan
02.01.02.01 PRO-P: Pembangunan Sarpras Pertahanan Perbatasan								
02.01.02.02 PRO-P: Pembangunan Sarpras Pendukung Pertahanan di Perbatasan								
02.01.03 KP: Memperkuat Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi dan Memperkuat Kapabilitas Badan Pertahanan Siber	01 - Terwujudnya penguatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber	01 - Persentase pemenuhan peralatan siber	persen	67,5	67,5	80		012 - Kementerian Pertahanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.01.03.01 PRO-P: Pengadaan Alutsista Siber								
02.01.03.02 PRO-P: Pendidikan dan Latihan								
02.01.04 KP: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	01 - Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit	01 - Persentase pemenuhan sarpras rumah dinas	persen	69,42	69,42	76,33		012 - Kementerian Pertahanan
02.01.04.01 PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Prajurit								
02.01.04.02 PRO-P: Pendidikan Tinggi Pertahanan								
02.01.05 KP: Meningkatkan Kesiapan Alpalhankam melalui Pemeliharaan dan Perawatan	01 - Terwujudnya peningkatan kesiapan alpalhankam melalui pemeliharaan dan perawatan	01 - Persentase pemenuhan harwat alutsista	persen	49,7	49,7	60		012 - Kementerian Pertahanan
02.01.05.01 PRO-P: Harwat Alutsista Matra Darat								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.01.05.02 PRO-P: Harwat Alutsista Matra Laut								
02.01.05.03 PRO-P: Harwat Alutsista Matra Udara								
02.02 PP: Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	01 - Terwujudnya industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing	01 - *Ranking* industri pertahanan (SIPRI top 100)	peringkat	>100	<100	<100		012 - Kementerian Pertahanan
02.02.01 KP: Mempercepat Peningkatan Kemampuan Industri Strategis Nasional dalam Memenuhi Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri	01 - Terwujudnya percepatan peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi TNI/Polri	01 - Persentase peningkatan kemampuan industri pertahanan	persen	60	68	100		012 - Kementerian Pertahanan
02.02.01.01 PRO-P: Litbang Alpalhankam								
02.02.01.02 PRO-P: *First Article*								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.02.02 KP: Meningkatkan Komitmen untuk Menggunakan Produk-produk Industri Strategis Nasional dan Mendayagunakan Sebesar Mungkin Kapasitas Industri Strategis Dalam Negeri	01 - Terwujudnya peningkatan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri	01 - Persentase pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alpalhankam yang melibatkan industri pertahanan	persen	100	100	100		012 - Kementerian Pertahanan
02.02.02.01 PRO-P: Pengadaan Alpalhankam Industri Pertahanan bidang Pertahanan Negara								
02.02.02.02 PRO-P: Pengadaan Alpalhankam Industri Pertahanan bidang Keamanan Negara								
02.02.03 KP: Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan *Skema Spend to Invest*	01 - Terwujudnya transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan *skema spend to invest*	01 - Persentase perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang terlaksana dalam pengadaan alpalhankam luar negeri	persen	100	100	100		012 - Kementerian Pertahanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.02.03.01 PRO-P: Pengembangan Alpalhankam *Spend to Invest* Matra Darat								
02.02.03.02 PRO-P: Pengembangan Alpalhankam *Spend to Invest* Matra Laut								
02.02.03.03 PRO-P: Pengembangan Alpalhankam *Spend to Invest* Matra Udara								
02.03 PP: Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung	01 - Terwujudnya penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung	01 - Persentase sumber daya nasional yang dimanfaatkan menjadi kekuatan pertahanan	persen	100	100	100		012 - Kementerian Pertahanan
02.03.01 KP: Penguatan Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Memperkuat Komponen Cadangan	01 - Terwujudnya penguatan konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat komponen cadangan	01 - Persentase kader bela negara yang telah terbentuk	persen	- (indikator baru)	10	100		012 - Kementerian Pertahanan
		02 - Persentase kelulusan komponen cadangan dengan nilai baik	persen	100	100	100		012 - Kementerian Pertahanan
02.03.01.01 PRO-P: Bela Negara								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.03.01.02 PRO-P: Pembangunan Komcad								
02.03.02 KP: Pembinaan Komponen Pendukung untuk Penguatan Pertahanan Negara	01 - Terwujudnya pembinaan komponen pendukung untuk penguatan pertahanan negara	01 - Persentase penataan dan pembinaan komponen pendukung	persen	- (indikator baru)	100	100	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	012 - Kementerian Pertahanan
02.03.02.01 PRO-P: Pembinaan Komduk								
02.03.02.02 PRO-P: Penataan Komduk								
02.04 PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	01 - Terwujudnya sistem deteksi dini yang mampu mendukung keamanan negara	01 - *Fragile State Index*		63,7	62,8	59,2		050 - Badan Intelijen Negara
		02 - *Global Terrorism Index*		3,99	3,95	3,79		113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.04.01 KP: Melakukan Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, serta Paham Kebhinekaan di Daerah-daerah yang Rawan Konflik serta Rentan Isu Separatisme	01 - Terwujudnya sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme	01 - Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam aspek wawasan kebangsaan pada wilayah konflik dan rentan	kegiatan	5	5	5		010 - Kementerian Dalam Negeri
02.04.01.01 PRO-P: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Aspek Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Konflik dan Rentan								
02.04.02 KP: Penguatan Kapabilitas Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Dalam Negeri	01 - Terwujudnya penguatan kapabilitas penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan dalam negeri	01 - Cakupan deteksi dini intelijen	persen	100	100	100		050 - Badan Intelijen Negara
02.04.02.01 PRO-P: Penguatan Operasi Intelijen dan Kontra Intelijen								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.04.02.02 PRO-P: Penguatan SDM Intelijen								
02.04.03 KP: Koordinasi Sinergi Antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme	01 - Meningkatnya sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme	01 - Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	persen	97,8	100	100		113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.03.01 PRO-P: Kolaborasi dan Penguatan Instrumen Penanggulangan Terorisme								
02.04.03.02 PRO-P: Penguatan Kesiapsiagaan Nasional								
02.04.04 KP: Penguatan Kontra Radikalisasi	01 - Terwujudnya penguatan kontra radikalisasi	01 - Indeks Risiko Terorisme (Target)		51,87	51,77	51,37		113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.04.01 PRO-P: Penguatan Intelijen dan Kontra Terorisme								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.04.05 KP: Penguatan Deradikalisasi Terorisme	01 - Terwujudnya penguatan deradikalisasi terorisme	01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)		30,01	29,91	29,51		113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.05.01 PRO-P: Deradikalisasi Terorisme								
02.04.06 KP: Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	01 - Terwujudnya penguatan pusat analisis dan pengendalian krisis	01 - Persentase peningkatan kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis	persen	30	40	80		113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.06.01 PRO-P: Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Terorisme)								
02.05 PP: Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	01 - Terwujudnya interaksi dan transaksi siber, persandian, dan sinyal yang aman	01 - Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber		– (indikator baru)	0,69	0,84		051 - Badan Siber dan Sandi Negara

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.05.01 KP: Memperkuat Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi	01 - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana keamanan siber, sandi, dan sinyal nasional	01 - Persentase pemanfaatan inovasi hasil perekayasaan di bidang keamanan siber dan sandi	persen	– (indikator baru)	33	66,7		051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.01.01 PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal								
02.05.01.02 PRO-P: Sertifikasi Produk Keamanan, Siber, Sandi, dan Sinyal								
02.05.02 KP: Pengembangan SDM, Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	01 - Terpenuhinya SDM keamanan siber dan sandi nasional	01 - Rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) SDM siber dan sandi	persen	– (indikator baru)	16	8		051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.02.01 PRO-P: Pelatihan dan Peningkatan Profesionalisme SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal								
02.05.02.02 PRO-P: Peningkatan Budaya Keamanan, Siber, Sandi, dan Sinyal								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.05.03 KP: Penguatan Kelembagaan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	01 - Terwujudnya kelembagaan keamanan siber dan sandi nasional	01 - Nilai kematangan keamanan siber PSE		2,59	2,77	3,55		051 - Badan Siber dan Sandi Negara
		02 - Nilai kematangan penyelenggara persandian		– (indikator baru)	3	3,7		051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.03.01 PRO-P: Kebijakan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal								
02.05.03.02 PRO-P: Kerjasama Antar Lembaga Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal								
02.05.03.03 PRO-P: Peningkatan Maturitas Lembaga Keamanan Siber								
02.05.04 KP: Operasi Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal Strategis	01 - Terwujudnya operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis yang efektif	01 - Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional		– (indikator baru)	0,70	0,84		051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.04.01 PRO-P: Operasi Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal								
02.05.04.02 PRO-P: Penanganan Kejahatan Siber, Sandi, dan Sinyal								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.06 PP: Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	01 - Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia	01 - IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut		67	74,5	84,5		119 - Badan Keamanan Laut
		02 - IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut		48	58,5	64		119 - Badan Keamanan Laut
		03 - IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut		67	67,5	69,5		119 - Badan Keamanan Laut
		04 - IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut		33	33,2	34		119 - Badan Keamanan Laut
		05 - Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi		54,22	54,22	100		012 - Kementerian Pertahanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.06.01 KP: Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	01 - Terwujudnya penguatan strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	01 - Persentase Kehadiran dalam forum-forum internasional terkait keamanan laut	persen	25	50	87,5		119 - Badan Keamanan Laut
02.06.01.01 PRO-P: Kerja Sama Keamanan Laut								
02.06.01.02 PRO-P: Kerja Sama Patroli Internasional								
02.06.02 KP: Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut	01 - IKLN Dimensi Kapasitas Patroli		68	68,2	69		119 - Badan Keamanan Laut
		02 - Persentase pemenuhan postur Bakamla RI	persen	5,19	7	15		119 - Badan Keamanan Laut

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP		80,00	80,00	84,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.02.01 PRO-P: Pengadaan dan Harwat Alpalhankam Keamanan Laut								
02.06.02.02 PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut								
02.06.02.03 PRO-P: Penyusunan Kebijakan Keamanan Laut								
02.06.03 KP: Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point*	01 - Terwujudnya kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, peningkatan keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut, ALKI, dan *Choke Point*	01 - IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan		68	68,1	68,5		119 - Badan Keamanan Laut
		02 - Persentase kesesuaian rencana patroli nasional	persen	100	100	100		119 - Badan Keamanan Laut
		03 - Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		91,00	92,00	96,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.03.01 PRO-P: Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.06.03.02 PRO-P: Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat								
02.06.04 KP: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personel Lembaga Keamanan Laut	01 - Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan laut	01 - Persentase pemenuhan sarpras profesionalisme dan kesejahteraan	persen	4,2	4,2	15		119 - Badan Keamanan Laut
02.06.04.01 PRO-P: Pembangunan Fasilitas Kesejahteraan Personel								
02.06.04.02 PRO-P: Pembangunan Fasilitas Profesionalisme Personel								
02.06.05 KP: Pemetaan Batimetri dan Alur Laut serta Modernisasi Peralatan dan Sarana Prasarana Penyelenggaraan *Hidro-Oseanografi*	01 - Terwujudnya pemetaan batimetri dan alur laut serta modernisasi peralatan dan sarana prasarana penyelenggaraan *hidro-oseanografi*	01 - Persentase realisasi rencana luas wilayah perairan Indonesia (pedalaman, kepulauan, teritorial, ZEE, dan landas kontinen) yang diperbarui melalui surta hidrografi dan oseanografi	persen	54,22	54,22	100		012 - Kementerian Pertahanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		02 - Persentase pemenuhan peralatan dan sarpras penyelenggaraan *hidro oseanografi*	persen	42,1	42,1	100		012 - Kementerian Pertahanan
02.06.05.01 PRO-P: Survei dan Pemetaan								
02.06.05.02 PRO-P: Pengadaan Alat dan Sarpras Hidros								
02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	01 - Terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali dan kondusif	01 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		3,39	3,80	4,20		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.07.01 KP: Melakukan Peningkatan Kemampuan Penanganan Konflik Sosial dan Pengamanan Objek Vital	01 - Terwujudnya aparat keamanan yang memiliki kemampuan penanganan konflik sosial dan pengamanan objek vital sesuai dengan standar dan humanis	01 - Indeks Harkamtibmas		67,5	67,6	68,5		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.07.01.01 PRO-P: Pengamanan Konflik Sosial yang Profesional dan Humanis								
02.07.01.02 PRO-P: Pengamanan Obyek Vital								
02.07.02 KP: Melakukan Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana	01 - Terwujudnya penyelesaian tindak pidana oleh Polri secara efektif, efisien dan tepat sasaran	01 - *Crime Rate*	per 100.000 penduduk	43	40	36		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - *Clearance Rate* Tindak Pidana	persen	74	75	79		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.07.02.01 PRO-P: Penyelesaian Tindak Pidana Transnasional								
02.07.02.02 PRO-P: Penyelesaian Tindak Pidana Konvensional								
02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	01 - Terwujudnya profesionalisme pelayanan kepolisian	01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian		85,77	86,00	88,00		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.08.01 KP: Melakukan Peningkatan Kesiapan Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	01 - Terpenuhinya kebutuhan almatsus dan sarana prasarana Polri dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga kepolisian	01 - Tingkat pemenuhan *Minimum Essential Police Equipment* (MEPE)	persen	- (indikator baru)	80	84		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.01.01 PRO-P: Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian								
02.08.01.02 PRO-P: Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan Kepolisian								
02.08.02 KP: Melakukan Peningkatan Kualitas dan Digitalisasi Layanan Kepolisian	01 - Terwujudnya peningkatan layanan kepolisian yang berkualitas dan mudah diakses yang didukung oleh teknologi terbaru	01 - Indeks SPBE		3,00	3,40	4,00		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri	persen	85,1	86	90		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.02.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Kepolisian								
02.08.02.02 PRO-P: Digitalisasi Layanan Kepolisian								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.08.03 KP: Melakukan Peningkatan Jumlah dan Proporsi Polwan	01 - Terwujudnya kesetaraan gender di lingkungan Polri melalui penyesuaian rasio jumlah SDM dan pembaharuan *work arrangement*	01 - Jumlah pusat pendidikan Polwan	unit	1	1	1		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Jumlah kapasitas pusat pendidikan Polwan	orang	805	900	1200		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.03.01 PRO-P: Rekrutmen Personil Polri Berbasis Gender								
02.08.03.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Penunjang Karier bagi Polwan								
02.08.04 KP: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Anggota Polri	01 - Terwujudnya SDM Polri yang memiliki standar kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri	01 - Indeks Profesionalitas SDM Polri		- (indikator baru)	70,5	72,5		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.04.01 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Tematik Personil Polri								
02.08.04.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Personil Polri								

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	01 - Terpeliharanya hubungan Internasional yang kondusif dengan terselenggaranya diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi	01 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara		- (indikator baru)	0,546	0,580		011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional		4,97 (2023)	4,10 (Skala 5)	4,50 (Skala 5)		011 - Kementerian Luar Negeri
		03 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional		4,07	4,10 (Skala 5)	4,18 (Skala 5)		011 - Kementerian Luar Negeri
		04 - Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi		75	76	80		011 - Kementerian Luar Negeri
02.09.01 KP: Percepatan Penyelesaian Perjanjian Batas Maritim dan Darat Indonesia dengan Negara Tetangga dan tetap mengedepankan Prinsip Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Skema *Good Neighbour Policy*	01 - Terlaksananya percepatan penyelesaian perjanjian batas maritim dan darat Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam *skema good neighbour policy*	01 - Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga		52,43	69,75	76,21	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara		61,13	63,00	78,00		010 - Kementerian Dalam Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.09.01.01 PRO-P: Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Maritim Negara								
02.09.01.02 PRO-P: Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Darat Negara								
02.09.02 KP: Penguatan Kepemimpinan di Tingkat Global melalui Peran Aktif dalam Fora dan Organisasi Internasional, Pembangunan Postur Diplomasi, serta Pelibatan Diaspora Indonesia	01 - Meningkatnya peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi internasional, terbangunnya postur diplomasi, serta meningkatnya pelibatan diaspora Indonesia	01 - Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	persen	75	75	79	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral	persen	75	75	79		011 - Kementerian Luar Negeri
		03 - Persentase keberhasilan pencalonan Indonesia/wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional	persen	75	75	79		011 - Kementerian Luar Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Angka pembangunan postur diplomasi		- (indikator baru)	5	25		011 - Kementerian Luar Negeri
		05 - Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia	persen	15	20	40		011 - Kementerian Luar Negeri
02.09.02.01 PRO-P: Penguatan kepemimpinan Indonesia dalam Organisasi/Fora Kerja Sama Internasional, serta Peran Aktif dalam Perdamaian Dunia								
02.09.02.02 PRO-P: Strategi Pembangunan Postur Diplomasi								
02.09.02.03 PRO-P: Pengembangan Ekosistem Partisipasi Diaspora dalam Agenda Pembangunan Nasional melalui Pemberian Insentif								
02.09.03 KP: Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Menguatnya kerja sama pembangunan internasional	01 - Persentase kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional Indonesia yang telah sesuai dengan prioritas nasional	persen	- (indikator baru)	20	100		011 - Kementerian Luar Negeri
02.09.03.01 PRO-P: Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.09.03.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Internasional								
02.09.04 KP: Penguatan Diplomasi Ekonomi	01 - Terwujudnya penguatan diplomasi ekonomi	01 - Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	persen	75	80	84		011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas	persen	75	80	82		011 - Kementerian Luar Negeri
		03 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan	PTA/FTA/ CEPA	19	23	28		090 - Kementerian Perdagangan
02.09.04.01 PRO-P: Diplomasi Ekonomi yang Adaptif								
02.09.04.02 PRO-P: Diplomasi Ekonomi yang Strategis Dengan Mitra Utama								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.09.04.03 PRO-P: Diplomasi Ekonomi Dengan Negara Tetangga, Perbatasan, Regional, dan Sub Regional								
02.09.05 KP: Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil	01 - Terwujudnya perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang untuk perluasan kesempatan kerja dengan keahlian menengah dan tinggi	01 - Jumlah kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan tenaga kerja terampil	kesepakatan	- (indikator baru)	7	11		104 - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
02.09.05.01 PRO-P: Mengembangkan dan Memperkuat Proses Migrasi Tenaga Kerja Berbasis Kawasan								
02.09.05.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.09.06 KP: Proses Aksesi Indonesia ke OECD	01 - Terwujudnya aksesi Indonesia ke OECD	01 - Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen initial memorandum kepada sekretariat OECD (2024-2025)	persen	- (indikator baru)	100	0		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Persentase dokumen initial memorandum yang selesai proses reviu dari komite OECD (2025-2028)	persen	- (indikator baru)	30	0		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		03 - Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029)	persen	- (indikator baru)	20	100		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02.09.06.01 PRO-P: Penilaian Mandiri, Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum Kepada Sekretariat OECD								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.09.06.02 PRO-P: Penyelesaian Proses Reviu Initial Memorandum dari Komite OECD								
02.09.06.03 PRO-P: Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Percepatan Keanggotaan OECD								
02.10 PP: Swasembada Pangan	03 - Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan tata kelola sistem pangan	01 - Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	persen	3,4 (2022)	3,5	3,3		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)		0,693 (2023, angka kajian sementara BPS)	0,7445	0,8599		018 - Kementerian Pertanian
	02 - Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, dan penanganan kerawanan pangan	01 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		93,5	94	96		125 - Badan Pangan Nasional
		02 - Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	persen	8,53	7,21	4,41		131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	01 - Meningkatnya ketersediaan pangan secara berkelanjutan berbasis lumbung pangan	01 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		91,4	97,3	98,30		125 - Badan Pangan Nasional

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.10.01 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Kalimantan Tengah	01 - Peningkatan produksi beras KSPP Kalimantan Tengah	ton	23.578	196.984	2.309.701	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen padi KSPP Kalimantan Tengah	ha	- (indikator baru)	146.806	1.643.167		018 - Kementerian Pertanian
02.10.01.01 PRO-P: *Geospasial* KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah								
02.10.01.02 PRO-P: *On Farm* KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah								
02.10.01.03 PRO-P: *Off Farm* KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah								
02.10.02 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Utara	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen hortikultura di KSPP Sumatera Utara	01 - Peningkatan produksi hortikultura KSPP Sumatera Utara	ton	481	25.840	56.240	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen hortikultura KSPP Sumatera Utara	ha	16,02	1.700	3.700		018 - Kementerian Pertanian
02.10.02.01 PRO-P: *Geospasial* KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.10.02.02 PRO-P: *On Farm* KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara								
02.10.02.03 PRO-P: *Off Farm* KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara								
02.10.03 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Sumatera Selatan	01 - Peningkatan produksi beras KSPP Sumatera Selatan	ton	- (indikator baru)	65.724	3.240.081		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen padi KSPP Sumatera Selatan	ha	- (indikator baru)	28.568	2.599.240		018 - Kementerian Pertanian
02.10.03.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan								
02.10.03.02 PRO-P: *On Farm* KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan								
02.10.03.03 PRO-P: *Off Farm* KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.10.04 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Nusa Tenggara Timur	01 - Peningkatan produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	ton	- (indikator baru)	33.624	238.020		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen padi KSPP Nusa Tenggara Timur	ha	- (indikator baru)	10.930	183.111		018 - Kementerian Pertanian
	02 - Meningkatnya produksi dan luas panen jagung di KSPP Nusa Tenggara Timur	01 - Peningkatan produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	ton	- (indikator baru)	49.100	181.038		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	ha	- (indikator baru)	9.048	29.640		018 - Kementerian Pertanian
02.10.04.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur								
02.10.04.02 PRO-P: *On Farm* KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur								
02.10.04.03 PRO-P: *Off Farm* KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.10.05 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen jagung di KSPP Papua	01 - Peningkatan produksi jagung KSPP Papua	ton	- (indikator baru)	1.310	12.393		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen jagung KSPP Papua	ha	- (indikator baru)	189	1.589		018 - Kementerian Pertanian
02.10.05.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Papua								
02.10.05.02 PRO-P: *On Farm* KSPP/Lumbung Pangan Papua								
02.10.05.03 PRO-P: *Off Farm* KSPP/Lumbung Pangan Papua								
02.10.06 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Papua Selatan	01 - Peningkatan produksi beras KSPP Papua Selatan	ton	- (indikator baru)	0	3.719.000		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen padi KSPP Papua Selatan	ha	- (indikator baru)	0	1.900.000		018 - Kementerian Pertanian
02.10.06.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.10.06.02 PRO-P: *On Farm* KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan								
02.10.06.03 PRO-P: *Off Farm* KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan								
02.10.07 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	01 - Peningkatan produksi bahan pangan utama	01 - Lahan baku sawah yang dicetak	ribu ha	- (indikator baru)	42	79,81		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman	ribu ha	- (indikator baru)	6,9	12,12		018 - Kementerian Pertanian
02.10.07.01 PRO-P: Peningkatan Luas Lahan Pertanian (Ekstensifikasi)								
02.10.07.02 PRO-P: Peningkatan Daya Guna Lahan Pertanian (Intensifikasi)								
02.10.07.03 PRO-P: Infrastruktur Pendukung KSPP/Lumbung Pangan Lainnya								
02.10.08 KP: Penguatan Cadangan Pangan	01 - Terjaganya cadangan pangan nasional	01 - Jumlah pengelolaan cadangan pangan beras	juta ton	1,17	3 - 3,5	3 - 3,5		125 - Badan Pangan Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.10.08.01 PRO-P: Pengelolaan Cadangan Pangan								
02.10.08.02 PRO-P: Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan								
02.10.09 KP: Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)	01 - Meningkatnya penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat	01 - Volume produksi ikan budi daya	juta ton	6,20 (2023)	6,75	8,52		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Volume produksi perikanan tangkap	juta ton	7,75 (2023)	6,19	7,50		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.10.09.01 PRO-P: Pengembangan Input Produksi Perikanan Budi Daya								
02.10.09.02 PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budi Daya								
02.10.09.03 PRO-P: Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan Perikanan Budi Daya dan Revitalisasi Tambak Rakyat								
02.10.09.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Mendukung Transformasi Perikanan Budi daya								
02.10.09.05 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap serta Kampung/Sentra Nelayan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.10.09.06 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha KP								
02.10.09.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pendampingan/Penyuluhan Masyarakat KP								
02.10.09.08 PRO-P: Peningkatan Perlindungan terhadap Pelaku Usaha KP								
02.10.09.09 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Sistem Rantai Dingin, dan Logistik Perikanan								
02.10.10 KP: Pengembangan Pangan Hewani	01 - Meningkatnya produksi bahan pangan hewani	01 - Produksi daging	juta ton	5,29 (2023)	4,96	5,56		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Produksi telur	juta ton	6,89 (2023)	7,43	8,79		018 - Kementerian Pertanian
		03 - Produksi susu	ribu ton	837,22 (2023)	855,57	900,4		018 - Kementerian Pertanian
	02 - Meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan	01 - Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	persen	- (indikator baru)	80	95		127 - Badan Karantina Indonesia
02.10.10.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Input Peternakan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.10.10.02 PRO-P: Implementasi Praktik Peternakan Modern								
02.10.10.03 PRO-P: Penguatan Pasca-Panen dan Hilirisasi Produk Hasil Ternak								
02.10.10.04 PRO-P: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan Pendekatan Satu Kesehatan								
02.10.11 KP: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	01 - Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati	01 - Produksi padi	juta ton	53,98	54,45	56,05	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Produksi jagung	juta ton	19,56	21,48	25,89		018 - Kementerian Pertanian
		03 - Produksi aneka kacang	ribu ton	516,11	540,28	592,32		018 - Kementerian Pertanian
		04 - Produksi buah dan sayur	juta ton	28,82	30,66	35,47		018 - Kementerian Pertanian
		05 - Produksi sorghum	ribu ton	17,34	18,21	18,95		018 - Kementerian Pertanian
		06 - Produksi ubi jalar	ton	1.430.341	1.517.449	1.707.902		018 - Kementerian Pertanian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		07 - Produksi kedelai	ton	349.099	370.359	416.842		018 - Kementerian Pertanian
		08 - Produksi hasil hutan bukan kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)	ton	388.049	450.000	650.000		143 - Kementerian Kehutanan
02.10.11.01 PRO-P: Input dan Pendukung Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati								
02.10.11.02 PRO-P: *On Farm* Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati								
02.10.11.03 PRO-P: *Off Farm* Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati								
02.10.11.04 PRO-P: Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat								
02.10.12 KP: Penganekaragaman Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia	01 - Konsumsi buah dan sayur	gram/kapita/ hari	244,6	245,33	255,29		125 - Badan Pangan Nasional
		02 - Konsumsi pangan hewani	gram/kapita/ hari	124,5	129,11	139,76		125 - Badan Pangan Nasional
		03 - Konsumsi umbi-umbian	gram/kapita/ hari	41,1	53,40	64,91		125 - Badan Pangan Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Konsumsi ikan masyarakat	kg/kapita/ tahun	25,07 (2023)	26,26	28,63		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.10.12.001 PRO-P: Analisis dan Fasilitasi Penganekaragaman Pangan								
02.10.12.002 PRO-P: Promosi dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat								
02.10.13 KP: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	01 - Meningkatnya kualitas keamanan pangan	01 - Indeks Keamanan Pangan Segar		60	61	65		125 - Badan Pangan Nasional
		02 - Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi *standard* mutu dan keamanan pangan	persen	- (indikator baru)	70	80		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03 - Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	persen	- (indikator baru)	40	20		127 - Badan Karantina Indonesia
		04 - Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	persen	- (indikator baru)	100	100		018 - Kementerian Pertanian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	02 - Terkendalinya penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan	01 - Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	persen	- (indikator baru)	85	95		127 - Badan Karantina Indonesia
		02 - Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	persen	- (indikator baru)	85	95		127 - Badan Karantina Indonesia
		03 - Persentase wilayah terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)	persen	- (indikator baru)	85	95		127 - Badan Karantina Indonesia
		04 - Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	persen	- (indikator baru)	70	90		018 - Kementerian Pertanian
02.10.13.01 PRO-P: Pengawasan Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan								
02.10.13.02 PRO-P: Pengujian Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.10.13.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan								
02.10.13.04 PRO-P: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan								
02.10.14 KP: Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi	01 - Jumlah Komoditas yang wajib terfortifikasi	komoditas	3	3	4		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	persen	- (indikator baru)	20	100		125 - Badan Pangan Nasional
02.10.14.001 PRO-P: Fasilitasi Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi								
02.10.14.002 PRO-P: Pengembangan Kawasan Padi Biofortifikasi								
02.10.15 KP: Penanganan Kerawanan Pangan	01 - Menurunnya daerah rentan rawan pangan	01 - Persentase daerah rentan rawan pangan	persen	12	11,5	9,5	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	125 - Badan Pangan Nasional
		02 - Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan / *Food Insecurity Experience Scale* (FIES)	persen	4,5	3,75	3,36		125 - Badan Pangan Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.10.15.01 PRO-P: Penguatan Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan								
02.10.15.02 PRO-P: Intervensi Kerawanan Pangan								
02.10.16 KP: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, Regenerasi Sumber Daya Manusia, Riset, Inovasi, Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan yang Adaptif dan Inklusif	01 - Ditumbuhkan dan dikembangkannya kelembagaan ekonomi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam	01 - Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	lembaga	120	125	145	02 - Transformasi Ekonomi	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi	lembaga	15	4	27		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
	02 - Meningkatnya persentase petani muda	01 - Persentase petani muda terhadap jumlah petani	persen	21,93 (ST 2023 BPS)	22,03	22,43		018 - Kementerian Pertanian
02.10.16.01 PRO-P: Riset dan Inovasi yang Adaptif dan Inklusif								
02.10.16.02 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia								

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.10.16.03 PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kewirausahaan								
02.10.16.04 PRO-P: Pengembangan Satu Data Pangan								
02.10.16.05 PRO-P: Implementasi Bantuan Langsung Petani								
02.10.17 KP: Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah	03 - Meningkatnya nilai tambah bahan baku industri prioritas	01 - Produksi tanaman obat	ton	526.889 (2023)	529.523,45	540.193,61	02 - Transformasi Ekonomi	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Produksi vanili	ton	1.505 (2022)	1.582	1.588		018 - Kementerian Pertanian
		03 - Produksi lada	ton	75.205 (2022)	64.408	64.666		018 - Kementerian Pertanian
		04 - Produksi pala	ton	40.896 (2022)	41.527	41.693		018 - Kementerian Pertanian
		05 - Produksi florikultura	ribu tangkai	679.328,585 (2023)	597.622,50	596.969,14		018 - Kementerian Pertanian
		06 - Produksi cengkeh	ton	137.124 (2022)	133.570	134.105		018 - Kementerian Pertanian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		07 - Produksi kopi	ton	774.961 (2022)	780.957	80.221		018 - Kementerian Pertanian
		08 - Produksi tebu	ton	2.405.907 (2022)	36.813.539	84.714.460		018 - Kementerian Pertanian
		09 - Produksi karet	ton	2.717.081 (2022)	2.496.364	3.080.114		018 - Kementerian Pertanian
		10 - Produksi kakao	ton	650.612 (2022)	632.787	634.796		018 - Kementerian Pertanian
		11 - Produksi teh	ton	124.661 (2022)	116.555	116.648		018 - Kementerian Pertanian
		12 - Pertumbuhan PDB tanaman perkebunan	persen	1,73 (2023)	1,94	3,03		018 - Kementerian Pertanian
		13 - Pertumbuhan PDB tanaman hortikultura	persen	- 0,31 (2023)	1,36	3,04		018 - Kementerian Pertanian
02.10.17.01 PRO-P: Input dan Pendukung Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah								
02.10.17.02 PRO-P: *On Farm* Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.10.17.03 PRO-P: *Off Farm* Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah								
02.10.18 KP: Pengembangan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	01 - Meningkatnya implementasi praktik budi daya pertanian berkelanjutan	01 - Indeks Kepatuhan terhadap Standar dan Regulasi Budi Daya Pertanian Berkelanjutan		- (indikator baru)	3,0	3,4		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan	persen	10,46 (2021)	11,0	13		018 - Kementerian Pertanian
		03 – Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	persen	73,4 (Prognosis)	75	87		018 - Kementerian Pertanian
	02 - Meningkatnya nilai tambah dan ketertelusuran produk budi daya pertanian berkelanjutan	01 - Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian	persen	1,45 (2022)	1,47	1,55		018 - Kementerian Pertanian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	03 - Terjaganya sumber daya genetik komoditas produksi pertanian	01 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	varietas dan/atau galur	28 (2021)	30	30		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	aksesi	4.675,0 (2021)	4.700	4.800		018 - Kementerian Pertanian
02.10.18.01 PRO-P: Peningkatan Implementasi Praktik Budi Daya Pertanian Berkelanjutan								
02.10.18.02 PRO-P: Pengembangan Nilai Tambah dan Ketertelusuran Produk Pertanian Berkelanjutan								
02.10.18.03 PRO-P: Konservasi Komoditas Pertanian dan Praktik Budi Daya Pertanian Berkelanjutan								
02.11 PP: Swasembada Energi	01 - Meningkatnya ketersediaan energi	01 - Pasokan energi primer	MTOE	273	312	356,8		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya aksesibilitas dan keterjangkauan energi	01 - Konsumsi energi final per kapita	TOE per kapita	0,640	0,750	0,830		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	03 - Meningkatnya pemanfaatan energi bersih	01 - Porsi EBT dalam bauran energi primer	persen	13,2 (2023)	20,0	23		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Intensitas energi primer	SBM/miliar rupiah	149,1	147,7	137,6		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.01 KP: Peningkatan Penyediaan Energi	01 - Meningkatnya pasokan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energi	01 - Jumlah *lifting* minyak bumi	ribu BOPD	605,5	605	642 -792		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi	01 - Jumlah *lifting* gas bumi	ribu BOEPD	964	1.005	1.371 - 1.617		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	03 - Meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri	01 - Jumlah produksi batu bara	juta ton	775,20	717	743		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Realisasi kebutuhan batu bara dalam negeri	persen	120	100	100		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.11.01.01 PRO-P: Peningkatan Cadangan dan Produktivitas Energi								
02.11.01.02 PRO-P: Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri								
02.11.02 KP: Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	01 - Meningkatnya akses terhadap gas bumi	01 - Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota	sambungan rumah (kumulatif)	947.995	100.000	350.000		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi	km	22.478	22.550	22.750		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya akses terhadap BBM	01 - Jumlah volume penyaluran BBM bersubsidi	juta KL	17	19,41	20,48		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Jumlah volume penyaluran BBM nonsubsidi	juta KL	- (indikator baru)	35,16	38,64		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	03 - Meningkatnya akses terhadap listrik	01 - Jumlah pelanggan listrik (kumulatif)	ribu pelanggan	91.800	95.256	110.934		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	04 - Meningkatnya keterjangkauan energi	01 - Deviasi harga jual eceran BBM	persen	- (indikator baru)	0	0		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.02.01 PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan Gas Bumi								
02.11.02.02 PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan BBM								
02.11.02.03 PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan Listrik								
02.11.02.04 PRO-P: Pengawasan dan Penyaluran Energi yang Disubsidi								
02.11.03 KP: Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	01 - Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan	01 - Konsumsi *biofuel*	juta KL	11,30	13,50	17,11		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Produksi listrik energi terbarukan	GWH	47.657,46 (2023)	50.739	62.063		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya efisiensi energi	01 - Penurunan intensitas energi final	SBM/miliar rupiah	0,98	0,97	1,84		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.11.03.01 PRO-P: Diversifikasi Menuju Energi Bersih								
02.11.03.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Energi Terbarukan								
02.11.03.03 PRO-P: Pengembangan Ekosistem Pendukung Energi Bersih								
02.11.03.04 PRO-P: Perluasan Pemanfaatan *Biofuel*								
02.11.03.05 PRO-P: Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi								
02.12 PP: Swasembada Air	01 - Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif	01 - Kapasitas tampungan air	m^3/kapita	59,59	59,31	63,54		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	persen	53,34	53,01	56,18		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	persen	61,55	61,61	62,37		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	persen	15,6	15,6	16,57		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m³	0,31	0,34	0,43		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06 - Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	persen	- (indikator baru)	12	100		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman	01 - Rumah tangga dengan akses air minum aman	persen	11,80 (2020)	33	43		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	persen	10,21 (2023)	12,5	30		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka	persen	4,2 (2023)	2,5	0		024 - Kementerian Kesehatan
02.12.01 KP: Pembangunan dan Pengelolaan Tampungan Air	01 - Meningkat dan terjaganya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan	01 - Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola	unit (kumulatif)	1.563	1.563	4.213	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah bendungan yang selesai dibangun	unit (kumulatif)	47 (2015–2024)	1	16		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun	unit (kumulatif)	1.391 (2015–2024)	13	226		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	unit (kumulatif)	19	20	50		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05 - Jumlah bendungan yang direhabilitasi	unit (kumulatif)	2	10	25		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.01.01 PRO-P: Pembangunan Tampungan Air								
02.12.01.02 PRO-P: Rehabilitasi dan Revitalisasi Tampungan Air								
02.12.01.03 PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Tampungan Air								
02.12.02 KP: Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan	01 - Meningkatnya pasokan air berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air	01 - Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya	persen	35	35	45		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit	wilayah sungai	50	50	50		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	m^3/detik (kumulatif)	75,03	78,78	93,79		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Kapasitas prasarana air baku yang dibangun	m^3/detik (kumulatif)	46,7 (2015–2024)	0,37	19,12		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05 - Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi	m^3/detik (kumulatif)	1,44	0,84	5,53		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06 - Luas layanan irigasi yang dikelola	ha (kumulatif)	3.142.532	3.142.532	3.229.532		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		07 - Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas	ha (kumulatif)	134.118 (2020–2024)	10.000	180.000		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		08 - Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	ha (kumulatif)	1.078.057 (2020–2024)	75.864	1.200.000		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		09 - Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	miliar m^3	58,32	55,40	45,13		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.12.02.01 PRO-P: Penyediaan Air Baku Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Strategis								
02.12.02.02 PRO-P: Penyediaan Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil								
02.12.02.03 PRO-P: Penyediaan Air Baku Bersumber dari Bendungan								
02.12.02.04 PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan								
02.12.02.05 PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal								
02.12.02.06 PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi yang Bersumber dari Bendungan								
02.12.02.07 PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Penyediaan Pasokan Air								
02.12.02.08 PRO-P: Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.12.03 KP: Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air	01 - Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	01 - Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan	persen	36	38	47	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	ha (kumulatif)	37.754 (2020–2024)	3.600	27.000		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	unit (kumulatif)	549	549	697		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipelihara	unit (kumulatif)	1.784	1.784	2.222		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05 - Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen	juta m^3	1,57	0,35	4,3		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06 - Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural	kawasan (kumulatif)	- (indikator baru)	0	16		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		07 - Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	wilayah sungai (kumulatif)	- (indikator baru)	19	26		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.03.01 PRO-P: Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis								
02.12.03.02 PRO-P: Pengendalian Banjir di Kawasan Perkotaan								
02.12.03.03 PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air di Pulau Kecil								
02.12.03.04 PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air di Kawasan Strategis Ekonomi dan Daerah Berisiko Daya Rusak Air Tinggi								
02.12.03.05 PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Pengelolaan Risiko Banjir								
02.12.04 KP: Konservasi Sumber Daya Air	01 - Terwujudnya kuantitas air secara berkelanjutan melalui peningkatan tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS)	01 - Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan	juta ha	12,7	12,45	11,45	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	143 - Kementerian Kehutanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya kualitas ekosistem perairan darat	01 - Jumlah mata air yang dipertahankan dan diselamatkan	unit	175	60	300		143 - Kementerian Kehutanan
02.12.04.01 PRO-P: Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air								
02.12.04.02 PRO-P: Pengawetan Air								
02.12.04.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan, Data, dan Informasi								
02.12.04.04 PRO-P: Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem Mangrove								
02.12.04.05 PRO-P: Penyelamatan Mata Air Kritis								
02.12.04.06 PRO-P: Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Kualitas Air								
02.12.05 KP: Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	01 - Meningkatnya jumlah dan kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir	01 - Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	persen	24 (2020)	39,20	51,36	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Kapasitas SPAM terbangun	liter/detik	281.045	281.797	287.500		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Akses air minum jaringan perpipaan	persen	19,76 (2023)	28,2	40,2		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase *Non Revenue Water* (NRW) PDAM	persen	33 (2023)	32	25		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin dan berkala	01 - Kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	kab/kota	65 (2023)	100	300		024 - Kementerian Kesehatan
		02- Kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat Kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	kab/kota	65 (2023)	50	250		024 - Kementerian Kesehatan
02.12.05.01 PRO-P: Pengembangan SPAM								
02.12.05.02 PRO-P: Pengelolaan SPAM								
02.12.05.03 PRO-P: Pengawasan Kualitas Air Minum								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.12.06 KP: Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	01 - Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SPALD	01 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik	kab/kota	196	218	514	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Kapasitas IPAL yang terbangun	sambungan rumah	684.782 (2023)	730.000	1.700.000		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Rumah tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala	persen	9,35 (2023)	10	25		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya keberfungsiaan dan kualitas infrastruktur SPALD	01 - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL	persen	0	0	20		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - *Idle capacity IPLT*	persen	75,27 (2023)	70	30		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - *Idle capacity IPAL*	persen	65 (2023)	64	60		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan LLTT	kab/kota	19 (2023)	30	70		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.06.001 PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat								
02.12.06.002 PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat								
02.12.06.003 PRO-P: Peningkatan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik								
02.12.06.004 PRO-P: Pemantauan dan Inspeksi Kualitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik								
02.12.06.005 PRO-P: Pengembangan Manajemen Layanan Sanitasi (Air Limbah Domestik)								
02.12.07 KP: Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Berorientasi pada Keberlanjutan	01 - Meningkatnya kualitas perencanaan air minum dan sanitasi (air limbah domestik)	01 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki Jakstra SPAM	provinsi dan kab/kota	15 Provinsi dan 103 kab/kota	18 Provinsi dan 178 kab/kota	38 Provinsi dan 508 kab/kota	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan	provinsi dan kab/kota	21 Provinsi dan 505 kab/kota	23 Provinsi dan 508 kab/kota	38 Provinsi dan 508 kab/kota		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan	provinsi dan kab/kota	278 (2023)	300	514		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM	BUMD air minum	121	176	394		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang aman dan berkelanjutan	01 - BUMD air minum berkinerja sehat	persen	65,39 (2023)	74	100		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan air limbah domestik (UPTD/BLUD/BUMD)	kab/kota	127 (2023)	180	514		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Jumlah BUMD air minum yang mengelola layanan air limbah domestik	BUMD air minum	5 (2023)	7	20		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - BUMD air minum dengan tarif *Full Cost Recovery* (FCR)	persen	42,49 (2023)	60	100		010 - Kementerian Dalam Negeri
		05 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan tarif/retribusi layanan air limbah domestik	kab/kota	17 (2023)	40	100		010 - Kementerian Dalam Negeri
	03 - Tersedianya landasan regulasi dan pedoman penyelenggaraan air minum dan air limbah domestik	01 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki Perda terkait tata kelola air limbah domestik	kab/kota	135 (2023)	150	514		010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Jumlah NSPK air minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	2	9		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Jumlah NSPK air limbah domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	1	5		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.12.07.001 PRO-P: Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik) melalui P3AM dan PPSP								
02.12.07.002 PRO-P: Penguatan Kelembagaan dan Pengaturan Air Baku, Air Minum, dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)								
02.12.07.003 PRO-P: Reformasi Kebijakan Tarif Air Baku, Air Minum, dan Air Limbah Domestik								
02.12.07.004 PRO-P: Penyusunan dan Pendampingan Pengaturan dan NSPK Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)								
02.12.08 KP: Penguatan Peran Masyarakat dan Ekosistem Air Minum dan Sanitasi Berbasis Inovasi dan Kolaborasi	01 - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air minum dan ALD	01 - Kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar STBM	kab/kota	4 (2023)	30	200	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Berkembangnya ekosistem air minum dan sanitasi berbasis inovasi	01 - Jumlah provinsi yang melakukan pelaporan kinerja air minum di tingkat kab/kota	provinsi	38 (2023)	38	38		010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Jumlah provinsi yang melakukan pelaporan kinerja sanitasi (air limbah domestik) di tingkat kab/kota	provinsi	1 (2023)	15	38		010 - Kementerian Dalam Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah proyek yang mendapatkan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0	4		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Jumlah proyek pengembangan dan *piloting* teknologi sistem pengelolaan air limbah domestik (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0	5		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05 - Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	8	10	13		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06 - Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0	2		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.12.08.001 PRO-P: Kampanye dan Edukasi Masyarakat untuk Mendorong Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Aman								
02.12.08.002 PRO-P: Pengembangan Manajemen Data Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang Terintegrasi								
02.12.08.003 PRO-P: Pengembangan Inovasi dan Teknologi Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)								
02.12.08.004 PRO-P: Pengembangan Model Bisnis, Skema Kerjasama, SDM, dan Pasar Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)								
02.12.09 KP: Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	01 - Meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	01 - Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	ha (kumulatif)	3.577 (2020–2024)	200	5.000	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa	m^3/detik (kumulatif)	2,98 (2020–2024)	0,7	8,82		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya layanan air minum dan sanitasi di Pesisir Utara Jawa	01 - Akses air minum jaringan perpipaan di Pesisir Utara Jawa	persen	30	31,5	41		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik di Pesisir Utara Jawa	kab/kota (kumulatif)	32	32	43		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.12.09.01 PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air								
02.12.09.02 PRO-P: Penyediaan Air Baku dan Air Minum								
02.12.09.03 PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik								
02.12.09.04 PRO-P: Pemantauan Penurunan Muka Tanah								
02.12.09.05 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup								
02.12.09.06 PRO-P: Pengembangan Kawasan								
02.13 PP: Ekonomi Syariah	01 - Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	01 - Kontribusi PDB syariah	persen	46,72 (2023)	49,04	56,11		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.13.01 KP: Industri Halal dan UMKM Halal	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri dan UMKM halal	01 - Persentase peningkatan daya saing industri yang memproduksi produk halal	persen	- (indikator baru)	4,46	7,00	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Pertumbuhan pariwisata ramah muslim	persen	20,41 (2023)	10,28	13,08		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.01.01 PRO-P: Pengembangan Industri Makanan Minuman Halal								
02.13.01.02 PRO-P: Pengembangan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal								
02.13.01.03 PRO-P: Pengembangan Industri Fesyen Muslim								
02.13.01.04 PRO-P: Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim								
02.13.01.05 PRO-P: Penguatan Halal *Value Chain*								
02.13.01.06 PRO-P: Penguatan Promosi Industri Halal								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.13.02 KP: Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional	01 - Meningkatnya ekspor produk halal berdaya saing global dan menguatnya kerjasama ekonomi syariah internasional	01 - Nilai ekspor halal/PDB	persen	3,69 (2023)	3,73	3,92	02 - Transformasi Ekonomi	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.02.01 PRO-P: Penguatan Ekspor Halal								
02.13.02.02 PRO-P: Penguatan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional								
02.13.03 KP: Ekosistem Halal	01 - Menguatnya ekosistem halal pendukung pertumbuhan ekonomi syariah	01 - Jumlah produk tersertifikasi halal	produk	2.172.106	7.000.000	7.000.000	02 - Transformasi Ekonomi	142 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
02.13.03.01 PRO-P: Akselerasi Fasilitasi Sertifikasi Halal								
02.13.03.02 PRO-P: Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal								
02.13.03.03 PRO-P: Pengembangan Kebijakan Ekosistem Halal								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.13.03.04 PRO-P: Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal								
02.13.03.05 PRO-P: Pengembangan Riset Pendukung Ekosistem Halal								
02.13.03.06 PRO-P: Pengembangan Penghitungan PDB Syariah								
02.13.04 KP: Keuangan Syariah	01 - Meningkatnya peran keuangan syariah mendukung perekonomian nasional	01 - Aset keuangan syariah/PDB	persen	42,67 (2023)	45,38	51,42	02 - Transformasi Ekonomi	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.04.01 PRO-P: Penguatan Perbankan Syariah								
02.13.04.02 PRO-P: Penguatan Pasar Modal Syariah								
02.13.04.03 PRO-P: Penguatan IKNB Syariah								
02.13.05 KP: Dana Sosial Syariah	01 - Meningkatnya peran dana sosial syariah mendukung perekonomian dan perlindungan sosial nasional	01 - ZIS-DSKL/PDB	persen	0,155 (2023)	0,169	0,208	02 - Transformasi Ekonomi	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
		02 - Aset wakaf uang/PDB	persen	0,011 (2023)	0,016	0,027		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.13.05.01 PRO-P: Akselerasi Bauran ZISWAF dan keuangan syariah								
02.13.05.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF								
02.14 PP: Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya pengembangan ekonomi digital dalam mendukung kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	001 - Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	persen	8	8-9	12-13		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02.14.001 KP: Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya Jumlah SDM Digital	01 - Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif)	persen	3	3,21	5,21	02 - Transformasi Ekonomi	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK)	persen	79 (2023)	83	90		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
02.14.001.001 PRO-P: Pengembangan SDM Digital dan Digitalisasi Masyarakat								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.14.001.002 PRO-P: Penguatan Infrastruktur dan Pelindungan Keamanan Data								
02.14.001.003 PRO-P: Riset dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital								
02.14.001.004 PRO-P: Pengembangan Regulasi, Pendanaan dan Iklim Bisnis								
02.14.002 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	01 - Meningkatnya pengembangan ekonomi dan Industri digital	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis		39,12 (2022)	40,38	41,70	02 - Transformasi Ekonomi	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Tingkat kesuksesan *startup* digital nasional (*success rate startup digital*)	persen	- (indikator baru)	7	15		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia *Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) > 3.0	perusahaan	74 (2023)	87	156		019 - Kementerian Perindustrian
		04 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB	persen	4,3	4,3	4,4		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.14.002.001 PRO-P: Pengembangan Industri dan Perangkat Digital								
02.14.002.002 PRO-P: Penguatan Pengembangan Ekonomi Digital UMKM								
02.14.002.003 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Perdagangan								
02.14.002.004 PRO-P: Pengembangan Keuangan dan Perbankan Digital								
02.14.002.005 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan								
02.14.002.006 PRO-P: Pengembangan Media Digital								
02.14.002.007 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Transportasi dan Pariwisata								
02.14.002.008 PRO-P: Pelayanan Kesehatan Digital								
02.14.002.009 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Pendidikan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.14.002.010 PRO-P: Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah								
02.14.002.011 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Sektor Energi dan Lingkungan								
02.15 PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular	01 - Meningkatkan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material	01 - Tingkat input material sirkular	persen	9	9.2	10		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02.15.01 KP: Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Meminimalkan dan mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan meningkatkan penggunaan material sirkular	01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	perusahaan (akumulatif)	140	152	200		019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	persen	10	11	15		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Persentase sampah yang didaur ulang	persen	13	16	20		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.15.01.01 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Industri Manufaktur dalam Penerapan Ekonomi Sirkular								
02.15.01.02 PRO-P: Penerapan Industri Hijau								
02.15.02 KP: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	01 - Mengurangi susut pangan pada rantai pasok pangan	01 - Persentase penurunan susut pangan	persen	3	3-5	3-5	02 - Transformasi Ekonomi	018 - Kementerian Pertanian
	02 - Mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali	02 - Persentase pangan yang terselamatkan	persen	1,44	3-5	3-5		125 - Badan Pangan Nasional
02.15.02.01 PRO-P: Pengembangan Kebijakan dan Standar Susut dan Sisa Pangan								
02.15.02.02 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pangan Pertanian, Perikanan, dan Peternakan								
02.15.02.03 PRO-P: Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kerjasama Penyelamatan Pangan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.15.03 KP: Pengembangan Produk Ramah Lingkungan	01 - Meningkatkan jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	01 - Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan	produk ramah lingkungan (kumulatif)	51	70	150		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.15.03.01 PRO-P: Pengembangan Labelisasi, Standarisasi, dan Riset Produk Ramah Lingkungan								
02.15.03.02 PRO-P: Penerapan Konstruksi Berkelanjutan dan Bangunan Gedung Hijau								
02.15.03.03 PRO-P: Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Prinsip Berkelanjutan								
02.15.04 KP: Penguatan Ekosistem Daur Ulang	01 - Peningkatan kapasitas dan tingkat daur ulang	01 - Tingkat daur ulang	persen	5	5,2	6		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.15.04.01 PRO-P: Pengembangan Kebijakan, Teknologi dan Fasilitas Pengelolaan Sampah dengan Prinsip Sirkular								
02.15.04.02 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha, Bank Sampah, dan Kelompok Masyarakat dalam Penerapan Ekonomi Sirkular								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.15.04.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Bank Sampah & Mitra 3R								
02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	01 - Meningkatnya upaya pencegahan kerusakan serta konservasi ekosistem dan spesies	01 - Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati		0,40 (2020)	0,51	0,64		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	01 - Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan		0,31 (2020)	0,37	0,44		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya upaya pengelolaan sumber daya genetik keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	01 - Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital *sequence information* pada sumber daya genetik	model	1	1	1		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.16.01 KP: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	01 - Meningkatnya efektivitas pengelolaan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	01 - Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	unit	294 (2023)	304	400	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	143 - Kementerian Kehutanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01 - Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil		49,56 (2023)	50,00	58,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
	03 - Meningkatnya luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01 - Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	persen	8,98 (2023)	9,23	10		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
	04 - Meningkatnya pengelolaan areal preservasi	01 - Luas areal preservasi yang dikembangkan	ha	- (indikator baru)	528.000	1.000.000		143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanaan dan pengelolaanya	unit	2	2	2		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	05 - Meningkatnya pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem melalui pengembangan *geopark*	01 - Jumlah *geopark* yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UNESCO *Global Geopark*	unit (kumulatif)	10	12	17		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	06 - Meningkatnya pemulihan ekosistem terdegradasi	01 – Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	ha	29.734,22	20.000	70.000		143 - Kementerian Kehutanan
02.16.01.01 PRO-P: Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)								
02.16.01.02 PRO-P: Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil								
02.16.01.03 PRO-P: Pengelolaan Areal Preservasi								
02.16.01.04 PRO-P: Pengelolaan Geologi untuk Mendukung Keanekaragaman Ekosistem								
02.16.01.05 PRO-P: Pemulihan Ekosistem Darat yang Terdegradasi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.16.01.06 PRO-P: Pemulihan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir, dan Laut yang Terdegradasi								
02.16.01.07 PRO-P: Identifikasi Tipe, Luasan, dan Status Keterancaman Ekosistem								
02.16.02 KP: Pengurangan Status Keterancaman Spesies Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan	01 - Berkurangnya status keterancaman spesies	01 - Indeks Daftar Merah Nasional status keterancaman spesies		0,75	0,75	0,76		143 - Kementerian Kehutanan
	02 - Menurunnya penyebaran jenis asing invasif di Indonesia	01 - Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyebaran jenis asing invasif di area karantina Indonesia	persen	- (indikator baru)	81	85		127 - Badan Karantina Indonesia
02.16.02.01 PRO-P: Pemantauan, Penyelamatan, dan Penanganan Konflik Spesies Tumbuhan, Satwa Liar, dan Biota Perairan								
02.16.02.02 PRO-P: Pengembangbiakan dan Konservasi Keragaman Genetik Spesies Tumbuhan, Satwa Liar, dan Biota Perairan								
02.16.02.03 PRO-P: Pemberantasan Perburuan dan Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar, serta IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated*) *Fishing*								
02.16.02.04 PRO-P: Pengendalian Jenis Asing Invasif, Vektor Penyakit, dan *Zoonosis*								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.16.03 KP: Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati	01 - Meningkatnya tata kelola keanekaragaman hayati	01 - Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	kelompok masyarakat (kumulatif)	- (indikator baru)	200	2500		143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia	dokumen	1	1	1		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03 - Jumlah lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati	lembaga	- (indikator baru)	10	10		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		04 - Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati	inovasi	50 (2023)	100	180		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
02.16.03.01 PRO-P: Pelibatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati								
02.16.03.02 PRO-P: Integrasi Data dan Pengayaan IPTEK Keanekaragaman Hayati								
02.16.03.03 PRO-P: Penguatan Perencanaan dan Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.16.03.04 PRO-P: Mobilisasi Pendanaan Inovatif, Dukungan Swasta, dan Insentif Positif untuk Keanekaragaman Hayati								
02.16.04 KP: Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan mendukung Bioekonomi	01 - Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan	01 - Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	miliar rupiah	25,96	26	28	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau *appendix CITES*	nilai	62,40 (2023)	68,30	70,94		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03 - Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	persen	- (indikator baru)	60	80		127 - Badan Karantina Indonesia
	02 - Meningkatnya pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	01 - Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	juta ha (kumulatif)	2,0	2,1	2,5		143 - Kementerian Kehutanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		02 - Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	miliar rupiah	204	209	239		143 - Kementerian Kehutanan
02.16.04.01 PRO-P: Pemanfaatan Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan Secara Berkelanjutan								
02.16.04.02 PRO-P: Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon, Air, dan Panas Bumi Secara Berkelanjutan								
02.16.04.03 PRO-P: Pengelolaan Wisata Alam dan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan								
02.16.05 KP: Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	01 - Meningkatnya pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan	01 - Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	produk (kumulatif)	10	15	25		143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi	produk	25	50	150		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	02 - Meningkatnya pengelolaan keamanan hayati (*biosafety* dan *biosecurity*)	01 - Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (*biosafety* dan *biosecurity*)	rekomendasi kebijakan (kumulatif)	40	44	60		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.16.05.01 PRO-P: Pengembangan Bioprospeksi, Bioteknologi, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik								
02.16.05.02 PRO-P: Pengelolaan Keamanan Hayati (*Biosafety and Biosecurity*)								
02.17 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Air	01 - Indeks Kualitas Air (IKA)		54,59 (2023)	72,02	72,77		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	01 - Indeks Kualitas Udara (IKU)		88,67 (2023)	78,53	79,49		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	01 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		78,84 (2023)	81,02	81,22		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	04 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	01 - Indeks Kualitas Lahan (IKL)		61,79	77,97	78,19		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	05 - Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	persen	30	30	55		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	06 - Terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	01 - Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		0,564	0,567	0,576		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	01 - Meningkatnya ketersediaan data kualitas air sungai dan danau	01 - Ketersediaan status mutu DAS dan danau	data	188	190	198		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya kualitas air permukaan	01 - Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu	lokasi	1	5	5		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air	kab/kota	0	5	5		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	03 - Meningkatnya pengendalian pencemaran air di sektor industri	01 - Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu	industri	2.853	2.940	3.310		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.01.01 PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Danau								
02.17.01.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Air melalui Pengelolaan Air Limbah								
02.17.01.03 PRO-P: Peningkatan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Air								
02.17.01.04 PRO-P: Pengendalian Pencemaran Air di Sektor Industri								
02.17.02 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas udara di Kab/Kota	01 - Meningkatnya pengelolaan kualitas udara	01 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor udara	kab/kota	0	5	5		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya pengelolaan emisi udara di industri, prasarana, dan jasa	01 - Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara	industri	2.855	2.940	3.310		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.17.02.01 PRO-P: Pemantauan Kualitas Udara di Kab/Kota								
02.17.02.02 PRO-P: Pengendalian Pencemaran Udara di Kab/Kota serta Sektor Industri, Prasarana, dan Jasa								
02.17.03 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas dan Kesehatan Air Laut	01 - Meningkatnya pemulihan kualitas ekosistem pesisir dan laut yang terkontaminasi	01 - Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan	m	127.600	5.000	5.000		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah	pelabuhan/ industri	36	36	50		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03 - Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air laut	provinsi	0	37	37		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.03.01 PRO-P: Pengelolaan Kualitas Air Laut								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.17.03.02 PRO-P: Rehabilitasi Ekosistem Laut dan Pesisir								
02.17.04 KP: Peningkatan Kualitas Lahan	01 - Meningkatnya luasan lahan rusak yang dipulihkan	01 – Indeks Kualitas Tutupan Lahan		77,98	77,98	78,20		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya pengelolaan kerusakan lahan	01 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor lahan	kab/ kota	0	15	15		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan	01 - Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian Kerusakan Lahan (KLH)	industri	113	113	133		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	04 - Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	01 – Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS	persen	5,85	9,86	100		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang
		02 – Persentase penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	persen	70,38	73,88	80,02		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.17.04.01 PRO-P: Pemulihan Ekosistem Mangrove dan Lahan Rusak								
02.17.04.02 PRO-P: Implementasi Program Indonesia Hijau dan PROPER Sektor Lahan								
02.17.04.03 PRO-P: Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang								
02.17.05 KP: Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	01 - Meningkatnya ketersediaan data dan informasi karakteristik ekosistem gambut	01 - Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)		64,11	64,15	64,3		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut	industri	330	245	400		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.05.01 PRO-P: Pengelolaan Data dan Informasi Ekosistem Gambut								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.17.05.02 PRO-P: Pemulihan Lahan Gambut								
02.17.06 KP: Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Limbah Radioaktif	01 - Meningkatnya jumlah B3 yang dikelola	01 - Jumlah B3 yang dikelola	ton	6.220.572	6.002.005	7.500.231		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya jumlah limbah B3 dan non B3 yang dikelola	01 - Jumlah limbah B3 dan non B3 yang dikelola	ton	62.508.066	65.153.500	85.356.500		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya jumlah limbah radioaktif yang dikelola	01 - Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelola	fasilitas	- (indikator baru)	2	3		085 - Badan Pengawas Tenaga Nuklir
02.17.06.01 PRO-P: Peningkatan Pengelolaan B3								
02.17.06.02 PRO-P: Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 dan non B3								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.17.06.03 PRO-P: Peningkatan Pengelolaan Limbah Radioaktif								
02.17.07 KP: Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penertiban dan Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang	01 - Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi	01 - Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya	usaha/ kegiatan/izin	80	80	600		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Menurunnya tingkat kerawanan kawasan hutan	01 - Luas kawasan hutan yang diamankan	ha	4.589.460 (2023)	800.000	1.200.000		143 - Kementerian Kehutanan
	03 - Meningkatnya penyelesaian tindak pidana dan perdata, dan sengketa terkait lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	perkara	14	14	58		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	04 - Meningkatnya Indeks Kepatuhan Ruang yang optimal	01 – Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang	persen	50	52	60		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	05 - Meningkatnya sarana dan prasarana dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di pusat dan daerah	01 - Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program	layanan	- (indikator baru)	40	40		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.07.01 PRO-P: Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Aparat Pengawas, Penyidik dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Tata Ruang								
02.17.07.02 PRO-P: Pengawasan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK								
02.17.07.03 PRO-P: Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan								
02.17.07.04 PRO-P: Penanganan Perkara Bidang LHK yang Diselesaikan								
02.17.07.05 PRO-P: Layanan Pengujian Laboratorium dan Standard Pengelolaan SDA dan Lingkungan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.17.07.06 PRO-P: Pengendalian Pemanfaatan Ruang								
02.17.07.07 PRO-P: Penertiban Pemanfaatan Ruang								
02.17.07.08 PRO-P: Sarana dan Prasarana Perizinan, Instrumen dan Penerapan Sistem Perizinan di Pusat dan Daerah								
02.17.07.09 PRO-P: Peningkatan Perencanaan, Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
02.17.08 KP: Penguatan Instrumen Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup *(environmental safeguard)*	01 - Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah dengan ekosistem rentan	provinsi/kab/ kota	24	48	55	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya kualitas kebijakan rencana dan/atau program yang mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan	01 - Persentase KRP yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau)	persen	100	100	100		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	03 - Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan hidup	01 - Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	persen	63	65	85		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.08.01 PRO-P: Penerapan dan Penguatan RPPLH								
02.17.08.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas KRP Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
02.17.08.04 PRO-P: Peningkatan Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Usaha dan Kegiatan								
02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	01 - Meningkatnya IKPS Nasional	18 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		52,64 (2023)	58	65		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.18.01 KP: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	01 - Meningkatnya sampah yang dikelola	01 - Persentase sampah yang dikelola	persen	39,01	51,21	100	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM)	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM)	kab/kota	4 (2023)	30	200		024 - Kementerian Kesehatan
02.18.01.01 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Sampah								
02.18.01.02 PRO-P: Penguatan Kebijakan Pendanaan dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah								
02.18.01.03 PRO-P: Pengembangan Data dan Sistem Informasi Persampahan								
02.18.01.04 PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan Sistem Pengelolaan Sampah								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.18.01.05 PRO-P: Pengembangan Inovasi dan Standarisasi Teknologi Tepat Guna pengelolaan sampah								
02.18.01.06 PRO-P: Perubahan Perilaku untuk Pemilahan Sampah								
02.18.02 KP: Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	01 - Menurunnya sampah residu yang masuk di TPA/LUR	01 - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - TPA/LUR yang dioperasikan secara *sanitary landfill*/tingkat pengontrolan penuh	unit	- (indikator baru)	0	11 (kumulatif)		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)	ton	744,60	18	1244		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.18.02.01 PRO-P: Penyediaan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah								
02.18.02.02 PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah								
02.18.02.03 PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan TPA *Sanitary Landfill*								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.18.02.04 PRO-P: Pengelolaan Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
02.18.02.05 PRO-P: Penanganan Sampah dari Badan Air								
02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	01 - Menurunnya emisi GRK	01 - Persentase penurunan emisi GRK (kumulatif)	persen	17,02 (2023)	18,37	21,12		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
		02 - Persentase penurunan emisi GRK (tahunan)	persen	23,48 (2023)	26,67	30,11		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
02.19.01 KP: Penurunan Emisi GRK Sektor Energi	01 - Menurunnya Emisi GRK Sektor Energi	02 - Reduksi emisi GRK sektor energi	juta ton CO_2-Eq	142	164	272	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.19.01.01 PRO-P: Pengembangan Energi Rendah Karbon								
02.19.01.02 PRO-P: Peningkatan Konservasi Energi								
02.19.01.03 PRO-P: Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.19.02 KP: Penurunan Emisi GRK Sektor Berbasis Lahan	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor lahan	01 - Reduksi emisi GRK sektor hutan	juta ton CO_2-Eq	- (indikator baru)	410,80	482,67		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - Reduksi emisi GRK sektor pertanian	juta ton CO_2-Eq	- (indikator baru)	6,27	8,94		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03 – Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi		0	55	76		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.19.02.01 PRO-P: Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
02.19.02.02 PRO-P: Restorasi dan Pencegahan Degradasi Lahan Gambut								
02.19.02.03 PRO-P: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan								
02.19.02.04 PRO-P: Implementasi Pertanian Berkelanjutan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.19.03 KP: Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru	01 - Menurunnya emisi GRK sektor kelautan pesisir	01 - Reduksi emisi GRK sektor kelautan pesisir	juta ton CO_2-Eq	10,80	14,59	49,16		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.19.03.01 PRO-P: Rehabilitasi Mangrove								
02.19.03.02 PRO-P: Rehabilitasi Lamun								
02.19.04 KP: Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor industri	01 - Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	juta ton CO_2-Eq	6,75 (2022)	6,75	6,93		019 - Kementerian Perindustrian
02.19.04.01 PRO-P: Peningkatan Implementasi Standar Industri Hijau								
02.19.04.02 PRO-P: Kebijakan dan Capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor IPPU								
02.19.05 KP: Penguatan Aksi Penurunan Emisi GRK di Sektor Pengelolaan Limbah	02 - Menurunnya emisi GRK sektor pengelolaan limbah	01 - Reduksi emisi GRK sektor limbah	juta ton CO_2-Eq	8,8	14,13	31,90		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.19.05.01 PRO-P: Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Pusat								
02.19.05.02 PRO-P: Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Limbah Cair Domestik oleh Pemerintah Pusat								
02.19.06 KP: Penguatan Tata Kelola dan Faktor Pendukung Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK serta Nilai Ekonomi Karbon	01 - Meningkatkan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK	01 - Jumlah data informasi yang ter-*register* dan terverifikasi	sektor	5	5	5	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung nilai ekonomi karbon	kebijakan	2	5	5		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.19.06.01 PRO-P: Pemutakhiran Inventarisasi, Verifikasi, serta Registrasi Emisi GRK								
02.19.06.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya								
02.19.06.03 PRO-P: Pengembangan Regulasi dan Mekanisme Perdagangan Karbon (termasuk Bursa Karbon) di Tingkat Internasional, Nasional, dan Daerah								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.20 PP: Pekerjaan Hijau/*Green Jobs*	01 - Meningkatnya proporsi tenaga kerja hijau	01 - Proporsi tenaga kerja hijau	persen	2,62 (2023)	2,70–2,73	2,96–3,14		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
02.20.01 KP: Pengembangan Ekosistem Pekerjaan Hijau/*Green Jobs*	01 - Berkembangnya ekosistem pekerjaan hijau/*green jobs*	01 - Jumlah kebijakan yang spesifik mendukung pekerjaan hijau/*green jobs*	kebijakan	- (indikator baru)	1	1	02 - Transformasi Ekonomi	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
	02 - Menguatnya peran asosiasi dan DUDIKA dalam pengembangan pekerjaan hijau/*green jobs*	01 - Jumlah kerja sama yang melibatkan asosiasi dan DUDIKA dalam pengembangan pekerjaan hijau/*green jobs*	kerja sama	- (indikator baru)	1	1		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
02.20.01.01 PRO-P: Penyadartahuan tentang Pekerjaan Hijau/*Green Jobs*								
02.20.01.02 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Regulasi tentang Pekerjaan Hijau/*Green Jobs*								
02.20.01.03 PRO-P: Pembangunan Data/Informasi tentang Pekerjaan Hijau/*Green Jobs* dan Keterampilan Hijau								
02.20.01.04 PRO-P: Pengembangan Kerja Sama/Kemitraan dalam Ekosistem Pekerjaan Hijau/*Green Jobs*								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.20.01.05 PRO-P: Pemagangan dan Penyediaan Tenaga Pengajar/Guru/Instruktur Pelatihan oleh DUDIKA Hijau								
02.20.01.06 PRO-P: Fasilitasi Hubungan Industrial dan Pelindungan Pekerja Hijau								
02.20.02 KP: Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau	01 - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja hijau	01 - Jumlah tenaga kerja yang dikembangkan kompetensi hijaunya	orang	120.000 (2023)	300.000	1.100.000		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		02 - Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) pekerjaan hijau/*green jobs* yang Ditetapkan	dokumen	- (indikator baru)	1	1		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
02.20.02.01 PRO-P: Pengembangan Standar Kompetensi Hijau								
02.20.02.02 PRO-P: Penyusunan dan Penerapan Kurikulum Hijau dan Metode Pendidikan/Pelatihan Hijau								
02.20.02.03 PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan Hijau								
02.20.02.04 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Hijau bagi Tenaga Pengajar/Guru/Instruktur								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.20.02.05 PRO-P: Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan Hijau								
02.20.02.06 PRO-P: Pelaksanaan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi Hijau								
02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	01 - Meningkatnya aktivitas ekonomi hijau di sektor kehutanan	01 - Nilai pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan	triliun rupiah	122,2	134,74	146,54		143 - Kementerian Kehutanan
02.21.01 KP: Peningkatan Produktivitas Hutan	01 - Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kehutanan secara berkelanjutan	01 - Nilai PNBP fungsional kehutanan	triliun rupiah	7,16	7,72	9,99	02 - Transformasi Ekonomi	143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Nilai ekspor produk kehutanan	miliar USD	15,01	15,42	17,05		143 - Kementerian Kehutanan
02.21.01.01 PRO-P: Peningkatan Produktivitas Produk Kehutanan Kayu								
02.21.01.02 PRO-P: Diversifikasi Produk Kehutanan (Non Kayu)								
02.21.02 KP: Pengembangan Produk Bioekonomi Hutan Melalui Agroforestri	01 - Meningkatkan potensi pengembangan produk bioekonomi hutan	01 - Nilai investasi sektor kehutanan	triliun rupiah	- (indikator baru)	0,24	1,2	02 - Transformasi Ekonomi	143 - Kementerian Kehutanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.21.02.01 PRO-P: Pengembangan Percontohan Bioekonomi Berbasis Agroforestri								
02.21.02.02 PRO-P: Riset dan Teknologi untuk Mendukung Peningkatan Nilai Tambah								
02.21.02.03 PRO-P: Pengembangan Akses Pasar, Investasi dan Infrastruktur Pendukung								
02.21.03 KP: Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari	01 - Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari	01 - Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH)	unit	1.467	1.022	3.282		143 - Kementerian Kehutanan
02.21.03.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pengelola - Pemerintah								
02.21.03.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pengelola - Pelaku Bisnis								
02.21.04 KP: Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	01 - Menguatnya kepastian legalitas dan legitimasi kawasan hutan	01 - Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	desa	- (indikator baru)	528	2.640		143 - Kementerian Kehutanan
02.21.04.01 PRO-P: Penguatan Perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan								

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.21.04.02 PRO-P: Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan								
02.21.05 KP: Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan	01 - Menguatnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan	01 - Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	kelompok masyarakat	14.774	15.574	19.094		143 - Kementerian Kehutanan
	02 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan	01 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	miliar rupiah	1.400	1.900	2.900		143 - Kementerian Kehutanan
02.21.05.01 PRO-P: Pengembangan Hasil Hutan Berbasis Masyarakat untuk Ketahanan Pangan, Energi, dan Air								
02.21.05.02 PRO-P: Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan								
02.21.06 KP: Perlindungan dan Pengamanan Hutan	01 - Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan	01 - Penurunan laju deforestasi	juta ha/tahun	0,120	0,111	0,094	02 - Transformasi Ekonomi	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.06.01 PRO-P: Peningkatan Pengamanan Hutan dan Kawasan Hutan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.21.06.02 PRO-P: Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan								
02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	01 - Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi biru	01 - IBEI Pilar Ekonomi		22,19 (2023)	24,43	35,92		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
	02 - Meningkatnya perlindungan kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	01 - IBEI Pilar Lingkungan		31,27 (2023)	33,79	46,91		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
	03 - Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia sektor ekonomi biru	01 - IBEI Pilar Sosial		55,19 (2023)	57,23	68,31		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
02.22.01 KP: Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru	01 - Memperkuat tata kelola ekonomi biru	01 - Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir	persen	91,17	13,6	100	02 - Transformasi Ekonomi	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		81,00	82,00	86,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil		0,45	0,49	0,61		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		04 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada pada batas biologis yang aman	persen	≤80	≤80	≤80		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.22.01.01 PRO-P: Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
02.22.01.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Penangkapan Ikan Terukur dan Perizinan Usaha Perikanan								
02.22.01.03 PRO-P: Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan								
02.22.01.04 PRO-P: Penguatan Sistem Teknologi Informasi, Kerja Sama, dan Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan								
02.22.01.05 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Industri, Wisata Bahari, dan Jasa Kelautan Berkelanjutan								
02.22.01.06 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Kawasan Konservasi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.22.01.07 PRO-P: Pemanfaatan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil/Terluar								
02.22.02 KP: Peningkatan Pengelolaan Konservasi Perairan dan Ekosistem Pesisir	01 - Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01 - Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang efektif dikelola (kumulatif)	juta ha	16,5	18,5	21,5	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	juta ha	29,2	30	32,5		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.22.02.02 PRO-P: Pemanfaatan Data dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil								
02.22.02.03 PRO-P: Peningkatan Sarana Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil								
02.22.02.04 PRO-P: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil								
02.22.02.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.22.03 KP: Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri kelautan dan perikanan	01 - Pertumbuhan PDB perikanan (ADHK)	persen	5,49 (2023)	4,00-6,00	6,00-7,00	02 - Transformasi Ekonomi	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Volume produksi ikan	juta ton	13,95 (2023)	12,94	16,02		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03 - Volume produksi olahan perikanan	juta ton	3,62 (2023)	3,71	4,37		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		04 - PDB perikanan	triliun rupiah	554,04 (2023)	595,06	718,98		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		05 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT)	juta rupiah	220.600	604.200	631.227		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		06 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi tilapia	juta rupiah	77.361	447.260	830.124		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		07 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi udang	juta rupiah	659.210	397.550	697.500		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.22.03.02 PRO-P: Pengelolaan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap								
02.22.03.03 PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Kluster Komoditas Ikan Budi Daya Berbasis Kawasan								
02.22.03.06 PRO-P: Peningkatan Kualitas, Mutu dan Daya Saing Hasil Perikanan								
02.22.03.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan								
02.22.03.08 PRO-P: Perluasan Pasar Produk Perikanan								
02.22.03.09 PRO-P: Penguatan Logistik dan Sistem Rantai Dingin Produk Perikanan								
02.22.04 KP: Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	01 - Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut	01 - Volume produksi garam	juta ton	2,00	2,25	3,00	02 - Transformasi Ekonomi	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Produktivitas lahan garam rakyat	ton/ha	83	83	93		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03 - Utilisasi industri pengolahan garam industri	persen	50	52,50	63,79		019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Utilisasi industri pengolahan hasil laut	persen	41,93	45	65		019 - Kementerian Perindustrian
		05 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi garam	juta rupiah	2.280.864	7.379.000	13.771.897		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.22.04.01 PRO-P: Pengembangan Garam Industri Terintegrasi								
02.22.04.02 PRO-P: Penguatan Sarana dan Prasarana Industri Garam								
02.22.04.03 PRO-P: Pengembangan Produk Olahan Laut dan Bioprospeksi Sumber Daya Kelautan								
02.22.05 KP: Penguatan Industri Transportasi Laut	01 - Meningkatnya nilai tambah industri galangan kapal pendukung transportasi penyebrangan	01 - Volume reparasi kapal	ribu DWT (kumulatif)	9,5 (Jan-Nov)	11,2	12,2		019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Volume produksi pembuatan kapal	ribu DWT (kumulatif)	0,98	1,1	1,5		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Nilai ekspor industri perkapalan	ribu USD	830,89	858,02	1.315,25		019 - Kementerian Perindustrian
02.22.05.01 PRO-P: Pengembangan Industri Galangan Kapal sebagai Industri Berteknologi Tinggi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.22.05.02 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok Bahan Baku Industri Perkapalan								
02.22.05.03 PRO-P: Pengembangan Mutu dan Daya Saing Industri Perkapalan								
02.22.06 KP: Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan	01 - Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau	lokasi destinasi pariwisata bahari	0	10	10	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Jumlah wisatawan nusantara di destinasi bahari dan danau prioritas	ribu perjalanan	7.797,76 (2023)	13.686,56	16.985,12		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Jumlah wisatawan mancanegara di destinasi bahari dan danau prioritas	ribu kunjungan	8.344,92 (2023)	12.204,23	16.275,78		147 - Kementerian Pariwisata
02.22.06.01 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Bahari								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.22.06.02 PRO-P: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Pariwisata Bahari								
02.22.06.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Investasi Sektor Pariwisata Bahari								
02.22.06.04 PRO-P: Peningkatan *Branding Coral Triangle* Indonesia								
02.22.06.05 PRO-P: Penguatan Sektor Pendukung Pariwisata Bahari								
02.22.07 KP: Pengembangan Iptek, Inovasi, dan SDM Ekonomi Biru	01 - Meningkatnya hasil dan pemanfaatan riset, sumber daya manusia di sektor biru	01 - Pusat inovasi berbasis maritim	unit (kumulatif)	0	0	2	02 - Transformasi Ekonomi	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02 - Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja	persen	74,17 (2023)	75	79		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.22.07.01 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Kelautan, dan Perikanan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
02.22.07.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Maritim, Kelautan dan Perikanan								
02.22.07.03 PRO-P: Penguatan Riset di Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan								
02.22.07.04 PRO-P: Penguatan Cadangan Energi Berbasis Laut dan Perairan								

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

PRIORITAS NASIONAL 3: MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03 PN: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	01 - Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	01 - Stok infrastruktur terhadap PDB	persen	43,00 (2019)	46,50	48,50		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
	02 - Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB	01 - Total aset sektor keuangan/PDB	persen	170,5 (2023)	188,5	213,6		Otoritas Jasa Keuangan
	03 - Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	01 - Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	persen	23,96	35,00	46,00		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	04 - Meningkatnya nilai tambah pariwisata	01 - Rasio PDB pariwisata	persen	3,60 (2022)	4,50–4,60	4,90–5,00		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Devisa pariwisata	miliar USD	14,00 (2023)	19,00–22,10	32,00–39,40		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	05 - Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	01 - Proporsi PDB ekonomi kreatif	persen	6,77 (2023)	7,3–7,9	8,0–8,4		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
03.01 PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	01 - Meningkatnya konektivitas dan layanan multimoda melalui integrasi transportasi darat, laut dan udara	01 - Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional	jam per 100 km	1,90 (2023)	1,90	1,70		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	persen	98,20 (2023)	98	98		107 - Badan SAR Nasional
		03 - Jumlah perjalanan kereta api	juta perjalanan	0,86	0,92	1,03		022 - Kementerian Perhubungan
		04 - *On time performance* penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85		022 - Kementerian Perhubungan
		05 - Peningkatan volume angkutan laut (kumulatif angka dasar tahun 2022)	persen (kumulatif)	5,6 (2023)	10	24		022 - Kementerian Perhubungan
		06 - Jumlah penumpang angkutan kereta api	juta penumpang	501	519	601		022 - Kementerian Perhubungan
		07 - Volume angkutan penyeberangan	juta kendaraan	11,5 (2023)	11,6	12,2		022 - Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		08 - Jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 kota metropolitan	juta penumpang	685 (2023)	850	950		022 - Kementerian Perhubungan
		09 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan	persen	53,68 (2023)	65	73		022 - Kementerian Perhubungan
		10 - Peningkatan pemenuhan SDM transportasi yang kompeten	persen	85,5 (2023)	85,5	87,5		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.01 KP: Pengembangan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan	01 - Meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan mendukung pertumbuhan dan pemerataan	01 - Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan	km per 100 km^2	2,70	2,60	2,84		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Panjang jalan tol yang beroperasi (kumulatif angka dasar tahun 2020)	km (kumulatif)	751 (2023)	994	5,134		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota	persen	92/70/53/81	94/71/56/82	98/76/66/85		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
03.01.01.01 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan/Jembatan Lintas Utama Pulau								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.01.01.02 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan/Jembatan Non Lintas Utama								
03.01.01.03 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan mendukung Kawasan Strategis Nasional								
03.01.01.04 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan mendukung Simpul Transportasi dan/atau Terintegrasi dengan *Hinterland*								
03.01.01.05 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan mendukung Wilayah Tertinggal dan Perbatasan								
03.01.01.06 PRO-P: Peningkatan Konektivitas Jalan Berkeselamatan								
03.01.01.09 PRO-P: Penanganan Jalan Daerah								
03.01.01.10 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Jalan								
03.01.02 KP: Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang	01 - Terwujudnya KA penumpang antar kota dan penguatan KA angkutan barang yang andal	01 - Panjang jalur KA yang beroperasi	km (kumulatif)	6.880 (2023)	6.928	6.985		022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik	persen	63 (2023)	65	70		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2	persen	93,85 (2023)	94	98		022 - Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.01.02.01 PRO-P: Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota								
03.01.02.02 PRO-P: Peningkatan, Perawatan, dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api mendukung Keandalan dan Keselamatan								
03.01.02.03 PRO-P: Penyediaan Layanan Nonkomersil Kereta Api								
03.01.02.04 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Kereta Api								
03.01.03 KP: Pengembangan Jaringan Pelabuhan Terpadu	01 - Terwujudnya jaringan pelabuhan yang terpadu	01 - Pelabuhan yang ditingkatkan kapasitasnya (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	72	86	142		022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Penumpang angkutan laut nonkomersil	ribu penumpang	1.444 (2023)	1.637	2.022		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Muatan barang angkutan laut nonkomersil	ton	660.664 (2023)	720.124	839.043		022 - Kementerian Perhubungan
		04 - Tingkat keandalan kenavigasian	persen	92,33 (2023)	94,84	95,57		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.03.01 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut								

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.01.03.02 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut mendukung Kawasan Prioritas								
03.01.03.03 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut mendukung Kawasan Tertinggal dan Perbatasan								
03.01.03.05 PRO-P: Penyediaan Layanan Angkutan Laut Penumpang dan Barang Nonkomersil								
03.01.03.06 PRO-P: Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Laut								
03.01.03.08 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Laut								
03.01.04 KP: Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu	01 - Terwujudnya jaringan bandara yang terpadu untuk mendukung konektivitas wilayah	01 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	100 (2023)	116	121		022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	81		022 - Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.01.04.01 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara								
03.01.04.02 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara mendukung Kawasan Prioritas								
03.01.04.03 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara mendukung Kawasan Tertinggal dan Perbatasan								
03.01.04.04 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang								
03.01.04.05 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Kargo Udara								
03.01.04.06 PRO-P: Keselamatan dan Keamanan Penerbangan								
03.01.04.07 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Udara								
03.01.05 KP: Penguatan Konektivitas Darat dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	01 - Terwujudnya konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas	01 - Pelabuhan penyeberangan yang beroperasi	lokasi (kumulatif)	230 (2023)	235	242		022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Terminal penumpang yang beroperasi	lokasi (kumulatif)	113 (2023)	115	119		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Lokasi rawan kecelakaan yang ditangani	lokasi	179 (2023)	534	574		022 - Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.01.05.01 PRO-P: Pengembangan/Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan								
03.01.05.02 PRO-P: Pembangunan Sarana Angkutan Penyeberangan								
03.01.05.03 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Angkutan Jalan, Multimoda, dan Angkutan Penyeberangan Nonkomersil ke Daerah 3TP								
03.01.05.04 PRO-P: Peningkatan Keselamatan Angkutan Darat								
03.01.05.05 PRO-P: Pengembangan/Pembangunan Simpul Konektivitas Darat								
03.01.05.06 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Darat								
03.01.06 KP: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan	01 - Terwujudnya sistem angkutan umum massal perkotaan yang efisien	01 - Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	kota (kumulatif)	6 (2023)	10	20		022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan	juta penumpang per hari	1,4 (2023)	1,42	1,56		022 - Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel	juta penumpang per hari	2,989 (2023)	2,825	2,836		022 - Kementerian Perhubungan
		04 - Infrastruktur jalan perkotaan yang dibangun (kumulatif angka dasar tahun 2020)	km (kumulatif)	34,50 (2023)	54,5	155		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
03.01.06.01 PRO-P: Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan								
03.01.06.02 PRO-P: Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel								
03.01.06.03 PRO-P: Pengembangan Tata Kelola Angkutan Umum Massal Perkotaan								
03.01.06.04 PRO-P: Jalan Perkotaan								
03.01.07 KP: Pengembangan SDM untuk Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi	01 - Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM transportasi yang berdaya saing	01 - Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi	persen	92 (2023)	92	94		022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Tingkat penyerapan lulusan pembentukan SDM transportasi	persen	85,1 (2023)	70	70		022 - Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.01.07.01 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Vokasi SDM Transportasi								
03.01.07.02 PRO-P: Pemenuhan Infrastruktur Penunjang SDM Transportasi								
03.01.07.03 PRO-P: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi								
03.01.07.04 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Pengembangan SDM Transportasi								
03.01.08 KP: Peningkatan Layanan Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Transportasi	01 - Meningkatnya layanan pencarian dan pertolongan pada kecelakaan transportasi	01 - Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	persen	42,10 (2023)	44,59	60,94		107 - Badan SAR Nasional
		02 - Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih (kumulatif angka dasar tahun 2020)	orang	5.155 (2023)	12.558	24.808		107 - Badan SAR Nasional
03.01.08.01 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan (SAR)								
03.01.08.02 PRO-P: Peningkatan SDM Pencarian dan Pertolongan (SAR)								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.01.08.03 PRO-P: Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR)								
03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik	01 - Meningkatnya pembangunan TIK di tingkat nasional	01 - Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) nasional		5,90 (2023)	6,10	6,30		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
	02 - Meningkatnya transformasi digital	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)		49,20 (2022)	50,80	52,53		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
	03 - Meningkatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berkualitas	01 - Konsumsi listrik per kapita	kWh	1.337 (2023)	1.464	1.720		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
03.02.01 KP: Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran	01 - Meningkatnya cakupan dan kualitas di bidang telekomunikasi, pos dan penyiaran	01 - Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan	persen	70,53 (2023)	78	90	02 - Transformasi Ekonomi	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - *Integrated Index for Postal Development* (2IPD)		50 (2022)	60	78		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03 - Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) per populasi	persen	73,44 (2023)	74	78		117 - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi	persen	70 (2023)	73	85		116 - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
		05 - Jangkauan jaringan pita lebar bergerak *(mobile broadband)* per populasi	persen	97,16 (2023)	97,30	98		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		06 - Pelanggan terlayani jaringan pita lebar tetap *(fixed broadband)* terhadap total rumah tangga	persen	20,82 (2023)	30	50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		07 - Pengguna internet	persen	79,50	81,10	87,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		08 – Pertumbuhan pengakses *streaming* siaran radio digital	persen	31 (2023)	35	120		116 - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
	02 - Meningkatnya kualitas internet pita lebar *(broadband)* nasional	01 - Kecepatan internet jaringan pita lebar tetap *(fixed broadband)*	Mbps	32,10	37	100		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Kecepatan internet jaringan pita lebar bergerak *(mobile broadband)*	Mbps	38,91 (2023)	50	100		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita	persen	8,41 (2021)	4,50	2,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
03.02.01.001 PRO-P: Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat								
03.02.01.002 PRO-P: Pemerataan dan Pemenuhan Layanan Pos dan Logistik Digital								
03.02.01.003 PRO-P: Perluasan Layanan Penyiaran Digital dan *Multiplatform*								
03.02.01.004 PRO-P: Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital								
03.02.01.005 PRO-P: Pengelolaan dan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi dan Satelit								
03.02.02 KP: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	01 - Meningkatnya ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan masyarakat digital	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat		51,75 (2022)	52,08	52,24	02 - Transformasi Ekonomi	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah		51,13 (2022)	54,05	57,65		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03 - Kapasitas pusat data per kapita	watt per kapita	0,74	1,47	6,87		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Indeks Ruang Digital Kondusif		- (indikator baru)	3	3,8		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
03.02.02.001 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Pendukung Layanan Publik Digital								
03.02.02.002 PRO-P: Peningkatan Layanan Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital								
03.02.02.003 PRO-P: Pengembangan Regulasi, Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan								
03.02.02.004 PRO-P: Riset dan Pengembangan Ekosistem Digital								
03.02.02.005 PRO-P: Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi *Superplatform*								
03.02.02.006 PRO-P: Pengembangan dan Pemanfaatan *Emerging Technology*								
03.02.03 KP: Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Beban Dasar dan Variabel	01 - Terbangunnya infrastruktur pembangkit listrik yang andal	01 - Kapasitas pembangkit listrik (kumulatif angka dasar tahun 2023)	GW (kumulatif)	91 (2023)	93,9	100	02 - Transformasi Ekonomi	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Penurunan emisi pembangkitan listrik	juta ton CO_2	15,32 (2023)	16,41	21,11		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Produksi tenaga listrik	GWh	323.320 (2023)	363.044	451.364		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
03.02.03.01 PRO-P: Pembangunan Pembangkit Listrik Beban Dasar dan Variabel serta Sistem Penyimpanan Energi								
03.02.03.02 PRO-P: Pengubahan Bahan Bakar Pembangkit Listrik yang Rendah Karbon								
03.02.04 KP: Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	01 - Meningkatnya kapasitas infrastruktur jaringan tenaga listrik	01 - Panjang jaringan transmisi tenaga listrik	kms	2.806 (2023)	2.152	15.206	02 - Transformasi Ekonomi	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Kapasitas gardu induk	MVA	5.360 (2023)	1.510	25.320		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03 - Panjang jaringan distribusi tenaga listrik	kms	22.898 (2023)	11.714	10.761		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		04 - Kapasitas gardu distribusi	MVA	1.277 (2023)	1.949	1.873		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		05 - Rasio elektrifikasi nasional	persen	99,79 (2023)	~100	~100		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		06 - SAIDI / SAIFI nasional	(jam/ pelanggan/ tahun)/(kali /pelanggan/ tahun)	5,64 / 4,27 (2023)	5,38 / 4,07	4,96 / 3,76		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		07 - Susut jaringan	persen	8,73	8,72	8,43		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
03.02.04.01 PRO-P: Pembangunan Jaringan Transmisi dan Interkoneksi Dalam dan Antar Pulau *(Super Grid)*								
03.02.04.02 PRO-P: Pembangunan Jaringan Distribusi dan Terisolasi serta Listrik Pedesaan								
03.02.04.03 PRO-P: Digitalisasi Infrastruktur Ketenagalistrikan								
03.02.05 KP: Perluasan Jangkauan Infrastruktur Tenaga Listrik	01 - Meningkatnya jangkauan infrastruktur tenaga listrik	01 - SPKLU dan *private charging station* terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)	unit	932 (2023)	2.060	7.557	02 - Transformasi Ekonomi	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - SPBKLU terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)	unit	1.772 (2023)	2.070	3.031		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Koneksi tenaga listrik tambahan yang berkualitas	unit	131.600 (2023)	100.000	100.000		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
03.02.05.01 PRO-P: Pengembangan Koneksi Tenaga Listrik								
03.02.05.02 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur SPKLU dan SPBKLU								
03.03 PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	01 - Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja formal	01 - Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB	persen	1,07 (2021)	1,10	1,20		149 - Kementerian Koperasi
		02 - Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah	persen	3,06	3,10	3,30		150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		03 - Rasio kewirausahaan	persen	3,08	3,10	3,60		150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
03.03.01 KP: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	01 - Meningkatnya kontribusi koperasi sektor produksi terhadap total kontribusi koperasi	01 - Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi terhadap total volume usaha koperasi	persen	8,31 (2022)	8,58	10,00	02 - Transformasi Ekonomi	149 - Kementerian Koperasi
03.03.01.01 PRO-P: Pengembangan Usaha Koperasi								

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.03.01.02 PRO-P: Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan Koperasi								
03.03.01.03 PRO-P: Penguatan Kapasitas SDM dan Reputasi Koperasi								
03.03.01.04 PRO-P: Penguatan Sistem Pengawasan Koperasi								
03.03.02 KP: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	01 - Meningkatnya kapasitas usaha dan akses UMKM pada sumber daya produktif	01 - Proporsi UMKM yang memiliki izin usaha	persen	18,64	19,5	24,0	02 - Transformasi Ekonomi	150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		02 - Proporsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan	persen	20,32 (2023)	21,6	25,0		150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
03.03.02.01 PRO-P: Pemanfaatan Teknologi, Riset, dan Inovasi								
03.03.02.02 PRO-P: Perluasan Akses dan Inovasi Pembiayaan								
03.03.02.03 PRO-P: Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar								
03.03.02.04 PRO-P: Formalisasi Usaha serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.03.02.05 PRO-P: Penyusunan Konsep dan Kebijakan UMKM Berkelanjutan								
03.03.03 KP: Pengembangan Kewirausahaan	01 - Meningkatnya jumlah orang berusaha dibantu buruh tetap	01 - Rasio pelaku usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	persen	18,99	19,4	23,0	02 - Transformasi Ekonomi	150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
03.03.03.01 PRO-P: Integrasi dan Pemanfaatan Basis Data Tunggal UMKM dan Koperasi								
03.03.03.02 PRO-P: Integrasi Layanan Usaha								
03.03.03.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja UMKM								
03.03.03.04 PRO-P: Inkubasi dan Pendampingan Wirausaha Inklusif dan Berkelanjutan								
03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	01 - Peningkatan pendalaman sektor keuangan	01 - Aset perbankan/PDB	persen	57,2 (2023)	66,9	77,2		Otoritas Jasa Keuangan
		02 - Aset dana pensiun/PDB	persen	7,3 (2023)	8,0	11,2		Otoritas Jasa keuangan
		03 - Aset asuransi/PDB	persen	9,0 (2023)	9,1	10,5		Otoritas Jasa keuangan
		04 - Kapitalisasi pasar modal/PDB	persen	55,9 (2023)	57,8	68,0		Otoritas Jasa keuangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Total kredit/PDB	persen	33,9 (2023)	37,8	46,8		Otoritas Jasa keuangan
		06 - Inklusi keuangan	persen	88,7 (2023)	91,0	93,0		Otoritas Jasa keuangan
03.04.01 KP: Penguatan Peran Perbankan	01 - Meningkatnya peran perbankan	01 – Total DPK/PDB	persen	40,5 (2023)	43,0	50,9		Otoritas Jasa Keuangan
		02 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit	persen	20,55 (2023)	21,58	25,00		Otoritas Jasa Keuangan
03.04.01.001 PRO-P: Keberagaman Produk Perbankan								
03.04.01.002 PRO-P: Kredit Sektor Produktif								
03.04.01.003 PRO-P: Kredit Penyediaan Perumahan								
03.04.01.004 PRO-P: Kredit Sektor Berkelanjutan								
03.04.02 KP: Penguatan Peran Sektor Keuangan Nonbank	01 - Memperkuat peran sektor keuangan nonbank	01 - Densitas dana pensiun	juta rupiah	0,98 (2023)	1,05	1,51		Otoritas Jasa Keuangan
		02 - Penetrasi asuransi	persen	2,8 (2023)	2,9	3,4		Otoritas Jasa Keuangan
		03 – Nilai transaksi saham/PDB	persen	16,0 (2023)	19,8	23,9		Otoritas Jasa Keuangan
03.04.02.001 PRO-P: Penetrasi dan Densitas Dana Pensiun								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.04.02.002 PRO-P: Penetrasi dan Densitas Asuransi								
03.04.02.003 PRO-P: Pendalaman Pasar Modal								
03.04.03 KP: Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	01 - Meningkatnya inklusi dan literasi keuangan	01 - Indeks Literasi Keuangan	persen	51,20 (2023)	57,25	69,35		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
03.04.03.001 PRO-P: Literasi dan Edukasi Keuangan								
03.04.03.002 PRO-P: Perlindungan Konsumen								
03.04.03.003 PRO-P: Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah								
03.04.03.004 PRO-P: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat								
03.04.03.005 PRO-P: Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi								
03.04.03.006 PRO-P: Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.04.03.007 PRO-P: Ekosistem Pendukung Sektor Keuangan								
03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	01 - meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	01 - Pengeluaran wisatawan mancanegara	USD per kunjungan	1.239 (2023)	1.300–1.381,3	1.600–1.672		147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Tenaga kerja pariwisata	juta orang	22,89 (2022)	25,75	29,00		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Indeks Pembangunan Pariwisata *(Travel & Tourism Development Index,* *terbit biennial tahun genap)	peringkat (xx besar)	22	22*	20*		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Kunjungan wisatawan mancanegara	juta kunjungan	11,57 (2023)	14,6–16,0	20,0–23,5		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Perjalanan wisatawan nusantara	juta perjalanan	852,80 (2023)	1.084	1.500		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.01 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	juta rupiah	19.976.019,1 (2023)	22.023.561,06	26.769.776,11	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	miliar rupiah	10.878,30 (2018)	23.672,34	30.776,00		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Devisa pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	juta USD	334 (2018)	718,37	931,00		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Jawa Tengah)	orang	2.925.715 (2022)	3.280.514	3.821.392		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	juta rupiah	955.099,60 (2023)	1.191.228,32	1.853.052,41		147 - Kementerian Pariwisata
		07 - Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (DIY)	orang	439.029 (2022)	454.432	475.814		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.01.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan								
03.05.01.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi Berbasis Pelestarian Kearifan Budaya Jawa dan Ziarah, termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi, di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan								
03.05.01.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan								
03.05.01.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan								

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.01.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan								
03.05.01.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan								
03.05.01.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Borobudur-Yogyakarta-Prambanan								
03.05.02 KP: Penguatan Destinasi Regeneratif Bali	01 - Meningkatnya kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata Bali	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Bali	juta rupiah	54.683.173,97 (2023)	60.288.199,30	73.280.683,05	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Bali	miliar rupiah	101.325,81 (2023)	123.500,99	183.472,56		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Bali	juta USD	9.364,00 (2019)	12.665,99	15.540,00		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Bali	orang	622.432 (2022)	644.270	674.584		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Bali	juta rupiah	7.547.919,45 (2023)	9.413.987,20	14.644.221,75		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.02.001 PRO-P: Penataan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata Sarbagita								
03.05.02.002 PRO-P: Pengembangan Transportasi Umum Ramah Lingkungan Bali								
03.05.02.003 PRO-P: Pengembangan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas Bali Utara								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.02.004 PRO-P: Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial Bali								
03.05.02.005 PRO-P: Pengembangan SDM dan Kebudayaan Bali								
03.05.02.006 PRO-P: Promosi dan *Branding* Bali sebagai Destinasi Terbaik di Dunia								
03.05.03 KP: Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau	01 - Meningkatnya kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata Kepulauan Riau	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Kepulauan Riau	juta rupiah	6.301.872,6 (2023)	6.947.814,54	8.445.112,00	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Kepulauan Riau	miliar rupiah	5.413,10 (2019)	5.819,81	11.642,70		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Kepulauan Riau	juta USD	2.001,1 (2019)	2.870,43	4.770,20		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Kepulauan Riau	orang	236.159 (2022)	294.642	395.744		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau	juta rupiah	2.355.111,35 (2023)	2.937.364,16	4.569.308,55		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.03.001 PRO-P: Peningkatan Konektivitas Batam-Bintan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.03.002 PRO-P: Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim dan Wisata Kesehatan								
03.05.03.003 PRO-P: Penguatan Identitas KTA Batam, Bintan, dan Natuna								
03.05.03.004 PRO-P: Akselerasi Ekonomi Biru di Natuna								
03.05.03.005 PRO-P: Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial Kepulauan Riau								
03.05.03.006 PRO-P: Pengembangan SDM Pariwisata dan Kebudayaan Melayu Kepulauan Riau								
03.05.03.007 PRO-P: Pengembangan Sistem Transportasi Ramah Lingkungan								
03.05.04 KP: Penguatan Destinasi Regeneratif *Greater* Jakarta	01 - Meningkatnya kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata Jakarta	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum *greater* Jakarta	juta rupiah	191.980.855,2 (2023)	211.658.892,86	257.272.707,14	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara *greater* Jakarta	miliar rupiah	367.760,29 (2023)	421.993,70	555.633,24		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Jakarta	juta USD	2.291,8 (2019)	3.439,37	4.708,60		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Tenaga kerja pariwisata *greater* Jakarta (DKI)	orang	1.479.227 (2022)	1.537.529	1.618.855		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Tenaga kerja pariwisata *greater* Jakarta (Jawa Barat)	orang	4.978.804 (2022)	5.591.063	6.526.097		147 - Kementerian Pariwisata
		06 - Tenaga kerja pariwisata *greater* Jakarta (Banten)	orang	1.230.545 (2022)	1.523.452	2.025.213		147 - Kementerian Pariwisata
		07 - Investasi sektor pariwisata *greater* Jakarta	juta rupiah	12.650.725,3 (2023)	14.130.860,16	21.997.903,42		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.04.001 PRO-P: Transformasi Jakarta sebagai Kota Global								
03.05.04.002 PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan								
03.05.04.003 PRO-P: Pengurangan Emisi dan Pengelolaan Lingkungan								
03.05.04.004 PRO-P: Penguatan Destinasi Wisata Urban dan MICE								
03.05.04.005 PRO-P: Pengarusutamaan Pariwisata Berkelanjutan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.04.006 PRO-P: Pengembangan SDM Pariwisata Berstandar Internasional								
03.05.05 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Lombok-Gili Tramena	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Lombok-Gili Tramena	juta rupiah	2.206.361,02 (2023)	2.432.513,02	2.956.734,78	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Lombok-Gili Tramena	miliar rupiah	5.666,50 (2018)	14.850,43	28.971,58		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Lombok-Gili Tramena	juta USD	290 (2018)	800,60	1.659,00		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Lombok-Gili Tramena	orang	428.952 (2022)	544.460	748.244		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramena	juta rupiah	4.488.604,30 (2023)	5.598.319,34	8.708.640,46		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.05.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Lombok-Gili Tramena								
03.05.05.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Lombok-Gili Tramena								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.05.003 PRO-P: Pembangunan Sarana Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Lombok-Gili Tramena								
03.05.05.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Lombok-Gili Tramena								
03.05.05.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Lombok-Gili Tramena								
03.05.05.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Lombok-Gili Tramena								
03.05.05.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Lombok-Gili Tramena								
03.05.05.008 PRO-P: Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus								
03.05.06 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Manado-Likupang	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Manado-Likupang	juta rupiah	2.573.717,65 (2023)	2.837.523,71	3.449.027,80	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Manado-Likupang	miliar rupiah	6.491,89 (2019)	8.982,47	17.232,90		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Manado-Likupang	juta USD	139(2019)	267,09	427,00		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Tenaga kerja pariwisata Manado-Likupang	orang	208.674 (2022)	219.919	235.860		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Manado-Likupang	juta rupiah	774.326,55 (2023)	965.762,85	1.502.322,56		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.06.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Manado-Likupang								
03.05.06.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Manado-Likupang								
03.05.06.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Manado-Likupang								
03.05.06.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Manado-Likupang								
03.05.06.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Manado-Likupang								
03.05.06.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Manado-Likupang								
03.05.06.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Manado-Likupang								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.06.008 PRO-P: Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus								
03.05.07 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Bangka-Belitung	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Bangka Belitung	juta rupiah	3.281.893,64 (2023)	3.614.153,73	4.398.051,36	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Bangka Belitung	miliar rupiah	2.455,23 (2019)	13.161,89	21.763,57		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Bangka Belitung	juta USD	23,90 (2019)	41,54	78,30		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Bangka Belitung	orang	98.106 (2022)	109.216	126.011		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Bangka Belitung	juta rupiah	527.458,60 (2023)	657.861,88	1.023.357,60		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.07.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Bangka-Belitung								
03.05.07.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Bangka-Belitung								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.07.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Bangka-Belitung								
03.05.07.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Bangka-Belitung								
03.05.07.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Bangka-Belitung								
03.05.07.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Bangka-Belitung								
03.05.07.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Bangka-Belitung								
03.05.07.008 PRO-P: Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus								
03.05.08 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Danau Toba	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Danau Toba	juta rupiah	2.193.003,64 (2022)	2.417.786,51	2.938.834,62	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Danau Toba	miliar rupiah	1.021 (2018)	2.048,41	2.619,69		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Danau Toba	juta USD	73,1 (2018)	163,91	263,80		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Tenaga kerja pariwisata Danau Toba	orang	1.118.911 (2022)	1.199.556	1.316.197		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Danau Toba	juta rupiah	411.336,50 (2023)	513.030,98	798.061,37		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.08.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Danau Toba								
03.05.08.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Danau Toba								
03.05.08.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Danau Toba								
03.05.08.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Danau Toba								
03.05.08.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Danau Toba								
03.05.08.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Danau Toba								
03.05.08.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Danau Toba								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.09 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Raja Ampat	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Raja Ampat	juta rupiah	14.636,37 (2022)	18.196,50	22.117,96	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Raja Ampat	miliar rupiah	195,67 (2022)	290,40	501,08		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata dari Raja Ampat	juta USD	5 (2019)	42,44	70,30		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Raja Ampat	orang	7.542 (2022)	9.054	11.552		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Raja Ampat	juta rupiah	12.575,05 (2023)	15.683,97	24.397,69		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.09.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Raja Ampat								
03.05.09.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Raja Ampat								
03.05.09.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Raja Ampat								
03.05.09.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Raja Ampat								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.09.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Raja Ampat								
03.05.09.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Raja Ampat								
03.05.09.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Raja Ampat								
03.05.10 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Labuan Bajo	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Labuan Bajo	juta rupiah	38.850 (2023)	42.889,25	52.062,72	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Labuan Bajo	miliar rupiah	974,49	1.175,23	2.488,59		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Labuan Bajo	juta USD	161 (2019)	283,52	637,04		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Labuan Bajo	orang	251.887 (2023)	304.910	393.362		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Labuan Bajo	juta rupiah	532.233,85 (2023)	663.817,72	1.032.622,38		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.10.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Labuan Bajo								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.10.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Labuan Bajo								
03.05.10.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Labuan Bajo								
03.05.10.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Labuan Bajo								
03.05.10.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Labuan Bajo								
03.05.10.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Labuan Bajo								
03.05.10.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Labuan Bajo								
03.05.11 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Bromo-Tengger-Semeru	juta rupiah	17.501.425,28 (2023)	19.273.275,88	23.453.583,72	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara di Bromo-Tengger-Semeru	miliar rupiah	838,7	1.112,12	3.437,90		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	juta USD	4,0 (2019)	7,21	22,21		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Tenaga kerja pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	orang	3.493.968 (2022)	3.954.841	4.665.259		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	juta rupiah	778.773,45 (2023)	971.309,16	1.510.950,29		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.11.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru								
03.05.11.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Bromo-Tengger-Semeru								
03.05.11.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru								
03.05.11.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru								
03.05.11.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru								
03.05.11.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru								
03.05.11.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Bromo-Tengger-Semeru								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.11.008 PRO-P: Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus								
03.05.12 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Wakatobi	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Wakatobi	juta rupiah	35.525,73 (2023)	39.122,37	47.607,88	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Wakatobi	miliar rupiah	108	132,95	305,40		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Wakatobi	juta USD	7,44	9,38	23,76		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Wakatobi	orang	209.447 (2022)	243.687	298.200		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Wakatobi	juta rupiah	31.376,65 (2023)	45.520,70	80.832,32		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.12.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Wakatobi								
03.05.12.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Wakatobi								
03.05.12.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Wakatobi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.12.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Wakatobi								
03.05.12.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Wakatobi								
03.05.12.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Wakatobi								
03.05.12.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Wakatobi								
03.05.13 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Morotai	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Morotai	juta rupiah	2.584,92 (2023)	2.849,87	3.464,04	02 - Transformasi Ekonomi	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Morotai	miliar rupiah	103,92 (2022)	159,98	242,5		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Morotai	juta USD	0,69	0,78	1,56		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Morotai	orang	73.603 (2022)	82.835	96.971		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Morotai	juta rupiah	1.151,65 (2023)	49.626,20	77.197,58		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.05.13.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Morotai								
03.05.13.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Morotai								
03.05.13.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Morotai								
03.05.13.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Morotai								
03.05.13.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Morotai								
03.05.13.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Morotai								
03.05.13.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Morotai								
03.05.13.008 PRO-P: Fasilitasi Kawasan Ekonomi Kreatif								
03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	01 - Meningkatnya kinerja sektor ekonomi kreatif	01 - Laju pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	persen	5,30 (2022)	5,3–5,5	6,1		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif	persen	-11,07 (2023)	4,9–5,2	6,0		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	juta orang	24,92 (2023)	25,55	27,66		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		04 - Pertumbuhan investasi ekonomi kreatif	persen	31,94 (2023)	5,3–7,3	7,0–8,0		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.01 KP: Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif	01 - Meningkatnya investasi ekonomi kreatif	01 - Nilai investasi ekonomi kreatif	triliun rupiah	89,33 (2023)	123,85–136,28	152,3–183,71		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.01.01 PRO-P: Penguatan Data Ekonomi Kreatif								
03.06.01.02 PRO-P: Penguatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif								
03.06.01.03 PRO-P: Fasilitasi Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif								
03.06.01.04 PRO-P: Penguatan Komersialisasi Kekayaan Intelektual								
03.06.01.05 PRO-P: Pelindungan Hasil Kreativitas								
03.06.01.06 PRO-P: Penguatan Jejaring dan Integrasi Rantai Pasok Ekonomi Kreatif								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.06.02 KP: Penguatan Ekosistem Film, Animasi, Video, dan Musik	01 - Meningkatnya kinerja subsektor film, animasi, video, dan musik	01 - Pertumbuhan PDB subsektor film, animasi, video, dan musik	persen	2,72 (2022)	6,8–7,5	9,5–12,8		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor subsektor film, animasi, video, dan musik	persen	-8,00 (2020)	6,7–11,9	9,5–13,0		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		03 - Jumlah tenaga kerja subsektor film, animasi, video, dan musik	ribu orang	188 (2022)	203	225		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.02.01 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik								
03.06.02.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik								
03.06.02.03 PRO-P: Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik								
03.06.02.04 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik								
03.06.02.05 PRO-P: Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik								
03.06.02.06 PRO-P: Pengembangan Insentif Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.06.03 KP: Penguatan Ekosistem Fesyen dan Kriya	01 - Meningkatnya kinerja subsektor fesyen dan kriya	01 - Pertumbuhan PDB subsektor fesyen dan kriya	persen	7,76 (2022)	5,3–8,0	7,2–8,3		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor subsektor fesyen dan kriya	persen	-12,01 (2023)	3,5	6,4		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		03 - Jumlah tenaga kerja subsektor fesyen dan kriya	ribu orang	9.107 (2022)	9.836	10.900		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.03.01 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Fesyen dan Kriya								
03.06.03.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Subsektor Fesyen dan Kriya								
03.06.03.03 PRO-P: Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Fesyen dan Kriya								
03.06.03.04 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Subsektor Fesyen dan Kriya								
03.06.03.05 PRO-P: Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Fesyen dan Kriya								
03.06.03.06 PRO-P: Pengembangan Insentif Subsektor Fesyen dan Kriya								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	01 - Meningkatnya kinerja subsektor aplikasi dan gim	01 - Pertumbuhan PDB subsektor aplikasi dan gim	persen	2,58 (2022)	6,7–7,0	8,3–10,7		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor subsektor aplikasi dan gim	persen	152,41 (2021)	6,0–10,0	8,0–14,9		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		03 - Jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim	ribu orang	152 (2022)	187	245		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.04.01 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Aplikasi dan Gim								
03.06.04.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Subsektor Aplikasi dan Gim								
03.06.04.03 PRO-P: Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Aplikasi dan Gim								
03.06.04.04 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Subsektor Aplikasi dan Gim								
03.06.04.05 PRO-P: Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Aplikasi dan Gim								
03.06.04.06 PRO-P: Pengembangan Insentif Subsektor Aplikasi dan Gim								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
03.06.05 KP: Penguatan Ekosistem Kuliner	01 - Meningkatnya kinerja subsektor kuliner	01 - Pertumbuhan PDB subsektor kuliner	persen	8,61 (2022)	5,3–8,8	7,2–9,1		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor subsektor kuliner	persen	-2,47 (2023)	5,2–5,4	8,0		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		03 - Jumlah tenaga kerja subsektor kuliner	ribu orang	13.435 (2022)	14.048	14.910		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.05.01 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Kuliner								
03.06.05.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Subsektor Kuliner								
03.06.05.03 PRO-P: Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Kuliner								
03.06.05.04 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Subsektor Kuliner								
03.06.05.05 PRO-P: Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Kuliner								
03.06.05.06 PRO-P: Pengembangan Insentif Subsektor Kuliner								

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

PRIORITAS NASIONAL 4: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z), DAN PENYANDANG DISABILITAS

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04 PN: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01 - Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	01 - Rata-rata nilai PISA: (a) membaca; (b) matematika; (c) sains		(a) 359; (b) 366; (c) 383 (2022)	(a) 396; (b) 404; (c) 416	(a) 409; (b) 416; (c) 426		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	9,22	9,33	9,82		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		03 - Harapan lama sekolah	tahun	13,21	13,32	13,58		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04 - Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	persen	66,30 (2023)	66,78	67,66		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	persen	10,15 (2023)	11,11	12,68		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		06 - Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional: (a) literasi membaca; (b) numerasi		(a) 60,89; (b) 51,36 (2023)	(a) 62,89; (b) 54,36	(a) 66,89; (b) 59,86		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	02 - Terwujudnya kesehatan untuk semua	01 - Usia harapan hidup (UHH)	tahun	72,13 (2023)	74,43	75,4		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Angka kelahiran total (*Total fertility rate*)	rata-rata kelahiran per wanita usia subur (WUS) 15-49 Tahun	2,14 (2023)	2,12	2,10		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	03 - Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	01 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,447 (2023)	0,430	0,394		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		69,51 (2023)	72,89	75,55		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Indeks Pembangunan Pemuda		60,59 (2023)	65,16	73,27		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		05 - Indeks Pembangunan Gender		91,85 (2023)	92,02–92,11	92,34–92,54		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		06 - Indeks Perlindungan Anak		68,29 (2023)	70,19	75,29		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		07 - Mobilitas penduduk lanjut usia	persen	92,94 (2023)	94	96		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		08 - Mobilitas penduduk penyandang disabilitas	persen	68,42 (2023)	69	71		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

SK No 122191 C

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	04 - Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja	01 - Tingkat pengangguran terbuka	persen	4,91	4,50–5,00	4,00–4,71		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Peringkat indeks inovasi global	peringkat	54	53	49		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	05 - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat	01 - Jumlah perolehan medali emas pada *olympic games*	medali	2	4–6 (2028)			036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Jumlah perolehan medali emas pada *paralympic games*	medali	1	4–6 (2028)			036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		03 - Peringkat pada *Asian Games*	peringkat	13 (2023)	9–11 (2026)			036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04 - Peringkat pada *Asian Para Games*	peringkat	6 (2023)	5–7 (2026)			036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Peringkat pada SEA *Games*	peringkat	3 (2023)	3	2–4		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		06 - Peringkat pada ASEAN *Para Games*	peringkat	1 (2023)	1–2 (2029)			036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		07 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	persen	9,04	10,36–11-45	12,13–13,40		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	01 - Tercapainya pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun yang berkualitas (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	01 - Tingkat penyelesaian jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat	persen	67,07	67,44	69,71		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Jumlah anak tidak sekolah usia 6–18 tahun	anak tidak sekolah	4.185.957 (2023)	3.776.239	3.112.816		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		03 - Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD	persen	63,81	64,39	65,13		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.01.01 KP: Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	01 - Tercapainya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan prasekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak	01 - Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	persen	36,03	36,61	37,11		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.01.01.01 PRO-P: Penyediaan bantuan operasional satuan PAUD								
04.01.01.02 PRO-P: Penyediaan bantuan afirmatif untuk PAUD								
04.01.02 KP: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC)	01 - Tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	persen	26,67	31,14	49,00		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	persen	42,09	46,08	62,04		025 - Kementerian Agama
04.01.02.01 PRO-P: Revitalisasi Prasarana Pendidikan dan Pembangunan Satuan Pendidikan Baru (PHTC)								
04.01.02.02 PRO-P: Revitalisasi Sarana Pendidikan (PHTC)								
04.01.03 KP: Penyaluran Bantuan Pendidikan yang Tepat Sasaran	01 - Terwujudnya perluasan kesempatan belajar untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin	01 - Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya		0,765	0,788	0,809		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Tingkat penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha	persen	68,63	70,48	77,85		025 - Kementerian Agama

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.01.03.01 PRO-P: Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah								
04.01.03.02 PRO-P: Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bagi Peserta Didik Kurang Mampu								
04.01.03.03 PRO-P: Penyediaan Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Afirmasi								
04.01.04 KP: Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	01 - Tercapainya penurunan kasus anak putus sekolah dan anak tidak sekolah	01 - Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal	anak	- (indikator baru)	496.810	2.714.050		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	anak	261.197	261.297	261.697		025 - Kementerian Agama
04.01.04.01 PRO-P: Pembinaan Dalam Pencegahan Anak Tidak Sekolah								
04.01.04.02 PRO-P: Penanganan Anak Tidak Sekolah								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	01 - Terwujudnya kualitas pengajaran dan pembelajaran yang efektif	01 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	persen	(a) 48,31; (b) 37,04 (2023)	(a) 50,55; (b) 41,36	(a) 55,00; (b) 50,00		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	persen	33,03 (2023)	33,24	34,08		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		03 - *Early Childhood Development Index* (ECDI)		87,70	88,30	91,27		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri	persen	- (indikator baru)	70	90		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.02.01 KP: Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK)	01 - Terwujudnya pembelajaran yang inovatif, serta meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik	01 - Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	persen	15,69	16,56	18,27		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	persen	30,50	32,24	39,18		025 - Kementerian Agama
04.02.01.01 PRO-P: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.02.01.02 PRO-P: Penyediaan Akses Listrik dan Internet untuk Satuan Pendidikan								
04.02.02 KP: Penciptaan Ekosistem Satuan Pendidikan yang Mendukung Proses Pembelajaran Berkualitas, termasuk Peningkatan Kecakapan Literasi Kelas Awal, serta Penguatan Karakter dan *Wellbeing* Peserta Didik dan Pendidik	01 - Terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan mampu mengembangkan kompetensi sebagai masyarakat yang aktif	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar	persen	18,15	36,30	100,00		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	persen	10,08	20,05	59,93		025 - Kementerian Agama
04.02.02.01 PRO-P: Penguatan Pendidikan Karakter yang Dilaksanakan pada Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik dan Pendidik								
04.02.02.02 PRO-P: Peningkatan Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN maupun non ASN dalam Bentuk Finansial dan Nonfinansial								
04.02.02.03 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Peserta Didik								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.02.03 KP: Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif	01 - Terwujudnya peserta didik yang kompeten dan mampu mengaplikasikan materi-materi pembelajaran	01 - Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	persen	(a) 68,13; (b) 62,51 (2023)	(a) 68,62; (b) 67,35	(a) 76,62; (b) 75,35		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi	persen	(a) 58,07; (b) 50,91 (2023)	(a) 59,30; (b) 52,55	(a) 60,15; (b) 54,21		025 - Kementerian Agama
04.02.03.02 PRO-P: Pelaksanaan Asesmen dan Pengujian Pendidikan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.02.03.03 PRO-P: Pengembangan Kebijakan dan Model Asesmen Pendidikan								
04.02.04 KP: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	01 - Terwujudnya tumbuh kembang anak usia dini secara optimal dalam mendukung kualitas belajar anak	01 - Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI	persen	50,19	64,79	100,00		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.02.04.01 PRO-P: Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan PAUD-HI								
04.02.04.02 PRO-P: Penguatan Pendidikan, Pengasuhan, Peningkatan Gizi dan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Dini								
04.02.05 KP: Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	01 - Tercapainya peningkatan kualitas dan pemahaman ilmu agama pada peserta didik untuk diterapkan dalam kehidupan	01 - Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	persen	41,96	54,93	98,84		025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan	persen	54,67	62,08	90,40		025 - Kementerian Agama
04.02.05.01 PRO-P: Peningkatan Kompetensi pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Agama								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.02.05.02 PRO-P: Penyediaan Bantuan Pemberdayaan Kualitas bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan								
04.02.05.03 PRO-P: Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pembelajaran Agama								
04.02.06 KP: Penerapan Kurikulum yang Kontekstual Berpusat pada Peserta Didik serta Fokus pada Karakter dan Kompetensi Esensial	01 - Terwujudnya pembelajaran yang memuat aspek mendasar dan relevan dengan kebutuhan saat ini dan masa depan	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	persen	83,94	87,96	100,00		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	persen	50,21	53,52	60,33		025 - Kementerian Agama

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.02.06.01 PRO-P: Penyediaan Buku dan Bahan Ajar yang Berkualitas								
04.02.06.02 PRO-P: Pengembangan Kurikulum dan model pembelajaran yang adaptif								
04.02.06.03 PRO-P: Penerapan Kurikulum dan Model Pembelajaran Adaptif								
04.02.07 KP: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	01 - Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global	01 - Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi	unit	- (indikator baru)	0	17	01 - Transformasi Sosial	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina	unit	- (indikator baru)	12	20		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.02.07.01 PRO-P: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul								
04.02.07.02 PRO-P: Pembinaan Sekolah Unggul Transformasi								
04.02.08 KP: Revitalisasi Pendidikan Nonformal	01 - Tercapainya peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dan menjamin pendidikan kesetaraan sebanding dengan pendidikan formal	01 - Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya	persen	22,01	24,43	34,12		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.02.08.01 PRO-P: Penyediaan Layanan Pendidikan Nonformal								
04.02.08.02 PRO-P: Penguatan Lembaga Pendidikan Nonformal								
04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	01 - Terwujudnya layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas	01 - Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	persen	56,00	65,00	100,00		025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	persen	- (indikator baru)	10,00	30,00		025 - Kementerian Agama
04.03.01 KP: Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	01 - Meningkatnya kualitas pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	persen	- (indikator baru)	30,00	70,00		025 - Kementerian Agama

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.03.01.01 PRO-P: Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Keagamaan								
04.03.01.02 PRO-P: Penyediaan Bantuan Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Berbasis Kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keagamaan								
04.03.01.03 PRO-P: Penyediaan Bantuan Sarana Prasarana untuk Satuan Pendidikan Keagamaan								
04.03.02 KP: Rekognisi Lulusan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	01 - Terpenuhinya rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi	persen	32	55	75	01 - Transformasi Sosial	025 - Kementerian Agama
04.03.02.01 PRO-P: Pembinaan Satuan Pendidikan Keagamaan								
04.03.02.02 PRO-P: Pembinaan Keagamaan untuk Peserta Didik								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.03.03 KP: Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	01 - Terwujudnya penguatan penjaminan mutu pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	persen	- (indikator baru)	10,00	30,00		025 - Kementerian Agama
04.03.03.01 PRO-P: Pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan Keagamaan								
04.03.03.02 PRO-P: Pendampingan dalam Peningkatan Mutu pada Satuan Pendidikan								
04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	01 - Terwujudnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	01 - Indeks Pemerataan Guru		36,91	35,91	31,91		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	persen	35,21 (2023)	41,63	54,47		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.04.01 KP: Reformasi Pendidikan Keguruan melalui Penguatan LPTK dan Revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)	01 - Menguatnya mutu lembaga pelaksana pendidikan tenaga kependidikan dan profesi guru	01 - Proporsi perguruan tinggi LPTK yang terakreditasi	persen	94,24 (2022)	96,4	100		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul	persen	0 (2022)	1,25	6,25		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
	02 - Meningkatnya proporsi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	01 - Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal	persen	57,94	71,50	87,77		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan	persen	38,91 (2023)	51,17	98,00		025 - Kementerian Agama
04.04.01.01 PRO-P: Revitalisasi LPTK dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan PPG								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.04.01.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendidik melalui Sertifikasi Profesi								
04.04.02 KP: Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (e.g. Pelatihan, *In-service Training*), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	01 - Terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan mata pelajaran	01 - Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik	persen	32,61	40,22	70,11		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik	persen	80,00	80,85	84,22		025 - Kementerian Agama
04.04.02.01 PRO-P: Pemenuhan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
04.04.02.02 PRO-P: Pemenuhan Kesejahteraan Afirmatif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memenuhi Kekurangan Guru								
04.04.02.03 PRO-P: Perencanaan dan Kebijakan Penyediaan Guru ASN								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.04.02.04 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
04.04.02.05 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Guru Agama Berbasis Kinerja								
04.04.02.06 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Kinerja								
04.04.02.07 PRO-P: Pendampingan Pembelajaran untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	01 - Terselenggaranya sistem tata kelola pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, serta reputasi kelembagaan pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	persen	62,80	64,06	69,34		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B	persen	64,94 (2023)	67,16	76,04		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.05.01 KP: Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan	01 - Terwujudnya lembaga pendidikan yang ideal, mandiri, dan berintegritas	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	persen	54,06 (2023)	59,47	72,28		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	persen	41,79	42,50	55,90		025 - Kementerian Agama
04.05.01.02 PRO-P: Pendampingan dalam Peningkatan Kualitas untuk Kepala Satuan Pendidikan								
04.05.02 KP: Peningkatan Kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Khususnya Terkait Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	01 - Terwujudnya kolaborasi yang bersinergi dan berkualitas dalam peningkatan mutu pendidikan	01 - Persentase daerah (provinsi dan kab/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	persen	42,75	57,61	82,61		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.05.02.01 PRO-P: Pembinaan Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.05.02.02 PRO-P: Pengembangan Kebijakan Pendidikan								
04.05.03 KP: Penguatan Sistem Penjaminan Mutu	01 - Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP	persen	89,67 (2023)	98,65	99,29		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP	persen	30,48	33,81	51,71		025 - Kementerian Agama
04.05.03.01 PRO-P: Pendampingan Satuan Pendidikan dalam Peningkatan Penjaminan Mutu								
04.05.03.02 PRO-P: Penyediaan dan Pemanfaatan sistem Informasi Data Pendidikan								
04.05.03.03 PRO-P: Percepatan Akreditasi Lembaga Pendidikan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM)	01 - Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan berkembangnya STEAM di pendidikan tinggi	01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi	persen	31,45 (2023)	33,94	38,04		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (a) total; (b) karyawan atau wirausaha;	persen	(a) 59,86 (2022); (b) 81,87 (2022)	(a) 62,16; (b) 83,59	(a) 65,37; (b) 86,31		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Proporsi mahasiswa baru berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul	persen	23,6 (2020)	28,8	33,1		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04 - Proporsi mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas	persen	92,6 (2020)	93,7	94,0		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		05 - Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	persen	40,67 (2022)	43,70	48,10		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		06 - Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM	persen	28,13 (2023)	29,04	30,96		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.01 KP: Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	01 - Meningkatnya relevansi dan partisipasi pendidikan tinggi	01 - Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya)		0,33 (2023)	0,46	0,58	01 - Transformasi Sosial	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Jumlah provinsi dengan APK PT di atas 31%	provinsi	22 (2023)	23	26		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan	bulan	13 (2023)	12,5	10,5		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04 - Rasio *outbound* per *inbound* mahasiswa	persen	6,50 (2018)	7,20	7,73		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		05 - Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	persen	31,99 (2023)	32,99	35,00		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.06.01.01 PRO-P: Penyaluran Bantuan Pembiayaan Pendidikan Tinggi yang Tepat Sasaran								
04.06.01.02 PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi								
04.06.01.03 PRO-P: Inovasi dan Perluasan Layanan Pendidikan Tinggi								
04.06.01.04 PRO-P: Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi								
04.06.01.05 PRO-P: Pendidikan Karakter, Peningkatan Kemampuan Interpersonal dan Mobilitas Akademik Mahasiswa								
04.06.02 KP: Pengembangan STEAM	01 - Menguatnya bidang STEAM di perguruan tinggi	01 - Proporsi Program Studi STEM	persen	43,5 (2022)	47,7	53,0	01 - Transformasi Sosial	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Proporsi program studi terakreditasi unggul (a) total; (b) STEM; (c) non-STEM	persen	(a) 14,97; (b) 14,90; (c) 15,02 (2022)	(a) 16,93; (b) 16,87; (c) 16,98	(a) 19,55; (b) 19,50; (c)19,58		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.02.01 PRO-P: Restrukturisasi dan Penataan Program Studi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.06.02.02 PRO-P: Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis STEAM								
04.06.03 KP: Penguatan Otonomi Perguruan Tinggi Sebagai Rumah Masyarakat Ilmiah	01 - Meningkatnya kualitas kelembagaan perguruan tinggi untuk mendukung penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah	01 - Proporsi perguruan tinggi terakreditasi	persen	59,55 (2022)	63,64	66,91	01 - Transformasi Sosial	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	perguruan tinggi	11 (2023)	12	16		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.03.01 PRO-P: Akreditasi Perguruan Tinggi								
04.06.03.02 PRO-P: Fasilitasi dan Rekomendasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perguruan Tinggi								
04.06.03.03 PRO-P: Penguatan Kampus Sehat, Aman, Nyaman, dan Inklusif								
04.06.03.04 PRO-P: Akselerasi Implementasi Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.06.04 KP: Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Dosen	01 - Terwujudnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi dosen	01 - Persentase dosen berkualifikasi S3: (a) total; (b) STEM; (c) non-STEM	persen	(a) total 18,18 (2021); (b) STEM 16,01 (2021); (c) non STEM 19,93 (2021)	(a) total: 21,56; (b) STEM: 19,08; (c) non STEM: 23,54	(a) total: 24,43; (b) STEM: 21,71; (c) non STEM: 26,58	01 - Transformasi Sosial	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen	persen	50,12 (2023)	51,29	53,41		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kapasitas	orang	16.551 (2023)	17.000	19.000		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.04.01 PRO-P: Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen melalui Beasiswa Gelar								
04.06.04.02 PRO-P: Tata Kelola dan Peningkatan Jenjang Karier Dosen								
04.06.04.03 PRO-P: Peningkatan dan Reorientasi Keterampilan Dosen								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	01 - Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing yang relevan dengan kebutuhan industri	01 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan	persen	42,18	44,88	50,90		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	persen	1,63 (2023)	3,30	3,90		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
04.07.01 KP: Penguatan Pendidikan Menengah Vokasi	01 - Terwujudnya lulusan pendidikan menengah vokasi yang produktif dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan industri	01 - Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha	persen	12,86	13,42	15,91		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.07.01.01 PRO-P: Penerapan Kurikulum dan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi Berbasis Industri								
04.07.01.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Pemerataan Pendidik pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi								
04.07.01.03 PRO-P: Sertifikasi Kompetensi Siswa pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi								
04.07.01.04 PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi (DAK)								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.07.02 KP: Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi	01 - Meningkatnya lulusan pendidikan tinggi vokasi yang produktif dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan industri	01 - Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: (a) bekerja; (b) berwirausaha	persen	(a) 74,25; (b) 4,29 (2023)	(a) 74,50; (b) 4,50	(a) 75,50; (b) 5,50		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.07.02.01 PRO-P: Relevansi Kurikulum dan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi								
04.07.02.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi dan Mobilitas Dosen dan Instruktur PT Vokasi								
04.07.02.03 PRO-P: Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa PT Vokasi								
04.07.02.04 PRO-P: Sarana dan Prasarana PT Vokasi								
04.07.02.05 PRO-P: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Sektor Strategis								
04.07.03 KP: Penguatan Pelatihan Vokasi	01 - Terwujudnya kegiatan pelatihan vokasi dan ketenagakerjaan yang produktif dan sesuai kebutuhan industri bagi lulusan vokasi	01 - Persentase lulusan pelatihan vokasi setahun terakhir yang bekerja atau berwirausaha	persen	41,86 (2023)	44	48		026 - Kementerian Ketenagakerjaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.07.03.01 PRO-P: Pelatihan Vokasi di Sektor Strategis								
04.07.03.02 PRO-P: Pemagangan Industri di Dalam dan Luar Negeri								
04.07.03.03 PRO-P: Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja								
04.07.03.04 PRO-P: Fasilitasi dan Bantuan Lembaga Pelatihan Vokasi								
04.07.03.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Instruktur dan Pelatih								
04.07.04 KP: Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif	01 - Terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja	01 - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi	persen	62,13 (2023)	62,97	65,53	02 - Transformasi Ekonomi	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		02 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	orang	7.120.907 (2023)	13.289.510	22.289.510		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		03 - Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan	perusahaan	530.809 (2023)	447.352	1.996.979		026 - Kementerian Ketenagakerjaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.07.04.01 PRO-P: Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								
04.07.04.02 PRO-P: Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								
04.07.04.03 PRO-P: Iklim Ketenagakerjaan yang Mendukung Pasar Kerja Fleksibel, Responsif Gender dan Inklusif								
04.07.04.04 PRO-P: Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja								
04.08 PP: Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	01 - Meningkatnya proporsi anggaran iptek dan inovasi terhadap PDB untuk mendukung pembangunan nasional	01 - Pengeluaran iptek dan inovasi	persen PDB	0,28 (2020)	0,30	0,45		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02 - Proporsi anggaran litbang nonpemerintah/ swasta	persen	12,5 (2020)	25	35		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		03 - Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat *THE Impact Ranking* SDGs: (a) Top 300 (b) Top 600 (c) Top 1000	perguruan tinggi	(a) 8; (b) 11; (c) 22 (2023)	(a) 8; (b) 12; (c) 22	(a) 9; (b) 15; (c) 25;		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.08.01 KP: Penguatan Kapasitas Iptek dan inovasi	01 - Meningkatnya kualitas SDM iptek dan inovasi	01 - Jumlah SDM Iptek (Dosen, Peneliti dan Perekayasa) per juta penduduk	SDM iptek per juta penduduk	1242	1267	1371		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya	persen	- (indikator baru)	25	50		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		03 - Proporsi jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10	persen	0,12	0,15	0,35		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		04 - Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset	KI per 100 periset	1,62	4,56	8,48		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	02 - Meningkatnya kualitas infrastruktur iptek dan inovasi	01 - Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dibangun	infrastruktur	8	1	10		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
04.08.01.01 PRO-P: SDM Iptek yang Mengikuti Pendidikan S3								
04.08.01.02 PRO-P: SDM Iptek dan Inovasi yang Mengikuti Program Peningkatan Kapasitas yang Mendukung Kegiatan Iptek dan Inovasi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.08.01.03 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Iptek dan Inovasi Strategis								
04.08.01.04 PRO-P: Pengembangan Skema Rekrutmen dan Jenjang Karier SDM Iptek								
04.08.01.05 PRO-P: Pengembangan Skema Insentif SDM Iptek, Lembaga Riset dan Industri								
04.08.02 KP: Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	01 - Meningkatnya peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi	01 - Jumlah lembaga pengelola penelitian, inovasi dan pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	- (indikator baru)	5	10		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
	02 - Meningkatnya peran BRIDA dalam Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	01 - Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal	lembaga	- (indikator baru)	2	15		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	03 - Meningkatnya peran *Science Techno Park* (STP) dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	01 - Jumlah *Science Techno Park* (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	5	5	8		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Jumlah *Science Techno Park* (STP) baru yang dikembangkan di luar Jawa	lembaga	- (indikator baru)	0	5		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi	miliar rupiah	- (indikator baru)	50	200		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04 - Jumlah *startup* binaan yang produktif	*startup*	- (indikator baru)	2	15		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		05 - Jumlah *hub* tematik yang dikembangkan di BRIN	lembaga	- (indikator baru)	0	4		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		06 - Jumlah penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan inovasi di BRIN	miliar rupiah	- (indikator baru)	20	125		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	04 - Meningkatnya peran sektor (K/L) terkait dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di sektor-sektor prioritas	01 - Jumlah *hub* iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk	lembaga	- (indikator baru)	0	4		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
04.08.02.01 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat								
04.08.02.02 PRO-P: Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemanfaatan Iptek dan Inovasi								
04.08.02.03 PRO-P: Pengembangan Layanan dan Fasilitasi BRIDA/Ekosistem Daerah								
04.08.02.04 PRO-P: Pengembangan *Hub* Inovasi Sektoral dan Tematik								
04.08.02.05 PRO-P: Pengembangan Kapasitas *Science Techno Park* (STP)								
04.08.02.06 PRO-P: *Start up* yang Mendapatkan Fasilitasi Inkubasi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.08.03 KP: Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi secara Masif di Berbagai Bidang termasuk Pengawasan Ketenaganukliran	01 - Meningkatnya pemanfaatan iptek dan inovasi	01 - Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat pada bidang-bidang prioritas	produk	- (indikator baru)	25	115		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	02 - Meningkatnya kerjasama iptek dan inovasi dengan mitra/ industri	01 - Jumlah kerja sama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan industri/badan usaha pada bidang-bidang prioritas	kerja sama	- (indikator baru)	25	50		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
04.08.03.01 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Pangan								
04.08.03.02 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Energi								
04.08.03.03 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Pertahanan dan Keamanan								
04.08.03.04 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Sumber Daya Air								
04.08.03.05 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Industri Manufaktur yang Mendukung Hilirisasi SDA								
04.08.03.06 PRO-P: Pemanfaatan Hasil Riset Bidang Kesehatan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.08.03.07 PRO-P: Pemanfaatan Riset bidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup								
04.08.03.08 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Kebijakan, Sosial Humaniora, dan Kebudayaan								
04.08.03.09 PRO-P: Pemanfaatan Riset bidang Kelautan								
04.08.03.10 PRO-P: Kerjasama Iptek dan Inovasi dengan Mitra/Industri								
04.08.03.11 PRO-P: Pengawasan Tenaga Nuklir								
04.08.04 KP: Penguatan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Keunggulan Iptek dan Inovasi Berbasis Kewilayahan dan Berdaya Saing	01 - Terwujudnya perguruan tinggi yang memiliki penelitian berdampak, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wilayah setempat	01 - Indeks QS *International Research Network Collaboration*		14, 29 (2023)	19,35	29,48	01 - Transformasi Sosial	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; (a) rasio sitasi; (b) h-index		(a) 0,42; (b) 318 (2023)	(a) 1,88; (b) 318	(a) 4,79; (b) 319		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Jumlah paten *granted* dari perguruan tinggi	paten	15.465 (2023)	17.500	27.500		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat	produk	75.669 (2023)	82.000	110.000		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.08.04.01 PRO-P: Pengembangan Pusat Keunggulan dan Peningkatan Produktivitas Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi								
04.08.04.02 PRO-P: Peningkatan Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi								
04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	01 - Terwujudnya talenta riset inovasi, seni budaya, dan olahraga yang memperoleh rekognisi di tingkat nasional dan internasional	01 - Jumlah SDM iptek yang mendapatkan rekognisi internasional	orang	95	99	116		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02 - Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional	karya seni budaya	15 (2023)	15	27		140 - Kementerian Kebudayaan
		03 - Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional	persen	73,38 (2023)	76-80	76-80		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Peringkat pada *Youth Olympic Games*	peringkat	83 (2018)	81-83 (2026)			092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Peringkat pada *Asian Youth Games*	peringkat	15 (2013)	13-15	12-14		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		06 - Peringkat pada *Asian Youth Para Games*	peringkat	5 (2021)	3-5	2-4		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.09.01 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	01 - Meningkatnya rekognisi internasional terhadap talenta seni budaya serta penyelenggaraan ajang dan non ajang seni budaya berkelas internasional di Indonesia	01 - Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional	talenta seni budaya	97 (2023)	111	139		140 - Kementerian Kebudayaan
		02 - Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional	festival dan pameran seni budaya	6	7	11		140 - Kementerian Kebudayaan
		03 - Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	persen	31,49	32,76	38,32		140 - Kementerian Kebudayaan
04.09.01.01 PRO-P: Pembinaan Talenta Seni Budaya								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.09.01.02 PRO-P: Penyelenggaraan Ajang Seni dan Festival Seni Budaya								
04.09.01.03 PRO-P: Pemberian Penghargaan untuk Talenta Seni Budaya								
04.09.02 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	01 - Terciptanya SDM Iptek yang memiliki kompetensi tingkat internasional	01 - Rasio SDM iptek per satu juta penduduk	SDM iptek per 1 juta penduduk	1.151 (2023)	1.265	1.721		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02 - Jumlah SDM iptek masuk ke dalam pemeringkatan *World's Top 2% Scientists*	orang	95 (2023)	99	116		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		03 - Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa	peraih	100 (2023)	144	320		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.09.02.01 PRO-P: Memperluas Kumpulan Bakat (*Talent Pool*) dan akuisisi Talenta Riset dan Inovasi								
04.09.02.02 PRO-P: Memperkuat Pembinaan serta Fasilitasi Talenta Riset dan Inovasi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.09.02.03 PRO-P: Meningkatkan Sarana Prasarana Esensial Manajemen Talenta								
04.09.02.04 PRO-P: Meningkatkan Sinergi Pendanaan dan Tata Kelola Kelembagaan Riset dan Inovasi								
04.09.02.05 PRO-P: Meningkatkan Apresiasi Talenta Riset dan Inovasi								
04.09.03 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	01 - Terbinanya olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global	01 - Provinsi dengan sekolah khusus olahraga yang terstandardisasi	provinsi	16 (2023)	18	22		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Kab/kota dengan PPLP yang terbentuk	kab/kota	24 (2023)	29	49		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah	persen	- (indikator baru)	15	15		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat	persen	- (indikator baru)	15	30		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		05 - Jumlah perolehan medali pada *Youth Olympic Games*	medali	1 perunggu (2018)	1 emas (2026)			092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		06 - Jumlah perolehan medali pada *Asian Youth Games*	medali	1 emas/ 2 perak/ 2 perunggu (2013)	1 - 2	2 - 3		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		07 - Jumlah perolehan medali pada Asian *Youth* Para Games	medali	12 emas/ 11 perak/ 14 perunggu (2021)	12 - 15	14 - 16		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.09.03.01 PRO-P: Pengembangan Sistem Pembinaan Pra-Bibit, Bibit dan Talenta Potensial Bidang Olahraga								
04.09.03.02 PRO-P: Pengembangan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.09.04 KP: Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN)	01 - Terwujudnya tata kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang akuntabel dan berkelanjutan	01 - Jumlah rekomendasi kebijakan rencana aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN)	rekomendasi kebijakan	1 (2023)	1	1		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
04.09.04.01 PRO-P: Penguatan Basis Data Terpadu MTN								
04.09.04.02 PRO-P: Penguatan Sinergi Pelaksanaan MTN								
04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	01 - Terwujudnya masyarakat literat untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan daya cipta	01 - Nilai dimensi budaya literasi IPK		60,49 (2023)	63,24	67,05		140 - Kementerian Kebudayaan
04.10.01 KP: Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	01 - Terwujudnya layanan perpustakaan yang berkualitas untuk menguatkan budaya literasi, kreativitas dan inovasi	01 - Indeks pembangunan literasi masyarakat		69,42 (2023)	70,50	72,50		057 - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
04.10.01.01 PRO-P: Peningkatan Layanan Literasi yang Berkualitas dan Merata								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.10.01.02 PRO-P: Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial								
04.10.02 KP: Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca	01 - Meningkatnya budaya kegemaran membaca	01 - Tingkat kegemaran membaca		66,67 (2023)	71,50	75,50		057 - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
04.10.02.01 PRO-P: Pembiasaan Kegemaran Membaca								
04.10.02.02 PRO-P: Penguatan Komunitas dan Penggerak Literasi								
04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	01 - Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat berbasis siklus hidup melalui penguatan edukasi, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat	01 - Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	189 (2020)	122	77		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Angka kematian balita	per 1.000 kelahiran hidup	19,83 (2020)	15,00	11,90		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek)	persen	21,50 (2023)	18,8	14,2		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Prevalensi remaja putri anemia	persen	- (indikator baru)	25	15		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja	persen	- (indikator baru)	10	50		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		06 - Persentase lanjut usia yang mandiri	persen	74,30 (2023)	75	83		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (*Proportion of demand satisfied by modern methods*)	persen	83,9	84,7	87,1		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		08 - Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	persen	- (indikator baru)	36	70		024 - Kementerian Kesehatan
04.11.01 KP: Penurunan Kematian Ibu dan Anak	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar dengan persalinan di fasyankes, memperkuat deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan emergensi, pelayanan darah, tata laksana balita sakit, serta imunisasi	01 - Persentase persalinan di fasyankes	persen	87,2 (2023)	88	95	01 - Transformasi Sosial	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase kab/kota dengan RS PONEK sesuai standar	persen	19,45 (2023)	25	85		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase kab/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar	persen	- (indikator baru)	20	80		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase kab/kota dengan CFR *direct obstetric* (eklampsi & pendarahan *postpartum*) < 1%	persen	- (indikator baru)	25	80		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Persentase *antenatal care* (ANC) 6 kali (K6)	persen	- (indikator baru)	80	90		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Cakupan *antenatal care* (ANC) sesuai standar (12T)	persen	- (indikator baru)	63	75		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Persentase anemia pada ibu hamil	persen	27,7 (2023)	26	20		024 - Kementerian Kesehatan
		08 - Persentase calon pengantin yang mendapat skrining kesehatan	persen	49,2 (2023)	50	70		024 - Kementerian Kesehatan
		09 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)	(kelahiran hidup per 1000 perempuan)	19,7 (2023)	19,4	17,8		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		10 - Cakupan KF lengkap sesuai standar	persen	26,8 (2023)	35	85		024 - Kementerian Kesehatan
		11 - Persentase KB Pasca Persalinan	persen	49,1 (2023)	57	75		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		12 - Angka kematian neonatal	per 1.000 kelahiran hidup	9,30 (2020)	9,2	7,2		024 - Kementerian Kesehatan
		13 - Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	16,85 (2020)	12,62	9,96		024 - Kementerian Kesehatan
		14 - Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar	persen	90,77 (2023)	91	95		024 - Kementerian Kesehatan
		15 - Cakupan imunisasi bayi lengkap	persen	75 (2023)	80	95		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.11.01.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu & Anak								
04.11.01.02 PRO-P: Penguatan Pelayanan Promotif & Preventif Ibu & Anak								
04.11.01.03 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Penurunan Kematian Ibu dan Anak								
04.11.02 KP: Pencegahan dan Penurunan *Stunting*	01 - Pencegahan dan penurunan *stunting* melalui pendekatan spesifik dan sensitif	01 - Prevalensi *wasting* (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	persen	8,5 (2023)	8	5	01 - Transformasi Sosial	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase bayi lahir *premature* (<37 minggu)	persen	11,1 (2023)	11	9		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)	persen	- (indikator baru)	15	10		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	persen	68,6 (2023)	73	85		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	persen	55,5 (2023)	61	73		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	persen	60,9 (2023)	73	85		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan	persen	24 (2023)	50	70		024 - Kementerian Kesehatan
		08 - Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK)	persen	74,2	75	95		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.11.02.01 PRO-P: Penguatan Intervensi Spesifik *Stunting*								
04.11.02.02 PRO-P: Penguatan Intervensi Sensitif *Stunting*								
04.11.03 KP: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah	01 - Persentase remaja putri yang mengonsumsi TTD	persen	61,3 (2023)	65	80	01 - Transformasi Sosial	024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia produktif	01 - Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	persen	- (indikator baru)	25	70		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah Pos upaya kesehatan kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal	pos	10.200 (2023)	15.000	60.000		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja	persen	- (indikator baru)	10	50		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	03 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia	01 - Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	47,22 (2022)	50	70		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase puskesmas santun lansia	persen	69	70	90		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu	persen	11,01 (2023)	20	50		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP)	persen	- (indikator baru)	10	50		024 - Kementerian Kesehatan
	04 - Meningkatnya pelayanan KB dan kespro	01 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern contraceptive prevalence rate* (mCPR)	persen	61,7	61,8	62,2		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		02 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need* KB)	persen	11,1	10,5	8,5		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		03 - Persentase peserta KB aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	25,5	25,7	26,7		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		04 - Persentase puskesmas mampu pelayanan KB MKJP	persen	- (indikator baru)	30	50		024 - Kementerian Kesehatan
04.11.03.01 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Usia Sekolah								
04.11.03.02 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Usia Produktif								
04.11.03.03 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Lansia								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.11.03.04 PRO-P: Peningkatan Pelayanan KB & kespro								
04.11.04 KP: Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	01 - Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit	01 - Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%	persen	- (indikator baru)	40	90	01 - Transformasi Sosial	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir	persen	- (indikator baru)	65	80		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia prasekolah	persen	- (indikator baru)	50	70		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja	persen	- (indikator baru)	20	70		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	persen	- (indikator baru)	35	70		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	persen	- (indikator baru)	50	70		024 - Kementerian Kesehatan
04.11.04.01 PRO-P: Skrining kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia								
04.11.04.02 PRO-P: Penguatan sistem dan tata kelola pemeriksaan kesehatan gratis								
04.12 PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	01 - Terlaksananya pemberian makan bergizi gratis bagi anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah untuk mencapai pemenuhan gizi	01 - Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB	persen	87,3 (2023)	87,99	90,1		128 - Badan Gizi Nasional
		02 - Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U	persen	75,03 (2023)	75,28	75,67		128 - Badan Gizi Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis	persen	- (indikator baru)	91	95		128 - Badan Gizi Nasional
		04 - Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar	persen	- (indikator baru)	100	100		128 - Badan Gizi Nasional
04.12.01 KP: Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Terlaksananya pemberian makan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	01 - Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	10	100	01 - Transformasi Sosial	128 - Badan Gizi Nasional
		02 - Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	11	100		128 - Badan Gizi Nasional
		03 - Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	11	100		128 - Badan Gizi Nasional
		04 - Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24	100		128 - Badan Gizi Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24	100		128 - Badan Gizi Nasional
		06 - Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24	100		128 - Badan Gizi Nasional
		07 - Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24	100		128 - Badan Gizi Nasional
		08 - Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24	100		128 - Badan Gizi Nasional
		09 - Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	2	100		128 - Badan Gizi Nasional
		10 - Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik	persen	- (indikator baru)	50	90		128 - Badan Gizi Nasional
		11 - Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik	persen	- (indikator baru)	50	90		128 - Badan Gizi Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.12.01.01 PRO-P: Penyediaan Makanan Bergizi bagi Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Balita								
04.12.01.02 PRO-P: Penyediaan Makanan Bergizi Gratis bagi Siswa dan Santri								
04.12.01.03 PRO-P: Promosi dan Edukasi Gizi dan Pangan								
04.12.02 KP: Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	01 - Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	01 - Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional	sistem	- (indikator baru)	1	1	01 - Transformasi Sosial	128 - Badan Gizi Nasional
		02 - Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar	unit	- (indikator baru)	5.000	26.508		128 - Badan Gizi Nasional
		03 - Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan	persen	- (indikator baru)	100	100		128 - Badan Gizi Nasional
04.12.02.01 PRO-P: Pengembangan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Makanan Bergizi								
04.12.02.02 PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Makanan Bergizi								
04.12.02.03 PRO-P: Penguatan Intervensi Pendukung Pemberian Makan Bergizi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit melalui upaya pencegahan, penemuan kasus, dan penuntasan pengobatan	01 - Insidensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	per 100.000 penduduk	387 (2023)	329	190		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Kab/kota dengan eliminasi kusta	kab/kota	6	11	42		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Desa endemis *schistosomiasis* yang mencapai eliminasi	desa	16 (2023)	18	28		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Insidensi HIV	per 100.000 penduduk	0,10 (2023)	0,09	0,06		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	kab/kota	389 (2023)	425	500		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase Diabetes dalam Pengendalian	persen	- (indikator baru)	15	25		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	persen	18,9	20	40		024 - Kementerian Kesehatan
		08 - Kab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim	kab/kota	- (indikator baru)	30	125		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		09 - Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun	persen	1,4 (2023)	1,4	1,4		024 - Kementerian Kesehatan
		10 - Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	kab/kota	- (indikator baru)	50	250		024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan budaya hidup sehat, serta pembangunan berwawasan kesehatan	01 - Prevalensi obesitas >18 tahun	persen	23,4 (2023)	23,4	23,4		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun	persen	12,4 (2023)	12,4	8,4		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.01 KP: Penuntasan TBC	01 - Tercapainya penuntasan TBC melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan pengobatan TBC sampai tuntas	01 - Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	persen	74 (2022)	90	90	01 - Transformasi Sosial	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB *Succes Rate*)	persen	87 (2023)	90	90		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah	persen	2,6 (2023)	72	80		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (*Enrollment* TBC)	persen	86 (2022)	95	95		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.01.01 PRO-P: Peningkatan Upaya Pencegahan TBC								
04.13.01.02 PRO-P: Intensifikasi Penemuan Kasus								
04.13.01.03 PRO-P: Pengobatan TBC								
04.13.02 KP: Eliminasi Penyakit Kusta & *Schistosomiasis*	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit Kusta & *Schistosomiasis*	01 - Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	persen	84,36	86	89	01 - Transformasi Sosial	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	persen	84,97 (2023)	90	90		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	persen	9,60	<5	<5		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Cakupan pemberian obat pencegahan masal (POPM) untuk *schistosomiasis*	persen	83,6 (2023)	87,2	100		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.13.02.01 PRO-P: Pengendalian Penyakit Kusta								
04.13.02.02 PRO-P: Pengendalian Penyakit *Schistosomiasis*								
04.13.03 KP: Pengendalian Penyakit Menular Lainnya	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit menular lainnya	01 - ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART	persen	70 (2023)	90	90	01 - Transformasi Sosial	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah kab/kota yang mencapai *positivity rate* (PR) malaria <5%	kab/kota	333 (2023)	405	500		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.03.01 PRO-P: Pengendalian Penyakit HIV/AIDS								
04.13.03.02 PRO-P: Pengendalian Penyakit Malaria								
04.13.04 KP: Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Peningkatan Upaya Kesehatan Jiwa	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular	01 - Jumlah kab/kota yang melakukan skrining DM > 60%	kab/kota	32	52	175	01 - Transformasi Sosial	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	- (indikator baru)	5	38		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	persen	- (indikator baru)	30	90		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	persen	- (indikator baru)	20	70		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Cakupan imunisasi HPV	persen	6	90	90		024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Meningkatnya pengendalian gangguan jiwa	01 - Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa	persen	6 (2023)	10	30		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.04.01 PRO-P: Pencegahan dan Tata Laksana Kasus PTM								
04.13.04.03 PRO-P: Peningkatan Upaya Kesehatan Jiwa								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.13.05 KP: Pembudayaan Hidup Sehat dan Pengendalian Faktor Risiko PTM	01 - Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM	01 - Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	persen	62,6 (2023)	65	80	01 - Transformasi Sosial	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase penduduk dengan literasi kesehatan	persen	36,3 (2023)	38,3	46,3		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	persen	15 (2023)	15	25		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR	kab/kota	367	397	514		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan UBM	kab/kota	228 (2023)	276	472		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM	persen	- (indikator baru)	3	15		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	persen	- (indikator baru)	75	83		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.13.05.01 PRO-P: Tata Kelola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat								
04.13.05.02 PRO-P: Pengendalian Konsumsi Rokok								
04.13.05.03 PRO-P: Aktivitas Fisik								
04.13.05.04 PRO-P: Pangan Sehat								
04.13.06 KP: Penyehatan Lingkungan	01 - Meningkatnya upaya penyehatan lingkungan	01 - Kab/Kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	kab/kota	65 (2023)	100	300	01 - Transformasi Sosial	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Kab/Kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat (Kab/Kota)	kab/kota	- (indikator baru)	50	250		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	kab/kota	4 (2023)	30	200		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Kab/Kota sehat	kab/kota	136	182	330		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.06.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Sistem dalam Penyehatan Lingkungan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.13.06.02 PRO-P: Perubahan Perilaku *Hygiene* dan Sanitasi								
04.13.06.03 PRO-P: Penyediaan Akses Air Bersih & Sanitasi								
04.13.06.04 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lingkungan								
04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	01 - Meningkatnya kapasitas ketahanan kesehatan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit *emerging* dan *re-emerging*, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat	01 - Persentase kab/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah	persen	37,16 (2023)	40	70		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	persen	90 (2023)	94	100		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Jumlah KLB keracunan pangan	kejadian	291	250	50		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Jumlah kab/kota eliminasi rabies	kab/kota	418	430	514		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	persen	62	65	90		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		06 - Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	72,5	78,4		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		07 - Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar	persen	- (indikator baru)	10	60		024 - Kementerian Kesehatan
04.14.01 KP: Penguatan Surveilans, Pengendalian KLB/wabah dan Penanganan Bencana	01 - Meningkatnya pengendalian KLB/ wabah dan penanganan bencana dengan fokus pada penguatan sistem surveilans, laboratorium, & pos pintu masuk negara	01 - Kab/kota yang merespons sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	kab/kota	452 (2023)	462	514		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	laboratorium	- (indikator baru)	30	100		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	persen	70 (2023)	73	85		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	persen	40 (2023)	47	75		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Jumlah kab/kota endemis yang melaksanakan upaya p*reventif* promotif rabies	kab/kota	- (indikator baru)	110	321		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	kab/kota	- (indikator baru)	100	514		018 - Kementerian Pertanian
04.14.01.01 PRO-P: Penguatan Surveilans & Pengendalian KLB/Wabah/ Penanganan Bencana								
04.14.01.02 PRO-P: Penguatan Laboratorium								
04.14.01.03 PRO-P: Penguatan Pos Pintu Masuk Negara								
04.14.01.04 PRO-P: Pengendalian Penyakit Rabies								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.14.02 KP: Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Pengendalian Resistensi Antimikroba	01 - Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba	01 - Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	persen	61,96	65	90	01 - Transformasi Sosial	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase penurunan kekosongan (*stock out*) obat dan vaksin di fasyankes	persen	- (indikator baru)	10	30		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	persen	- (indikator baru)	91	98		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase RS yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)	persen	- (indikator baru)	30	80		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	persen	- (indikator baru)	30	80		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.14.02.01 PRO-P: Tata Kelola dan Penyediaan Sediaan Farmasi								
04.14.02.02 PRO-P: Penggunaan Obat Rasional								
04.14.02.03 PRO-P: Pengendalian Resistensi Antimikroba								
04.14.03 KP: Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi	01 - Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi	01 - Kab/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	kab/kota	- (indikator baru)	50	360		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - kab/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)	kab/kota	- (indikator baru)	50	360		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase kab/kota Pangan Aman	persen	13 (2023)	14	78		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		04 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	persen	77,8 (2023)	78	85		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	persen	73,3 (2023)	75	79		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		06 - Persentase obat yang aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	90	94		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		07 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	65	73		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		08 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	68	76		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		09 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	62	66		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		10 - Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan	persen	- (indikator baru)	94	98		024 - Kementerian Kesehatan
04.14.03.01 PRO-P: Penguatan Sistem Pengawasan Pangan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.14.03.02 PRO-P: Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi & Alat Kesehatan								
04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	01 - Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di hingga tingkat desa, pendekatan khusus pelayanan bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta, serta meningkatkan kualitas pendanaan kesehatan	01 - Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	persen	1,17 (2023)	20	75		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	persen	28	28	70		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	persen	37	38	85		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	persen	12	17	50		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	persen	63	67	86		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		06 - Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	persen	98,42	98,6	99		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Persentase belanja kesehatan *out of pocket* masyarakat berpengeluaran 40% terbawah	persen	4,0 (2023)	3,98	3,87		024 - Kementerian Kesehatan
		08 - Pengeluaran kesehatan total per kapita	juta	2,1 (2023)	2,2	3		024 - Kementerian Kesehatan
		09 - Persentase provinsi dan kab/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan	persen	- (indikator baru)	20	75		024 - Kementerian Kesehatan
		10 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	persen	46,72	50	70		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.15.01 KP: Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	01 - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	01 - Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar	persen	<30	30	80		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase kab/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif	persen	18	25	80		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	- (indikator baru)	10	50		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase puskesmas memiliki SPA sesuai standar	persen	18,5	40	90		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	30	50	90		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		06 - Persentase puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	persen	30	35	75		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Peran Puskesmas								
04.15.01.02 PRO-P: Pengembangan Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Peningkatan Peran Kader Kesehatan								
04.15.01.03 PRO-P: Pengembangan Layanan Kesehatan Primer yang Inklusif								
04.15.02 KP: Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kab/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	01 - Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh Indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses sulit termasuk layanan kesehatan bergerak	01 - Persentase provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar	persen	31,5	40	90		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase Kab/Kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar	persen	7,8	20	80		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	- (indikator baru)	8	40		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Kab/kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar	kab/kota	26 (2023)	27	40		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Jumlah kab/kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas	kab/kota	65	75	150		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase RS pemerintah daerah yang memenuhi ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	persen	40	45	80		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	kab/kota	- (indikator baru)	22	66		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		08 - Jumlah RS pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian	RS	3	5	30		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.02.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pelayanan Rujukan								
04.15.02.02 PRO-P: Pengembangan Layanan Unggulan Berbasis Kompetensi								
04.15.02.03 PRO-P: Penguatan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan di Daerah Sulit Akses								
04.15.03 KP: Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	01 - Meningkatnya pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan dengan mendorong peningkatan, pemenuhan, dan pemerataan dari sisi produksi, kompetensi, jumlah, maupun jenis dari SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah	01 - Jumlah kab/kota dengan SDM kesehatan puskesmas sesuai standar	kab/kota	6	19	175		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	kab/kota	250	270	345		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Rasio dokter spesialis	per 1.000 penduduk	0,18	0,19	0,24		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	persen	11,38	15	35		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul	persen	12,27	14,82	25		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.15.03.01 PRO-P: Peningkatan Produksi SDM Kesehatan								
04.15.03.02 PRO-P: Peningkatan Pendayagunaan SDM Kesehatan								
04.15.03.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan								
04.15.04 KP: Penguatan JKN dan Pendanaan Kesehatan	01 - Memperkuat kapasitas JKN dan pendanaan kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan	01 - Cakupan kepesertaan aktif JKN	persen	76,5 (2023)	80	83,5		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		02 - Jumlah kepesertaan segmen PBI	juta jiwa	96,7 (2023)	96,8	96,8		027 - Kementerian Sosial
		03 - Tingkat kepuasan publik atas layanan jaminan kesehatan nasional	persen	- (indikator baru)	85	89		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		04 - Kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial kesehatan	angka	2,92 (prognosis)	1,5 - 6	1,5 - 6		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		05 - Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik	persen	11,9 (2023)	5	5		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.04.01 PRO-P: Penguatan Kepesertaan JKN								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.15.04.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola JKN								
04.15.04.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendanaan kesehatan								
04.15.05 KP: Penguatan Tata Kelola, Data, Informasi dan Inovasi Teknologi Kesehatan	01 - Menguatnya tata kelola, data, informasi dan teknologi kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan	01 - Persentase provinsi dan kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah	persen	- (indikator baru)	70	90		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan	persen	- (indikator baru)	10	50		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase sistem informasi data kesehatan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	persen	- (indikator baru)	20	100		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan *online* nasional	persen	15	20	80		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi	persen	2	4	15		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.05.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Kesehatan								
04.15.05.02 PRO-P: Penguatan Data dan Informasi								
04.15.05.03 PRO-P: Peningkatan Pemanfaatan dan Inovasi Teknologi Kesehatan								
04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	01 - Menguatnya ketangguhan keluarga dalam menjamin terpenuhinya hak-hak individu dalam keluarga dan mendorong terbentuknya modal sosial	01 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		62,4	64,1	70,9		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02 - Median usia kawin pertama (MUKP)	tahun	22,3	22,4	22,8		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.16.01 KP: Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak	01 - Menguatnya kemampuan keluarga dalam penanaman nilai moral, etika, integritas, karakter dan pengembangan psikososial anak	01 - Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini	persen	54,31 (2023)	55,66	57,43	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02 - Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja	persen	39,7 (2023)	45	70		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		03 - Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah	persen	39,7 (2022)	45	70		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja		84,70 (2023)	85,20	87,20		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		05 - Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir	persen	20,50	19,76	16,79		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		06 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir	persen	9,02	8,82	8,64		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.16.01.01 PRO-P: Penyiapan Kehidupan Berkeluarga								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.16.01.02 PRO-P: Penguatan Kualitas Pengasuhan dalam Keluarga								
04.16.01.03 PRO-P: Peningkatan Pemahaman dan Kapasitas Keluarga dalam Menjalankan Fungsinya								
04.16.02 KP: Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga	01 - Meningkatnya fasilitas pendukung dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan fungsi keluarga	02 - Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera yang terjangkau	persen	65,97 (2023)	70	90	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		03 - Persentase tempat penitipan anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	persen	- (indikator baru)	10	50		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
04.16.02.01 PRO-P: Penyediaan Fasilitas dan Lingkungan Pendukung Keluarga								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.16.02.02 PRO-P: Pusat Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga								
04.16.03 KP: Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi bagi Keluarga Rentan	01 - Terjaminnya aspek legalitas, hukum dan ekonomi bagi keluarga rentan	01 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga		54,41 (2023)	55,41	59,41	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02 - Indeks Kerentanan Keluarga		8,83 (2023)	8,6	7,8		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
04.16.03.01 PRO-P: Pemenuhan Hak Sipil dan hukum bagi keluarga								
04.16.03.02 PRO-P: Penguatan Keluarga Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	01 - Terpenuhinya hak dan perlindungan anak	01 - Indeks Pemenuhan Hak Anak		65,58 (2023)	67,57	72,91	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Indeks Perlindungan Khusus Anak		79,91 (2023)	81,44	86,44		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	persen	94,03	96	99,8		010 - Kementerian Dalam Negeri
		04 - Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	persen	Laki-laki : 31,11 Perempuan: 36,31	Laki-laki : 25,37 Perempuan: 31,6	Laki-laki : 22,82 Perempuan: 29,73		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		05 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan	persen	2,37	2,41	2,70		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.17.01 KP: Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak	01 - Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, meningkatnya kapasitas dan resiliensi anak serta menguatnya kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak	01 - Cakupan kepesertaan aktif JKN usia 0-17 tahun	persen	70	72,5	76,0	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah kab/kota dengan peringkat dalam kab/kota Layak Anak (KLA)	kab/kota	KLA: 0; Utama: 19; Nindya: 76; Madya: 130; Pratama: 135 (2023)	KLA: 0; Utama: 20; Nindya : 77; Madya: 132; Pratama: 140	KLA: 2; Utama: 23; Nindya: 88; Madya: 140; Pratama: 160		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga	persen	77,89	78,03	78,57		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		04 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir	persen	7,28	7,06	6,16		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		05 - Jumlah kab/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan	kab/kota	280 (2023)	325	429		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.17.01.01 PRO-P: Peningkatan Lingkungan Ramah Anak dan Penguatan Resiliensi untuk Pemenuhan Hak Anak Secara Universal								
04.17.01.02 PRO-P: Penguatan Data, Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan terkait Pemenuhan Hak Anak Secara Universal								
04.17.02 KP: Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya	01 - Meningkatnya pencegahan dan penanganan serta menguatnya kelembagaan dan tata kelola tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	01 - Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	persen	6,92 (2023)	6,45	5,03	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Angka pekerja anak usia 5-17 tahun	persen	1,72 (2023)	1,67	1,61		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		03 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	56,64 (2023)	85	85		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		04 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	Laki-laki: 2,18; Perempuan: 2,17	Laki-laki: 1,56; Perempuan: 2,09	Laki-laki: 1,28; Perempuan: 1,88		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	Laki-laki: 1,83; Perempuan: 2,67	Laki-laki:1,42; Perempuan: 2,25	Laki-laki:1,13; Perempuan: 1,46		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		06 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir	persen	Laki-laki: 27,03; Perempuan: 33,07	Laki-laki: 21,98; Perempuan: 28,52	Laki-laki: 20,05; Perempuan: 26,70		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		07 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir	persen	12,64	12,42	11,70		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.17.02.01 PRO-P: Pencegahan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan, dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak								
04.17.02.02 PRO-P: Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.17.02.03 PRO-P: Penguatan Data, Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan terkait Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya								
04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	1 - Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Partisipasi Aktifnya di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Politik	01 - Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi	persen	62,2 (2023)	66,74	74,28	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Angka kesakitan pemuda	persen	6,24 (2023)	5,99	5,76		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil	persen	12,63 (2023)	11,63	9,63		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Persentase usia muda (16-30 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	persen	25,8 (2023)	24,13	23,00		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		05 - Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	persen	70,49 (2023)	75,79	82,85		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.18.01 KP: Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko	01 - Meningkatnya kualitas individu pemuda yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan; penguatan karakter, dan tercegahnya perilaku berisiko pada pemuda	01 - Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	persen	15,82 (2023)	25,49	46,49	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK	persen	96,74 (2023)	96,96	98,85		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Persentase pemuda yang merokok	persen	24,75 (2023)	23,88	23,05		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Persentase pemuda berolahraga	persen	30,32 (2023)	38,92	47,50		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.18.01.1 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendidikan serta Penguatan Karakter Pemuda dan Pramuka								
04.18.01.2 PRO-P: Peningkatan Kualitas Kesehatan Pemuda								
04.18.01.3 PRO-P: Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda								
04.18.02 KP: Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam Ketenagakerjaan	01 - Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang ekonomi khususnya partisipasi aktif dalam ketenagakerjaan	01 - Persentase pemuda pekerja tidak penuh	persen	32,46 (2023)	31	28,68	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Rasio Kewirausahaan Pemuda	persen	1,16 (2023)	1,33	1,61		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	persen	16,66 (2023)	17,82	19,81		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	persen	66,08 (2023)	66,3	67,84		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.18.02.1 PRO-P: Peningkatan Partisipasi Ketenagakerjaan Layak Pemuda								
04.18.02.2 PRO-P: Peningkatan Kewirausahaan Pemuda								
04.18.03 KP: Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik	01 - Meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang kehidupan khususnya partisipasi aktif di bidang sosial dan politik	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	persen	5,44 (2023)	5,65	6,72	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	persen	1,44 (2023)	1,48	1,8		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.18.03.1 PRO-P: Peningkatan Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda								
04.18.03.2 PRO-P: Peningkatan Inklusivitas dan Kesetaraan Gender Pemuda								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	01 - Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunnya kekerasan terhadap perempuan	01 - Proporsi perempuan kawin/pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	persen	0,126 (2023)	0,103	0,067	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Proporsi anggota legislatif	persen	Laki-Laki: 78,10; Perempuan: 21,90	Laki-Laki: 77,55; Perempuan: 22,45	Laki-Laki: 77,23; Perempuan: 22,77		076 - Komisi Pemilihan Umum
		03 - Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	persen	Laki-Laki: 42,62; Perempuan: 37,60 (2023)	Laki-Laki: 43,41; Perempuan: 38,89	Laki-Laki: 44,49; Perempuan: 40,27		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04 - Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan	persen	56,42	56,30–58,80	56,70–60,89		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		05 - Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan	persen	6,6	6,3	4,9		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		06 - Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan	ribu rupiah	Laki-laki: 16.736; Perempuan: 9.579 (2023)	Laki-Laki: 16.891; Perempuan: 9.920	Laki-Laki: 17.899; Perempuan: 10.603		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		07 - Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE	lembaga	KL: 3; Provinsi: 2; Kab/Kota: 3	KL: 4; Provinsi: 3; Kab/Kota: 5	KL: 16; Provinsi: 15; Kab/Kota: 47		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.19.01 KP: Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan	01 - Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan	01 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun	persen	0,258 (2023)	0,255	0,248	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/sederajat	persen	87,29	87,40	88,63		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.19.01.01 PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Reproduksi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.19.01.02 PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan								
04.19.02 KP: Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	01 - Meningkatnya kapasitas, kemandirian, kepemimpinan, dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, didukung oleh penguatan kebijakan, akses sumber daya, dan norma sosial budaya yang mendorong partisipasi bermakna perempuan dalam pembangunan	01 - Persentase perempuan di jabatan tinggi pratama dan madya	persen	Pratama 14; Madya 16	Pratama 14,5; Madya 16,5	Pratama 16,5; Madya 18,5	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Persentase perempuan di posisi managerial	persen	35,02	38,68	44,88		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Persentase perempuan kepala desa	persen	5,76	6,26	8,26		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.19.02.01 PRO-P: Peningkatan *Agency* dan Representasi Perempuan dalam Lembaga masyarakat dan partai politik								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.19.02.02 PRO-P: Peningkatan *Agency* dan Representasi Perempuan dalam Birokrasi dan Jabatan Publik								
04.19.03 KP: Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan	01 - Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan melalui peningkatan kapasitas, akses terhadap peluang kerja, dan ekosistem kewirausahaan serta penguatan kebijakan yang ramah perempuan dan keluarga	01 - Persentase kesenjangan upah laki-laki dan perempuan	persen	22,09	21	17	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Rasio kewirausahaan perempuan	persen	1,70 (2023)	1,79	2,21		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Indeks Literasi Digital		Laki-Laki: 3,56; Perempuan: 3,52 (2023)	Laki-Laki: 3,62; Perempuan: 3,60	Laki-Laki: 3,74; Perempuan: 3,76		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
04.19.03.01 PRO-P: Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemajuan Kewirausahaan Perempuan								
04.19.03.02 PRO-P: Penguatan Lingkungan Kerja yang Ramah Perempuan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.19.04 KP: Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan	01 - Meningkatnya cakupan dan kualitas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, data, koordinasi lintas sektor, serta kesadaran dan perubahan norma sosial budaya	01 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain	persen	3,70	3,59	3,19	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	persen	5,7	5,54	5,23		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir	persen	18	17,35	14,73		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		04 - Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan	persen	75,41	77,51	85,90		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		05 - Prevalensi Perempuan yang Mengalami P2GP	persen	46,3	43,86	34,09		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		06 - Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	persen	49,25 (2023)	85	85		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		07 - Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA	orang	26.161 (2023)	28.777-30.085	42.133 - 44.048		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.19.04.01 PRO-P: Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan								
04.19.04.02 PRO-P: Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan								
04.19.05 KP: Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan	01 - Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dalam pembangunan	01 - Persentase anggaran responsif gender	persen	K/L: 4,04; Prov/Kab/Kota : 10	K/L 5,20; Prov/Kab/Kota : 11,2	K/L 10.00; Prov/Kab/Kota : 16,00	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Persentase RO/Sub kegiatan responsif gender	persen	K/L: 3.80	K/L: 4,00	K/L: 10,00		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan rencana aksi kesetaraan gender	persen	- (indikator baru)	Prov: 7; Kab/Kota: 0	Prov: 38; Kab/Kota: 155		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.19.05.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan di Pusat								
04.19.05.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan di Daerah								
04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	01 - Terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat	01 - Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usia		- (indikator baru)	59,67	70,64		027 - Kementerian Sosial
		02 - Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas		- (indikator baru)	38,42	55,30		027 - Kementerian Sosial
04.20.01 KP: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	01 - Pemenuhan akses layanan dasar dan perlindungan dari kekerasan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia	01 - Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan	persen	99,55 (2023)	99,60	99,80		027 - Kementerian Sosial
		02 - Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	persen	8,19	10	18		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

SK No 122288 C

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	persen	12,33	13,08	16,05		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.20.01.01 PRO-P: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas								
04.20.01.02 PRO-P: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Lanjut Usia								
04.20.02 KP: Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Proses Pembangunan	01 - Terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kebijakan pembangunan	01 - Persentase pemprov yang melibatkan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan	persen	73 (2023)	75	95		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
		02 - Persentase pemprov yang melibatkan lansia dalam penyusunan kebijakan	persen	18 (2023)	30	50		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.20.02.01 PRO-P: Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan								
04.20.02.02 PRO-P: Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Lansia dalam Proses Pembangunan								
04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	01 - Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Regional dan Internasional	01 - Jumlah perolehan medali pada SEA Games	medali	87 emas/ 80 perak/ 109 perunggu (2023)	87 emas/ 80 perak/ 109 perunggu	87 emas/ 80 perak/ 109 perunggu		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games	medali	159 emas/ 148 perak/ 94 perunggu (2023)	159 emas/148 perak/ 94 perunggu (2029)			092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Jumlah perolehan medali pada Asian Games	medali	7 emas/ 11 perak/ 18 perunggu (2023)	7 emas/11 perak/18 perunggu (2026)			092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games	medali	29 emas/ 30 perak/ 36 perunggu (2023)	29 emas/30 perak/36 perunggu (2026)			092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.21.01 KP: Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Talenta Unggul	01 - Terbinanya Olahragawan Talenta Unggul yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional	01 - Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabor unggulan olimpiade	orang	150 (2023)	180	300		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade	orang	100 (2023)	100	100		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade	orang	182 (2023)	500	1500		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade	orang	22 (2023)	120	200		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.21.01.01 PRO-P: Pengembangan Tata Kelola Pembinaan Olahraga Prestasi								
04.21.01.02 PRO-P: Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Elite Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade								
04.21.02 KP: Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga Berstandar Internasional	01 - Terbinanya Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Berstandar Nasional dan Internasional	01 - Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional	orang	250 (2023)	250	500		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional	orang	50 (2023)	50	100		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan	lembaga	18 (2023)	18	18		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.21.02.01 PRO-P: Pengembangan Tenaga Keolahragaan Berstandar Nasional dan Internasional								
04.21.02.02 PRO-P: Pengembangan Organisasi Olahraga Berstandar Nasional dan Internasional								
04.21.03 KP: Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas	01 - Terwujudnya Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas	01 - Jumlah lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	lembaga	11 (2023)	11	11		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Jumlah lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade	lembaga	548 (2023)	548	548		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.21.03.01 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Olahraga								
04.21.03.02 PRO-P: Peningkatan Fasilitasi Sarana Olahraga								
04.21.04 KP: Peningkatan Partisipasi dan Penyelenggaraan *Event*/Festival/Kompetisi Olahraga	01 - Meningkatnya partisipasi dan penyelenggaraan *event*/festival/kompetisi olahraga kelas dunia	01 - *Event* kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	kegiatan	18 (2023)	20	20		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	kegiatan	18 (2023)	20	20		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.21.04.01 PRO-P: Partisipasi dan Penyelenggaraan *Event*/Festival/Kompetisi Olahraga Nasional								
04.21.04.02 PRO-P: Partisipasi dan Penyelenggaraan *Event*/Festival/Kompetisi Olahraga Regional dan Internasional								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	01 - Meningkatnya budaya berolahraga di Masyarakat	01 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	persen	25,92 (2021)	36,71	47,50		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.22.01 KP: Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Penyandang Disabilitas	01 - Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga melalui pengembangan olahraga pendidikan dan penyandang disabilitas	01 - Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir	persen	48,76 (2021)	69,06	85,36	01 - Transformasi Sosial	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	persen	8,24 (2021)	11,67	15,10		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.22.01.01 PRO-P: Pengembangan Olahraga Pendidikan								
04.22.01.02 PRO-P: Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
04.22.02 KP: Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Industri	01 - Meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga dan industri olahraga	01 - Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga	persen	100	100	100	01 - Transformasi Sosial	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun	persen	3,29	3,59	4,75		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.22.02.01 PRO-P: Pengembangan Olahraga Masyarakat								
04.22.02.02 PRO-P: Pengembangan Industri Olahraga								

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

PRIORITAS NASIONAL 5: MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05 PN: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	01 - Rasio PDB Industri Pengolahan	persen	18,67 (2023)	20,80	21,90		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	02 - Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	01 - Biaya logistik	persen PDB	14,29 (2022)	13,52	12,50		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Pembentukan modal tetap bruto	persen PDB	29,3 (2023)	29,4	29,9		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		03 - Ekspor barang dan jasa	persen PDB	21,7 (2023)	21,7	22,6		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya Saing industri pengolahan prioritas	01 - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	persen	4,64 (2023)	5,50	8,14		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.01 KP: Pengembangan Hilirisasi Nikel	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri nikel	01 - Kapasitas produksi industri olahan nikel	juta ton/tahun	27,44	33,64	33,74	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi nikel	juta rupiah	113.700.000	44.100.000	108.210.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.01.01 PRO-P: Pengembangan Industri *Stainless Steel*								
05.01.01.02 PRO-P: Pengembangan Industri *Nickel Sulfate*, Katoda, dan *Battery Precursor* Berbasis Nikel								
05.01.01.03 PRO-P: Pengembangan Industri *Battery Pack* Berbasis NMC (Nikel-Mangan-Kobalt)								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.01.04 PRO-P: Tata Kelola Industri Nikel serta Ketersediaan Bahan Baku dan Energi								
05.01.01.05 PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Nikel								
05.01.01.06 PRO-P: Harmonisasi Kebijakan Industri Nikel								
05.01.02 KP: Pengembangan Hilirisasi Tembaga	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri tembaga	01 - Kapasitas produksi industri olahan tembaga	ribu ton/tahun	375	1.195	1.195	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi tembaga	juta rupiah	45.720.000	45.933.000	55.132.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.02.01 PRO-P: Tata Kelola Industri Tembaga dan Ketersediaan Bahan Baku								
05.01.02.02 PRO-P: Pengembangan Industri Hilir/Antara Olahan Tembaga								
05.01.02.03 PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Tembaga								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.03 KP: Pengembangan Hilirisasi Bauksit	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri bauksit	01 - Kapasitas produksi industri olahan Bauksit	juta ton/tahun	5,02	6,27	17,47	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi bauksit	juta rupiah	10.790.000	11.782.000	16.752.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.03.01 PRO-P: Tata Kelola Industri dan Ketersediaan Bahan Baku Industri Bauksit								
05.01.03.02 PRO-P: Pengembangan Industri Hilir/Antara Olahan Bauksit								
05.01.03.03 PRO-P: Dekarbonasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Bauksit								
05.01.03.04 PRO-P: Harmonisasi Kebijakan Industri Bauksit								
05.01.04 KP: Pengembangan Hilirisasi Timah	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri timah	01 - Kapasitas produksi industri olahan timah	ribu ton/tahun	136,9	142,1	257,3	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi timah	juta rupiah	500.000	510.000	550.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.04.01 PRO-P: Tata Kelola Industri dan Ketersediaan Bahan Baku Industri Timah								
05.01.04.02 PRO-P: Peningkatan Penerapan Standardisasi di Industri Timah								
05.01.04.03 PRO-P: Peningkatan Adopsi Teknologi Tinggi untuk Pengolahan Timah								
05.01.04.04 PRO-P: Dekarbonasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Timah								
05.01.04.05 PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Produk dan Daya Saing Produk Timah di Pasar Domestik dan Global								
05.01.05 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas dan diversifikasi kelapa sawit	01 - Produksi kelapa sawit	ton	235.421.494 (2023)	239.646.870	257.074.690	02 - Transformasi Ekonomi	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Ragam produk hilir sawit	produk	193	208	250		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Produksi bahan baku (CPO dan CPKO)	ton/hektar	51.794.263 (2022)	53.021.870	56.877.775		018 - Kementerian Pertanian
		04 - Rasio ekspor produk hilir kelapa sawit terhadap bahan baku	persen	92,0	92,3	93,7		019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi kelapa sawit	juta rupiah	44.090.000	1.489.335	2.297.112		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.05.01 PRO-P: Peningkatan Produktivitas Kebun Kelapa Sawit dan Kualitas Bahan Baku								
05.01.05.02 PRO-P: *Sustainability* dan *Traceability*								
05.01.05.03 PRO-P: Pengembangan Industri *Biofuel*								
05.01.05.04 PRO-P: Pengembangan Industri Oleokimia								
05.01.05.05 PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Sawit								
05.01.05.06 PRO-P: *Rebranding* Produk Sawit Indonesia yang Berkelanjutan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.06 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa	01 - Produktivitas kelapa	ton/hektar	1,12 (2022)	1,13	1,21	02 - Transformasi Ekonomi	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Produksi kelapa	ton	2.867.054	2.880.690	2.936.021		018 - Kementerian Pertanian
		03 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi kelapa	juta rupiah	4.492.915	392.210	708.343		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		04 - Utilisasi industri pengolahan kelapa	persen	40	55	75		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.06.01 PRO-P: Perbaikan Data Perkelapaan (Budi Daya dan Pengolahan)								
05.01.06.02 PRO-P: Peningkatan Produksi dan Penyebaran Benih Unggul								
05.01.06.03 PRO-P: Peningkatan Produktivitas Kelapa								
05.01.06.04 PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Produk dan Daya Saing Produk								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.06.05 PRO-P: Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa								
05.01.06.06 PRO-P: Peningkatan Investasi Industri Pengolahan Kelapa								
05.01.06.07 PRO-P: Integrasi Rantai Pasok di Dalam Negeri dan Ekspor								
05.01.06.08 PRO-P: Peningkatan Riset dan Inovasi Kelapa								
05.01.07 KP: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri rumput laut	01 - Volume produksi rumput laut	juta ton	10,76 (2023)	11,64	14,14	02 - Transformasi Ekonomi	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi rumput laut	juta rupiah	230.000	510.000	607.501		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		03 - Utilisasi industri pengolahan rumput laut	persen	49,51	53,76	70,76		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.07.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Bahan Baku melalui Peningkatan Produktivitas Budi Daya Rumput Laut								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.07.02 PRO-P: Pengembangan Industri dan Hilirisasi Rumput Laut								
05.01.07.03 PRO-P: Penelitian dan Pengembangan Budi Daya Rumput Spesies Baru dan Inovasi Teknologi untuk Diversifikasi Produk Rumput Laut (Karagenan, Agar-Agar, Biostimulan, Nutraseutikal, Pakan Ternak)								
05.01.07.04 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Kelembagaan								
05.01.07.05 PRO-P: Fasilitasi Pembiayaan dan Investasi								
05.01.08 KP: Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong	01 - Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Diversifikasi Sagu dan Singkong	01 - Produksi sagu	ton	385.905 (2022)	393.623	478.451		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Kapasitas produksi pati sagu	ton/tahun	60.000	100.000	320.000		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Produksi ubi kayu	ton	16.764.227	17.270.926	18.330.731		018 - Kementerian Pertanian
		04 - Produktivitas sagu	ton/hektar	3,08 (2022)	3,12	3,19		018 - Kementerian Pertanian
		05 - Produktivitas ubi kayu	ton/hektar	27,11 (2023)	27,81	29,56		018 - Kementerian Pertanian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.08.01 PRO-P: Jaminan Kepastian Bahan Baku Sagu dan Singkong								
05.01.08.02 PRO-P: Pengembangan Industri Hilir Sagu dan Singkong								
05.01.08.03 PRO-P: Fasilitasi Akses Pasar Produk Olahan Sagu dan Singkong								
05.01.09 KP: Pengembangan Industri Kimia	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah industri kimia	01 - Kapasitas produksi industri kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batubara	ribu ton	59.783,45	60.234,97	79.668,38	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Pertumbuhan PDB bahan kimia dan barang dari bahan kimia	persen	-0,98 (2023)	6,08	7,34		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi minyak bumi	juta rupiah	17.460.000,00	34.453.998,13	56.010.103,68		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		04 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi gas bumi	juta rupiah	16.114.108,34	20.234.887,79	32.894.822,80		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.09.01 PRO-P: Mega Proyek Industri Kimia Dasar								
05.01.09.02 PRO-P: Revitalisasi Industri Pupuk untuk Mendukung Swasembada Pangan								
05.01.09.03 PRO-P: Gasifikasi Batubara								
05.01.09.04 PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Kimia								
05.01.09.05 PRO-P: Tata Kelola Kebijakan Pengembangan Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam								
05.01.09.06 PRO-P: Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam								
05.01.09.07 PRO-P: Pengembangan Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam								
05.01.10 KP: Pembangunan Industri Semikonduktor	01 - Terwujudnya pertumbuhan industri semikonduktor	01 - Pertumbuhan PDB industri barang logam: komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik	persen	13,67 (2023)	7,50	11,42	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi pasir silika	juta rupiah	1.290.000	1.419.000	2.076.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.10.01 PRO-P: Penyiapan Rantai Pasok Industri Semikonduktor								
05.01.10.02 PRO-P: Peningkatan SDM Industri Semikonduktor								
05.01.10.03 PRO-P: Riset dan Pengembangan Semikonduktor								
05.01.11 KP: Pengembangan Industri Kosmetik dan Farmasi	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri kosmetik dan farmasi	01 - Pertumbuhan PDB industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional	persen	1,85 (2023)	11,48	11,86	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri	persen	43	50	80		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.11.01 PRO-P: Penguatan Industri Bahan Baku Kosmetik dan Farmasi								
05.01.11.02 PRO-P: Pemanfaatan PBJ Pemerintah untuk Utilisasi Kapasitas Industri Farmasi								
05.01.11.03 PRO-P: Harmonisasi dan Pemenuhan Standar Internasional								
05.01.11.04 PRO-P: Implementasi Perpres Jamu								
05.01.11.05 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi serta Adopsi Teknologi								
05.01.11.06 PRO-P: *Branding* Kosmetik Halal untuk Perluasan Pasar Ekspor								
05.01.11.07 PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular di Industri Kosmetik dan Farmasi								
05.01.12 KP: Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	01 - Terwujudnya pertumbuhan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	01 - Persentase produksi kendaraan listrik roda empat terhadap total produksi kendaraan roda empat	persen	0,94 (2023)	1,00	1,4	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.12.01 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok Industri di dalam Negeri (termasuk IKM)								
05.01.12.02 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Pengisian Daya								
05.01.12.03 PRO-P: Pengembangan Ekosistem Industri EV								
05.01.12.04 PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular pada Industri Baterai								
05.01.13 KP: Pengembangan Industri Dirgantara	01 - Terwujudnya pertumbuhan industri dirgantara	01 - Utilisasi industri pesawat terbang dan perlengkapannya	persen	50	60	70	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.13.01 PRO-P: Penguatan Industri Pesawat Terbang, Komponen, dan Rantai Pasok Kedirgantaraan								
05.01.13.02 PRO-P: Peningkatan SDM, Riset dan Inovasi Kedirgantaraan								
05.01.13.03 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kedirgantaraan								
05.01.13.04 PRO-P: Peningkatan Jasa Kedirgantaraan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.13.05 PRO-P: Pengembangan dan Pemanfaatan Satelit								
05.01.14 KP: Pengembangan Industri Mesin dan Perlengkapan	01 - Terwujudnya peningkatan daya saing industri mesin dan perlengkapan	01 - Pertumbuhan PDB industri mesin dan perlengkapan	persen	-0,03 (2023)	4,00	8,70	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri	persen	56	60	75		024 - Kementerian Kesehatan
05.01.14.01 PRO-P: Pengembangan Industri EBT								
05.01.14.02 PRO-P: Pengembangan Industri Alat Kesehatan								
05.01.14.03 PRO-P: Pengembangan Industri Alat Pertanian								
05.01.14.04 PRO-P: Pengembangan Industri Alat Berat dan Mesin Perkakas								
05.01.14.05 PRO-P: Adopsi Teknologi, *Smart Manufacturing*, dan Pemanfaatan Riset/Inovasi di Industri Mesin dan Perlengkapan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.15 KP: Peningkatan Industri Makanan dan Minuman	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri padat karya terampil pada industri makanan minuman	01 - Pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman	persen	4,47 (2023)	5,43	8,00	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.15.01 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok IKM dan Jaminan Ketersediaan Bahan Baku/Penolong di Industri Makanan dan Minuman								
05.01.15.02 PRO-P: Peningkatan Penerapan Standardisasi di Industri Makanan dan Minuman								
05.01.15.03 PRO-P: Peningkatan Adopsi Teknologi dan Pemanfaatan Riset/Inovasi Industri Makanan dan Minuman								
05.01.15.04 PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular dan Industri Hijau di Industri Makanan dan Minuman								
05.01.15.05 PRO-P: Fasilitasi Pengembangan Industri dan Peningkatan Daya Saing Produk Makanan dan Minuman								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.16 KP: Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri tekstil dan produk tekstil	01 - Pertumbuhan PDB industri tekstil dan pakaian jadi	persen	-1,98 (2023)	3,50	6,32	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Produktivitas tenaga kerja industri TPT	persen	55,29	60,34	79,76		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Penyerapan tenaga kerja industri TPT	orang	3.975.905	3.918.787	4.072.465		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.16.01 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok								
05.01.16.02 PRO-P: Penguatan SDM dan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Kondusif								
05.01.16.03 PRO-P: Penyediaan Energi Bersih dan Terbarukan yang Andal dan Bersaing								
05.01.16.04 PRO-P: Adopsi Teknologi 4.0 dan Teknologi Rendah Emisi								
05.01.16.05 PRO-P: Optimalisasi Riset dan Inovasi								
05.01.16.06 PRO-P: Peningkatan Akses terhadap Lembaga Pembiayaan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.16.07 PRO-P: Pengembangan *Sustainable Textile* dan Tekstil Budaya Lokal								
05.01.16.08 PRO-P: Penguatan *Branding* Produk Tekstil dan Peningkatan Ekspor								
05.01.16.09 PRO-P: Peningkatan Pangsa Pasar di *e-Commerce* dan Pemanfaatan PBJ								
05.01.16.10 PRO-P: Kebijakan Tata Niaga Impor dan Pemberantasan Impor Ilegal								
05.01.17 KP: Pengembangan Industri Alas Kaki	01 - Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Industri Alas Kaki	01 - Pertumbuhan PDB industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki	persen	-0,34 (2023)	3,80	6,20	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.17.01 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok dan Kualitas Bahan Baku								
05.01.17.02 PRO-P: Adopsi Teknologi di Industri Alas Kaki untuk Peningkatan Efisiensi								
05.01.17.03 PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular di Industri Alas Kaki								
05.01.17.04 PRO-P: Fasilitasi Peningkatan Daya Saing dan Ekspor Industri Alas Kaki								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.18 KP: Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas dan daya saing industri logam dasar besi dan baja	01 - Pertumbuhan PDB industri logam dasar	persen	14,17 (2023)	11,49	14,90	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Utilisasi industri logam dasar	persen	83,14 (2023)	77	85		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi industri logam dasar besi dan baja	juta rupiah	9.600.000	10.166.000	12.784.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.18.01 PRO-P: Ketersediaan Bahan Baku Industri Logam Dasar yang Berkualitas dan Kompetitif								
05.01.18.02 PRO-P: Kepastian Pasokan dan Harga Energi untuk Industri Logam Dasar								
05.01.18.03 PRO-P: Peningkatan Utilisasi Kapasitas Terpasang Industri Besi-Baja								
05.01.18.04 PRO-P: Pengembangan Industri *Special Steel*								
05.01.18.05 PRO-P: Penerapan Dekarbonisasi Industri di Industri Logam Dasar								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.01.18.06 PRO-P: Optimalisasi Penerapan Standardisasi di Industri Logam Dasar								
05.01.19 KP: Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Terwujudnya peningkatan kemampuan jasa industri dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan	01 - Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional	persen	2,72 (2016)	3,12	3,35	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.19.01 PRO-P: Tata Kelola Kebijakan Jasa Industri								
05.01.19.02 PRO-P: Pendampingan Pelaku Jasa Industri								
05.01.19.03 PRO-P: Fasilitasi Kemitraan Jasa Industri								
05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	01 - Terwujudnya aglomerasi industri di KI/KEK prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru	01 - Rasio PDRB industri pengolahan di provinsi KI/KEK prioritas terhadap PDB industri pengolahan	persen	47,92 (2023)	48,06	48,57		019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.01 KP: Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KEK Arun Lhokseumawe	01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe	triliun rupiah	0,55	0,80	2,65	02 - Transformasi Ekonomi	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.02.01.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.01.02 PRO-P: Perizinan KEK Arun Lhokseumawe								
05.02.01.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.01.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.01.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.02 KP: Pengembangan KEK Sei Mangkei	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI/KEK Sei Mangkei	01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei	triliun rupiah	5,50	6,03	12,22	02 - Transformasi Ekonomi	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.02.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.02.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi, Perumahan, Pengolahan Persampahan/Limbah, Air Bersih)								
05.02.02.06 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.02.07 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.02.08 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.03 KP: Pengembangan KEK Galang Batang	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI/KEK Galang Batang	01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang	triliun rupiah	2,40	13,80	13,20	02 - Transformasi Ekonomi	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.02.03.01 PRO-P: Perizinan KI/KEK Galang Batang								
05.02.03.02 PRO-P: Penataan Ruang KI/KEK Galang Batang								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.03.04 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.03.05 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Energi								
05.02.03.06 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.03.07 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.03.08 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.05 KP: Pengembangan KEK Gresik	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI/KEK JIIPE Gresik	01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik	triliun rupiah	21,70	22,80	25,22	02 - Transformasi Ekonomi	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.02.05.01 PRO-P: Penataan Ruang KEK Gresik								
05.02.05.03 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.05.04 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.05.05 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.05.06 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.06 KP: Pengembangan KI Bintan Inti Industrial Estate	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Bintan Inti Industrial Estate	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Bintan Inti Industrial Estate	triliun rupiah	1,65	1,73	4,99	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.06.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.06.04 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi)								
05.02.06.05 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.06.06 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.06.07 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.07 KP: Pengembangan KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	triliun rupiah	5,99	5,99	6,22	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.07.01 PRO-P: Penataan Ruang KI Krakatau Industrial Estate Cilegon								
05.02.07.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.07.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.07.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.07.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.08 KP: Pengembangan KIT Wilmar	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KIT Wilmar	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KIT Wilmar	triliun rupiah	13,02	13,14	13,55	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.08.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.08.02 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.08.03 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.08.04 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.09 KP: Pengembangan KIT Batang	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KIT Batang	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KIT Batang	triliun rupiah	3,77	4,14	5,32	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.09.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.09.02 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan dan Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.09.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.09.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.09.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.10 KP: Pembangunan KI Seafer	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Seafer	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Seafer	triliun rupiah	0,73	0,73	2,46	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.10.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.10.02 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Energi								
05.02.10.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.10.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.10.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.10.06 PRO-P: Perizinan KI Seafer								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.11 KP: Pembangunan KI iSentra @Lamongan	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI iSentra @Lamongan	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI iSentra @Lamongan	triliun rupiah	1,18	1,37	1,97	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.11.01 PRO-P: Perizinan KI iSentra @Lamongan								
05.02.11.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.11.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana pendukung (Energi, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.11.04 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.11.05 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.11.06 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.12 KP: Pembangunan KI Ngawi	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Ngawi	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Ngawi	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,03	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.12.01 PRO-P: Perizinan KI Ngawi								
05.02.12.02 PRO-P: Penataan Ruang KI Ngawi								
05.02.12.04 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.12.05 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi dan Air Bersih)								
05.02.12.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.12.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.12.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.13 KP: Pengembangan KI KBS (Ketapang Bangun Sarana)	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI KBS (Ketapang Bangun Sarana)	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI KBS (Ketapang Bangun Sarana)	triliun rupiah	2,22	2,31	2,59	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.13.01 PRO-P: Penataan Ruang dan Fasilitasi Perizinan untuk Perluasan Kawasan								
05.02.13.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.13.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.13.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.13.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.13.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.14 KP: Pengembangan KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	triliun rupiah	2,24	4,30	10,91	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.14.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.14.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.14.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.14.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.14.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.15 KP: Pembangunan KI Indonesia Pomalaa Industry Park	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park	triliun rupiah	1,05	1,05	7,29	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.15.01 PRO-P: Perizinan KI Indonesia Pomalaa Industry Park								
05.02.15.02 PRO-P: Pengembangan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.15.03 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan								
05.02.15.04 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.15.08 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.15.09 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.15.10 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.16 KP: Pengembangan KI Konawe	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Konawe	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Konawe	triliun rupiah	305,94	305,96	306,87	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.16.01 PRO-P: Penataan Ruang KI Konawe								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.16.03 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.16.04 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Kesehatan, Perumahan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.16.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.16.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.16.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.17 KP: Pengembangan KI Stardust	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Stardust	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Stardust	triliun rupiah	0,33	0,48	0,98	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.17.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.17.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi, Perumahan, Kesehatan, Air Bersih dan Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.17.08 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.17.09 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.17.10 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.18 KP: Pembangunan KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	triliun rupiah	6,99	9,16	16,15	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.18.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.18.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.18.06 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.18.07 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.18.08 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.19 KP: Pengembangan KI Morowali	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Morowali	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Morowali	triliun rupiah	466,71	467,46	469,89	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.19.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.19.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.19.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.19.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.19.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.20 KP: Pembangunan KI Sumbawa Barat	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Sumbawa Barat	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Sumbawa Barat	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,23	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.20.02 PRO-P: Perizinan KI Sumbawa Barat								
05.02.20.03 PRO-P: Penataan Ruang KI Sumbawa Barat								
05.02.20.05 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.20.06 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.20.10 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.20.11 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.20.12 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.21 KP: Pengembangan KI Pulau Obi	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Pulau Obi	01 - Nilai Investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Pulau Obi	triliun rupiah	0,01	2,53	10,62	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.21.03 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.21.04 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/limbah)								
05.02.21.08 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.21.09 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.21.10 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.22 KP: Pengembangan KI Weda Bay	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Weda Bay	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Weda Bay	triliun rupiah	346,33	349,49	359,67	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.22.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.22.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.22.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.22.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.22.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.23 KP: Pembangunan KI Buli	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Buli	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Buli	triliun rupiah	0,01	0,21	0,83	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.23.01 PRO-P: Pengembangan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.23.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan								
05.02.23.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.23.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.23.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.23.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.24 KP: Pembangunan KI Fakfak	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Fakfak	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Fakfak	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,01	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.24.02 PRO-P: Perizinan KI Fakfak								
05.02.24.03 PRO-P: Penataan Ruang KI Fakfak								
05.02.24.05 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi								
05.02.24.06 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih dan Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.24.10 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.24.11 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.02.24.12 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								
05.02.25 KP: Pembangunan KI Takalar	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Takalar	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Takalar	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,41	02 - Transformasi Ekonomi	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.25.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan								
05.02.25.02 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih dan Pengolahan Persampahan/Limbah)								
05.02.25.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan								
05.02.25.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok								
05.02.25.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.03 PP: Optimalisasi *Backbone* Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	01 - Menguatnya kinerja layanan konektivitas *backbone* dan sistem logistik nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global	01 - Biaya transportasi logistik terhadap PDB	persen	8,79 (2022)	8,27	7,56		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan	hari	1,8	1,7	1,2		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.03.01 KP: Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan *Backbone*, dan Sarana Penunjang Logistik	01 - Menguatnya infrastruktur konektivitas, layanan b*ackbone*, dan sarana penunjang logistik	01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan darat selain angkutan rel terhadap PDB	persen	2,66	2,50	2,29		022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Biaya transportasi logistik pada angkutan laut terhadap PDB	persen	1,02	0,96	0,87		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB	persen	0,89	0,84	0,77		022 - Kementerian Perhubungan
		04 - Biaya transportasi logistik pada angkutan rel terhadap PDB	persen	0,04	0,03	0,03		022 - Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Biaya transportasi logistik pada angkutan sungai danau dan penyeberangan terhadap PDB	persen	0,10	0,09	0,08		022 - Kementerian Perhubungan
		06 - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	lokasi (kumulatif)	6	7	12		022 - Kementerian Perhubungan
		07 - Kinerja bongkar muat pada pelabuhan utama petikemas	*box/ship*/jam	21 (2023)	31	50		022 - Kementerian Perhubungan
		08 - Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (kumulatif)	3 (2023)	9	5		022 - Kementerian Perhubungan
		09 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama	juta ton	1.391	1.419	1.536		022 - Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.03.01.01 PRO-P: Standarisasi Fasilitas Pelabuhan, Bandara, serta Terminal								
05.03.01.02 PRO-P: Pengembangan Konektivitas Jalan dan Kereta Api Terintegrasi dengan Simpul Utama dan *Hinterland*								
05.03.01.03 PRO-P: Penyediaan Layanan Angkutan Logistik								
05.03.01.04 PRO-P: Tata Kelola Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Logistik								
05.03.01.05 PRO-P: Pengembangan Sarana Penunjang Logistik, termasuk Rantai Berpendingin								
05.03.02 KP: Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik	01 - Menguatnya integrasi pada sistem dan proses bisnis logistik serta dan digitalisasi pada layanan logistik	01 - Waktu penahanan (*dwell time*) di pelabuhan selama fase impor	hari	2,85	2,90–2,85	2,66–2,60		015 - Kementerian Keuangan
05.03.02.01 PRO-P: Penguatan Integrasi pada Sistem dan Proses Bisnis Logistik								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.03.02.02 PRO-P: Percepatan Adopsi Teknologi Digital pada Layanan Penyedia Jasa Logistik								
05.03.03 KP: Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik	01 - Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik dalam negeri	01 - Indeks peningkatan SDM transportasi		110,10	85,5	87,5		022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Pertumbuhan sektor pos logistik	persen	9,16	9,5	11,5		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
05.03.03.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia di Bidang Logistik								
05.03.03.02 PRO-P: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik								
05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	01 - Meningkatnya realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global	01 - Nilai PMA dan PMDN	triliun rupiah	1.418,9 (2023)	1.905,6	3.414,8		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.04.01 KP: Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi	01 - Meningkatnya investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi	01 - Nilai PMA/PMDN sektor sekunder	triliun rupiah	596,3 (2023)	855,9	1.718,3		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		02 - Persentase realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)	(persen total nilai PMA/PMDN)	47,6 (2023)	48,3	49,7		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		03 - Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan	triliun rupiah	253,4 (2023)	307,1	507,2		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		04 - Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi	triliun rupiah	375,4 (2023)	521,4	901,6		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.04.01.01 PRO-P: Percepatan Transformasi Digital pada Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha di Sektor Industri dan Non Industri								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.04.01.02 PRO-P: Penyusunan Informasi Investasi Proyek Prioritas Strategis pada Sektor-Sektor Pendorong Transformasi Ekonomi								
05.04.01.03 PRO-P: Transformasi Kebijakan Ekosistem Investasi dan Hilirisasi yang Terintegrasi								
05.04.01.04 PRO-P: Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Investasi dalam Rangka Penciptaan Pusat-Pusat Pertumbuhan								
05.04.01.05 PRO-P: Peningkatan Kemitraan Usaha Nasional untuk Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM								
05.04.01.06 PRO-P: Penguatan Transformasi Digital melalui Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi								
05.04.01.07 PRO-P: Peningkatan Pelayanan dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah Pusat-Pusat								
05.04.02 KP: Peningkatan Investasi yang Berorientasi Ekspor dan mendukung Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	01 - Meningkatnya Investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global	01 - Nilai PMA berorientasi ekspor	triliun rupiah	115,4 (2023)	171,6	367,4		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		02 - Nilai PMDN berorientasi ekspor	triliun rupiah	41,2 (2023)	60,4	126,4		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.04.02.01 PRO-P: Percepatan Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha untuk Investasi Luar Negeri (FDI/PMA) Strategis								
05.04.02.02 PRO-P: Peningkatan Fasilitasi *Outward Investment* dan Penguatan Kerjasama Penanaman Modal untuk Pengembangan Rantai Nilai Global								
05.04.02.03 PRO-P: Penguatan Promosi Penanaman Modal untuk Mendorong Hilirisasi dan Industrialisasi di Pusat-Pusat Pertumbuhan								
05.04.03 KP: Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur Konektivitas dan Logistik	01 - Meningkatnya investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik	01 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	persen	51,5 (2023)	52,1	53,2		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.04.03.01 PRO-P: Percepatan Strategi dan Rencana Proyek Penanaman Modal dalam Rangka Penciptaan Pusat-Pusat Pertumbuhan								
05.04.03.02 PRO-P: Peningkatan Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN pada Forum Bisnis dan Investasi Internasional								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	01 - Meningkatnya perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor serta penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global	01 - Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia	persen	1,11 (2023)	1,12	1,43		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Nilai ekspor jasa Indonesia	miliar USD	23,10 (2022)	29,93	42,24		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	persen	0,81 (2022)	0,99	1,20		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah	triliun rupiah	1.622 (2022)	1.803	3.013		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.01 KP: Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global1	01 - Meningkatnya nilai pembelian perdagangan antar wilayah per pulau	01 - Nilai pembelian perdagangan antarwilayah di Pulau Sumatera	triliun rupiah	205 (2022)	217	267		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Nilai pembelian perdagangan antarwilayah di Pulau Jawa	triliun rupiah	1.059 (2022)	1.158	2.074		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Nilai pembelian perdagangan antarwilayah di Pulau Bali-Nusra	triliun rupiah	51 (2022)	93	136		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Nilai pembelian perdagangan antarwilayah di Pulau Kalimantan	triliun rupiah	121 (2022)	144	222		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Nilai pembelian perdagangan antarwilayah di Pulau Sulawesi	triliun rupiah	135 (2022)	138	237		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Nilai pembelian perdagangan antarwilayah di Pulau Papua-Maluku	triliun rupiah	51 (2022)	55	77		090 - Kementerian Perdagangan
	02 - Meningkatnya kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Provinsi per pulau	01 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera	persen	11,63 (2022)	12,10	12,75		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa	persen	12,48 (2022)	13,31	14,39		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Bali-Nusra	persen	9,23 (2022)	10,06	11,16		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Kalimantan	persen	10,12 (2022)	10,65	11,35		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sulawesi	persen	10,78 (2022)	11,98	13,61		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Papua-Maluku	persen	10,63 (2022)	11,95	13,75		090 - Kementerian Perdagangan
	03 - Meningkatnya nilai ekspor barang per pulau	01 - Nilai ekspor barang di Pulau Sumatera	miliar rupiah	1.159.400 (2022)	1.352.500	2.158.700		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Nilai ekspor barang di Pulau Jawa	miliar rupiah	1.542.700 (2022)	1.953.800	3.014.500		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Nilai ekspor barang di Pulau Bali-Nusra	miliar rupiah	51.700 (2022)	76.200	124.700		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Nilai ekspor barang di Pulau Kalimantan	miliar rupiah	961.500 (2022)	1.127.400	1.974.300		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Nilai ekspor barang di Pulau Sulawesi	miliar rupiah	429.700 (2022)	551.400	870.900		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Nilai ekspor barang di Pulau Papua-Maluku	miliar rupiah	257.700 (2022)	321.200	542.000		090 - Kementerian Perdagangan
	04 - Meningkatnya diversifikasi ekspor per pulau	01 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Sumatera		0,42 (2022)	0,30	0,22		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Jawa		0,09 (2022)	0,05	0,04		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Bali-Nusra		0,37 (2022)	0,27	0,17		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Kalimantan		0,60 (2022)	0,45	0,32		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Sulawesi		0,53 (2022)	0,39	0,28		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		06 - Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Papua-Maluku		0,74 (2022)	0,60	0,50		090 - Kementerian Perdagangan
	05 - Meningkatnya jumlah usaha *e-commerce* per pulau	01 - Jumlah usaha *e-commerce* di Pulau Sumatera	unit (kumulatif)	330.700 (2022)	482.800	799.700		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Jumlah usaha *e-commerce* di Pulau Jawa	unit (kumulatif)	2.288.300 (2022)	3.340.800	5.533.100		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Jumlah usaha *e-commerce* di Pulau Bali-Nusra	unit (kumulatif)	125.300 (2022)	183.000	303.100		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Jumlah usaha *e-commerce* di Pulau Kalimantan	unit (kumulatif)	132.000 (2022)	192.700	319.300		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Jumlah usaha *e-commerce* di Pulau Sulawesi	unit (kumulatif)	109.700 (2022)	160.100	265.300		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Jumlah usaha *e-commerce* di Pulau Papua-Maluku	unit (kumulatif)	10.100 (2022)	14.700	24.400		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	06 - Terciptanya stabilisasi harga komoditas pangan pokok antarwaktu dan antarwilayah	01 - Koefisien variasi (*coefficient of variation*) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antarwaktu dan antarwilayah	persen	- (indikator baru)	20–25	10–15		125 - Badan Pangan Nasional
05.05.01.001 PRO-P: Integrasi Informasi Keunggulan Daerah serta Data Permintaan dan Penawaran setiap Daerah								
05.05.01.002 PRO-P: Promosi Antardaerah untuk Mendorong Perdagangan Domestik dan Antardaerah								
05.05.01.003 PRO-P: Kerjasama Antardaerah untuk Mendorong Perdagangan Domestik dan Antardaerah								
05.05.01.004 PRO-P: Peningkatan Kualitas SDM Daerah untuk Mendorong Ekspor								
05.05.01.005 PRO-P: Stabilisasi Harga Bahan Pangan dengan Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Antardaerah								
05.05.01.006 PRO-P: Pelatihan Ekspor dan Adaptasi Bisnis *E-Commerce* bagi Pelaku UMKM di Daerah								
05.05.01.007 PRO-P: Pendampingan Pelaku Usaha di Daerah untuk mendorong Perdagangan Domestik, Antar Daerah dan Ekspor								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.05.01.008 PRO-P: Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah								
05.05.01.009 PRO-P: Kebijakan Perdagangan untuk Mendorong Digitalisasi Perdagangan								
05.05.02 KP: Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi	01 - Meningkatnya pangsa ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi di pasar global	01 - Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia	persen	22,67 (2022)	24,98	27,16		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia	persen	0,65 (2022)	0,72	0,97		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (*Environmental Goods*)	miliar USD	8,59 (2022)	17,09	42,76		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	persen	7,9	8,6	11,4		019 - Kementerian Perindustrian
05.05.02.001 PRO-P: Pengembangan Pasar Ekspor Indonesia								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.05.02.002 PRO-P: Promosi Ekspor Produk Teknologi Menengah Tinggi								
05.05.02.003 PRO-P: Fasilitasi Sertifikasi Produk dan Perlindungan HKI untuk Mendorong Ekspor Barang dan Jasa								
05.05.02.004 PRO-P: Pendampingan Dalam Rangka Mendorong Perdagangan Hijau yang Berkelanjutan								
05.05.02.005 PRO-P: Optimalisasi *Market Intelligence* untuk Produk Ekspor Barang dan Jasa								
05.05.02.006 PRO-P: Pengamanan Pasar Ekspor								
05.05.03 KP: Peningkatan Ekspor Produk Industri Penyerap Tenaga Kerja Tinggi	01 - Meningkatnya pangsa ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi	01 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia	persen	1,35 (2022)	1,43	1,63		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor	pelaku usaha (kumulatif)	20.533 (2022)	22.354	25.000		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Persentase usaha *e-commerce* yang melakukan ekspor	persen	0,85 (2022)	1,06	1,41		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.05.03.001 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Eksportir								
05.05.03.002 PRO-P: Promosi Ekspor Produk UMKM dan Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi								
05.05.03.003 PRO-P: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Sistem Pengupahan Produk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)								
05.05.03.004 PRO-P: Integrasi Informasi dan Mekanisme Ekspor								
05.05.03.005 PRO-P: *Business Matching* Untuk Mendorong Kemitraan Dalam Rantai Nilai Global								
05.05.03.006 PRO-P: Fasilitasi Pembiayaan dan Asuransi Perdagangan Internasional								
05.05.04 KP: Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA	01 - Meningkatnya pangsa ekspor produk pertanian, perikanan dan industri berbasis SDA di pasar global	01 - Nilai ekspor hasil perikanan	miliar USD	5,63 (2023)	6,25	8,50		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia	persen	2,96 (2022)	3,28	3,95		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia	persen	2,38 (2022)	2,59	3,06		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah		0,294 (2023)	0,286	0,269		019 - Kementerian Perindustrian
		05 - Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing	produk	179 (2022)	208	212		019 - Kementerian Perindustrian
		06 - Nilai ekspor rumput laut	juta USD	433,72 (2023)	574,00	898,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		07 - Proporsi ekspor produk olahan rumput laut	persen	34,31	46,5	61,3		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
05.05.04.001 PRO-P: Kebijakan dan Fasilitasi Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA								
05.05.04.002 PRO-P: Promosi Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.05.04.003 PRO-P: Kerja Sama untuk Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA								
05.05.04.004 PRO-P: Peningkatan Fasilitas Perdagangan di Kawasan Perbatasan								
05.05.05 KP: Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	01 - Meningkatnya ekspor jasa dan produk kreatif	01 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi	miliar USD	2,37 (2022)	2,82	4,01		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Nilai ekspor jasa bisnis lainnya	miliar USD	5,93 (2022)	8,46	10,28		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Nilai ekspor ekonomi kreatif	miliar USD	23,96 (2023)	26,44	32,94		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		04 - Nilai perdagangan komoditas digital	miliar USD	9,27 (2022)	10,86	14,25		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.05.001 PRO-P: Perluasan Akses Informasi Pasar Potensial dan *Buyer* untuk Ekspor Jasa dan Produk Kreatif								
05.05.05.002 PRO-P: Koordinasi Kebijakan dan Penyediaan Data Perdagangan Sektor Jasa dan Produk Kreatif yang Terintegrasi								
05.05.05.003 PRO-P: Perundingan Perdagangan dan Kerjasama Perdagangan Jasa								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.05.05.004 PRO-P: Penguatan SDM dan Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa								
05.05.05.005 PRO-P: Promosi Ekspor Jasa dan Produk Kreatif								
05.05.06 KP: Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif termasuk *Electric Vehicle* (EV)	01 - Meningkatnya partisipasi sektor elektronik Indonesia dalam rantai nilai regional di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dan sektor otomotif Indonesia termasuk *Electric Vehicle* (EV) dalam rantai nilai global	01 - Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	persen	42,00 (2022)	49,00	57,00		019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk *electric vehicle* (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	persen	23,00 (2022)	23,00	36,00		019 - Kementerian Perindustrian
05.05.06.001 PRO-P: Sinkronisasi SNI Produk Otomotif dan Elektronik Indonesia dengan Standar Internasional								
05.05.06.002 PRO-P: Kerja Sama untuk Penurunan Hambatan Tarif dan Non-Tarif Produk Ekspor Indonesia								
05.05.06.003 PRO-P: Pemantauan NTM yang Diterapkan Indonesia untuk Produk Otomotif dan Elektronik Indonesia								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.05.06.004 PRO-P: Penyelenggaraan Forum Bisnis dan *Business Matching* bagi Pelaku Ekspor Indonesia untuk Masuk dalam Rantai Pasok Global								
05.05.06.005 PRO-P: Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor yang Terintegrasi								
05.05.07 KP: Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	01 - Meningkatnya pemanfaatan atau utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global	01 - Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP	miliar USD	172,8 (2023)	184,9	269,1		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN	miliar USD	53,1 (2023)	56,8	82,6		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam rangka utilisasi Indonesia-EFTA CEPA	miliar USD	2,8 (2023)	3,0	4,3		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Nilai ekspor barang ke Australia dalam rangka utilisasi IA-CEPA	miliar USD	3,2 (2023)	3,4	4,9		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Nilai ekspor barang ke Jepang dalam rangka utilisasi IJEPA	miliar USD	20,8 (2023)	22,2	32,4		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		06 - Nilai ekspor barang ke UAE dalam rangka utilisasi IUAE-CEPA	miliar USD	2,6 (2023)	2,8	4,1		090 - Kementerian Perdagangan
		07 - Nilai ekspor barang ke Korea dalam rangka utilisasi IK-CEPA	miliar USD	10,3 (2023)	11,0	16,0		090 - Kementerian Perdagangan
		08 - Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka utilisasi Indonesia-Chile CEPA	miliar USD	0,31 (2023)	0,33	0,49		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.07.001 PRO-P: Sosialisasi dan Penyediaan Informasi Digital Terkait Aturan Perdagangan, Peluang Bisnis, dan Lainnya								
05.05.07.002 PRO-P: Peninjauan dan Sinkronisasi Regulasi Perdagangan dalam Negeri untuk Mengoptimalisasi Utilisasi FTA/CEPA								
05.05.07.003 PRO-P: Pengembangan *Exporter Tools* untuk Meningkatkan Kapasitas Eksportir di antaranya Informasi Pasar, Persiapan Ekspor, Strategi Pemasaran, Logistik, Akses - Manajemen Keuangan, dan Manajemen Risiko								
05.05.07.004 PRO-P: Peningkatan Jumlah dan Kapasitas dari Perwakilan Perdagangan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.05.07.005 PRO-P: Peningkatan Kesepakatan dan Proses Ratifikasi Perundingan Perdagangan								
05.05.08 KP: Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen	01 - Meningkatnya daya saing produk Indonesia terstandardisasi	01 - Persentase produk ekspor Indonesia yang ber-SNI	persen	3,109 (2023)	3,3	4,6		084 - Badan Standarisasi Nasional
		02 - Persentase produk ber-SNI	persen	10	10	20		084 - Badan Standarisasi Nasional
	02 - Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat	01 - Indeks Persaingan Usaha		4,87/7,00 (2022)	5,35/7,00	6,00/7,00		108 - Komisi Pengawas Persaingan Usaha
	03 - Meningkatnya keberdayaan konsumen	01 - Indeks Keberdayaan Konsumen		53,23 (2022)	63	75		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.08.001 PRO-P: Pengembangan Standar Nasional Produk dalam Rangka Pengamanan Pasar Domestik dan Pemenuhan Standar Pasar Ekspor								
05.05.08.002 PRO-P: Penguatan Akreditasi, Kalibrasi, Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi								
05.05.08.003 PRO-P: Percepatan Penerapan dan Pemberlakuan Secara Wajib Standar Produk dan Tata Kelola Ekosistem Standarisasi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.05.08.004 PRO-P: Penciptaan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat								
05.05.08.005 PRO-P: Pemberdayaan Konsumen								
05.06 PP: Optimalisasi Investasi Strategis Negara	01 - Meningkatnya investasi strategis negara	01 - Jumlah nilai investasi strategis negara	triliun rupiah	- (indikator baru)	100	400		Danantara
05.06.01 KP: Pengelolaan Portofolio dan Tujuan Investasi Strategis Negara	01 - Optimalisasi portofolio investasi strategis negara	01 - *Return on Investment* (ROI)	persen	- (indikator baru)	6,0	8,0		Danantara
05.06.01.01 PRO-P: Portofolio								
05.06.01.02 PRO-P: Tujuan Investasi								
05.06.02 KP: Peningkatan Investasi Strategis Negara pada Sektor Prioritas	01 - Meningkatnya investasi strategis negara pada sektor prioritas	01 - Jumlah investasi strategis negara sektor prioritas yang mencapai *financial close*	proyek	- (indikator baru)	2	10		Danantara

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
05.06.02.01 PRO-P: Pertambangan, Energi, Pangan dan Air								
05.06.02.02 PRO-P: Infrastruktur dan Perumahan								
05.06.02.03 PRO-P: Teknologi, Industri Strategis, dan Kesehatan								

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

PRIORITAS NASIONAL 6: MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06 PN: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01 - Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	01 - Proporsi penduduk kelas menengah	persen	17,13	17,50	20,00		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		02 - Tingkat kemiskinan	persen	9,03	7,0–8,0	4,5–5,0		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		03 - Tingkat kemiskinan ekstrem	persen	1,47	0,5–1,0	0		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		04 - Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	persen	9,07 (2023)	10	12		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
	02 - Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01 - Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	persen	65,25	67,00	74,00		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	03 - Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Persentase desa mandiri	persen	22,85	23,29	25,79		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	04 - Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	01 - Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	persen	56,56 (2022)	57,29	59,25		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
06.01 PP: Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi	01 - Tersedianya data dalam satu sistem yang efisien, tepat, dan efektif untuk mendukung perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan	01 - Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala	persen	30	40	80		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.01.01 KP: Tata Kelola Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	01 - Terbangunnya sistem interoperabilitas data antar Kementerian/ Lembaga	01 - Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek	persen	7	40	100	01 - Transformasi Sosial	055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
06.01.01.001 PRO-P: Pengelolaan Sistem Data								
06.01.01.002 PRO-P: *Monitoring* dan Pemutakhiran Data								
06.01.01.003 PRO-P: Pengelolaan Data dan Regulasi								
06.01.01.004 PRO-P: Integrasi Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan Data Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati								
06.01.02 KP: Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	01 - Terselenggaranya pemanfaatan data yang optimal untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional	01 - Persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT	persen	30	60	100	01 - Transformasi Sosial	055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
		02 - Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT	persen	30	60	100		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.01.02.01 PRO-P: Pemanfaatan Data Sektoral								
06.01.02.02 PRO-P: Penataan Sumber Daya Manusia								
06.01.02.03 PRO-P: Integrasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati								
06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	01 - Terwujudnya integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial yang inklusif dan adaptif dalam menghadapi bencana alam, bencana sosial, serta dampak perubahan iklim	01 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	persen	64,75 (2023)	68	85		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		02 - Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	persen	29,77 (Semester I)	32,15	43,92		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		03 - Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	jiwa/tahun	- (indikator baru)	1,5 juta	1,5 juta		027 - Kementerian Sosial

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.02.01 KP: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	01 - Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi	01 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai	persen	60 (2023)	65	80		027 - Kementerian Sosial
		02 - Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan	persen	7 (2023)	8	25		027 - Kementerian Sosial
		03 - Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera	jiwa/tahun	10 ribu	400 ribu	1,5 juta		027 - Kementerian Sosial
06.02.01.01 PRO-P: Bantuan Keluarga, Pendidikan dan Kesehatan								
06.02.01.02 PRO-P: Bantuan Energi dan Pangan								
06.02.01.03 PRO-P: Layanan Sosial dan Bantuan Kebencanaan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.02.02 KP: Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terlaksananya reformasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	persen	10,63 (Semester I)	14,01	29,02	01 - Transformasi Sosial	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		02 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	persen	52,39 (Semester I)	54,18	62,14		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		03 - Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif	rekomendasi kebijakan	3 (2023)	3	4		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
06.02.02.01 PRO-P: Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara inklusif								
06.02.02.02 PRO-P: Penguatan Program dan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.02.03 KP: Pengembangan Ekonomi Perawatan (*Care Economy*)	01 - Meluasnya pemberian layanan keperawatan	01 - Persentase lembaga kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	persen	25	28	45	01 - Transformasi Sosial	027 - Kementerian Sosial
		02 - Persentase tenaga SDM kesejahteraan sosial/pendamping perawatan yang tersertifikasi	persen	37	40	55		027 - Kementerian Sosial
06.02.03.01 PRO-P: Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain								
06.02.03.02 PRO-P: Penguatan kapasitas perawatan masyarakat								
06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif	01 - Terciptanya lapangan kerja dari peningkatan wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan	01 - Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	persen	73,8	74,1	76		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		02 - Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya	persen	4,96	14,98	53,89		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.03.01 KP: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	01 - Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah	01 - Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap	persen	3,9 (2023)	4,5	6,3	02 - Transformasi Ekonomi	150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
06.03.01.01 PRO-P: Penatakelolaan Kartu Usaha								
06.03.01.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing								
06.03.02 KP: Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	01 - Meningkatnya kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif	01 - Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	jiwa/tahun	- (indikator baru)	1.000.000	3.000.000		027 - Kementerian Sosial
06.03.02.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Kerja								
06.03.02.02 PRO-P: Penguatan Kewirausahaan Afirmatif								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.03.03 KP: Reforma Agraria	01 - Terlaksananya reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, serta meningkatkan kemandirian masyarakat penerima Tanah Obyek Reforma Agraria	01 - Persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan	persen	46,16	47,16	50,66		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang
		02 - Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria	persen	46,64	47,64	51,14		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang
		03 - Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan		0,0057	0,002	0,0227		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang
06.03.03.01 PRO-P: Pelaksanaan Penataan Aset Reforma Agraria								
06.03.03.02 PRO-P: Pelaksanaan Penataan Akses (Pemberdayaan Masyarakat) Reforma Agraria								
06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya peran Wilayah Metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	persen	44,13 (2022)	44,35	45,60		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata Wilayah Metropolitan		44,61 (2023)	44,81	45,61		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya peran perkotaan Non-Wilayah Metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	persen	6,97 (2022)	7,47	8,13		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata perkotaan Non-Wilayah Metropolitan		48,36 (2023)	48,66	49,86		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
06.04.01 KP: Pembangunan Wilayah Metropolitan	01 - Meningkatnya Peran Wilayah Metropolitan KBI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	persen	40,75 (2022)	40,93	42,09	02 - Transformasi Ekonomi	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata Wilayah Metropolitan KBI		45,86 (2023)	46,16	47,36		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya Peran Wilayah Metropolitan KTI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	persen	3,38 (2022)	3,42	3,52		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata Wilayah Metropolitan KTI		42,74 (2023)	43,04	44,24		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.04.01.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Medan								
06.04.01.02 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang								
06.04.01.03 PRO-P: Pemantapan Wilayah Metropolitan Jakarta								
06.04.01.04 PRO-P: Pemantapan Wilayah Metropolitan Bandung								
06.04.01.05 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang								
06.04.01.06 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya								
06.04.01.07 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar								
06.04.01.08 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin								
06.04.01.09 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.04.01.10 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan Manado								
06.04.02 KP: Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	01 - Meningkatnya peran perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	persen	3,83 (2022)	3,89	4,01	02 - Transformasi Ekonomi	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI		49,81 (2023)	50,11	51,31		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya peran perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	persen	3,15 (2022)	3,57	4,12		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI		47,20 (2023)	47,5	48,7		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
06.04.02.01 PRO-P: Penyiapan Perkotaan yang Berpotensi Menjadi Wilayah Metropolitan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.04.02.02 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar								
06.04.02.03 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang								
06.04.02.04 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil								
06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	01 - Mengembangkan kota berkelanjutan di dunia	01 - Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara		47,79	48,29	50,29		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	02 - Menggerakkan ekonomi Indonesia di masa depan	01 - Laju pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan	persen	5,4	5,8	8,2		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	03 - Mewujudkan simbol identitas nasional	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara		61,35	62,85	68,85		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.05.01 KP: Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	01 - Terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya	01 - Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun	ha	715,32	800–850	1.750–2.200	02 - Transformasi Ekonomi	126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara	persen	- (indikator baru)	20	100		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03 - Persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara	persen	- (indikator baru)	50	90		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		04 - Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara	persen	23	50	80		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		05 - Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan Ibu Kota Nusantara		0,65	0,74	0,87		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	02 - Terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	06 - Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	orang	- (indikator baru)	1.700–4.100	4.500–9.500		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		07 - Cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara	persen	- (indikator baru)	25	82		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
06.05.01.01 PRO-P: Perencanaan dan Penataan Ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan Sekitarnya								
06.05.01.02 PRO-P: Pembangunan Gedung/Perkantoran di Ibu Kota Nusantara								
06.05.01.03 PRO-P: Pembangunan Hunian/Rumah Tangga Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara								
06.05.01.04 PRO-P: Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Ibu Kota Nusantara								
06.05.01.05 PRO-P: Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Ibu Kota Nusantara								
06.05.01.06 PRO-P: Pemindahan ASN/Hankam ke Ibu Kota Nusantara								
06.05.01.07 PRO-P: Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Cerdas Ibu Kota Nusantara								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.05.02 KP: Pembangunan Sosial, *Superhub* Ekonomi, dan Pengelolaan Lingkungan Ibu Kota Nusantara	01 - Terwujudnya pengembangan *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitar	01 - Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah di Ibu Kota Nusantara	persen	1,58	1,88	3,00		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Realisasi nilai investasi sektor swasta di Ibu Kota Nusantara	triliun rupiah	58,41	60	100		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03 - Rencana klaster *superhub* ekonomi IKN yang disiapkan	klaster	1	1	3		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	02 - Terwujudnya pembangunan sosial dan sumberdaya manusia di Ibu Kota Nusantara	01 - Persentase masyarakat sejahtera	persen	8,91	9,50	11,50		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Persentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara	persen	55	63	87		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03 - Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) di Ibu Kota Nusantara	persen	65	70	82		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	03 - Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara	01 - Persentase pengelolaan kawasan lindung Ibu Kota Nusantara	persen	17	18	22		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara		70,72	71,22	74,44		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03 - Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara		104,00	100,80	83,10		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		04 - Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan	ha	- (indikator baru)	50	550		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
06.05.02.01 PRO-P: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Ibu Kota Nusantara								
06.05.02.02 PRO-P: Peningkatan Investasi di Ibu Kota Nusantara								
06.05.02.03 PRO-P: Pengembangan *Superhub* Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.05.02.04 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ibu Kota Nusantara								
06.05.02.05 PRO-P: Pembangunan Kesehatan di Ibu Kota Nusantara								
06.05.02.06 PRO-P: Pembangunan Pendidikan di Ibu Kota Nusantara								
06.05.02.07 PRO-P: Penyelenggaraan Kawasan Lindung dan Kehutanan Ibu Kota Nusantara								
06.05.02.08 PRO-P: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Ibu Kota Nusantara								
06.05.02.09 PRO-P: Pengembangan Kawasan Pertanian Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara								
06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	01 - Meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01 - Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	unit/tahun	769.078	360.112	3.000.000		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.06.01 KP: Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	01 - Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU	01 - Jumlah unit rumah baru yang terbangun	unit/tahun	4.311	365	30.700		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		02 - Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya	unit/tahun	150.202	34.289	250.000		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		03 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas	unit/tahun	43.008	10.500	15.000		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.01.01 PRO-P: Fasilitasi Pembangunan Rumah Baru								
06.06.01.02 PRO-P: Pengembangan Perumahan dan Permukiman								
06.06.01.03 PRO-P: Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah								
06.06.01.04 PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan pada Perumahan Tapak								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.06.02 KP: Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu	01 - Meningkatnya perumahan publik vertikal yang disediakan secara terpadu	01 - Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)	unit/tahun	1.320	1.258	5.400		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		02 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal	unit/tahun	- (indikator baru)	0	5.000		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.02.01 PRO-P: Penyediaan Hunian Publik Vertikal Milik								
06.06.02.02 PRO-P: Penyediaan Hunian Publik Vertikal Sewa								
06.06.02.03 PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan di Hunian Publik Vertikal								
06.06.03 KP: Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	01 - Meningkatnya pelaksanaan bantuan kemudahan dan fasilitasi pembiayaan perumahan	01 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	rumah tangga/tahun	570.237	324.200	419.300		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.03.01 PRO-P: Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Perumahan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.06.03.02 PRO-P: Fasilitasi dan Penyaluran Subsidi/ Bantuan Pembiayaan Perumahan								
06.06.03.03 PRO-P: Fasilitasi Kerjasama Pembiayaan Perumahan dengan Berbagai Instansi								
06.06.03.04 PRO-P: Penyiapan Proyek Kerjasama dan Investasi Perumahan								
06.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Perumahan	01 - Terciptanya ekosistem perumahan yang mendukung tersedianya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01 - Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	kab/kota	514	514	514		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	rekomendasi kebijakan	1	1	1		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.04.01 PRO-P: Implementasi Standar Keandalan Bangunan								
06.06.04.02 PRO-P: Peningkatan Peran dan Kapasitas Pelaku Pembangunan Perumahan								
06.06.04.03 PRO-P: Perlindungan Konsumen Perumahan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.06.04.04 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Hunian Publik								
06.06.04.05 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Hunian Privat								
06.06.05 KP: Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu	01 - Meningkatnya permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	01 - Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	ha/tahun	198,98	196	200		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.05.01 PRO-P: Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kota								
06.06.05.02 PRO-P: Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kawasan								
06.07 PP: Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	01 - Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Persentase desa mandiri KTI dan KBI	persen	KTI: 7,42 KBI: 15,42	KTI: 7,74 KBI: 15,55	KTI: 8,29 KBI: 17,50		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.07.01 KP: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	01 - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa	01 – Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman	persen	18,9 (2023)	22	30		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 – Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman	persen	4,77	6	12		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	25,99	26,12	26,65		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
		04 - Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	persen	24,62	24,81	25,61		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.07.01.01 PRO-P: Penguatan Pembangunan Layanan Dasar Kesehatan Desa								
06.07.01.02 PRO-P: Peningkatan Utilitas Dasar Desa								
06.07.01.03 PRO-P: Peningkatan Konektivitas Desa								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.07.02 KP: Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan Desa	01 - Meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan melalui transformasi aktivitas dan pemberdayaan ekonomi desa	01 - Persentase bagi hasil BUMDes terhadap PADes	persen	3,97	4,02	4,22		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	02 - Mengembangkan kawasan perdesaan sebagai embrio pusat pertumbuhan lokal	01 - Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status berdaya saing	kawasan	3	4	8		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	03 - Menguatkan ketahanan masyarakat desa terhadap kondisi sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan desa	01 - Persentase desa berketahanan iklim	persen	33,73	34,73	38,73		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
06.07.02.01 PRO-P: Transformasi Ekonomi Lokal Desa								
06.07.02.02 PRO-P: Transformasi Ketahanan Sosial Desa								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.07.02.03 PRO-P: Transformasi Pelestarian Lingkungan Desa								
06.07.02.04 PRO-P: Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan								
06.07.03 KP: Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif	01 - Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah dan pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif	01 - Persentase desa yang menerapkan layanan berbasis digital	persen	74 (2022)	76	84		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
		02 - Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa	desa	- (indikator baru)	90	800		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 – Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	desa	- (indikator baru)	150	1.660		010 - Kementerian Dalam Negeri
06.07.03.01 PRO-P: Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa								
06.07.03.02 PRO-P: Penguatan Kelembagaan Desa								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.07.03.03 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Data Desa								
06.07.04 KP: Pembangunan Daerah Tertinggal	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal	01 - Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju	persen	- (indikator baru)	16,67	56,67		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
06.07.04.01 PRO-P: Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal								
06.07.04.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan di Daerah Tertinggal								
06.07.04.03 PRO-P: Peningkatan Konektivitas di Daerah Tertinggal								
06.07.04.04 PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Dasar di Daerah Tertinggal								
06.07.04.05 PRO-P: Pengembangan Pariwisata Rintisan di Daerah Tertinggal								
06.07.04.06 PRO-P: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna di Daerah Tertinggal								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.07.04.07 PRO-P: Pembangunan Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal								
06.07.05 KP: Transformasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	01 - Menjadi beranda terdepan negara dengan meningkatkan integrasi dan kerjasama antar negara maupun antar wilayah	01 - Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas	persen	21,46	19,87	13,54		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		02 - Persentase desa maju dan mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	persen	44,38	45,56	48,47		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		03 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan		0,52	0,56	0,72		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		04 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas		0,64	0,68	0,82		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.07.05.01 PRO-P: Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan								
06.07.05.02 PRO-P: Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan								
06.07.05.03 PRO-P: Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana di Kawasan Perbatasan								
06.07.05.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Kawasan Perbatasan								
06.07.06 KP: Transformasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi	01 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal	01 - Persentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi	persen	52,88	55,49	65,93		152 - Kementerian Transmigrasi
		02 - Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi		0,425	0,450	0,550		152 - Kementerian Transmigrasi
		03 - Persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	persen	0,90	1,10	2,00		152 - Kementerian Transmigrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase dukungan kegiatan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Masyarakat/Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	persen	37,5	40	55		152 - Kementerian Transmigrasi
06.07.06.01 PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Aksesibilitas Logistik								
06.07.06.02 PRO-P: Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi								
06.07.06.03 PRO-P: Redistribusi Aset (Tanah) Transmigrasi								
06.07.06.04 PRO-P: Penataan Persebaran Penduduk dan Penyediaan Tenaga Terampil								
06.07.07 KP: Tata Kelola Pendampingan/Penyuluhan	01 - Meningkatnya kapasitas pendamping pembangunan	01 - Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan	kementerian/ lembaga	4	4	7		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
06.07.07.01 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Keluarga Berencana								
06.07.07.02 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Pertanian								
06.07.07.03 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Kehutanan								
06.07.07.04 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Sosial								
06.07.07.05 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Kesehatan								
06.07.07.06 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Kewirausahaan								
06.07.07.07 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Perikanan								

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

PRIORITAS NASIONAL 7: MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07 PN: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	01 - Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	01 - Indeks Pembangunan Hukum		0,68 (2023)	0,69	0,73		130 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
		02 - Indeks Persepsi Korupsi		34 (2023)	38	43,7		093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
		03 - Indeks Integritas Partai Politik		62,83	63,00-64,99	71,00-72,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	02 - Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	01 - Indeks Reformasi Birokrasi Nasional		69,98	71,38	77,26		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		93	93,5	95,5		011 - Kementerian Luar Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	03 - Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	01 - Angka prevalensi penyalahguna narkotika		1,73	1,70	1,60		066 - Badan Narkotika Nasional
	04 - Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	01 - *Return on Asset* (ROA) BUMN	persen	3,14 (2023)	3,21	3,42		041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	05 - Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	01 - Rasio pendapatan negara terhadap PDB	persen	12,82	12,36	13,75–18,00		015 - Kementerian Keuangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	06 - Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Tingkat inflasi	persen	1,57	2,5±1,0	2,5±1,0		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	01 - Terwujudnya partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional	01 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kaderisasi		64,98	65,00–66,99	73,00–74,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Keuangan		61,42	61,50–63,99	70,00–71,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		03 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kode Etik		61,85	62,00–63,99	70,00–71,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		04 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi Internal		61,11	61,50–63,99	70,00–71,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Rekrutmen		67,47	68,00-69,99	76,00-77,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	02 - Terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas	01 - Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu		61,72	64,85	77,37		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	03 - Terwujudnya penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat	01 – Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"	daerah	- (indikator baru)	150	514		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.01.01 KP: Penguatan Tata Kelola Partai Politik dan Pendidikan Politik	01 - Terwujudnya kelembagaan partai politik yang berbasis nilai serta pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel	01 - Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada mendagri	persen	100 (2023)	100	100	03 - Transformasi Tata Kelola	010 - Kementerian Dalam Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		02 - Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik	persen	100	100	100		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.01.01.01 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Keuangan Partai Politik								
07.01.01.03 PRO-P: Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Politik untuk Kader Partai Politik dan Masyarakat								
07.01.02 KP: Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP	01 - Terselenggaranya pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	01 - Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	persen	3,55	10	50		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.01.02.01 PRO-P: Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional								
07.01.02.02 PRO-P: Peningkatan Kuantitas Layanan Administrasi Kependudukan								

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.01.03 KP: Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu	01 - Terwujudnya sistem pemilu yang transformatif	01 – Persentase kepuasan masyarakat atas kinerja KPU	persen	- (indikator baru)	72	80	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	076 – Komisi Pemilihan Umum
		02 – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu		76,96	0 (tidak dihitung)	83		115 – Badan Pengawas Pemilihan Umum
07.01.03.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu								
07.01.03.02 PRO-P: Peningkatan Integritas dan Independensi Penyelenggara Pemilu								
07.01.03.03 PRO-P: Perbaikan Regulasi Kepemiluan								
07.01.04 KP: Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu	01 - Terwujudnya sistem pemilu yang inklusif dan partisipatif	01 – Persentase daftar pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif	persen	- (indikator baru)	95	99	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	076 - Komisi Pemilihan Umum
		02 – Persentase kualitas pengawasan data pemilih berkelanjutan	persen	- (indikator baru)	80	95		115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.01.04.01 PRO-P: Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih								
07.01.04.02 PRO-P: Peningkatan Pengawasan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih								
07.02 PP: Reformasi Hukum	01 - Terwujudnya regulasi yang adaptif dan taat azas, akses keadilan yang merata, serta masyarakat yang patut hukum	01 - Indeks Materi Hukum		0,60 (2023)	0,51	0,55		135 - Kementerian Hukum
		02 - Indeks Budaya Hukum		0,81 (2023)	0,83	0,87		135 - Kementerian Hukum
07.02.01 KP: Mendirikan Pusat Legislasi Nasional	01 - Terwujudnya sistem regulasi yang adaptif dan taat asas	01 - Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan		3,70	3,26	3,30	03 - Transformasi Tata Kelola	135 - Kementerian Hukum
07.02.01.01 PRO-P: Penguatan Kelembagaan Regulasi								
07.02.01.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Regulasi								

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.02.02 KP: Transformasi Akses Terhadap Keadilan	01 - Terwujudnya layanan akses terhadap keadilan yang substansial terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan	01 - Indeks Perlindungan Saksi dan Korban		- (indikator baru)	81	89	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	123 - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		02 - Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	persen	84,4 (2023)	88,2	92,2		135 - Kementerian Hukum
07.02.02.01 PRO-P: Pemenuhan Layanan Akses terhadap Keadilan								
07.02.02.02 PRO-P: Penguatan Kebijakan Transformasi Akses terhadap Keadilan								
07.02.03 KP: Penguatan Budaya Hukum	01 - Terwujudnya program literasi hukum dan pemberdayaan hukum masyarakat yang inklusif	01 - Tingkat kepatutan hukum masyarakat		0,67 (2023)	0,72	0,76	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	135 - Kementerian Hukum
		02 - Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum		0,95 (2023)	0,94	0,98		135 - Kementerian Hukum
07.02.03.01 PRO-P: Penguatan Pemberdayaan Hukum Masyarakat								
07.02.03.02 PRO-P: Penguatan Budaya Hukum Penyelenggara Negara								

SK No 122399 C

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.02.04 KP: Pembangunan Hukum Sektor Strategis	01 - Memperkuat pembangunan sektor strategis yang berlandaskan hukum	01 - Persentase penyelesaian kasus pertanahan	persen	58,03	50	60	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang
07.02.04.01 PRO-P: Penegakan dan Pelayanan Hukum								
07.02.04.02 PRO-P: Penyusunan Kebijakan								
07.03 PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	01 - Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Indeks Kelembagaan Hukum		0,73 (2023)	0,76	0,80		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Penegakan Hukum		0,64 (2023)	0,73	0,77		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
07.03.01 KP: Penguatan Kelembagaan Hukum	01 - Terwujudnya lembaga penegak hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum		0,73 (2023)	0,69	0,73	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.03.01.01 PRO-P: Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman								
07.03.01.02 PRO-P: Penguatan Lembaga Hukum di Bidang Pelayanan, Penerapan dan Pembangunan Hukum								
07.03.02 KP: Penerapan dan Penegakan Hukum	01 - Terwujudnya penegakan hukum yang adil, tidak tebang-pilih, transparan, berintegritas, dan profesional	01 - Tingkat implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum	persen	56,7 (2023)	58,7	62,7	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata	persen	54	35	55		005 - Mahkamah Agung
07.03.02.01 PRO-P: Penerapan dan Penegakan Hukum Pidana Terpadu dengan Dukungan TI dan Berperspektif Restoratif								
07.03.02.02 PRO-P: Penerapan dan Penegakan Hukum Perdata yang Berkepastian								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal*	01 - Terwujudnya efektivitas dan integrasi kebijakan bidang penuntutan di Kejaksaan RI dan Jaksa Agung sebagai pengacara negara	01 - Persentase peningkatan pengendalian perkara	persen	- (indikator baru)	61	69		006 - Kejaksaan Republik Indonesia
		02 - Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan	persen	- (indikator baru)	60	80		006 - Kejaksaan Republik Indonesia
07.04.01 KP: Penguatan Kelembagaan Kejaksaan	01 - Terwujudnya sistem penuntutan yang integratif	01 - Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	persen	- (indikator baru)	61	69	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	006 - Kejaksaan Republik Indonesia
07.04.01.01 PRO-P: Pengendali Perkara								
07.04.01.02 PRO-P: *Advocaat Generaal*								
07.04.02 KP: Peningkatan Jumlah, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Jaksa	01 - Terwujudnya kualitas dan kuantitas jaksa yang proporsional	01 - Tingkat kecukupan personil jaksa	persen	98,02	98,20	99,20		006 - Kejaksaan Republik Indonesia
		02 - Tingkat pengembangan kapasitas personil jaksa	persen	10,65	50	85		006 - Kejaksaan Republik Indonesia

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Tingkat kesesuaian pengelolaan SDM jaksa	persen	77,6	80	90		006 - Kejaksaan Republik Indonesia
07.04.02.01 PRO-P: Pemenuhan Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi								
07.04.02.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi								
07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	01 - Terwujudnya sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis	01 - Indeks Integritas Nasional		70,97 (2023)	74,52	77,57		093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
		02 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		3,85	3,97	4,06		093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
		03 - Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang		5,37 (2022)	5,52	5,83		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
07.05.01 KP: Penguatan Kelembagaan Gerakan Pemberantasan Korupsi Secara Lebih Sistematis	01 - Terwujudnya pelembagaan gerakan pemberantasan korupsi lebih sistematis	01 - Nilai dimensi internal (Indeks Integritas Nasional)		77,42 (2023)	81,30	84,63	03 - Transformasi Tata Kelola	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.05.01.01 PRO-P: Penguatan Lembaga Penegak Hukum Pemberantas Korupsi								
07.05.01.02 PRO-P: Gerakan Pemberantasan Korupsi Lebih Sistematis								
07.05.02 KP: Pemberantasan Korupsi yang Bersifat Pr*eventif* melalui Edukasi dan Gerakan Budaya Antikorupsi	01 - Terciptanya peningkatan kesadaran antikorupsi	01 - Nilai dimensi persepsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi)		3,76	3,84	3,93	03 - Transformasi Tata Kelola	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
07.05.02.01 PRO-P: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi								
07.05.02.02 PRO-P: Gerakan Budaya Antikorupsi								
07.05.03 KP: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	01 - Terwujudnya strategi pencegahan korupsi di sektor pemerintah dan masyarakat	01 - Nilai dimensi eksternal (Indeks Integritas Nasional)		84,97 (2023)	89,17	91,35	03 - Transformasi Tata Kelola	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
07.05.03.01 PRO-P: Revitalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.05.03.02 PRO-P: Sistem Pencegahan Korupsi di Sektor Peningkatan Hajat Hidup Orang Banyak dan Perlindungan Sumber Daya Publik								
07.05.04 KP: Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	01 - Terwujudnya strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU yang terintegrasi, modern, dan berorientasi pada pengejaran aset tindak pidana	01 - Persentase capaian implementasi stranas TPPU	persen	75	80	100	03 - Transformasi Tata Kelola	078 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
07.05.04.01 PRO-P: Integrasi Pencegahan TPPU								
07.05.04.02 PRO-P: Optimalisasi Pemberantasan TPPU								
07.06 PP: Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	01 - Terciptanya upaya holistik dan terintegratif dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba yang dilakukan baik ditingkat pusat, provinsi, dan kab/kota	01 - Indeks P4GN		63,6	63,6	67		066 - Badan Narkotika Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.06.01 KP: Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Narkoba, dan Pengembangan Keterampilan Hidup Sehat, Terutama Dimulai dari Keluarga dan Sekolah	01 - Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	01 - Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika		58,56	59,00	61,00		066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.01.01 PRO-P: Peningkatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika								
07.06.01.02 PRO-P: Peningkatan Keterampilan Masyarakat dan Budaya Hidup Sehat di Kawasan Rawan Narkotika								
07.06.02 KP: Optimalisasi Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	01 - Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi dalam rangka meningkatkan kepulihan penyalahguna narkotika	01 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi		3,53	3,57	3,70		066 - Badan Narkotika Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.06.02.01 PRO-P: Peningkatan Efektivitas Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika								
07.06.02.02 PRO-P: Memperkuat Lembaga Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba								
07.06.03 KP: Meningkatkan Program Deteksi Dini Penyalahgunaan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa	01 - Terciptanya generasi penerus bangsa yang bebas dari ancaman perilaku negatif yang bisa menghambat potensinya	01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja		52,70	60	62,5		066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.03.01 PRO-P: Peningkatan Pengetahuan Bahaya Narkotika di Kalangan Anak Usia Sekolah								
07.06.03.02 PRO-P: Penguatan Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Satuan Pendidikan								
07.06.04 KP: Meningkatkan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Pemberantasan Narkoba	01 - Terlaksananya penanganan tindak pidana narkotika yang sesuai dengan UU yang berlaku	01 - *Clearance rate* tindak pidana narkotika	persen	89	90	94		066 - Badan Narkotika Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.06.04.01 PRO-P: Peningkatan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkoba								
07.06.04.02 PRO-P: Peningkatan Akurasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika								
07.06.06 KP: Meningkatkan Kemampuan Penyelidikan Intelijen P4GN	01 - Meningkatnya kemampuan deteksi dini dan pemetaan terhadap potensi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika	01 - Persentase jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal	persen	- (indikator baru)	7	11		066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.06.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Intelijen dalam Rangka P4GN								
07.06.06.02 PRO-P: Peningkatan Data dan Informasi Intelijen P4GN								
07.06.07 KP: Optimalisasi Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - Meningkatnya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	01 - Jumlah perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	perkara	20	25	45		066 - Badan Narkotika Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.06.07.01 PRO-P: Pengungkapan Kasus TPPU Narkotika dari TPA Narkotika yang Berpotensi TPPU								
07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	001 - Terwujudnya penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi	01 - Indeks Sistem Merit ASN		0,54 (2023)	0,61	0,65		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.01 KP: Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total *Reward* Berbasis Kinerja ASN	01 - Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif	01 - Aspek penggajian, penghargaan dan disiplin Indeks Sistem Merit	persen	67	67	- (target mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang dimutakhirkan)	03 - Transformasi Tata Kelola	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Aspek manajemen kinerja Indeks Sistem Merit	persen	61	61	- (target mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang dimutakhirkan)		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase instansi pemerintah yang aspek penghargaan dan pengakuan berbasis kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"	persen	- (indikator baru)	- (indikator baru)	54		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.01.01 PRO-P: Penerapan Manajemen Penghargaan dan Pengakuan bagi ASN								
07.07.01.02 PRO-P: Penerapan Sistem Manajemen Kinerja ASN								
07.07.02 KP: Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN	01 - Terwujudnya sistem manajemen talenta ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi	01 - Aspek perencanaan kebutuhan Indeks Sistem Merit	persen	78,45 (2023)	78,45	- (target mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang dimutakhirkan)	03 - Transformasi Tata Kelola	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Aspek pengadaan Indeks Sistem Merit	persen	78,91 (2023)	78,91	- (target mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang dimutakhirkan)		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase instansi pemerintah yang aspek perencanaan kebutuhan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"	persen	- (indikator baru)	- (indikator baru)	54		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		04 - Persentase instansi pemerintah yang aspek pengadaan pegawai dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"	persen	- (indikator baru)	- (indikator baru)	54		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		05 - Persentase instansi pemerintah yang aspek manajemen talenta dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"	persen	- (indikator baru)	- (indikator baru)	54		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		06 - Persentase instansi pemerintah yang aspek standar kompetensi jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"	persen	- (indikator baru)	- (indikator baru)	54		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		07 - Persentase instansi pemerintah yang aspek standardisasi jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"	persen	- (indikator baru)	- (indikator baru)	54		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.02.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Manajemen Talenta ASN								
07.07.02.02 PRO-P: Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN								
07.07.02.03 PRO-P: Penerapan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN								
07.07.02.04 PRO-P: Penerapan Standardisasi Jabatan dan Standar Kompetensi ASN								
07.07.03 KP: Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN yang Mendorong Kemudahan Akses Belajar	01 - Terwujudnya penerapan pengembangan kompetensi ASN yang berkualitas	01 - Aspek pengembangan karier Indeks Sistem Merit	persen	33,57 (2023)	33,57	- (target mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang dimutakhirkan)	03 - Transformasi Tata Kelola	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		02 - Persentase instansi pemerintah yang aspek pengembangan kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"	persen	- (indikator baru)	- (indikator baru)	54		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.03.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Pengembangan Kompetensi								
07.07.03.02 PRO-P: Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN								
07.07.03.03 PRO-P: Pemberian Beasiswa Pendidikan								
07.07.04 KP: Digitalisasi Manajemen ASN	01 - Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang berkualitas	01 - Aspek sistem informasi Indeks Sistem Merit	persen	57,2 (2023)	57,2	- (target mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang dimutakhirkan)	03 - Transformasi Tata Kelola	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Persentase instansi pemerintah yang aspek digitalisasi manajemen ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"	persen	- (indikator baru)	- (indikator baru)	54		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.07.04.001 PRO-P: Penguatan Platform Digital Manajemen ASN								
07.07.04.02 PRO-P: Pengembangan dan Pemeliharaan *Backend Services* Platform Digital Manajemen ASN								
07.07.05 KP: Penerapan Budaya Kerja yang Mendorong Peningkatan Integritas ASN	01 - Terbangunnya perilaku ASN yang beretika	01 - Indeks BerAkhlak		61,1 (2023)	61,1	- (target mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang dimutakhirkan)	03 - Transformasi Tata Kelola	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Persentase instansi pemerintah yang aspek budaya kerja dan citra institusi ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"	persen	- (indikator baru)	- (indikator baru)	54		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.05.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Budaya Kerja								
07.07.05.02 PRO-P: Peningkatan Integritas dan Budaya Kerja ASN								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.07.06 KP: Penerapan dan Evaluasi Kebijakan Manajemen ASN	01 - Terwujudnya penerapan dan evaluasi manajemen ASN yang berkualitas	01 - Jumlah instansi pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal "baik"	instansi pemerintah	98	98	- (target mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang dimutakhirkan)	03 - Transformasi Tata Kelola	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Persentase instansi pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal "menengah"	persen	- (indikator baru)	- (indikator baru)	54		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		03 - Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi manajemen ASN yang dimanfaatkan	persen	- (indikator baru)	- (indikator baru)	100		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.06.01 PRO-P: Penerapan Kebijakan Sistem Merit								
07.07.06.02 PRO-P: Evaluasi Manajemen ASN								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	01 - Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	01 - Indeks Pelayanan Publik		3,78 (2023)	3,68	3,80		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional		64,91 (2023)	70	75		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.08.01 KP: Tata Kelola Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	01 - Indeks Pelayanan Publik K/L		4,16 (2023)	3,9	4,07	03 - Transformasi Tata Kelola	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Indeks Pelayanan Publik Provinsi		3,91 (2023)	3,64	3,8		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		03 - Indeks Pelayanan Publik Kabupaten		3,63 (2023)	3,51	3,62		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		04 - Indeks Pelayanan Publik Kota		4,01 (2023)	3,96	4,09		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	02 - Terwujudnya pengawasan eksternal pelayanan publik	01 - Persentase K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi	persen	34,92 (2023)	38,15	50,55		110 - Ombudsman Republik Indonesia
07.08.01.01 PRO-P: Penguatan Kerangka Regulasi Tata Kelola Pelayanan Publik								
07.08.01.02 PRO-P: Penguatan Pelayanan Publik Inklusif dan Terpadu								
07.08.01.03 PRO-P: Penguatan Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik								
07.08.01.04 PRO-P: Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik								
07.08.02 KP: Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan	01 - Terwujudnya kinerja pembangunan yang akuntabel dan berintegritas	01 - Persentase instansi pemerintah (K/L) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori "B" ke atas)	persen	97,62	97	100	03 - Transformasi Tata Kelola	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Persentase instansi pemerintah (provinsi) dengan nilai akuntabilitas kinerja baik (kategori "B" ke atas)	persen	100	100	100		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase instansi pemerintah (kab/kota) dengan nilai akuntabilitas kinerja baik (kategori "B" ke atas)	persen	75,79	76	83		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		04 - Nilai kinerja pengadaan		58	50,77	60		106 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		05 - Tingkat penerapan tata kelola pengadaan		57	54,62	74,80		106 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		06 - Persentase kegiatan prioritas utama dengan kinerja baik	persen	66,30	70	78		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
		07 - Tingkat pemanfaatan data statistik	persen	- (indikator baru)	76	86		054 - Badan Pusat Statistik

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		08 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,35	2,60	3,17		054 - Badan Pusat Statistik
		09 - Persentase instansi pemerintah yang menerapkan tata kelola kualitas kebijakan yang baik	persen	18,37 (2023)	30	85		086 - Lembaga Administrasi Negara
07.08.02.01 PRO-P: Penguatan Ekosistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah								
07.08.02.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah								
07.08.02.03 PRO-P: Penyediaan Data Pembangunan								
07.08.02.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerintah								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.08.03 KP: Sinergi Pengendalian dan Pengawasan Program Pembangunan Nasional	01 - Terwujudnya sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional	01 - Persentase K/L dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	persen	- (indikator baru)	47,57	72,82	03 - Transformasi Tata Kelola	089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		02 - Persentase provinsi dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	persen	- (indikator baru)	39,47	57,89		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		03 - Persentase kab/kota dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	persen	- (indikator baru)	9,84	50,20		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		04 - Tingkat pemanfaatan hasil pengawasan intern dalam penyelenggaraan pembangunan nasional	predikat	- (indikator baru)	Optimal	Optimal		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		05 - Tingkat pemanfaatan hasil pengendalian program prioritas Presiden dalam penyelenggaraan pembangunan nasional	persen	- (indikator baru)	30	50		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.08.03.01 PRO-P: Pengendalian Program Prioritas Presiden								
07.08.03.02 PRO-P: Pengendalian Intern dan Pengawasan Pembangunan								
07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	01 - Terwujudnya harmonisasi pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan dengan memperhatikan tipologi kewilayahan serta penguatan fondasi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah	01 - Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat		72,01 (2023)	73	85		010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		83,75 (Persentase capaian penerapan SPM di daerah tahun 2023)	88	92		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (*local tax ratio*)	persen PDB	1,20	1,25	1,45		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.01 KP: Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah	01 - Terwujudnya harmonisasi kewenangan pusat dan daerah yang optimal	01 - Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori sangat baik	provinsi	13 (2023)	17	30	03 - Transformasi Tata Kelola	010 - Kementerian Dalam Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.09.01.01 PRO-P: Penyiapan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah								
07.09.01.02 PRO-P: Penguatan Kolaborasi Multi Aktor di Daerah								
07.09.01.03 PRO-P: Optimalisasi Sinergi Pemerintahan Pusat dan Daerah								
07.09.02 KP: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah	01 - Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintah daerah dengan memperhatikan tipologi kewilayahan	001 - Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori tuntas paripurna	provinsi	2 (2023)	5	34	03 - Transformasi Tata Kelola	010 - Kementerian Dalam Negeri
		002 - kabupaten/kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setidaknya berkategori tuntas madya	kab/kota	28 (2023)	152	354		010 - Kementerian Dalam Negeri
		003 - Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori sangat inovatif (prov, kab, kota)	daerah (prov/kab/ kota)	75 (2023)	82	147		010 - Kementerian Dalam Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.09.02.01 PRO-P: Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Urusan Wajib Pemerintah Daerah								
07.09.02.02 PRO-P: Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah								
07.09.02.03 PRO-P: Optimalisasi Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Daerah								
07.09.03 KP: Penguatan Fondasi Keuangan Daerah	01 - Terwujudnya keuangan daerah dengan pendapatan daerah yang optimal, belanja daerah yang berkualitas, dan pemanfaatan pendanaan alternatif yang meningkat	01 - Jumlah daerah dengan proporsi pajak daerah terhadap PAD meningkat	daerah (prov/kab/ kota)	300	300	546	03 - Transformasi Tata Kelola	010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Jumlah daerah dengan proporsi retribusi daerah terhadap PAD meningkat	daerah (prov/kab/ kota)	300	300	546		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	persen	6,81	6,10	6,50		015 - Kementerian Keuangan
		04 - Jumlah provinsi yang memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik	provinsi	4	19	38		010 - Kementerian Dalam Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		05 - Jumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pendanaan alternatif	daerah (prov/kab/ kota)	7	2	11		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.03.01 PRO-P: Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah								
07.09.03.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Belanja Daerah								
07.09.03.03 PRO-P: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pendanaan Alternatif Daerah								
07.10 PP: Pemerintah Digital	01 - Terwujudnya pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien	01 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		2,79 (2023)	3,00	2,00		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.01 KP: Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital	01 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang transformatif	01 - Jumlah kebijakan pemerintah digital yang ditetapkan	kebijakan	- (indikator baru)	4	0	03 - Transformasi Tata Kelola	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Jumlah lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digital	lembaga	- (indikator baru)	0	614		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.10.01.01 PRO-P: Kebijakan Pemerintah Digital								
07.10.01.02 PRO-P: Kedaulatan Sistem Pemerintah Digital								
07.10.01.03 PRO-P: Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital								
07.10.01.04 PRO-P: Pengembangan Proses Bisnis Tematik dalam Arsitektur Pemerintah Digital								
07.10.02 KP: Penguatan Teknologi Pemerintah Digital	01 - Tersedianya teknologi pemerintah digital yang berkualitas dan tangguh	01 – Persentase instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP	persen	- (indikator baru)	90	100	03 - Transformasi Tata Kelola	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 – Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP	persen	- (indikator baru)	5	15		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
07.10.02.01 PRO-P: Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital								
07.10.02.02 PRO-P: Penguatan Aplikasi Pemerintah Digital								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.10.02.03 PRO-P: Penguatan Keamanan Siber Pemerintah								
07.10.03 KP: Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital ASN	01 - Terwujudnya ASN yang berkompetensi dan berbudaya digital dalam pelaksanaan pemerintah digital	01 - Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal	persen	- (indikator baru)	50	90	03 - Transformasi Tata Kelola	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.03.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Digital ASN								
07.10.03.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Digital ASN								
07.10.03.03 PRO-P: Peningkatan Kompetensi ASN Pengelola Layanan Digital								
07.10.04 KP: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	01 - Terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu	001 - Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik	layanan	- (indikator baru)	10	50	03 - Transformasi Tata Kelola	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.04.01 PRO-P: Pengembangan Layanan Publik Prioritas Berbasis Digital								

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.10.04.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Layanan Perizinan Berusaha								
07.10.04.03 PRO-P: Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan								
07.10.04.04 PRO-P: Transformasi Pelayanan Pertanahan								
07.10.05 KP: Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah	01 - Tersedianya data pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk interoperabilitas dan lintas instansi yang mendukung layanan digital nasional	01 - Nilai Indeks Satu Data Indonesia		- (indikator baru)	51-70	91-100	03 - Transformasi Tata Kelola	055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
		02 - Persentase cakupan peta dasar skala besar untuk wilayah Indonesia	persen	- (indikator baru)	9,4	83,6		083 - Badan Informasi Geospasial
		03 - Persentase simpul jaringan informasi geospasial dengan kinerja unggul	persen	- (indikator baru)	6,64	9,79		083 - Badan Informasi Geospasial
		04 - Persentase IGT yang termanfaatkan	persen	- (indikator baru)	6,6	100		083 - Badan Informasi Geospasial
07.10.05.01 PRO-P: Tata Kelola Data								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.10.05.02 PRO-P: Penguatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan								
07.10.05.03 PRO-P: Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik								
07.10.05.04 PRO-P: Penyediaan Peta Dasar Skala Besar								
07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	01 - Meningkatnya produktivitas BUMN	01 - *Profit margin ratio* (PMR) BUMN	persen	11,15 (2023)	10,50	10,98		041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
07.11.01 KP: Peningkatan Daya Saing BUMN	01 - Meningkatnya daya saing BUMN	01 - *Total asset turnover* BUMN	kali	0,282 (2023)	0,305	0,311		041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
07.11.01.01 PRO-P: Kinerja BUMN								
07.11.01.02 PRO-P: Ekonomi Berkelanjutan								
07.11.01.03 PRO-P: Ketahanan Energi dan Pangan								
07.11.01.04 PRO-P: Transformasi Digital								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.11.01.05 PRO-P: Infrastruktur Konektivitas								
07.11.01.06 PRO-P: Pariwisata dan Budaya								
07.11.01.07 PRO-P: Pembiayaan Sektor Strategis								
07.11.02 KP: Peningkatan Efisiensi Peran BUMN dalam Penugasan Pemerintah	01 - Meningkatnya efisiensi peran BUMN dalam penugasan pemerintah	01 - Peringkat risiko komposit BUMN minimal 3	persen	- (indikator baru)	60,9	78,3		041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
07.11.02.01 PRO-P: Efisiensi Peran BUMN pada Program Perintis								
07.11.02.02 PRO-P: Penguatan Peran BUMN dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan								
07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	01 - Tercapainya peningkatan penerimaan perpajakan yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi	01 - Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	persen PDB	10,07	10,24	11,52-15,00		015 - Kementerian Keuangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
	02 - Terwujudnya peningkatan PNBP yang optimal dan tidak bergantung pada SDA	01 - Rasio PNBP (persen PDB)	persen PDB	2,61	2,11	2,21-2,99		015 - Kementerian Keuangan
07.12.01 KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	01 - Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak	01 - Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi	persen	90	90	90		015 - Kementerian Keuangan
		02 - Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh WP badan dan orang pribadi berdasarkan target yang ditetapkan	persen	100	100	100		015 - Kementerian Keuangan
		03 - Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara	persen	100	100	100		015 - Kementerian Keuangan
07.12.01.01 PRO-P: Implementasi Sistem Informasi Inti Perpajakan (*core tax*) dan Interoperabilitas dengan Sistem Informasi *Stakeholder* Terkait, Menuju *Data-Driven*								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.12.01.02 PRO-P: Simplifikasi Proses Bisnis dan Kelembagaan serta Penguatan Kebijakan								
07.12.01.03 PRO-P: Tata Kelola Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan (termasuk *Sin Tax*)								
07.12.01.04 PRO-P: Peningkatan Kepatuhan Perpajakan								
07.12.02 KP: Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	01 - Terciptanya dukungan PNBP yang optimal	01 - Rasio capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan	persen	90-100	90-100	90-100		015 - Kementerian Keuangan
07.12.02.01 PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Migas								
07.12.02.02 PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Nonmigas yang Bernilai Tambah Tinggi								
07.12.02.03 PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Penerimaan Non-SDA								
07.12.02.04 PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Pengelolaan Aset								
07.12.02.05 PRO-P: Inovasi Layanan Berbasis IT untuk Meningkatkan Kepatuhan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negara	01 - Terwujudnya dukungan belanja negara yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan	01 - Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara		86	86	88		015 - Kementerian Keuangan
07.13.01 KP: Peningkatan Efektivitas Belanja Pemerintah Pusat	01 - Meningkatnya alokasi belanja negara yang produktif	01 - Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah		84	85	87		015 - Kementerian Keuangan
07.13.01.01 PRO-P: Percepatan Reformasi Subsidi Tepat Sasaran								
07.13.01.02 PRO-P: Tata Kelola Belanja Negara untuk Penyiapan Landasan Transformasi								
07.13.01.03 PRO-P: Kebijakan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan								
07.13.01.04 PRO-P: Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Terintegrasi								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.13.02 KP: Optimalisasi Kualitas Belanja TKD	01 - Meningkatnya kualitas belanja TKD untuk mendukung transformasi ekonomi	01 - Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	persen	100	100	100		015 - Kementerian Keuangan
		02 - Alokasi TKD untuk infrastruktur	triliun rupiah	70,4	55,6	55,6		015 - Kementerian Keuangan
		03 – Persentase kinerja hibah daerah	persen	75	75	75		015 - Kementerian Keuangan
07.13.02.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah								
07.13.02.02 PRO-P: Kebijakan dan Mekanisme Sinkronisasi Belanja TKD dan Belanja K/L								
07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	01 - Terwujudnya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi	01 - Rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman	persen PDB	2,29	2,53	2,45-2,50		015 - Kementerian Keuangan
		02 - Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang menjamin keberlanjutan fiskal	persen PDB	39,5	39,15	39,01-39,10		015 - Kementerian Keuangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.14.01 KP: Optimalisasi Sumber-Sumber Pembiayaan Utang yang Menjaga Kesinambungan Fiskal	01 - Terciptanya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan yang berkelanjutan	01 - Imbal hasil (*yield*) SBN	persen	7,0	6,8–7,2	6,0–7,0		015 - Kementerian Keuangan
		02 - Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara	persen	100	100	100		015 - Kementerian Keuangan
07.14.01.01 PRO-P: Optimalisasi Portofolio Pembiayaan								
07.14.01.02 PRO-P: Peraturan Mengenai Pengelolaan Pembiayaan Luar Negeri dan Dalam Negeri								
07.14.02 KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi sumber-Sumber Pembiayaan Non Utang yang Inovatif	01 - Meningkatnya pemanfaatan skema pendanaan inovatif	01 - Jumlah peraturan KPBU yang ditetapkan	peraturan	1	1	1		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
		02 - Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan	sistem informasi	1	1	1		055 - Kementerian PPN/BAPPENAS
07.14.02.01 PRO-P: Penyempurnaan Peraturan Mengenai Skema KPBU								
07.14.02.02 PRO-P: Sistem Informasi Terintegrasi Pendanaan KPBU dan Pendanaan Inovasi Lainnya								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.15 PP: Pengendalian Inflasi	01 - Terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi	01 - Tingkat inflasi	persen	1,57	2,5±1,0	2,5±1,0		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
07.15.01 KP: Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	01 - Terjaganya komponen inflasi harga bergejolak	01 - Inflasi harga bergejolak	persen	0,12	3,00-5,00	3,00-5,00		125 - Badan Pangan Nasional
07.15.01.01 PRO-P: Stabilisasi dan Pengawasan Harga Pangan								
07.15.01.02 PRO-P: Pengembangan Jaringan Irigasi								
07.15.01.03 PRO-P: Peningkatan Ketersediaan Pangan Dalam Negeri								
07.15.01.04 PRO-P: Sarana dan Prasarana Penyimpanan Produk								
07.15.01.05 PRO-P: Peningkatan Teknologi Pertanian								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.15.01.06 PRO-P: Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian								
07.15.01.07 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan								
07.15.01.08 PRO-P: Sarana Logistik dan Distribusi Pangan								
07.15.01.09 PRO-P: Infrastruktur dan Layanan Transportasi								
07.15.01.10 PRO-P: Ketersediaan Data Inflasi dan Harga Pangan								
07.15.01.11 PRO-P: Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi								
07.15.01.12 PRO-P: Sinergi Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi								
07.16 PP: Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	01 - Terwujudnya pelindungan WNI, termasuk pekerja migran Indonesia	01 - Persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri	persen	85	87	89		011 - Kementerian Luar Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
07.16.01 KP: Penguatan Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	01 - Meningkatnya proporsi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum	01 - Proporsi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum	persen	55,56 (2023)	60	80	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	104 - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
07.16.01.01 PRO-P: Persiapan Keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia								
07.16.01.02 PRO-P: Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia								
07.16.02 KP: Pelindungan dan Pelayanan WNI, termasuk PMI di Luar Negeri yang Integratif	01 - Terintegrasinya dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) , termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri	01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri		96	96	96,4	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		97,5	98	98,4		011 - Kementerian Luar Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri		98,5	98,7	99,1		011 - Kementerian Luar Negeri
07.16.02.01 PRO-P: Tata Kelola dan Diplomasi Pelayanan dan Pelindungan								
07.16.02.02 PRO-P: Penanganan Kasus WNI di Luar Negeri								

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 8: MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08 PN: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	01 - Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		62,85 (2021)	65,49	68,13		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	02 - Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	01 - Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	persen	0,140 (2022)	0,137	0,135		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	01 - Terwujudnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah dalam kehidupan beragama, serta layanan keagamaan yang transformatif	01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		76,47	76,77	78,25		025 - Kementerian Agama
		02 - Indeks Layanan Keagamaan		86,51	87,11	88,62		025 - Kementerian Agama

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.01.01 KP: Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan	01 - Meningkatnya moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan	01 - Nilai Layanan Penyuluhan Agama		84,52	84,63	85,07		025 - Kementerian Agama
		02 - Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (Agama dan Etnis)		61,78 (2021)	64,39	74,81		025 - Kementerian Agama
		03 - Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	persen	27	35	85		025 - Kementerian Agama
		04 - Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga	persen	0,5 (2022)	0,7	1,1		025 - Kementerian Agama
08.01.01.01 PRO-P: Peningkatan Literasi Keagamaan								
08.01.01.02 PRO-P: Peningkatan Bimbingan Keagamaan Keluarga								
08.01.01.03 PRO-P: Peningkatan Layanan Bimbingan Perkawinan (Calon Pengantin)								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.01.02 KP: Jaminan Hak Beragama serta Kehidupan Beragama yang Harmonis dan Rukun	01 - Meningkatnya jaminan kebebasan beragama dan kehidupan beragama yang harmonis serta rukun	01 - Persentase rekomendasi *early warning system* (keagamaan) yang ditindaklanjuti	persen	10	25	85		025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi	persen	24	30	50		025 - Kementerian Agama
08.01.02.01 PRO-P: Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik								
08.01.02.02 PRO-P: Pembinaan Kerukunan Umat Beragama								
08.01.02.03 PRO-P: Penyelenggaraan *Event* Keagamaan								
08.01.03 KP: Peningkatan Peran Tokoh Agama, Lembaga Agama, dan Lembaga Sosial Keagamaan	01 - Menguatnya peran dan kerjasama tokoh agama dan lembaga agama/sosial keagamaan dalam mewujudkan layanan keagamaan yang inklusif	01 - Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan	persen	40	43	55		025 - Kementerian Agama

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.01.03.01 PRO-P: Peningkatan Peran Lembaga Agama dan Keagamaan dalam Pembangunan								
08.01.03.02 PRO-P: Peningkatan Partisipasi Tokoh Agama dalam Pembangunan								
08.01.04 KP: Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	01 - Tersedianya sarpras peribadatan yang memenuhi standar	01 - Persentase sarana prasarana peribadatan yang memenuhi standar	persen	66,69	67,35	70,00		025 - Kementerian Agama
08.01.04.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Ibadah & Sarpras Peribadatan lainnya								
08.01.04.02 PRO-P: Penyediaan Kitab Suci yang Sahih dan Merata								
08.01.05 KP: Transformasi Layanan Keagamaan yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif di Kantor Urusan Agama (KUA)	01 - Meningkatnya kualitas layanan KUA secara merata, inklusif, dan transformatif	01 - Indeks Kepuasan Layanan KUA		85,53	85,64	86,07		025 - Kementerian Agama
08.01.05.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana KUA								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.01.05.02 PRO-P: Pengembangan Inovasi Layanan KUA (Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan)								
08.01.06 KP: Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman	01 - Meningkatnya kualitas layanan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman	01 - Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): (a) Layanan haji dalam negeri; (b) Layanan haji luar negeri		(a) 90,45 (2022); (b) 88,20	(a) 91,00; (b) 88,25	(a) 92,00; (b) 90,25		025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase nilai pertumbuhan perolehan nilai manfaat dana haji	persen	10,4	12,2	15,2		Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
		03 - Persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A): (a) Lembaga penyelenggara haji khusus; (b) Lembaga penyelenggara umrah	persen	(a) 82; (b) 96	(a) 82,05; (b) 96,01	(a) 82,25; (b) 96,03		025 - Kementerian Agama
08.01.06.01 PRO-P: Revitalisasi Sarpras Layanan Ibadah Haji dan Umrah								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.01.06.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Ibadah Haji								
08.01.06.03 PRO-P: Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Haji Khusus dan Umrah								
08.01.07 KP: Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal yang profesional	01 - Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal		88,56	90,98	93,27		142 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
		02 - Tingkat literasi produk dan jasa halal	persen	34,08	42,09	58,11		142 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
08.01.07.01 PRO-P: Penguatan Literasi Produk Halal								
08.01.07.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Penjaminan Produk Halal								
08.01.07.03 PRO-P: Penguatan Kolaborasi Penjaminan Produk Halal								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.01.08 KP: Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif	01 - Meningkatnya pengembangan dana sosial keagamaan produktif untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat	01 - Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan	persen	1	2	6		025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional	persen	78	81	95		025 - Kementerian Agama
08.01.08.01 PRO-P: Revitalisasi Dana Sosial Keagamaan untuk Pengentasan Kemiskinan								
08.01.08.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lembaga Filantropi Keagamaan								
08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	01 - Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan berkebudayaan maju	01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		57,13 (2023)	58,39	60,70		140 - Kementerian Kebudayaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.02.01 KP: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	01 - Terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang kokoh berlandaskan nilai-nilai Pancasila	01 - Persentase penduduk yang mengikuti gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya	persen	36,00 (2023)	36,71	38,13		140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.01.01 PRO-P: Penguatan Etika Sosial Budaya untuk Membentuk Masyarakat yang Harmonis, Rukun, dan Berkeadaban								
08.02.01.02 PRO-P: Penguatan Etika Politik dan Pemerintahan untuk Melembagakan Sistem Demokrasi yang Substantif dan Partisipatif, serta Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Terintegrasi, dan Berorientasi Pelayanan								
08.02.01.03 PRO-P: Penguatan Etika Ekonomi dan Bisnis Sebagai Landasan Transformasi Ekonomi untuk Mendorong Produktivitas dan Daya Saing Bangsa								
08.02.01.04 PRO-P: Penguatan Etika Hukum Yang Berkeadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum yang Mengedepankan Nilai-Nilai Kemanusiaan								
08.02.01.05 PRO-P: Penguatan Etika Keilmuan untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Kreatif, dan Inovatif								
08.02.01.06 PRO-P: Penguatan Etika Lingkungan Sebagai Pondasi Pembangunan yang Berkelanjutan								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.02.02 KP: Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya	01 - Terwujudnya pengelolaan terpadu warisan budaya yang efektif dan berkelanjutan	01 - Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan	persen	58	60	71		140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.02.01 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan								
08.02.02.02 PRO-P: Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Tradisi, dan Kearifan Lokal								
08.02.02.03 PRO-P: Revitalisasi Manuskrip								
08.02.02.04 PRO-P: Pengembangan Budaya Bahari								
08.02.02.05 PRO-P: Revitalisasi Jalur Rempah								
08.02.03 KP: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	01 - Terwujudnya kawasan pemajuan kebudayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM kebudayaan	01 - Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya	persen	0,43 (2023)	0,49	0,56		140 - Kementerian Kebudayaan
		02 - Jumlah kawasan pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (kumulatif)	kawasan	1	3	15		140 - Kementerian Kebudayaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.02.03.01 PRO-P: Pengelolaan Terpadu Festival Seni Budaya Daerah Berkelas Internasional								
08.02.03.02 PRO-P: Pengelolaan Terpadu Cagar Budaya di Kawasan Pemajuan Kebudayaan								
08.02.04 KP: Jaminan Hak Kebudayaan, Ekspresi Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	01 - Terpenuhinya hak berkebudayaan dan kebebasan berekspresi, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat	01 - Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	persen	1,58	1,67	2,04		140 - Kementerian Kebudayaan
		02 - Jumlah wilayah adat yang dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan	wilayah adat	3	3	6		140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.04.01 PRO-P: Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat								
08.02.04.02 PRO-P: Pelindungan Hutan Adat dan Tanah Ulayat								
08.02.04.03 PRO-P: Penguatan dan Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.02.05 KP: Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia	01 - Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia	01 - Indeks Pembangunan Kebahasaan		45,82 (2022)	51,31	55,01		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
08.02.05.01 PRO-P: Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia								
08.02.05.02 PRO-P: Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional								
08.02.05.03 PRO-P: Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah								
08.02.06 KP: Transformasi Kearsipan untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan	01 - Terwujudnya kearsipan yang transformatif untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan	01 - Indeks Budaya Tertib Arsip		70,24	72,40	78,24		087 - Arsip Nasional Republik Indonesia
		02 - Indeks Memori Kolektif Bangsa		69,10	71,65	76,02		087 - Arsip Nasional Republik Indonesia
08.02.06.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Tertib Arsip								
08.02.06.02 PRO-P: Perluasan Layanan Kearsipan untuk Publik								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.02.06.03 PRO-P: Pengembangan Pusat Khazanah Kearsipan Nusantara								
08.02.07 KP: Pengembangan Diplomasi Kebudayaan	01 - Meningkatnya rekognisi global atas kebudayaan Indonesia	01 - Jumlah warisan budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya dunia	unit	2	3	10		140 - Kementerian Kebudayaan
		02 - Jumlah rumah budaya Indonesia yang dikembangkan dan dimanfaatkan (kumulatif)	rumah budaya	10 (2017)	11	18		140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.07.01 PRO-P: Pengelolaan Warisan Budaya Dunia Indonesia								
08.02.07.02 PRO-P: Promosi dan Pertukaran Budaya								
08.02.07.03 PRO-P: Penguatan Kerja Sama Kebudayaan								
08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	01 - Menurunnya potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan)	01 - Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan)	persen	0,995 (2023)	0,135	0,646		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.03.01 KP: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	01 - Peningkatan nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	01 - Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		- (indikator baru)	55	76		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
08.03.01.01 PRO-P: Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh								
08.03.01.02 PRO-P: Peningkatan Ketahanan Perikanan terhadap Perubahan Iklim								
08.03.01.03 PRO-P: Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai								
08.03.01.04 PRO-P: Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar								
08.03.02 KP: Pengelolaan Sumber Daya Air Adaptif Iklim	01 - Meningkatnya keakurasian modifikasi cuaca	01 - Persentase akurasi keberhasilan modifikasi cuaca	Persen	- (indikator baru)	82	90		075 - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
08.03.02.01 PRO-P: Pembangunan Tampungan Air								
08.03.02.02 PRO-P: Revitalisasi Tampungan Air								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.03.02.03 PRO-P: Pembangunan Pengendalian Banjir								
08.03.02.04 PRO-P: Pengendalian Lahar/ Sedimen								
08.03.02.05 PRO-P: Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air								
08.03.03 KP: Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim	01 - Menurunnya potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada sektor pertanian	01 - Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian	persen	0,248 (2023)	0,091	0,439		018 - Kementerian Pertanian
08.03.03.01 PRO-P: Pembangunan Embung atau Tampungan Air Skala Kecil Lainnya								
08.03.03.02 PRO-P: Irigasi Pertanian								
08.03.03.03 PRO-P: Optimasi Lahan Pertanian								
08.03.03.04 PRO-P: Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.03.03.05 PRO-P: Penyediaan Pupuk dan Saprodi Pertanian								
08.03.03.06 PRO-P: Pengembangan, Pengelolaan, dan Modernisasi Jaringan Irigasi								
08.03.03.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Petani terkait Informasi Iklim								
08.03.04 KP: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sensitif Iklim	01 – Menurunnya persentase kejadian penyakit sensitif iklim	01 – Persentase penurunan kejadian penyakit sensitif iklim	persen	- (indikator baru)	10	14		024 - Kementerian Kesehatan
08.03.04.01 PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Penyakit DBD								
08.03.04.02 PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Penyakit Malaria								
08.03.04.03 PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Penyakit Pneumonia								
08.03.04.04 PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diare								
08.03.04.05 PRO-P: Pengendalian Vektor dan Penyebaran Penyakit Sensitif Iklim								

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.03.04.06 PRO-P: Peningkatan Kesehatan Lingkungan								
08.03.05 KP: Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas untuk Pembangunan Berketahanan Iklim	01 - Meningkatnya tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan berketahanan iklim	01 - Persentase aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi prioritas	persen	- (indikator baru)	10	30		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
08.03.05.01 PRO-P: Penyediaan Informasi Pendukung Peningkatan Ketahanan Iklim								
08.03.05.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM untuk Ketahanan Iklim								
08.03.05.03 PRO-P: Perlindungan Sosial untuk Ketahanan Iklim								
08.03.05.04 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Pemerintah								
08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	01 - Menurunnya tingkat risiko bencana nasional	01 - Persentase penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Nasional	persen	1,54 (2023)	1,2	1,2		103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.04.01 KP: Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi	01 - Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana	01 - Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang	persen	62 (2023)	67	90	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Penanggulangan Bencana								
08.04.01.02 PRO-P: Pengembangan Mitigasi Bencana melalui Riset dan Inovasi								
08.04.01.03 PRO-P: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana								
08.04.01.04 PRO-P: Penyediaan Logistik dan Peralatan sesuai Standar Penanggulangan Bencana								
08.04.02 KP: Peningkatan Layanan Peringatan Dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana	01 - Meningkatnya penyelenggaraan layanan peringatan dini dan keandalan respons saat terjadi bencana	01 - Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana	persen	6,00	6,10	6,32	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		02 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana ke publik	menit	3	< 3	< 3		075 - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana dan menerima intervensi sesuai standar	persen	75	100	100		103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.02.01 PRO-P: Pendampingan Penanganan Kedaruratan Bencana								
08.04.02.02 PRO-P: Pelayanan Peringatan Dini Multiancaman Bencana								
08.04.03 KP: Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	01 - Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	01 - Persentase daerah pasca bencana masif yang ditangani	persen	100	100	100	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.03.01 PRO-P: Pemulihan Kehidupan Masyarakat Pascabencana								
08.04.03.02 PRO-P: Pemulihan Ekonomi Terintegrasi Pascabencana								

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.04.04 KP: Peningkatan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana	01 - Meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap bencana	01 - Persentase desa berketahanan bencana multipihak	persen	10,31	10,49	11,74	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.04.01 PRO-P: Peningkatan Kemampuan Adaptif Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana								
08.04.04.02 PRO-P: Pemberdayaan Komunitas Masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana								
08.04.05 KP: Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana	01 - Meningkatnya infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana	01 - Rasio kabupaten/kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana	persen	- (indikator baru)	19	100	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
08.04.05.01 PRO-P: Peningkatan Keandalan Bangunan Berketahanan Bencana								
08.04.05.02 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air								

SK No 122462 C

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pengampu
08.04.05.05 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Mitigasi Bencana Geologi								

Keterangan:

Target bersifat indikatif dan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: (a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; (b) ketersediaan dan sumber pendanaan; serta (c) keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 149744 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025—2029

ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2025—2029

SK No 194342 A

1. Wilayah Sumatera

1.1 Provinsi Aceh

ACEH

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Jantho
2 Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe
3 Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan DT Gayo-Danau Laut Tawar
4 Kawasan Perkotaan Meulaboh
5 Kawasan Perkotaan Langsa
6 Kawasan Perkotaan Subulussalam
7 KPBPB Sabang

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kopi
1 DT Gayo (Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah)

Sawit dan Karet
2 Pesisir Timur Laut Aceh (Kab. Aceh Timur dan Kab. Aceh Tamiang)
3 Pesisir Barat-Selatan Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam)

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan
1 Pesisir Utara Aceh (Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang)

Swasembada Air dan Energi
2 DT Gayo (Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah)

Swasembada Pangan dan Energi
3 Pesisir Barat Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Barat Daya)

D. Kawasan Afirmasi

1 Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Gunung Leuser

Sasaran Pembangunan Provinsi Aceh

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,8 (Rata-rata 2025–2029)	46,8	1,1	12,00 – 13,00	0,290 – 0,293	0,57	36,08	82,89	4,60 – 5,28
2029	6,6 (2029)	65,2	1,1	6,39 – 7,39	0,254 – 0,258	0,60	53,63	83,56	4,07 – 4,94

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A7	Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Jantho (A1) dan KPBPB Sabang (A7) • Kota Banda Aceh • Kab. Aceh Besar • Kota Sabang	• Pengembangan KPBPB Sabang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berdaya saing, berwawasan maritim, dan *globally connected*, melalui: ○ Pengembangan Pelabuhan CT-3 dan CT-1 Sabang ○ Penguatan industri transportasi laut di Sabang ○ Pengembangan Sabang *Integrated Special Tourism Zone* ○ *Urban renewal* Kota Tua Sabang ○ Pengembangan *Sabang International Maritime Research Center dan University* ○ Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kota Sabang (PHTC) ○ Penguatan PKSN Perbatasan Prioritas Sabang • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Banda Aceh-Jantho, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Banda Aceh dan Sabang (PHTC) • Pembangunan jalan *missing link* Jantho–Keumala • Penguatan Sabang sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar • Pengembangan *World Class Islamic University* pada UIN Ar-Raniry • Pengembangan SPAM Regional Banda Aceh-Aceh Besar • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Banda Aceh
A2	Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe • Kota Lhokseumawe • Kab. Aceh Utara • Kab. Bireuen	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Lhokseumawe, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, dan industri energi dan *green hydrogen*) • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi lanjutan gas bumi, terutama untuk produk-produk yang mendukung industri lainnya seperti olefin, aromatik, DME • Pengembangan Pelabuhan Krueng Geukeuh • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Lhokseumawe (PHTC) • Pengembangan SPAM Regional Lhokseumawe-Aceh Utara • Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Pusong Lhokseumawe • Pengembangan kota agropolitan Lhokseumawe • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr. Fauziah Bireuen (PHTC) • Preservasi jalan ruas Lhokseumawe–Bireuen • Pengembangan Bandar Udara Malikussaleh (peningkatan terminal) • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A3	Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dataran Tinggi Gayo-Danau Laut Tawar • Kab. Aceh Tengah • Kab. Bener Meriah • Kab. Gayo Lues	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Takengon, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan kota agropolitan Takengon • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Banda Aceh dan Sabang (PHTC) • Pengembangan SPAM Regional Takengon-Redelong • Pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan DT Gayo-Danau Laut Tawar melalui peningkatan 6A kepariwisataan secara holistik • Penataan kawasan *waterfront* Danau Laut Tawar di Takengon • Preservasi jalan ruas Lhokseumawe–Redelong–Takengon dan Takengon–Blangkejeren • Penuntasan pembangunan jalan ruas Geumpang–Pameu • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Datu Beru (PHTC) • Pembangunan Jembatan Enang-Enang (Kab. Bener Meriah)
A4	Kawasan Perkotaan Meulaboh • Kab. Aceh Barat	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Meulaboh, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Meulaboh (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Meulaboh • Pengembangan terminal *multipurpose* Pelabuhan Meulaboh • Preservasi jalan ruas Takengon–Meulaboh, Meulaboh–Calang, Meulaboh–Sukamakmue–Blangpidie • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kab/kota, khususnya pada RSUD Cut Nyak Dhien (PHTC)
A5	Kawasan Perkotaan Langsa • Kota Langsa	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Langsa, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Langsa (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Langsa • Pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Langsa (PHTC) • Pengembangan kota agropolitan Langsa
A6	Kawasan Perkotaan Subulussalam • Kota Subulussalam	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Subulussalam, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Subulussalam (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Subulussalam • Pengembangan kota agropolitan Subulussalam • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kota Subulussalam (PHTC) • Preservasi jalan ruas Subulussalam–Tapaktuan, Subulussalam-Singkil, dan Subulussalam-Salak
C1	Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh • Kab. Aceh Besar • Kab. Pidie	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Alue Ubay, D. I. Krueng Pase, D. I. Jambo Aye, D. I. Krueng Tiro, D. I. Krueng Aceh, D. I. Krueng Jreu • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Pidie Jaya • Kab. Bireuen • Kab. Aceh Utara • Kab. Aceh Timur • Kab. Aceh Tamiang	• Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Pengembangan kawasan sentra produksi garam di Pidie, Aceh Utara, dan Pidie Jaya • Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada *Andaman-North Sumatera Basin* • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Arun-Sigli • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Arun-Pangkalan Susu • Pengembangan *broodstock center* udang • Pengembangan kawasan sentra produksi garam di Pidie, Aceh Utara, dan Pidie Jaya • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: o Kab. Aceh Besar: Mesjid Raya o Kab. Pidie: Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga o Kab. Pidie Jaya: Panteraja, Meurah Dua, Ulim o Kab. Bireuen: Kuala o Kab. Aceh Utara: Dewantara, Samudera, Lapang, Baktiya Barat o Kota Lhokseumawe: Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti, Blang Mangat o Kab. Aceh Timur: Madat, Nurussalam, Darul Aman, Idi Rayeuk, Idi Timur, Peudawa, Peureulak Barat, Peureulak, Peureulak Timur, Rantau Selamat, Birem Bayeun o Kota Langsa: Langsa Barat

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
C2	Kawasan Swasembada Air dan Energi Dataran Tinggi Gayo • Kab. Bener Meriah • Kab. Aceh Tengah	• Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* WS Pasee–Peusangan dan WS Jambo Aye • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Laut Tawar dan DAS Peusangan • Revitalisasi Danau Laut Tawar • Pembangunan infrastruktur PLTS Apung Danau Laut Tawar • Pembangunan infrastruktur PLTA Peusangan II
C3	Kawasan Swasembada Pangan dan Energi Pesisir Barat Aceh • Kab. Aceh Jaya • Kab. Aceh Barat • Kab. Nagan Raya • Kab. Aceh Barat Daya	• Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Tutut (Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya) • Pengembangan gasifikasi batu bara • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Lhok Guci, D. I. Susoh, dan D. I. Jeuram • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Perencanaan dan penyiapan pembangunan Jembatan Spiral Geureute pada Lintas Jalan Nasional Banda Aceh–Calang • Kawasan Perdesaan Budidaya Perikanan Air Tawar Terpadu Kab. Nagan Raya
D1	Kawasan Afirmasi Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan) • Kab. Simeulue	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Preservasi jalan Lingkar Simeulue • Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perikanan dan perkebunan (kelapa dan pala) • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Sinabang (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Sinabang • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaut • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kab. Simeulue (PHTC) • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Dataran Tinggi Gayo • Kab. Aceh Tengah • Kab. Bener Meriah	• Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (kopi) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi) • Peningkatan mutu produk pertanian (kopi) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
B2 B3	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Karet Pesisir Timur Aceh (B2) dan Pesisir Barat-Selatan Aceh (B3) • B2: Pesisir Timur: Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang • B3: Pesisir Barat-Selatan: Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan karet) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan karet) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan karet) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan *silvopastura*
E1	Kawasan Konservasi TN Gunung Leuser • Kab. Gayo Lues • Kab. Aceh Barat Daya • Kab. Aceh Tenggara • Kab. Aceh Selatan	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Bener Meriah • Kab. Aceh Singkil • Kab. Aceh Tengah • Kab. Gayo Lues • Kab. Pidie • Kab. Nagan Raya • Kab. Aceh Utara	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Aceh	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit menular lainnya o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, antara lain melalui: o Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan o Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan o Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui: o Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia o Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan o Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik o Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* o Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: o Perluasan infrastruktur digital o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital o Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: o Penguatan tata kelola pemerintahan digital o Penguatan infrastruktur pemerintahan digital o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN o Digitalisasi layanan publik prioritas o Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Penguatan ekonomi syariah, antara lain melalui: o Pengembangan Industri Halal o Peningkatan Ekspor Halal dan Kerja sama Ekonomi Syariah Internasional o Penciptaan Ekosistem UMKM Halal o Penguatan Keuangan Syariah o Penguatan Dana Sosial Syariah • Penguatan pendidikan Islam bertaraf global, melalui: o Peningkatan kualitas pendidikan dayah dan pendidikan keagamaan o Rekognisi lulusan pendidikan keagamaan dan pendidikan dayah/pesantren o Penguatan penjaminan mutu pendidikan keagamaan dan pendidikan dayah/pesantren

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.2 Provinsi Sumatera Utara

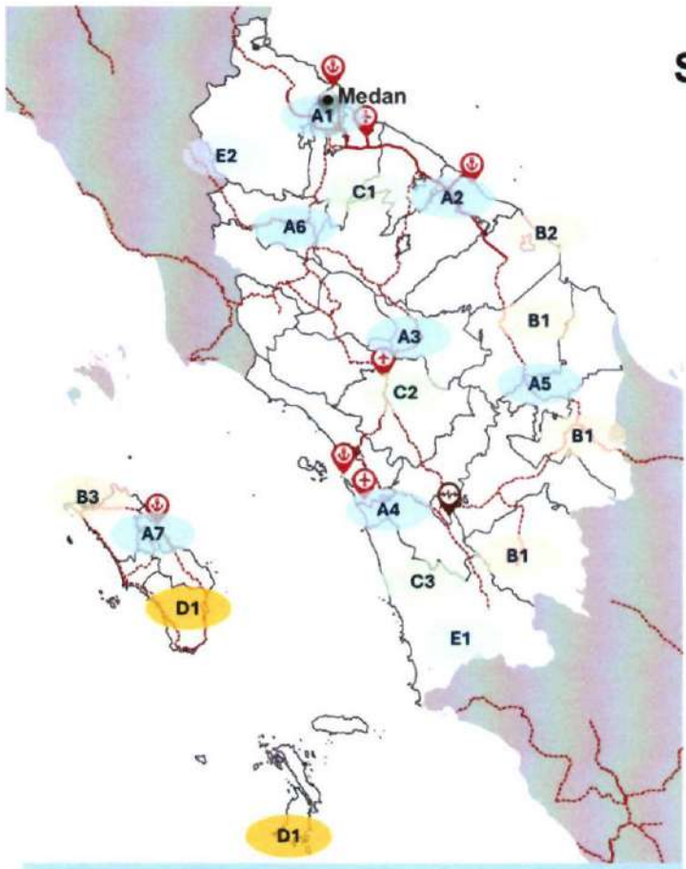

SUMATERA UTARA

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan-Binjai-Deli Serdang
2 Kawasan Pengembangan Industri Kualatanjung-Seimangkei
3 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Danau Toba (termasuk Kawasan Perkotaan Balige)
4 Kawasan Perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan
5 Kawasan Perkotaan Rantauprapat
6 Kawasan Perkotaan Kabanjahe
7 Kawasan Perkotaan Gunungsitoli

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sawit, Karet, Kelapa

1 Asahan-Labuhanbatu-Padanglawas (Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Padanglawas, Kab. Padanglawas Utara)

Ekonomi Biru

2 Asahan-Tanjungbalai (Kota Tanjungbalai, Kab. Asahan)
3 Nias Utara (Kab. Nias Utara)

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan

1 Sumatera Timur (Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu)

Swasembada Pangan, Air, dan Energi

2 Bukit Barisan Utara (Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Karo)

Swasembada Pangan dan Air

3 Batang Angkola-Batang Gadis (Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal)

D. Kawasan Afirmasi

1 Kep. Nias (Kab. Nias Utara, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan, Kota Gunungsitoli) (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Batang Gadis
2 TN Gunung Leuser

Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,8 (Rata-rata 2025-2029)	78,4	5,2	6,96 – 7,46	0,303 – 0,305	0,54	1,00	77,20	5,27 – 5,56
2029	7,6 (2029)	115,3	5,3	2,82 – 3,82	0,287 – 0,291	0,57	18,52	77,87	4,74 – 5,20

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan-Binjai-Deli Serdang • Kota Medan • Kota Binjai • Kab. Deli Serdang	• Peningkatan kualitas dan penataan WM Medan, antara lain melalui: o Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Medan o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan o Penyusunan *metropolitan statistical area* • Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Medan melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta komuter • Pengembangan TPST skala regional Medan–Deli Serdang • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Medan, termasuk penerapan NBS, SIH3, dan FEWS • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Medan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Medan (PHTC) • Pengembangan RSU Haji Medan menuju rumah sakit berstandar internasional • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RSAL dr. Komang Makes (Kota Medan) • Penataan Kota Lama Kesawan • Pembangunan SPAM Regional Medan–Binjai–Deli Serdang • Pengembangan Aeropolis Kualanamu • *Medan Urban Traffic Improvement Project* • Pengembangan koridor industri Medan-Binjai-Deli Serdang (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, industri makanan dan minuman, industri perikanan, industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, dan industri mesin dan perlengkapan) • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi karet, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar karet, yaitu *compound rubber*, lateks dasar, dan karet padat, serta produk hilirisasi lanjutan karet ban performa tinggi, material tahan gempa • Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Pangkalan Susu-Medan Barat • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Galang-Medan Timur • Pengembangan pusat inkubasi kewirausahaan dan UMKM di kawasan *Deli Sport City* • Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Belawan • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A2	Kawasan Pengembangan Industri Kualatanjung-Sei Mangkei • Kab. Batubara • Kab. Simalungun	• Pengembangan koridor industri Kualatanjung-Sei Mangkei (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, hilirisasi bauksit, industri mesin dan perlengkapan, dan industri logam, besi, dan baja) • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi karet, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar karet, yaitu *compound rubber*, lateks dasar, dan karet padat, serta produk hilirisasi lanjutan karet ban performa tinggi, material tahan gempa • Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif • Hilirisasi bauksit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar bauksit, yaitu SGA, CGA, dan *aluminium ingot*, serta produk hilirisasi lanjutan bauksit *aluminium alloy*, katalis alumina, komposit aluminium • Pengembangan KEK Sei Mangkei • Pengembangan KI Kualatanjung • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kota penyangga Inderapura dan Perdagangan (PHTC) • Pengembangan SPAM Kualatanjung-Inderapura dan SPAM Sei Mangkei-Perdagangan • Pengembangan Kota Penyangga Inderapura (Kab. Batubara) (rumah sakit, pasar modern, terminal bus) • Pengembangan Kota Penyangga Perdagangan (Kab. Simalungun) (BLK, pasar modern, terminal bus) • Pengembangan kelas jauh Politeknik Negeri Medan • Pengembangan SUTET 500 kV Galang-Rantauprapat-Perawang • Pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Utara-Riau • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada kota penyangga Indrapura • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A3	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Danau Toba dan Kawasan Perkotaan Balige (Destinasi	• Peningkatan 6A Pariwisata dan *Urban Renewal* di Parapat-Ajibata, Balige, Baktiraja, Pangururan, Silalahi-Paropo, Merek, dan Ambarita-Tomok • Pengembangan Kawasan Terpadu *Sibandan Special Tourism Zone*

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Pariwisata Prioritas Danau Toba) • Kab. Toba • Kab. Samosir • Kab. Humbang Hasundutan • Kab. Tapanuli Utara • Kab. Dairi • Kab. Karo • Kab. Simalungun	• Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah, serta Pusat Riset Kebudayaan Bertaraf Internasional • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Balige, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Balige (PHTC) • Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Ajibata • Pengembangan SPAM Perkotaan Balige dan SPAM Pulau Samosir • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Pematangsiantar-Parapat-Balige-Siborongborong • Pengembangan kota agropolitan Balige • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada di kawasan perkotaan Balige (PHTC) • Preservasi jalan ruas Balige–Siborongborong–Doloksanggul–Tele–Sidikalang, Tele–Panguruan, Lingkar Samosir, Siborongborong-Tarutung–Sipirok, dan Tarutung–Sibolga
A4	Kawasan Perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan • Kota Sibolga • Kab. Tapanuli Tengah • Kota Padangsidimpuan	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan (PHTC) • Pengembangan SPAM Regional Sibolga-Pandan • Pengembangan SPAM Perkotaan Padangsidimpuan • Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Sibolga • Pengembangan Pelabuhan Sibolga • Pengembangan kota agropolitan Padangsidimpuan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kab. Tapanuli Selatan (PHTC) • Preservasi jalan ruas Sibolga–Pandan–Padangsidimpuan, Padangsidimpuan–Sipirok–Tarutung, Sibolga–Tarutung, Padangsidimpuan–Aekgodang–Gunungtua, Padangsidimpuan–Aekgodang–Sibuhuan, dan Padangsidimpuan–Panyabungan
A5	Kawasan Perkotaan Rantauprapat • Kab. Labuhanbatu	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Rantauprapat, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Rantauprapat (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Rantauprapat • Pengembangan kota agropolitan Rantauprapat • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Rantauprapat (PHTC) • Preservasi jalan ruas Rantauprapat–Gunungtua-Sibuhuan • Pembangunan Jalan Tol Rantauprapat-Kisaran
A6	Kawasan Perkotaan Kabanjahe • Kab. Karo	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kabanjahe, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Kabanjahe (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Kabanjahe-Berastagi • Pengembangan kota agropolitan Kabanjahe-Berastagi • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kabupaten Karo (PHTC) • Preservasi jalan ruas Kabanjahe–Berastagi–Medan, Kabanjahe–Sidikalang–Subulussalam, Kabanjahe–Kutacane
C1	Kawasan Swasembada Pangan Sumatera Timur • Kab. Langkat • Kab. Deli Serdang • Kab. Serdang Bedagai • Kab. Simalungun • Kab. Asahan • Kab. Labuhanbatu	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Bandar Sidoras dan D. I. Namu Sirasira • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: o Kab. Langkat: Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Berandan Barat, Gebang, Tanjung Pura o Kab. Serdang Bedagai: Tanjung Beringin, Bandar Khalipah o Kab. Batu Bara: Sei Suka o Kab. Asahan: Silau Laut, Sei Kepayang Timur
C2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Utara • Kab. Toba • Kab. Samosir • Kab. Humbang Hasundutan • Kab. Tapanuli Utara • Kab. Dairi • Kab. Karo • Kab. Pakpak Bharat • Kab. Tapanuli Tengah	• Pengembangan KSPP Sumatera Utara • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, serta peningkatan produktivitas petani • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* WS Toba-Asahan, terutama pada Sub-DAS Asahan dan Sub-DAS Asahan Hulu (Danau Toba) • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Toba dan Sub-DAS Asahan • Revitalisasi Danau Toba • Pembangunan infrastruktur PLTA Simonggo • Pembangunan infrastruktur PLTA Asahan III dan IV • Pembangunan infrastruktur PLTA PS Danau Toba • Pembangunan PLTS Apung Danau Toba • Pembangunan infrastruktur PLTA Batangtoru • Pengembangan PLTP Sarulla • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Galang-PLTA PS Danau Toba • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Sarulla-PLTA Batangtoru • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Sarulla-Rantauprapat

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
C3	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Batang Angkola-Batang Gadis • Kab. Tapanuli Selatan • Kab. Mandailing Natal	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Batang Batahan dan D. I. Batang Angkola • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* WS Batang Angkola-Batang Gadis, terutama pada DAS Batang Gadis • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Batang Gadis dan Danau Siais

D1
A7
	Kawasan Afirmasi Kepulauan Nias (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) (D1) dan Kawasan Perkotaan Gunungsitoli (A7)
	• Kab. Nias
	• Kab. Nias Utara*
	• Kab. Nias Barat
	• Kab. Nias Selatan
	• Kota Gunungsitoli
	
	Keterangan:
	*) Daerah Tertinggal
		• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan
		• Peningkatan ketahanan bencana
		• Pembangunan/Preservasi jalan Lingkar dan Trans Nias
		• Pengembangan Pelabuhan Gunungsitoli
		• Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah
		• Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perikanan dan perkebunan (kelapa dan pisang)
		• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Gunungsitoli, antara lain melalui:
		  ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
		  ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan SPAM Perkotaan Gunungsitoli • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Gunungsitoli (PHTC) • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr. M. Thomsen Nias (PHTC) • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat dan Kab. Nias Selatan • Peningkatan 6A Pariwisata di Telukdalam, Kep. Hinako, Lahewa-Tureloto, Kep. Batu • Pengembangan jaringan/daerah irigasi baru di WS Nias • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa Asahan-Labuhanbatu-Padanglawas • Kab. Asahan • Kab. Labuhanbatu • Kab. Labuhanbatu Utara • Kab. Labuhanbatu Selatan • Kab. Padanglawas • Kab. Padanglawas Utara	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, dan kelapa) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
B2	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Asahan-Tanjungbalai • Kota Tanjungbalai • Kab. Asahan	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Tanjungbalai • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
B3	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Nias Utara • Kab. Nias Utara	• Pengembangan pelabuhan perikanan di Lahewa • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
E1 E2	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Batang Gadis (E1) dan TN Gunung Leuser (E2) • TN Batang Gadis: Kab. Mandailing Natal • TN Gunung Leuser: Kab. Langkat	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Sumatera Utara	• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Padangsidimpuan
	• Kab. Labuhanbatu Selatan • Kab. Mandailing Natal • Kab. Padanglawas • Kab. Padanglawas Utara • Kab. Labuhanbatu Utara • Kab. Nias Selatan • Kab. Pakpak Bharat • Kab. Nias Utara • Kab. Nias Barat • Kab. Langkat • Kab. Nias • Kota Gunungsitoli	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Sumatera Utara	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan o Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik o Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* o Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: o Perluasan infrastruktur digital o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital o Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN o Digitalisasi layanan publik prioritas o Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Sumatera Utara, antara lain melalui: o Pelindungan dan pelestarian warisan budaya o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan o Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Sumatera Utara, antara lain melalui: o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) o Penanggulangan judi dan penyelundupan o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

1.3 Provinsi Sumatera Barat

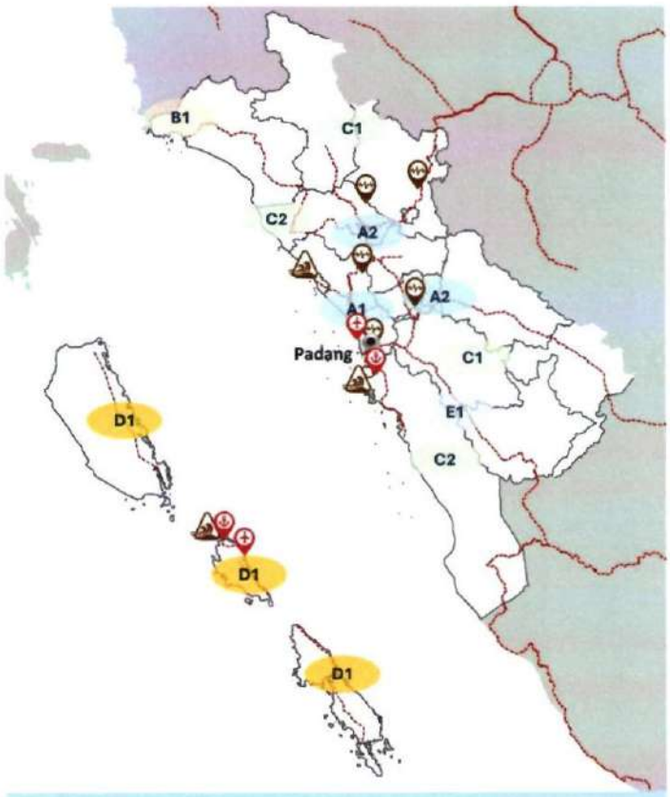

SUMATERA BARAT

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman
2 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau (termasuk Kawasan Perkotaan Bukittinggi-Padangpanjang dan Solok-Sawahlunto)

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sawit dan Ekonomi Biru
1 Pasaman Barat

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan, Air, dan Energi
1 Dataran Tinggi Minangkabau (Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Sijunjung)

Swasembada Pangan
2 Minangkabau Pesisir (Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat)

D. Kawasan Afirmasi

1 Kep. Mentawai (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Kerinci-Seblat

Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,4 (Rata-rata 2025-2029)	61,8	1,5	4,50 – 5,10	0,274 – 0,279	0,59	52,62	77,95	5,37 – 5,76
2029	7,3 (2029)	90,2	1,6	2,40 – 3,40	0,243 – 0,247	0,63	65,89	78,79	4,51 – 5,37

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman • Kota Padang • Kota Pariaman • Kab. Padang Pariaman	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Padang-Pariaman, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan koridor industri rintisan Padang-Pariaman (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa, hilirisasi kelapa sawit, industri makanan dan minuman, dan industri transportasi laut dan galangan kapal) • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah • Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Bungus • Pembangunan SPAM Regional Padang-Padang Pariaman-Pariaman • Pembangunan TPST Regional Padang-Padang Pariaman-Pariaman • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Padang (PHTC) • Preservasi jalan ruas Padang–Mandeh–Painan–Tapan • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman
A2	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau (termasuk Kawasan Perkotaan Bukittinggi-Padangpanjang dan Kawasan Perkotaan Solok-Sawahlunto) • Kab. Tanah Datar • Kab. Agam • Kab. Solok • Kab. Limapuluh Kota • Kab. Sijunjung • Kota Bukittinggi • Kota Padangpanjang	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bukittinggi-Padangpanjang dan Solok-Sawahlunto, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Peningkatan 6A Pariwisata, *Urban Renewal*, dan pembangunan Pasar Wisata Terintegrasi Pusat Seni dan Kebudayaan di Bukittinggi, Sawahlunto, Solok, Batusangkar, Payakumbuh, dan Padangpanjang • Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Kototinggi • Pengembangan kawasan pariwisata budaya Kampung Adat Sijunjung • Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kota Solok • Kota Sawahlunto • Kota Payakumbuh	• Pengembangan Kawasan Terpadu Kandi di Sawahlunto • Penataan *waterfront* Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bukittinggi-Padangpanjang dan Solok-Sawahlunto (PHTC) • Pembangunan Jalan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru • Peningkatan jalur KA Kayutanam-Padangpanjang • Pembangunan *Fly Over* Sitinjau Lauik • Preservasi jalan ruas Padang–Arosuka–Solok, Solok–Padang Aro, Solok–Sawahlunto–Muarosijunjung–Pulaupunjung–Muarobungo, Muarosijunjung–Teluk Kuantan, Padangpanjang–Batusangkar, Bukittinggi–Danau Maninjau–Lubukbasung–Padangsawah–Simpang Ampek, Bukittinggi–Lubuksikaping • Pengembangan kota agropolitan Bukittinggi dan Solok • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Achmad Mochtar di Bukittinggi dan RSUD Sawahlunto (PHTC) • Pembangunan TPST Regional Bukittinggi-Agam-Padangpanjang • Pengembangan SPAM Regional Bukittinggi-Agam-Padangpanjang • Pengembangan SPAM Perkotaan Solok dan SPAM Perkotaan Sawahlunto • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Bukittinggi • Pembangunan sabo dam sebagai upaya mitigasi bencana alam gunung api, terutama pada Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Tanah Datar • Kawasan Perdesaan Prioritas Kab. Agam
C1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau • Kab. Tanah Datar • Kab. Agam • Kab. Solok • Kab. Solok Selatan • Kab. Limapuluh Kota • Kab. Sijunjung • Kab. Pasaman	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Batang Sinamar, D. I. Batang Antokan, D. I. Panti Rao • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment* area WS Indragiri, WS Akuaman, WS Selaut-Tarusan, WS Masang-Pasaman • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah • Revitalisasi Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah • Pembangunan infrastruktur PLTP Muaralaboh • Pembangunan infrastruktur PLTA Masang II • Pembangunan PLTS Apung Danau Singkarak • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Payakumbuh-Perawang • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung-Kamang Baru (Kab. Sijunjung)
C2	Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir • Kab. Pesisir Selatan • Kab. Padang Pariaman • Kab. Pasaman Barat	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Batang Anai, D. I. Batang Bayang, D. I. Batang Tongar • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut (Kab. Pesisir Selatan)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
D1	Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Kep. Mentawai	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Pembangunan jalan Trans Mentawai • Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perkebunan (kelapa dan sagu), hasil hutan dan agroforestri, dan perikanan • Peningkatan tipe RS dari tipe D ke tipe C, dan pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kep. Mentawai (PHTC) • Peningkatan 6A Pariwisata di Sipora dan Siberut • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Tuapeijat (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Tuapeijat • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Ekonomi Biru Pasaman Barat • Kab. Pasaman Barat	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Airbangis • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pasaman Barat • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
E1	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Kerinci-Seblat • Kab. Pesisir Selatan • Kab. Solok Selatan	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat dan Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Sumatera Barat	• Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman *megathrust* dan tsunami di Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kep. Mentawai (*Megathrust* Mentawai-Siberut) • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Padangpanjang
	• Kab. Kep. Mentawai • Kab. Solok • Kab. Sijunjung	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Sumatera Barat	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit menular lainnya o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, antara lain melalui: o Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan o Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan o Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia ○ Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: ○ Penguatan tata kelola pemerintahan digital ○ Penguatan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Minangkabau (ABS-SBK), antara lain melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat • Penguatan ekonomi syariah, antara lain melalui: ○ Pengembangan Industri Halal ○ Peningkatan Ekspor Halal dan Kerja sama Ekonomi Syariah Internasional ○ Penciptaan Ekosistem UMKM Halal ○ Penguatan Keuangan Syariah ○ Penguatan Dana Sosial Syariah

1.4 Provinsi Riau

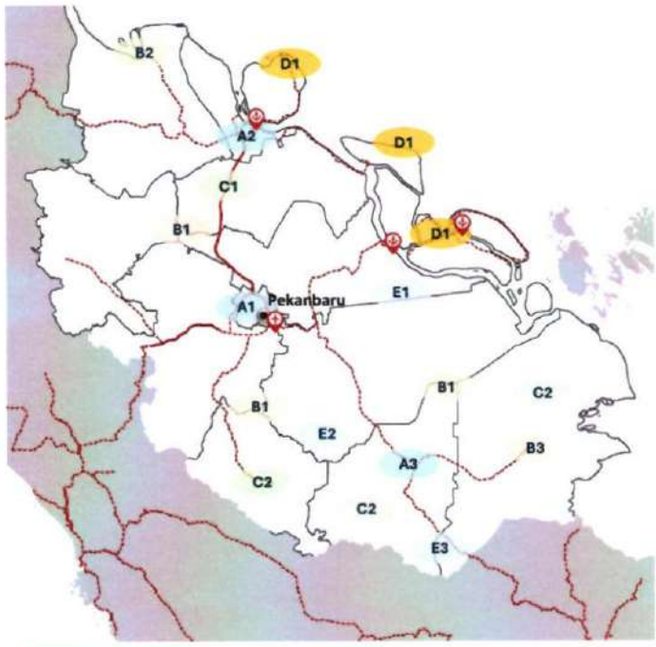

RIAU

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Kawasan Perkotaan Pekanbaru
2 Kawasan Perkotaan Dumai & Kawasan Pengembangan Industri Dumai
3 Kawasan Perkotaan Rengat

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sawit, Karet, Kelapa
1 Rokan-Siak-Kampar-Indragiri

Ekonomi Biru
2 Rokan Hilir
3 Indragiri Hilir

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Energi
1 Riau

Swasembada Pangan dan Air
2 Indragiri (Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kuantan Singingi)

D. Kawasan Afirmasi

1 Kepulauan Meranti-Bengkalis (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Zamrud
2 TN Tesso Nilo
3 TN Bukit Tigapuluh

Sasaran Pembangunan Provinsi Riau

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,2 (Rata-rata 2025–2029)	174,8	5,0	5,19 – 6,19	0,318 – 0,324	0,57	46,88	71,85	3,55 – 3,66
2029	5,9 (2029)	249,7	4,9	3,25 – 4,25	0,279 – 0,283	0,60	83,68	72,69	2,94 – 3,42

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Perkotaan Pekanbaru • Kota Pekanbaru • Kab. Kampar • Kab. Pelalawan • Kab. Siak	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pekanbaru, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Kawasan Perkotaan Pekanbaru melalui pembangunan BRT • Pengembangan koridor industri Pekanbaru-Dumai • Pengembangan SPAM Regional Pekanbaru-Kampar • Pembangunan TPST Regional Pekanbaru-Kampar-Pelalawan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pekanbaru (PHTC) • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Pekanbaru • Pembangunan Jembatan Siak V dan *Pekanbaru East Outer Ring Road* Trase IV • Pembangunan Jalan Tol Lingkar Barat Pekanbaru (Menghubungkan Tol Pekanbaru-Dumai, Tol Pekanbaru-Padang, dan Tol Pekanbaru-Rengat) • Peningkatan 6A pada koridor pariwisata Muaratakus-Pekanbaru-Siak (Revitalisasi dan Penataan *Waterfront* Sungai Siak di Pekanbaru dan Siak Sri Inderapura, Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Percandian Muaratakus, serta *Urban Renewal* Kota Tua Pekanbaru dan Kawasan Istana Siak) • Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang dan Jalan Tol Pekanbaru–Rengat–Jambi • Preservasi jalan ruas Pekanbaru–Teluk Kuantan
A2	Kawasan Perkotaan Dumai dan Kawasan Pengembangan Industri Dumai • Kota Dumai	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Dumai, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan koridor industri Pekanbaru-Dumai (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri energi, dan industri kosmetik dan farmasi) • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi karet, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar karet, yaitu *compound rubber*, lateks dasar, dan karet padat, serta produk hilirisasi lanjutan karet ban performa tinggi, material tahan gempa • Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif • Pengembangan dan pembangunan Kilang Minyak Bumi Dumai • Pengembangan Pelabuhan Dumai • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Dumai (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Dumai • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kota Dumai (PHTC) • Pembangunan Jalan Tol Dumai-Kotapinang-Rantauprapat-Kisaran • Pembangunan Jalan Lingkar Barat Dumai (Bukit Timah-Parit Kitang-Lubukgaung) • Preservasi jalan ruas Dumai–Bagansiapiapi dan Dumai–Sungai Pakning • Pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Utara-Riau • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Dumai • Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A3	Kawasan Perkotaan Rengat • Kab. Indragiri Hulu	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Rengat, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Rengat (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Rengat • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Indrasari Rengat (PHTC) • Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Rengat-Jambi • Preservasi jalan ruas Rengat–Teluk Kuantan dan Rengat-Tembilahan • Pengembangan kota agropolitan Rengat
C1	Kawasan Swasembada Energi Riau • Kab. Rokan Hilir • Kab. Rokan Hulu • Kab. Bengkalis	• Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada *Central Sumatera Basin* • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Sumatera-Kep. Meranti-Karimun-Batam-Bintan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Kampar • Kab. Pelalawan • Kab. Siak • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri Hilir • Kab. Kep. Meranti	• Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Perawang-Dumai-Malaysia (Interkoneksi 500 kV Sumatera-Malaysia) • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Perawang-Rantauprapat • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Perawang-Peranap-Aurduri
C2	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Indragiri • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri Hilir • Kab. Kuantan Singingi	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Kelayang, D. I. R. Kuala Keritang, D. I. R. Kuala Sebatu, D. I. R. Pengalihan Keritang, dan D. I. Simandolak-Pangean • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan gambut dan mangrove, dan lahan pada *catchment area* WS Indragiri, terutama pada DAS Indragiri dan DAS Gaung • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Indragiri dan DAS Gaung
D1	Kawasan Afirmasi Kepulauan Meranti-Bengkalis (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Kep. Meranti • Kab. Bengkalis	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Pengembangan SPAM Perkotaan Selatpanjang • Peningkatan ketahanan bencana • Preservasi jalan Trans Meranti • Pembangunan Jembatan Tebingtinggi-Merbau

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan Pulau Rangsang sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar • Pengembangan bandara perintis Kep. Meranti • Pembangunan Pelabuhan Dorak • Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perkebunan (sagu dan kelapa) dan perikanan • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Selatpanjang (PHTC) • Preservasi Jalan Trans Bengkalis • Penguatan Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan • Penguatan PKSN Perbatasan Prioritas Bengkalis • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: ○ Kab. Kep. Meranti: Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Rangsang
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa Rokan-Siak-Kampar-Indragiri • Kab. Rokan Hilir • Kab. Rokan Hulu • Kab. Bengkalis • Kab. Kampar • Kab. Pelalawan • Kab. Siak • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri Hilir • Kab. Kuantan Singingi	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, dan kelapa) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: ○ Kab. Rokan Hilir: Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi
B2 B3	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Rokan Hilir (B2) dan Indragiri Hilir (B3) • Kab. Rokan Hilir • Kab. Indragiri Hilir	• Pengembangan pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan Bagansiapiapi dan Pelabuhan Perikanan Tembilahan • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Rokan Hilir dan Indragiri Hilir • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
E1 E2 E3	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Zamrud (E1), Tesso Nilo (E2), dan Bukit Tigapuluh (E3) • Zamrud: Kab. Siak • Tesso Nilo: Kab. Pelalawan • Bukit Tigapuluh: Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Indragiri Hilir	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana
	• Kab. Kep. Meranti • Kab. Rokan Hulu • Kab. Kampar • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Bengkalis • Kab. Indragiri Hilir	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Riau	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit menular lainnya o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, antara lain melalui: o Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan o Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan o Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik o Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* o Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: o Perluasan infrastruktur digital o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital o Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: o Penguatan tata kelola pemerintahan digital o Penguatan infrastruktur pemerintahan digital o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN o Digitalisasi layanan publik prioritas o Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Melayu Riau, antara lain melalui: o Pelindungan dan pelestarian warisan budaya o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan o Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat • Penguatan ekonomi syariah, antara lain melalui: o Pengembangan Industri Halal o Peningkatan Ekspor Halal dan Kerja sama Ekonomi Syariah Internasional o Penciptaan Ekosistem UMKM Halal o Penguatan Keuangan Syariah o Penguatan Dana Sosial Syariah • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Riau, antara lain melalui: o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) o Penanggulangan judi dan penyelundupan o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.5 Provinsi Jambi

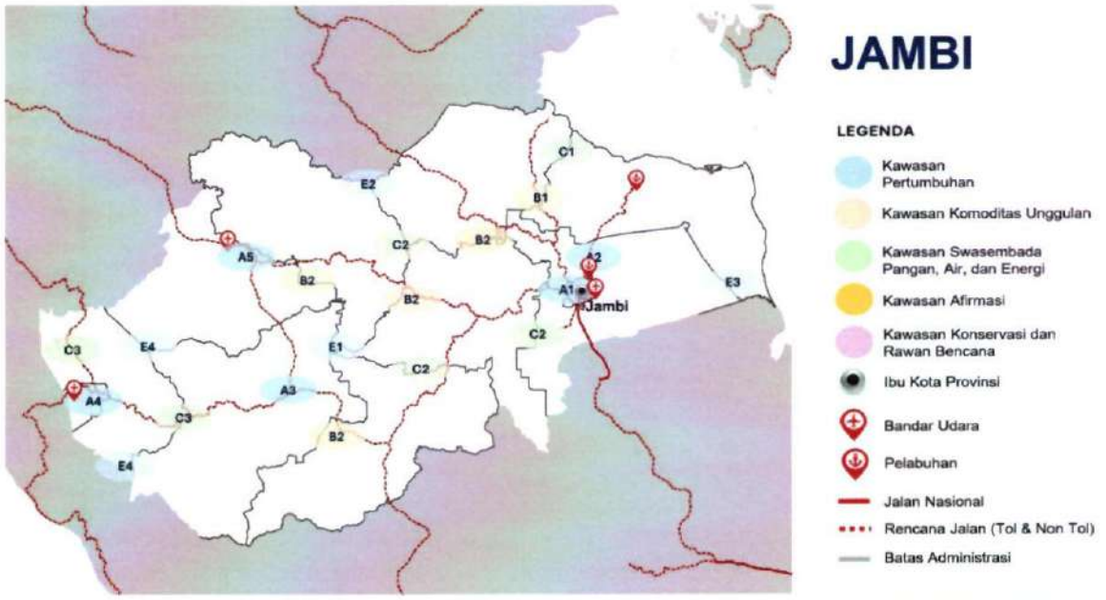

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Kawasan Perkotaan Jambi
2 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Candi Muarojambi
3 Kawasan Perkotaan Bangko
4 Kawasan Perkotaan Sungaipenuh
5 Kawasan Perkotaan Muarobungo

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sawit dan Kelapa
1 Tanjungjabung (Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tanjung Jabung Timur)

Sawit dan Karet
2 Cekungan Batanghari (Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muarojambi, Kab. Batanghari, Kab. Tebo, Kab. Bungo, dan Kab. Merangin)

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan
1 Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tanjung Jabung Timur

Swasembada Air dan Energi
2 Cekungan Batanghari (Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Muarojambi, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat)

Swasembada Pangan, Air, dan Energi
3 Bukit Barisan Tengah Jambi (Kab. Kerinci, Kab. Merangin, Kota Sungaipenuh)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Bukit Duabelas
2 TN Bukit Tigapuluh
3 TN Berbak
4 TN Kerinci-Seblat

Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,1 (Rata-rata 2025–2029)	90,8	1,4	6,30 – 6,80	0,337 – 0,341	0,56	78,50	73,71	4,27 – 4,38
2029	7,0 (2029)	132,7	1,4	3,66 – 4,66	0,311 - 0,315	0,59	86,55	74,56	2,78 – 4,07

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2	Kawasan Perkotaan Jambi (A1) dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Candi Muarojambi (A2) • Kota Jambi • Kab. Muaro Jambi	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Jambi, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Jambi (PHTC) • Pengembangan SPAM Regional Jambi • Pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi • Peningkatan 6A pada kawasan pariwisata Candi Muarojambi (Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Percandian Muarojambi dan peningkatan Jalan Nasional akses Situs Percandian Muarojambi) • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Raden Mattaher Jambi (PHTC) • Preservasi jalan ruas Jambi–Sengeti–Kualatungkal, Jambi–Muarabulian, dan Jambi–Muarasabak • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Jambi • Pengembangan koridor industri rintisan Jambi-Muarojambi • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif • Hilirisasi lanjutan batubara, terutama untuk produk-produk yang mendukung industri lainnya seperti briket, kokas, karbon aktif, syngas, metanol, DME • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A3	Kawasan Perkotaan Bangko • Kab. Merangin	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bangko, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bangko (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Bangko • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kolonel Abundjani (PHTC) • Preservasi jalan ruas Bangko–Muarabungo–Muaratebo, Bangko–Sarolangun–Rupit, Bangko–Sungaipenuh
A4	Kawasan Perkotaan Sungaipenuh • Kota Sungaipenuh	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sungaipenuh, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Sungaipenuh (PHTC) • Pengembangan SPAM Regional Sungaipenuh-Kerinci • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Mayjen H. A. Thalib (PHTC) • Pengembangan kota agropolitan Sungaipenuh • Preservasi jalan ruas Sungaipenuh–Padang Aro, Sungaipenuh–Bangko, Sungaipenuh–Tapan–Mukomuko
A5	Kawasan Perkotaan Muarabungo • Kab. Bungo	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muarabungo, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Muarabungo (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Muarabungo • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD H. Hanafie (PHTC)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Preservasi jalan ruas Muarabungo–Bangko, Muarabungo–Tebo, Muarabungo–Pulaupunjung • Peningkatan Bandar Udara Muarabungo
C1	Kawasan Swasembada Pangan Tanjungjabung • Kab. Tanjung Jabung Barat • Kab. Tanjung Jabung Timur	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. R. Parit Pudin, D. I. R. Pematang Lumut • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Pembangunan Jembatan Sungai Rambut
C2	Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Batanghari • Kab. Tanjung Jabung Barat • Kab. Muaro Jambi • Kab. Batanghari • Kab. Bungo • Kab. Tebo • Kab. Sarolangun	• Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* WS Batanghari, terutama pada Sub-DAS Batanghari Hulu dan Sub-DAS Batang Tebo • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Batanghari Hulu dan Sub-DAS Batang Tebo • Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Muaraenim, Formasi Air Benakat, dan Formasi Sinamar • Pengembangan gasifikasi batubara • Pembangunan PLTU Mulut Tambang • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Aurduri-Muaraenim-Bukit Asam • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Aurduri-PLTU MT Jambi 1 dan 2 • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Bangko-PLTU MT Jambi 1 dan 2

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalur Kereta Api Logistik Sarolangun-Muaratembesi-Muarabulian-Jambi-Muarasabak • Pengembangan Pelabuhan Muarasabak
C3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Tengah Jambi • Kab. Kerinci • Kab. Merangin • Kota Sungaipenuh	• Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* WS Batanghari, terutama pada Sub-DAS Batang Merangin-Tembesi • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Kerinci dan Sub-DAS Batang Merangin-Tembesi • Revitalisasi Danau Kerinci • Pembangunan Bendungan Merangin dan PLTA Bendungan Merangin • Pembangunan infrastruktur PLTA Merangin • Pembangunan infrastruktur PLTP Sungaipenuh • Pembangunan PLTS Apung Danau Kerinci • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Sei Batang Sangkir dan D. I. Sei Siulak Deras • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Kelapa Tanjungjabung • Kab. Tanjung Jabung Barat	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan kelapa) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan kelapa)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Tanjung Jabung Timur	• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan kelapa) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan kelapa) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan kelapa
B2	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Karet Cekungan Batanghari • Kab. Muaro Jambi • Kab. Bungo • Kab. Tebo	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan karet) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan karet) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan karet) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
E1 E2 E3 E4	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Duabelas (E1), TN Bukit Tigapuluh (E2), TN Berbak (E3), dan TN Kerinci-Seblat (E4) • TN Bukit Duabelas: Kab. Batanghari, Kab. Tebo • TN Bukit Tigapuluh: Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat • TN Berbak: Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi • TN Kerinci-Seblat: Kab. Kerinci, Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kota Sungaipenuh	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana • Pengembangan Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata VII Koto Ilir (Kab. Tebo)
	• Kab. Muarojambi • Kab. Bungo • Kab. Sarolangun • Kab. Tebo • Kab. Batanghari	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Jambi	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah ○ Revitalisasi pendidikan nonformal ○ Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak ○ Pencegahan dan Penurunan *stunting* ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit menular lainnya ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, antara lain melalui: ○ Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan ○ Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: ○ Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan ○ Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: ○ Penguatan tata kelola pemerintahan digital ○ Penguatan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Melayu Jambi, antara lain melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat • Penguatan ekonomi syariah, antara lain melalui: ○ Pengembangan Industri Halal ○ Peningkatan Ekspor Halal dan Kerja sama Ekonomi Syariah Internasional ○ Penciptaan Ekosistem UMKM Halal ○ Penguatan Keuangan Syariah ○ Penguatan Dana Sosial Syariah • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jambi, antara lain melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

1.6 Provinsi Sumatera Selatan

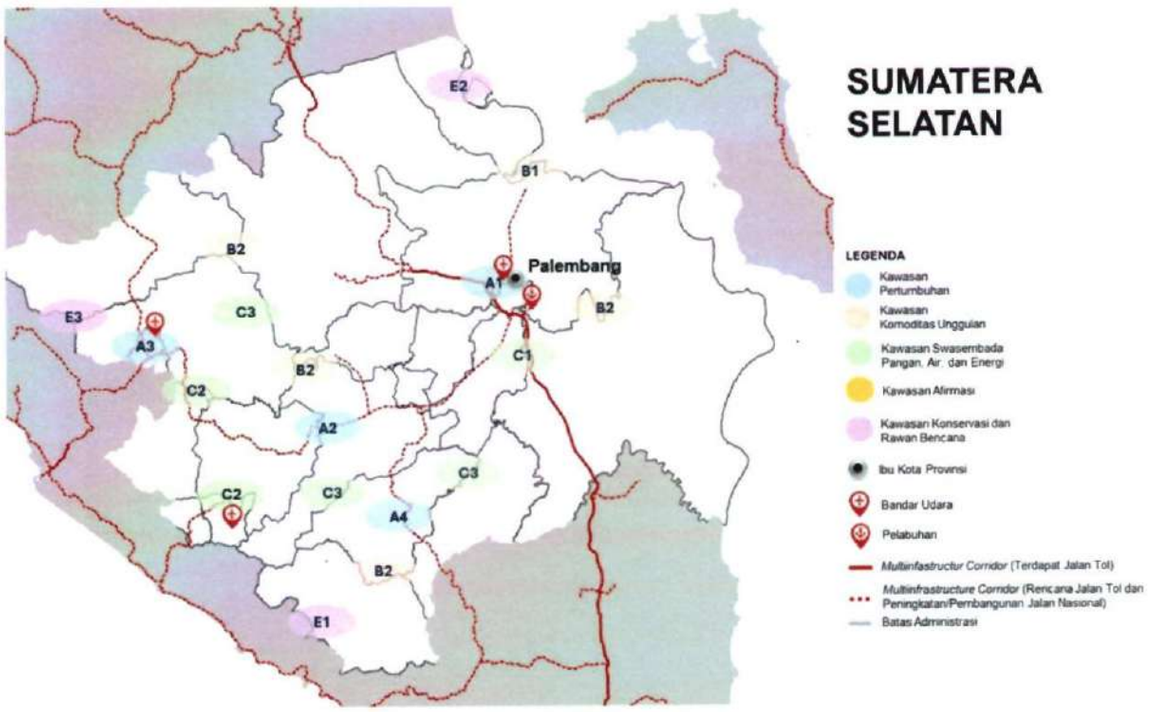

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Wilayah Metropolitan Palembang & Kawasan Pengembangan Industri Palembang-Banyuasin
2 Kawasan Perkotaan Muaraenim & Kawasan Pengembangan Industri Tanjungenim
3 Kawasan Perkotaan Lubuklinggau
4 Kawasan Perkotaan Baturaja

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Ekonomi Biru

1 Banyuasin

Sawit, Karet, Kelapa, Kopi

2 Cekungan Musi (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan

1 Ogan-Komering-Banyuasin (Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur)
2 Musi Hulu (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kota Pagar Alam)

Air dan Energi

3 Cekungan Musi (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim,Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Bukit Barisan Selatan
2 TN Sembilang
3 TN Kerinci-Seblat

Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,1 (Rata-rata 2025-2029)	83,4	3,1	9,37 – 10,37	0,316 – 0,320	0,54	69,97	68,19	3,82 – 3,93
2029	8,1 (2029)	127,1	3,3	6,05 - 7,05	0,294 - 0,298	0,57	80,74	69,20	3,29 – 3,67

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Wilayah Metropolitan Palembang dan Kawasan Pengembangan Industri Palembang-Banyuasin • Kota Palembang • Kab. Banyuasin • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ilir	• Pengembangan dan penataan WM Palembang, antara lain melalui: ○ Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Palembang ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan ○ Penyusunan *metropolitan statistical area* ○ Penataan Kawasan Strategis dan Penyediaan Perumahan Publik Vertikal Perkotaan Terpadu di Wilayah Metropolitan Palembang • Pengembangan TOD dan *Urban Renewal* Kawasan Stasiun Ampera • Pembangunan Jalan Lingkar Timur Palembang • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Palembang • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Palembang • Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin • Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin • Pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi dan Jalan Tol Palembang-Prabumulih-Muaraenim-Lahat • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Palembang (PHTC) • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan (Kab. Ogan Ilir), dan Telang (Kab. Banyuasin) • Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang • Pengembangan koridor industri Palembang-Banyuasin (sektor industri prioritas: industri kimia, industri energi, hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, industri perikanan, dan industri makanan dan minuman) • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi karet, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar karet, yaitu *compound rubber*, lateks dasar, dan karet padat, serta produk hilirisasi lanjutan karet ban performa tinggi, material tahan gempa • Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif • Optimalisasi dan efisiensi pabrik Pusri III-B

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan dan pembangunan Kilang Minyak Bumi Plaju • Pembangunan *Fly Over* Sudirman dan *Underpass* Charitas • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A2	Kawasan Perkotaan Muaraenim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjungenim • Kab. Muara Enim	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muaraenim, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan kawasan industri di Tanjungenim (sektor industri prioritas: industri kimia dan industri energi) • Pengembangan industri gasifikasi/hilirisasi batubara di Tanjungenim • Hilirisasi lanjutan batubara, terutama untuk produk-produk yang mendukung industri lainnya seperti briket, kokas, karbon aktif, syngas, metanol, DME • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Muaraenim (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Muaraenim-Tanjungenim • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr. H. M. Rabain Muara Enim (PHTC) • Pembangunan Jalan Tol Prabumulih-Muaraenim • Preservasi jalan ruas Muaraenim–Lahat–Pagaralam dan Muaraenim–Baturaja • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kikim (Kab. Lahat) • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A4	Kawasan Perkotaan Baturaja • Kab. Ogan Komering Ulu	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Baturaja, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Baturaja (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Baturaja • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja (PHTC) • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RS Tk. III dr. Noesmir Baturaja • Preservasi jalan ruas Baturaja–Martapura, Baturaja–Prabumulih, dan Baturaja–Muaradua • Pengembangan kota agropolitan Baturaja

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A3	Kawasan Perkotaan Lubuklinggau • Kota Lubuklinggau	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Lubuklinggau, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Lubuklinggau (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Lubuklinggau • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau (PHTC) • Preservasi jalan ruas Lubuklinggau–Tebingtinggi–Lahat, Lubuklinggau–Rupit, Lubuklinggau–Curup • Pengembangan kota agropolitan Lubuklinggau
C1	Kawasan Swasembada Pangan Ogan-Komering-Banyuasin • Kab. Banyuasin • Kab. Musi Banyuasin • Kab. Ogan Komering Ilir • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ulu • Kab. Ogan Komering Ulu Timur	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. R. Air Saleh, D. I. R. Delta Air Sugihan, D. I. R. Delta Upang, D. I. R. Karangagung Tengah, D. I. R. Pulaurimau, D. I. R. Telang I dan II, D. I. R. Ogan Keramasan, D. I. R. Sugihan Kanan, D. I. R. Sungai Lumpur, D. I. Way Komering • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Pengembangan KSPP Sumatera Selatan • Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi) • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
C2	Kawasan Swasembada Pangan Musi Hulu • Kab. Musi Rawas • Kab. Musi Rawas Utara • Kab. Empat Lawang • Kab. Lahat • Kab. Muara Enim • Kota Pagar Alam	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Kelingi Tugumulyo, D. I. Air Lakitan, D. I. Air Keruh, D. I. Lintang Kanan, D. I. Lintang Kiri, D. I. Muara Riben • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
C3	Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Musi • Kab. Musi Rawas • Kab. Musi Rawas Utara • Kab. Empat Lawang • Kab. Lahat • Kab. Muara Enim • Kab. Banyuasin • Kab. Musi Banyuasin • Kab. Ogan Komering Ilir • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ulu • Kab. Ogan Komering Ulu Timur	• Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* DAS Musi, serta pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Musi, serta pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering • Revitalisasi Danau Ranau • Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Muaraenim dan Formasi Air Benakat • Pengembangan gasifikasi batubara • Pembangunan infrastruktur PLTA Tanjungsakti • Pembangunan infrastruktur PLTP Danau Ranau • Pembangunan infrastruktur PLTP Rantaudedap • Pembangunan PLTS Apung Danau Ranau • Pembangunan PLTU Mulut Tambang • Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Muaraenim-Tarahan-Kalianda

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Ogan Komering Ulu Selatan • Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	• Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Lumutbalai-Muaraenim-Gumawang-GITET 275 kV Lampung 1 • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Betung-Kenten • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Betung-PLTU MT Sumsel 1 • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Kenten-Sungsang-Muntok (Interkoneksi 275 kV Sumatera-Bangka) • Peningkatan Jalur KA Prabumulih-Baturaja-Tarahan • Peningkatan Jalur KA Prabumulih-Muaraenim-Lahat • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Petata (Kab. Penukal Abab Lematang Ilir) • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Penukal Abab Lematang Ilir • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Ogan Komering Ulu Selatan
B2	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, Kopi, dan Kelapa Cekungan Musi • Kab. Musi Rawas • Kab. Musi Rawas Utara • Kab. Empat Lawang • Kab. Lahat • Kab. Muara Enim • Kab. Banyuasin • Kab. Musi Banyuasin • Kab. Ogan Komering Ilir • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ulu • Kab. Ogan Komering Ulu Timur • Kab. Ogan Komering Ulu Selatan • Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi, dan kelapa • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Banyuasin Ekonomi Biru • Kab. Banyuasin	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Sungsang • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
E1 E2 E3	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan (E1) , TN Sembilang (E2), dan TN Kerinci-Seblat (E3)	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• TN Bukit Barisan Selatan: Kab. Ogan Komering Ulu Selatan • TN Sembilang: Kab. Banyuasin • TN Kerinci-Seblat: Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Musi Rawas, Kota Lubuklinggau	• Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
	• Kab. Musi Rawas Utara • Kab. Ogan Komering Ulu • Kab. Muara Enim • Kab. Empat Lawang	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Sumatera Selatan	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui: o Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia o Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Sumatera Selatan, antara lain melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pendalaman sektor keuangan, antara lain melalui: ○ Penguatan peran perbankan ○ Penguatan peran sektor keuangan nonbank ○ Peningkatan inklusi dan literasi keuangan • Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, antara lain melalui: ○ Pengembangan koperasi sektor produksi ○ Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif ○ Pengembangan kewirausahaan

1.7 Provinsi Bengkulu

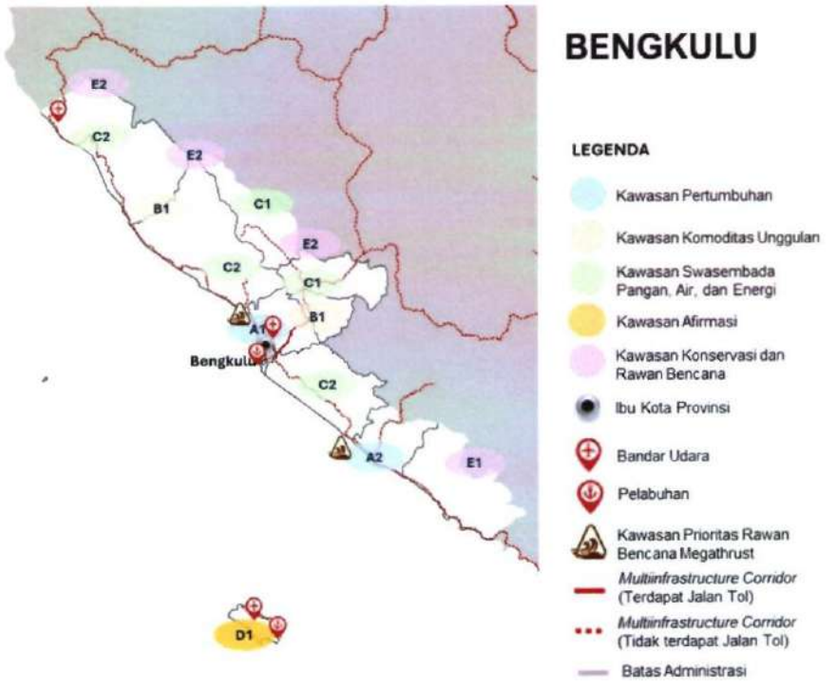

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Kawasan Perkotaan Bengkulu dan Kawasan Pengembangan Industri Pulaubaai
2 Kawasan Perkotaan Manna

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sawit, Karet, Kopi
1 Utara Bengkulu (Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang)

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Air dan Energi
1 Bukit Barisan Tengah Bengkulu (Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang)

Swasembada Pangan
2 Mukomuko-Bengkulu Utara-Seluma-Bengkulu Selatan

D. Kawasan Afirmasi

1 Pulau Enggano (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Bukit Barisan Selatan
2 TN Kerinci-Seblat

Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,5 (Rata-rata 2025–2029)	53,2	0,5	13,10– 13,60	0,327 – 0,332	0,54	57,74	71,27	3,30 – 3,41
2029	7,4 (2029)	79,3	0,5	7,99 - 8,99	0,305 - 0,309	0,57	67,60	72,12	2,56 – 3,13

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Perkotaan Bengkulu dan Kawasan Pengembangan Industri Pulaubaai • Kota Bengkulu	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bengkulu, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan Pelabuhan Pulaubaai, yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan industri Pulaubaai • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema • Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Lubuklinggau • Pembangunan TPST Regional Bengkulu-Seluma-Bengkulu Tengah • Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Pulau Baai Bengkulu • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bengkulu (PHTC) • Preservasi jalan ruas Bengkulu–Tais, Bengkulu–Mukomuko, dan Bengkulu–Argamakmur-Tubei • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu (PHTC) • Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan Bengkulu (PHTC)
A2	Kawasan Perkotaan Manna • Kab. Bengkulu Selatan	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Manna, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Manna (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Manna • Preservasi jalan ruas Manna–Tais, Manna–Pagaralam, Manna–Bintuhan–Krui • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna (PHTC) • Pengembangan kota agropolitan Manna
C1	Kawasan Swasembada Air dan Energi Bukit Barisan Tengah Bengkulu • Kab. Lebong • Kab. Rejang Lebong • Kab. Kepahiang	• Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* DAS Ketahun, DAS Lais, DAS Lemau, DAS Bengkulu, dan DAS Nelas • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Ketahun, DAS Lais, DAS Lemau, DAS Bengkulu, DAS Nelas, dan Danau Tes • Revitalisasi Danau Tes • Peningkatan cadangan dan produktivitas batu bara pada Formasi Lemau • Pembangunan infrastruktur PLTP Hululais • Pembangunan infrastruktur PLTP Kepahiang • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Lubuklinggau-Pulaubaai
C2	Kawasan Swasembada Pangan Mukomuko-Bengkulu Utara-Seluma-Bengkulu Selatan • Kab. Mukomuko • Kab. Bengkulu Utara • Kab. Seluma • Kab. Bengkulu Selatan	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Air Lais Kuro Tidur, D.I. Air Manjuto, D. I. Air Seluma, D. I. Air Nipis Seginim • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lagita (Kab. Bengkulu Utara) • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Kawasan Perdesaan Prioritas Kab. Bengkulu Selatan
D1	Kawasan Afirmasi Pulau Enggano (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Bengkulu Utara	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Pembangunan/Preservasi jalan Lingkar/Trans Enggano • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perkebunan (kelapa) dan perikanan • Pembangunan rumah sakit berkualitas di Pulau Enggano (PHTC) • Peningkatan 6A *ecotourism* di Kawasan Hutan Enggano • Peningkatan 6A *cultural tourism* Enggano • Pengembangan pusat penelitian biodiversitas tropis Enggano • Penguatan Pulau Enggano sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kopi, Utara Bengkulu • Kab. Mukomuko • Kab. Bengkulu Utara • Kab. Rejang Lebong • Kab. Kepahiang	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, kopi, dan karet • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
E1 E2	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan dan TN Kerinci-Seblat • E1: TN Bukit Barisan Selatan: Kab. Kaur • E2: TN Kerinci-Seblat: Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara,	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Kab. Rejang Lebong, Kab. Lebong	• Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tsunami di Bengkulu	• Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
	• Kab. Bengkulu Utara • Kab. Bengkulu Tengah • Kab. Rejang Lebong • Kab. Kepahiang	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Bengkulu	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Bengkulu, antara lain melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

1.8 Provinsi Lampung

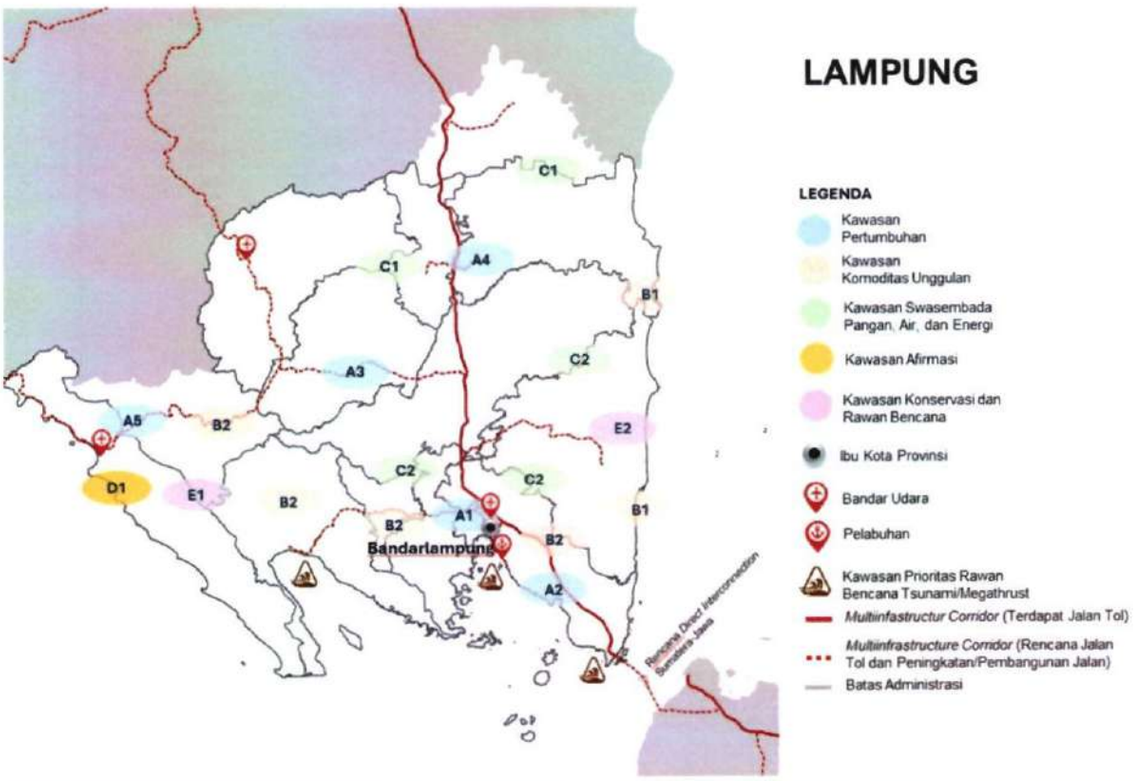

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Kawasan Perkotaan Bandar Lampung
2 Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan
3 Kawasan Perkotaan Kotabumi
4 Kawasan Perkotaan Menggala
5 Kawasan Perkotaan Liwa

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Ekonomi Biru
1 Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan)

Kopi dan Kelapa
2 Lampung Barat-Selatan (Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur)

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan dan Air
1 Mesuji-Tulangbawang (Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara)
2 Seputih-Sekampung (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus)

D. Kawasan Afirmasi

1 Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Bukit Barisan Selatan
2 TN Waykambas

Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,3 (Rata-rata 2025-2029)	55,1	2,2	9,50– 10,00	0,318 – 0,321	0,55	62,79	70,99	3,86 – 4,00
2029	7,2 (2029)	80,6	2,2	5,79 - 6,79	0,271 - 0,275	0,58	72,13	71,84	3,25 – 3,73

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung (A1) dan Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (A2) • Kota Bandar Lampung • Kab. Lampung Selatan	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bandarlampung, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan koridor industri Bandarlampung-Lampung Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa, hilirisasi tebu, dan industri makanan dan minuman) • Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif • Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu *raw sugar*, GKP, molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik • Pengembangan Pelabuhan Panjang • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bandarlampung (PHTC) • Pengembangan SPAM Regional Pesawaran-Bandarlampung-Lampung Selatan • Pembangunan Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang • Preservasi jalan ruas Bandarlampung–Gedongtataan–Pringsewu–Kotaagung dan Bandarlampung–Metro–Sukadana • Perencanaan dan penyiapan pembangunan Interkoneksi Sumatera-Jawa • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Kalianda-Merak (Interkoneksi 500 kV Sumatera-Jawa) • Pembangunan TPST Regional Bandarlampung-Metro-Lampung Selatan • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bandarlampung • Pengembangan Kawasan Kota Baru Lampung • Pembangunan infrastruktur PLTP Rajabasa • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A4	Kawasan Perkotaan Menggala • Kab. Tulang Bawang	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Menggala, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Menggala (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Menggala • Preservasi jalan ruas Menggala–Wiralaga Mulya dan Menggala–Panaragan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Menggala Tulangbawang (PHTC) • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Tulang Bawang Barat (*hinterland* Kawasan Perkotaan Menggala) • Pengembangan kota agropolitan Menggala
A3	Kawasan Perkotaan Kotabumi • Kab. Lampung Utara	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kotabumi, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Kotabumi (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Kotabumi • Preservasi jalan ruas Kotabumi–Terbanggi Besar dan Kotabumi–Bukitkemuning–Blambangan Umpu • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Mayor Jenderal HM Ryacudu Kotabumi (PHTC) • Pengembangan kota agropolitan Kotabumi
A5	Kawasan Perkotaan Liwa • Kab. Lampung Barat	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Liwa, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan SPAM Perkotaan Liwa • Preservasi jalan ruas Liwa–Bukitkemuning dan Liwa–Krui

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa (PHTC) • Pengembangan kota agropolitan Liwa
C1	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Mesuji-Tulangbawang • Kab. Mesuji • Kab. Way Kanan • Kab. Tulang Bawang • Kab. Tulang Bawang Barat • Kab. Lampung Utara	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Rawa Rawajitu, D. I. Way Rarem, D. I. Way Umpu, D. I. R. Rawapitu, dan D. I. R. Rawa Mesuji Atas • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
C2	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Seputih-Sekampung • Kab. Lampung Tengah • Kab. Lampung Timur • Kab. Lampung Selatan • Kab. Pringsewu • Kab. Pesawaran	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Way Sekampung, D. I. Way Seputih, D. I. Jabung, D. I. Way Curup, D. I. Way Jepara, D. I. Bumiagung, D. I. Way Tulungmas, D. I. Way Tebu Sistem • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Tanggamus	• Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, DAS Way Jepara, dan DAS Way Kambas • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, dan DAS Way Jepara • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
D1	Kawasan Afirmasi Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Pesisir Barat	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perkebunan (kopi) dan pariwisata bahari • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan 6A pariwisata di Pesisir Barat • Peningkatan Bandar Udara Taufik Kiemas Krui • Pengembangan SPAM Perkotaan Krui • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Krui (PHTC) • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Pesisir Barat

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung • Kab. Lampung Timur • Kab. Tulang Bawang • Kab. Lampung Selatan	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhanmaringgai • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Lampung Timur, Tulangbawang, dan Lampung Selatan • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
B2	Kawasan Komoditas Unggulan Kopi dan Kelapa Lampung Barat-Selatan • Kab. Lampung Timur • Kab. Lampung Selatan • Kab. Pesawaran • Kab. Tanggamus • Kab. Lampung Barat	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (kopi, kelapa) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi, kelapa) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (kopi, kelapa) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi, kelapa) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan kelapa • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
E1 E2	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan (E1) dan TN Waykambas (E2) • TN Bukit Barisan Selatan: Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat • TN Waykambas: Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Lampung	• Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman *megathrust* dan tsunami di Kawasan Perkotaan Bandarlampung dan Pesisir Selatan Lampung (*Megathrust* Selat Sunda)
	• Kab. Tanggamus • Kab. Pesisir Barat • Kab. Lampung Barat	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Lampung	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah ○ Revitalisasi pendidikan nonformal ○ Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak ○ Pencegahan dan Penurunan *stunting* ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Lampung, antara lain melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

1.9 Provinsi Kepulauan Riau

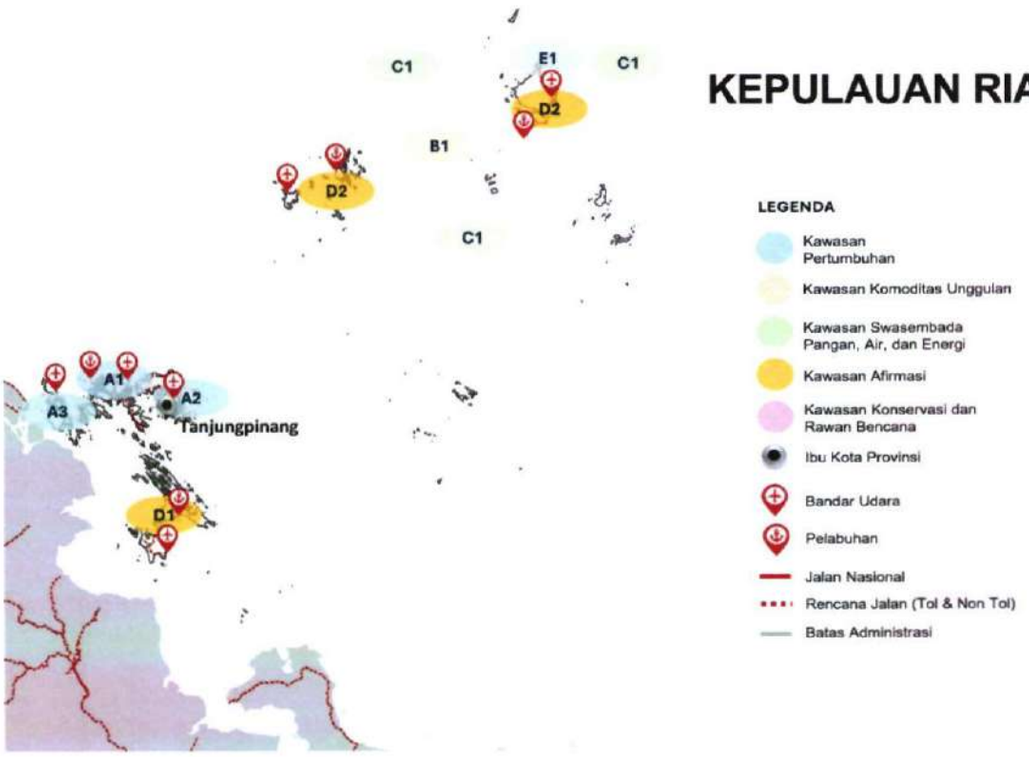

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Kawasan Perkotaan Batam & KPBPB Batam
2 Kawasan Perkotaan Tanjungpinang & KPBPB Bintan
3 Kawasan Perkotaan Tanjungbalai Karimun & KPBPB Karimun

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Ekonomi Biru
1 Natuna-Anambas

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Energi
1 Natuna

D. Kawasan Afirmasi

1 Kepulauan Lingga (Percepatan Pengentasan Kemiskinan)
2 Kepulauan Natuna-Anambas (Daerah Terdepan dan Pemerataan Pembangunan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 *Geopark* Natuna

Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,1 (Rata-rata 2025-2029)	177,3	1,6	4,40 – 4,90	0,321 – 0,324	0,62	1,00	73,28	6,08 – 6,47
2029	8,1 (2029)	266,0	1,7	2,26 – 3,26	0,314 – 0,317	0,66	3,13	74,13	5,57 – 6,06

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2 A3	Kawasan Perkotaan Batam dan KPBPB Batam (A1), Kawasan Perkotaan Tanjungpinang dan KPBPB Bintan (A2), dan Kawasan Perkotaan Tanjungbalai Karimun dan KPBPB Karimun (A3) • Kota Batam • Kota Tanjungpinang • Kab. Bintan • Kab. Karimun	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Batam dan kawasan perkotaan Tanjungpinang, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan Jembatan Batam-Bintan terintegrasi Jalan Tol Batam-Bintan • Pengembangan koridor industri Batam-Bintan-Karimun (sektor industri prioritas: industri semikonduktor, industri mesin dan perlengkapan, industri dirgantara, industri transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, industri logam, besi, dan baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal) • Pengembangan Pelabuhan Batuampar dan Pelabuhan Kabil • Pembangunan Jalan Lingkar Luar Tanjungpinggir-Jodoh • Pengembangan Kawasan Terpadu *Rempang Ecocity* • Pengembangan Kawasan Terpadu *Galang Maritime City* • Pengembangan KEK Batam *Aero Technic*, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjungsauh, KEK Galang Batang, KI Bintan *Aerospace*, KI Bintan *Inti Industrial Estate*, dan KI-KI lainnya di BBK • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Batam-Bintan (PHTC) • Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan Batam (PHTC) • Pembangunan *Closing Dam Piayu* • Pembangunan Bendungan Estuari Galang-Galang Baru • Pengembangan CBD-TOD Teluk Tering-*Batam Center* • Pengembangan SPAM Regional Batam, SPAM Regional Bintan, dan SPAM Perkotaan Karimun • Pengembangan *Batam Urban dan Industrial Sewerage System Development Project* • Perencanaan, persiapan, dan pembangunan LRT Batam Trase Bandara Hang Nadim-Batam Center-Batu Ampar dan BRT Trans Batam Trase Batam Center-Tanjung Uncang, yang terintegrasi dengan TOD • Pembangunan TPST Regional Batam dan TPST Regional Bintan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan kawasan pariwisata Batam-Bintan (Pengembangan Kawasan MICE dan *Urban Tourism* Batam Center, Pengembangan Kawasan *Integrated Tourism Zone* Lagoi, Revitalisasi Kawasan Budaya Pulau Penyengat dan Pengembangan *Grey Tourism*) • Pengembangan Politeknik Negeri Batam menjadi universitas/institut teknologi bertaraf *World Class Research University* Berbasis Potensi Wilayah • Pembangunan PLTS Apung Waduk Duriangkang • Pembangunan pipa transmisi gas bumi Pulau Pemping-WNTS • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Embung Fatimah Kota Batam (PHTC) • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Sumatera-Kep. Meranti-Karimun-Batam-Bintan • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: o Kab. Karimun: Meral Barat, Tebing, Karimun o Kota Batam: Belakang Padang o Kab. Bintan: Bintan Utara, Telok Sebong, Gunung Kijang, Bintan Pesisir • Pengembangan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau, terutama di Batam (KEK Kesehatan Internasional Batam/KEK Sekupang dan KEK Nongsa) dan Bintan (kawasan Lagoi) • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RSAL dr. Midiyato Suratani (Kota Tanjungpinang) • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
C1	Kawasan Swasembada Energi Natuna • Kab. Natuna	• Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada *West Natuna Basin* (*producing basin*) • Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada *East Natuna Basin* (*discovery basin*) • Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada *South Natuna Basin* (*unexplored basin*)
D1	Kawasan Afirmasi Lingga (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Lingga	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Pembangunan/Preservasi jalan Lingkar dan Trans Lingga dan Singkep • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: pertambangan (bauksit), perikanan, dan perkebunan (kelapa) • Hilirisasi bauksit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar bauksit, yaitu SGA, CGA, dan *aluminium ingot*, serta produk hilirisasi lanjutan bauksit *aluminium alloy*, katalis alumina, komposit aluminium • Pengembangan SPAM Perkotaan Dabo • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Dabo (PHTC) • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
D2	Kawasan Afirmasi Natuna-Anambas (Daerah Terdepan dan Pemerataan Pembangunan) • Kab. Natuna	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Pengembangan SPAM Perkotaan Ranai dan SPAM Perkotaan Tarempa

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Kepulauan Anambas	• Peningkatan ketahanan bencana • Pembangunan/Preservasi jalan Trans Natuna dan Anambas • Penguatan Natuna dan Anambas sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar • Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perikanan dan pariwisata bahari • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Ranai dan Tarempa (PHTC) • Pengembangan Pelabuhan Selat Lampa • Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan • Penguatan PKSN Perbatasan Prioritas Natuna • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Tarempa Kepulauan Anambas • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: ○ Kab. Kep. Anambas: Jemaja Barat, Jemaja, Siantan Selatan, Siantan Utara, Kute Siantan
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Natuna-Anambas • Kab. Natuna • Kab. Kep. Anambas	• Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pering, Pelabuhan Perikanan Selatlampa, dan Pelabuhan Perikanan Tarempa • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
E1	Kawasan Konservasi *Geopark* Natuna • Kab. Natuna	• Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem • Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	• Kab. Kepulauan Anambas • Kab. Bintan • Kab. Karimun • Kab. Natuna • Kab. Lingga	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Kepulauan Riau	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan o Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik o Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* o Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: o Perluasan infrastruktur digital o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital o Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN o Digitalisasi layanan publik prioritas o Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Kepulauan Riau, antara lain melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru, antara lain melalui: ○ Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru ○ Peningkatan Pengelolaan Konservasi Perairan dan Ekosistem Pesisir ○ Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan ○ Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Laut dan Perairan ○ Penguatan Industri Transportasi Laut ○ Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari ○ Pengembangan Iptek, Inovasi, dan SDM Ekonomi Biru • Penguatan Keamanan Laut di wilayah Kepulauan Riau, antara lain melalui: ○ Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan ○ Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point* ○ Meningkatkan Kekuatan TNI di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar • Peningkatan produktivitas perikanan, antara lain melalui: ○ Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap ○ Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya ○ Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat ○ Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan ○ Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan ○ Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Melayu Riau, antara lain melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

1.10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

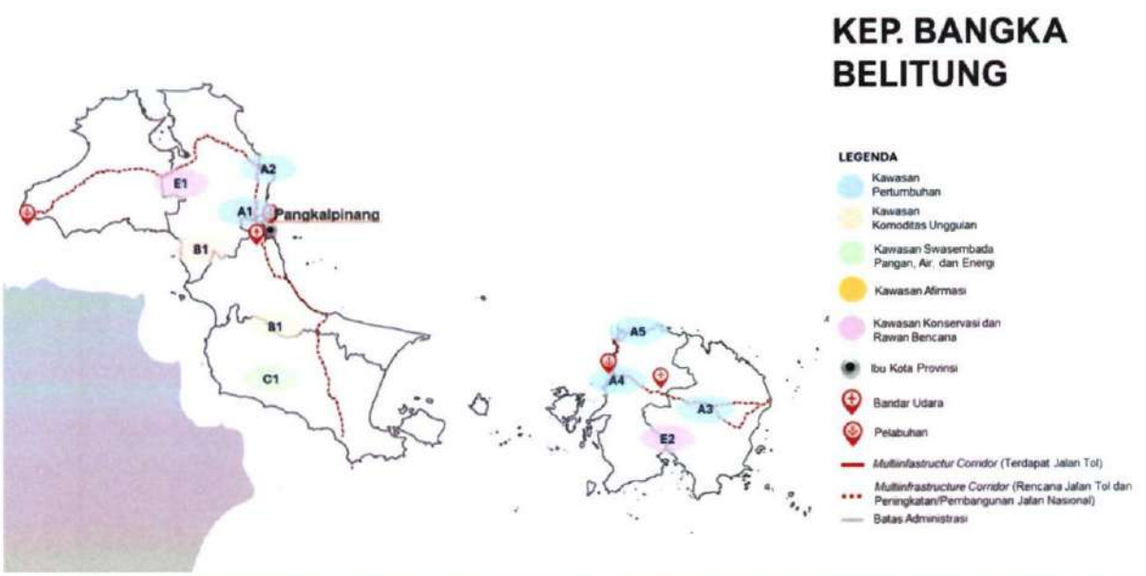

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Kawasan Perkotaan Pangkalpinang
2 Kawasan Pengembangan Industri Pangkalpinang-Sungailiat
3 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Belitung
4 Kawasan Perkotaan Tanjungpandan
5 KEK Tanjung Kelayang

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Timah, Bauksit, dan Lada
1 Bangka (Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan)

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan
1 Bangka Selatan

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Gunung Maras
2 *Geopark* Belitung

Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	4,6 (Rata-rata 2025–2029)	73,7	0,5	2,92 – 3,92	0,239 – 0,242	0,56	54,55	76,66	3,98 – 4,33
2029	5,5 (2029)	101,9	0,5	1,79 – 2,79	0,204 – 0,208	0,59	62,21	77,32	2,84 – 3,94

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2	Kawasan Perkotaan Pangkalpinang (A1) dan Kawasan Pengembangan Industri Pangkalpinang-Sungailiat (A2) • Kota Pangkalpinang • Kab. Bangka	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pangkalpinang, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan koridor industri Pangkalpinang-Sungailiat (sektor industri prioritas: hilirisasi timah dan bauksit, hilirisasi kelapa sawit, dan industri makanan dan minuman) • Hilirisasi timah, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar timah, yaitu solder, timah lembaran, dan *alloy* dasar, serta produk hilirisasi lanjutan timah solder premium, timah paduan, material konstruksi, *microchips*, baterai • Hilirisasi bauksit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar bauksit, yaitu SGA, CGA, dan *aluminium ingot*, serta produk hilirisasi lanjutan bauksit *aluminium alloy*, katalis alumina, komposit aluminium, material pesawat • Pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pangkalpinang (PHTC) • Preservasi jalan ruas Pangkalpinang–Sungailiat–Muntok dan Pangkalpinang–Koba–Toboali • Pembangunan SPAM Regional Pangkalpinang • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. (HC) Ir. Soekarno Pangkalpinang (PHTC) • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Muntok-Pangkalpinang • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 150 kV Pangkalpinang-Koba-Belitung (Interkoneksi 150 kV Bangka-Belitung) • Pembangunan TPST Regional Pangkalpinang-Bangka-Sungailiat • Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Sungailiat • Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan Pangkalpinang (PHTC)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A3 A4 A5	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Belitung (A3), Kawasan Perkotaan Tanjungpandan (A4), dan KEK Tanjung Kelayang (A5)) (Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka-Belitung) • Kab. Belitung • Kab. Belitung Timur	• Peningkatan 6A Pariwisata dan *Urban Renewal* di Tanjungpandan, KEK Tanjung Kelayang, Gantung, dan Manggar • Pengembangan Kawasan Andalan Menuju Pengembangan Inovasi Terpadu (KAMPIT) Kampit • Preservasi jalan ruas Lingkar Belitung, Tanjungpandan–Simpang Renggiang–Manggar, Simpang Renggiang–Gantung, dan Gantung–Manggar • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Tanjungpandan, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Tanjungpandan (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Tanjungpandan-Tanjungkelayang • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr. H. Marsidi Judono Tanjungpandan (PHTC) • Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Tanjungpandan
C1	Kawasan Swasembada Pangan Bangka Selatan • Kab. Bangka Selatan	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Jeriji • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang (Kab. Bangka Selatan) • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Timah, Bauksit, dan Lada Bangka • Kab. Bangka • Kab. Bangka Barat • Kab. Bangka Tengah • Kab. Bangka Selatan	• Peningkatan tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri timah dan bauksit • Peningkatan penerapan standardisasi di industri timah dan bauksit • Peningkatan adopsi teknologi tinggi untuk pengolahan timah dan bauksit • Dekarbonasi industri dan ekonomi sirkular di industri timah dan bauksit • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (lada) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (lada) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (lada) • Peningkatan mutu produk pertanian (lada)
E1	Kawasan Konservasi TN Gunung Maras • Kab. Bangka • Kab. Bangka Barat	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari
E2	Kawasan Konservasi *Geopark* Belitung • Kab. Belitung • Kab. Belitung Timur	• Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem • Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	• Kab. Belitung • Kab. Belitung Timur • Kab. Bangka Tengah	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan o Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik o Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* o Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: o Perluasan infrastruktur digital o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital o Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN o Digitalisasi layanan publik prioritas o Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Kepulauan Bangka Belitung, antara lain melalui: o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) o Penanggulangan judi dan penyelundupan o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru, antara lain melalui: o Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru o Peningkatan Pengelolaan Konservasi Perairan dan Ekosistem Pesisir o Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan o Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Laut dan Perairan o Penguatan Industri Transportasi Laut o Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari o Pengembangan Iptek, Inovasi, dan SDM Ekonomi Biru • Peningkatan produktivitas perikanan, antara lain melalui: o Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap o Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya o Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat o Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan o Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan o Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

2. Wilayah Jawa

2.1 Provinsi DKI Jakarta dan Kawasan Aglomerasi Jakarta

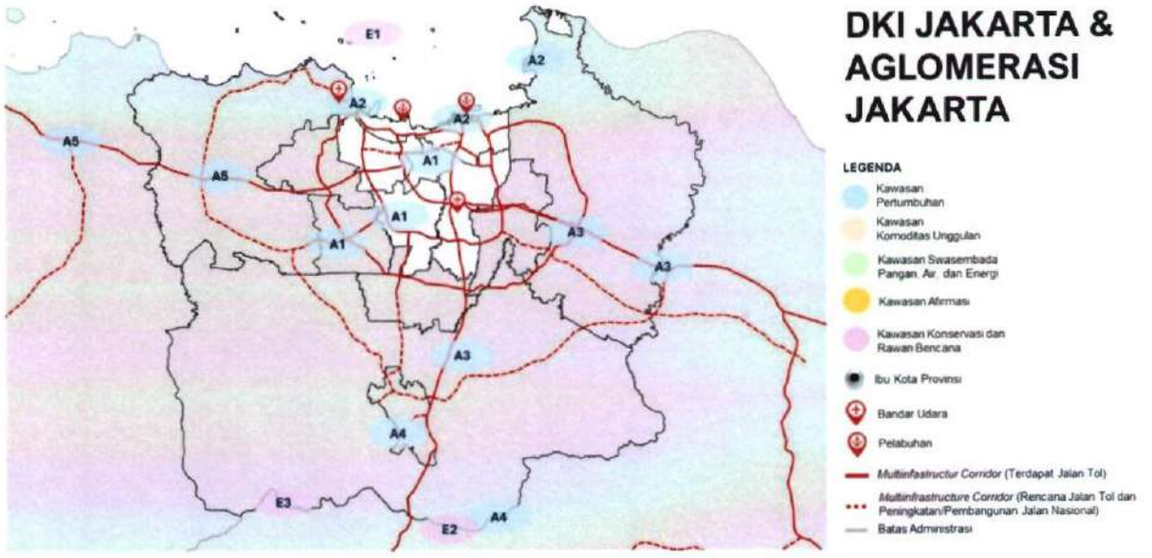

A. Kawasan Pertumbuhan

1. *Jakarta-Tangerang International Business Corridor*
2. *Northern Coast New Economic Hub*
3. Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban
4. Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur
5. Koridor Industri Cilegon-Serang-Tangerang

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1. TN Kepulauan Seribu
2. TN Gede-Pangrango
3. TN Halimun-Salak

Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,8 (Rata-rata 2025–2029)	373,4	16,7	3,55 – 3,85	0,425 – 0,430	0,65	14,65	51,34	5,54 – 6,40
2029	7,9 (2029)	560,8	16,5	2,08 – 3,08	0,417 – 0,421	0,69	22,01	51,98	4,93 – 5,99

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2 A3 A4 A5	Kawasan Aglomerasi Jakarta/WM Jakarta • Provinsi DKI Jakarta • Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Cianjur • Provinsi Banten: Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	• Pemantapan dan penataan Kawasan Aglomerasi Jakarta, antara lain melalui: o Pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jakarta (Dewan Kawasan Aglomerasi) o Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi, yang merupakan masterplan penataan Kawasan Aglomerasi Jakarta, serta rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan o Penyusunan *metropolitan statistical area* • Pengembangan Kawasan Perkotaan Depok (tematik kota pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Jakarta/KA Jakarta, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan *Greater Jakarta Integrated Transit Based Living Area*, antara lain melalui: o Pembangunan MRT Fase 3 Timur-Barat Trase Medan Satria-Tomang o Pembangunan *Elevated Busway* Koridor Batas DKI Jakarta-CBD Ciledug dan Penyiapan Pembangunan *Elevated Busway* CBD Ciledug-Poris Plawad o Pembangunan LRT Jabodebek Trase Harjamukti-Baranangsiang dan Pembangunan LRT Jabodebek Trase Harjamukti-Pondokcina o Pembangunan Jalan Tol Sawangan-Selabenda o Pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung) o Pembangunan Jalan Tol *JORR Elevated* Cikunir-Ulujami • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Aglomerasi Jakarta (termasuk Tangerang Raya, Bekasi Raya, Depok, dan Bogor Raya), termasuk penerapan SIH3 dan FEWS

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan *World Class Research University* Berbasis Potensi Wilayah pada Universitas Indonesia dan Universitas Islam Internasional Indonesia • Pengembangan SPAM Depok • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Depok • Pembangunan *Jakarta Sewerage System* (JSS) Zona 6 • Pengembangan Destinasi Regeneratif *Greater Jakarta*, yang berfokus antara lain kepada peningkatan *event* MICE dan/atau forum internasional yang diselenggarakan di Kawasan Aglomerasi Jakarta • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RS Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa (Kota Adm. Jakarta Timur) dan RSAL dr. Mintohardjo (Kota Adm. Jakarta Pusat), Lembaga Biomedis Puskesad (Kota Adm. Jakarta Timur), Lembaga Peralatan Kesehatan Puskesad (Kota Adm. Jakarta Timur), RSGM Ladokgi R. E. Martadinata (Kota Adm. Jakarta Pusat) • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A1	*Jakarta-Tangerang International Business Corridor dan Jakarta Global City Urban Tourism (Central-South)* • Provinsi DKI Jakarta: Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Adm. Jakarta Selatan • Provinsi Banten: Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang	• Pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota • Pembangunan MRT Lebakbulus-Serpong • Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai • Pengembangan *Central Station Manggarai* • Pembangunan LRT Jakarta Trase Kelapa Gading–Sunter Barat–Rajawali–Jayakarta • Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Ruas Semanan-Grogol–Sunter-Kelapagading • Pembangunan Jalur KA *Jakarta Elevated Inner Ring Railroad* Trase Manggarai–Tanah Abang–Duri–Kampung Bandan–Pasar Senen–Manggarai • Pengembangan TOD Blok M, Dukuh Atas, dan Lebakbulus • Pembangunan Kawasan *University Town* di Grogol-Tomang-Tanjung Duren • Pengembangan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten (KEK BSD) • Pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja • Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga–Rajeg–Balaraja • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan • Pembangunan TPST Regional Tangerang Raya • Pembangunan *Jakarta Sewerage System* (JSS) Zona 5 • Pengembangan dan integrasi infrastruktur, serta peningkatan layanan RSAB Harapan Kita, RSJPD Harapan Kita, dan RS Kanker Dharmais
A2	*Northern Coast New Economic Hub dan Jakarta Global City Urban Tourism (North)* • Provinsi DKI Jakarta: Kota Adm. Jakarta Utara • Provinsi Banten: Kab. Tangerang	• Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut Pesisir Utara Jakarta (Penyelesaian NCICD Fase A Kewenangan Pemerintah Pusat, Daerah, dan Swasta) • Rekayasa dan Reklamasi Pesisir Utara Jakarta: Reklamasi Pulau O, P, Q • Pengembangan *New Priok Container Terminal* Tahap 2 (NPCT2) dan Tahap 3 (NPCT3) • Pengembangan Kawasan Ancol (Bagian *Northern Coast New Economic Corridor*) • Pengembangan Pelabuhan Perikanan Modern dan Industri Perikanan Terintegrasi PPS Nizam Zachman dan PPN Muara Angke

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi	• Pembangunan Jalan Tol *Harbour Toll Road II* • Revitalisasi Kota Tua Jakarta dan *Heritage Port Sunda Kelapa* • Pembangunan Waduk Lepas Pantai Muara Cisadane • Rekayasa pengamanan kawasan pesisir yang mengalami abrasi, Muaragembong • Penyediaan SPAM perpipaan pada kawasan permukiman di sepanjang pesisir utara Kawasan Aglomerasi Jakarta • Pembangunan *Jakarta Sewerage System* (JSS) Zona 2, 5, dan 8 • Pengembangan koridor industri Cilincing-Tarumajaya
E1	Kawasan Konservasi TN Kepulauan Seribu • Kab. Adm. Kep. Seribu	• Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil • Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
	Provinsi DKI Jakarta	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui: o Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia o Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan o Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik o Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* o Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: o Perluasan infrastruktur digital o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital o Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN o Digitalisasi layanan publik prioritas • Memperkuat reformasi hukum, terutama di DKI Jakarta, antara lain melalui: o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) o Penanggulangan judi dan penyelundupan o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

2.2 Provinsi Jawa Barat

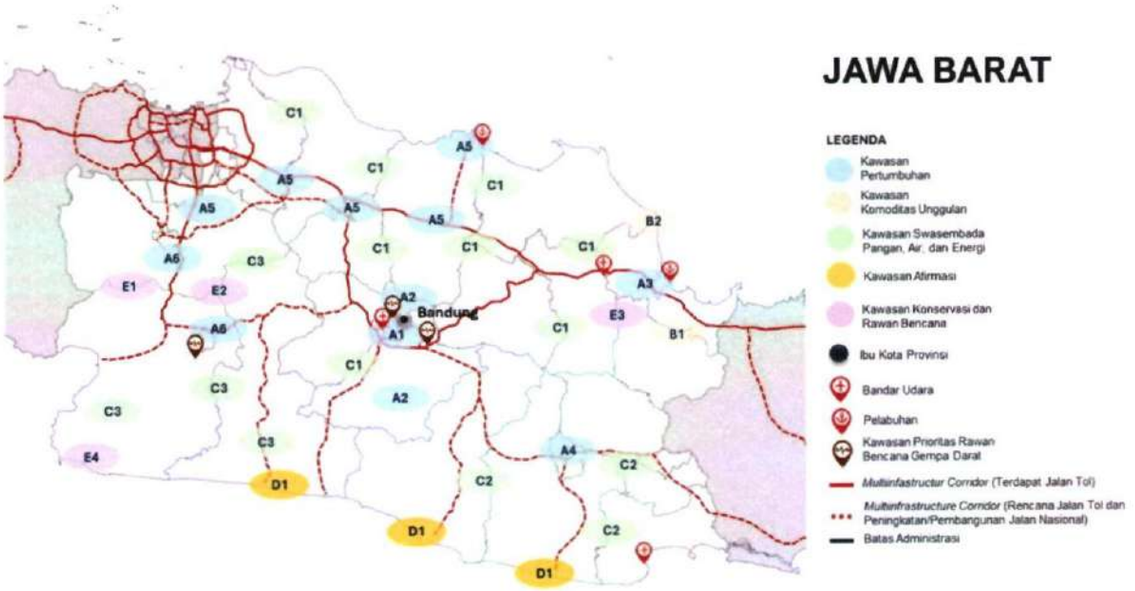

A. Kawasan Pertumbuhan

1. WM Bandung, Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung
2. Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya
3. Kawasan Perkotaan Cirebon & Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati
4. Kawasan Perkotaan Tasikmalaya
5. Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)
6. Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur

B. Kawasan Komoditas Unggulan

1. Cirebon-Majalengka (Tebu)
2. Indramayu-Cirebon (Ekonomi Biru)

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Citarum-Cimanuk-Cisanggarung (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan)
2. Citanduy-Ciwulan-Cilaki (Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran)
3. Priangan Barat (Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi)

D. Kawasan Afirmasi

1. Jawa Barat Bagian Selatan (bagian pesisir selatan Kab. Cianjur, Kab. Garut, dan Kab. Tasikmalaya) (Pemerataan Pembangunan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1. TN Halimun-Salak
2. TN Gede-Pangrango
3. TN Ceremai
4. *Geopark* Ciletuh

Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,9 (Rata-rata 2025–2029)	59,6	12,7	5,85 – 6,46	0,383 – 0,390	0,57	6,61	64,06	6,42 – 6,99
2029	7,9 (2029)	84,9	12,3	2,86 – 3,86	0,381 – 0,383	0,60	8,95	65,07	5,94 – 6,56

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A5	Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban • Kota Bekasi • Kab. Bekasi • Kab. Bogor • Kab. Karawang • Kab. Purwakarta • Kab. Subang	• Pengembangan koridor industri Bogor–Bekasi–Karawang–Purwakarta–Subang–Patimban (sektor industri prioritas: industri makanan dan minuman, semikonduktor, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan industri mesin dan perlengkapan) • Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Sisi Selatan • Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban • Pembangunan jalur KA akses Pelabuhan Patimban • Pembangunan Pelabuhan Patimban dan *Patimban Industrial Estate* • Pembangunan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II • Pembangunan TPST Regional Bekasi Raya • Pembangunan TPST Regional Karawang-Purwakarta • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bekasi dan Cikarang • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Perkotaan Bekasi • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Karawang (PHTC) • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RSAU dr. Hoedijono (Kab. Subang) • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Karawang dan Cikarang (PHTC) • Pengembangan SPAM Regional Cikarang-Karawang-Purwakarta • Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik NPK Phonska 3 dan 4 di Cikampek • Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A6	Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur • Kota Bogor • Kab. Bogor	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kota Sukabumi • Kab. Sukabumi • Kab. Cianjur	○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi (PHTC) • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kota Bogor (PHTC) • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD R. Syamsudin, SH Sukabumi (PHTC) • Pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi • Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Cianjur–Ciranjang-Padalarang • Pembangunan Jalan Tol *Bogor Ring Road* • Pembangunan Jalan Tol Bogor–Serpong (via Parung) • Pembangunan Jalan Puncak II • Pembangunan TPST Regional Bogor–Sukabumi • Pengembangan SPAM Bogor Raya • Pengembangan *World Class Research University* Berbasis Potensi Wilayah pada Institut Pertanian Bogor • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bogor • Peningkatan 6A Pariwisata pada *hotspot* pariwisata, antara lain: Palabuhanratu, Puncak, Taman Bumi Ciletuh, Gunungpadang • *Urban Renewal* pada kota-kota wisata, antara lain: Bogor dan Sukabumi • Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Gunungpadang • Pengembangan KEK Lido • Pengembangan kota agropolitan Sukabumi • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RS Tk. III Salak dr. H. Sadjiman (Kota Bogor)
A1 A2	WM Bandung dan Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung (A1), Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya (A2) • Kota Bandung • Kab. Bandung • Kab. Bandung Barat • Kota Cimahi	• Pemantapan dan penataan WM Bandung, antara lain melalui: ○ Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Bandung ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan ○ Penyusunan *metropolitan statistical area* ○ Penataan kawasan strategis dan penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan terpadu di Wilayah Metropolitan Bandung • Pengembangan Kawasan Perkotaan Jatinangor (tematik kota pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Bandung, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Perencanaan dan persiapan pembangunan LRT Bandung • Pembangunan BRT Cekungan Bandung • Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung • Pembangunan TPST Regional Bandung Raya • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Bandung, termasuk penerapan SIH3 dan FEWS • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Bandung • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Bandung (PHTC) • Pembangunan SPAM Regional Bandung • Elektrifikasi jalur KA Komuter Bandung Raya Segmen Cicalengka-Padalarang • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Cicalengka–Tasikmalaya–Kroya • Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya • Pengembangan *World Class Research University* Berbasis Potensi Wilayah pada Institut Teknologi Bandung • Perencanaan pembangunan pipa gas bumi Cikampek–Bandung • Pengembangan koridor industri Cekungan Bandung (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, industri semikonduktor, industri makanan dan minuman, serta industri tekstil dan alas kaki) • Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Geowisata dan Artefak Gua Pawon (Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat), serta revitalisasi kawasan purbakala Situs Gua Pawon • Peningkatan 6A Pariwisata pada *hotspot* pariwisata, antara lain: Tangkubanparahu dan Rancaupas-Pangalengan • *Urban Renewal* pada kota-kota wisata, antara lain: Lembang dan Ciwidey • Preservasi jalan ruas Bandung–Lembang–Tangkubanparahu, Soreang–Ciwidey–Rancaupas–Rancabali, Ciwidey–Pangalengan • Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di WM Bandung (PHTC) • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RS Tk. II Dustira (Kota Cimahi), Lembaga Farmasi Puskesad (Kota Bandung), Lembaga Biologi Vaksin Puskesad (Kota Bandung) • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A3	Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati • Kota Cirebon • Kab. Cirebon	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cirebon, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Majalengka	○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Cirebon (PHTC) • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, *stroke*, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Gunung Jati Cirebon (PHTC) • Pembangunan TPST Regional Cirebon Raya • Pengembangan SPAM Regional Cirebon Raya • Pengembangan koridor industri Cirebon–Kertajati (sektor industri prioritas: industri dirgantara dan industri mesin dan perlengkapan) • Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu *raw sugar*, GKP, molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik • Pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang • Pengembangan *Kertajati Aerocity* • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya • Pengembangan kota agropolitan Cirebon • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A4	Kawasan Perkotaan Tasikmalaya • Kota Tasikmalaya	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Tasikmalaya, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Tasikmalaya (PHTC) • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya (PHTC) • Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya • Pembangunan jalur ganda KA Lintas Bandung-Cicalengka–Tasikmalaya–Kroya • Pembangunan TPST Regional Tasikmalaya–Ciamis • Pengembangan Kota Agropolitan Tasikmalaya
C3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Priangan Barat • Kab. Bogor • Kab. Sukabumi	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Cipamingkis dan D. I. Ciletuh • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Cianjur	• Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment* area, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Cimandiri, DAS Cibuni • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Cimandiri • Pembangunan Bendungan Cibeet • Pembangunan Bendungan Cijurey • Pembangunan infrastruktur PLTP Gunung Salak VII • Pembangunan infrastruktur PLTP Cisolok-Cisukarame • Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti (Kab. Sukabumi) • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
C1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung • Kab. Bekasi • Kab. Karawang • Kab. Purwakarta • Kab. Bandung Barat • Kab. Bandung • Kab. Subang • Kab. Indramayu	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Jatiluhur, D. I. Rentang, D. I. Cihea, D. I. Cikeusik, D. I. Seuseupan, D. I. Cipanas II, D. I. Cipancuh, D. I. Cileuleuy, D. I. Leuwinangka • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Sumedang • Kab. Cirebon • Kab. Kuningan • Kab. Majalengka	• Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean, serta Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Jatigede, Waduk Darma, Waduk Sadawarna, Waduk Cipancuh, Situ Lembang, Situ Patenggang, Situ Cisanti, Situ Cipanunjang-Cileunca • Pembangunan infrastruktur PLTA PS *Upper Cisokan* • Pembangunan PLTS Apung Jatiluhur • Pembangunan infrastruktur PLTP Patuha • Pembangunan infrastruktur PLTP Wayang-Windu • Pembangunan infrastruktur PLTP Tangkubanparahu • Pembangunan infrastruktur PLTP Tampomas • Pembangunan Kilang Minyak Bumi Balongan • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
C2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy-Ciwulan-Cilaki • Kab. Garut • Kab. Tasikmalaya • Kab. Ciamis • Kab. Pangandaran	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Cikunten, D. I. Cikunten II, D. I. Manganti, D. I. Bantarheulang, D. I. Lakbok Utara • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Banjar • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
		• Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
		• Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Ciwulan, DAS Citanduy, DAS Cijulang, DAS Cikandang, DAS Cimedang, DAS Cilangla
		• Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Ciwulan, DAS Citanduy, DAS Cijulang, Situ Bagendit, Situ Gede
		• Pembangunan infrastruktur PLTA PS Matenggeng
		• Pengembangan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi (Kab. Garut)
		• Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
		• Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
		• Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		• Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
D1	Kawasan Afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Garut • Kab. Tasikmalaya • Kab. Cianjur	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan
		• Peningkatan ketahanan bencana
		• Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah
		• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pameungpeuk (PHTC)
		• Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: pertanian hortikultura dan peternakan
		• Peningkatan 6A pariwisata di Santolo, Leuweung Sancang, dan Bojonglarang Jayanti
		• Peningkatan/pembangunan jalan ruas Garut–Cikajang–Pameungpeuk, Cidaun–Ciwidey–Soreang, Sindangbarang–Sukanegara–Cianjur, Tasikmalaya–Cikatomas–Cikalong, dan Jalan Lintas Selatan Jawa Barat

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer di Pameungpeuk, serta penguatan kawasan Pameungpeuk sebagai kawasan pertahanan dan keamanan matra udara • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, terutama di RSUD Pameungpeuk (PHTC)
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Cirebon-Majalengka • Kab. Cirebon • Kab. Majalengka	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tebu
B2	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Indramayu-Cirebon • Kab. Cirebon • Kab. Indramayu	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Eretan dan PPN Kejawanan • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Indramayu-Cirebon • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya air payau dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Indramayu-Cirebon
E1 E2 E3 E4	Kawasan Konservasi TN Halimun-Salak (E1), TN Gede-Pangrango (E2), TN Ciremai (E3), dan *Geopark* Ciletuh (E4) • TN Halimun-Salak: Kab. Bogor, Kab. Sukabumi • TN Gede-Pangrango: Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi • TN Ciremai: Kab. Kuningan, Kab. Majalengka • *Geopark* Ciletuh: Kab. Sukabumi	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Barat	• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Sukabumi, Kota Cimahi, dan Kota Bandung
	• Kab. Bogor • Kab. Bandung Barat • Kab. Garut • Kab. Bandung • Kab. Cianjur	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Jawa Barat	Indikasi Intervensi Umum: • Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui: o Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia o Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
		• Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui:
		○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan
		○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi
		○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik
		○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time*
		○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik
		• Percepatan transformasi digital, antara lain melalui:
		○ Perluasan infrastruktur digital
		○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital
		○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok
		• Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui:
		○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
		○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN
		○ Digitalisasi layanan publik prioritas
		○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital
		• Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jawa Barat, antara lain melalui:
		○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
		○ Penanggulangan judi dan penyelundupan
		○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
		• Pendalaman sektor keuangan, antara lain melalui:
		○ Penguatan peran perbankan
		○ Penguatan peran sektor keuangan nonbank
		○ Peningkatan inklusi dan literasi keuangan

2.3 Provinsi D.I Yogyakarta

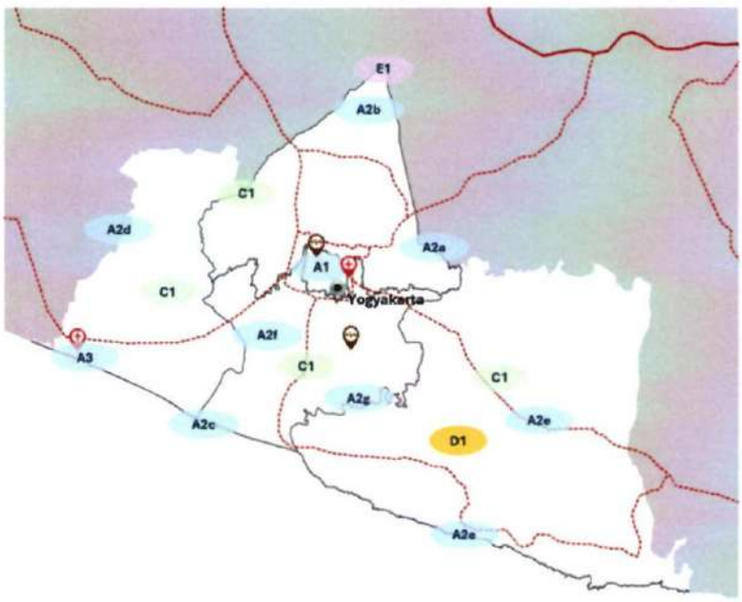

D.I. YOGYAKARTA

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- *Multinfastructur Corridor* (Terdapat Jalan Tol)
- *Multinfrastructure Corridor* (Rencana Jalan Tol dan Peningkatan/Pembangunan Jalan Nasional)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Kawasan Perkotaan Yogyakarta
2 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Yogyakarta:
   a. Prambanan-Ratuboko
   b. Kaliurang-Merapi
   c. Pantai Selatan Bantul-Kulonprogo
   d. Perbukitan Menoreh
   e. Geopark Gunung Sewu, termasuk pantai-pantai dan sistem geomorfologi karst Gunungkidul
   f. Kasongan-Selarong
   g. Imogiri
3 Kawasan Aerotropolis YIA

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan dan Air

1 Progo-Opak (Kab. Sleman, Kab. Kulonprogo, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul)

D. Kawasan Afirmasi

1 Pegunungan Sewu (Kab. Gunungkidul) (Pemerataan Pembangunan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Gunung Merbabu-Merapi

Sasaran Pembangunan Provinsi D.I Yogyakarta

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,0 (Rata-rata 2025-2029)	55,1	0,9	10,00 – 10,50	0,443 – 0,447	0,75	62,14	70,49	3,12 – 3,51
2029	8,0 (2029)	78,6	0,8	6,11 – 7,11	0,436 – 0,440	0,79	74,36	71,33	2,83 – 3,27

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2 A3	Kawasan Perkotaan Yogyakarta (A1), Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Yogyakarta (A2), dan Kawasan Aerotropolis YIA (A3) (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan) • Kota Yogyakarta • Kab. Sleman • Kab. Kulonprogo • Kab. Gunungkidul • Kab. Bantul	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Yogyakarta, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Yogyakarta (PHTC) • Pembangunan TPST Regional Yogyakarta • Pengembangan SPAM Regional Kawasan Perkotaan Yogyakarta • Pengembangan SPAL Regional Kawasan Perkotaan Yogyakarta • Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan Yogyakarta (PHTC) • Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Klaten–Kartasura • Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Magelang–Bawen • Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Kulonprogo (YIA) • *Urban Renewal* Kota Tua Yogyakarta, Kotagede, dan Revitalisasi Keraton Yogyakarta, Pura Pakualaman, dan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta • Pengembangan *World Class Research University* Berbasis Potensi Wilayah pada Universitas Gadjah Mada dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta • Peningkatan/preservasi jalan ruas Yogyakarta–Bantul–Parangtritis, Yogyakarta–Kaliurang, Yogyakarta–Wonosari–Semanu–Pracimantoro • Pengembangan Kawasan Aerotropolis YIA (*Yogyakarta International Airport*) • Peningkatan 6A Pariwisata, terutama pada *hotspot* pariwisata, antara lain: o Percandian Prambanan–Sewu o Keraton Ratu Boko o Kaliurang–Merapi o Pantai selatan Bantul–Kulonprogo o Perbukitan Menoreh o *Geopark* Gunung Sewu, termasuk pantai-pantai dan sistem geomorfologi karst Gunungkidul

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Kasongan–Selarong ○ Imogiri
C1	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Progo-Opak • Kab. Sleman • Kab. Kulonprogo • Kab. Gunungkidul • Kab. Bantul	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Karangtalun, D. I. Kalibawang, dan D. I. Progo Manggis-Kalibening • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Serang, DAS Progo Tengah-Hilir, DAS Opak, dan DAS Bribin • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Bribin • Pembangunan Bendungan Gari • Pembangunan Bendungan Karangtalun • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
D1	Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Gunungkidul	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, listrik, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Wonosari (PHTC) • Pengembangan SPAM Kawasan Perkotaan Wonosari • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: pertanian hortikultura dan peternakan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan 6A pariwisata di *Geopark* Gunung Sewu, termasuk pantai-pantai dan sistem geomorfologi karst Gunungkidul • Pembangunan Jalan Lintas Selatan Bantul–Gunungkidul–Wonogiri • Peningkatan/preservasi jalan ruas Yogyakarta–Wonosari–Semanu–Pracimantoro
E1	Kawasan Konservasi TN Gunung Merbabu-Merapi • Kab. Sleman	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di D. I. Yogyakarta	• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul
	• Kab. Bantul • Kab. Gunungkidul	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi DI Yogyakarta	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui: ○ Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia ○ Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di DI Yogyakarta, antara lain melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pendalaman sektor keuangan, antara lain melalui: ○ Penguatan peran perbankan ○ Penguatan peran sektor keuangan nonbank ○ Peningkatan inklusi dan literasi keuangan • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di DI Yogyakarta, antara lain melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

2.4 Provinsi Jawa Tengah

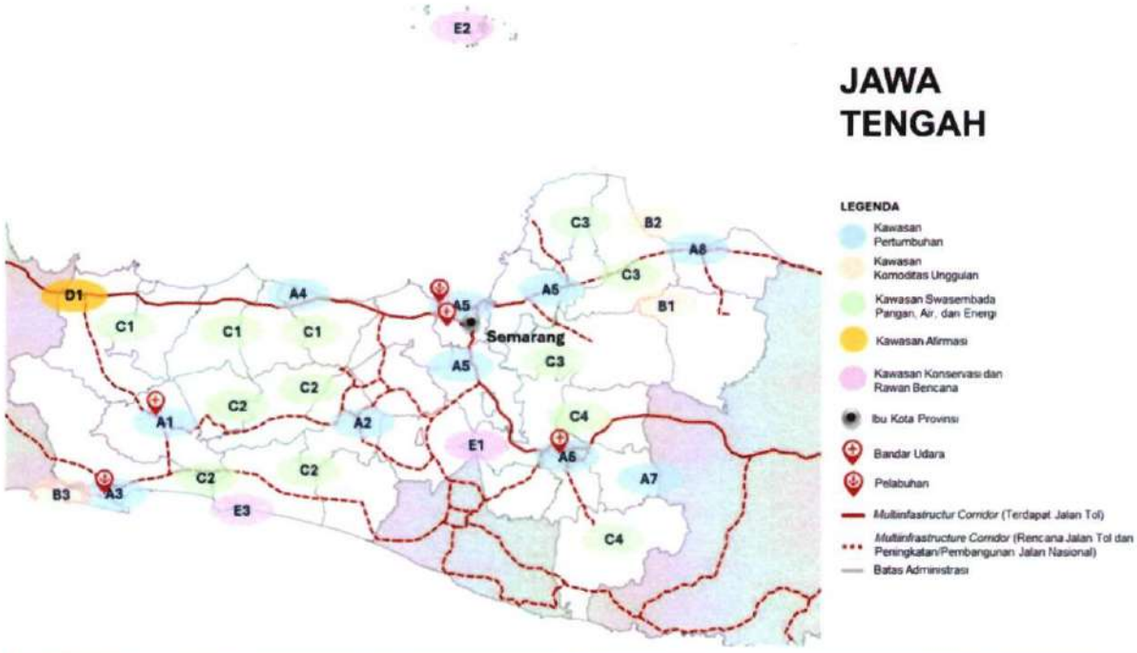

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Kawasan Perkotaan Purwokerto
2 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng
3 Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap
4 Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang
5 WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus
6 Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo
7 Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar
8 Kawasan Perkotaan Rembang

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Tebu
1 Pegunungan Kendeng (Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Blora, Kab. Sragen)

Ekonomi Biru
2 Pati-Rembang
3 Cilacap

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan dan Air
1 Pemali-Comal (Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kab. Batang)

Swasembada Pangan, Air, dan Energi
2 Dieng-Serayu-Bogowonto (Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo)
3 Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana (Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Rembang, Kab. Grobogan)
4 Bengawan Solo (Kab. Blora, Kab. Sragen, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri)

D. Kawasan Afirmasi

1 Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Merbabu-Merapi
2 TN Karimunjawa
3 *Geopark* Kebumen

Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,7 (Rata-rata 2025–2029)	51,1	8,2	9,00 – 9,66	0,362 – 0,367	0,62	0,32	75,68	4,42 – 4,81
2029	7,7 (2029)	71,8	7,9	5,21 – 6,21	0,355 – 0,360	0,65	27,57	75,87	3,73 – 4,49

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A5	WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus • Kota Semarang • Kota Salatiga • Kab. Semarang • Kab. Kendal • Kab. Demak • Kab. Kudus	• Peningkatan kualitas dan penataan WM Semarang, antara lain melalui: o Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Semarang o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan RTH o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan o Penyusunan *metropolitan statistical area* • Pengembangan Kawasan Perkotaan Salatiga (tematik kota pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Semarang, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Semarang melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta komuter • Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak • Pembangunan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban • Pembangunan TPST Regional Semarang-Demak • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Semarang, termasuk penerapan NBS, SIH3, dan FEWS • Pengembangan SPAL Regional WM Semarang • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Semarang (PHTC) • Pembangunan SPAM Regional Semarang • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya • Pembangunan pipa gas bumi Cirebon–Semarang

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pembangunan pipa gas bumi Kalija (Kalimantan–Jawa) • Pengembangan koridor industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus (sektor industri prioritas: industri kimia, industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan alas kaki) • Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu *raw sugar*, GKP, molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik • Pengembangan KI Seafer (Kab. Kendal) • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Demak • Pengembangan Pelabuhan *New Tanjung Mas-Kendal Seaport* • Pembangunan Tanggul Pantai/Laut Kendal-Semarang-Demak dan Pengembangan Kawasan Pesisir Semarang-Demak • *Urban Renewal* Kota Tua Semarang • Pembangunan Bendungan Bodri • Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan WM Semarang (PHTC) • Pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Kab. Kendal) • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A4	Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang • Kota Pekalongan • Kab. Pekalongan • Kab. Batang	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pekalongan–Batang, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pekalongan-Batang (PHTC) • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kraton Kab. Pekalongan (PHTC) • Pembangunan TPST Regional Pekalongan-Batang • Pengembangan SPAM Regional Pekalongan-Batang • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Pekalongan dan pembangunan pengaman pantai pesisir Pekalongan-Batang • Pengembangan koridor industri Batang (sektor industri prioritas: industri mesin dan perlengkapan, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri semikonduktor, hilirisasi nikel) • Pengembangan KIT Batang, termasuk infrastruktur pendukungnya seperti jalan, sistem penyediaan air baku dan air minum, telekomunikasi, *dry port*, pelabuhan, dsb. • Pembangunan pipa gas bumi Cirebon–Semarang • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya • Pengembangan kota agropolitan Pekalongan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A6 A7	Kawasan Perkotaan Surakarta dan Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo (A6) • Kota Surakarta • Kab. Boyolali • Kab. Karanganyar • Kab. Sukoharjo Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar (A7) • Kota Surakarta • Kab. Sragen • Kab. Karanganyar	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Surakarta, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Surakarta (PHTC) • Pembangunan TPST Regional Solo–Karanganyar–Boyolali–Sukoharjo • Pengembangan SPAM Regional Wososukas • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Surakarta • Pengembangan koridor industri Surakarta–Boyolali–Karanganyar–Sukoharjo (sektor industri prioritas: industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, dan industri tekstil dan alas kaki) • Pembangunan Jalan Tol Kartasura–Klaten–Yogyakarta • Pengembangan kota agropolitan Surakarta • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Surakarta • *Urban Renewal* Kota Tua Surakarta dan Revitalisasi Keraton Surakarta dan Puri Mangkunegara • Peningkatan 6A Pariwisata pada *hotspot* pariwisata, antara lain: Sangiran (termasuk revitalisasi Museum dan Situs Purbakala Sangiran), Tawangmangu, Cetho-Sukuh • Preservasi jalan ruas Solo–Sangiran, Solo–Tawangmangu • Penyediaan layanan KA *commuter line* Surakarta Raya (Surakarta-Sukoharjo-Karanganyar-Sragen) • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A1	Kawasan Perkotaan Purwokerto • Kab. Banyumas	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Purwokerto, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Purwokerto (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Purwokerto

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto (PHTC) • Pengembangan kota agropolitan Purwokerto
A3	Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap • Kab. Cilacap	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cilacap, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Cilacap (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Cilacap • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Cilacap (PHTC) • Preservasi jalan ruas Cilacap–Kebumen–Purworejo (Lintas Selatan Jawa Tengah) • Pengembangan kota agropolitan Cilacap • Pengembangan Pelabuhan Cilacap • Pembangunan Kilang Minyak Bumi Cilacap • Pengembangan koridor industri Cilacap (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, industri semen dan bahan konstruksi, industri makanan dan minuman) • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A8	Kawasan Perkotaan Rembang • Kab. Rembang	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Rembang, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Rembang (PHTC) • Pengembangan SPAM Perkotaan Rembang • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr. R. Soetrasno Rembang (PHTC) • Preservasi jalan ruas Rembang–Blora • Pembangunan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban • Pengembangan kota agropolitan Rembang

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A2	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Borobudur-Dataran Tinggi Dieng (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan) • Kota Magelang • Kab. Magelang • Kab. Wonosobo • Kab. Temanggung • Kab. Banjarnegara	• Peningkatan 6A Pariwisata Candi Borobudur sebagai *The World's Largest Buddhist Pilgrimage Destination* • Peningkatan 6A Pariwisata, antara lain pada Dataran Tinggi Dieng dan Kompleks Percandian Dieng dan Museum Kaliasa • *Urban Renewal* Kota Wisata Magelang, Wonosobo, dan Temanggung • Pengembangan Kawasan Perdesaan Margomarem (Kab. Wonosobo) • Pembangunan Jalan Tol Bawen–Magelang–Yogyakarta • Preservasi jalan ruas Borobudur–Wonosobo–Banjarnegara–Purbalingga–Purwokerto • Preservasi jalan ruas Wonosobo–Parakan–Temanggung-Secang • Preservasi jalan ruas Parakan–Ngadirejo–Weleri • Preservasi jalan ruas Wonosobo–Tambi–Percandian Dieng • Preservasi jalan ruas Ngadirejo–Sikatok–Tambi • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RST Tk. II dr. Soedjono (Kota Magelang)
C3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana • Kab. Semarang • Kab. Demak • Kab. Jepara • Kab. Kudus • Kab. Pati • Kab. Grobogan • Kab. Blora • Kab. Rembang	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Glapan, D. I. Sedadi, D. I. Klambu, D. I. Jragung, D. I. Dumpil, D. I. Sidorejo, D. I. Gemblong, dan D. I. Gunungrowo • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan *pada catchment area*, terutama pada DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Juana, DAS Capluk, DAS Lasem • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Juana, DAS Capluk, DAS Lasem, Danau Rawapening, Waduk Kedungombo • Pembangunan infrastruktur PLTP Ungaran • Pembangunan Bendungan Dolog • Pembangunan Bendungan Karangnongko • Pembangunan Bendungan Cabean • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani;

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
C2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dieng-Serayu-Bogowonto • Kab. Wonosobo • Kab. Banjarnegara • Kab. Purbalingga • Kab. Banyumas • Kab. Cilacap • Kab. Kebumen • Kab. Purworejo	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Banjarcahyana, D. I. Singomerto, D. I. Serayu, D. I. Wadaslintang, D. I. Sempor, dan D. I. Tajum • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* WS Serayu-Bogowonto • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau • Pembangunan infrastruktur PLTP Candradimuka • Pembangunan infrastruktur PLTP Dieng • Pembangunan infrastruktur PLTP Baturraden • Pembangunan Bendungan Bener • Pengembangan pabrik ekstraksi litium dari fluida panas bumi di Dataran Tinggi Dieng • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
C1	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Pemali-Comal • Kab. Brebes • Kab. Tegal • Kab. Pemalang • Kab. Pekalongan • Kab. Batang	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Waduk Malahayu, D. I. Kumisik, D. I. Pemali Bawah, D. I. Cacaban, D. I. Cipero, D. I. Gung, D. I. Sungapan, D. I. Comal, D. I. Kupang Krompeng, D. I. Sragi, dan D. I. Kaliwadas • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Wawar/Medono, DAS Bogowonto • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Wawar/Medono, DAS Bogowonto, Waduk Wadaslintang, Waduk Sempor, Waduk Mrica • Pembangunan Bendungan Kedunglanggar • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
C4	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Tengah • Kab. Wonogiri • Kab. Sukoharjo	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Klaten • Kab. Boyolali • Kab. Sragen • Kab. Karanganyar • Kab. Blora	• Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu, Waduk Gajahmungkur, Waduk Cengklik • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Pegunungan Kendeng • Kab. Rembang • Kab. Pati • Kab. Blora • Kab. Sragen	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tebu
B2 B3	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pati-Rembang (B2) • Kab. Pati • Kab. Rembang Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Cilacap (B3) • Kab. Cilacap	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Bajomulyo dan PPN Tasik Agung • Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Cilacap • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pati-Rembang • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Pati, Rembang, dan Cilacap
D1	Kawasan Afirmasi Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Brebes	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Preservasi jalan daerah di Kab. Brebes • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: pertanian dan peternakan • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
E1	Kawasan Konservasi TN Merbabu-Merapi • Kab. Magelang • Kab. Boyolali • Kab. Semarang	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
E2	Kawasan Konservasi TN Karimunjawa • Kab. Jepara	• Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil • Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
E3	Kawasan Konservasi *Geopark* Kebumen • Kab. Kebumen	• Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem • Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Wonosobo • Kab. Pemalang • Kab. Brebes • Kab. Temanggung • Kab. Magelang • Kab. Banyumas • Kab. Banjarnegara	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Jawa Tengah	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui: o Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia o Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
		• Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik
		• Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok
		• Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital
		• Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jawa Tengah, antara lain melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
		• Pendalaman sektor keuangan, antara lain melalui: ○ Penguatan peran perbankan ○ Penguatan peran sektor keuangan nonbank ○ Peningkatan inklusi dan literasi keuangan
		• Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah, antara lain melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

2.5 Provinsi Jawa Timur

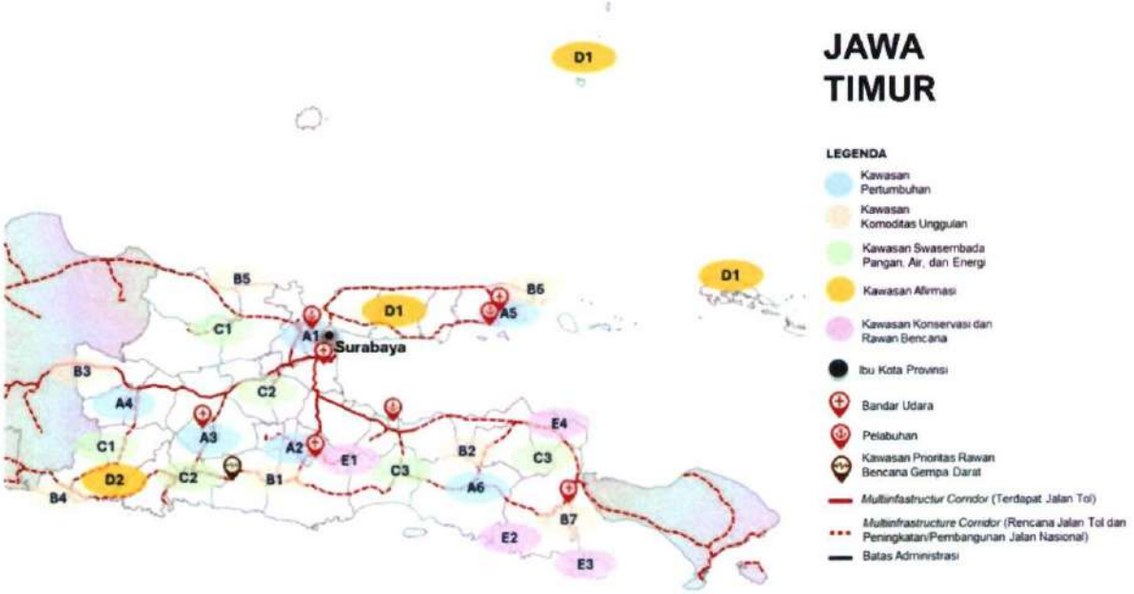

A. Kawasan Pertumbuhan

1. WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan
2. Kawasan Perkotaan Malang-Batu, Kawasan Pengembangan Industri Malang-Singasari-Lawang & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo-Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi
3. Kawasan Perkotaan Kediri
4. Kawasan Perkotaan Madiun
5. Kawasan Perkotaan Sumenep
6. Kawasan Perkotaan Jember

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Tebu

1. Lingkar Kelud-Kawi-Arjuna-Welirang (Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo)
2. Tapal Kuda (Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo)
3. Pegunungan Kendeng-Lingkar Lawu (Kab. Ngawi, Kab. Magetan)

Ekonomi Biru

4. Pacitan-Trenggalek-Tulungagung
5. Lamongan-Tuban
6. Sumenep
7. Banyuwangi

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Bengawan Solo (Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kab. Lamongan)
2. Brantas (Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo)
3. Tapal Kuda (Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi)

D. Kawasan Afirmasi

1. Madura dan Kepulauan (Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep) (Percepatan Pengentasan Kemiskinan)
2. Pegunungan Sewu (Kab. Pacitan dan Kab. Trenggalek) (Pemerataan Pembangunan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1. TN Bromo-Tengger-Semeru
2. TN Meru Betiri
3. TN Alas Purwo
4. TN Baluran

Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,9 (Rata-rata 2025–2029)	80,7	14,2	7,58 – 8,08	0,381 – 0,386	0,64	1,00	74,17	3,90 – 4,49
2029	8,0 (2029)	114,8	13,7	4,31 – 5,31	0,369 – 0,373	0,68	2,52	74,50	3,26 – 4,21

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan	• Peningkatan kualitas dan penataan WM Surabaya, antara lain melalui: o Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Surabaya o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan RTH o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan o Penyusunan *metropolitan statistical area* • Pengembangan Kawasan Perkotaan Gresik (tematik kota industri) sebagai kota satelit dari WM Surabaya, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan WM Surabaya, antara lain Pengembangan *Surabaya Regional Railway Line* Fase 1 dan BRT Surabaya • Pembangunan Jalan Tol Surabaya *East Ring Road* (Bandara Juanda-Kenjeran) • Pembangunan Jalan Tol Gresik–Lamongan–Tuban • Pembangunan Jalur Ganda KA Segmen Sepanjang–Wonokromo • Pengembangan TPST Regional Surabaya Raya • Pengembangan SPAL Regional WM Surabaya • Pengembangan *World Class Research University* Berbasis Potensi Wilayah pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Surabaya (PHTC) • Pembangunan SPAM Regional Surabaya dan peningkatan SPAM Mojolagres

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Surabaya, termasuk pengendalian banjir Kali Buntung dan Kali Lamong • Pengembangan koridor industri Gresik–Surabaya–Sidoarjo–Mojokerto–Pasuruan (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, hilirisasi tembaga, industri logam, besi, dan baja, industri mesin dan perlengkapan, dan industri makanan dan minuman) • Hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu *raw sugar*, GKP, molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik • Pengembangan KEK Gresik dan pengembangan KI i-Sentra@Lamongan • Pembangunan Pabrik Amonia Urea III Petrokimia Gresik (PKG) • Pembangunan Pabrik *Soda Ash* Petrokimia Gresik (PKG) • Perencanaan dan penyiapan pembangunan jalur KA Duduksampeyan-Pelabuhan JIIPE Manyar, serta pengembangan *dry port* kereta api • *Urban Renewal* Kota Tua Surabaya • Pengembangan TPST Regional Pasuruan–Probolinggo • Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Keraton Majapahit Trowulan • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya
A2	Kawasan Perkotaan Malang-Batu, Kawasan Pengembangan Industri Malang-Singasari-Lawang, dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo-Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi (Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru) • Kota Malang • Kota Batu • Kab. Malang • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Lumajang • Kab. Blitar	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Malang-Batu, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Malang–Batu (PHTC) • *Urban Renewal* Kota Wisata Batu • Pembangunan TPST Regional Malang • Pengembangan SPAM Regional Malang • Pengembangan koridor industri Malang-Singasari-Lawang (sektor industri prioritas: industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, dan industri tekstil dan alas kaki) • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah • Pengembangan KEK Singasari • Pengembangan kota agropolitan Malang–Batu • Pengembangan SPAL Regional Kawasan Perkotaan Malang • Peningkatan 6A Pariwisata Malang–Bromo–Tengger–Semeru • Preservasi jalan ruas Malang–Batu dan Malang-Bromo • Pembangunan infrastruktur pengendalian sedimen dan lahar Gunung Semeru

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Revitalisasi Museum PETA Blitar • Pembinaan melalui pelatihan kapasitas SDM Pariwisata berbasis pariwisata berkelanjutan • Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Semeru
A3	Kawasan Perkotaan Kediri • Kota Kediri • Kab. Kediri	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kediri, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Kediri (PHTC) • Pembangunan TPST Regional Kediri • Pengembangan SPAM Regional Kediri • Pengembangan kota agropolitan Kediri • Pembangunan Jalan Tol Kertosono–Kediri • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Gambiran Kediri (PHTC) • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Kediri • Preservasi jalan ruas Kediri–Tulungagung–Trenggalek dan Kediri–Tulungagung–Blitar • Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Kelud
A4	Kawasan Perkotaan Madiun • Kota Madiun • Kab. Madiun • Kab. Magetan	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Madiun, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Madiun (PHTC) • Pembangunan TPST Regional Madiun • Pengembangan SPAM Regional Madiun • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Madiun • Pengembangan kota agropolitan Madiun • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Soedono Madiun (PHTC) • Preservasi jalan ruas Madiun-Magetan dan Madiun-Ponorogo-Pacitan • Pengembangan Kawasan Industri Ngawi, sebagai *hinterland* dari Kawasan Perkotaan Madiun • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RSAU dr. Efram Harsana (Kab. Magetan)
A6	Kawasan Perkotaan Jember • Kab. Jember	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Jember, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Jember (PHTC) • Pembangunan TPST Regional Jember • Pengembangan SPAM Regional Jember • Pengembangan kota agropolitan Jember • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Soebandi Jember (PHTC) • Preservasi jalan ruas Jember-Banyuwangi, Jember-Bondowoso-Situbondo, dan Jember-Lumajang • Perencanaan dan persiapan reaktivasi jalur KA segmen Kalisat-Situbondo
C1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur • Kab. Pacitan • Kab. Ponorogo • Kab. Magetan • Kab. Madiun • Kab. Ngawi • Kab. Bojonegoro • Kab. Tuban • Kab. Lamongan • Kab. Gresik	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Colo, D. I. Asin Bawah, D. I. Bengawan Jero, D. I. Gondang, D. I. Prijetan, D. I. Sim, D. I. Waduk Pondok, D. I. Jejeruk, D. I. Sungkur, D. I. Beron, dan D. I. Pacal • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada Sub-DAS Kali Madiun, Sub-DAS Bengawan Solo Hilir, DAS Grindulu, DAS Prumpung, DAS Kali Lamong, dan DAS Kali Corong • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Kali Madiun, Sub-DAS Bengawan Solo Hilir, DAS Grindulu, DAS Prumpung, DAS Kali Lamong, dan DAS Kali Corong, Waduk Pacal, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Prijetan, dan Telaga Sarangan • Pembangunan infrastruktur PLTP Tegala Ngebel • Pembangunan infrastruktur PLTA PS Grindulu • Pengembangan Kilang Minyak Bumi GRR Tuban • Pembangunan kilang olefin di Tuban • Pengembangan *biofuel* dari metanol dan etanol di Bojonegoro

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pembangunan Jalan Tol Gresik-Lamongan-Tuban-Rembang • Preservasi jalan ruas Bojonegoro-Babad-Lamongan-Gresik dan Tuban-Babad • Pengembangan Kawasan Prioritas Organik Bernutrisi Lereng Gunung Lawu (Kab. Karanganyar) • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
C2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas • Kab. Malang • Kab. Blitar • Kab. Kediri • Kab. Nganjuk • Kab. Jombang • Kab. Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Tulungagung • Kab. Trenggalek	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Delta Brantas, D. I. Is Kedung Kandang, D. I. Menturus, D. I. Mrican, D. I. Padi Pomahan, D. I. Is Molek, dan D. I. Waduk Bening • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada Sub-DAS Brantas Hulu, Sub-DAS Lekso, Sub-DAS Konto, Sub-DAS Brangkal • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Brantas Hulu, Sub-DAS Lekso, Sub-DAS Konto, Sub-DAS Brangkal, Waduk Karangkates, Waduk Widas, Waduk Selorejo • Peningkatan operasi dan pemeliharaan bendungan-bendungan pada DAS Brantas • Pembangunan infrastruktur PLTP Arjuno Welirang • Pembangunan Bendungan Bagong • Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Gondang (Kab. Mojokerto) • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian;

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur
C3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Lumajang • Kab. Jember • Kab. Situbondo • Kab. Bondowoso • Kab. Banyuwangi	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Bondoyudo, D. I. Sampean Baru, D. I. Baru, D. I. Setail, D. I. Porolinggo, D. I. Setail Teknik, D. I. Bedadung, D. I. Pondok Waluh, D. I. Talang, D. I. Jatiroto, D. I. Pekalen, D. I. Banyuputih, dan D. I. Sampean • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Bondoyudo, DAS Bedadung, DAS Sampean, DAS Tempuran-Kedungbajul • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Bondoyudo, DAS Bedadung, DAS Sampean, DAS Tempuran-Kedungbajul • Pembangunan infrastruktur PLTP Ijen • Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi • Pengembangan SPAM Regional Probolinggo-Lumajang dan peningkatan kapasitas SPAM Umbulan • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani;

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur
A5 D1	Kawasan Afirmasi Madura (D1) dan Kepulauan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) dan Kawasan Perkotaan Sumenep (A5) • Kab. Bangkalan • Kab. Sampang • Kab. Pamekasan • Kab. Sumenep	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Preservasi Jalan Lintas Selatan Madura dan Jalan Lintas Utara Madura • Pengembangan jaringan/daerah irigasi baru di WS Madura • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perikanan dan peternakan • *Replacement* fasilitas Pelabuhan Sapudi • Peningkatan fasilitas Pelabuhan Keramaian (Pulau Masalembu) • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sumenep, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan SPAM Perkotaan Sumenep • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Sumenep (PHTC) • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep (PHTC) • Pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
D2	Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Pacitan	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Trenggalek	• Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dan preservasi Jalan Lintas Selatan Wonogiri–Pacitan–Trenggalek–Tulungagung, serta jalan ruas Ponorogo–Pacitan dan Ponorogo–Trenggalek • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perikanan, pertanian, dan perkebunan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota di RSUD dr. Darsono Pacitan (PHTC) • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Lingkar Kelud-Kawi-Arjuna-Welirang • Kab. Malang • Kab. Blitar • Kab. Kediri • Kab. Jombang • Kab. Mojokerto • Kab. Sidoarjo	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tebu
B2	Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Tapal Kuda • Kab. Lumajang • Kab. Jember • Kab. Situbondo • Kab. Bondowoso	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tebu
B3	Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Pegunungan Kendeng-Lingkar Lawu • Kab. Ngawi • Kab. Magetan	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tebu
B4	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pacitan-Trenggalek-Tulungagung • Kab. Pacitan • Kab. Trenggalek • Kab. Tulungagung	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Tamperan dan PPN Prigi • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
B5	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Lamongan-Tuban • Kab. Lamongan • Kab. Tuban	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Brondong dan PPP Bulu • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Lamongan dan Tuban
B6	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Sumenep • Kab. Sumenep	• Pengembangan pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan Pasongsongan • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Sumenep
B7	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Banyuwangi • Kab. Banyuwangi	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Muncar • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Banyuwangi • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya, terutama pada komoditas lobster air laut yang memiliki nilai jual tinggi (*high-value commodity*) • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya air payau dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
E1 E2 E3 E4	Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger-Semeru (E1) • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Malang • Kab. Lumajang Kawasan Konservasi TN Meru Betiri (E2) • Kab. Jember • Kab. Banyuwangi	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari dan peningkatan fungsi sosial kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Kawasan Konservasi TN Alas Purwo (E3) • Kab. Banyuwangi Kawasan Konservasi Baluran (E4) • Kab. Situbondo	
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Timur	• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Blitar
	• Kab. Bangkalan • Kab. Pamekasan • Kab. Sampang • Kab. Sumenep • Kab. Bondowoso	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Jawa Timur	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan o Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik o Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* o Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: o Perluasan infrastruktur digital o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital o Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN o Digitalisasi layanan publik prioritas o Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jawa Timur, antara lain melalui: o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) o Penanggulangan judi dan penyelundupan o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Timur, antara lain melalui: o Pelindungan dan pelestarian warisan budaya o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan o Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

2.6 Provinsi Banten

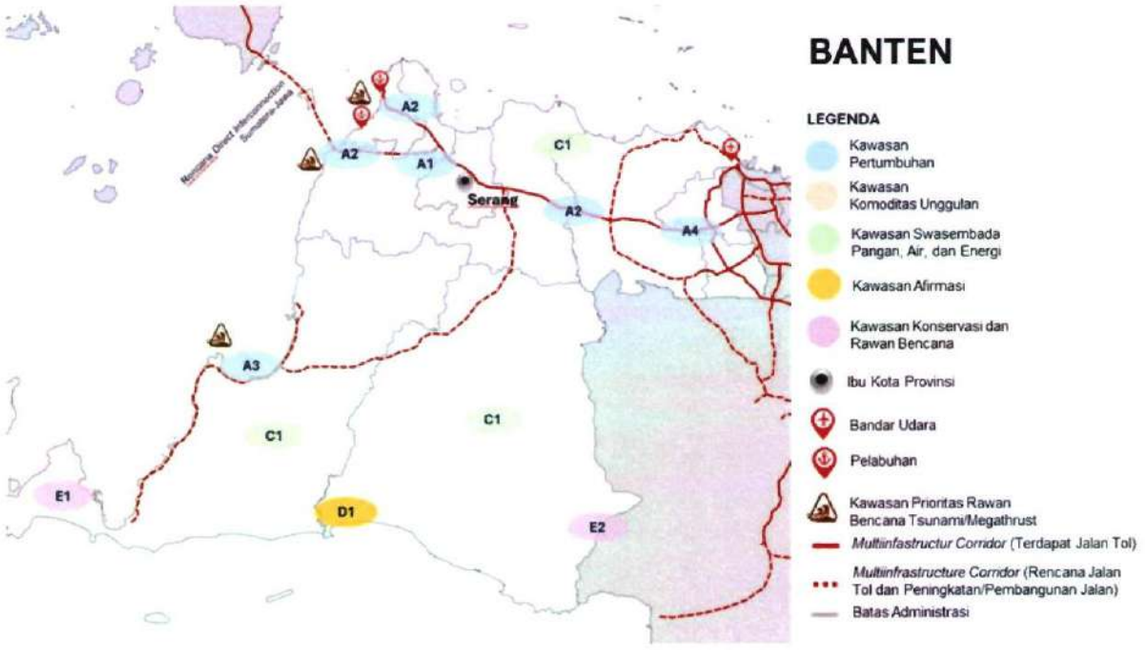

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang
2 Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang
3 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung
4 Kawasan Perkotaan Tangerang Raya (bagian dari Kawasan Aglomerasi Jakarta)

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

Swasembada Pangan, Air, dan Energi
1 Banten (Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang)

D. Kawasan Afirmasi

1 Banten Selatan (pesisr selatan Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang) (Percepatan Pengentasan Kemiskinan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Ujung Kulon
2 TN Halimun-Salak

Sasaran Pembangunan Provinsi Banten

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,8 (Rata-rata 2025–2029)	74,6	3,9	4,50 – 5,50	0,344 – 0,365	0,56	43,56	66,92	6,87 – 7,24
2029	7,9 (2029)	106,4	3,8	2,42 – 3,42	0,326 – 0,330	0,59	56,65	67,93	6,39 – 6,82

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2 A4	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang (A1), Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang (A2), dan *Jakarta-Tangerang International Business Corridor* • Kota Cilegon • Kota Serang • Kab. Serang • Kab. Tangerang • Kota Tangerang • Kota Tangerang Selatan	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cilegon–Serang, antara lain melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pengembangan koridor industri Cilegon–Serang–Tangerang (sektor industri prioritas: industri kimia, industri makanan dan minuman, dan industri logam, besi, dan baja) • Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (kelapa sawit), dan pengembangan Kawasan Industri Krakatau *Industrial Estate* Cilegon (industri kimia dan logam dasar) • Hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas • Pengembangan Pelabuhan Ciwandan-Cigading • Perencanaan dan penyiapan pembangunan Interkoneksi Sumatera–Jawa • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Cilegon-Serang (PHTC) • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Banten (PHTC) • Peningkatan jalur KA Rangkasbitung–Merak • Pembangunan TPST Regional Serang–Cilegon • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan • Pelebaran Jalan Merak-Batas Kota Cilegon • Pengembangan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten (KEK BSD) • Pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja • Pembangunan Jalan Tol Kamal–Teluk Naga–Rajeg–Balaraja

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan • Pembangunan TPST Regional Tangerang Raya • Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kab. Serang • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
A3	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	• Peningkatan 6A Pariwisata di KEK Tanjung Lesung dan *urban renewal* Labuan • Preservasi jalan ruas Panimbang-Labuan, Panimbang–Tanjunglesung, dan Panimbang–Sumur–Ujungkulon (via pesisir) • Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuan • Pembangunan Jalan Tol Serang–Rangkasbitung–Panimbang
C1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten • Kab. Serang • Kab. Tangerang • Kab. Lebak • Kab. Pandeglang	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Cisadane, D. I. Ciujung, D. I. Cidurian • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian–Cimanceuri, DAS Cibungur–Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh–Cipuntenageung–Cibama • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian–Cimanceuri, DAS Cibungur–Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh–Cipuntenageung–Cibama • Pembangunan infrastruktur PLTP Rawadano • Pembangunan Bendungan Karian • Pembangunan Bendungan Cidanau • Pembangunan *Interbasin Transfer System* Banten • Pembangunan SPAM Regional Karian Barat • Pembangunan SPAM Regional Karian Timur • Pembangunan SPAM Regional Sindangheula • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		• Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
D1	Kawasan Afirmasi Banten Selatan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Lebak • Kab. Pandeglang	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan
		• Peningkatan ketahanan bencana
		• Pengembangan PSDKU sesuai keunggulan wilayah (indikasi lokasi: Malingping)
		• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Malingping (PHTC)
		• Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perikanan, pertanian tanaman pangan, dan pertanian hortikultura
		• Peningkatan 6A pariwisata di Sawarna dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy (Baduy Luar)
		• Peningkatan/pembangunan jalan ruas Panimbang–Muarabinuangeun, Muarabinuangeun–Malingping–Bayah–Sawarna–Palabuhanratu, Cikulur–Ciboleger
		• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, terutama di RSUD Malingping (PHTC)
		• Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital
		• Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
E1 E2	Kawasan Konservasi TN Ujung Kulon (E1) • Kab. Pandeglang Kawasan Konservasi TN Halimun-Salak (E2) • Kab. Lebak	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
		• Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
		• Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
		• Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
		• Penguatan pengelolaan hutan lestari
		• Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan
		• Perlindungan dan pengamanan hutan
	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Banten	• Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman *megathrust* dan tsunami di Kawasan Perkotaan Cilegon dan Pesisir Barat Banten (*Megathrust* Selat Sunda)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Pandeglang • Kab. Tangerang • Kab. Lebak • Kab. Serang	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Banten	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan o Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik o Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* o Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: o Perluasan infrastruktur digital o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital o Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN o Digitalisasi layanan publik prioritas o Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Banten, antara lain melalui: o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) o Penanggulangan judi dan penyelundupan o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Banten, antara lain melalui: o Pelindungan dan pelestarian warisan budaya o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan o Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Wilayah Bali – Nusa Tenggara

3.1 Provinsi Bali

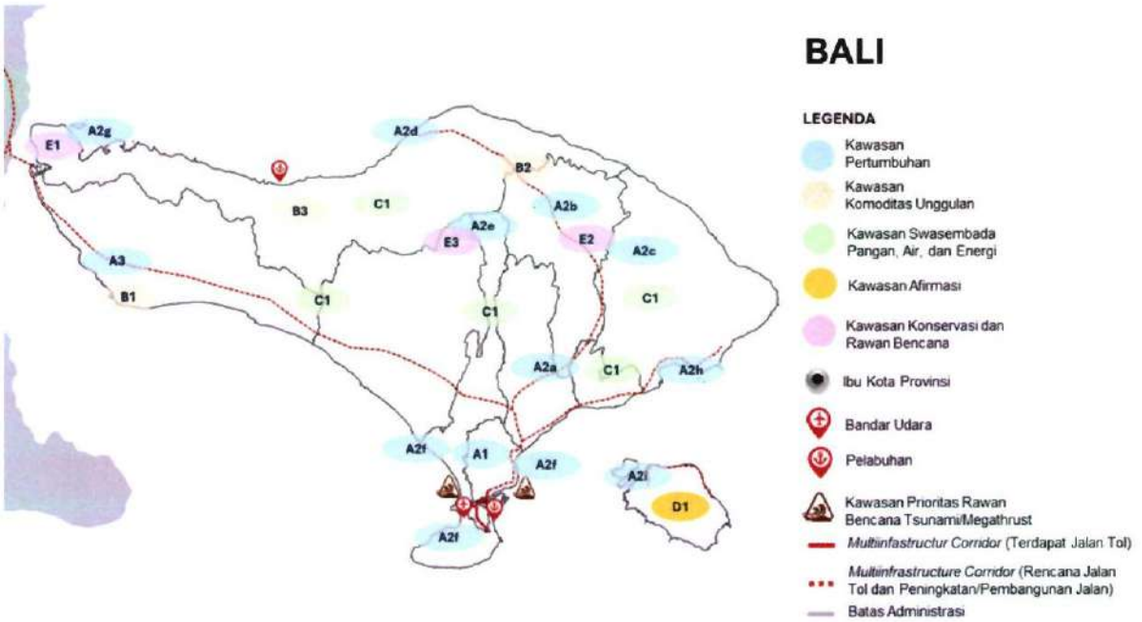

A. Kawasan Pertumbuhan

1 WM Denpasar
2 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali
   a. Ubud-Tegallalang-Payangan (Ulapan)
   b. Kintamani-Danau Batur
   c. Besakih-Gunung Agung
   d. Singaraja-Lovina (termasuk urban renewal kawasan perkotaan Singaraja menuju kota pariwisata pusaka)
   e. Bedugul
   f. Kuta-Canggu-Sanur-Nusadua
   g. TNBB-Menjangan-Pemuteran
   h. Amuk-Candidasa
   i. Nusapenida
3 Rintisan Kawasan Pengembangan Industri Candikusuma-Pengambengan

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Ekonomi Biru
1 Jembrana

Kopi
2 Bangli-Buleleng

Anggur
3 Buleleng

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan, Air, dan Energi
1 Bali-Nusapenida (Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung)

D. Kawasan Afirmasi

1 Nusapenida (Daerah Terdepan dan Pemerataan Pembangunan)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Bali Barat
2 TWA Gunung Batur-Bukit Payang
3 TWA Danau Buyan-Danau Tambingan

Sasaran Pembangunan Provinsi Bali

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,5 (Rata-rata 2025-2029)	72,7	1,4	3,57 – 3,93	0,355 - 0,359	0,61	5,36	76,19	1,87 – 2,35
2029	8,5 (2029)	110,9	1,4	1,79 – 2,79	0,331 – 0,335	0,64	26,88	76,89	1,63 – 2,17

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	WM Denpasar • Kota Denpasar • Kab. Badung • Kab. Tabanan • Kab. Gianyar	• Peningkatan kualitas dan penataan WM Denpasar, antara lain melalui: o Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Denpasar o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Penyusunan *metropolitan statistical area* • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan WM Denpasar, antara lain pengembangan BRT dean sistem transit • Pembangunan TPST Regional Sarbagita • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Denpasar • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25–50 tahunan di WM Denpasar • Bali *Beach Conservation Project II* • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Denpasar (PHTC) • Pembangunan SPAM Regional Sarbagita • Pengembangan *World Class Research University* berbasis potensi wilayah pada Universitas Udayana, Institut Seni Indonesia Denpasar, dan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa • Pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH *Development Area 2*) • Pengembangan KEK Sanur • Pengembangan KEK Kura-Kura Bali • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi–Singapadu–Sanur–Benoa • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi–Canggu
A2	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali) • Kota Denpasar • Kab. Jembrana	• Peningkatan 6A Pariwisata pada *hotspot* pariwisata Bali, antara lain: o Ubud–Tegallalang–Payangan (Ulapan) o Kintamani–Danau Batur o Besakih–Gunung Agung o Singaraja–Lovina (termasuk *urban renewal* kawasan perkotaan Singaraja menuju kota pariwisata pusaka) o Bedugul–Kuta–Canggu–Sanur–Nusadua

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Tabanan • Kab. Badung • Kab. Buleleng • Kab. Gianyar • Kab. Bangli • Kab. Klungkung • Kab. Karangasem	o TNBB–Menjangan–Pemuteran o Amuk–Candidasa o Nusapenida • Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu–Ubud–Gianyar–Bangli–Kintamani–Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara–Singaraja • Pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Baru/Bali Utara • Pengembangan kawasan pariwisata Ulapan, termasuk perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Lingkar Ulapan • Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung • Pengembangan Pelabuhan Gunaksa • Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan • Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Agung
A3	Rintisan Kawasan Pengembangan Industri Candikusuma-Pengambengan • Kab. Jembrana	• Pengembangan KI Candikusuma (sektor industri prioritas: industri makanan dan minuman dan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai) • Pengembangan SPAM pada kawasan Negara-Pengambengan-Candikusuma • Pengembangan SPAL dan TPST pendukung aktivitas industri • Penyiapan pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja (PHTC) • Penguatan dan integrasi pendidikan/pelatihan dengan kebutuhan industri pada SMKN 2 Negara dan BLK Jembrana
C1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bali-Nusapenida • Kab. Badung • Kab. Buleleng • Kab. Jembrana • Kab. Tabanan • Kab. Gianyar • Kab. Tabanan • Kab. Karangasem • Kab. Klungkung	• Rehabilitasi dan Peningkatan D. I. Tukad Ayung. D. I. Tukad Penet, D. I. Tukad Unda, D. I. Tukad Saba , D. I. Tukad Oos, D. I. Tukad Pekerisan, D. I. Tukad Petanu, D. I. Tukad Yeh Hoo • Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah • Pelestarian kearifan budaya Subak dalam mendukung terwujudnya Swasembada Pangan • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet-Yeh Empas, DAS Oos–Petanu–Pakerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS Daya, DAS Saba • Peningkatan pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet-Yeh Empas, DAS Oos-Petanu-Pakerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS Daya, DAS Saba, Danau Buyan, Danau Beratan, Danau Tamblingan, Danau Batur • Pembangunan infrastruktur PLTP Bedugul • Pembangunan PLTS Bali Barat dan Bali Timur • Pembangunan PLTS Nusapenida dan BESS (*Battery Energy Storage System*) • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV *Java-Bali Interconnection*

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan dan pengembangan *broodstock center* udang di Kab. Karangasem • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
B1	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Jembrana • Kab. Jembrana	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Pengambengan • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Jembrana • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
B2 B3	Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Bangli-Buleleng (B2) • Kab. Bangli • Kab. Buleleng Kawasan Komoditas Unggulan Anggur Buleleng (B3) • Kab. Buleleng	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (kopi, anggur) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi, anggur) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (kopi, anggur) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi, anggur) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan anggur • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
D1	Kawasan Afirmasi Nusapenida (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan) • Kab. Klungkung	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Pembangunan/preservasi jalan lingkar dan Trans Nusapenida • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan • Pembangunan rumah sakit berkualitas di Nusapenida (PHTC)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan Pulau Nusapenida sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di sekitar ALKI-2 • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pemanfaatan sumber daya biota laut dan ekosistem pesisir secara berkelanjutan • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan • Kawasan Perdesaan Pariwisata Gema Santi Nusapenida
E1 E2 E3	Kawasan Konservasi TN Bali Barat (E1) • Kab. Jembrana • Kab. Buleleng Kawasan Konservasi TWA Gunung Batur-Bukit Payang (E2) • Kab. Bangli Kawasan Konservasi TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan (E3) • Kab. Tabanan • Kab. Buleleng	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan
	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Bali	• Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman *megathrust* dan tsunami di Kawasan Perkotaan WM Denpasar
	• Kab. Bangli • Kab. Karangasem • Kab. Buleleng	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Bali	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitalisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan o Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik o Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* o Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: o Perluasan infrastruktur digital o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital o Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: o Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN o Digitalisasi layanan publik prioritas o Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Bali, antara lain melalui: o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) o Penanggulangan judi dan penyelundupan o Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) o Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang o Penguatan pengawasan dan penindakan imigrasi • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Bali, antara lain melalui: o Pelindungan dan pelestarian warisan budaya o Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan o Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

3.2 Provinsi Nusa Tenggara Barat

A. Kawasan Pertumbuhan

DPP Lombok Gili Tramena
1. Kota Mataram
2. Kab. Lombok Utara
3. Kab. Lombok Barat
4. Kab. Lombok Tengah
5. Kab. Lombok Timur

Kawasan Perkotaan Sedang Kota Mataram
6. Kota Mataram

Kawasan Industri Sumbawa Barat
7. Kab. Sumbawa Barat

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Perkebunan
1. Kabupaten Lombok Timur
2. Kabupaten Dompu
3. Kabupaten Lombok Utara
4. Kabupaten Sumbawa

Kawasan Peternakan
5. Kabupaten Lombok Tengah
6. Kabupaten Lombok Timur
7. Kabupaten Sumbawa
8. Kabupaten Dompu
9. Kabupaten Bima

Kawasan Sentra Garam
10. Kabupaten Bima
11. Kabupaten Lombok Timur
12. Kabupaten Sumbawa
13. Kabupaten Lombok Barat

Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut
14. Kabupaten Sumbawa
15. Kabupaten Lombok Timur
16. Kabupaten Bima
17. Kabupaten Lombok Tengah
18. Kabupaten Lombok Barat

Sentra Akuakultur – Komoditas Udang
19. Kabupaten Sumbawa
20. Kabupaten Bima
21. Kabupaten Lombok Timur
22. Kabupaten Sumbawa Barat
23. Kabupaten Lombok Utara

Kawasan Pengembangan Sentra Berbasis Perikanan Tangkap
24. Kabupaten Lombok Timur
25. Kabupaten Sumbawa
26. Kabupaten Dompu

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

Kawasan Pangan Lokal
1. Kabupaten Sumbawa
2. Kabupaten Lombok Timur
3. Kabupaten Dompu
4. Kabupaten Bima

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)
1. Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata Sembalun, Kabupaten Lombok Timur

Kawasan Transmigrasi (KT)
2. KT Selaparang, Kabupaten Lombok Timur

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi
1. Kawasan Konservasi Nasional Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara
2. Kawasan Konservasi Daerah Gili Balu, Kabupaten Sumbawa Barat

Kawasan Rawan Bencana Gempa Darat
3. Kota Mataram

Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	8,4 (Rata-rata 2025–2029)	35,2	0,8	11,68 - 12,18	0,369 - 0,373	0,56	25,99	76,19	2,19 - 2,79
2029	9,3 (2029)	53,9	0,9	8,12 - 9,12	0,324 - 0,328	0,60	51,70	77,03	1,81 - 2,59

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2 A3 A4 A5	Kawasan DPP Lombok Gili–Tramena • Kota Mataram • Kab. Lombok Utara • Kab. Lombok Barat • Kab. Lombok Tengah • Kab. Lombok Timur	Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata khususnya wisata petualangan pada kawasan prioritas (DPP Lombok - Gili Tramena), melalui: • peningkatan jalan nasional, dengan *output*: pembangunan jalan akses simpul transportasi • pengembangan atraksi (alam, budaya, buatan) termasuk berbasis geologi Lombok–Gili Tramena, dengan *output*: *event* MICE dalam negeri, pendukungan *event* daerah, pelaksanaan kegiatan (*events*) nasional dan internasional, jejaring Destinasi Pariwisata di wilayah Destinasi II yang dikembangkan, dokumen perencanaan daerah pariwisata di wilayah destinasi II yang terpadu, desa wisata yang dikembangkan, koordinasi strategis perencanaan dan pengembangan *Geopark* Rinjani • Pengembangan kawasan *geopark* yang diwujudkan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan dan implementasi rencana induk pengembangan *geopark* • pembangunan sarana prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Lombok–Gili Tramena, dengan *output*: sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota • pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata Lombok-GIli Tramena, dengan *output*: fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pariwisata, SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja, sertifikasi SDM bidang pariwisata • pemasaran pariwisata Lombok–Gili Tramena, dengan *output*: publikasi, promosi terpadu, konten promosi wisata minat khusus, jejaring promosi wisata minat khusus, promosi terpadi (pameran, perjalanan wisata pengenan, dan kerja sama dengan maskapai dan *wholesaler*) • Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata Lombok-Gili Tramena, dengan *output*: fasilitasi akses pembiayaan pasar modal, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata, koordinasi implementasi *Blue, Green, Circular Economy* pada usaha pariwisata, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata • Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus dengan, dengan *output*: pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK, peningkatan investasi kerja sama komunikasi dan sistem informasi di KEK, pelayanan investasi administrator KEK tipe A • Pengurangan emisi GRK sektor pengelolaan sampah oleh pemerintah pusat, dengan *output*: bank sampah induk yang terbangun, fasilitas pengelolaan sampah spesifik, sistem pengelolaan persampahan skala kota, instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pemanfaatan secara berkelanjutan dan pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: prasarana penanggulangan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; bantuan pengembangan desa pesisir bersih; pemanfaatan keanekaragaman hayati dan laut dan ekosistemnya dengan memperhatikan daya dukung; fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir; kab/kota yang difasilitasi dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular pengelolaan sampah
A6	Kawasan Perkotaan Sedang Kota Mataram • A6: Kota Mataram	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kota Mataram, melalui: • Pembangunan kawasan perkotaan sedang, dengan *output*: penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk kota sedang, penguatan instrumen peringatan dini bencana, rumah susun hunian MBR/pekerja, pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh, bantuan PSU bidang perumahan, pembangunan dan peningkatan spam, SPALD-T skala regional/kota/permukiman/kawasan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, sistem pengelolaan persampahan skala regional/kota/kawasan • Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z
A7	Kawasan Industri Sumbawa Barat • A7: Kab. Sumbawa Barat	Pengembangan Aglomerasi Industri di Kawasan Industri Sumbawa Barat, melalui: • Perencanaan dan perizinan KI Sumbawa Barat • Penataan ruang dan pengembangan konektivitas simpul transportasi KI Sumbawa Barat • Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan/jembatan, sarana prasarana perumahan/kesehatan/air bersih/listrik/pengolahan persampahan dan limbah • Peningkatan investasi kawasan dan pengembangan usaha serta rantai pasok • Penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM • Peningkatan investasi hilirisasi tembaga
B1 B2 B3 B4	Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Hasil Perkebunan • B1: Kab. Lombok Timur • B2: Kab. Dompu • B3: Kab. Lombok Utara • B4: Kab. Sumbawa	Pengembangan Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Tembakau (Kab. Lombok Timur), Tebu (Kab. Dompu), Kelapa (Kab. Lombok Utara), Kopi (Kab. Sumbawa), melalui: • Peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan, dengan *output*: kawasan tebu, kawasan tembakau, kawasan kelapa, kawasan kopi, sarana dan prasarana pascapanen, sarana dan prasarana pengolahan, dan produksi benih tanaman perkebunan • Peningkatan daya saing produk perkebunan yang disertai peningkatan industri pengolahan hasil perkebunan, dengan *output*: pengembangan industri pengolahan perkebunan produk hilir, fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri tempurung dan sabut kelapa, neraca komoditas perkebunan, pengembangan industri pengolahan perkebunan, pendampingan pembiayaan usaha mikro, peningkatan peluang investasi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi • Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor, dengan *output*: kawasan perkebunan, kawasan kopi dan kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kopi internasional, kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Implementasi pertanian rendah karbon, dengan *output*: desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, dengan *output*: fasilitasi hilirisasi investasi, sertifikasi produk mutu pestisida dan pupuk
B5 B6 B7 B8 B9	Pengembangan Kawasan Peternakan • B5: Kab. Lombok Tengah • B6: Kab. Lombok Timur • B7: Kab. Sumbawa • B8: Kab. Dompu • B9: Kab. Bima	Pengembangan kawasan peternakan melalui: • Pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani, dengan *output*: benih ternak unggul, sarana perbibitan ternak, prasarana perbibitan ternak, ternak ruminansia perah dan potong, pakan olahan dan bahan pakan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dan layanan kesehatan hewan • Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, dengan *output*: bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, sertifikasi benih/bibit ternak, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarana prasarana kesehatan hewan, dan layanan optimalisasi reproduksi
B10 B11 B12 B13	Kawasan Sentra Garam Rakyat • B10: Kab. Bima • B11: Kab. Lombok Timur • B12: Kab. Sumbawa • B13: Kab. Lombok Barat	Pengembangan Kawasan sentra garam, melalui: • Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan *output*: korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam industri ke industri, fasilitasi pendampingan pelaku usaha komoditas yang siap edar, peningkatan kualitas garam yang memenuhi standar garam industri, bantuan sarana pengembangan usaha petambak garam (korporasi), dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik • Penguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan *output*: lahan garam yang difasilitasi dan sarana niaga garam rakyat yang diserahkan ke masyarakat/Pemda • Peningkatan produktivitas garam rakyat, dengan *output*: pengadaan sarana dan prasarana produksi garam, pengembangan korporasi petambak garam
B14 B15 B16 B17 B18	Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut • B14: Kab. Sumbawa • B15: Kab. Lombok Timur • B16: Kab. Bima • B17: Kab. Lombok Tengah • B18: Kab. Lombok Barat	Pengembangan sentra budidaya dan hilirisasi rumput laut, melalui: • Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut, dengan *output*: peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan • Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia, dengan *output*: fasilitasi investasi hilirisasi industri, penguatan kapasitas pembudidaya rumput laut, pengembangan pangan dan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, dan kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut. • Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktivitas budidaya rumput laut, dengan *output*: bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut – *'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas'*, dll • Pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut, dengan *output*: pengembangan hilirisasi industri pengolahan hasil laut dan perikanan • Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan budidaya rumput spesies baru dan inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak)
B19 B20 B21 B22 B23	Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang • B19: Kabupaten Sumbawa • B20: Kabupaten Bima • B21: Kabupaten Lombok Timur • B22: Kabupaten Sumbawa Barat • B23: Kabupaten Lombok Utara	Pengembangan sentra akuakultur khususnya udang, melalui: • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat di Kabupaten Sumbawa, dengan *output*: benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasil KP, sarana penyimpanan produk KP, dan sarana distribusi logistik produk KP • Pengembangan akuakultur komoditas udang, dengan *output*: *breeding* program induk unggul, penataan jaringan irigasi dan revitalisasi lahan tambak udang dengan prioritas tambak tradisional plus, pengerukan muara sungai yang mengalami sedimentasi, penyederhanaan perizinan lintas sektor, dan peningkatan mutu produk serta perluasan pasar ekspor
B24 B25 B26	Pengembangan Kawasan Sentra Berbasis Perikanan Tangkap • B24: Kab. Lombok Timur • B25: Kab. Sumbawa • B26: Kab. Dompu	Penyiapan kawasan prioritas pengembangan kelautan dan perikanan pada sentra berbasis perikanan tangkap, melalui: • Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana produksi perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan, dengan *output*: identifikasi potensi sosial budaya dan kelembagaan setiap lokasi untuk pengembangan sesuai karakter lokal; mendorong *ownership* nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk; (fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok nelayan; penguatan pendanaan; dan integrasi program K/L terkait (a.l: Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian ESDM) sebagai percontohan dan potensi replikasi; kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya; alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan • Pembangunan industri pengolahan ikan, dengan *output*: Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI), sarana pengolahan hasil KP, sarana penyimpanan produk KP, sarana distribusi logistik produk KP
C1 C2 C3 C4	Pengembangan Pangan Lokal • C1: Kab. Sumbawa • C2: Kab. Lombok Timur • C3: Kab. Dompu • C4: Kab. Bima	Penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan pangan lokal Sumbawa berbasis pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, melalui: • Penguatan pascapanen pangan lokal, dengan *output*: sarana pengolahan hasil tanaman pangan dan pascapanen tanaman pangan, sertifikat produk tanaman pangan • Sertifikasi dan peredaran benih nabati, dengan *output*: sertifikat benih padi dan jagung, area penyaluran benih padi dan jagung • Pengembangan pangan lokal dan nabati, dengan *output*: optimasi/pengembangan lahan pertanian produktif, pembangunan jalan pertanian, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi pertanian, pengembangan kawasan padi dan jagung, peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH) • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat, dengan *output*: benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasil KP, sarana penyimpanan produk KP, sarana distribusi logistik produk KP • Pengembangan pangan hewani, dengan *output*: benih dan bibit ternak unggul, ternak ruminansia potong, sarana dan prasarana perbibitan ternak, sarana pasca panen/pengolahan/pemasaran hasil peternakan, layanan kesehatan hewan • Penguatan pengolahan dan pemasaran produk ternak, dengan *output*: sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, unit usaha yang dibina sertifikasi NKV • Pembangunan industri pakan ternak (bahan baku jagung dan sorgum), dengan *output*: jumlah produsen (individu) pakan/bahan pakan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan, penjaminan mutu dan keamanan pakan, jumlah saran pakan/bahan pakan • Pengembangan koperasi sektor produksi, dengan *output*: Peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, dan pengembangan usaha koperasi
D1	Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata Sembalun • D1: Kabupaten Lombok Timur	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas berbasis Pariwisata Sembalun, melalui: • Peningkatan produktivitas perdesaan, dengan *output*: fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan, pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan, fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata • Pengembangan fasilitas pendukung perdesaan, dengan *output*: sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi) • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi) • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya) • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa
D2	Kawasan Transmigrasi Selaparang • D2: Kabupaten Lombok Timur	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaparang di Kab. Lombok Timur, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran • Perluasan Jaringan Telekomunikasi Dan Akses Internet Cepat • Pengembangan SDM TIK Dan Digitalisasi Masyarakat • Perluasan Layanan Penyiaran Digital
E1 E2	Kawasan Konservasi • E1: Kawasan Konservasi Nasional Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara • E2: Kawasan Konservasi Daerah Gili Balu, Kabupaten Sumbawa Barat	Pengembangan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKPWP3K) di KKN Gili Matra, melalui: • Pengelolaan KKPWP3K, dengan *output*: peningkatan sarana pengelolaan kawasan dan monitoring ekosistem, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan kawasan, pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan, dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
E3	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi • E3: Kota Mataram	Pengelolaan Risiko Bencana Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kota Mataram, melalui: • Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi dan resiliensi masyarakat terhadap bencana, dengan *output*: Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi, Peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan *intensitymeter* dan *accelerograph* melalui *Indonesia Disaster Resillience Initiatives Project* (IDRIP), Peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui IDRIP, Layanan Informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Timur • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengembangan kawasan pariwisata, melalui: • Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan transportasi, dengan *output*: jalan koridor logistik, jembatan koridor logistik, pembangunan jembatan koridor logistik (*backbone*) dan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi tenaga listrik dan listrik pedesaan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan *output*: lokasi yang memperoleh sinyal telekomunikasi bergerak seluler (*Base Transceiver Station/Lastmile* 4G) di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dengan *output*: *Fasilitator/Enabler* Digital PMSE yang dibina, pelaksanaan pemantauan/monitoring, bimtek pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE dan masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital • Perluasan layanan penyiaran digital, dengan *output*: transmisi yang terbangun, pengadaan infrastruktur teknologi informatika dan media baru dan *downtime* siaran (tidak lebih dari 7 jam per bulan) yang terjadi
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Peningkatan Pengelolaan Ekosistem, Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir, melalui: • Peningkatan ketahanan pesisir dan laut, dengan *output*: pengamanan pesisir 3 (Tiga) Gili di Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kota Mataram, Kab. Dompu, Kab. Bima • Pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil/terluar, dengan *output*: bantuan ekonomi produktif dan prasarana/infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar • Pengembangan kawasan pesisir tangguh dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dengan *output*: sarana pendukung penyelenggaraan penataan ruang laut, rekomendasi kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), rekomendasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembangunan sistem monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut • Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, dengan *output*: kawasan konservasi perairan yang operasional (kumulatif), *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA, kerja sama, jejaring dan kemitraan konservasi ekosistem, sarana pendukung penyelenggaraan konservasi ekosistem dan biota perairan
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengelolaan risiko bencana banjir dan bencana alam lainnya di daerah berisiko tinggi serta pengelolaan tampungan air serbaguna, melalui: • peningkatan infrastruktur berketahanan bencana, dengan *output*: pembangunan pengendalian banjir, *Urban Flood Control System*

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		Improvement in Selected Cities, National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), operasi modifikasi cuaca untuk aksi dini bencana banjir/longsor • Penuntasan tindak lanjut pemanfaatan irigasi dan air baku dari Bendungan Bintang Bano dan Beringin Sila
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses dan bidang pendidikan serta penguatan sumber daya manusia sesuai kebutuhan DUDI bidang pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui: • Pengembangan sarana prasarana, perluasan akses pendidikan menengah/tinggi/vokasi sektor strategis, pengembangan bidang STEAM, dengan *output*: Rehabilitasi/renovasi, pembangunan/revitalisasi sarana dan prasarana, serta pembangunan gedung sekolah menengah/tinggi/vokasi • Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dengan *output*: layanan kerja sama nasional dan internasional, sertifikasi profesi dan SDM, pelatihan/sertifikasi/kompetensi vokasi bidang pertanian/perikanan/pariwisata/industri, pelatihan vokasi industri *Upskilling* dan *Reskilling*, kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja, satuan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, pengembangan kerja sama pelatihan • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jejang pendidikan
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit, melalui : • Penguatan intervensi spesifik *stunting*, dengan *output*: Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *Buffer Stock*, Tenaga Kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, Pendampingan kesehatan ibu hamil dan balita bermasalah gizi, Pelatihan pencegahan *stunting*, Penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi (*weight faltering, underweight*, gizi kurang), Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan keluarga yang mendapat bantuan sosial • Peningkatan upaya pencegahan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS, malaria, dan kusta, dengan *output*: obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian penyakit, masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian • Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didukung dengan penjaminan kesejahteraan • Peningkatan gizi, dengan *output*: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum *stunting* terjadi serta pemberian tata laksananya, implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin)
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola pelayanan kesehatan melalui: • Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan *output*: pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan bergerak, penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin, peningkatan RSUD tipe D menjadi C, dan penduduk penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN) • Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, termasuk untuk menekan angka kematian ibu dan anak, dengan *output*: pelatihan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak), peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA, fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA, pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA, fasilitasi dan pembinaan lembaga, dan alat kesehatan layanan kanker terpadu • Peningkatan produksi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dengan *output*: rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama, sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspesialis, dan bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengembangan dan peningkatan pelabuhan/bandara serta sarana dan prasarana transportasi laut/udara dan penyebrangan untuk penumpang dan logistik untuk mendukung kawasan strategis, melalui: • Pembangunan dan penguatan pelabuhan serta infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output*: pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kilo (MYC 2025-2026), Pelabuhan Calabai dan Sape serta pelabuhan lainnya • Penyediaan PSO dan layanan nonkomersil serta muatan barang angkutan laut tetap dan teratur, dengan *output*: layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, layanan angkutan tol laut prioritas nasional, layanan angkutan ternak prioritas nasional, layanan angkutan rede prioritas nasional, layanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru prioritas nasional
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penyediaan air minum, perumahan dan kawasan permukiman serta peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, melalui: • Penanganan permukiman kumuh terpadu, dengan *output*: pemugaran permukiman kumuh, peremajaan permukiman kumuh, pemukiman kembali permukiman kumuh, bantuan PSU bidang perumahan • Pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan, dengan *output*: pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan, fasilitasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan • Pengembangan dan pengelolaan SPAM, dengan *output*: pembangunan SPAM Kabupaten/Kota, pembangunan SPAM regional, peningkatan SPAM Kabupaten/Kota, peningkatan SPAM regional, perluasan SPAM Kabupaten/Kota • Pengawasan kualitas air minum, dengan *output*: infrastruktur air minum berbasis masyarakat, tenaga terlatih pengawasan kualitas air minum, daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman • Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk berkelanjutan, dan berketahanan iklim masyarakat, dengan *output*: sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman, dan berbasis masyarakat, serta sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota • Penerapan ekonomi sirkular secara partisipatif, dengan *output*: fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis 3R, pemanfaatan teknologi *recycling* plastik daur ulang, pembangunan dan pembinaan bank sampah induk dan masyarakat pengelola sampah
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Peningkatan infrastruktur energi listrik serta penguatan implementasi energi listrik dan transisi energi listrik, melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan ekosistem pendukung energi bersih, dengan *output*: percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon, monitoring tingkat komponen dalam negeri bidang aneka energi baru dan terbarukan • Pembangunan jaringan transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, dengan *output*: pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, pengawasan dan pengendalian efisiensi penyediaan tenaga listrik • Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik, infrastruktur jaringan transmisi, dan infrastruktur distribusi tenaga listrik, dengan *output*: pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat • Perluasan layanan penyiaran digital • Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat, melalui: • Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan *output*: bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat, TKM pemula tematik, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan • Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dengan *output*: pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, mustahiq yang diselaraskan datanya, dan aparatur yang mengikuti pengembangan perencanaan dan standar pelayanan minimal (SPM) • Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan *output*: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, tenaga kerja mandiri (TKM) pemula, pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan, dan bantuan alat dan mesin pertanian prapanen • Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output*: penerima bantuan iuran PBI JKN, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, mahasiswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, dan bantuan logistik korban bencana alam

3.3 Provinsi Nusa Tenggara Timur

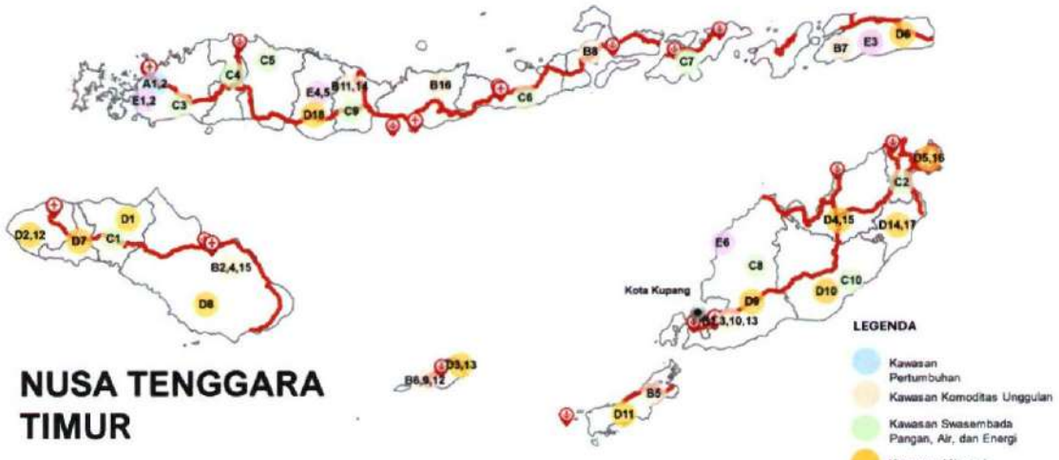

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata

1. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo – Kab. Manggarai Barat, dengan rencana perluasan menjadi DPP Labuan Bajo – Flores
   - Kab. Manggarai
   - Kab. Ngada
   - Kab. Ende

Kawasan Perkotaan

2. Kawasan Perkotaan Pariwisata Labuan Bajo – Kab. Manggarai Barat

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Industri Berbasis Komoditas Rumput Laut

1. Kab. Kupang dan Kota Kupang
2. Kab. Sumba Timur

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut

3. Kab. Kupang
4. Kab. Sumba Timur
5. Kab. Rote Ndao
6. Kab. Sabu Raijua
7. Kab. Alor
8. Kab. Flores Timur

Sentra Industri Berbasis Komoditas Garam

9. Kab. Sabu Raijua
10. Kab. Kupang
11. Kab. Nagekeo

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Garam

12. Kab. Sabu Raijua
13. Kab. Kupang
14. Kab. Nagekeo
15. Kab. Sumba Timur
16. Kab. Ende

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

1. Kab. Sumba Tengah: KSPP
2. Kab. Belu: KSPP, potensial air
3. Kab. Manggarai Barat: potensial pangan
4. Kab. Manggarai: potensial pangan, potensial energ
5. Kab. Manggarai Timur: potensial pangan
6. Kab. Sikka: potensial pangan
7. Kab. Lembata: potensial pangan
8. Kab. Kupang: potensial air, potensial energi
9. Kab. Nagekeo: potensial air
10. Kab. Timor Tengah Selatan: potensial pangan

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*
1. Kab. Sumba Tengah
2. Kab. Sumba Barat Daya
3. Kab. Sabu Raijua

*) *Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal*

Kawasan Perbatasan
PKSN dan Wilayah Pendukung
4. PKSN Kefamenanu, Kec. Biboki Moenleu, Naibenu, Mutis, Musi – Kab. Timor Tengah Utara
5. PKSN Atambua, Kec. Lasiolat, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi – Kab. Belu
6. PKSN Kalabahi, Kec. Pantai Timur – Kab. Alor

Kecamatan Perbatasan Prioritas
7. Kec. Lamboya, Lamboya Barat – Kab. Sumba Barat
8. Kec. Ngadu Ngala, Karera, Pinu Pahar, Tabundung, Katala Hamu Lingu – Kab. Sumba Timur
9. Kec. Amfoang Timur, Kupang Barat, Nekamese, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi Timur – Kab. Kupang
10. Kec. Nunkolo, Kot Olin, Kualin – Kab. Timor Tengah Selatan
11. Kec. Landu Leko, Rote Timur, Pantai Baru, Rote Selatan, Lobalain, Rote Barat Daya, Rote Barat, Ndao Nuse – Kab. Rote Ndao
12. Kec. Kodi Balaghar – Kab. Sumba Barat Daya
13. Kec. Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara, Raijua – Kab. Sabu Raijua
14. Kec. Kobalima Timur – Kab. Malaka

Kawasan Transmigrasi
15. KT Ponu – Kab. Timor Tengah Utara
16. KT Tasifeto-Mandeu – Kab. Belu
17. KT Kobalima Timur – Kab. Malaka

Kawasan Perdesaan Prioritas
18. Kawasan Perdesaan Agrowisata Kopi Flores Bajawa – Kab. Ngada

E. Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi
1. Taman Nasional Komodo – Kab. Manggarai Barat
2. Cagar Alam Wae Wuul – Kab. Manggarai Barat
3. Kawasan Konservasi Daerah Selat Pantar dan Laut Sekitarnya - Kab. Alor
4. Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau – Kab. Ngada
5. Cagar Alam Riung – Kab. Ngada
6. Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya (10 Kab. di Prov NTT)

Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,7 (Rata-rata 2025–2029)	25,7	0,6	15,32 – 15,82	0,319 – 0,324	0,48	61,82	80,02	2,49 – 2,99
2029	6,6 (2029)	35,1	0,6	10,21 – 11,21	0,314 – 0,319	0,51	77,71	80,69	2,10 – 2,79

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Pertumbuhan: • A1: Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat) dengan rencana perluasan menjadi DPP Labuan Bajo–Flores (Kab.	Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Labuan Bajo) dan perluasannya di Pulau Flores melalui: • Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan jalan akses simpul transportasi, jalan strategis termasuk Jalan Lintas Utara (Labuan Bajo–Terang–Kedindi) dan jalan daerah, serta pelabuhan kapal pesiar (*cruise)* • Pengembangan atraksi, dengan *output*: dukungan pelaksanaan *event* daerah, nasional, dan internasional

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Manggarai*, Kab. Ngada*, Kab. Ende*) Keterangan: *) Indikasi *key tourism area (KTA)* perluasan	• Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: SPAL, SPAM, pengolahan sampah berbasis 3R, infrastruktur kelistrikan, dan revitalisasi pasar rakyat • Pengembangan keterampilan SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan *output*: pembinaan, pelatihan, dan pembekalan kerja SDM pariwisata, serta manajemen kunjungan wisata • Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan *output*: promosi investasi dan promosi destinasi terpadu • Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta peningkatan akses pembiayaan modal • Peningkatan pelestarian adat dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa, perlindungan jalur jelajah satwa Komodo, penyediaan jalur evakuasi bencana, pembangunan rambu suar dan sarana bantu navigasi pelayaran, serta pengadaan ambulans laut
A2	Kawasan Pertumbuhan: • A2: Kawasan Perkotaan Pariwisata Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat)	Pengembangan Kawasan Perkotaan Pariwisata Labuan Bajo melalui: • Penataan kawasan dan peningkatan citra kota dengan *output*: penguatan *branding* kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota • Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan jalan strategis, SPAM, SPAL, infrastruktur listrik dan TIK, PSU bidang perumahan, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya • Penguatan peran kawasan, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8	Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas Rumput Laut) Sentra Industri • B1: Kab. Kupang dan Kota Kupang • B2: Kab. Sumba Timur Sentra Produksi: • B3: Kab. Kupang • B4: Kab. Sumba Timur • B5: Kab. Rote Ndao • B6: Kab. Sabu Raijua • B7: Kab. Alor • B8: Kab. Flores Timur	Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui: • Penguatan sentra produksi rumput laut, dengan *output*: pengendalian hama terpadu dan revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi • Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk rumput laut, dengan *output*: pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak), penyediaan peralatan/mesin pendukung pengolahan, sertifikat mutu produk, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta perluasan ekspor dan promosi produk • Peningkatan ketersediaan bibit rumput laut unggul, dengan *output*: pengembangan unit produksi bibit berkualitas dan penyaluran bibit rumput laut • Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan *output*: pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (*smart fisheries village*), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan • Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: pengembangan pelabuhan pendukung industri rumput laut, pembangunan jalan termasuk jalan akses Pelabuhan Maritaing (Erana-Maritaing), dan infrastruktur TIK • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian *matching fund* (BOPTN

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		penelitian) terkait riset hilirisasi produk rumput laut, serta penerapan teknologi digital
B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16	Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas Garam) Sentra Industri • B9: Kab. Sabu Raijua • B10: Kab. Kupang • B11: Kab. Nagekeo Sentra Produksi • B12: Kab. Sabu Raijua • B13: Kab. Kupang • B14: Kab. Nagekeo • B15: Kab. Sumba Timur • B16: Kab. Ende	Penguatan sentra produksi serta penyiapan pengembangan sentra industri garam terintegrasi melalui: • Peningkatan produksi garam konsumsi dan garam industri, dengan *output*: optimalisasi lahan garam tambak, penyediaan peralatan/mesin pendukung produksi, serta intensifikasi dan ekstensifikasi lahan • Pengembangan industri dan tata niaga/pemasaran garam konsumsi dan garam industri, dengan *output*: penyediaan peralatan/mesin pendukung pengolahan, sertifikasi mutu produk, penyediaan sentra niaga garam rakyat, penyaluran distribusi garam industri ke industri, pemenuhan spesifikasi garam industri, serta perluasan ekspor dan promosi produk garam industri • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: promosi investasi, serta pembentukan/pengembangan koperasi dan BUMDes • Peningkatan sarana prasarana pendukung serta pengembangan inovasi teknologi, dengan *output*: pengembangan pelabuhan pendukung industri garam, pembangunan jalan strategis dan daerah, dan pengembangan inovasi teknologi
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan *output*: Jalan Trans Flores, Trans Timor, dan Trans Sumba, penanganan jalan daerah dan jalan 3TP, dan jalan akses simpul transportasi • Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan *output*: Pelabuhan Kupang, Nun Baun Sabu, Wae Kelambu, Raijua, Lewoleba, Salura, Marapokot, Seba, Ndao, Baranusa, dan Wini, serta jaringan pelayaran dan sarana kapal RoRo • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: Bandara El Tari, Bandara Komodo, dan Bandara Lede Kalumbang • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta perluasan layanan penyiaran digital
	• Kota Kupang (perikanan) • Kab. Sumba Timur (perikanan) • Kab. Manggarai Barat (pariwisata dan ekonomi kreatif)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, Politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif) sesuai kebutuhan DUDI melalui: • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan *output*: jalan menuju fasilitas pendidikan, perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta SMK yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM Dikti dan tenaga

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		kependidikan vokasi, serta tenaga kependidikan yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan, serta satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja
C1 C2	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C1: KSPP Sumba Tengah (Kab. Sumba Tengah) • C2: KSPP Belu (Kab. Belu)	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Belu dan KSPP Sumba Tengah melalui: • Penyiapan pengembangan kawasan, dengan *output*: optimasi lahan menjadi produktif, pembangunan embung pertanian dan non pertanian, penyediaan jaringan drainase dan irigasi, konektivitas transportasi desa, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju KSPP termasuk jalan akses KSPP Sumba Tengah (Mamboro–Tana Ringu) • Peningkatan produksi, dengan *output*: penyaluran benih padi dan jagung berkualitas, areal pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pangan, dan unit pengolah pupuk organik (UPPO) • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana produksi, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, serta penyediaan alat dan mesin pertanian • Penguatan pascapanen dan tata kelola, dengan *output*: penyediaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kelembagaan ekonomi petani, pengembangan usaha koperasi, dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk *digital farming*
C3 C4 C5 C6 C7 C10	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C3: Kab. Manggarai Barat* (padi, pangan akuatik) • C4: Kab. Manggarai* (padi, sapi) • C5: Kab. Manggarai Timur* (padi, pangan akuatik) • C6: Kab. Sikka* (pangan akuatik) • C7: Kab. Lembata* (babi) • C10: Kab. Timor Tengah Selatan* (jagung dan sapi) Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Alor** (padi, jagung, pangan akuatik) • Kab. Sabu Raijua** (padi, jagung, sorgum, kambing)	Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis pertanian tanaman pangan (padi, jagung, sorgum), pangan akuatik/*bluefood* berbasis perikanan tangkap laut, dan pangan hewani (sapi dan babi) melalui: • Penguatan produksi, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, areal pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyaluran benih tanaman pangan dan bibit ternak unggul, bantuan hijauan pakan ternak, layanan kesehatan dan vaksin hewan, serta pengembangan olahan hasil komoditas pangan dan produk turunannya • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian, jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, pengadaan gudang lumbung pangan, serta penyediaan sarana pra, pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan • Penguatan kapasitas SDM (petani, kelompok tani, nelayan, dan kelompok nelayan), dengan *output*: penguatan dan pelatihan kelompok tani yang terlatih GAP (*Good Agriculture Practices*), GHP (*Good Handling Practices*), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), serta penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong *ownership* petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan koperasi, IKM/UMKM dan BUMDes, serta peningkatan sistem logistik pangan lokal

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Keterangan: • *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi • **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan *output:* pengembangan kawasan padi, jagung, dan sorgum, penyaluran benih tanaman pangan dan bibit ternak unggul, bantuan hijauan pakan ternak, layanan kesehatan dan vaksin hewan, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan
C4 C8	Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C4: Kab. Manggarai* • C8: Kab. Kupang* Kawasan Rentan Energi: • Kab. Manggarai Timur** • Kab. Sumba Barat Daya** • Kab. Timor Tengah Selatan** Keterangan: • *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi • **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui: • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel yang pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output:* pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), dan pembangkit listrik tenaga air (PLTM), serta pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output:* pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
C2 C8 C9	Kawasan Potensial Swasembada Air: • C2: Kab. Belu* • C8: Kab. Kupang* • C9: Kab. Nagekeo* Kawasan Rawan Air: • Kab. Manggarai Timur** • Kab. Sumba Barat Daya**	Peningkatan ketahanan air pulau dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan melalui: • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan *output*: pembangunan Bendungan Mbay, Bendungan Manikin, Bendungan Welikis Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan *output:* pembangunan embung dan pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Keterangan: • *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi • **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air	
D1 D2 D3	Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal: • D1: Kab. Sumba Tengah (pariwisata, padi, dan jagung) • D2: Kab. Sumba Barat Daya (pariwisata dan jambu mete) • D3: Kab. Sabu Raijua (kambing)	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi berbasis pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, serta pariwisata, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), peningkatan akses pembiayaan modal, pendukungan *event* daerah serta pengembangan desa wisata, penyediaan benih ternak unggul, layanan kesehatan dan vaksin hewan, pengolahan dan pemasaran komoditas dan produk turunannya, peningkatan kemandirian dan daya saing masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan *output*: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul transportasi, serta pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara • Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan *output*: masyarakat di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana
D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung: • D4: PKSN Kefamenanu, serta Kec. Biboki Monleu, Naibenu, Mutis, dan Musi (Kab. Timor Tengah Utara) • D5: PKSN Atambua, serta Kec. Lasiolat, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat, dan	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui: • Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, dengan *output*: peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, penyediaan bibit unggul, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengolahan pasca panen komoditas, masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, peningkatan akses pembiayaan modal, penataan bangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Oepoli di Kab. Kupang, layanan validasi dan verifikasi pupuk, jalan pertanian yang terbangun, serta pembangunan irigasi perpipaan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Nanaet Duabesi (Kab. Belu) • D6: PKSN Kalabahi, serta Kec. Pantai Timur (Kab. Alor) Kecamatan Perbatasan Prioritas: • D7: Kec. Lamboya dan Lamboya Barat (Kab. Sumba Barat) • D8: Kec. Ngadu Ngala, Karera, Pinu Pahar, Tabundung, Katala Hamu Lingu (Kab. Sumba Timur) • D9: Kec. Amfoang Timur, Kupang Barat, Nekamese, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi Timur (Kab. Kupang) • D10: Kec. Nunkolo, Kot Olin, Kualin (Kab. Timor Tengah Selatan) • D11: Kec. Landu Leko, Rote Timur, Pantai Baru, Rote Selatan, Lobalain, Rote Barat Daya, Rote Barat, Ndao Nuse (Kab. Rote Ndao) • D12: Kec. Kodi Balaghar (Kab. Sumba Barat Daya) • D13: Kec. Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara, Raijua (Kab. Sabu Raijua) • D14: Kec. Kobalima Timur (Kab. Malaka)	• Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan *output*: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, fasilitasi kampung siaga bencana, dan pembinaan masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam di kawasan perbatasan • Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan *output*: *piloting* pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara
D15 D16 D17	Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi: • D15: KT. Ponu (Kab. Timor Tengah Utara) • D16: KT Tasifeto–Mandeu (Kab. Belu) • D17: KT Kobalima Timur (Kab. Malaka)	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu, Tasifeto - Mandeu, dan Kobalima Timur melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), optimasi kawasan pertanian padi, jagung, dan kelapa, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, serta pengendalian Organisme

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan dan penyakit ternak, penyediaan bibit unggul pertanian dan peternakan sapi • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran • Penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil, dengan *output*: tenaga pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya, penyediaan instruktur yang berkinerja tinggi di kawasan transmigrasi
D18	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas • D18. Kawasan Perdesaan Agrowisata Kopi Flores Bajawa (Kab. Ngada)	Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata berbasis komoditas Kopi Flores Bajawa melalui: • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R • Peningkatan aksesibilitas desa, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik, serta penyediaan moda transportasi desa • Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pengembangan dan penataan destinasi wisata lokal, serta pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam pengembangan agrowisata dan produk ekonomi kreatif berbasis komoditas kopi • Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan *output*: fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agrowisata
	• Kab. Sumba Barat (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Rote Ndao (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sabu Raijua (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Timor Tengah Selatan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Tengah (Daerah Tertinggal) • Kab. Sumba Barat Daya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Belu (PKSN Atambua dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Malaka (Kecamatan Perbatasan Prioritas)	Penyiapan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan dasar dan menengah melalui: • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan *output*: jalan menuju fasilitas pendidikan, rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, serta perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual • Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berkualitas, dengan *output*: model kurikulum yang adaptif dan kontekstual; pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik berkualitas, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian program Indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik), serta fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja • Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Manggarai Timur	
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
	• Kab. Sumba Barat (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Rote Ndao (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sabu Raijua (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Timor Tengah Selatan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Tengah (Daerah Tertinggal) • Kab. Sumba Barat Daya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Kupang (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Manggarai Timur • Kab. Alor (PKSN Atambua dan Kecamatan Perbatasan Prioritas)	Pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas dan layanan kesehatan melalui: • Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan, dengan *output*: pembangunan jalan, serta penyediaan moda transportasi layanan kesehatan bergerak • Peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit; serta penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, dengan *output*: pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembinaan dan pendampingan layanan kesehatan bergerak, serta implementasi layanan *telemedicine* • Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didukung dengan penjaminan kesejahteraan
	Penanganan penyakit TBC: • Kab. Malaka • Kab. Sumba Barat	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Sumba Timur • Kab. Sabu Raijua Penanganan penyakit Malaria: • 12 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Penanganan penyakit ISPA: • Kab. Belu • Kab. Lembata • Kab. Sikka • Kab. Flores Timur Penanganan penyakit Rabies: • Kab. Timor Tengah Selatan • Kab. Sikka • Kab. Ende Penanganan penyakit Kusta: Provinsi Nusa Tenggara Timur	TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian ISPA terlatih, optimalisasi data dan informasi ISPA, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit rabies, dengan *output*: penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan obat hewan
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya melalui: • Peningkatan gizi, dengan *output*: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum *stunting* terjadi serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari *buffer stock*, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan *output*: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan *output*: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Pemberantasan *IUU Fishing*: • WPP 573 (perbatasan perairan dengan Timor Leste dan Australia)	Penguatan pertahanan keamanan dengan mewujudkan kedaulatan di laut terutama dalam pemberantasan IUU Fishing pada perbatasan perairan dan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) melalui: • Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan *output*: operasi kapal dan *speed boat* pengawas serta patroli mandiri • Penyiapan kolaborasi dan kerja sama antar pihak dengan negara-negara tetangga seperti Timor Leste dan Australia • Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan *output*: lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta iuu *(illegal, unreported, unregulated) fishing.* • Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan *output*: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
E1 E2 E3 E4 E5 E6	Kawasan Konservasi: • E1: TN Komodo (Kab. Manggarai Barat) • E2: CA Wae Wuul (Kab. Manggarai Barat) • E3: KKD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya (Kab. Alor) • E4: TWAL Tujuh Belas Pulau (Kab. Ngada) • E5: CA Riung (Kab. Ngada) • E6: TNP Laut Sawu dan Sekitarnya (10 Kab. di Prov. NTT)	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi • Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan *output*: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan *output*: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) • Peningkatan sarana prasarana pendukung
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim melalui: • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, serta penerapan *nature-based solutions*, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan

4. Wilayah Kalimantan

4.1 Provinsi Kalimantan Barat

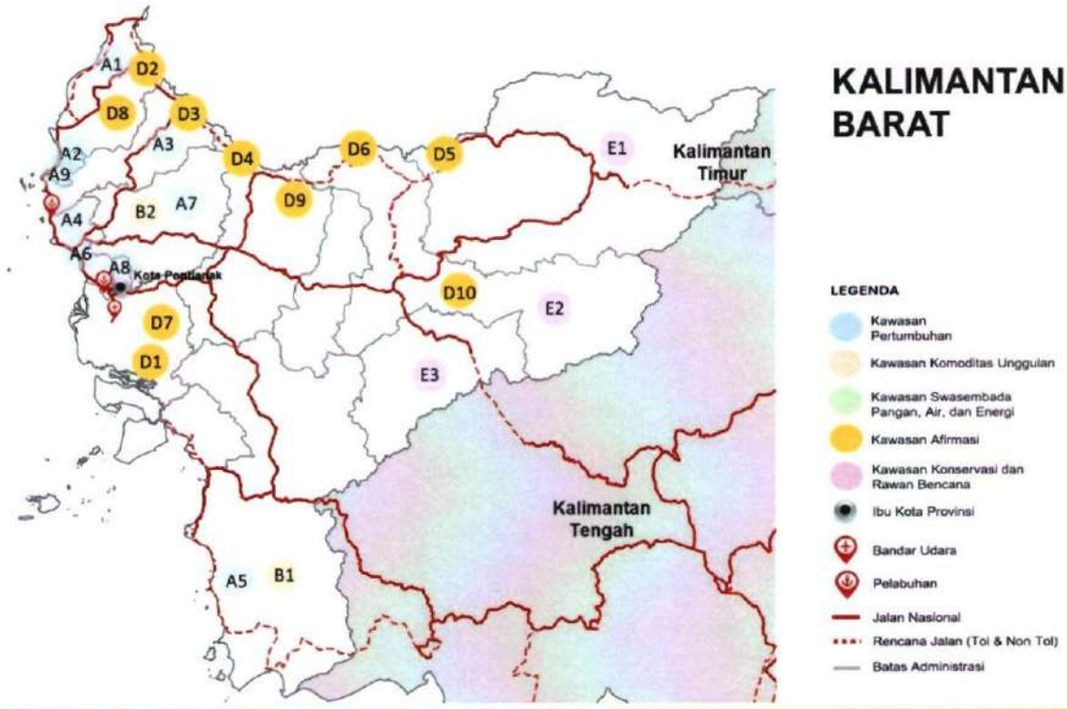

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata Sambas-Singkawang
1. Kabupaten Sambas
2. Kabupaten Singkawang
3. Kabupaten Bengkayang

Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Mempawah (Kijing)
4. Kabupaten Mempawah

Kawasan Industri Ketapang
5. Kabupaten Ketapang

Kawasan Pengembangan Pelabuhan Kijing
6. Kabupaten Mempawah
7. Kabupaten Landak
8. Kota Pontianak
9. Kota Singkawang

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Sentra Kelapa Sawit
1. Kabupaten Ketapang
2. Kabupaten Sanggau

E. Kawasan Konservasi

Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan *(Heart of Borneo)*
1. Kabupaten Kapuas Hulu
2. Kabupaten Sintang
3. Kabupaten Melawi

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)
1. KPP Agropolitan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya

Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas
2. PKSN Paloh Aruk, Kabupaten Sambas
3. PKSN Jagoi Babang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Bengkayang
4. PKSN Entikong, Kabupaten Sanggau
5. PKSN Nangabadau dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Kapuas Hulu
6. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Sintang

Kawasan Transmigrasi (KT)
7. KT Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya
8. KT Gerbang Mas Perkasa, Kabupaten Sambas
9. KT Sekayam-Entikong, Kabupaten Sanggau
10. KT Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,9 (Rata-rata 2025-2029)	55,5	1,3	5,65 – 6,15	0,315 – 0,321	0,51	67,73	77,51	4,73 – 4,86
2029	7,9 (2029)	81,2	1,4	3,45 – 4,45	0,271 – 0,275	0,54	85,43	78,07	3,46 – 4,52

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2 A3	Kawasan Pariwisata Sambas–Singkawang: • A1: Kabupaten Sambas • A2: Kabupaten Singkawang • A3: Kabupaten Bengkayang	Pengembangan Kawasan Pariwisata Sambas-Singkawang, melalui: • Pembangunan prasarana pengaman pantai • Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik dan persampahan pada perumahan tapak
A4	Kawasan Perkotaan Kecil: • A4: Kabupaten Mempawah	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil, melalui: • Penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk kawasan perkotaan dan kota kecil • Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun • Penataan kawasan perkotaan dengan fokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau serta pemenuhan layanan dasar air minum • Peningkatan kualitas lingkungan melalui pemenuhan layanan persampahan, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi Z
A5	Kawasan Industri Ketapang: • A5: Kabupaten Ketapang	Hilirisasi dan penguatan produktivitas pusat-pusat industri berbasis mineral, sumber daya hayati, dan industri padat karya, melalui: • Tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri nikel, tembaga dan bauksit. • Pengembangan industri hilir nikel, tembaga dan bauksit, dengan *output*: industri smelter/pemurnian/pengolahan logam dasar beserta turunannya yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya, kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan bauksit, standar dalam rangka mendukung ekspor. • Peningkatan penerapan standarisasi di industri nikel, tembaga dan bauksit, dengan *output*: standar dalam rangka mendukung ekspor dan

		fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi industri smelter logam bukan besi dan turunannya • Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kerja di industri nikel, tembaga dan bauksit, dengan *output*: mahasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV reguler • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, TPT dan alas kaki), dengan *output*: rancangan SKKNI sektor industri. • Jaminan ketersediaan bahan baku industri sawit dan kelapa yang berkualitas, dengan *output*: peningkatan produktivitas sektor hulu dengan *output* kriteria standar CPI untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit • Pengembangan industri hilir sawit dan kelapa dengan *output*: fasilitasi investasi industri kelapa sawit dan pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri hasil hutan dan perkebunan. • Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang, dengan *output*: pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang, pengembangan Bandar Udara Pangsuma, pembangunan jalan akses Bandara Singkawang • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat • Perluasan layanan penyiaran digital
A6 A7 A8 A9	Kawasan Pengembangan Pelabuhan Kijing: • A6: Kabupaten Mempawah • A7: Kabupaten Landak • A8: Kota Pontianak • A9: Kota Singkawang	Pengembangan infrastruktur dan kawasan perkotaan di sekitar Pelabuhan Kijing melalui: • Pengembangan bandara, dengan *output*: pendampingan KPBU Lokasi Bandara Singkawang dan pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu • Pembangunan jalan nasional, dengan *output*: pembangunan jalan akses Pelabuhan Kijing • Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, dengan *output*: Jalan Kawasan Prioritas Nangatayap–Sungai Kelik–Siduk dan jalan strategis Dermaga Ferry–Teraju • Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik dan persampahan pada perumahan tapak, dengan *output*: bantuan PSU bidang Perumahan • Fasilitasi pembangunan rumah baru, dengan *output*: penyediaan rumah khusus reguler • Fasilitasi peningkatan kualitas rumah, dengan *output*: bantuan pembangunan rumah swadaya
B1 B2	Kawasan Sentra Kelapa Sawit • B1: Kabupaten Ketapang • B2: Kabupaten Sanggau	Pengembangan Kawasan Sentra Kelapa Sawit, melalui: • Peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit dan kualitas bahan baku, dengan *output*: kriteria standar CPO untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit • *Sustainability* dan *Traceability*, dengan *output*: fasilitasi peningkatan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit melalui pembentukan Lembaga sertifikasi (LS) ISPO Hilir dan penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit. • Pengembangan industri *biofuel*, dengan *output*: pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (*Hydrogenated Vegetable Oil/ Sustainable Aviation Fuel*) berbahan baku *technical oil* • Pengembangan industri oleokimia dan *biofuel* berbasis minyak kelapa sawit disertai *rebranding* dan promosi produk sawit berkelanjutan

		• Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Sawit, dengan *output*: *Pilot Plant Fraksionasi Multipurpose* TKKS • *Rebranding* produk sawit berkelanjutan, dengan *output:* promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri
D1	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) • D1: KPP Agropolitan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Agropolitan Rasau Jaya, melalui: • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum dan sanitasi) • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet dan telekomunikasi) • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya) • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa
D2 D3 D4 D5 D6	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP): • D2: PKSN Paloh Aruk, Kabupaten Sambas • D3: PKSN Jagoi Babang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Siding), Kabupaten Bengkayang • D4: PKSN Entikong, Kabupaten Sanggau • D5: PKSN Nangabadau dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Puring Kencana), Kabupaten Kapuas Hulu • D6: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Ketungau Hulu), Kabupaten Sintang	Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Entikong, PKSN Nangabadau dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: • Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan, dengan *output* di antaranya: Pembangunan Sarana Permukiman, Ketenagalistrikan dan Energi, Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, maupun Layanan Konektivitas, dan Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan *output* di antaranya: pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, pembangunan jalan akses perbatasan Tebas–Merbau, Nanga Era–Bts Kaltim, pembangunan terminal barang internasional Aruk, pembangunan terminal barang internasional Sei Kelik, pembangunan terminal barang internasional Jagoi Babang, penataan bangunan kawasan pos lintas batas negara (PLBN), pembangunan PLBN Sei Kelik beserta sarana dan prasarana pendukungnya, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, layanan validasi dan verifikasi pupuk, pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, dan pembangunan irigasi perpipaan pertanian. • Penataan ruang dan penanggulangan bencana di kawasan perbatasan, dengan *output*: dokumen harmonisasi RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara
D7 D8 D9 D10	Kawasan Transmigrasi (KT): • D7: KT Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya • D8: KT Gerbang Mas Perkasa, Kabupaten Sambas	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa di Kabupaten Sambas, Kawasan Transmigrasi Sekayam-Entikong di Kabupaten Sanggau, dan Kawasan Transmigrasi Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang, melalui : • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian

	• D9: KT Sekayam-Entikong, Kabupaten Sanggau • D10: KT Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang	• Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran
E1 E2 E3	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan *(Heart of Borneo)* • E1: Kabupaten Kapuas Hulu • E2: Kabupaten Sintang • E3: Kabupaten Melawi	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk *Heart of Borneo* disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui: • Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan *output*: penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat dan udara, kelompok masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta area penanganan dampak • Peningkatan kualitas ekosistem gambut dengan *output*: lahan gambut yang dipulihkan dan direstorasi • Rehabilitasi ekosistem mangrove dengan *output*: lahan rusak yang dipulihkan, pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove • Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi
	Provinsi Kalimantan Barat • Lokasi Prioritas Penduduk Termiskin (Kabupaten Melawi)	Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif dan pemenuhan infrastruktur dasar di daerah afirmasi melalui: • Pembangunan jaringan distribusi dan listrik perdesaan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik • Pelaksanaan bantuan keluarga, pendidikan dan kesehatan, dengan *output*: pemberian Kartu Indonesia Pintar, pemberian beasiswa afirmasi, dan pelaksanaan program Indonesia Pintar • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan, dengan *output*: pemberdayaan rumah tangga miskin melalui kampung Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf • Peningkatan kemandirian masyarakat • Peningkatan daya saing Masyarakat • Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU • Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir • Penyediaan dan pengawasan infrastruktur sanitasi aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim berbasis CWIS • Penyaluran bantuan sosial yang adaptif
	Provinsi Kalimantan Barat	Penguatan pendidikan dasar dan vokasi untuk menciptakan SDM unggul yang sesuai dengan potensi daerah untuk mendorong perekonomian lokal melalui: • Relevansi kurikulum dan kualitas pembelajaran PT Vokasi, dengan *output*: program studi vokasi yang menerapkan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja, dan Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan penguatan mutu berstandar industri • Penguatan pelatihan vokasi, dengan *output*: pelatihan vokasi di sektor strategis, sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan fasilitasi dan bantuan lembaga pelatihan • Revitalisasi sarana dan prasarana Sekolah dan Madrasah pada seluruh jenjang Pendidikan
	Provinsi Kalimantan Barat	Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, melalui: • Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan *output*: peningkatan kompetensi Rumah Sakit (RS) dalam layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU) dan layanan Kesehatan Ibu

	dan Anak; pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) untuk pelayanan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal di RS sesuai standar; pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk RS • Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan, dengan *output*: pemenuhan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar, peningkatan keterampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar, pengadaan alat kesehatan di posyandu sesuai standar, dan revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat di puskesmas pembantu • Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan *output*: penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes Primer
Provinsi Kalimantan Barat	Pencegahan dan penurunan *stunting* serta kematian ibu dan anak serta pengendalian dan penuntasan TBC, penyakit menular, dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: • Penguatan intervensi spesifik *stunting* dengan *output*: Ibu Hamil yang mendapat makanan tambahan dari *Buffer Stock*, balita uang mendapat makanan tambahan dan, daerah yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita • Peningkatan upaya pencegahan TBC dengan *output*: masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan *output*: penurunan kematian ibu dan anak, pencegahan dan penurunan *stunting*, pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta penyelenggaraan jaminan sosial • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan *output*: penuntasan TBC • Seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar • Penguatan deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak
Provinsi Kalimantan Barat	Hilirisasi Kelapa, melalui: • Peningkatan produksi dan penyebaran benih unggul, dengan *output*: produksi benih tanaman perkebunan • Peningkatan produktivitas kelapa (budidaya dan pengolahan), dengan *output*: penerapan GAP (*Good Agriculture Practices*) dan pertanian regeneratif • Perbaikan data perkelapaan (budidaya dan pengolahan), dengan *output*: neraca komoditas kelapa dan produk turunannya • Peningkatan diversifikasi produk dan daya saing produk, dengan *output*: pengembangan industri pengolahan kelapa produk hilir (MCT dan SAF) dan restrukturisasi mesin/peralatan • Peningkatan sentra IKM pengolahan kelapa, dengan *output*: pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro • Peningkatan investasi industri pengolahan kelapa, dengan *output*: peningkatan peluang investasi di sektor industri • Integrasi rantai pasok dalam negeri, dengan *output*: Forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sektor hulu-hilir industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar • Peningkatan riset dan inovasi kelapa, dengan *output*: pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi di industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar

Provinsi Kalimantan Barat	Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, melalui: • Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik termasuk persiapan pengembangan pembangkit berbasis nuklir dan hidro • Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk • Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan
Provinsi Kalimantan Barat	Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui: • Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam • Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi) • Penguatan pascapanen pangan nabati, dengan *output:* sarana pascapanen tanaman perkebunan

4.2 Provinsi Kalimantan Tengah

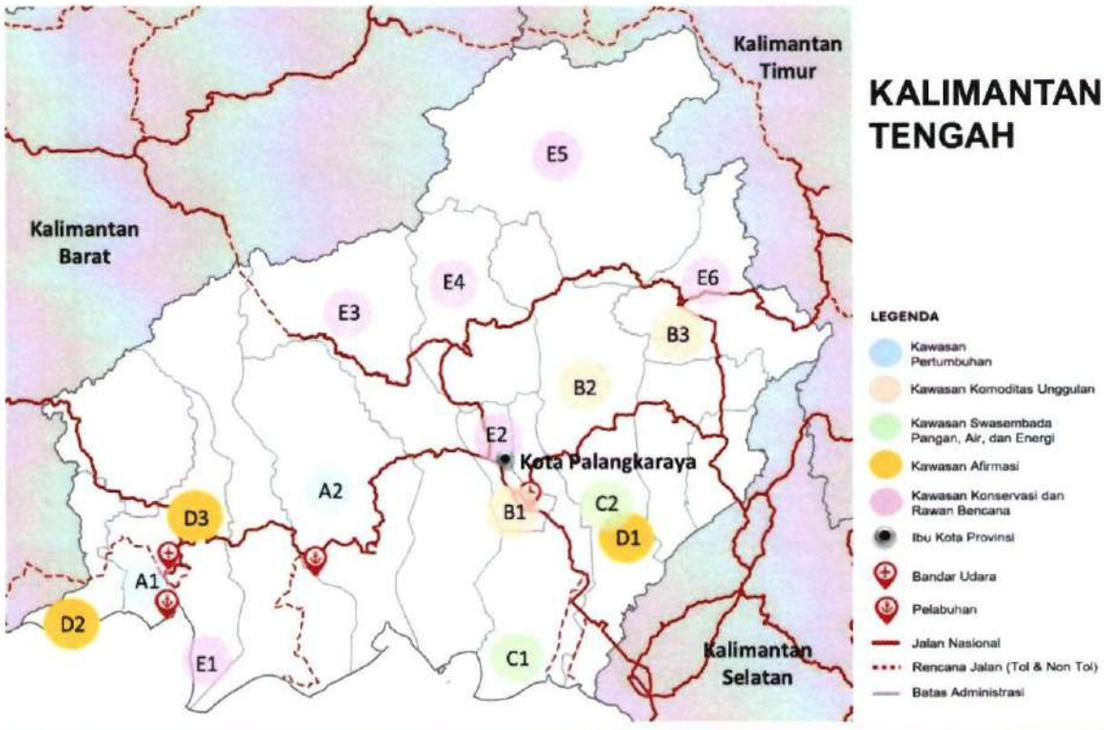

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Agro Industri Kalimantan Tengah
1. Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kabupaten Kotawaringin Timur

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah
1. Kota Palangkaraya
2. Kabupaten Kapuas
3. Kabupaten Barito Utara

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah
1. Kabupaten Pulang Pisau
2. Kabupaten Kapuas

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Transmigrasi (KT)
1. KT Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas
2. KT Jelai (Pulau Nibung), Kabupaten Sukamara
3. KT Arut Selatan dan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat

E. Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi Kalimantan Tengah
1. Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Taman Nasional Sebangau, Kota Palangkaraya

Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan *(Heart of Borneo)*
3. Kabupaten Katingan
4. Kabupaten Gunung Mas
5. Kabupaten Murung Raya
6. Kabupaten Barito Utara

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,4 (Rata-rata 2025-2029)	85,3	1,0	4,11 – 4,61	0,311 – 0,315	0,55	76,00	76,34	3,32 – 3,91
2029	7,3 (2029)	124,0	1,0	2,43 – 3,43	0,242 – 0,246	0,58	90,18	77,01	2,92 – 3,61

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2	Kawasan Agro Industri Kalimantan Tengah • A1: Kabupaten Kotawaringin Barat • A2: Kabupaten Kotawaringin Timur	Pengembangan pusat-pusat industri dan hilirisasi industri sumber daya hayati (sawit dan kelapa) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, melalui: • Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas bahan baku komoditas sawit dan kelapa, dengan *output:* penetapan kriteria standar *Crude Palm Oil* (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit dan peralatan fasilitas laboratorium/*workshop*/layanan industri hasil perkebunan; penyebaran benih unggul; peningkatan riset dan inovasi kelapa; peningkatan kualitas dan kuantitas produksi benih tanaman perkebunan; penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan pertanian regeneratif • Pengembangan industri oleokimia dan *biofuel* berbasis minyak sawit disertai *rebranding* dan promosi produk sawit berkelanjutan • Peningkatan diversifikasi dan daya saing produk, dengan *output*: pengembangan produk hilir dan restrukturisasi mesin/peralatan perkebunan industri pengolahan kelapa, fasilitasi sertifikasi produk, disertai bimbingan teknis pengembangan produk dan kemasan • Peningkatan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan kelapa dan investasi industri pengolahan kelapa, dengan *output*: pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro dan keberlanjutan investasi disertai restrukturisasi mesin/peralatan industri
B1 B2 B3	Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah • B1: Kota Palangkaraya • B2: Kabupaten Kapuas B3: Kabupaten Barito Utara	Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah khususnya untuk komoditas Gabus, Nila, dan Patin di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Utara, melalui: • Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap (PUD) • Penyediaan input produksi perikanan • Peningkatan kualitas, mutu dan daya saing hasil perikanan • Penguatan kapasitas dan perlindungan terhadap masyarakat, kelembagaan dan kewirausahaan perikanan
C1 C2	Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah: • C1: Kabupaten Pulang Pisau • C2: Kabupaten Kapuas	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang didukung Kawasan Transmigrasi Lamunti–Dadahup di Kabupaten Kapuas, melalui: • Pengembangan kawasan secara geospasial, dengan *output:* pembangunan dan pengembangan infrastruktur • Pengembangan kawasan secara *on farm*, dengan *output:* penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan kawasan secara *off farm*, dengan *output:* penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani
D1 D2 D3	Kawasan Transmigrasi (KT): • D1: Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas • D2: Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung) di Kabupaten Sukamara • D3: Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung) di Kabupaten Sukamara, serta Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output:* pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output:* pengadaan bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output:* fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: pengelolaan perpindahan dan penempatan transmigran
E1 E2	Kawasan Konservasi Kalimantan Tengah: • E1: Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat • E2: Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya	Pengembangan wisata berkelanjutan berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya dengan pelibatan mitra lokal, melalui: • Pengelolaan wisata alam secara berkelanjutan, dengan *output:* pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata alam, peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), dan fasilitasi usaha ekonomi produktif • Pelibatan peran masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, dengan *output:* pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kompetensi masyarakat pemanfaat kawasan konservasi
E3 E4 E5 E6	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo)* • E3: Kabupaten Katingan • E4: Kabupaten Gunung Mas • E5: Kabupaten Murung Raya • E6: Kabupaten Barito Utara	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan Tengah termasuk *Heart of Borneo* disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui: • Pengendalian kebakaran serta rehabilitasi hutan dan lahan, dengan *output:* penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta operasi modifikasi cuaca untuk aksi dini bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) • Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan *output:* pemulihan dan restorasi lahan gambut, pengelolaan data informasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dan peningkatan layanan penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut • Peningkatan kualitas ekosistem mangrove, dengan *output:* pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove, penguatan data dan informasi publik perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem (RPPE) Mangrove • Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan *output:* inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan • Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Kalimantan Tengah	Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral seperti bauksit dan tembaga sesuai potensi daerah, melalui: • Tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri, dengan *output:* rekomendasi keprospekan sumber daya mineral dan rekomendasi kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral • Pengembangan industri hilir/antara olahan sumber daya mineral, dengan *output:* riset dan inovasi hilirisasi sumber daya alam tidak terbarukan, kebijakan penguatan industri logam, monitoring dan evaluasi perkembangan industri smelter/pemurnian/pengolahan logam dasar beserta turunannya • Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular, dengan *output:* fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi industri smelter logam bukan besi dan turunannya dan peningkatan manajemen energi dan air serta pemanfaatan EBT *(Renewable Energy)* dalam rangka efisiensi sumberdaya industri
	Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui: • Penguatan konektivitas jalan, udara, darat, dan laut, dengan *output:* pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, pembangunan dan pengembangan bandara termasuk Bandara Murung Raya dan Bandara Kuala Kurun • Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output:* pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan jalan koridor logistik, dan pembangunan jembatan koridor logistik khususnya penuntasan *Missing Link* Jalan Lintas Tengah Kalteng-Kalbar -Tumbang Samba
	Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, melalui: • Revitalisasi prasarana pendidikan, dengan *output:* pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan • Pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan *output:* pelatihan vokasi industri *upskilling* dan *reskilling* di Provinsi Kalimantan Tengah disertai fasilitasi keikutsertaan diklat dan pendidikan kecakapan wirausaha • Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan *output:* peningkatan kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri • Penguatan pendidikan menengah vokasi, dengan *output:* pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi pusat keunggulan, pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan, pendampingan peningkatan mutu, dan pengembangan pengajaran berbasis pabrik *(teaching factory)*
	Provinsi Kalimantan Tengah	Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal, melalui: • Penyediaan air baku kawasan sulit air, bencana kekeringan, dan kawasan terpencil, dengan *output*: pembangunan tampungan air dan prasarana air baku • Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal, dengan *output:* pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rehabilitasi/peningkatan prasarana irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan konektivitas tenaga listrik disertai pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan digitalisasi, melalui: • Pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, dengan *output:* pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu • Pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan, dengan *output:* Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) • Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk • Perluasan jaringan telekomunikasi, akses internet cepat, dan layanan penyiaran digital disertai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan digitalisasi masyarakat
	Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, melalui: • Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan *output:* peningkatan kompetensi Rumah Sakit (RS) dalam layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU) dan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) untuk pelayanan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal di RS sesuai standar; dan pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk RS • Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan, dengan *output:* pemenuhan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar, peningkatan ketrampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar, pengadaan alat kesehatan di posyandu sesuai standar, dan revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat di puskesmas pembantu • Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan *output:* penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes Primer
	Provinsi Kalimantan Tengah	Pengembangan permukiman dan pemenuhan akses air minum, sanitasi aman, serta pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan inklusif, melalui: • Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir, dengan *output*: pengembangan dan pengelolaan SPAM • Peningkatan utilitas dasar perdesaan, dengan *output*: peningkatan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dan setempat skala individu • Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah, dengan *output*: pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, sistem pengelolaan persampahan skala regional, skala kota, skala kawasan, dan berbasis masyarakat • Fasilitasi pembangunan rumah baru, dengan *output:* bantuan pembangunan rumah swadaya dan bantuan rehabilitasi rumah keluarga penerima manfaat (KPM)
	Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya dan pengendalian penyakit menular, melalui: • Pengendalian penyakit malaria, dengan *output:* pengadaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria; pembinaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; fasilitasi dan pembinaan pencegahan dan pengendalian malaria

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan intervensi spesifik dan sensitif *stunting*, dengan *output:* penerapan konvergensi Pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah, fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi, balita, ibu, dan bayi baru lahir, fasilitasi dan pembinaan: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING), Implementasi 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan penganekaragaman pangan
	Provinsi Kalimantan Tengah	Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui: • Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan *output:* sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk) dan pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial • Penyaluran bantuan sosial adaptif dan penguatan JKN, dengan *output:* penduduk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan, penyaluran cadangan pangan pemerintah, penyediaan elpiji 3kg yang tepat sasaran • Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan *output*: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, tenaga kerja mandiri (TKM) pemula dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha

4.3 Provinsi Kalimantan Selatan

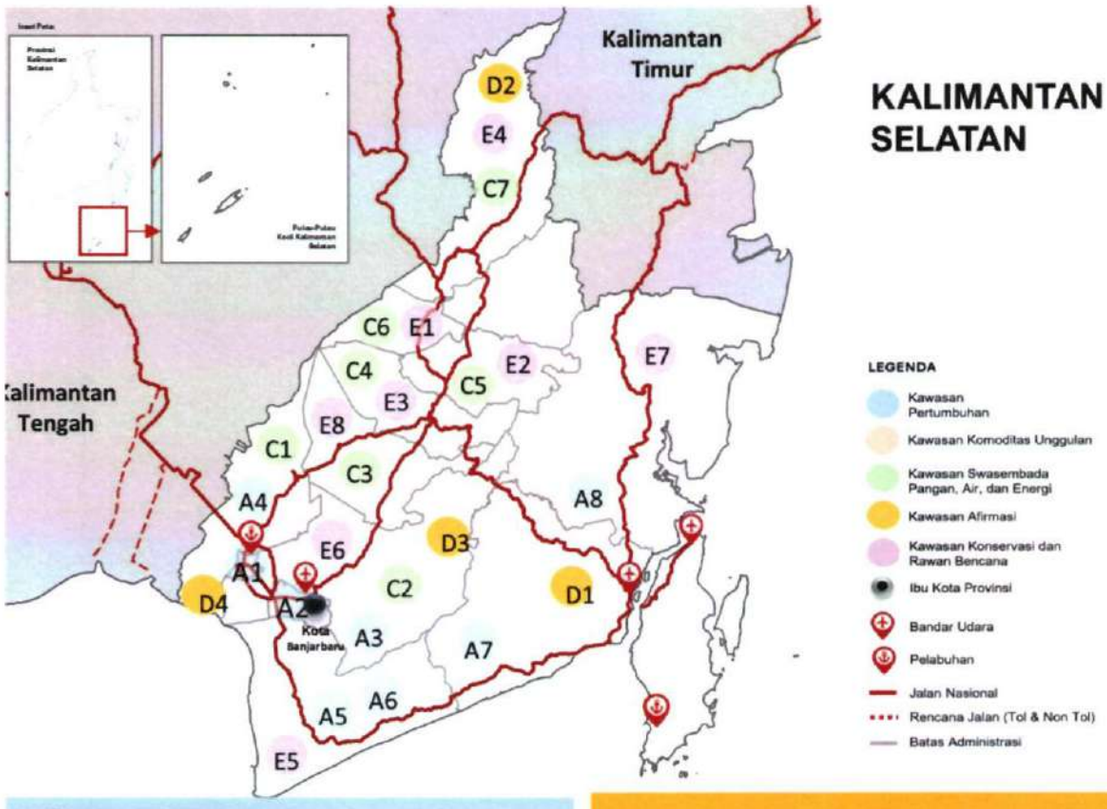

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin
1. Kota Banjarmasin
2. Kota Banjarbaru
3. Kabupaten Banjar
4. Kabupaten Barito Kuala
5. Kabupaten Tanah Laut

Kawasan Pertumbuhan Industri Baru
6. Kabupaten Tanah Laut
7. Kabupaten Tanah Bumbu
8. Kabupaten Kotabaru

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu
1. Kabupaten Barito Kuala
2. Kabupaten Banjar
3. Kabupaten Tapin
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara,
7. Kabupaten Tabalong

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Prioritas Perdesaan (KPP)
1. KPP Agropolitan, Kabupaten Tanah Bumbu
2. KPP Agrowisata Hortikultura Kabupaten Tabalong
3. KPP Agrominapolitan Kabupaten Banjar

Kawasan Transmigrasi (KT)
4. KT Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala

E. Kawasan Konservasi

Kawasan Pegunungan Meratus (Geopark Meratus dan Kawasan Loksado)
1. Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Kabupaten Tabalong
5. Kabupaten Tanah Laut
6. Kabupaten Banjar
7. Kabupaten Kotabaru
8. Kabupaten Tapin

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,1 (Rata-rata 2025-2029)	72,7	1,3	3,44 – 3,94	0,307 – 0,311	0,57	75,97	72,32	3,86 – 4,25
2029	8,1 (2029)	106,3	1,3	1,64 – 2,64	0,274 – 0,278	0,61	80,99	73,10	3,29 – 3,97

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2 A3 A4 A5	Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin: • A1: Kota Banjarmasin • A2: Kota Banjarbaru • A3: Kabupaten Banjar • A4: Kabupaten Barito Kuala • A5: Kabupaten Tanah Laut	Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin, melalui: • Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional, dengan *output*: bantuan peralatan/sarana, penyelidikan geologi tata lingkungan untuk penataan ruang dan infrastruktur • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya, dengan *output*: bantuan Prasarana Sarana Umum (PSU) bidang perumahan, bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/pekerja, bantuan pembangunan rumah swadaya, pemukiman kembali, peremajaan, dan pemugaran permukiman kumuh, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, fasilitasi literasi digital, jalan non-status yang dikembangkan di kawasan transmigrasi di Kabupaten Barito Kuala, subsidi angkutan umum perkotaan di Kota Banjarmasin • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan, dengan *output*: PBK Provinsi Kalimantan Selatan, *pilot project* kerja sama daerah dalam mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin • Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh, dengan *output*: pemetaan komponen kerentanan dan kapasitas, penguatan instrumen peringatan dini bencana • Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan *Transit Oriented Development* (TOD) • Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu melalui pembentukan kelembagaan (atau forum) pengelola WM Banjarmasin dan penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, dengan *output*: daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di wilayah metropolitan, daerah yang melakukan penilaian indeks maturasi perkotaan lintas K/L secara terpadu di wilayah metropolitan, daerah yang dikuatkan tata kelola *smart city*-nya di wilayah metropolitan, dan daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP perkotaan pada wilayah metropolitan • Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan, dengan *output*: *Metropolitan Statistical Area*

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A6 A7 A8	Kawasan Pertumbuhan Industri Baru: • A6: Kabupaten Tanah Laut • A7: Kabupaten Tanah Bumbu • A8: Kabupaten Kotabaru	Pengembangan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor, melalui: • Penguatan industri dasar seperti hilirisasi kimia berbasis batubara • Pengembangan hilirisasi nikel, dengan *output*: industri smelter/pemurnian/pengolahan logam dasar beserta turunannya yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya, kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel, perencanaan dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi, industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor industri logam, industri yang terfasilitasi melalui pendampingan dalam rangka peningkatan investasi dan/atau ekspor, industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan akses pasar dan pendampingan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika, industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri • Pengembangan industri karet, dengan *output*: penyusunan data *supply-demand* sektor tekstil, kulit dan alas kaki, dan penerapan tingkat komponen dalam negeri - industri kecil, peralatan fasilitas laboratorium/*workshop*/layanan industri karet, serta pengembangan produk, pendampingan IKM, peningkatan kreativitas, dan informasi pasar, promosi dan pemasaran • Pengembangan hilirisasi kelapa sawit, dengan *output*: kriteria *standar* CPO untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, peralatan fasilitas laboratorium/*workshop*/layanan industri hasil perkebunan, mineral logam, dan maritim, fasilitasi peningkatan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit melalui pembentukan lembaga sertifikasi (LS) ISPO Hilir, penguatan standardisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF - *Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel)* berbahan baku *technical oil*, fasilitasi penyediaan pasokan bioetanol untuk bahan bakar nabati (*biofuel)* dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional, serta kebijakan pembangunan rendah karbon (PRK) dan penurunan gas rumah kaca (GRK) sektor industri • Peningkatan investasi hilirisasi besi baja
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7	Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu: • C1: Kabupaten Barito Kuala • C2: Kabupaten Banjar • C3: Kabupaten Tapin • C4: Kabupaten Hulu Sungai Selatan • C5: Kabupaten Hulu Sungai Tengah • C6: Kabupaten Hulu Sungai Utara • C7: Kabupaten Tabalong	Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui: • Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, dengan *output:* sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk yang dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara • Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan *output:* kawasan karet • Penguatan pascapanen pangan nabati, dengan *output:* sarana pascapanen tanaman perkebunan • Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan *output:* benih ternak unggul • Pengembangan pengairan dan irigasi dengan *output:* pembangunan dan/atau pengembangan irigasi di Wilayah Sungai (WS) Cengal-Batulicin untuk meningkatkan ketahanan pangan • Peningkatan ketersediaan pangan, dengan *output:* intervensi cetak sawah di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tabalong

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
D1 D2 D3	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP): • D1: KPP Agropolitan, Kabupaten Tanah Bumbu • D2: KPP Agrowisata Hortikultura, Kabupaten Tabalong • D3: KPP Agrominapolitan, Kabupaten Banjar	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan, melalui: • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi), dengan rincian *output*: fasilitasi lembaga posyandu dalam penerapan 6 bidang SPM, sarana puskesmas, pustu dan posyandu (SOPHI), fasilitasi program P4GN bidang pencegahan berbasis sumber daya pembangunan desa, desa yang mendapatkan fasilitasi konvergensi pencegahan *stunting*, revitalisasi posyandu, dan kampanye posyandu aktif, sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi), dengan rincian *output*: perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, penguatan interkoneksi ketenagalistrikan Barito – Mahakam; pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu, desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator, kabupaten/kota yang difasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama, peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari, OM BTS 4G/*Lastmile*, pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi, sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya) • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa
D4	Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala: • D4: KT Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman. • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian. • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi. • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran.
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8	Kawasan Pegunungan Meratus (*Geopark* Meratus dan Kawasan Loksado): • E1: Kabupaten Hulu Sungai Utara • E2: Kabupaten Hulu Sungai Tengah • E3: Kabupaten Hulu Sungai Selatan • E4: Kabupaten Tabalong • E5: Kabupaten Tanah Laut	Pengembangan ekowisata kelas dunia di *Geopark Geosite* Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra dan tenaga kerja lokal melalui pengembangan destinasi wisata potensial, melalui: • Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di *Geopark Geosite* Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja • Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan *Geopark* Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• E6: Kabupaten Banjar • E7: Kabupaten Kotabaru • E8: Kabupaten Tapin	
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui: • Pembangunan jembatan Laut–Pulau Kalimantan • Pembangunan jalan nasional, dengan *output:* pembangunan jalan strategis ruas Anjir Pasar (batas Provinsi Kalimantan Tengah)–Serapat–Batas Kota Banjarmasin • Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, dengan *output:* Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan ruas Walangsi–Kaparkias dan Pagatan–Batulicin • Pengembangan/pembangunan/rehabilitasi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, dengan *output:* Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional di Kab. Kotabaru • Pengembangan pelabuhan logistik di Pulau Laut, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan • Pengembangan bandara, dengan *output:* Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam, Kotabaru, Kalimantan Selatan
	Provinsi Kalimantan Selatan	Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, melalui: • Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik • Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk • Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan
	Provinsi Kalimantan Selatan	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat, melalui: • Penguatan intervensi spesifik dan sensitif *stunting,* dengan *output:* ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *buffer-stock*, dan kegiatan koordinasi dan advokasi terkait perbaikan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita • Intensifikasi penemuan kasus, pengobatan, serta peningkatan upaya pencegahan , dengan *output:* pemberian obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, serta NSPK pencegahan dan pengendalian TBC • Eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan *output:* peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, supervisi dan monitoring evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit tropis, serta *assessment* eliminasi penyakit tropis (kusta) • Pencegahan dan pengendalian kejadian penyakit malaria, dengan *output:* layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria • Pengendalian penyakit menular lainnya, dengan *output* NSPK pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS
	Provinsi Kalimantan Selatan	Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), melalui: • Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pembiayaan JKN/KIS melalui Bantuan Masyarakat, dengan *output:* cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS • Pembangunan rumah sakit lengkap di kabupaten, melalui: pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
	Provinsi Kalimantan Selatan	Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan Prasarana Sarana Umum (PSU) melalui fasilitasi pembangunan rumah baru, penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan pada perumahan tapak, penyaluran subsidi/bantuan pembiayaan rumah, serta penanganan permukiman kumuh, dengan *output:* bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI, rumah swadaya, dan MBR/pekerja, bantuan Prasarana Sarana Umum (PSU) bidang perumahan; pembangunan, peningkatan, dan perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional dan kabupaten/kota; infrastruktur air minum berbasis masyarakat; fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka; pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh.
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, melalui: • Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri; • Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK; • Sertifikasi kompetensi siswa SMK/MAK. • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan
	Provinsi Kalimantan Selatan	Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui: • Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan *output*: sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk) dan pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial; • Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan, dengan *output*: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan, penyaluran cadangan pangan pemerintah, penyediaan elpiji 3 kg yang tepat sasaran.
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan kualitas pemuda, serta penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: • Pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul, dengan *output:* pengembangan tata kelola pembinaan olahraga prestasi, dan pengembangan sistem pembinaan olahragawan elite cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade; • Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, dan pencegahan perilaku berisiko; • Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan, dengan *output:* peningkatan partisipasi ketenagakerjaan layak pemuda, dan peningkatan kewirausahaan pemuda;

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik; • Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas, dengan *output:* penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial; • Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia, dengan *output:* lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial.
	Provinsi Kalimantan Selatan	Perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya, melalui: • Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; • Pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya; • Penguatan data, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana melalui: • Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana, dengan *output:* penguatan instrumen peringatan dini bencana; • Penyediaan sarana dan prasarana penanganan darurat.

4.4 Provinsi Kalimantan Timur

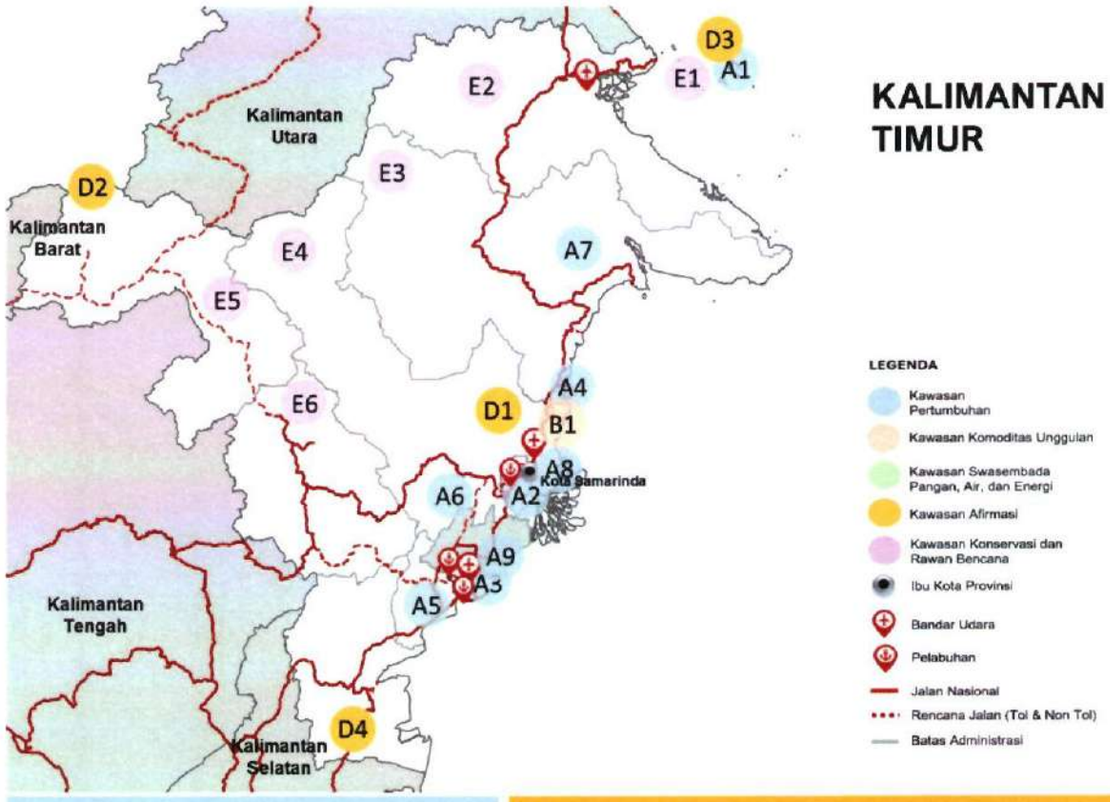

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan-Berau
1. Kabupaten Berau

Kawasan *Superhub* Ekonomi Ibu Kota Nusantara
2. Kota Samarinda
3. Kota Balikpapan
4. Kota Bontang
5. Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Kabupaten Kutai Timur

Kawasan Perkotaan Besar
8. Kota Samarinda
9. Kota Balikpapan

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Timur
1. Kabupaten Kutai Kartanegara

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)
1. KPP Agroekowisata, Kabupaten Kutai Kartanegara

Kawasan Perbatasan Prioritas
2. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Mahakam Ulu
3. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Berau

Kawasan Transmigrasi (KT)
4. Kawasan Transmigrasi Kerang, Kabupaten Paser

E. Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi Derawan
1. Kabupaten Berau

Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan *(Heart of Borneo)*
2. Kabupaten Berau
3. Kabupaten Kutai Timur
4. Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kabupaten Mahakam Ulu
6. Kabupaten Kutai Barat

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,8 (Rata-rata 2025–2029)	237,1	4,2	4,24 – 5,05	0,310-0,321	0,59	40,82	80,20	4,60 – 5,14
2029	8,6 (2029)	326,9	4,6	2,37 – 3,37	0,309 - 0,313	0,62	67,46	80,87	4,14 – 4,77

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan-Berau • A1: Kabupaten Berau	Pengembangan kawasan pariwisata petualangan Derawan–Berau, melalui: • Pengembangan klaster pariwisata di sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan *output*: penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan khususnya di Pulau Derawan dan Pulau Maratua, penyusunan) rencana induk/masterplan penataan dan pengembangan di kawasan Pariwisata Berau untuk mendukung pengembangan pariwisata di sekitar IKN dan pengembangan *Tourist Information Center* sebagai pusat informasi terintegrasi terkait aktivitas pariwisata • Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan transportasi, dengan *output*: pengembangan Bandara Maratua, jalan koridor logistik, jembatan koridor logistik, pembangunan jembatan koridor logistik (*backbone*) dan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi tenaga listrik dan listrik pedesaan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan *output:* lokasi yang memperoleh sinyal telekomunikasi bergerak seluler (*Base Transceiver Station / Lastmile* 4G) di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dengan *output:* Fasilitator/*Enabler Digital* PMSE yang dibina, pelaksanaan pemantauan/monitoring, bimtek pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE dan masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital • Perluasan layanan penyiaran digital, dengan *output:* transmisi yang terbangun, pengadaan infrastruktur teknologi informatika dan media baru dan *downtime* siaran (tidak lebih dari 7 jam per bulan) yang terjadi
A2 A3 A4 A5 A6 A7	Kawasan *Superhub* Ekonomi Ibu Kota Nusantara • A2: Kota Samarinda • A3: Kota Balikpapan • A4: Kota Bontang • A5: Kabupaten Penajam Paser Utara • A6: Kabupaten Kutai Kartanegara • A7: Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan kawasan *superhub* ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, melalui: • Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, dengan *output*: pembangunan SPAM Regional Kalimantan Timur • Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan *output*: pengembangan objek wisata desa dan perdesaan, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu, serta fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II, serta *event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) dalam negeri yang didukung • Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan *output*: kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan,

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik, penguatan ekosistem fesyen dan kriya, penguatan ekosistem aplikasi dan gim, penguatan ekosistem kuliner, pelatihan SDM ekonomi kreatif, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif, serta edukasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, inkubasi produk kreatif subsektor film, animasi, dan video serta musik • Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara • Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandardisasi pada agroindustri hilir kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan *output*: kriteria standar *Crude Palm Oil* (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, fasilitasi investasi hilir kelapa sawit, dan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi Kedua (HVO/SAF - *Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel*) berbahan baku *technical oil*, promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri, peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, promosi produk rumput laut skala internasional, pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani dan pengadaan asuransi pertanian • Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandardisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar), dengan *output*: rekomendasi dan regulasi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis minyak bumi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis gas bumi, fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas *coal to ammonia* di Kutai Timur pendampingan implementasi sektor industri, gasifikasi batubara di Kutai Timur, rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara, pengembangan dan pembangunan kilang minyak bumi (Kilang Balikpapan), pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang dan Bangka (*Indonesia Deepwater Development Project/IDD*), percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon dan penyediaan serta permintaan produk turunan • Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki), dengan *output*: penyusunan data *supply-demand* dan tingkat komponen dalam negeri industri kecil pada sektor tekstil, kulit dan alas kaki • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil, dengan *output*: pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor minuman, hasil tembakau, serta bahan penyegar dan penerapan making Indonesia 4.0 pada Industri Kecil Menengah (IKM) pada industri aneka dan IKM kimia, sandang dan kerajinan • Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan *output*: pengembangan sektor industri aneka, layanan pemberdayaan penyuluh, rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki serta layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) • Peningkatan produksi pangan nabati, dengan *output*: alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura • Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik, dengan *output*: preservasi pada sejumlah jalan/jembatan koridor logistik • Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan *output*: pengembangan pelabuhan • Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan *output*: pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Kota Balikpapan), Bandara Aji Pangeran Tumenggung

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara) • Pembangunan jalan nasional akses perbatasan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi, dengan *output*: pembangunan jalan koridor logistik Tering–Long Bagun 5 • Pengembangan transportasi berkelanjutan, dengan *output*: pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS (*Buy the Service*) di Kota Balikpapan
A8 A9	Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan • A8: Kota Samarinda • A9: Kota Balikpapan	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan, dengan *output*: bantuan PSU bidang perumahan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI, pemugaran permukiman kumuh, peremajaan permukiman kumuh, permukiman kembali permukiman kumuh, bantuan pembangunan rumah swadaya, bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi, penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk kota besar (Samarinda dan Balikpapan), penataan kawasan prioritas pada Kota Samarinda (Blok Teras Samarinda–Zona Kota Tua), pembangunan fasilitas pendidikan politeknik pariwisata di Samarinda untuk mendukung pengembangan pariwisata di IKN dan sekitarnya, serta penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z
B1	Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Timur • B1: Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budi daya dan revitalisasi tambak rakyat, dengan *output*: klaster revitalisasi tambak udang dan bandeng, irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP), kampung perikanan budi daya air payau yang dikembangkan, klaster komoditas unggulan air tawar berbasis kawasan, klaster komoditas unggulan air payau berbasis kawasan dan revitalisasi tambak budi daya ikan air payau
D1	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) • D1: KPP Agroekowisata Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Agroekowisata Kutai Kartanegara, melalui: • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi), dengan *output*: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, sarana dan prasarana perdagangan desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi), dengan *output*: perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator, peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari, OM BTS 4G/*Lastmile*, dan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan, pendampingan desa dan pengembangan BUMDesa • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya), dengan *output*: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, desa wisata di dilayah destinasi II yang dikembangkan dan pengembangan, penguatan tata kelola desa wisata dan penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa, dengan *output*: pengembangan Akademi Desa 4.0,

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa dan integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD • Peningkatan produktivitas desa wisata, dengan *output*: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan
D2 D3	Kecamatan Perbatasan Prioritas • D2: Kec. Long Apari dan Kec. Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu • D3: Kec. Maratua, Kabupaten Berau	Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: • Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan, dengan *output* di antaranya: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, pembangunan jalan koridor logistik (*backbone*), dan pengembangan Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau
D4	Kawasan Transmigrasi (KT) • D4: KT Kerang, Kabupaten Paser	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran
E1	Kawasan Konservasi Derawan • E1: Kabupaten Berau	Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui: • Pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: data dan informasi ekosistem dan data dan informasi konservasi biota perairan • Peningkatan sarana pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: sarana pendukung penyelenggaraan konservasi biota perairan • Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: kerja sama jejaring dan kemitraan konservasi ekosistem, kawasan konservasi perairan yang operasional dan *Oceans for Prosperity Project* – LAUTRA • Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelola kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: kelompok masyarakat penggerak konservasi dan pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya
E2 E3 E4 E5 E6	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) • E2: Kabupaten Berau • E3: Kabupaten Kutai Timur • E4: Kabupaten Kutai Kartanegara • E5: Kabupaten Mahakam Ulu • E6: Kabupaten Kutai Barat	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk *Heart of Borneo* di wilayah Kalimantan Timur disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui: • Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan *output*: penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat dan udara, kelompok masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta area penanganan dampak • Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan *output*: lahan gambut yang dipulihkan dan direstorasi serta data dan informasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) • Rehabilitasi ekosistem mangrove, dengan *output*: lahan rusak yang dipulihkan, pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan *output*: inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan • Pengendalian banjir di kawasan perkotaan dan daerah berisiko tinggi • Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi
	Provinsi Kalimantan Timur	Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui: • Pengelolaan sarana dan prasarana sektor logistik yang berkelanjutan, dengan *output*: layanan angkutan penyeberangan perintis
	Provinsi Kalimantan Timur	Penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sejenisnya secara partisipatif (hulu) beserta penanganannya (hilir), melalui: • Peningkatan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) melalui Tempat Pengolahan Sistem Terpadu (TPST) guna pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor pengolahan sampah, dengan *output*: sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat • Pemanfaatan teknologi pengolahan *Refuse Derived Fuel (RDF) plant* dan teknologi tepat guna lainnya di berbagai lini industri, dengan *output*: pemanfaatan teknologi pengolahan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau • Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik dan persampahan pada perumahan tapak, dengan *output*: bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bidang perumahan
	Provinsi Kalimantan Timur	Penguatan konektivitas listrik terutama bagi rumah tangga yang tidak mampu atau berada di daerah afirmasi serta implementasi transisi energi, melalui: • Peningkatan dan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan dengan pemanfaatan energi rendah karbon, dengan *output*: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro • Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk • Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan
	Provinsi Kalimantan Timur	Penguatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana dasar termasuk pelayanan kesehatan pada daerah afirmasi dan 3T • Pembangunan konektivitas udara, dengan *output*: pembangunan Bandara Ujoh Bilang (Kabupaten Mahakam Ulu) • Pembangunan Rumah Sakit lengkap di Kabupaten, dengan *output*: peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di Kabupaten Mahakam Ulu
	Provinsi Kalimantan Timur	Perwujudan swasembada sektor pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui: • Peningkatan produksi pangan nabati dan pemberdayaan ekonomi, dengan *output*: alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura • Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan *output*: rekomendasi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian • Pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, dengan *output*: Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan • Jaminan ketersediaan bahan baku bioindustri agro, dengan *output*: area pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hortikultura dan sarana perlindungan hortikultura • Peningkatan produksi pangan nabati dan modernisasi jaringan irigasi guna peningkatan pemberdayaan ekonomi, dengan *output*: jaringan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		irigasi yang direhabilitasi dan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura • Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, termasuk peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi)
	Provinsi Kalimantan Timur	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC, malaria dan HIV/AIDS) dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), melalui: • Penguatan intervensi spesifik *stunting*, dengan *output*: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *buffer stock* • Intensifikasi penemuan kasus dan pengobatan sebagai upaya pencegahan TBC, dengan *output*: tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian, layanan survei faktor risiko dan layanan pencegahan penyakit TBC • Pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian, sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menuju eliminasi dan layanan survei faktor risiko penyakit malaria • Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian serta layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS • Pengendalian penyakit kusta, dengan *output*: masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian serta tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian penyakit kusta
	Provinsi Kalimantan Timur	Penguatan kapasitas pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan, melalui: • Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan *output*: pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya, fasilitasi pengelolaan proyek penguatan Rumah Sakit layanan kanker, jantung, stroke, dan *uro-nefrologi* (KJSU) dan pengembangan layanan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis komputer di seluruh Kabupaten/Kota • Peningkatan kualitas pelayanan rujukan, dengan *output*: NSPK mutu dan akreditasi rumah sakit
	Provinsi Kalimantan Timur	Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui: • Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan *output*: sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk) dan pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial • Penyaluran bantuan sosial adaptif dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional, dengan *output*: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan, penyaluran cadangan pangan pemerintah, penyediaan elpiji 3 kg yang tepat sasaran dan pemberian perlindungan kerja melalui fasilitasi PBI Jamsostek dan jaminan kehilangan pekerjaan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Kalimantan Timur	Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pengembangan bidang *STEAM*, serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja berupa pengembangan bidang keahlian jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat, melalui: • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan • Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi (PT) Vokasi, dengan *output*: gedung, bangunan dan prasarana pendidikan tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya • Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan *output*: SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan, berbasis industri dan mendapatkan pendampingan peningkatan mutu • Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK, dengan *output*: guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan, inovasi model pembelajaran vokasi dan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri untuk kebutuhan dunia kerja • Sertifikasi kompetensi siswa SMK/MAK, dengan *output*: siswa SMK/MAK yang mendapatkan penguatan persiapan program magang luar negeri dan tersertifikasi terhadap kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja • Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan *output*: pengembangan kerja sama pelatihan dan satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja
	Provinsi Kalimantan Timur	Pengelolaan risiko dan mitigasi bencana alam yang efisien dan tepat guna, melalui: • Mitigasi bencana di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan *output*: koordinasi, pelayanan publik lainnya dan dukungan teknis bidang lingkungan hidup penanggulangan bencana • Pelaksanaan bantuan kebencanaan, dengan *output*: analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana • Pengembangan mitigasi berbasis alam, dengan *output*: koordinasi bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta pelayanan publik lainnya bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah penanggulangan bencana, dengan *output*: pendidikan dan pelatihan teknis Penanggulangan Bencana (PB), daerah yang menerapkan SPM sub urusan bencana, pendidikan dan pelatihan teknis PB bagi fasilitator nasional dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi • Penyusunan dokumen penanggulangan bencana, dengan *output*: analisis pengembangan strategi, rekomendasi kebijakan dan analisis strategi penanggulangan bencana • Peningkatan keandalan bangunan berketahanan bencana, dengan *output*: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan, pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pasca bencana, penataan bangunan kawasan rawan bencana dan daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian Pelaksanaan Bangunan Gedung (PBG) berketahanan bencana
	Provinsi Kalimantan Timur	Pengembangan kawasan dan pelestarian warisan budaya serta tanah ulayat masyarakat adat melalui pembinaan talenta seni budaya, dengan *output*: warisan budaya yang diregistrasi nasional dan ditetapkan dan warisan budaya yang dilindungi

4.5 Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

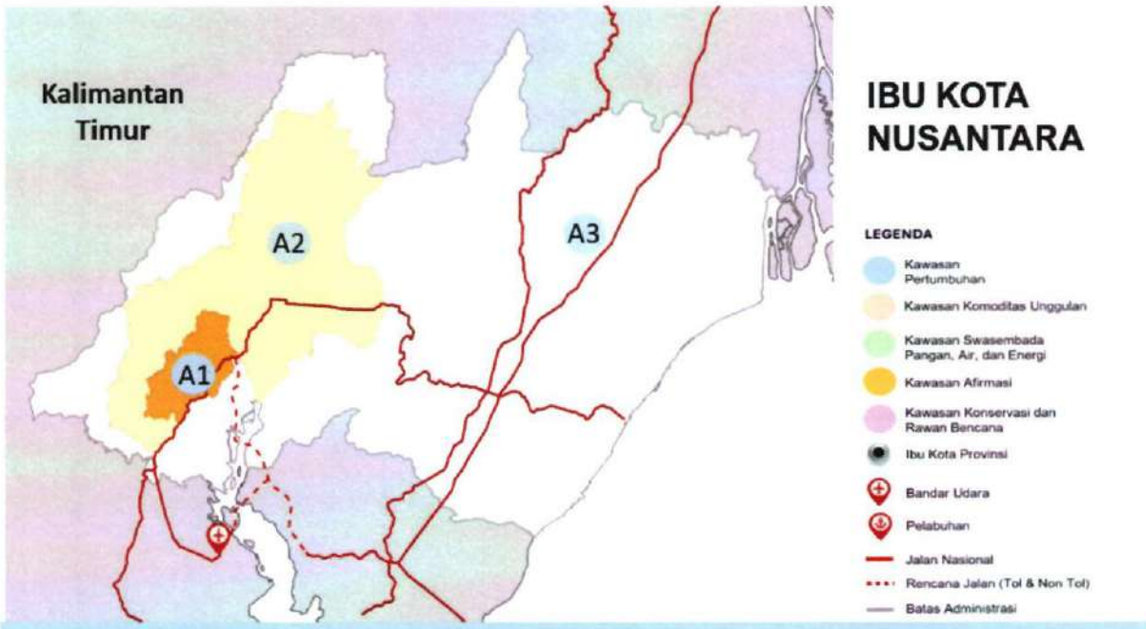

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Superhub Ibu Kota Nusantara (IKN)

1. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)
2. Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN)
3. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2 A3	Kawasan *Superhub* Ibu Kota Nusantara (IKN) • A1: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) • A2: Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) • A3: Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN)	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta pemindahan, melalui: • Perencanaan dan penataan ruang kawasan inti dan sekitarnya, dengan *output*: Rencana Pengembangan Kawasan (RPK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perdesaan, pengadaan tanah, serta rekomendasi kebijakan percepatan pemindahan ibu kota negara • Pembangunan gedung/perkantoran, dengan *output*: bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan • Pembangunan gedung/hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan *output*: bangunan gedung dan penataan kawasan, serta operasional dan pemeliharaan • Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan *output*: Rumah Susun ASN dan Hankam, hunian/perumahan umum, serta operasional dan pemeliharaan • Pembangunan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: pembangunan dan perluasan sistem pengolahan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, operasional dan pemeliharaan, rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN, infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta pembangkit listrik tenaga surya • Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan *output*: jaringan jalan akses menuju IKN (jalan tol/jalan bebas hambatan menuju KIPP),

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		infrastruktur jalan dan *multi utility tunnel* (MUT) dalam KIPP, persiapan pembangunan jalur kereta api (KA) akses KIPP, bandara IKN, layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, serta operasional dan pemeliharaan • Pemindahan ASN dan personel hankam, dengan *output*: diseminasi informasi pemindahan ibu kota negara, pengamanan ibu kota negara, rekomendasi kebijakan pengelolaan aset dalam rangka pemindahan, serta koordinasi pelaksanaan pemindahan ASN/Hankam ke Ibu Kota Nusantara • Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas, dengan *output*: sistem informasi kota cerdas, kebijakan pengembangan ekosistem digital, serta layanan sistem perizinan terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
		Pembangunan sosial, *superhub* ekonomi, dan pengelolaan lingkungan Ibu Kota Nusantara, melalui: • Pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan *output*: pembinaan ekonomi dan pelatihan vokasi • Peningkatan investasi, dengan *output*: promosi kegiatan di kawasan nasional IKN, dukungan penjaminan BUMN, serta rekomendasi kebijakan kemudahan berusaha dan investasi • Pengembangan *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitar, dengan *output*: rencana induk destinasi pariwisata prioritas regeneratif, desa wisata yang dikembangkan, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif, fasilitasi kerja sama daerah mitra, serta promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif • Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan *output*: fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat • Pembangunan kesehatan, dengan *output*: pembinaan pengendalian dan layanan mitigasi penemuan kasus dalam upaya percepatan eliminasi malaria, serta bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk pencegahan dan penurunan *stunting* • Pembangunan pendidikan, dengan *output*: bantuan pendidikan afirmasi (Program Indonesia Pintar), revitalisasi satuan pendidikan di kabupaten/kota, sekolah unggul berbasis *higher order thinking skills* (HOTS) untuk jenjang pendidikan menengah, serta sarana dan gedung perguruan tinggi vokasi yang direvitalisasi di wilayah sekitar • Penyelenggaraan kawasan lindung dan kehutanan, dengan *output*: rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengawasan dan pengendalian kehutanan, serta penyuluhan dan sosialisasi pengembangan pemanfaatan kehutanan dan sumber daya air • Pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan *output*: tata kelola lingkungan hidup, pengawasan lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan di wilayah IKN, pemantauan kualitas lingkungan hidup, pelayanan persetujuan lingkungan di wilayah IKN, AMDAL kawasan, kajian risiko bencana IKN, pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat tangguh bencana serta kearifan lokal, serta operasional aktivitas penanggulangan bencana • Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan, dengan *output*: bantuan peralatan pasca panen di satuan permukiman dan pusat SKP pada kawasan transmigrasi di wilayah sekitar, basis data pangan, bibit kultur jaringan hortikultura unggulan, lahan pertanian berkelanjutan, pelayanan penyuluhan pertanian, serta pertanian konservasi, pertanian regeneratif, dan rendah karbon yang dikembangkan

4.6 Provinsi Kalimantan Utara

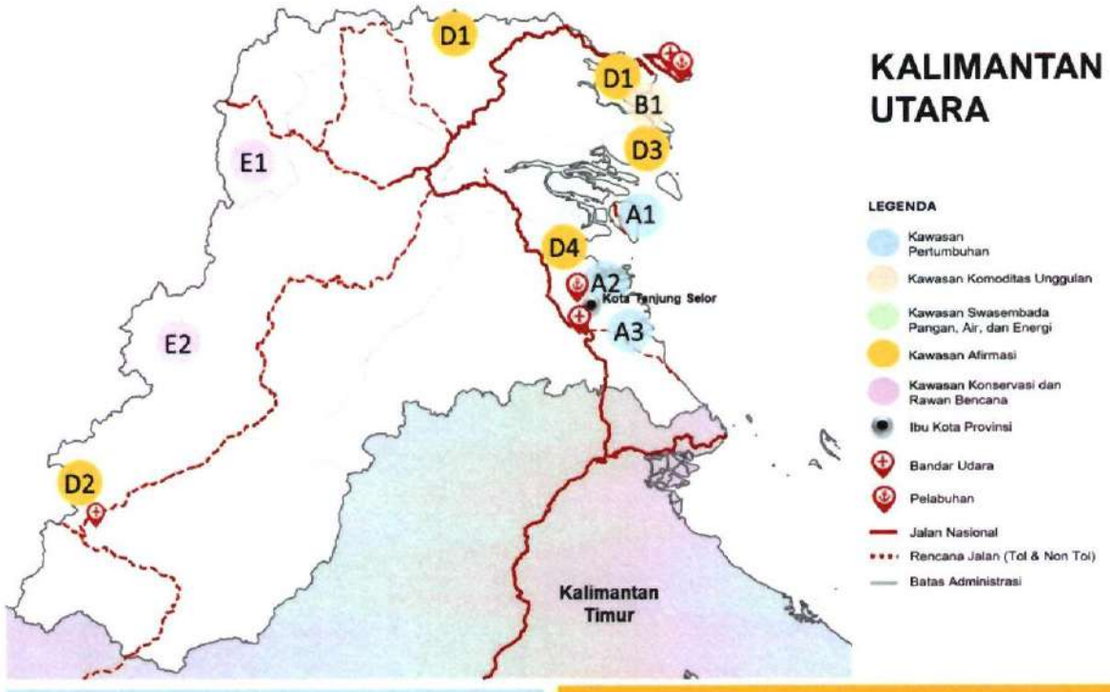

A. Kawasan Pertumbuhan

Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan
1. Kota Tarakan
2. Kabupaten Bulungan

Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning
3. Kabupaten Bulungan

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Sentra Rumput Laut
1. Kabupaten Nunukan

D. Kawasan Afirmasi

Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas
1. PKSN Nunukan dan PKSN Tou Lumbis dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Nunukan
2. PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Malinau
3. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Tana Tidung

Kawasan Transmigrasi (KT)
4. KT Salim Batu, Kabupaten Bulungan

E. Kawasan Konservasi

Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan *(Heart of Borneo)*
1. Kabupaten Nunukan
2. Kabupaten Malinau

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,2 (Rata-rata 2025-2029)	227,1	0,7	4,33 – 5,07	0,263	0,56	55,77	77,77	3,90 – 3,94
2029	7,0 (2029)	323,3	0,7	2,33 – 3,33	0,257 – 0,261	0,59	81,05	78,57	2,70 – 3,45

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2	Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan • A1: Kota Tarakan • A2: Kabupaten Bulungan	Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan, melalui: • Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan *output*: pembangunan SPAM Kabupaten/Kota, pembangunan SPAM Regional, dan pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat • Penyediaan hunian publik vertikal sewa, dengan *output*: penyediaan bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI • Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dengan *output*: pengembangan sistem persampahan berbasis Masyarakat • Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan, dengan *output*: penyediaan bantuan prasarana sarana utilitas umum bidang perumahan • Pembangunan embung atau tampungan air skala kecil lainnya di Kota Tanjung Selor, dengan *output*: pembangunan embung atau tampungan air skala kecil lainnya • Pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan di Kota Tanjung Selor, dengan *output*: pengembangan sentra perikanan tangkap yang ditingkatkan fasilitasnya • *On Farm* di Kota Tanjung Selor, dengan *output*: penyediaan bantuan sarana produksi pertanian di satuan permukiman dan pusat SKP • Pembangunan dan pengembangan bandara di Kota Tarakan, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Juwata • Penguatan kewirausahaan afirmatif di Kota Tarakan, dengan *output*: pengembangan sentra perikanan tangkap yang ditingkatkan fasilitasnya • Pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi di Kota Tarakan, dengan *output*: pengembangan angkutan udara perintis penumpang, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang • Pengembangan kawasan konservasi mangrove dan bekantan termasuk pengembangan sarana dan prasarana serta dukungan promosi di Kota Tarakan
A3	Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning: • A3: Kabupaten Bulungan	Pengembangan Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning, melalui: • Peningkatan investasi kawasan, dengan *output*: pembentukan *Eco Industrial Park* (KI berwawasan lingkungan), *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) bidang jasa dan kawasan, peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan pada bidang jasa dan kawasan, penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan *output*: pengembangan IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan fasilitasi perluasan akses pasar • Pengembangan pembangunan PLTA Kayan Terintegrasi, dengan *output*: pengawasan dan pengendalian konsumsi listrik per kapita, rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, serta AI Data Kayan. • Pengembangan pembangunan PLTA Kayan terintegrasi • Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan *Industrial Park* Indonesia • Penambahan penerbangan umum dan perintis • Peningkatan/perbaikan jalan akses ke lokasi sumber daya dan kawasan • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas
B1	Kawasan Sentra Rumput Laut • B1 Kabupaten Nunukan	Pengembangan Kawasan dan Sentra Rumput Laut, melalui: • Pengembangan industri dan hilir rumput laut, dengan *output*: peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, dan promosi produk rumput laut skala internasional • Peningkatan produktivitas budidaya rumput laut, dengan *output*: pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui *platform* digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani • Fasilitasi pembiayaan dan investasi • Penelitian dan pengembangan budidaya rumput spesies baru serta inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak)
D1 D2 D3	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas • D1: PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Krayan Selatan, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sei Menggaris, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, dan Kec. Krayan Barat), Kabupaten Nunukan • D2: PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kayan Hilir dan Kec. Bahau Hulu), Kabupaten Malinau • D3: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tana Lia), Kab. Tana Tidung	Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: • Pemenuhan layanan dasar di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 Harga, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan *output*: pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, penataan bangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan PLBN Long Midang beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan koridor logistik (*backbone*), pengembangan bandar udara Long Apung tahap III, Kab. Malinau, pengembangan bandar udara Seluwing, Kab. Malinau, pengembangan bandar udara Yuvai Semaring, Kab. Nunukan, pengembangan bandar udara Nunukan, Kab. Nunukan, pengembangan fasilitas pelabuhan Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan, pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk • Penataan ruang dan penanggulangan bencana di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN), penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, dan penguatan instrumen peringatan dini bencana • Penguatan tata kelola pemerintahan di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
D4	Kawasan Transmigrasi (KT) • D4: KT Salim Batu, Kabupaten Bulungan	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: penyediaan bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: penyediaan fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran
E1 E2	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) • E1: Kabupaten Nunukan • E2: Kabupaten Malinau	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk *Heart of Borneo* di Wilayah Kalimantan Utara, melalui: • Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi • Konservasi komoditas pertanian dan praktik pertanian berkelanjutan, dengan *output*: penyusunan rekomendasi perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau • Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan *output*: penguatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan
	Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan pengembangan pangan nabati, hilirisasi komoditas pertanian strategis/unggulan serta modernisasi dan digitalisasi pertanian yang adaptif dan inklusif, melalui: • Penguatan pasca panen pangan nabati, dengan *output*: pengembangan sarana pascapanen tanaman pangan dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan • Sertifikasi dan peredaran benih nabati, dengan *output*: penyaluran benih padi • Jaminan ketersediaan bahan baku bioindustri agro, dengan *output*: penyediaan bahan tanam komoditi perkebunan • Adopsi teknologi pertanian, dengan *output*: penerapan teknologi pertanian • Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, termasuk peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi)
	Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan konektivitas (konektivitas jalan dan udara) dan pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah 3TP, melalui: • Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output*: pengembangan Jalan Koridor Logistik-Sekatak Buji-Malinau, Jalan Akses Simpul Transportasi Lingkar Pulau Sebatik, serta Pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III • Penanganan konektivitas jalan/jembatan non lintas utama, dengan *output*: pengembangan jalan koridor logistik serta pembangunan jembatan koridor logistik (*backbone*)
	Provinsi Kalimantan Utara	Swasembada energi serta penguatan konektivitas dan transisi energi listrik, melalui: • Peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan, dengan *output*: pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Nunukan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga yang belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T • Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk
	Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC dan malaria), melalui: • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik, dengan *output*: penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS • Penguatan intervensi sensitif *stunting*, dengan *output*: pengembangan infrastruktur air minum berbasis masyarakat • Intensifikasi penemuan kasus dan pengobatan TBC, dengan *output*: penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit TB di Kota Tarakan • Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS di Kota Tarakan • Pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria di Kota Tarakan
	Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan kualitas pendidikan dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah, melalui: • Pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan *output*: pelatihan berbasis kompetensi di Provinsi Kalimantan Utara • Peningkatan kualitas infrastruktur sosial, dengan *output*: pengembangan gedung perguruan tinggi vokasi yang direvitalisasi di Kabupaten Nunukan • Peserta didik penerima bantuan operasional satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan *output*: penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada siswa Raudlatul Athfal (RA) • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan
	Provinsi Kalimantan Utara	Pengentasan kemiskinan terutama di daerah afirmasi 3T, melalui: • Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi melalui registrasi sosial ekonomi • Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output*: siswa SMTK/SMAK penerima PIP, gerakan pangan murah yang dilaksanakan • Penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif
	Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan, melalui: • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik, dengan *output*: penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS/M • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat

5. Wilayah Sulawesi

5.1 Provinsi Sulawesi Utara

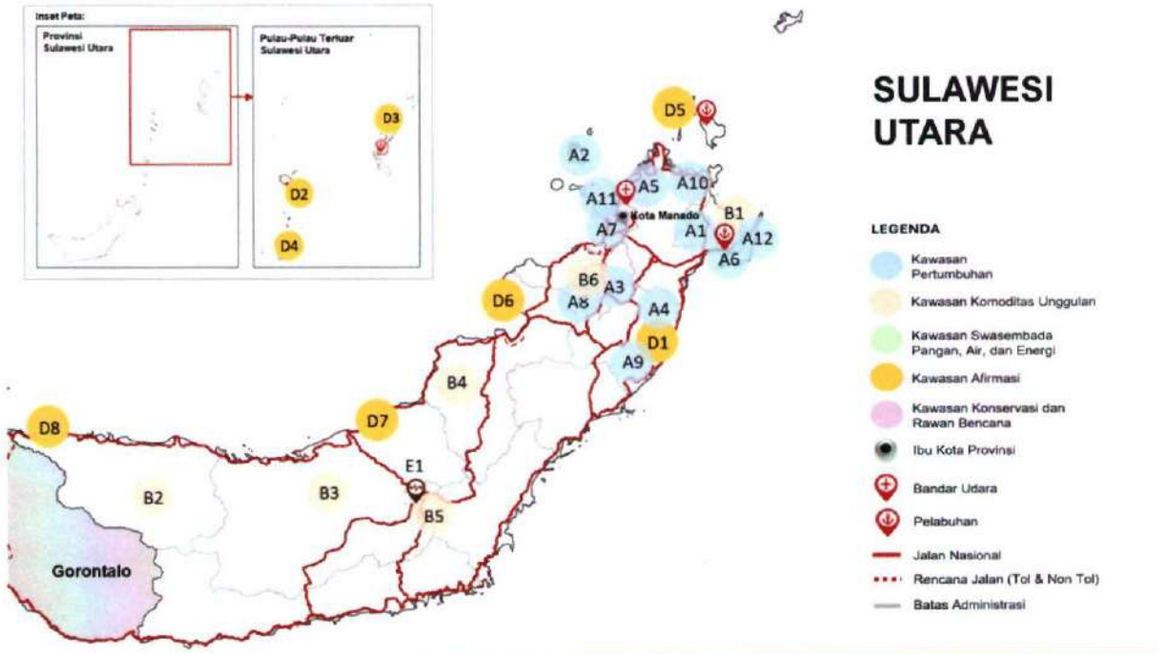

A. Kawasan Pertumbuhan

Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang

1. Kota Bitung
2. Kota Manado
3. Kota Tomohon
4. Kab. Minahasa
5. Kab. Minahasa Utara

Wilayah Metropolitan Manado

6. Kota Bitung
7. Kota Manado
8. Kota Tomohon
9. Kab. Minahasa
10. Kab. Minahasa Utara

Kawasan Perkotaan Sedang

11. Kota Manado
12. Kota Bitung

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Perikanan Tangkap Bitung

1. Kota Bitung

Kawasan Berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya

2. Kab. Bolaang Mongondow Utara
3. Kab. Bolaang Mongondow
4. Kab. Minahasa Selatan
5. Kota Kotamobagu
6. Kota Tomohon

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)

1. KPP MAPALUS, Kabupaten Minahasa

Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas

2. PKSN Tahuna dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Kepulauan Sangihe
3. PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Kepulauan Talaud
4. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
5. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Minahasa Utara
6. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Minahasa Selatan
7. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Bolaang Mongondow
8. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Bolaang Mongondow Utara

E. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara

1. Kota Kotamobagu

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,4 (Rata-rata 2025-2029)	74,4	0,8	5,59 – 6,19	0,339 – 0,352	0,52	54,90	78,71	5,01 – 5,56
2029	8,5 (2029)	109,2	0,8	2,30 – 3,30	0,332 – 0,336	0,55	68,65	79,39	4,66 – 5,14

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2 A3 A4 A5	Destinasi Pariwisata Prioritas Manado–Likupang: • A1: Kota Bitung • A2: Kota Manado • A3: Kota Tomohon • A4: Kabupaten Minahasa • Kabupaten Minahasa A5: Utara	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang dengan implementasi *blue, green, circular economy*, melalui: • Pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi, dengan *output:* pembangunan jalan mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado–Likupang, dan preservasi jalan ruas Airmadidi–Bts. Kota Tondano • Pengembangan atraksi (alam, bahari, budaya, buatan), dengan *output:* pengadaan *event* skala daerah, nasional, dan internasional, penerapan rencana aksi destinasi wisata, pengembangan desa wisata, dan pengadaan *event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas penunjang, dengan *output:* Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) Terpusat Skala Kota dan Regional, serta pembangunan fasilitas Pelabuhan P. Bangka-Kahuku • Pengembangan Keterampilan SDM dan layanan pariwisata, dengan *output:* pelatihan keterampilan SDM pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi wisata, sertifikasi SDM, dan pengembangan Politeknik Negeri Manado • Pemasaran Pariwisata, dengan *output:* publikasi, promosi terpadu, pameran, kerja sama dengan maskapai, dan promosi wisata minat khusus • Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi, dengan *output:* fasilitas akses pembiayaan digital dan pasar modal berkualitas, rantai pasok industri, promosi investasi pariwisata, advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi, literasi bisnis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akses pembiayaan *startup*, transformasi digital industri, standarisasi usaha, koordinasi implementasi *blue, green, circular economy* pada usaha pariwisata, dan fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) • Peningkatan keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana, dengan *output*: pengendali banjir di sungai inlet Danau Tondano, penataan Kawasan Tondano, koordinasi dan penguatan tata kelola destinasi, serta pelaksanaan operasi SAR
A6 A7 A8 A9	Wilayah Metropolitan Manado • A6:Kota Bitung • A7: Kota Manado • A8: Kota Tomohon	Pembangunan Wilayah Metropolitan Manado yang berkelanjutan dalam Sistem Perkotaan Nasional, melalui: • Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan hijau yang berkelanjutan, dengan *output:* sistem angkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi *Transit Oriented Development* (TOD),

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A10	• A9: Kabupaten Minahasa • A10. Kabupaten Minahasa Utara	pembangunan jalan perkotaan dan jalan lingkar Manado *Outer Ring Road* • Peningkatan ketangguhan bencana, pengelolaan risiko dan pengendalian banjir di perkotaan, dengan *output:* penanganan banjir periode kala-ulang 25–50 tahunan • Peningkatan layanan perkotaan dan kualitas lingkungan, dengan *output:* Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, pembangunan rumah susun dan rumah swadaya di perkotaan terpadu dengan PSU perumahan, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh, pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, pengembangan SPAM Regional Bimatara, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Sawangan, TPA Regional Mamitarang, dan PLTSa Kota Manado • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola perkotaan, dengan *output:* pengembangan desa wisata, *pilot project* kerja sama antardaerah dan multipihak dalam pembiayaan pembangunan perkotaan, penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu, penguatan *smart city*, kelembagaan pengelola WM Manado, dan advokasi dalam penerapan PP Perkotaan • Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan, dengan *output*: *Metropolitan Statistical Area*
A11 A12	Kawasan Perkotaan Sedang • A11: Kota Manado • A12: Kota Bitung	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang Kota Manado dan Bitung, dengan *output*: penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk kota sedang, bantuan PSU perumahan, bantuan pembangunan rumah swadaya, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh, pengembangan sanitasi, pembangunan dan peningkatan SPAM, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota dan permukiman, sistem pengelolaan persampahan skala kota, peningkatan layanan konektivitas transportasi, penguatan instrumen peringatan dini bencana, serta penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
B1	Kawasan Perikanan Tangkap Bitung • B1: Kota Bitung	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Bitung, melalui: • Pengembangan pelabuhan perikanan utama Bitung yang berwawasan lingkungan *(Eco Fishing Port)* • Pengembangan sarana penunjang logistik, prasarana perikanan tangkap, dan sistem rantai dingin produk perikanan, dengan *output:* sarana penyimpanan, gudang beku, sarana distribusi logistik, alat penangkapan ikan, dan kendaraan pemasaran ikan • Peningkatan daya saing sumber daya manusia penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan, dengan *output:* diklat pemberdayaan masyarakat, tata kelola budidaya ikan air laut, peningkatan eksportir kelautan perikanan baru, pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan, pelatihan petugas kesyahbandaran, dan pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan • Kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan, dengan *output:* pengembangan klaster ikan nila salin, klaster rumput laut berbasis kawasan, promosi usaha, temu

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		bisnis pada pameran produk di dalam negeri dan internasional, investasi strategis kelautan perikanan termasuk komoditas TCT (Tuna-Cakalang-Tongkol) terpadu, pelatihan intensif *bootcamp* dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, serta kerja sama internasional bidang kelautan dan perikanan
B2 B3 B4 B5 B6	Kawasan Berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya: • B2: Kabupaten Bolaang Mongondow Utara • B3: Kabupaten Bolaang Mongondow • B4: Kabupaten Minahasa Selatan • B5: Kota Kotamobagu • B6: Kota Tomohon	Pengembangan industrialisasi berbasis komoditas unggulan pertanian yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Bolaang Mongondow dan sekitarnya, melalui: • Penguatan akses pasar komoditas pertanian dan turunannya, dengan *output:* sertifikasi dan pengembangan produk mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan, serta pengembangan koridor logistik Worotican-Poigar • Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan *output:* rekomendasi perlindungan LP2B, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, *Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment,* dan pembangunan Bendungan Lolak • Inovasi dan adopsi teknologi pertanian, dengan *output:* percontohan pertanian modern, penerapan teknologi pertanian, pengembangan sistem pertanian terpadu di dataran tinggi, dan pengadaan asuransi pertanian • Implementasi praktik pertanian yang ramah iklim dan rendah karbon, dengan *output:* Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan optimasi lahan pertanian • Pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani, dengan *output:* benih ternak unggul, sarana perbibitan ternak, prasarana perbibitan ternak, ternak ruminansia perah, ternak ruminansia potong, pakan olahan dan bahan pakan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dan layanan kesehatan hewan • Peningkatan ekspor produk pertanian melalui pengembangan koperasi, promosi, dan kerja sama, dengan *output:* pelatihan intensif *bootcamp* dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, Rekomendasi Kebijakan terkait harga patokan ekspor produk pertanian dan kehutanan, *prototyping, piloting project,* dan *business plan* industri suplemen kapsul vitamin a (*betacarotene*), vitamin e (*tocopherol*) alami berbasis minyak sawit, promosi dan temu bisnis pada pameran berskala internasional dalam rangka peningkatan ekspor produk industri makanan, kerja sama pengembangan ekspor produk primer, dan kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kelapa internasional
D1	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) • D1: KPP MAPALUS, Kabupaten Minahasa	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas MAPALUS, Kabupaten Minahasa, melalui: • Penyediaan layanan dasar, dengan *output:* pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat • Peningkatan aksesibilitas, dengan *output:* pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan, pengembangan OM BTS 4G/*Lastmile* dan akses internet • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output:* pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal pariwisata, dengan *output:* preservasi dan resiliensi adat istiadat budaya lokal, pengembangan interaksi pemajuan budaya di wilayah adat, penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim • Peningkatan kapasitas tata kelola dan kelembagaan berbasis *digital*, dengan *output:* pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD
D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas • D2: PKSN Talaud dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kendahe), Kabupaten Kepulauan Sangihe • D3: PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Damau, Kec. Pulutan, dan Kec. Nanusa), Kabupaten Kepulauan Talaud • D4: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Siau Barat, Kec. Siau Barat Utara) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro • D5: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Likupang Barat, Kec. Wori) Kabupaten Minahasa Utara • D6: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tatapan, Kec. Tenga, Kec. Sinonsayang) Kabupaten Minahasa Selatan • D7: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Bolaang Timur) Kabupaten Bolaang Mongondow • D8: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Bolangitang Barat, dan Kec. Pinogaluman) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: • Pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, dan pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan *output*: *replacement* fasilitas Pelabuhan Matutuang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, pengembangan kawasan pala, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
E1	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara • E1: Kota Kotamobagu	Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara, melalui: • Pengelolaan multiancaman bencana geologi dan pengembangan mitigasi berbasis alam, dengan *output:* peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan *intensity meter* dan *accelerograph* melalui Indonesia *Disaster Resilience Initiatives Project* (IDRIP), perapatan stasiun Indonesia *Continuously Operating Reference Station* (Ina-CORS), Peta Geologi Gunung Api dan Kawasan Rawan Bencana Geologi • Peningkatan keandalan infrastruktur berketahanan bencana seismik, dengan *output:* rekomendasi ketahanan bangunan dan penataan bangunan kawasan rawan bencana • Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan *output:* layanan pemulihan sosial, ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan di daerah pascabencana
	Provinsi Sulawesi Utara	Penguatan layanan transportasi dan infrastruktur konektivitas integrasi ekonomi dan logistik, melalui: • Peningkatan layanan konektivitas udara, dengan *output:* bandara di pulau kecil terluar Sangihe dan Talaud • Peningkatan layanan konektivitas laut dan integrasi *hinterland* dengan simpul utama, dengan *output:* pelabuhan perikanan utama Bitung, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Miangas, serta pelabuhan lainnya di pulau terluar yang berwawasan lingkungan • Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output:* Pembangunan Jalan Strategis–Jalan Manado *Outer Ringroad* III, Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan, pengembangan pelabuhan, *Replacement* Fasilitas Pelabuhan Matutuang (MYC 2025-2026), *Replacement* Fasilitas Laut Pelabuhan Kotabunan
	Provinsi Sulawesi Utara	Penyediaan akses rumah layak huni dan pemerataan sarana dan prasarana dasar, serta perluasan jangkauan pelayanan energi di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, melalui: • Peningkatan akses rumah layak huni skala kota secara inklusif dan terpadu, serta penanganan permukiman kumuh, dengan *output:* pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh, serta pemukiman kembali permukiman kumuh, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, penyediaan rumah khusus reguler, Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), bantuan pembangunan rumah swadaya, KPM yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah, bantuan PSU bidang perumahan, fasilitasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan, fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka, dan pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan • Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi hulu ke hilir, dengan *output:* pembangunan SPAM Regional • Reformasi tata kelola persampahan, dengan *output:* teknologi *Waste-to-energy* (WtE) dan fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular, pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, *project* skema insentif, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dan bantuan PSU bidang perumahan • Pemenuhan akses sanitasi aman, dengan *output:* Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat dan Setempat Skala Kota, serta bantuan PSU bidang perumahan • Perluasan akses dan interkoneksi layanan listrik terisolasi (*isolated grid*), dengan *output:* pembangunan pembangkit listrik, jaringan dan gardu

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		induk, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T, dan peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari • Pemerataan jaringan telekomunikasi, internet cepat, dan adopsi digital ke seluruh wilayah serta adopsi *digital* di berbagai layanan publik, dengan *output:* penyediaan fiber optik pada daerah (kecamatan) di kawasan prioritas, OM BTS 4G /*Lastmile*, OM akses internet, layanan publik bidang telekomunikasi, fasilitasi literasi *digital*, portal layanan administrasi, pendampingan *smart city*, pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian, perikanan, dan logistik, fasilitasi digital *technopreneur*, pengendalian PSE, akses internet tetap pitalebar untuk UMKM dan fasilitas umum, serta fasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama
	Provinsi Sulawesi Utara	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, penurunan *stunting*, dan akses kesehatan reproduksi perempuan, melalui: • Percepatan penurunan dan penguatan intervensi spesifik serta sensitif *stunting*, dengan *output:* ibu hamil dan balita yang mendapat *buffer stock*, kegiatan *surveilans* gizi dan KIA, fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, pelatihan *stunting*, kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan *stunting*, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, dengan *output:* daerah yang fasilitasi terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja, vaksin lainnya dan logistik penunjang vaksinasi, model kurikulum yang adaptif dan kontekstual, bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS/M • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia produktif, dengan *output:* pembinaan lembaga dalam penerapan kesehatan kerja, tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitas terkait kesehatan kerja, dan sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia, dengan *output:* penguatan program dalam mendukung indikator usia produktif dan lansia, koordinasi pelayanan kelompok rentan, sosialisasi kesehatan lansia, sistem informasi kesehatan usia produktif dan lansia, dan fasilitasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan upaya kesehatan produktif dan lansia • Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan, dengan *output:* peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) dan KB, Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon), PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja, fasilitasi, Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus, dan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan program kesehatan dan lingkungan yang responsif *gender* (*stunting*/AKI, perubahan iklim, kespro)
	Provinsi Sulawesi Utara	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: • Penuntasan TBC, dengan *output:* obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, purwarupa alat deteksi penyakit, masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, dan layanan informasi dan edukasi TBC • Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output:* koordinasi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS dan layanan deteksi dini dan respons kejadian penyakit menular

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengendalian penyakit malaria, dengan *output:* obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria dan layanan informasi dan edukasi malaria • Pengendalian penyakit kusta, dengan *output:* layanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia dan daerah mendapat pembinaan program kusta dan frambusia di daerah • Pengendalian penyakit rabies, dengan *output:* kemitraan pencegahan dan pengendalian *zoonosis*
	Provinsi Sulawesi Utara	Penguatan akses pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM kesehatan profesional terutama di daerah sulit akses, melalui: • Penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan ekosistem digital di daerah sulit akses, dengan *output:* implementasi layanan *telemedicine*, pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak, serta RS kapal • Pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan *output:* pemenuhan ketersediaan 40 obat esensial dalam JKN, instalasi farmasi Kab/Kota yang menerapkan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar, dan peningkatan ABGCI dalam peningkatan akses obat inovatif • Peningkatan kapasitas dan peran puskesmas, dengan *output:* koordinasi manajemen puskesmas dalam penguatan integrasi layanan primer, tenaga kesehatan yang diorientasi/dilatih manajemen puskesmas, tenaga kesehatan yang diorientasi/diberikan pelatihan (SOPHI), dan pelatihan terkait layanan primer dan rujukan • Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan, dengan *output:* revitalisasi posyandu, sarana puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu) dan Posyandu (SOPHI), pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan pemantauan wilayah dengan pendekatan keluarga • Pengembangan layanan unggulan dan rujukan kesehatan, dengan *output:* pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh Kabupaten/Kota, serta peningkatan RS Tipe D menjadi tipe C di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur • Peningkatan dan pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan profesional terutama di daerah sulit akses dan afirmasi, dengan *output:* akselerasi rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer, pendayagunaan dokter spesialis (SDM), dan peningkatan kompetensi melalui program *fellowship*
	Provinsi Sulawesi Utara	Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia yang siap dunia usaha dan dunia industri, melalui: • Pengembangan sarana, prasarana, perluasan akses pendidikan menengah, tinggi dan vokasi sektor strategis, pengembangan bidang *Science, Technology, Engineering, Art, and Math* (STEAM), peningkatan daya saing riset dan inovasi di berbagai bidang, dengan *output:* revitalisasi sarana dan prasarana pada seluruh jenjang pendidikan termasuk sekolah, madrasah, Politeknik Pariwisata Manado dan Nusa Utara, bangunan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi industri yang ditingkatkan kapasitasnya, Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja, sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta program studi dengan inovasi pembelajaran digital dan berkualitas

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dengan *output:* SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur, sertifikasi profesi bidang pertanian, Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani, pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian, mahasiswa dan lulusan program di kerja sama industri, pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pengembangan kerja sama pelatihan, inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja, pengembangan kurikulum dan metode pelatihan, penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi, tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem *3 in 1* (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi), program kelas industri, fasilitasi pendampingan SMK yang *link and match* dengan industri, pelatihan vokasi industri *upskilling* dan *reskilling*
	Provinsi Sulawesi Utara	Pengentasan kemiskinan, peningkatan ketangguhan keluarga, dan integrasi bantuan sosial yang adaptif dengan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui: • Penguatan JKN dan perlindungan sosial adaptif, dengan *output:* penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, dan korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan • Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, dengan *output:* lembaga posyandu yang ditingkatkan kapasitasnya dalam implementasi 6 SPM, kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang sosial budaya dan kelembagaan di daerah lambat tumbuh, dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat
	Provinsi Sulawesi Utara	Peningkatan ketangguhan bencana di perkotaan, pesisir pantai, dan pulau-pulau kecil terluar, dengan *output:* pembangunan pengaman pantai daerah pesisir dan pulau terluar, pengendalian banjir Wilayah Metropolitan Manado, peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan *intensity meter* dan *accelerograph* melalui IDRIP, penyusunan peta geologi gunung api dan kawasan rawan bencana geologi, dan dokumen harmonisasi RPerpres RDTR KPN

5.2 Provinsi Sulawesi Tengah

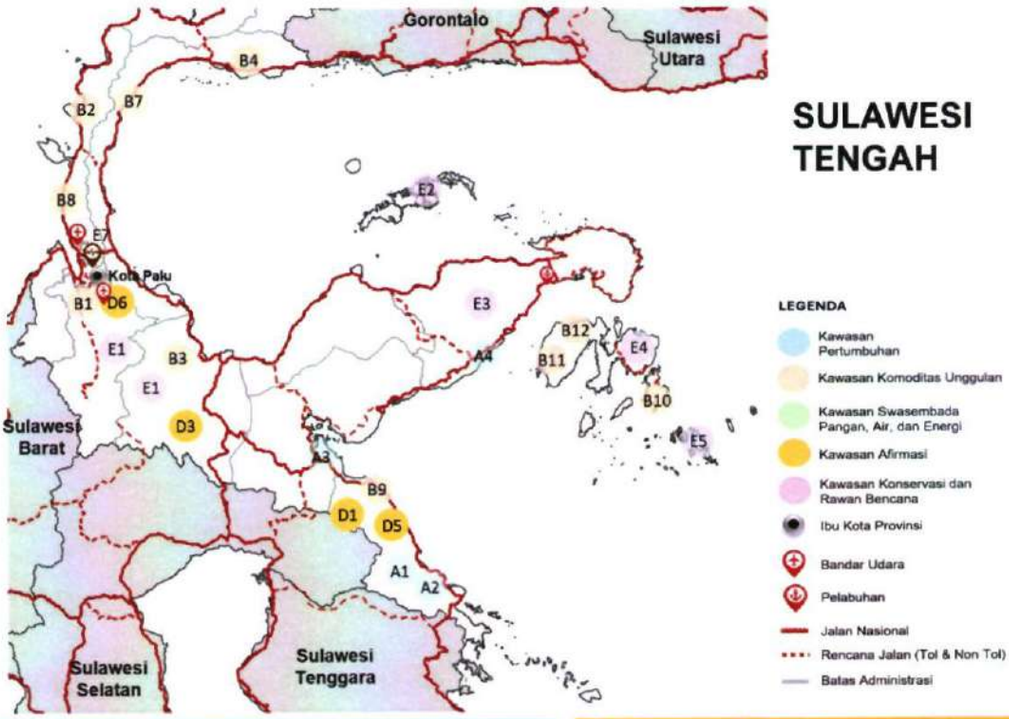

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Morowali (Bahodopi)

1. Kabupaten Morowali

Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara

2. Kabupaten Morowali
3. Kabupaten Morowali Utara

Kawasan Hilirisasi Gas Bumi

4. Kabupaten Banggai

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan

1. Kabupaten Sigi
2. Kabupaten Donggala
3. Kabupaten Poso
4. Kabupaten Parigi Moutong
5. Kabupaten Buol
6. Kabupaten Tolitoli

Kawasan Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT)

7. Kabupaten Parigi Moutong
8. Kabupaten Donggala
9. Kabupaten Morowali
10. Kabupaten Banggai Laut
11. Kabupaten Banggai Kepulauan

Kawasan Sentra Hilirisasi Rumput Laut

12. Kabupaten Banggai Kepulauan

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)

1. KPP Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali

Kecamatan Perbatasan Prioritas

2. Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Buol
3. Kecamatan Perbatasan, Kabupaten Toli-Toli

Kawasan Transmigrasi (KT)

4. KT Tampolore, Kabupaten Poso
5. KT Bungku, Kabupaten Morowali
6. KT Palolo, Kabupaten Sigi

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi:

Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah

1. Taman Nasional Lore Lindu, Kab. Sigi dan Kab. Poso
2. Taman Nasional Kepulauan Togean, Kab. Tojo Una-Una
3. Kabupaten Banggai
4. Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kabupaten Banggai Laut
6. Kabupaten Tolitoli

Kawasan Rawan Bencana:

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

7. Kota Palu

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	12,9 (Rata-rata 2025-2029)	141,8	1,9	11,06 – 11,56	0,298 – 0,302	0,51	77,96	81,75	2,25 – 2,94
2029	14,2 (2029)	258,7	2,4	6,20 – 7,20	0,280 - 0,284	0,55	85,77	82,60	2,09 – 2,72

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Morowali • A1: Kabupaten Morowali	Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Morowali (Bahodopi), dengan *output*: bantuan pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja serta bantuan pembangunan rumah swadaya, pemugaran permukiman kumuh, bantuan prasarana dan sarana umum bidang perumahan, Ruang Terbuka Publik (RTP) Bahomakmur dan Keurea, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, Sistem Pengelolaan Persampahan termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bahodopi, penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, serta penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
A2 A3	Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara • A2: Kabupaten Morowali • A3: Kabupaten Morowali Utara	Penguatan hilirisasi industri berbasis mineral di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, melalui: • Pengembangan Kawasan Industri (KI) Indonesia Huabao *Industrial Park*, Kawasan Industri Morowali, dan Kawasan Industri *Stardust* • Pengembangan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Morowali dan pelebaran jalan akses Bandar Udara Morowali • Peningkatan investasi kawasan, dengan *output*: penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal, percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan dan penataan kawasan industri, serta pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku • Pengembangan kemitraan usaha Pelebaran Jalan Akses Bandar Udara Morowali a dan rantai pasok, dengan *output*: kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka, fasilitasi sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangan, pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar di KI Prioritas, dan inkubasi bisnis untuk pembentukan wirausaha industri • Penyediaan pendidikan dan pelatihan, dengan *output*: pembangunan gedung dan penyediaan peralatan pendidikan tinggi vokasi industri • Pengembangan industri nikel sulfat, dengan *output*: penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel • Pembangunan industri baterai, dengan *output*: fasilitasi industri dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor serta perencanaan dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dengan *output*: fasilitasi industri dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri serta peningkatan investasi dan ekspor, serta fasilitasi dan restrukturisasi mesin/peralatan sentra IKM dan UPT logam, mesin, elektronika, dan alat angkut • Pengembangan industri *stainless steel*, dengan *output*: monitoring dan evaluasi perkembangan industri, fasilitasi peningkatan investasi dan ekspor, serta fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri • Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional untuk mewujudkan komitmen Net Zero Emissions (NZE) nasional, dengan *output*: penurunan emisi Gas Rumah Kaca, pengkajian kebutuhan standar industri hijau, penerapan transisi energi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan sertifikasi industri hijau • Harmonisasi kebijakan industri nikel, dengan *output*: penguatan standarisasi untuk hilirisasi
A4	Kawasan Hilirisasi Gas Bumi Sulawesi Tengah • A4: Kabupaten Banggai	Pengembangan Kawasan Hilirisasi Gas Bumi di Kabupaten Banggai, melalui: • Peningkatan penyediaan dan layanan gas bumi, dengan *output*: fasilitasi pembangunan infrastruktur regasifikasi gas bumi dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) terminal serta dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi • Transformasi kebijakan ekosistem investasi dan hilirisasi, dengan *output*: fasilitasi hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi serta penyusunan rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi
B1 B2 B3 B4 B5 B6	Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Sulawesi Tengah • B1: Kabupaten Sigi • B2: Kabupaten Donggala • B3: Kabupaten Poso • B4: Kabupaten Parigi Moutong • B5: Kabupaten Buol • B6: Kabupaten Tolitoli	Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tolitoli, melalui: • Penguatan konektivitas jalan, dengan *output*: preservasi ruas jalan Tolai–Sausu di Kabupaten Parigi Moutong dan Tagolu–Tentena di Kabupaten Poso • Pemanfaatan sarana prasarana pendukung produksi pertanian, dengan *output*: penyediaan sarana prasarana pascapanen pertanian serta alat dan mesin pertanian pra panen • Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI), dan gangguan lainnya, dengan *output*: pelatihan kelompok tani dan pembentukan regu pengendalian OPT • Peningkatan mutu produk, dengan *output*: sertifikasi produk mutu pestisida dan pelatihan kelompok tani • Penguatan regenerasi petani, dengan *output*: pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur, pelatihan pertanian bagi non aparatur, sertifikasi profesi bidang pertanian, serta pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Pelaksanaan bantuan langsung petani, dengan *output*: pemberian bantuan langsung petani untuk pembelian pupuk serta layanan validasi dan verifikasi pupuk • Teknologi pertanian, dengan *output*: pembangunan irigasi perpipaan pertanian, pembangunan irigasi perpompaan pertanian, pengembangan jaringan irigasi pertanian, serta pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim • Akses pembiayaan inklusif, dengan *output*: fasilitasi/pembinaan/pendampingan akses pembiayaan, penyediaan asuransi pertanian, serta fasilitasi dan pembinaan investasi

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Efisiensi rantai nilai, dengan *output*: fasilitasi pembinaan dan pendampingan efisiensi rantai nilai • Pengembangan hilirisasi kelapa, dengan *output*: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditas perkebunan, sarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan, neraca komoditas kelapa dan produk turunannya, fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri tempurung dan sabut kelapa, inkubasi koperasi, pengembangan industri pengolahan kelapa, restrukturisasi mesin/peralatan industri, dan pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro
B7 B8 B9 B10 B11	Kawasan Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) • B7: Kabupaten Parigi Moutong • B8: Kabupaten Donggala • B9: Kabupaten Morowali • B10: Kabupaten Banggai Laut • B11: Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui: • Penguatan konektivitas laut, dengan *output*: pengembangan Pelabuhan Bungin di Kabupaten Banggai Laut dan Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan • Penguatan konektivitas udara, dengan *output*: optimalisasi serta peningkatan layanan dan prasarana Bandara Banggai Laut di Kabupaten Banggai Laut • Pengembangan input produksi perikanan, dengan *output*: penyaluran benih ikan dan penyaluran calon induk unggul ikan • Pengembangan sarana produksi perikanan, dengan *output*: penyaluran sarana penangkapan dan budidaya ikan • Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan pendampingan masyarakat kelautan dan perikanan, dengan *output*: bantuan sarana pengembangan usaha nelayan, perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan, dan pendanaan usaha nelayan
B12	Kawasan Hilirisasi Rumput Laut Sulawesi Tengah • B12: Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui: • Penguatan konektivitas laut, dengan *output*: Pengembangan Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan • Pengembangan industri hilir rumput laut, dengan *output*: fasilitasi rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, penyaluran bibit rumput laut, dan penyaluran sarana budi daya rumput laut
D1	Kawasan Perdesaan Prioritas • D1: Kabupaten Morowali	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Morowali, melalui: • Penyediaan layanan dasar, dengan *output*: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat • Peningkatan aksesibilitas, dengan *output*: pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan, pengembangan OM BTS 4G/*Lastmile* dan akses internet • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal ekowisata, dengan *output*: preservasi dan resiliensi adat istiadat budaya lokal, pengembangan interaksi pemajuan budaya di wilayah adat, penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim. • Peningkatan kapasitas tata kelola dan kelembagaan berbasis digital, dengan *output*: pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
D2 D3	Kecamatan Perbatasan Prioritas • D2: Kec. Paleleh Barat, Kec. Gadung, Kec. Bokat, Kec. Biau, dan Kec. Karamat, Kabupaten Buol • D3: Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean, dan Kec. Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli	Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas
D4 D5 D6	Kawasan Transmigrasi (KT) • D4: KT Tampolore, Kabupaten Poso • D5: KT Bungku, Kabupaten Morowali • D6: KT Palolo, Kabupaten Sigi	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tampolore di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, dan Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran
E1 E2 E3 E4 E5 E6	Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah • E1: Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Sigi • E2: Taman Nasional Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una • E3: Kabupaten Banggai • E4: Kabupaten Banggai Kepulauan • E5: Kabupaten Banggai Laut • E6. Kabupaten Tolitoli	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Taman Nasional (TN) Lore Lindu serta Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di TN Togean, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tolitoli, melalui: • Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: penyusunan kebijakan penguatan pengelolaan areal dengan keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), fasilitasi pengelolaan taman keanekaragaman hayati untuk peningkatan efektivitas pengelolaan, serta pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasi • Perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir serta pengendalian pemanfaatan ruang laut, dengan *output*: penyusunan kebijakan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di daerah serta pembangunan sistem monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut • Pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil, dengan *output*: bantuan ekonomi produktif pesisir dan pulau-pulau kecil, dokumentasi data dan informasi potensi pesisir dan pulau-pulau kecil serta prasarana/infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil • Penguatan tata kelola industri, wisata bahari, dan jasa kelautan berkelanjutan, dengan *output*: fasilitasi pemetaan potensi biofarmakologi dan pemanfaatan air laut, penyusunan kebijakan berusaha jasa kelautan serta pengelolaan wisata bahari • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: rehabilitasi dan pemulihan ekosistem mangrove, pemulihan padang lamun / terumbu karang serta penyediaan prasarana rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil • Penguatan dan pengelolaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: fasilitasi dan perlindungan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
E7	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Palu • E7: Kota Palu	Pengelolaan kawasan rawan bencana gempa Palukoro, Matano, dan Saluki di Kota Palu, melalui: • Pelayanan peringatan dini multiancaman bencana dan peningkatan infrastruktur, dengan *output*: penguatan instrumen peringatan dini dan sistem informasi bidang kebencanaan • Peningkatan kemampuan adaptif masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan *output*: peningkatan kapasitas masyarakat dalam penguatan tanggap bencana, fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam, serta pembinaan penguatan *respond system* peringatan dini bencana berbasis masyarakat • Peningkatan infrastruktur, dengan *output*: penataan bangunan dan *Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL)* • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik • Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami
	Provinsi Sulawesi Tengah	Pengembangan kawasan sentra garam, melalui: • Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan *output*: korporasi petambak garam yang dikembangkan, verifikasi penyaluran distribusi garam industri ke industri, pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik. • Penguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan *output*: sarana niaga garam rakyat dan lahan garam yang difasilitasi. • Pengembangan korporasi petambak garam.
	Provinsi Sulawesi Tengah	Penguatan konektivitas udara, laut, jalan, dan darat, melalui: • Penguatan infrastruktur konektivitas laut, dengan *output*: peningkatan fasilitas Pelabuhan Bungin dan Pelabuhan Salakan • Penguatan infrastruktur konektivitas jalan, dengan *output*: pembangunan jalan koridor logistik dalam rangka pelaksanaan *Infrastructure Reconstruction Sector Loan* (IRSL)
	Provinsi Sulawesi Tengah	Pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman termasuk penyediaan air minum, listrik, telekomunikasi/internet, dan layanan sanitasi, melalui: • Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z • Peningkatan layanan penyediaan air minum, dengan *output*: pembangunan/peningkatan/perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Kabupaten/Kota, penyediaan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan penyediaan SPAM berbasis masyarakat • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK) dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Peningkatan penyediaan dan layanan listrik, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi, perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Dekarbonisasi penyediaan listrik, dengan *output*: fasilitasi dukungan sektor ketenagalistrikan dalam pencapaian target mitigasi Gas Rumah Kaca sektor energi sub sektor pembangkitan, penyusunan kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral logam dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, pengembangan mitra perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, pengendalian pembangunan pembangkit listrik, pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, dengan *output*: penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Regional/Kota/Permukiman dan penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (SPALD) setempat skala kota/individu • Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah, dengan *output*: penyediaan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah spesifik, pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R oleh pemerintah pusat, optimalisasi sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat • Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: penyediaan prasarana penanggulangan sampah di laut pesisir dan pulau-pulau kecil, bantuan pengembangan desa pesisir bersih, sosialisasi dampak pencemaran kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dan fasilitasi penanganan sampah di wilayah pesisir • Peningkatan kapasitas dan pendanaan pendorong pengelolaan sampah, dengan *output*: penerapan tata kelola persampahan di daerah, penyediaan basis data potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dukungan untuk peningkatan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) , dorongan daerah dalam melakukan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) • Perubahan perilaku untuk pemilahan sampah, dengan *output*: penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan di satuan pendidikan formal, fasilitasi dan pembinaan implementasi 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
	Provinsi Sulawesi Tengah	Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, melalui: • Tata Kelola registrasi sosial ekonomi, dengan *output*: koordinasi strategis penerapan Registrasi Sosial Ekonomi, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk), serta pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial • Pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan *output*: penerapan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial serta pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan • Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, dengan *output*: penyediaan bantuan iuran PBI JKN, bantuan sosial bersyarat bagi keluarga, KIP Kuliah, cadangan pangan pemerintah, dan elpiji 3 kg yang tepat sasaran
	Provinsi Sulawesi Tengah	Eliminasi penyakit endemik *Schistosomiasis* di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso serta peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: • Pengendalian penyakit *Schistosomiasis*, dengan *output*: penyediaan layanan pemantauan untuk pencegahan dan pengendalian *Schistosomiasis*, pembinaan program pengendalian *Schistosomiasis*, serta penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pencegahan dan penurunan *stunting*, dengan *output*: penyediaan makanan tambahan dari *Buffer Stock* untuk balita, pelaksanaan pemantauan gizi dan KIA, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan/ non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, fasilitasi dan pembinaan kepada daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, penerapan konvergensi Pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi, serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir • Penurunan kematian ibu dan anak, dengan *output*: penyediaan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar serta penguatan deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak
	Provinsi Sulawesi Tengah	Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), melalui: • Pembangunan Rumah Sakit lengkap, dengan *output*: Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi • Peningkatan kapasitas puskesmas dan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan serta pelayanan kesehatan di daerah sulit akses, dengan *output*: pengukuran dan pelaporan mutu puskesmas, penyediaan sarana, pemenuhan alat kesehatan, peningkatan ketrampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu, revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan pelayanan berbasis gugus pulau di wilayah kepulauan, dan penyediaan RS Kapal di wilayah kepulauan • Peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kapasitas SDM kesehatan, dengan *output*: akselerasi rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan, dan pelatihan strategis SDM kesehatan di RS Pemerintah • Penguatan tata kelola dan kepesertaan JKN, dengan *output*: koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, pemberian bantuan iuran PBI JKN, dan pemberian bantuan iuran kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)
	Provinsi Sulawesi Tengah	Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi dan pengembangan bidang STEAM, penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, serta melalui: • Penguatan pendidikan menengah vokasi, dengan *output*: pengembangan SMK menjadi pusat keunggulan, dukungan terhadap SMK dalam mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan, pendampingan peningkatan mutu SMK, dukungan terhadap SMK yang mengembangkan pengajaran berbasis pabrik (*Teaching Factory*), dukungan terhadap SDM dalam mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri dan program kelas industri, fasilitasi SMK agar *Link and Match* dengan industri, pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja bagi guru kejuruan, *Upskilling dan Reskilling* berstandar industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi, dan inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang Pendidikan • Peningkatan kontribusi IPTEK dan Inovasi, dengan *output*: pemanfaatan riset bidang pangan, energi, kelautan, manufaktur, bidang kesehatan, dan lain-lain

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Sulawesi Tengah	Pelestarian dan pemajuan ekosistem kebudayaan, melalui: • Pemberdayaan masyarakat dan komunitas adat, dengan *output*: pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta pengembangan wilayah adat sebagai ruang interaksi pemajuan kebudayaan • Perlindungan hutan adat dan tanah ulayat, dengan *output*: penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan bagi satuan pendidikan formal, penyediaan data inventarisasi tanah ulayat, dan pendaftaran tanah ulayat • Penguatan dan pengelolaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: fasilitasi dan perlindungan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil

5.3 Provinsi Sulawesi Selatan

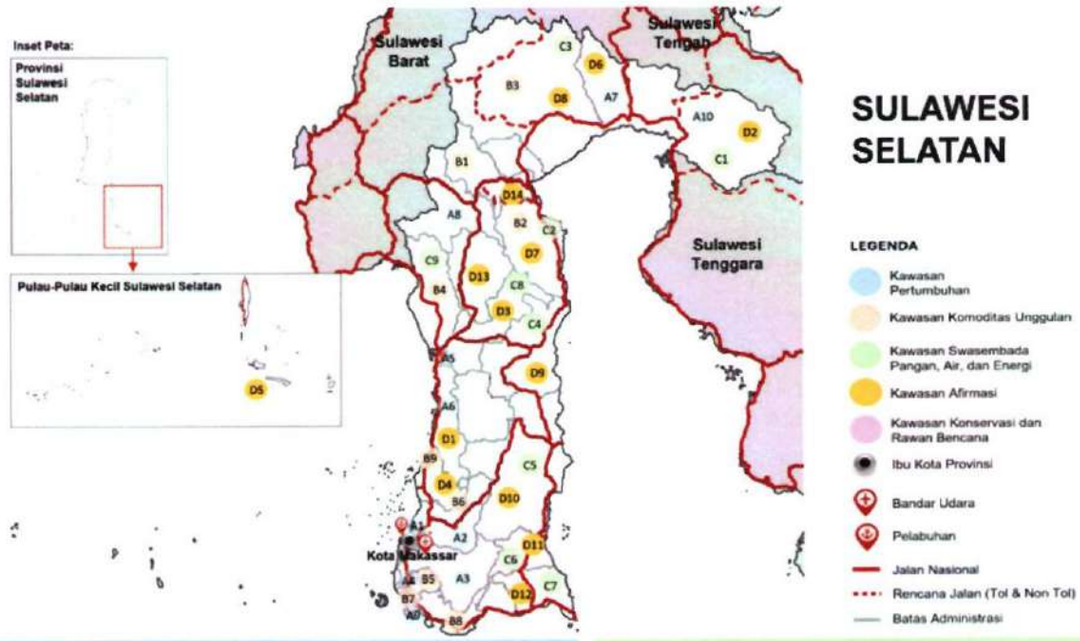

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya

1. Kota Makassar
2. Kabupaten Maros
3. Kabupaten Gowa
4. Kabupaten Takalar
5. Kota Pare-Pare
6. Kabupaten Barru

Kawasan Perkotaan Kecil

7. Kabupaten Luwu Timur
8. Kabupaten Tana Toraja

Kawasan Industri Takalar

9. Kabupaten Takalar

Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako

10. Kabupaten Luwu Timur

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi

1. Kabupaten Toraja Utara
2. Kabupaten. Luwu
3. Kabupaten Luwu Utara
4. Kabupaten Pinrang

Kawasan Perikanan Budidaya dan Sentra Rumput Laut

5. Kabupaten Takalar
6. Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Kawasan Sentra Garam

7. Kabupaten Takalar
8. Kabupaten Jeneponto
9. Kabupaten Pangkajene Kepulauan

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya

1. Kabupaten Luwu Timur
2. Kabupaten Luwu
3. Kabupaten Luwu Utara
4. Kabupaten Wajo
5. Kabupaten Bone
6. Kabupaten Sinjai
7. Kabupaten Bulukumba
8. Kabupaten Sidenreng Rappang
9. Kabupaten Pinrang

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)

1. KPP Agrowisata Gurilla, Kabupaten Barru

Kawasan Transmigrasi (KT)

2. KT Mahalona, Kabupaten Luwu Timur
3. KT Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang

Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan

4. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
5. Kabupaten Kepulauan Selayar

Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya

6. Kabupaten Luwu Timur
7. Kabupaten Luwu
8. Kabupaten Luwu Utara
9. Kabupaten Wajo
10. Kabupaten Bone
11. Kabupaten Sinjai
12. Kabupaten Bulukumba
13. Kabupaten Enrekang
14. Kota Palopo

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,2 (Rata-rata 2025–2029)	80,1	3,2	7,30 – 7,89	0,371 – 0,376	0,53	37,00	77,60	3,80 – 4,10
2029	8,2 (2029)	117,1	3,2	3,49 – 4,49	0,320 – 0,324	0,56	52,05	78,44	3,18 – 3,83

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
A1 A2 A3 A4 A5 A6	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya • A1: Kota Makassar • A2: Kabupaten Maros • A3: Kabupaten Gowa • A4: Kabupaten Takalar • A5: Kota Pare-Pare • A6: Kabupaten Barru	Peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Makassar (Mamminasata) dan sekitarnya yang berkelanjutan, melalui: • Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya, termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar, dengan *output*: bantuan PSU bidang perumahan, bantuan pembangunan rumah susun, pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh, pengembangan SPAM Regional Mamminasata dan Ajatappareng, penataan kawasan strategis dan penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan terpadu di Wilayah Metropolitan Makassar, pemenuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur pembangkit listrik, infrastruktur jaringan transmisi, dan infrastruktur distribusi tenaga listrik, PLTSa Kota Makassar, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk, dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan, dengan *output*: penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, *Digital Talent Scholarship*, pengembangan UIN Alauddin Makassar, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, Pembangunan Gedung PTK Islam Negeri Melalui SBSN dan PBK Provinsi Sulawesi Selatan, sarana dan prasarana bidang Pendidikan Poltekpar Makassar • Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD, dengan *output*: penyelenggaraan layanan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare (KA Makassar–Pare Pare), Jalan Tol Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar, pembangunan jalan perkotaan, pengembangan angkutan umum massal perkotaan di Kota Makassar, pembangunan terminal penumpang Tipe A Mandai, penanganan kinerja lalu lintas perkotaan (Mamminasata *Bypass*), kewajiban pembayaran atas ketersediaan layanan (dukungan/pendampingan KPBU), pembangunan jalan perkotaan, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan • Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas dan terpadu, serta pembentukan kelembagaan (atau forum) pengelola WM Makassar, dengan *output*: daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan, daerah yang dikuatkan tata Kelola *Smart City*-nya • Pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga, khususnya Stadion Sudiang, dengan *output*: Peningkatan prestasi, sarana, dan prasarana olahraga melalui pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		• Kerja sama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antardaerah melalui pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan (*fragmented government*) serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, dengan *output*: pertemuan teknis di daerah dengan pemangku kepentingan dan kesepakatan pemasaran produk perikanan di dalam negeri, *export center* Makassar, serta pengawasan, kerja sama, penguatan dan koordinasi kegiatan perdagangan lingkup regional, nasional dan internasional sesuai dengan komoditas unggulan • Peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir di perkotaan, dengan *output*: Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25–50 tahunan • Peningkatan cadangan dan produktivitas energi, dengan *output*: *North Hub Development Project Selat Makassar* • Penguatan industri transportasi laut, terutama di Kota Makassar, dengan *output*: pengembangan industri galangan kapal sebagai industri berteknologi tinggi, penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan, dan pengembangan mutu dan daya saing industri perkapalan • Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil Kota Makassar, dengan *output*: sarana pendukung penyelenggara konservasi ekosistem, pengelolaan kawasan yang ditingkatkan kompetensinya, *Oceans for Prosperity Project* – LAUTRA • Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan, dengan *output*: *Metropolitan Statistical Area*
A7 A8	Kawasan Perkotaan Kecil • A7: Kabupaten Luwu Timur • A8: Kabupaten Tana Toraja	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil, dengan *output*: penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu di Kota kecil Kabupaten Tana Toraja (Toraja), penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, bantuan peralatan/sarana, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, Pembangunan SPAM kabupaten/kota, bantuan PSU bidang perumahan, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota, dan pengembangan kawasan permukiman pendukung Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako di Luwu Timur
A9	Kawasan Industri Takalar • A9: Kabupaten Takalar	Pengembangan Kawasan Industri Takalar, melalui : • Pembangunan/pengembangan infrastruktur jalan/jembatan, dengan *output*: pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi • Pengembangan sarana prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih dan pengolahan persampahan/limbah), dengan *output*: fasilitasi pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri Takalar • Peningkatan investasi kawasan, dengan *output*: percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan investasi di kawasan ekonomi sebagai lokasi strategis, dan fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri • Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan *output*: pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar • Penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM, dengan *output*: mahasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa dan lulusan program DI Kerja sama Industri – Kota Makassar

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
A10	Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako • A10: Kabupaten Luwu Timur	Pengembangan kawasan dan hilirisasi nikel di smelter terintegrasi tambang Sorowako, Luwu Timur, melalui: • Tata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi, dengan *output*: rekomendasi keprospekan sumber daya mineral, kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral logam dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, dan tingkat implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada subsektor pertambangan mineral, serta hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri • Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional untuk mewujudkan komitmen *Net Zero Emissions* (NZE) nasional, dengan *output*: penurunan emisi Gas Rumah Kaca, pengkajian kebutuhan standar industri hijau, penerapan transisi energi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan sertifikasi industri hijau, dan fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi dan kebijakan penguatan industri logam berbasis nikel • Hilirisasi industri berbasis mineral penting, terutama nikel, dengan *output*: hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri, industri smelter/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi termonitor dan terevaluasi, fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi smelter nikel
B1 B2 B3 B4	Kawasan Perkebunan Kopi dan Kakao • B1: Kabupaten Toraja Utara • B2: Kabupaten. Luwu • B3: Kabupaten Luwu Utara • B4: Kabupaten Pinrang	Pengembangan sentra perkebunan, terutama kopi di Toraja Utara dan kakao di Luwu, Luwu Utara, dan Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan melalui: • Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor, dengan *output:* kawasan kopi dan kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kopi internasional, kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk • Implementasi pertanian rendah karbon, dengan *output:* desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, dengan *output:* fasilitasi hilirisasi investasi, sertifikasi produk mutu pestisida dan pupuk
B5 B6	Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut • B5: Kabupaten Takalar • B6: Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Pengembangan sentra perikanan budidaya dan rumput laut Kabupaten Takalar dan Pangkajene Kepulauan, melalui: • Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut • Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut, dengan *output*: peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan, infrastruktur kawasan budi daya rumput laut - *'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas'* • Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia, dengan *output*: fasilitasi investasi hilirisasi industri, penguatan kapasitas petani, pengembangan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, dan kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut • Pengembangan input produksi rumput laut • Pengembangan sarana dan prasarana produksi rumput laut

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
B7 B8 B9	Kawasan Sentra Garam • B7: Kabupaten Takalar • B8: Kabupaten Jeneponto • B9: Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Pengembangan Kawasan Sentra Garam, melalui: • Pengembangan korporasi petambak garam, dengan *output*: bantuan sarana pengembangan usaha, korporasi petambak garam, dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) • Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan *output*: korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam, dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri • Penguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan *output*: sarana niaga garam rakyat dan lahan garam yang difasilitasi
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9	Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya • C1: Kabupaten Luwu Timur • C2: Kabupaten Luwu • C3: Kabupaten Luwu Utara • C4: Kabupaten Wajo • C5: Kabupaten Bone • C6: Kabupaten Sinjai • C7: Kabupaten Bulukumba • C8: Kabupaten Sidenreng Rappang • C9: Kabupaten Pinrang	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui: • Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana, termasuk Pembangunan Bendungan Rongkong, dengan *output*: pengembangan lahan pertanian produktif, alat dan mesin pertanian, pembangunan DI Gilireng, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi Boya, Daerah Irigasi Saddang yang direhabilitasi, pengembangan jaringan irigasi, pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang direhabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi dan kerja sama di bidang pertanian • Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, dengan *output*: bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarana prasarana kesehatan hewan, dan layanan optimalisasi reproduksi • Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan *output*: rekomendasi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian • Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya, dengan *output*: produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian Sampel *Survaillance* Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang • Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan, dengan *output*: pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pelabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur • Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut, terutama di Kabupaten Luwu, Bone, Wajo, Pinrang dan Luwu Timur • Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan, dengan *output:* diklat pemberdayaan masyarakat, tata kelola budidaya ikan air laut, peningkatan eksportir kelautan perikanan baru, pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan, pelatihan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		petugas kesyahbandaran, dan pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan • Kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan, dengan *output:* pengembangan klaster ikan nila salin dan patin, klaster rumput laut berbasis kawasan, promosi usaha, temu bisnis pada pameran produk di dalam negeri dan internasional, pelatihan intensif *bootcamp* dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, serta kerja sama internasional bidang kelautan dan perikanan
D1	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) • D1: KPP Agrowisata Gurilla, Kabupaten Barru	Peningkatan Kawasan Perdesaan Prioritas Gurilla, melalui: • Penyediaan Layanan Dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi), dengan rincian *output*: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat • Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi), dengan rincian *output*: perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari, dan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan, pendampingan desa, dan pengembangan BUMDesa • Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya), dengan *output*: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, desa wisata di dilayah destinasi II yang dikembangkan, pengembangan dan penguatan tata kelola desa wisata • Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa, dengan *output*: pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD • Peningkatan ketahanan sosial dan lingkungan perdesaan, dengan *output* penguatan desa tanggap bencana dan peningkatan resiliensi adat istiadat, serta budaya nilai lokal
D2 D3	Kawasan Transmigrasi (KT) • D2: KT Mahalona, Kawasan Luwu Timur • D3: KT Pitu Riase, Kawasan Sidenreng Rappang	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kab. Luwu Timur dan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kab. Sidenreng Rappang, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran
D4 D5	Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan • D4: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Pemenuhan infrastruktur dan Pelayanan dasar di Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan (Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kepulauan Selayar), melalui: • Pemenuhan SPAM, sistem pengelolaan air limbah, dan sanitasi, dengan *output*: pemenuhan akses air minum aman dengan pengembangan spam terintegrasi hulu ke hilir, sistem pengelolaan air limbah domestik

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	• D5: Kabupaten Kepulauan Selayar	terpusat skala Kota/Kab dan permukiman, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat, dan pemenuhan akses sanitasi aman • pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan interkoneksi tenaga listrik hingga pedesaan serta penguatan implementasi transisi energi, dengan *output*: pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, peningkatan penyediaan dan layanan listrik bagi rumah tangga belum berlistrik serta penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal 24 jam/hari, PLTS • Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat dan pesisir dari hulu hingga hilir, dengan *output*: fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, pemantauan data dan informasi sampah laut, peningkatan pemahaman masyarakat terkait persampahan, pemenuhan dan pembinaan bank sampah, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) • Penguatan konektivitas laut, dengan *output*: peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, pembangunan kapal patroli, peningkatan fasilitas Pelabuhan Laut Kalatoa dan Jinato • Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: sarana pendukung penyelenggara konservasi ekosistem, pengelolaan kawasan yang ditingkatkan kompetensinya, *Oceans for Prosperity Project* - LAUTRA • Penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan, dengan *output*: terpenuhinya sarana dan prasarana bidang kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, pemenuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan serta implementasi layanan *telemedicine*
D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14	Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya • D6: Kabupaten Luwu Timur • D7: Kabupaten Luwu • D8: Kabupaten Luwu Utara • D9: Kabupaten Wajo • D10: Kabupaten Bone • D11: Kabupaten Sinjai • D12: Kabupaten Bulukumba • D13: Kabupaten Enrekang • D14: Kota Palopo	Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya , melalui: • Pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, dengan *output*: terpenuhinya akses dan pelayanan terkait energi, air minum, sanitasi, persampahan dan penyediaan perumahan • Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi, dengan *output*: jalan dan jembatan koridor logistik, pembangunan dan peningkatan jalan, *replacement* fasilitas Pelabuhan Larea-Rea Sinjai, peningkatan fasilitas Pelabuhan Lampia, pengembangan Pelabuhan Sinjai, pengembangan Bandar Udara Arung Palakka-Bone • Diversifikasi energi, peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan, dan perluasan pemanfaatan *biofuel* (terutama di Kabupaten Bone), dengan *output*: pengembangan bioetanol, PLTMH, PLTS, PLTM, volume *biofuel* untuk domestik, sertifikasi kompetensi tenaga listrik sektor ketenagalistrikan dan EBTKE
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, melalui: • Pengembangan jaringan bandara terpadu, dengan *output*: bandar udara bandar udara perairan, angkutan udara perintis penumpang, termasuk di Seko dan Sorowako, serta Tanatoraja • Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan *output*: layanan angkutan ternak, pembangunan kapal patroli, serta layanan angkutan penyeberangan perintis menuju Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara • Pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan serta Peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan *output*: pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, Pembangunan dan preservasi jalan nasional di jalan lintas provinsi ruas Koppe–Taccipi–Bts. Kota Watampone dan Ujung Lamuru–Koppe; dan ruas Bts. Kota Jeneponto–Bts. Kota Bantaeng, peningkatan dan preservasi jalan daerah, pembangunan *flyover*/*underpass*/terowongan, dan pengembangan terminal Tipe A

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, melalui: • Fasilitasi dan Penyaluran Subsidi/ Bantuan Pembiayaan Perumahan, peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru, dengan *output*: penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, penyediaan rumah khusus reguler dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), rumah susun hunian ASN/TNI/Polri dan MBR/pekerja, fasilitasi subsidi dan bantuan uang muka, pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan terjangkau dan berwawasan lingkungan • Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, dengan *output*: bantuan PSU bidang perumahan • Penanganan permukiman kumuh, dengan *output*: pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh • Pemenuhan kebutuhan air baku, dengan *output*: pembangunan bendungan multiguna (Bendungan Jenelata), pembangunan embung, pembangunan prasarana air baku • Pembangunan serta pemenuhan akses SPAM Terintegrasi, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi, dengan *output*: pemenuhan akses air minum aman, pengembangan SPAM terintegrasi (salah satunya optimalisasi SPAM Curio), sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan permukiman, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat, dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, pemenuhan sanitasi aman • Penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dengan *output*: fasilitasi penanganan sampah, pemantauan data dan informasi sampah, peningkatan kapasitas sumber daya pengelola sampah dan masyarakat, pemenuhan bank sampah, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penerapan ekonomi sirkular, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan pembinaan teknis • Peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dengan *output*: pengawasan dan pengendalian efisiensi penyediaan tenaga Listrik, jaringan transmisi, gardu induk, rekomendasi kebijakan transisi energi global, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T dan peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari • Dekarbonisasi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru terbarukan, dengan *output*: pembangunan PLTMH dan PLTS, rekomendasi pengendalian pembangkit, pengendalian Pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk • Pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM, dengan *output* perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, pengembangan SDM Digital dan digitalisasi masyarakat
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, melalui: • Pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan *output:* Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi, Peningkatan RS Tipe D menjadi tipe C di Kab. Toraja Utara, penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas, dan rumah sakit

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		• Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan *output*: pemenuhan dan peningkatan alat kesehatan, industri obat, vaksin, dan alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik • Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, dengan *output*: penugasan khusus, pelatihan dan bantuan pendidikan SDM kesehatan • Peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, dengan *output*: transformasi digital (TK), implementasi layanan *telemedicine*, dan lembaga yang menggunakan pendekatan biomedis dan genom kesehatan
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta Pencegahan dan penurunan *stunting* dan kematian ibu dan anak melalui: • Penuntasan TBC, dengan *output*: Obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, purwarupa alat deteksi penyakit, masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, dan layanan informasi dan edukasi TBC • Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: Koordinasi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS dan layanan deteksi dini dan respons kejadian penyakit menular • Pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria dan layanan informasi dan edukasi malaria • Pengendalian penyakit kusta, dengan *output*: layanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia dan daerah mendapat pembinaan program kusta dan frambusia di daerah • Pengendalian penyakit rabies, dengan *output*: kemitraan pencegahan dan pengendalian *zoonosis* • Penguatan intervensi spesifik *stunting*, terutama di Jeneponto, Tana Toraja dan Takalar, dengan *output*: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *buffer stock*, tenaga kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, layanan imunisasi pendukung pencapaian *stunting*, kegiatan surveilans gizi dan KIA, fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan *stunting* • Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan, dengan *output* Peningkatan Pelayanan Kespro dan KB, Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon), PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja, dan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Kesehatan dan Lingkungan yang Responsif Gender (*stunting*/AKI, perubahan iklim, kespro)
	Provinsi Sulawesi Selatan	Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui: • Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, termasuk peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan *output*: jaringan irigasi yang direhabilitasi/dibangun, Rehabilitasi Daerah Irigasi Kampili Kabupaten Gowa dan Takalar, Rehabilitasi Daerah Irigasi Kelara Karalloe Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto, pembangunan bendungan, sertifikat benih padi, alat dan mesin pertanian, lahan pertanian pangan produktif, dan pemanfaatan teknologi • Pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, dengan *output*: pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta sarana keamanan dan mutu pangan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		• Fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan *output*: pangan yang terdistribusi, sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan, Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional, dan rekomendasi kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan • Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya, dengan *output*: alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan; pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - *Eco Fishing Port*, pengembangan pelabuhan perikanan UPTD provinsi, pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengembangan sarana pengolahan • Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan, dengan *output*: Sarana Penyimpanan Produk KP; Sarana distribusi logistik produk KP; Gudang Beku dan Kelengkapannya; • Pengembangan pangan akuatik, dengan *output*: pengembangan klaster ikan nila salin, patin, dan pengembangan komoditas udang, dan revitalisasi tambak udang • Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan, dengan *output* diklat pemberdayaan masyarakat, tata kelola budidaya ikan air laut, peningkatan eksportir kelautan perikanan baru, pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan, pelatihan petugas kesyahbandaran, dan pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan • Kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan, dengan *output* pengembangan klaster ikan nila salin dan patin, klaster rumput laut berbasis kawasan, promosi usaha, temu bisnis pada pameran produk di dalam negeri dan internasional, pelatihan intensif *bootcamp* dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, serta kerja sama internasional bidang kelautan dan perikanan • Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, dengan *output*: bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarana prasarana kesehatan hewan, dan layanan optimalisasi reproduksi
	Provinsi Sulawesi Selatan	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, melalui: • Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan perguruan tinggi berbasis teknologi, dengan *output*: revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan vokasi dan perguruan tinggi yang direvitalisasi maupun dibangun • Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan *output*: SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan dan SMK yang mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan dan PBK Provinsi Sulawesi Selatan • Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dengan *output:* SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur, sertifikasi profesi bidang pertanian, Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani, pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian, mahasiswa dan lulusan program di kerja sama industri, pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pengembangan kerja sama pelatihan, inovasi model pembelajaran vokasi

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		mengacu pada dunia kerja, pengembangan kurikulum dan metode pelatihan, penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi, tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem *3 in 1* (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi), program kelas industri, fasilitasi pendampingan SMK yang *link and match* dengan industri, pelatihan vokasi industri *upskilling* dan *reskilling* • Pemagangan industri di dalam dan luar negeri, dengan *output*: peserta yang magang di perusahaan di luar negeri, peserta yang magang di perusahaan dalam negeri, dan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan bersama industri
	Provinsi Sulawesi Selatan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif , melalui: • Pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dengan *output*: koordinasi strategis registrasi sosial ekonomi dan jaringan komunikasi data dan *data center*; penguatan regulasi, monitoring dan pemutakhiran data hingga tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD, pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), dan penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data • Penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output*: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, mahasiswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, bantuan logistik korban bencana alam dan korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan • Pelaksanaan bantuan energi dan pangan, dengan *output*: Gerakan pangan murah yang dilaksanakan, stabilisasi pasokan dan harga pangan
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan ekosistem budaya berbasis *urban heritage*, *rural heritage*, pemanfaatan cagar budaya di kawasan karst (*Geopark* Maros Pangkep), dan revitalisasi budaya Bahari serta pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi (Kabupaten Bulukumba), melalui: • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional, dengan *output*: pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional (salah satunya Festival *Geopark* Maros Pangkep) dan peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan • Pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan, dengan *output*: cagar budaya, ODCB dan OPK yang dilestarikan dan desa pemajuan kebudayaan • Peningkatan Tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: data dan informasi warisan budaya • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis *urban heritage*, dengan *output*: koleksi, cagar budaya nasional, dan benda budaya yang dikelola, pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan pada kawasan karst, pengembangan budaya bahari dengan pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi
	Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, melalui: • Pengendalian risiko bencana di daerah rawan bencana, dengan *output*: Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pengembangan ruang terbuka hijau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana • Pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana, dengan *output*: penguatan desa/kelurahan tangguh bencana • Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan, dengan *output*: kawasan konservasi perairan yang operasional,

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya, destinasi wisata alam yang dikembangkan sarprasnya, dan fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata • Rehabilitasi hutan dan lahan, dengan *output*: rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan, dan rehabilitasi Daerah Tampungan Air (DTA) danau secara vegetatif • Pengendalian daya rusak air, dengan *output*: pembangunan pengendalian banjir dan pengaman pesisir Pantai • Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana, dengan *output*: Sarana SAR *rafting boat*, prasarana *search and rescue* (SAR), pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, dan penataan bangunan kawasan rawan bencana
	Provinsi Sulawesi Selatan	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya, melalui: • Penguatan industri transportasi laut, dengan *output*: pengembangan industri galangan kapal sebagai industri berteknologi tinggi, penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan, dan pengembangan mutu dan daya saing industri perkapalan • Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut, dengan *output*: pengembangan garam industri terintegrasi, penguatan sarana dan prasarana industri garam, dan pengembangan produk olahan laut dan bioprospeksi sumber daya kelautan • Peningkatan produktivitas budidaya rumput laut untuk peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku dalam rangka pengembangan hilirisasi rumput laut, dengan *output*: Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - *'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas* • Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dengan *output*: penguatan rantai pasok industri dalam negeri, pembangunan infrastruktur pengisian daya, pengembangan ekosistem EV, dan penerapan ekonomi sirkular pada industri baterai • Tata kelola dan pengembangan industri dan ketersediaan bahan baku industri nikel, tembaga, bauksit, dengan *output*: kebijakan dan inisiatif terkait penguatan industri logam, hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya mineral, peningkatan daya saing dan produktivitas industri, serta pengawasan dan fasilitasi standar produk • Pengembangan industri hilir, jaminan ketersediaan bahan baku, peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya, dengan *output*: peningkatan kualitas bahan baku, pengembangan teknologi dan pembibitan tanaman unggul, fasilitasi investasi hilirisasi industri, serta penguatan kapasitas petani • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri *medium-high technology*, dengan *output*: verifikasi kemampuan industri kosmetik, penguatan rantai pasok sektor kimia, farmasi, dan tekstil, pengembangan bahan baku obat, penyederhanaan perizinan impor, penyempurnaan kebijakan impor untuk mendukung ketersediaan bahan baku, fasilitasi industri *mold and dies*
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, melalui • Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif • Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik • Penguatan ekosistem fesyen dan kriya • Penguatan ekosistem aplikasi dan gim • Penguatan ekosistem kuliner

5.4 Provinsi Sulawesi Tenggara

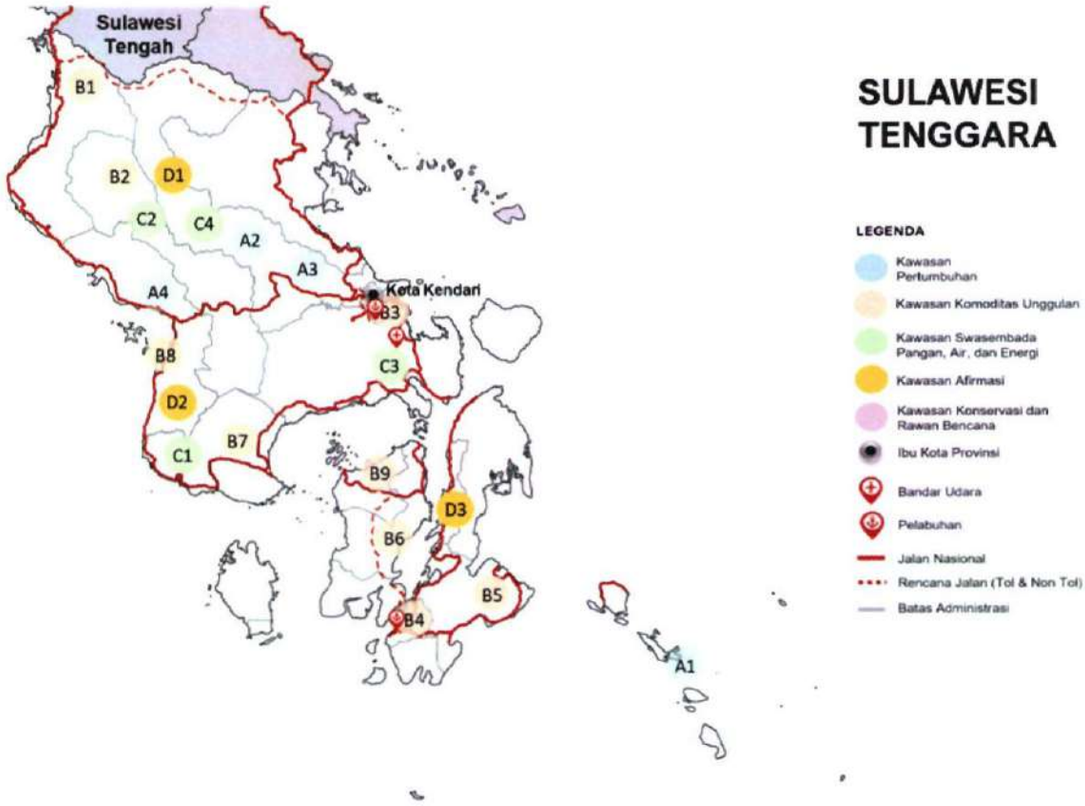

A. Kawasan Pertumbuhan

Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi
1. Kabupaten Wakatobi

Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe
2. Kabupaten Konawe

Kawasan Industri Pengolahan Hasil Tambang
3. Kabupaten Konawe
4. Kabupaten Kolaka

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Perkebunan Kakao
1. Kabupaten Kolaka Utara
2. Kabupaten Kolaka Timur

Kawasan Perikanan Tangkap
3. Kota Kendari
4. Kota Bau-Bau
5. Kabupaten Buton
6. Kabupaten Muna
7. Kabupaten Bombana
8. Kabupaten Kolaka
9. Kabupaten Muna Barat

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi

Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara
1. Kabupaten Bombana
2. Kabupaten Kolaka Timur
3. Kabupaten Konawe Selatan
4. Kabupaten Konawe

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Transmigrasi (KT)
1. KT Asinua, Kabupaten Konawe
2. KT Anawua, Kabupaten Kolaka
3. KT Mutiara, Kabupaten Muna

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,9 (Rata-rata 2025–2029)	73,1	0,9	10,04 – 10,54	0,365 – 0,371	0,53	28,93	82,39	2,54 – 3,04
2029	9,1 (2029)	106,4	0,9	6,60 – 7,60	0,343 – 0,347	0,56	55,12	83,06	2,32 – 2,80

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Destinasi Pariwisata Prioritas: • A1: Kabupaten Wakatobi	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi dengan implementasi *blue, green, circular economy*, melalui: • Pengembangan Aksesibilitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi, dengan *output:* aksesibilitas pariwisata • Pengembangan Atraksi termasuk *event* berkualitas dan warisan Geologi Wakatobi, dengan *output:* pendukungan *event* daerah, pelaksanaan kegiatan nasional dan internasional, provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata, dan jejaring destinasi pariwisata di Sulawesi Tenggara yang dikembangkan • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas Pariwisata Wakatobi, dengan *output:* Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota • Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata Wakatobi, dengan *output:* SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja dan masyarakat yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan peningkatan kapasitas SDM • Pemasaran Pariwisata Wakatobi, dengan *output*: publikasi, promosi terpadu, konten promosi wisata minat khusus, jejaring promosi wisata minat khusus • Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Wakatobi, dengan *output*: fasilitasi akses pembiayaan digital, pembiayaan *startup*, pembiayaan pasar modal, dan pembiayaan pariwisata berkualitas, rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif, advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi, promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif, promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif, transformasi digital industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dan penerapan pariwisata berkelanjutan • Keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana Wakatobi, dengan *output:* pelaksanaan operasi SAR Kota Kendari
A2	Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe: • A2: Kabupaten Konawe (Morosi)	Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Konawe, dengan *output*: penyusunan masterplan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu di kota kecil Kabupaten Konawe, penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, bantuan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja serta bantuan pembangunan rumah swadaya, pemugaran permukiman kumuh, penataan kawasan perkotaan dengan fokus pada penyediaan hunian layak dan terjangku serta pemenuhan layanan dasar air minum, peningkatan kualitas lingkungan melalui pemenuhan layanan persampahan, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A3 A4	Kawasan Industri Pengolahan Hasil Tambang Sulawesi Tenggara • A3: Kabupaten Konawe • A4: Kabupaten Kolaka	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis mineral dan sumber daya alam (nikel dan logam dasar) di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka, melalui: • Pembangunan/pengembangan infrastruktur jalan/jembatan, dengan *output:* Jalan *Shortcut* Kawasan Industri Konawe dan Jembatan Tabanggele - Pebunooha • Pengembangan Industri *Stainless Steel*, dengan *output:* hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri • Pengembangan Industri Nikel Sulfat, dengan *output:* Industri *smelter*/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya • Pembangunan Industri *Battery Precursor* Berbasis NMC (Nikel-Mangan-Kobalt), dengan *output:* Industri *battery precursor* berbasis NMC yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi • Pengembangan Industri Katoda Berbasis Nikel, dengan *output:* industri katoda nikel yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi • Pengembangan Industri *Battery Pack* Berbasis NMC, dengan *output:* industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri • Tata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi, dengan *output:* rekomendasi keprospekan sumber daya mineral • Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen peta jalan dekarbonisasi industri nikel nasional untuk mewujudkan komitmen *Net Zero Emissions* (NZE) nasional • Harmonisasi kebijakan industri nikel, dengan *output:* kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel • Peningkatan penerapan standarisasi di industri nikel, dengan *output:* standar dalam rangka mendukung ekspor dan pengawasan produk • Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan *output:* fasilitasi pendampingan SMK yang *link and match* dengan Industri, pelatihan vokasi industri *upskilling* dan *reskilling*, serta asessor lisensi dan asessor kompetensi • Ketersediaan bahan baku industri logam dasar yang berkualitas dan kompetitif, dengan *output:* neraca penyediaan dan permintaan besi baja, baja paduan, dan produk turunannya nasional • Kepastian pasokan dan harga energi untuk industri logam dasar, dengan *output:* evaluasi pemanfaatan HGBT di industri logam dasar • Peningkatan utilisasi kapasitas terpasang industri besi-baja, dengan *output:* industri logam dalam negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN • Pengembangan Industri *Special Steel*, dengan *output:* Industri *Special Steel* yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi • Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) di Industri Logam Dasar, dengan *output* Fasilitasi Investasi untuk Industri Pemotongan *Scrap* Logam • Optimalisasi penerapan standardisasi di Industri Logam Dasar, dengan *output:* Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Logam • Pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan serta peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan *output:* pembangunan jalan akses KI Konawe • Pengembangan Kawasan Industri Indonesia Pomalaa *Industrial Park* dan Kawasan Industri *Virtue Dragon Nickel Industry* • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
B1 B2	Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara • B1: Kabupaten Kolaka Utara • B2: Kabupaten Kolaka Timur	Pengembangan Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara dengan penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah, melalui: • *On Farm* penguatan produksi komoditas pertanian bahan baku industri prioritas, dengan *output:* kawasan kakao, area penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan • Pembangunan dan pengembangan bandara, dengan *output:* pembangunan Bandara Kolaka Utara
B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9	Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara • B3: Kota Kendari • B4: Kota Bau Bau • B5: Kabupaten Buton • B6: Kabupaten Muna • B7: Kabupaten Bombana • B8: Kabupaten Kolaka • B9: Kabupaten Muna Barat	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara sebagai ekonomi biru berkelanjutan di Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Muna Barat, melalui: • Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap, dengan *output*: alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - *Eco Fishing Port* • Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk Perikanan, dengan *output*: sarana penyimpanan produk kelautan perikanan; sarana distribusi logistik produk kelautan perikanan; gudang beku dan kelengkapannya • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan, dengan *output*: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha, wirausaha kelautan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, UMKM kelautan perikanan yang difasilitasi dalam inkubasi bisnis, pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah, eksportir kelautan perikanan baru yang ditumbuhkan, promosi usaha dan investasi kelautan perikanan, lembaga usaha kelautan perikanan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha • Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan, dengan *output*: pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pelabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur • Pengembangan klaster ikan nila salin, dengan *output*: ikan konsumsi air tawar hasil budidaya yang diproduksi, sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat, benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat • Revitalisasi tambak udang, dengan *output*: klaster kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng, benih udang yang disalurkan ke masyarakat, irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif, sarana budi daya ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat
C1 C2 C3 C4	Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara • C1: Kabupaten Bombana • C2: Kabupaten Kolaka Timur • C3: Kabupaten Konawe Selatan • C4: Kabupaten Konawe	Pengembangan lumbung pangan Sulawesi Tenggara dengan hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berkelanjutan, melalui: • Penerapan teknologi dan penyediaan bahan baku bioindustri agro, dengan *output*: kawasan kakao, kawasan karet, sarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan, dan prasarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan • Penguatan SDM pertanian dan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan *output*: perguruan tinggi sarjana terapan pertanian, SMK pertanian, rekomendasi perlindungan LP2B dan alih fungsi lahan pertanian, dan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan produksi dan pascapanen pangan nabati, dengan *output*: alat dan mesin pertanian, sarana pengolahan dan pascapanen, dan jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi • Penguatan pangan lokal, dengan *output:* sarana pengolahan hasil tanaman pangan dan sarana pascapanen tanaman pangan • Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, dengan *output:* kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan, fasilitasi dan pembinaan lembaga peternakan, fasilitasi dan pembinaan nilai tambah dan daya saing peternakan, *Horticulture Development of Dryland Areas Project, Integrated Coorporation Agriculture Resources Empowerment* • Pembangunan tampungan air, dengan *output:* Bendungan Pelosika
D1 D2 D3	Kawasan Transmigrasi • D1: KT Asinua, Kabupaten Konawe • D2: KT Anawua, Kabupaten Kolaka • D3: KT Mutiara, Kabupaten Muna	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Asinua di Kabupaten Konawe, Kawasan Transmigrasi Anawua di Kabupaten Kolaka, dan Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengembangan hilirisasi rumput laut, melalui: • Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan *output*: rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, infrastruktur kawasan budi daya rumput laut - *'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas'*, dan klaster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat • Pengembangan industri hilir rumput laut, dengan *output*: fasilitasi investasi industri rumput laut bernilai tinggi (Karagenan (polisakarida), Agar, Kosmetik, *Biofuel*, dan Bioplastik) dan pengembangan Biostimulan berbasis rumput laut • Peningkatan rantai nilai rumput laut, dengan *output*: memperkuat koperasi rumput laut untuk memperkuat posisi tawar petani rumput laut dan pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut • Peningkatan kapasitas tenaga kerja di Industri Rumput Laut, dengan *output*: pelatihan dan pendampingan pengolah rumput laut terkait praktik produksi dan pelatihan manajemen usaha rumput laut dengan memprioritaskan peran perempuan • Peningkatan dukungan finansial bagi pembudidaya rumput laut, dengan *output*: insentif fiskal bagi petani yang menggunakan bibit berkualitas dan menerapkan teknik ramah lingkungan dan penyediaan skema kredit mikro dengan bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha rumput laut
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai melalui: • Penguatan rantai pasok industri di dalam negeri (termasuk IKM), dengan *output:* hilirisasi grafit untuk mendukung ekosistem industri *Electric Vehicle* (EV) Nasional; fasilitasi dan pendampingan teknologi dan *skill-set* bagi IKM tier 2 dan tier 3 untuk transisi ke teknologi EV

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan infrastruktur pengisian daya, dengan *output:* Insentif untuk investasi SPKLU; Insentif untuk mendorong peningkatan daya listrik rumah tangga. • Pengembangan ekosistem industri EV Industri KBLBB yang terfasilitasi investasi, dengan *output:* penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi untuk transisi ke arah industri, perjanjian perdagangan untuk kemudahan bahan baku litium, mangan, dan kobalt • Penerapan Ekonomi Sirkular pada Industri Baterai, dengan *output:* fasilitasi investasi untuk industri baterai *recycling*
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui: • Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan *output*: pengembangan fasilitas Pelabuhan Lapuko, pengembangan fasilitas Pelabuhan Sikeli, pengembangan fasilitas Pelabuhan Raha • Pembangunan dan pengembangan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Matahora, Wakatobi; pengembangan Bandar Udara Sangia Nibandera, Kolaka; Pengembangan Bandar Udara Betoambari, Kota Baubau. • Penanganan konektivitas jalan mendukung wilayah tertinggal dan perbatasan, dengan *output:* Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Provinsi Sulawesi Tenggara • Pembangunan jalan lingkar perkotaan, dengan *output*: Pembangunan Jalan Perkotaan - Provinsi Sulawesi Tenggara • Pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, dengan *output*: pembangunan sistem angkutan umum massal • Pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan serta Peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan *output*: peningkatan keselamatan angkutan darat dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, pembangunan jalan dengan ruas BTS. Kab. Kolaka/Kab. Bombana–Boepinang, Wolo–BTS. Kota Kolaka, Boepinang–Bambaea, pembangunan jembatan strategis, peningkatan dan preservasi jalan daerah, terminal barang dan penumpang, Pembangunan terminal barang internasional, pengembangan terminal Tipe A • Pembangunan Sarana Angkutan Penyeberangan, dengan *output:* pembangunan kapal penyeberangan
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, melalui: • Peningkatan penyediaan dan layanan listrik, dengan *output:* pengendalian pembangunan pembangkit listrik, rumusan kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik, pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk, pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi • Peningkatan konektivitas ketenagalistrikan dan digitalisasi, dengan *output*: pengawasan dan pengendalian efisiensi penyediaan tenaga Listrik, jaringan transmisi, gardu induk, rekomendasi kebijakan transisi energi global, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T dan peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari; • Dekarbonisasi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk terbarukan beban dasar dan variabel, dengan *output*: pembangunan PLTMH dan PLTS, rekomendasi pengendalian pembangkit, pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk; • Penguatan infrastruktur telekomunikasi, dengan *output*: OM Palapa *Ring*, kerja sama badan usaha, dibangunnya 4G oleh operator,

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		percepatan teknologi dan pos digital, pembangunan transmisi, regulasi dan dukungan infrastruktur digital • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan *output*: penyediaan fiber optik pada daerah (kecamatan) di kawasan prioritas, OM pusat monitoring telekomunikasi, pos dan penyiaran, layanan publik bidang telekomunikasi, kabupaten/kota yang difasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat • Perluasan layanan penyiaran digital • Pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik • Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi aman, dan pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir berbasis ekonomi sirkular, melalui: • Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan *output*: pembangunan SPAM Kabupaten/Kota, pembangunan SPAM regional, peningkatan SPAM Kabupaten/Kota, peningkatan SPAM regional, perluasan SPAM kabupaten/kota, pembinaan teknis bidang air minum, dan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan SPAM, dengan *output*: pembinaan dan pengawasan pengembangan SPAM, daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum berdasarkan tipologi daerah • Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk berkelanjutan, dan berketahanan iklim masyarakat, dengan *output*: sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman, dan berbasis masyarakat, serta sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota • Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif, dengan *output*: rehabilitasi daerah irigasi multikomoditas • Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular, dengan *output*: persiapan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 (*E-Waste*), pemanfaatan teknologi *recycling* plastik daur ulang, fasilitas pengelolaan sampah spesifik • Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah, dengan *output*: pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik yang terbangun, jumlah fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R oleh pemerintah pusat yang terbangun, sistem pengelolaan persampahan skala regional, sistem pengelolaan persampahan skala kota, sistem pengelolaan persampahan skala kawasan
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan, termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit menular lainnya, Pencegahan dan penurunan *stunting* dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita, melalui: • Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan *output*: pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak, NSPK pelayanan kesehatan bergerak, penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin, peningkatan RSUD tipe D menjadi C, dan penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN • Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, termasuk untuk menekan angka kematian ibu dan anak, dengan *output*: pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak), peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA, fasilitasi pengelolaan manajemen proyek

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		penguatan pelayanan KIA, pemenuhan SPA dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA, fasilitasi dan pembinaan lembaga, dan alat kesehatan layanan kanker terpadu • Peningkatan produksi SDM kesehatan, dengan *output*: rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan pendidikan PPDS, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama, sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspesialis, dan bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan • Penguatan intervensi spesifik dan sensitif *stunting*, dengan *output*: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *Buffer Stock*, tenaga kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, dan layanan imunisasi pendukung pencapaian *stunting* • Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), dengan *output:* alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, obat dan perbekalan program pengendalian, serta data dan informasi malaria; bahan dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, pelayanan pengobatan, paket penyediaan alat dan reagen, serta obat dan perbekalan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS; tenaga kesehatan terlatih untuk pencegahan dan pengendalian, layanan *skrining mobile* dan fasyankes, layanan pencegahan dan pengendalian, serta alat, bahan, dan paket vaksin TBC; alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, penyediaan obat dan logistik *Multi Drug Therapy* (MDT), pendampingan dan pemantauan pengobatan, pemberian obat pencegahan, dan pemantauan penderita kusta pasca pengobatan
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, melalui: • Fasilitasi dan penyaluran subsidi/ bantuan pembiayaan perumahan, peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru, dengan *output*: penyediaan rumah khusus reguler dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), rumah susun hunian ASN/TNI/Polri dan MBR/pekerja, fasilitasi subsidi dan bantuan uang muka, pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan terjangkau dan berwawasan lingkungan • Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, dengan *output*: Bantuan PSU Bidang Perumahan • Penanganan permukiman kumuh, dengan *output*: pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Penguatan pendidikan, pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal, melalui: • Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan perguruan tinggi berbasis teknologi, dengan *output*: sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi dan prasarana perguruan tinggi yang dibangun, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah • Pemagangan industri di dalam dan luar negeri, dengan *output*: peserta yang magang di perusahaan di luar negeri, peserta yang magang di perusahaan dalam negeri, dan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan bersama industri • Pelatihan vokasi di sektor strategis yang didukung penjaminan mutu pendidikan, dengan *output*: pelatihan vokasi bidang pertanian dan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		perikanan, pelatihan vokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, pelatihan peningkatan produktivitas, pelatihan vokasi industri *upskilling dan reskilling*, PBK Provinsi Sulawesi Tenggara, penjaminan mutu satuan pendidikan, dokumen *tracer study*, rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor industri, pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran, dan standar pelatihan berbasis kompetensi • Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan *output*: SMK mengembangkan pusat keunggulan, mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan, mendapatkan pendampingan peningkatan mutu, dan mengembangkan pengajaran berbasis pabrik, SDM mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, program kelas industri, dan fasilitasi pendampingan *link and match* SMK dengan industri • Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK, dengan *output*: pelatihan kurikulum DUDI untuk guru kejuruan, *upskilling dan reskilling* pendidik dan tenaga kependidikan, inovasi model pembelajaran vokasi berbasis dunia kerja, prasarana dan sarana pendukung pembelajaran, dan siswa SMK yang tersertifikasi • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang Pendidikan
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui: • Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan *output*: bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat, Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula tematik, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan • Penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan revitalisasi dana sosial keagamaan, dengan *output*: keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, warga masyarakat rawan bencana sosial yang mendapat bantuan, dan lembaga Amil Zakat dan Nadzir Wakaf yang dibina dan diperkuat literasi program pengentasan kemiskinan • Pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dengan *output*: koordinasi strategis registrasi sosial ekonomi dan jaringan komunikasi data dan *data center*, penguatan regulasi, monitoring dan pemutakhiran data hingga tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD, pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT), dan penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data; • Penguatan JKN dan perlindungan sosial adaptif, dengan *output*: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, dan korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan. • Pelaksanaan bantuan energi dan pangan, dengan *output*: Gerakan pangan murah yang dilaksanakan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, • Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara inklusif dengan *output* Pembinaan Kelompok Pekerja Bukan Penerima upah dalam Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;, Fasilitasi Dialog Regulasi Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pelaku Hubungan Industrial, Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan • Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain dengan *output* Layanan atas Pengaduan Masyarakat terkait Pelanggaran Hak Anak, Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan Permakanan, Penyandang Disabilitas yang

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		mendapatkan Bantuan Permakanan dan Anak YAPI yang mendapatkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui: • Peningkatan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dengan *output*: Rekomendasi kebijakan PDRD, daerah dengan proporsi PDRD terhadap PAD meningkat, dan basis data potensi PDRD • Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan non utang yang inovatif, dengan *output*: penatausahaan BMD secara wajar, proporsi kontribusi BUMD yang meningkat, dan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) • Pengembangan instrumen pembiayaan utang daerah, dengan *output*: daerah yang difasilitasi dalam menerbitkan obligasi/sukuk daerah dan memanfaatkan pinjaman daerah

5.5 Provinsi Gorontalo

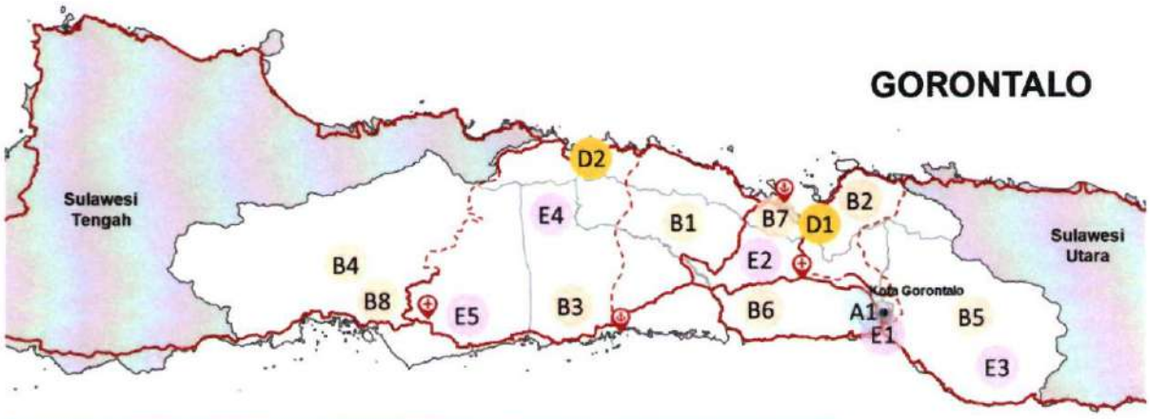

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Perkotaan Sedang Kota Gorontalo
1. Kota Gorontalo

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura
1. Kabupaten Gorontalo
2. Kabupaten Gorontalo Utara
3. Kabupaten Boalemo
4. Kabupaten Pohuwato
5. Kabupaten Bone Bolango

Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Kelapa
6. Kabupaten Gorontalo
7. Kabupaten Gorontalo Utara

Kawasan Sentra Garam
8. Kabupaten Pohuwato

LEGENDA
- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

D. Kawasan Afirmasi

Kecamatan Perbatasan Prioritas
1. Kabupaten Gorontalo Utara

Kawasan Transmigrasi (KT)
2. KT Sumulata, Kabupaten Gorontalo Utara

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Pesisir dan Konservasi Teluk Gorontalo, dsk
1. Kota Gorontalo
2. Kabupaten Gorontalo
3. Kabupaten Bone Bolango
4. Kabupaten Boalemo
5. Kabupaten Pohuwato

Sasaran Pembangunan Provinsi Gorontalo

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,8 (Rata-rata 2025–2029)	47,6	0,2	14,21 – 14,50	0,394 – 0,400	0,50	59,98	81,48	2,87 – 3,08
2029	6,7 (2029)	65,2	0,2	9,50 – 10,50	0,384 – 0,393	0,54	81,44	82,15	2,00 – 2,74

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Perkotaan Sedang Kota Gorontalo • A1: Kota Gorontalo	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kota Gorontalo, melalui: • Pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang Kota Gorontalo, dengan *output*: penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu, bantuan PSU perumahan, bantuan pembangunan rumah swadaya, pembangunan rumah susun hunian untuk ASN/TNI/POLRI, MBR dan pekerja, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, peremajaan, pemugaran, dan pemukiman kembali permukiman kumuh, pengembangan sanitasi, pembangunan dan peningkatan SPAM, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota dan permukiman, sistem pengelolaan persampahan skala kota, penguatan instrumen peringatan dini bencana, preservasi jalan akses simpul transportasi Jalan Kota Gorontalo - Limboto – Isimu, penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, penyediaan ruang terbuka hijau, serta penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penanganan Banjir Kota Gorontalo
B1 B2 B3 B4 B5	Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura • B1: Kabupaten Gorontalo • B2: Kabupaten Gorontalo Utara • B3: Kabupaten Boalemo • B4: Kabupaten Pohuwato • B5: Kabupaten Bone Bolango	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, melalui: • Pengembangan pangan nabati dan penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah, dengan *output*: area penyaluran benih jagung dan padi, sertifikat benih jagung dan padi, kawasan padi, kawasan aneka cabai, serta alat dan mesin pertanian • Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan *output*: penuntasan pembangunan Bendungan Bulango Ulu, pembangunan jaringan irigasi, dan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi • Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output*: peningkatan jalan dan jembatan koridor logistik Paguyaman–Tabulo, Isimu–Paguyaman, dan Taludaa–Pelabuhan Gorontalo, pembangunan jalan koridor logistik, pembangunan jalan akses simpul transportasi, serta pendampingan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait Pelabuhan Anggrek • Penguatan SDM pertanian dan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan masyarakat perdesaan, pendidikan tinggi vokasi pertanian, pendidikan menengah vokasi pertanian, rumah pengolah pupuk organik, dan pengembangan lahan pertanian produktif

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
B6 B7	Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Kelapa • B6: Kabupaten Gorontalo • B7: Kabupaten Gorontalo Utara	Pengembangan Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Kelapa, melalui: • Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa, dengan *output*: kawasan kelapa, sarana dan prasarana pascapanen, sarana dan prasarana pengolahan, dan produksi benih tanaman perkebunan • Peningkatan daya saing produk kelapa yang disertai peningkatan industri pengolahan kelapa, dengan *output*: pengembangan industri pengolahan kelapa produk hilir, fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri tempurung dan sabut kelapa, neraca komoditas kelapa, pengembangan industri pengolahan kelapa, pendampingan pembiayaan usaha mikro, peningkatan peluang investasi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi
B8	Kawasan Sentra Garam • B8: Kabupaten Pohuwato	Pengembangan Kawasan Sentra Garam, melalui: • Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan *output*: korporasi petambak garam yang dikembangkan, verifikasi penyaluran distribusi garam industri ke industri, pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik • Penguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan *output*: sarana niaga garam rakyat dan lahan garam yang difasilitasi
D1	Kecamatan Perbatasan Prioritas • D1: Kec. Gentuma Raya, Kec. Tomilito, Kec. Ponelo Kepulauan, Kec. Anggrek, Kec. Monano, Kec. Sumalata Timur, Kec. Biau, dan Kec. Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara	Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga, dan pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan
D2	Kawasan Transmigrasi • D2: Kawasan Transmigrasi Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran
E1 E2 E3 E4 E5	Kawasan Pesisir dan Konservasi Teluk Gorontalo, dsk • E1: Kota Gorontalo • E2: Kabupaten Gorontalo • E3: Kabupaten Bone Bolango • E4: Kabupaten Boalemo • E5: Kabupaten Pohuwato	Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Teluk Gorontalo dan sekitarnya melalui: • Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan, dengan *output*: kawasan konservasi perairan yang operasional, pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya, destinasi wisata alam yang dikembangkan sarana dan prasarananya, dan fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata • Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem, dengan *output*: rekomendasi penetapan status *Geopark* nasional dan pengembangan pola pendanaan pengembangan *Geopark* • Rehabilitasi hutan dan lahan, dengan *output*: rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan, dan rehabilitasi Daerah Tampungan Air (DTA) danau secara vegetatif

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengendalian daya rusak air, dengan *output*: pembangunan pengendalian banjir dan pengaman pesisir pantai • Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana, dengan *output*: Sarana *search and rescue* (SAR) *rafting boat*, prasarana SAR, pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, dan penataan bangunan kawasan rawan bencana
	Provinsi Gorontalo	Pengembangan permukiman yang didukung dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, peningkatan kapasitas dan jaringan listrik, serta penguatan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi, melalui: • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir, dengan *output*: pembangunan, peningkatan, dan perluasan SPAM Regional, Kabupaten/Kota, dan berbasis masyarakat • Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, dengan *output*: sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman, dan berbasis masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi • Peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan penerapan ekonomi sirkular secara partisipatif, dengan *output*: sistem pengelolaan persampahan skala regional, skala kota, skala kawasan, dan berbasis masyarakat, fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis 3R dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), pemanfaatan teknologi *recycling* plastik daur ulang, pembangunan dan pembinaan bank sampah induk dan masyarakat pengelola sampah • Penerapan ekonomi sirkular secara partisipatif, dengan *output*: fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis 3R, pemanfaatan teknologi *recycling* plastik daur ulang, pembangunan dan pembinaan bank sampah induk dan masyarakat pengelola sampah • Pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan, dengan *output:* pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM) dan pengawasan-evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan listrik • Pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan *output*: Kerja sama Badan Usaha, OM BTS 4G/*Lastmile*, Fasilitasi penerapan infrastruktur pasif bersama, OM akses internet, OM SATRIA 1. Layanan publik bidang telekomunikasi, Sistem perizinan telekomunikasi (OM), Perangkat pengukuran QoS telekomunikasi dan penyiaran, dan Pusat monitoring telekomunikasi, pos dan penyiaran • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dengan *output*: Sosialisasi informasi kebijakan di bidang perdagangan melalui sistem, inisiatif baru bimbingan teknis pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE, dan fasilitasi literasi digital sektor pertanian dan perikanan • Perluasan layanan penyiaran digital, dengan *output*: pembangunan transmisi dan multipleksing, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas teknik, peralatan teknik produksi dan penyiaran, penyediaan infrastruktur teknologi informatika, *multiplatform* OTT, manajemen arsip digital, revitalisasi perangkat siaran, dan prasarana *digital broadcasting system* (DBS dan OM) • Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Gorontalo	Penguatan konektivitas dan layanan transportasi yang integrasi dengan pengembangan wilayah untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui: • Penguatan konektivitas jalan, dengan *output*: peningkatan jalan dan jembatan koridor logistik Paguyaman–Tabulo, Isimu–Paguyaman, dan Taludaa–Pel. Gorontalo, pembangunan jalan koridor logistik, pembangunan jalan akses simpul transportasi, dan pembangunan *Gorontalo Outer Ring Road* (GORR) segmen 3 • Pembangunan dan pengembangan pelabuhan, dengan *output*: pendampingan KPBU Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan penyeberangan • Penguatan infrastruktur konektivitas udara, dengan *output*: pengembangan bandar udara
	Provinsi Gorontalo	Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola pelayanan kesehatan melalui: • Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan *output*: pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan bergerak, penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pelaksana pelayanan telemedisin, peningkatan RSUD tipe D menjadi C, dan penduduk penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN) • Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan *output*: pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak), peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA, fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA, pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA, fasilitasi dan pembinaan lembaga, dan alat kesehatan layanan kanker terpadu • Penurunan kematian ibu dan anak melalui seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak • Peningkatan produksi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dengan *output*: rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama, sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspesialis, dan bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan
	Provinsi Gorontalo	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta pencegahan dan penurunan *stunting* melalui : • Pengendalian penyakit Malaria, dengan *output*: alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, obat dan perbekalan program pengendalian, serta data dan informasi malaria • Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: bahan dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, pelayanan pengobatan, paket penyediaan alat dan reagen, serta obat dan perbekalan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS • Peningkatan upaya pencegahan TBC, dengan *output*: tenaga kesehatan terlatih untuk pencegahan dan pengendalian, layanan *skrining mobile* dan fasyankes, layanan pencegahan dan pengendalian, serta alat, bahan, dan paket vaksin TBC • Pengendalian penyakit Kusta, dengan *output*: alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, penyediaan obat dan logistik *Multi Drug Therapy* (MDT), pendampingan dan pemantauan pengobatan, pemberian obat pencegahan, dan pemantauan penderita kusta pasca pengobatan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan intervensi spesifik dan sensitif *stunting*, dengan *output*: Ibu Hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *Buffer Stock*, Tenaga Kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, dan layanan imunisasi pendukung pencapaian *stunting*
	Provinsi Gorontalo	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal melalui: • Pelatihan vokasi di sektor strategis yang didukung penjaminan mutu pendidikan, dengan *output*: revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan, pelatihan vokasi bidang pertanian dan perikanan, pelatihan vokasi di Provinsi Gorontalo, pelatihan peningkatan produktivitas, pelatihan vokasi industri *upskilling* dan *reskilling*, pelatihan berbasis kompetensi (PBK) Provinsi Gorontalo, penjaminan mutu satuan pendidikan, dokumen *tracer study*, rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor industri, pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran, dan standar pelatihan berbasis kompetensi • Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan *output*: SMK mengembangkan pusat keunggulan, mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan, mendapatkan pendampingan peningkatan mutu, dan mengembangkan pengajaran berbasis pabrik, SDM mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, program kelas industri, dan fasilitasi pendampingan *link and match* SMK dengan industri • Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK, dengan *output*: pelatihan kurikulum dunia kerja dunia usaha (DUDI) untuk guru kejuruan, *upskilling* dan *reskilling* pendidik dan tenaga kependidikan, inovasi model pembelajaran vokasi berbasis dunia kerja, prasarana dan sarana pendukung pembelajaran, dan siswa SMK yang tersertifikasi
	Provinsi Gorontalo	Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat melalui: • Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dengan *output*: pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, *mustahiq* yang diselaraskan datanya, dan aparatur yang mengikuti pengembangan perencanaan dan standar pelayanan minimal (SPM) • Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan *output*: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, tenaga kerja mandiri (TKM) pemula, pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan, dan bantuan alat dan mesin pertanian pra panen • Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output*: penerima bantuan iuran PBI JKN, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, mahasiswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, dan bantuan logistik korban bencana alam
	Provinsi Gorontalo	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas perikanan dan peternakan, melalui: • Pengembangan sarana penunjang logistik, prasarana perikanan tangkap, dan sistem rantai dingin produk perikanan, dengan *output*: pelabuhan perikanan yang dikembangkan, sarana penyimpanan, gudang beku, sarana distribusi logistik, alat dan sarana penangkapan ikan, dan kendaraan pemasaran ikan. • Peningkatan daya saing sumber daya manusia penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan, dengan *output*: diklat pemberdayaan masyarakat, tata kelola budidaya ikan air laut, peningkatan eksportir kelautan perikanan baru, pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan, pelatihan petugas

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		kesyahbandaran, serta pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan. • Kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan, dengan *output*: promosi usaha, investasi strategis KP termasuk komoditas TCT (Tuna-Cakalang-Tongkol) terpadu, pelatihan intensif *bootcamp* dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, serta kerja sama internasional bidang kelautan dan perikanan. • Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, dengan *output*: bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, sertifikasi benih/bibit ternak, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarana prasarana kesehatan hewan, dan layanan optimalisasi reproduksi.

5.6 Provinsi Sulawesi Barat

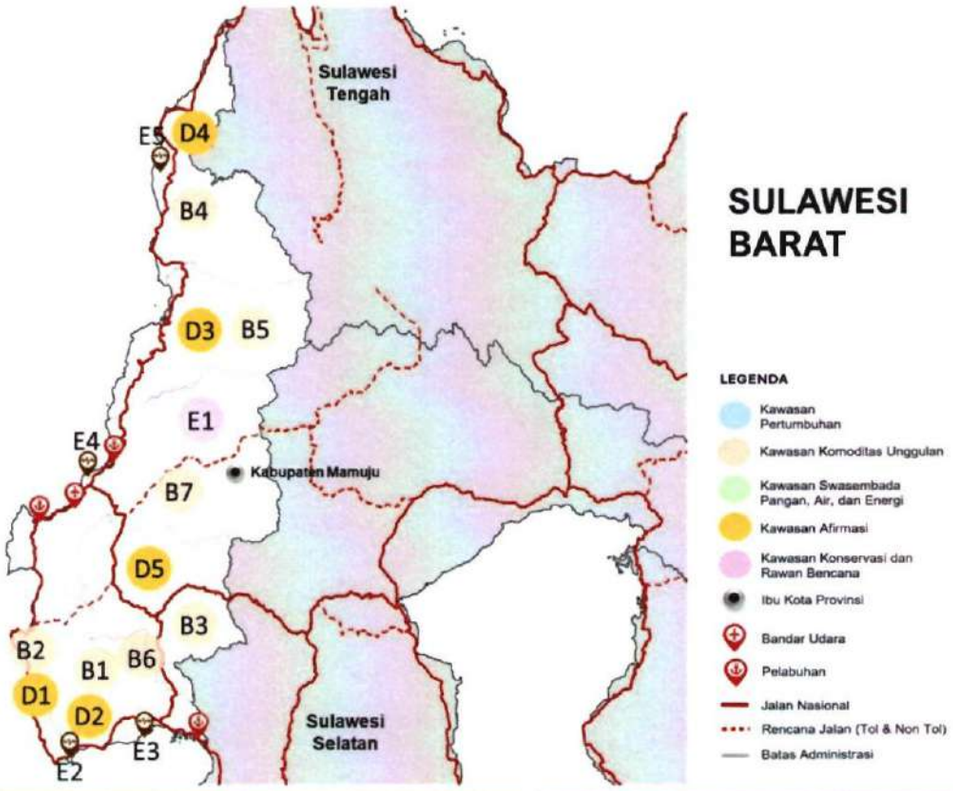

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi
1. Kabupaten Polewali Mandar
2. Kabupaten Majene
3. Kabupaten Mamasa
4. Kabupaten Pasangkayu
5. Kabupaten Mamuju Tengah

Kawasan Perikanan Budidaya
6. Kabupaten Polewali Mandar
7. Kabupaten Mamuju

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Transmigrasi (KT)
1. KT Ulumanda, Kabupaten Majene
2. KT Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar
3. KT Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah
4. KT Sarudu Baras, Kabupaten Pasangkayu
5. KT Mambi Mahelaan, Kabupaten Mamasa

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi
Kawasan Konservasi dan Pengembangan Pulau Kecil
1. Kabupaten Mamuju

Kawasan Rawan Bencana
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Makassar Strait Sulawesi Barat
2. Kabupaten Majene
3. Kabupaten Polewali Mandar
4. Kabupaten Mamuju
5. Kabupaten Pasangkayu

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,5 (Rata-rata 2025–2029)	43,8	0,3	9,00 – 9,73	0,345 – 0,349	0,51	61,65	84,82	1,41 – 2,00
2029	6,3 (2029)	58,7	0,3	4,97 – 5,97	0,332 – 0,336	0,54	76,22	85,32	1,07 – 1,76

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
B1 B2 B3 B4 B5	Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi • B1: Kabupaten Polewali Mandar • B2: Kabupaten Majene • B3: Kabupaten Mamasa • B4: Kabupaten Pasangkayu • B5: Kabupaten Mamuju Tengah	Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, serta hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berkelanjutan serta implementasi pertanian berketahanan iklim melalui : • Penguatan akses pasar dan pembiayaan pengembangan komoditas pertanian dan keturunannya, dengan *output*: pendampingan dalam sertifikasi produk mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan • Peningkatan produksi pangan nabati, dengan *output*: penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan, jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi, optimasi lahan, alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan • Penguatan pasca panen pangan nabati, dengan *output*: dukungan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan • Pengembangan kawasan dan benih padi biofortifikasi, dengan *output*: pengembangan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) • Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, dengan *output*: pendampingan lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor dan kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan • Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian muda, dengan *output*: pembentukan lembaga pendidikan menengah vokasi pertanian, pendidikan tinggi vokasi pertanian diploma tiga (D-III), dan pendidikan tinggi vokasi pertanian sarjana terapan (D-IV) • Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan *output*: penyusunan rekomendasi perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim • Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan
B6 B7	Kawasan Perikanan Budidaya • B6: Kabupaten Polewali Mandar • B7: Kabupaten Mamuju	Pengembangan komoditas perikanan budidaya, melalui : • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat, dengan *output*: pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan jumlah klaster kawasan revitalisasi tambak udang, dan jumlah kluster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan • Pengembangan *input* produksi perikanan budi daya, dengan *output*: produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut,

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		dan udang ke masyarakat, dan pengujian sampel *Surveillance* Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang. • Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan, sistem rantai dingin, dan logistik perikanan, dengan *output*: penyediaan sarana sistem rantai dingin hasil KP, pembangunan unit pengolahan ikan (UPI), pengembangan sarana distribusi logistik produk KP dan sarana distribusi logistik produk KP.
D1 D2 D3 D4 D5	Kawasan Transmigrasi (KT) • D1: KT Ulumanda, Kabupaten Majene • D2: KT Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar • D3: KT Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah • D4: KT Sarudu Baras, Kabupaten Pasangkayu • D5: KT Mambi Mehalaan, Kabupaten Mamasa	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ulumanda di Kab. Majene, Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu di Kab. Polewali Mandar, Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kab. Mamuju Tengah, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kab. Pasangkayu, dan Kawasan Transmigrasi Mambi Mehalaan di Kab. Mamasa, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran
E1	Kawasan Konservasi dan Pengembangan Pulau Kecil • E1: Kabupaten Mamuju	Pengembangan dan pengelolaan wisata bahari pada kawasan konservasi perairan dan ekosistem pesisir, melalui: • Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan, dengan *output*: kawasan konservasi perairan yang operasional, pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya, destinasi wisata alam yang dikembangkan sarprasnya, dan fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata • Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana, dengan *output*: Sarana SAR *rafting boat*, prasarana *search and rescue* (SAR), pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, dan penataan bangunan kawasan rawan bencana • Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil • Pengelola wisata alam dan wisata bahari secara berkelanjutan • Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi sektor pariwisata bahari
E2 E3 E4 E5	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Makassar *Strait* Sulawesi Barat • E2: Kabupaten Majene • E3: Kabupaten Polewali Mandar • E4: Kabupaten Mamuju • E5: Kabupaten Pasangkayu	Pengelolaan risiko bencana kawasan rawan bencana gempa bumi di Makassar *Strait*, melalui: • Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi dan resiliensi masyarakat terhadap bencana, dengan *output*: penyusunan Peta kawasan rawan bencana gempa bumi, penyediaan peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan *intensitymeter* dan *accelerograph* melalui IDRIP, penyediaan peralatan monitoring gempabumi dan tsunami melalui Indonesia *Disaster Resillience Initiatives Project* (IDRIP), fasilitasi dan pelayanan informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) wilayah timur • Pendampingan penanganan kedaruratan bencana, dengan *output*: penerapan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pascabencana, bantuan kepada korban bencana alam berupa bantuan logistik tanggap darurat, dan terselenggaranya operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pelayanan peringatan dini multiancaman bencana gempa bumi, dengan *output*: terpasangnya instrumentasi peringatan dini, persentase kecepatan informasi iklim dan kualitas udara dan terlaksananya pembinaan penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik • Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami
	Provinsi Sulawesi Barat	Peningkatan kualitas ekosistem gambut, melalui: • Pemulihan lahan gambut, dengan *output:* pemulihan lahan gambut di areal penggunaan lainnya, pelaksanaan Program Gambut Lestari, Program Desa Mandiri Peduli Gambut, dan penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut • Pengelolaan data dan informasi lahan gambut, dengan *output:* penyediaan data dan informasi Kesatuan Hidrologis Gambut
	Provinsi Sulawesi Barat	Pengembangan hilirisasi rumput laut, melalui: • Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan *output:* penyusunan rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, infrastruktur Kawasan Budidaya Rumput Laut - *'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas'*, dan klaster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat • Pengembangan industri hilir rumput laut, dengan *output:* fasilitasi investasi industri rumput laut bernilai tinggi (Karagenan (polisakarida), Agar, Kosmetik, *Biofuel*, dan Bioplastik) dan pengembangan Biostimulan berbasis rumput laut • Peningkatan rantai nilai rumput laut, dengan *output:* penguatan koperasi rumput laut untuk memperkuat posisi tawar petani rumput laut dan pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut • Peningkatan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut, dengan *output:* pelatihan dan pendampingan pengolah rumput laut terkait praktik produksi dan pelatihan manajemen usaha rumput laut dengan memprioritaskan peran perempuan • Peningkatan dukungan finansial bagi pembudidaya rumput laut, dengan *output:* penerapan sistem insentif fiskal bagi petani yang menggunakan bibit berkualitas dan menerapkan teknik ramah lingkungan dan penyediaan skema kredit mikro dengan bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha rumput laut
	Provinsi Sulawesi Barat	Pengembangan industri mesin dan perlengkapan, melalui: • Pengembangan industri alat pertanian, dengan *output:* pengembangan industri alat mesin pertanian yang terfasilitasi dalam rangka penguatan mekanisasi pertanian nasional • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi bidang pertanian dan perkebunan, dengan *output*: pengembangan model percontohan pertanian modern, purwarupa Budidaya Tanaman yang dihasilkan, purwarupa budidaya ternak yang dihasilkan, purwarupa hilirisasi produk pertanian yang dihasilkan, terlaksananya uji terap metode pengujian mutu benih, kelompok tani yang mendapatkan diseminasi melalui percontohan teknologi pertanian, kelompok tani yang terfasilitasi program IPDMIP, pembangunan irigasi perpipaan pertanian untuk penambahan areal tanam, pembangunan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim untuk penambahan areal tanam • Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan *output*: pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan kebijakan di bidang perindustrian sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Sulawesi Barat	Penguatan layanan transportasi, infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui: • Penanganan jalan daerah, dengan *output*: pembangunan jalan/jembatan daerah dan preservasi jalan/jembatan daerah • Peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan *output*: pelaksanaan kampanye/sosialisasi/promosi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan pengembangan/pemasangan fasilitas keselamatan jalan dan daerah yang menyusun rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan • Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan *output*: pembangunan/pengembangan pelabuhan simpul utama • Pengembangan bandara dengan *output*: pengembangan bandara Tampa Padang (Kab. Mamaju) dan Bandara Sumarorong (Kab. Mamasa) • Pembangunan jaringan distribusi dan terisolasi serta listrik pedesaan, dengan *output*: peningkatan pasokan tenaga listrik dam pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
	Provinsi Sulawesi Barat	Peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu, serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi aman, dan pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir berbasis teknologi tepat guna, penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, serta penguatan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi, melalui : • Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan *output*: pembangunan SPAM Kabupaten/Kota, pembangunan SPAM regional, peningkatan SPAM Kabupaten/Kota, peningkatan SPAM regional, perluasan SPAM kabupaten/kota, pembinaan teknis bidang air minum, dan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum, termasuk pada SPAM Regional Polewali Mandar-Majene • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan SPAM, dengan *output*: pembinaan dan pengawasan pengembangan SPAM, daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan umum berdasarkan tipologi daerah • Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk berkelanjutan, dan berketahanan iklim masyarakat, dengan *output*: pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman, dan berbasis masyarakat, serta sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota • Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif, dengan *output*: rehabilitasi daerah irigasi multikomoditas • Fasilitasi peningkatan kualitas rumah, dengan *output*: pemugaran, peremajaan, serta yang dilakukan pemukiman kembali di permukiman kumuh • Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z • Peningkatan penyediaan dan layanan listrik, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik dan pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi, pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk, dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan *output*: persentase (%) pelaksanaan program direktorat layanan telekomunikasi dan informatika badan usaha dalam rangka pemanfaatan kapasitas palapa ring barat 70 persen, *palapa ring* tengah

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		45 persen, palapa ring timur 45 persen, dengan *service level agreement* (SLA) minimal 95 persen dan jumlah lokasi yang memperoleh sinyal telekomunikasi bergerak seluler (*base transceiver station/lastmile* 4G) di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika (kumulatif) • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dengan *output*: pembinaan pada Fasilitator/*Enabler* Digital PMSE, pelaksanaan pemantauan/monitoring, bimbingan teknis pada pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE, dan peningkatan literasi masyarakat di bidang digital • Perluasan layanan penyiaran digital, dengan *output*: pembangunan transmisi, pengadaan infrastruktur teknologi informatika dan media baru, dan pemantauan terjadinya *downtime* siaran (tidak lebih dari 7 jam per bulan)
	Provinsi Sulawesi Barat	Percepatan pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi, melalui: • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan, dengan *output*: penyelarasan data mustahiq dan data kemiskinan regsosek, pembinaan dan penguatan lembaga amil zakat dan nadzir wakaf, lembaga dana amal paramita, lembaga amal kasih Katolik, dan lembaga amal sosial kristiani terkait program pengentasan kemiskinan, pembedayaan rumah tangga miskin melalui kampung ZISWAF • Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dengan *output*: pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, mustahiq yang diselaraskan datanya, dan aparatur yang mengikuti pengembangan perencanaan dan standar pelayanan minimal (SPM) • Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan *output*: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, tenaga kerja mandiri (TKM) pemula, pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan, dan bantuan alat dan mesin pertanian pra panen • Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output*: pemberian bantuan iuran PBI JKN, pemberian bantuan sosial bersyarat, penyediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi mahasiswa, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, dan bantuan logistik korban bencana alam
	Provinsi Sulawesi Barat	Penguatan sistem tata kelola pendidikan vokasi (SMA, SMK dan Politeknik) untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian dan perkebunan, melalui: • Pemerintah daerah yang dibina dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pendidikan, dengan *output*: pendampingan peningkatan mutu pada sekolah menengah atas (SMA) • Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang mendapatkan pendampingan dalam peningkatan kualitas, dengan *output*: pendampingan program sekolah penggerak • Penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dan pendidik, dengan *output*: pendampingan dalam rangka menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan di kabupaten/kota • Revitalisasi Sarana Pendidikan (PHTC), dengan *output*: penyediaan prasarana SMAKN • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan • Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan *output*: pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan, pengembangan pendidikan produk kreatif dan kewirausahaan di SMK, pendampingan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		peningkatan mutu dan pengajaran berbasis pabrik (*Teaching Factory*) di SMK • Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK, dengan *output*: pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja bagi guru kejuruan, pengembangan inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja, dan pendampingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri • Sertifikasi Kompetensi siswa SMK/MAK, dengan *output*: penguatan persiapan program magang luar negeri dan fasilitasi sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja
	Provinsi Sulawesi Barat	Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), melalui: • Peningkatan kapasitas puskesmas dan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan serta pelayanan kesehatan di daerah sulit akses, dengan *output*: pengukuran dan pelaporan mutu puskesmas, penyediaan sarana, pemenuhan alat kesehatan, peningkatan keterampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu, revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan pelayanan berbasis gugus pulau di wilayah kepulauan, dan pembinaan RS Kapal di wilayah kepulauan • Peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kapasitas SDM kesehatan, dengan *output*: akselerasi rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan, dan pelatihan strategis SDM kesehatan di RS Pemerintah • Penguatan tata kelola dan kepesertaan JKN, dengan *output*: koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, pemberian bantuan iuran PBI JKN, dan pemberian bantuan iuran kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) • Penurunan kematian ibu dan anak melalui seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak
	Provinsi Sulawesi Barat	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit, melalui: • Penguatan intervensi spesifik *stunting* dan sensitif *stunting*, dengan *output*: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *Buffer Stock*, Tenaga Kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, dan layanan imunisasi pendukung pencapaian *stunting*. • Peningkatan upaya pencegahan TBC, dengan *output*: tenaga kesehatan terlatih untuk pencegahan dan pengendalian, layanan *skrining mobile* dan fasyankes, layanan pencegahan dan pengendalian, serta alat, bahan, dan paket vaksin TBC. • Pengendalian penyakit Kusta, dengan *output*: dukungan penyediaan alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, penyediaan obat dan logistik MDT, pendampingan dan pemantauan pengobatan, pemberian obat pencegahan, dan pemantauan penderita kusta pasca pengobatan.

6. Wilayah Maluku

6.1 Provinsi Maluku

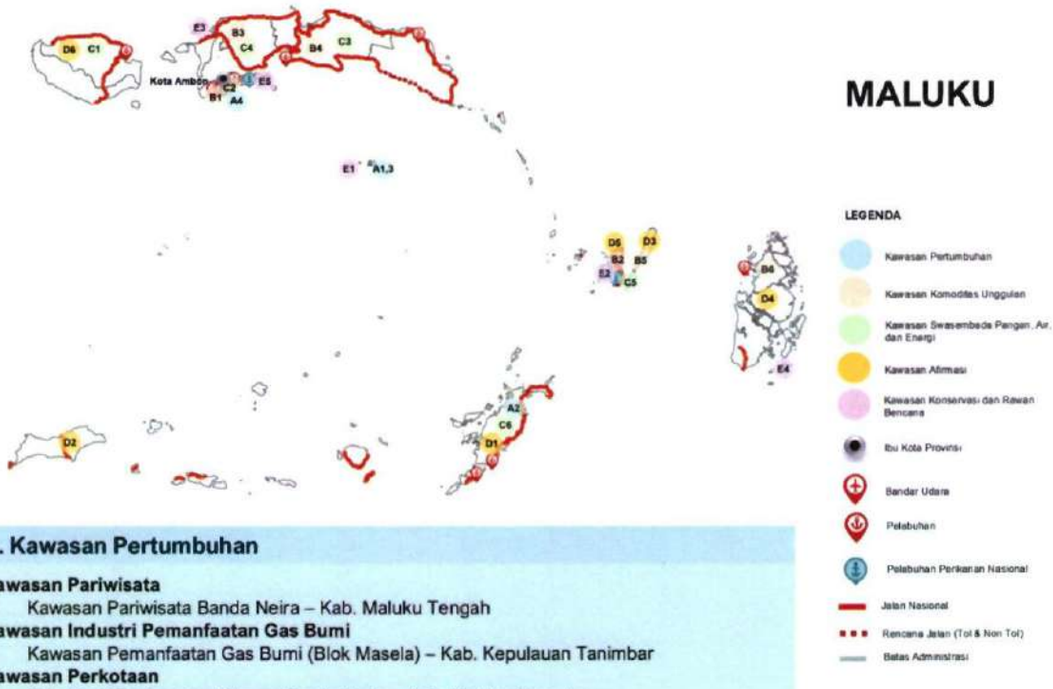

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata
1. Kawasan Pariwisata Banda Neira – Kab. Maluku Tengah

Kawasan Industri Pemanfaatan Gas Bumi
2. Kawasan Pemanfaatan Gas Bumi (Blok Masela) – Kab. Kepulauan Tanimbar

Kawasan Perkotaan
3. Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira – Kab. Maluku Tengah
4. Kawasan Perkotaan Sedang Ambon – Kota Ambon

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Industri Berbasis Komoditas TCT, Udang, dan Lobster
1. Kota Ambon
2. Kota Tual

Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT, Udang, dan Lobster
3. Kab. Seram Bagian Barat
4. Kab. Maluku Tengah
5. Kab. Maluku Tenggara
6. Kab. Kepulauan Aru

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Buru: potensial pangan, potensial air
2. Kota Ambon: potensial energi
3. Kab. Maluku Tengah: potensial pangan, potensial air
4. Kab. Seram Bagian Barat: potensial energi
5. Kab. Maluku Tenggara: potensial pangan
6. Kab. Kepulauan Tanimbar: potensial air

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perbatasan

PKSN dan Wilayah Pendukung
1. PKSN Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan dan Kec. Tanimbar Utara – Kab. Kepulauan Tanimbar
2. PKSN Ilwaki – Kab. Maluku Barat Daya

Kecamatan Perbatasan Prioritas
3. Kec. Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan Barat – Kab. Maluku Tenggara
4. Kec. Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur, Sir-Sir – Kab. Kepulauan Aru
5. Kec. Pulau Dullah Selatan – Kota Tual

Kawasan Perdesaan Prioritas
6. Kawasan Perdesaan Waeapo Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi – Kab. Buru

E. Kawasan Konservasi

1. KKN Laut Banda, TWA Gunung Api Banda, KK Perairan di Pulau Ay dan Pulau Rhun – Kab. Maluku Tengah
2. KKD Pulau Kei Kecil – Kab. Maluku Tenggara
3. KK Perairan Buano – Kab. Seram Bagian Barat
4. KK Kepulauan Aru bagian Tenggara – Kab. Kepulauan Aru
5. KK Perairan Kepulauan Lease –
   - Kota Ambon dan
   - Kab. Maluku Tengah

Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,3 (Rata-rata 2025–2029)	34,8	0,3	13,01 – 13,51	0,282 – 0,287	0,49	42,88	82,43	5,55 – 6,03
2029	8,4 (2029)	50,5	0,3	8,03 – 9,03	0,239 – 0,243	0,52	100	83,10	5,07 – 5,57

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Pertumbuhan: • A1: Kawasan Pariwisata Banda Neira (Kab. Maluku Tengah)	Pengembangan kawasan pariwisata Banda Neira di Kab. Maluku Tengah melalui: • Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: penanganan jalan daerah, peningkatan fasilitas pelabuhan dan dermaga • Peningkatan daya tarik pariwisata alam, sejarah, dan budaya banda, dengan *output*: pengembangan desa wisata, pengembangan atraksi wisata budaya, penyediaan prasarana bidang pariwisata dan kebudayaan, pendukungan *event* daerah, pembangunan pusat informasi kepariwisataan, termasuk konten peta wisata (*tourism map*) yang berkualitas, serta pemanfaatan cagar budaya dan aset sejarah • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: penyediaan akomodasi dan restoran yang berkualitas, kios cinderamata, pengembangan pasar tematik wisata, serta penyediaan layanan kesehatan wisatawan • Pengembangan kapasitas SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan *output*: fasilitasi dan pembinaan masyarakat lokal yang tersertifikasi di bidang pariwisata, penguatan tata kelola desa wisata dan kampung adat • Penguatan dan perluasan promosi dan pemasaran, dengan *output*: promosi terpadu secara nasional dan internasional, serta pembangunan jaringan pengetahuan dan media rekonstruksi diplomasi budaya jalur rempah • Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan *output*: peningkatan akses pembiayaan, literasi bisnis dan mutu produk IKM/UMKM, pembentukan dan pembinaan BUMDes dan koperasi berbasis pariwisata, perikanan, dan perkebunan
A2	Kawasan Pertumbuhan: • A2: Blok Masela (Kab. Kepulauan Tanimbar)	Percepatan pemanfaatan gas bumi untuk industri di Kab. Kepulauan Tanimbar (Blok Masela) melalui: • Penyiapan wilayah kerja pengembangan, dengan *output*: penetapan wilayah kerja pengembangan gas bumi dan wilayah keprospekan migas • Pengembangan infrastruktur dan teknologi pengolahan dan pemanfaatan gas bumi, dengan *output*: pembangunan jaringan gas bumi, sarana prasarana produksi pemanfaatan gas bumi, serta penyiapan pembangunan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas • Penyiapan kapasitas SDM, dengan *output*: pembangunan sarana prasarana dan program studi pendidikan tinggi vokasi berbasis industri migas • Penyiapan pembangunan sarana dan prasarana luar kawasan, dengan *output*: pembangunan SPAM, SPAL, sistem pengelolaan sampah, akses internet, jaringan listrik, serta pembangunan RTH dan ruang terbuka publik

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A3	Kawasan Pertumbuhan: • A3: Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira (Kab. Maluku Tengah)	Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira melalui: • Penataan ruang kota, dengan *output*: penetapan RDTR dan RTBL, penataan lanskap dan pembangunan fasilitas rekreasi, termasuk diantaranya penyediaan *wayfinding*, pembangunan *promenade* sepanjang pantai, pengembangan *shared-street*, *street furniture*, dan manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan • Peningkatan citra kota, dengan *output*: pemanfaatan cagar budaya (*adaptive reuse*) sesuai *branding* kawasan, penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya di dalam dan luar negeri • Peningkatan sarana prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: peningkatan SPAM, SPAL, drainase, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, penyediaan akses internet dan listrik berbasis EBT, penataan kawasan, serta peremajaan/pemugaran permukiman kumuh, bantuan pembangunan rumah swadaya, serta penyediaan fasilitas asrama pendidikan • Penguatan peran kawasan, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan/peningkatan jalan desa strategis, serta pengembangan bandar udara dan pelabuhan • Peningkatan tata kelola pelayanan publik, dengan *output*: pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang transparan dan akuntabel, serta penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital
A4	Kawasan Pertumbuhan: • A4: Kawasan Perkotaan Sedang Ambon (Kota Ambon)	Pengembangan Kawasan Perkotaan Sedang Ambon melalui: • Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan *output*: rencana induk (masterplan) • Penataan kawasan dan peningkatan citra kota dengan *output*: penguatan *branding* kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota • Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan dan peningkatan jalan, transportasi umum massal perkotaan, SPAM, SPAL, infrastruktur listrik dan TIK, PSU bidang perumahan, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya • Penguatan peran kawasan, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
B1 B2 B3 B4 B5 B6	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster) Sentra Industri • B1: Kota Ambon • B2: Kota Tual Sentra Produksi • B3: Kab. Maluku Tengah • B4: Kab. Seram Bagian Barat	Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster melalui: • Penguatan sentra produksi perikanan, dengan *output*: peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan • Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan *output*: pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk perikanan, peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pengembangan rantai dingin, distribusi logistik, penjaminan mutu produk perikanan, perluasan ekspor dan promosi produk perikanan, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan *output*: pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: pengembangan kampung nelayan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• B5: Kab. Maluku Tenggara • B6: Kab. Kepulauan Aru	dan desa perikanan cerdas (*smart fisheries village*), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan • Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian *matching fund* (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital
	Provinsi Maluku	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3T, dengan *output*: pembangunan Jalan Trans Buru, Seram, Moa, dan Yamdena, penanganan jalan daerah dan jalan 3T di antaranya di Pulau Kei Besar, Kepulauan Aru, serta peningkatan jalan mendukung akses pelabuhan laut (Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Amahai) • Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan *output*: peningkatan fasilitas Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Mahaleta, Pelabuhan Eray, Pelabuhan Marsela, Pelabuhan Namrole, Pelabuhan Banda Eli, dan Pelabuhan Sofyanin, pelayaran kapal Ro-Ro, penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis, serta pengembangan Pelabuhan Ambon sebagai simpul *transhipment* • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandara Pattimura, Bandara Kufar, Bandara Langgur, dan Bandara Dobo, pengembangan *seaplane* dan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta layanan penyiaran digital
	• Kota Ambon (perikanan) • Kota Tual (perikanan) • Kab. Maluku Tengah (pariwisata dan ekonomi kreatif) • Kab. Kepulauan Tanimbar (industri migas)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri. serta pertambangan dan penggalian) sesuai kebutuhan DUDI melalui: • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan *output*: jalan menuju fasilitas pendidikan, perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, serta revitalisasi fasilitas Pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta tenaga kependidikan yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan, serta satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja
C1 C3	Kawasan Potensial Swasembada Pangan:	Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi, ubi, dan kedelai) dan pangan akuatik/*bluefood* berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap, melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
C5	• C1: Kab. Buru (padi, pangan akuatik) • C3: Kab. Maluku Tengah (padi, kedelai, pangan akuatik) • C5: Kab. Maluku Tenggara (ubi, rumput laut) Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Kepulauan Aru (sagu) • Kab. Kepulauan Tanimbar (padi) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	• Penguatan produksi, dengan *output*: optimasi kawasan pertanian padi, kedelai, dan ubi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyaluran benih ikan, serta revitalisasi lahan tambak, revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi, serta pengembangan unit produksi bibit berkualitas dan penyaluran bibit rumput laut • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta penyediaan sarana pra, pascapanen, dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, pengadaan gudang lumbung pangan, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan akuakultur • Penguatan kapasitas SDM (petani, nelayan, dan pembudidaya ikan), dengan *output*: penguatan dan pelatihan kelompok tani GAP (*Good Agriculture Practices*), GHP (*Good Handling Practices*), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong *ownership* petani, nelayan, dan pembudidaya ikan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk, serta pendampingan untuk digitalisasi pertanian • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: pengembangan dan penguatan inkubator koperasi, serta peningkatan sistem logistik pangan lokal Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan *output*: pengembangan kawasan sagu dan padi, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan
C2 C4	Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C2: Kota Ambon* • C4: Kab. Seram Bagian Barat* Kawasan Rendah elektrifikasi: • Kab. Seram Bagian Timur** • Kab. Kepulauan Aru** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui: • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: pembangunan pembangkit listrik tenaga EBT berbasis biomassa (PLTBio) dan surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
C1 C3 C6	Kawasan Potensial Swasembada Air: • C1: Kab. Buru* • C3: Kab. Maluku Tengah* • C6: Kab. Kepulauan Tanimbar* Kawasan Rawan Air: • Kab. Maluku Barat Daya** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air	Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil melalui: • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan *output*: pembangunan Bendungan Way Apu, Bendungan Way Yori dan Bendungan Tanimbar Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan *output*: pembangunan embung, penyediaan infrastruktur desalinasi air laut di pulau-pulau kecil, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air
D1 D2 D3 D4 D5	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung: • D1: PKSN Saumlaki, serta Kec. Tanimbar Selatan dan Kec. Tanimbar Utara (Kab. Kepulauan Tanimbar) • D2: PKSN Ilwaki (Kab. Maluku Barat Daya) Kecamatan Perbatasan Prioritas: • D3: Kec. Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan Barat (Kab. Maluku Tenggara) • D4: Kec. Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur, Sir-Sir (Kab. Kepulauan Aru) • D5: Kec. Pulau Dullah Selatan (Kota Tual)	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki dan Ilwaki, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui: • Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, peningkatan akses internet dan listrik, serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sentra perikanan budidaya terutama di PKSN, dengan *output*: peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT (SKPT Saumlaki dan SKPT Moa) yang dikelola dan operasional sesuai standar, penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, pengembangan rumah bibit dan penyaluran bibit rumput laut, peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan, serta peningkatan fasilitas Pelabuhan Tepa, Eray dan Mahaleta, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan *output*: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Maluku • Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan *output*: *piloting* pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
D6	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas • D6: Kawasan Perdesaan Waeapo Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi (Kab. Buru)	Pengembangan Kawasan Perdesaan Waeapo Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi melalui: • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Peningkatan aksesibilitas desa, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik, serta penyediaan moda transportasi desa • Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam pengembangan agropolitan dan produk unggulan desa • Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan *output*: fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agropolitan
	Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka: • Kab. Buru Selatan • Kab. Kepulauan Aru (Daerah Tertinggal) • Kab. Maluku Barat Daya (Daerah Tertinggal dan PKSN Ilwaki) • Kab. Kepulauan Tanimbar (PKSN Saumlaki) Penguatan sekolah terbuka: • Kab. Maluku Tenggara • Kota Tual	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian program Indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik), serta fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan *output*: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya, serta peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan *output*: pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model kurikulum yang adaptif dan kontekstual
	Provinsi Maluku	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, diantaranya di Kawasan Banda Neira melalui: • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya, fasilitasi peningkatan penulisan sejarah lokal, serta monitoring dan evaluasi pelestarian cagar budaya, aset sejarah dan budaya, penyelenggaraan *event* diplomasi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan (OPK), dan pelestarian objek diduga cagar budaya (ODCB) dan OPK • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
	• Kab. Buru • Kab. Buru Selatan • Kab. Seram Bagian Timur • Kab. Kepulauan Aru (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Maluku Barat Daya (Daerah Tertinggal dan PKSN Ilwaki) • Kab. Kepulauan Tanimbar (Kecamatan Perbatasan Prioritas dan PKSN Saumlaki) • Kota Tual (Kecamatan Perbatasan Prioritas) Layanan Unggulan RS: Seluruh Kab/Kota	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*) melalui: • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung *telemedicine* • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*:, pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine* • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan *output*: penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan
	Penanganan Penyakit TBC: • Kab. Maluku Tenggara • Kab. Maluku Tengah • Kab. Kepulauan Aru • Kota Tual Penanganan Penyakit Malaria: 8 kabupaten di Provinsi Maluku	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, serta peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian ISPA terlatih serta

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Penanganan Penyakit ISPA: • Kab. Maluku Tengah • Kab. Maluku Barat Daya • Kota Ambon • Kota Tual Penanganan Penyakit pneumonia: • Kab. Buru • Kab. Kepulauan Aru • Kab. Seram Bagian Timur • Kab. Maluku Barat Daya Penanganan Penyakit rabies: • Kab. Kepulauan Tanimbar • Kab. Maluku Tengah • Kab. Seram Bagian Barat • Kab. Maluku Barat Daya • Kota Ambon Penanganan penyakit kusta: Provinsi Maluku	optimalisasi data dan informasi ISPA, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak • Pencegahan dan pengendalian penyakit pneumonia, dengan *output*: peningkatan layanan intensifikasi penemuan kasus dan deteksi dini pneumonia dan peningkatan alat dan bahan kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan pneumonia • Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit rabies, dengan *output*: penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan obat hewan
	Provinsi Maluku	Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya melalui: • Peningkatan gizi, dengan *output*: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum *stunting* terjadi serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari *buffer stock*, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan *output*: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan *output*: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB
	• WPP 714 (perbatasan perairan dengan Timor Leste) • WPP 715 (perbatasan perairan dengan Australia)	• Penguatan pertahanan keamanan melalui peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama, serta pemberantasan praktik IUU Fishing melalui: • Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan *output*: pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penyiapan kolaborasi dan kerja sama antarpihak dengan negara-negara tetangga seperti Timor Leste dan Australia • Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan *output*: operasionalisasi lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI), pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (*illegal, unreported, unregulated*) *fishing*. • Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan *output*: revitalisasi sarana prasarana serta perawatan armada pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
E1 E2 E3 E4 E5	Kawasan Konservasi: • E1: KKN Laut Banda, TWA Gunung Api Banda, KK Perairan di Pulau Ay dan Pulau Rhun (Kab. Maluku Tengah) • E2: KKD Pulau Kei Kecil (Kab. Maluku Tenggara) • E3: KK Perairan Buano (Kab. Seram Bagian Barat) • E4: KK Kepulauan Aru bagian Tenggara (Kab. Kepulauan Aru) • E5: KK Perairan Kepulauan Lease (Kota Ambon dan Kab. Maluku Tengah)	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21. • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan • Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan *output*: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah. • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan *output*: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) • Pengembangan potensi *geopark* di TWA Gunung Api Banda, dengan *output* pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata dan fasilitasi usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat
	Provinsi Maluku	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan *nature-based solutions*, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan

6.2 Provinsi Maluku Utara

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Industri
1. KI Buli – Kab. Halmahera Timur
2. KI Weda Bay – Kab. Halmahera Tengah
3. KI Pulau Obi – Kab. Halmahera Selatan

Kawasan Pariwisata
4. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Morotai – Kab. Pulau Morotai

Kawasan Perkotaan
5. Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba – Kab. Pulau Morotai
6. Kawasan Perkotaan Weda – Kab. Halmahera Tengah
7. Kota Baru Sofifi – Kota Tidore Kepulauan

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Industri Berbasis Komoditas Kelapa
1. Kab. Halmahera Barat

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kelapa
2. Kab. Halmahera Utara
3. Kab. Halmahera Selatan
4. Kab. Kepulauan Sula

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Pala
5. Kab. Halmahera Barat
6. Kab. Halmahera Tengah
7. Kab. Halmahera Utara

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Halmahera Utara: potensial pangan, potensial energi
2. Kab. Halmahera Timur: potensial pangan
3. Kab. Halmahera Selatan: potensial energi
4. Kab. Halmahera Tengah: potensial air

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Perbatasan

PKSN dan Wilayah Pendukung
1. PKSN Daruba dan Kec. Morotai Utara – Kab. Pulau Morotai

Kecamatan Perbatasan Prioritas
2. Kec. Patani Utara – Kab. Halmahera Tengah
3. Kec. Maba Utara – Kab. Halmahera Timur

Kawasan Transmigrasi
4. KT Sagea Waleh – Kab. Halmahera Tengah
5. KT Pulau Bacan – Kab. Halmahera Selatan
6. KT Patlean – Kab. Halmahera Timur
7. KT Pulau Morotai – Kab. Pulau Morotai

Kawasan Perdesaan Prioritas
8. Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Halmahera Barat – Kab. Halmahera Barat

E. Kawasan Konservasi

1. TN Aketajawe Lolobata –
   - Kab. Halmahera Tengah,
   - Kab. Halmahera Timur, dan
   - Kab. Tidore Kepulauan
2. SM Goa Bukimoruru – Kab. Halmahera Tengah
3. CA Pulau Obi – Kab Halmahera Selatan

Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	11,4 (Rata-rata 2025-2029)	77,9	0,4	4,95 – 5,15	0,280 – 0,297	0,48	86,35	80,36	3,80 – 4,00
2029	12,7 (2029)	133,4	0,5	0,92 – 1,92	0,273 – 0,290	0,50	94,12	81,03	2,82 – 3,60

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1 A2 A3	Kawasan Pertumbuhan: • A1: KI Buli, Kab. Halmahera Timur • A2: KI Weda Bay, Kab. Halmahera Tengah • A3: KI Pulau Obi, Kab. Halmahera Selatan	Optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting dan percepatan hilirisasi industri nikel di KI Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli melalui: • Perencanaan, perizinan, dan tata ruang KI Pulau Obi, dengan *output*: percepatan penerapan sistem perizinan terpadu • Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan di sekitar KI Buli dan KI Pulau Obi, dengan *output*: pembangunan jalan strategis menuju kawasan industri, peningkatan Jalan Ruas 035 Weda–Sagea, pembangunan alternatif akses jalan Maba–Kawasan Industri, pembangunan Jalan Sofifi–Buli, pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, pengembangan pelabuhan, peningkatan kapasitas air baku, SPAM, air limbah, sistem pengelolaan sampah, akses internet, jaringan listrik tegangan menengah, sarana pemadam kebakaran, pembangunan hunian pekerja, serta pengembangan fasilitas kesehatan primer • Penguatan hilirisasi pertambangan dan turunannya, dengan *output*: pengembangan smelter pengolahan nikel dan hasil pengolahan sisa industri • Peningkatan investasi dan promosi ekspor, dengan *output*: fasilitasi investor dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri • Fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan *output*: penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan, pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri, pengembangan UMKM, serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka sebagai bahan baku industri dan bahan penunjang • Penyediaan SDM berkualitas, dengan *output*: pendidikan vokasi industri dan pelatihan vokasi industri *upskilling* dan *reskilling*, serta fasilitas pendampingan SMK yang *link and match* dengan industri • Penerapan dekarbonisasi dan ekonomi sirkuler di industri pengolahan nikel dan turunannya, dengan *output*: percepatan dekarbonisasi dan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor industri untuk pemenuhan *enhanced* NDC dan menuju *net zero economy*, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung dekarbonisasi industri
A4	Kawasan Pertumbuhan: • A4: DPP Morotai, Kab. Pulau Morotai (termasuk PKSN Daruba)	Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting di DPP Morotai melalui: • Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pengembangan Bandara Pitu, pengembangan *seaplane* untuk mendukung pariwisata, penyediaan layanan angkutan penyeberangan perintis, serta pembangunan jembatan untuk mendukung logistik DPP Morotai • Pengembangan atraksi, dengan *output*: penataan kawasan koridor Daname dan Nunuhu, serta pelaksanaan kegiatan (*event*) festival Pulau Morotai • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: optimalisasi SPAM, TPA Daruba dan Sakita,

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		pembangunan TPS-3R, penyediaan kapal angkutan sampah antar pulau, pengelolaan air limbah, serta akses internet • Pengembangan keterampilan SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan *output*: pembinaan, pelatihan, dan pembekalan kerja SDM pariwisata, serta manajemen kunjungan wisata • Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan *output*: kerjasama pariwisata dengan negara-negara Pasifik dan Mikronesia, serta promosi investasi dan promosi destinasi terpadu • Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, peningkatan akses pembiayaan modal, serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka sebagai bahan baku industri dan bahan penunjang • Peningkatan pelestarian adat dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa, serta penyediaan jalur evakuasi bencana KTA Moro Point, KTA Rao, KTA Pasifik
A5	Kawasan Pertumbuhan: • A5: Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba (Kab. Pulau Morotai)	Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba melalui: • Penataan kawasan dan peningkatan citra kota, dengan *output*: penguatan *branding* kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota • Peningkatan sarana prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3r, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, PSU bidang perumahan, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya • Penguatan peran kawasan, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan jalan strategis, pengembangan bandar udara dan pelabuhan
A6	Kawasan Pertumbuhan: • A6: Kawasan Perkotaan Industri Weda (Kab. Halmahera Tengah)	Pengembangan Kawasan Perkotaan Industri Weda dan penataan kawasan perkotaan di sekitar KI Weda Bay melalui: • Peningkatan sarana prasarana dasar perkotaan dan penataan infrastruktur perkotaan di sekitar kawasan industri, dengan *output*: peningkatan sistem pengendalian banjir (*urban flood control system*), penanganan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pengembangan konsolidasi lahan, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pembangunan saluran drainase jalan primer dan sekunder, pembangunan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan sampah, pengembangan fasilitas kesehatan primer, serta pembangunan RTH dan ruang terbuka publik • Penguatan peran kawasan, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan dan penanganan jalan strategis • Pengelolaan masyarakat hukum adat di luar kawasan, dengan *output*: perlindungan dan penguatan kapasitas masyarakat hukum adat, serta penetapan hutan adat
A7	Kawasan Pertumbuhan: • A7: Kota Sofifi (Kota Tidore Kepulauan)	Pengembangan Kota Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara melalui: • Pembangunan pusat pemerintahan, dengan *output*: pembangunan bangunan gedung kantor (Polda, Kanwil BPN, BPTD, KOREM TNI-AD, LANAL TNI-AL, Kejaksaan Tinggi, BPKP, PUPR, dan hunian ASN/TNI/Polri

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: pembangunan jalan Tajawi–Kobe, peningkatan jalan akses simpul transportasi Bandara Kuabang Kao dan Loleo Oba, pengembangan Bandara Kuabang Kao dan Loleo Oba, serta penataan dan peningkatan Pelabuhan Sofifi • Peningkatan infrastruktur perkotaan, dengan *output*: pembangunan SPAM skala kota, SPAL, infrastruktur pengelolaan sampah, pengembangan kawasan perdagangan, serta pembangunan embung Sofifi dan dermaga polisi air
B1 B2 B3 B4	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas kelapa) Sentra Industri • B1: Kab. Halmahera Barat Sentra Produksi • B2: Kab. Halmahera Utara • B3: Kab. Halmahera Selatan • B4: Kab. Kepulauan Sula	Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas kelapa melalui: • Penguatan sentra produksi perkebunan, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, peningkatan rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan kawasan kelapa, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, serta perluasan kebun sumber benih • Pengembangan agroindustri, tata niaga/pemasaran, dan promosi produk, dengan *output*: pengembangan industri produk turunan kelapa, penguatan inkubator bisnis, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, peningkatan kerja sama perdagangan internasional, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan *output*: penguatan pendidikan vokasi pertanian dan industri, serta penerapan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja perkebunan • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, peningkatan gudang SRG dengan *Warehouse Management System* (WMS), penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman perkebunan, serta penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: peningkatan ekspor dan investasi dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengelolaan pemanfaatan ruang, dengan *output*: peningkatan akses reforma agraria terkait kepemilikan dan budidaya lahan perkebunan dalam kawasan hutan • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian *matching fund* (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perkebunan, pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk *digital farming*
B5 B6 B7	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas pala) Sentra Produksi • B5: Kab. Halmahera Barat • B6: Kab. Halmahera Tengah • B7: Kab. Halmahera Utara	Penguatan sentra produksi berbasis komoditas pala, melalui: • Peningkatan produksi perkebunan, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, peningkatan rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan kawasan pala, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman perkebunan, serta perluasan kebun sumber benih • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, peningkatan gudang SRG dengan *Warehouse Management System* (WMS), penyediaan sarana pascapanen dan sarana pengolahan hasil tanaman perkebunan, serta penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen • Peningkatan kualitas SDM, dengan *output*: penguatan pendidikan vokasi pertanian dan industri, serta penerapan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja perkebunan • Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk dengan *output*: pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		pengembangan UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk *digital farming*, serta pengembangan inovasi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan berbasis rempah
	Provinsi Maluku Utara	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3T, dengan *output*: pembangunan Jalan Trans Halmahera, penanganan jalan daerah dan jalan 3TP di antaranya di Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Pulau Mangoli, dan Pulau Sulawesi • Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan *output*: peningkatan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Gita, dan Pelabuhan Daruba, pelayaran kapal Ro-Ro, serta penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan *seaplane* dan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta layanan penyiaran digital
	• Kab. Halmahera Barat (perkebunan) • Kab. Halmahera Tengah (industri dan pertambangan) • Kab. Halmahera Selatan (pariwisata dan ekonomi kreatif serta (industri dan pertambangan) • Kab. Halmahera Timur (industri dan pertambangan) • Kab. Pulau Morotai (pariwisata dan ekonomi kreatif)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri. serta pertambangan dan penggalian) sesuai kebutuhan DUDI melalui: • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan *output*: jalan menuju fasilitas pendidikan, perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta tenaga kependidikan yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan, serta satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja
C1 C2	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C1: Kab. Halmahera Utara* (padi) • C2: Kab. Halmahera Timur* (padi, kedelai, dan pangan akuatik)	Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi dan kedelai) dan pangan akuatik/*bluefood* berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap, melalui: • Penguatan produksi pangan, dengan *output*: optimasi kawasan pertanian padi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, penyaluran benih ikan, serta revitalisasi lahan tambak

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Kepulauan Sula** (ubi) • Kab. Pulau Taliabu** (ubi dan jagung) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	• Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta penyediaan sarana pra, pasca panen, dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, serta pengadaan gudang lumbung pangan • Penguatan kapasitas SDM (petani, nelayan, dan pembudidaya ikan), dengan *output*: penguatan dan pelatihan kelompok tani gap (*good agriculture practices*), GHP (*good handling practices*), dan PHT (pengendalian hama terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong *ownership* petani, nelayan, dan pembudidaya ikan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk serta pendampingan untuk digitalisasi pertanian • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: pengembangan dan penguatan inkubator koperasi, serta peningkatan sistem logistik pangan lokal Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan *output*: pengembangan kawasan ubi dan jagung, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, peningkatan jalan usaha tani, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan
C1 C3	Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C1: Kab. Halmahera Utara* • C3: Kab. Halmahera Selatan* Kawasan Rendah elektrifikasi: • Kab. Pulau Taliabu** Keterangan: • *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi • **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui: • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: pembangunan pembangkit listrik tenaga EBT berbasis tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
C4	Kawasan Potensial Swasembada Air: • C4: Kab. Halmahera Tengah* Kawasan Rawan Air: • Kab. Kepulauan Sula** • Kab. Pulau Taliabu** Keterangan: • *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi • **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air	Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil melalui: • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan *output*: pembangunan Bendungan Wairoro Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan *output*: pembangunan embung, penyediaan infrastruktur desalinasi air laut di pulau-pulau kecil, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air
D1 D2 D3	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung • D1: PKSN Daruba, serta Kec. Morotai Utara (Kab. Pulau Morotai) Kecamatan Perbatasan Prioritas • D2: Kec. Patani Utara (Kab. Halmahera Tengah) • D3: Kec. Maba Utara (Kab. Halmahera Timur)	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui: • Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, peningkatan akses internet dan listrik, serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sentra perkebunan terintegrasi terutama di PKSN, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, peningkatan rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan kawasan kelapa, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, layanan validasi dan verifikasi pupuk, perluasan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan *output*: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Maluku • Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan *output*: *piloting* pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan *platform* digital manajemen ASN
D4 D5 D6 D7	Kawasan Afirmasi - Kawasan Transmigrasi • D4: KT Sagea Waleh (Kab. Halmahera Tengah) • D5: KT Pulau Bacan (Kab. Halmahera Selatan) • D6: KT Patlean (Kab. Halmahera Timur) • D7: KT Pulau Morotai (Kab. Pulau Morotai)	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sagea Waleh, Pulau Bacan, Patlean, dan Pulau Morotai melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), optimasi kawasan pertanian padi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, serta pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran
D8	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas • D8: Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Halmahera Barat	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Halmahera Barat melalui: • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Peningkatan aksesibilitas desa, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik, serta penyediaan moda transportasi desa • Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal berbasis komoditas kelapa dan pala, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam pengembangan agropolitan dan produk unggulan desa • Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan *output*: fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agropolitan dan pelaksanaan bantuan sosial adaptif
	Penguatan sekolah berpola asrama: • Kab. Pulau Taliabu • Kab. Halmahera Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) Penguatan sekolah terbuka: • Kab. Halmahera Selatan • Kab. Pulau Morotai (PKSN Daruba dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Halmahera Tengah (Kecamatan Perbatasan Prioritas)	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama dan sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka melalui: • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian program Indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (adem) dan pendidikan tinggi (adik), serta fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan *output*: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya, serta peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan *output*: pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model kurikulum yang adaptif dan kontekstual

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Maluku Utara	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
	• Kab. Kepulauan Sula • Kab. Pulau Taliabu • Kab. Halmahera Selatan • Kab. Halmahera Tengah (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Pulau Morotai (PKSN Daruba dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Halmahera Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Layanan Unggulan RS: seluruh kab/kota	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*) melalui: • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, peningkatan RS tipe D menjadi C, pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung *telemedicine* • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*:, pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine* • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan *output*: penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, serta peningkatan infrastruktur tik untuk mendukung *telemedicine* • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan
	Penanganan Penyakit TBC: • Kab. Halmahera Utara • Kab. Halmahera Timur	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Penanganan Penyakit Malaria: • Kab. Halmahera Selatan • Kab. Halmahera Utara • Kab. Halmahera Timur • Kab. Pulau Taliabu Penanganan Penyakit ISPA: • Kab. Halmahera Barat • Kab. Halmahera Tengah • Kab. Halmahera Utara Penanganan Penyakit pneumonia: • Kab. Halmahera Barat • Kab. Halmahera Utara • Kota Ternate • Kota Tidore Kepulauan Penanganan Penyakit Rabies: • Kab. Halmahera Barat • Kab. Halmahera Tengah • Kab. Halmahera Selatan • Kab. Halmahera Utara • Kab. Halmahera Timur • Kab. Pulau Morotai • Kota Ternate Penanganan Penyakit Kusta: Provinsi Maluku Utara	malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, serta peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian ISPA terlatih serta optimalisasi data dan informasi ISPA, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak • Pencegahan dan pengendalian penyakit pneumonia, dengan *output*: peningkatan layanan intensifikasi penemuan kasus dan deteksi dini pneumonia dan peningkatan alat dan bahan kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan pneumonia • Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit rabies, dengan *output*: penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan obat hewan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Halmahera Tengah • Kab. Halmahera Timur • Kab. Kepulauan Sula • Kab. Pulau Taliabu	Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya melalui: • Peningkatan gizi, dengan *output*: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum *stunting* terjadi serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari *buffer stock*, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan *output*: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi, kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan *output*: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB
	• WPP 716 (perbatasan perairan dengan Filipina) • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau)	Penguatan pertahanan keamanan melalui peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama serta pemberantasan praktik IUU *Fishing* melalui: • Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan *output*: pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan • Penyiapan kolaborasi dan kerja sama antarpihak dengan negara-negara tetangga seperti Filipina dan palau • Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan *output*: operasionalisasi lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI), pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (*illegal, unreported, unregulated*) *fishing*. • Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan *output*: revitalisasi sarana prasarana serta perawatan armada pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
E1 E2 E3	Kawasan Konservasi: • E1: Taman Nasional Aketajawe Lolobata (Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Timur, dan Kab. Tidore Kepulauan) • E2: Suaka Margasatwa Goa Bukimoruru (Kab. Halmahera Tengah) • E3: Cagar Alam Pulau Obi (Kab. Halmahera Selatan)	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21. • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan • Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan *output*: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah. • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan *output*: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Maluku Utara	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan *nature-based solutions*, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pascatambang

7. Wilayah Papua

7.1 Provinsi Papua Barat

PAPUA BARAT

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Industri
1. KI Fakfak – Kab. Fakfak

Kawasan Pariwisata
2. Kawasan Pariwisata Teluk Triton – Kab. Kaimana

Kawasan Pertambangan dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
3. Kawasan Pertambangan dan Pengolahan Migas – Kab. Teluk Bintuni

Kawasan Perkotaan
4. Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi – Kab. Pegunungan Arfak

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kakao
1. Kab. Manokwari Selatan

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Manokwari: potensial pangan, potensial energi
2. Kab. Manokwari Selatan: potensial pangan
3. Kab. Teluk Bintuni: potensial air, potensial energi
4. Kab. Kaimana: potensial air

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*
1. Kab. Manokwari Selatan
2. Kab. Teluk Bintuni
3. Kab. Teluk Wondama
4. Kab. Pegunungan Arfak

**) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal*

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

1. TN Teluk Cenderawasih – Kab. Teluk Wondama
2. Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni – Kab. Teluk Bintuni, Kab. Fakfak

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,7 (Rata-rata 2025-2029)	120,6	0,3	19,62 – 20,12	0,370 – 0,380	0,47	1,08	82,89	3,75 – 4,06
2029	6,6 (2029)	164,0	0,3	13,76 – 14,76	0,331 – 0,335	0,49	23,09	83,53	3,68 – 4,00

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Pertumbuhan: • A1: KI Fakfak (Kab. Fakfak)	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru di KI Fakfak dan percepatan hilirisasi industri petrokimia dalam memperkuat industri pupuk dalam negeri, melalui: • Perencanaan, perizinan, dan tata ruang kawasan industri, dengan *output*: penyusunan masterplan dan studi kelayakan, serta percepatan penerapan sistem perizinan terpadu • Pembangunan sarana dan prasarana pendukung di sekitar kawasan industri, dengan *output*: pembangunan jalan strategis, pembangunan spam, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik, bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/pekerja, pengembangan fasilitas kesehatan primer, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta perluasan layanan penyiaran digital • Peningkatan investasi dan promosi ekspor, dengan *output*: fasilitasi investor dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri petrokimia, serta operasionalisasi dan peningkatan investasi kawasan industri di luar Jawa • Fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan *output*: penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan, pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri, serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka • Penyediaan SDM berkualitas mendukung kawasan industri, dengan *output*: fasilitasi pendampingan SMK yang *link and match* dengan industri, pelatihan vokasi industri *upskilling* dan *reskilling* serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat
A2	Kawasan Pertumbuhan: • A2: Kawasan Pariwisata Teluk Triton (Kab. Kaimana)	Penyiapan kawasan pariwisata Teluk Triton di Kab. Kaimana, melalui: • Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan jalan daerah • Pengembangan atraksi, dengan *output*: pendukungan *event* daerah serta pengembangan desa wisata • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan spam dan sistem pengelolaan air limbah domestik • Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A3	Kawasan Pertumbuhan: • A3: Kawasan pertambangan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kab. Teluk Bintuni)	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui hilirisasi industri berbasis SDA (minyak dan gas bumi) berorientasi ekspor di Kab. Teluk Bintuni, melalui: • Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (*Carbon Capture, Utilization, and Storage*), dan *Compression* (UCC Project), serta pengembangan lapangan gas Asap, Kido, dan Merah (AKM) • Peningkatan investasi dan ekspor • Fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan *output*: penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan, pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri, serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka • Peningkatan SDM berkualitas, dengan *output* fasilitasi pendampingan SMK yang *link and match* dengan industri, serta pelatihan vokasi industri *upskilling* dan *reskilling* • Penguatan implementasi penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan migas
A4	Kawasan Pertumbuhan: • A4: Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi (Kab. Pegunungan Arfak)	Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi, melalui: • Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Anggi • Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan SPAM, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, pembangunan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya • Penataan kawasan dan peningkatan citra kota, dengan *output*: penataan kawasan, penguatan *branding* kawasan, dan penguatan promosi daya tarik kota
B1	Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas kakao) Sentra Produksi • B1: Kab. Manokwari Selatan	Penguatan sentra produksi berbasis komoditas kakao, melalui: • Peningkatan produksi perkebunan, dengan *output*: pengembangan kawasan kakao, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan • Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan *output*: pendampingan/penerapan sertifikasi/pengembangan produk, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk *digital farming*

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Papua Barat	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis dan jalan trans, dengan *output*: pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong ruas Jalan Windesi–Ambuni dan ruas Jalan Mameh-Windesi (Werabur), pembangunan jalan akses Bandar Udara Rendani, penanganan jalan daerah, dan peningkatan layanan angkutan jalan perintis • Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan *output*: peningkatan fasilitas Pelabuhan Manokwari di Kab. Manokwari, pengembangan fasilitas Pelabuhan Teluk Patipi dan Pelabuhan Fakfak di Kab.Fakfak, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Bintuni dan Pelabuhan Babo di Kab. Teluk Bintuni, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Oransbari di Kab. Manokwari Selatan, lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana di Kab. Kaimana, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan angkutan penyeberangan perintis • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Rendani di Kab. Manokwari, Bandar Udara Anggi di Kab. Pegunungan Arfak, Bandar Udara Wasior Baru–Teluk Wondama, Bandar Udara Abresso–Manokwari Selatan, Bandar Udara Babo di Kab.Teluk Bintuni, dan Bandar Udara Siboru di Kab.Fakfak, serta pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, terutama pada titik layanan publik, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat
	• Kab. Manokwari Selatan (perkebunan) • Kab. Kaimana (pariwisata) • Kab. Pegunungan Arfak (pariwisata) • Kab. Fakfak (industri pengolahan) • Kab. Teluk Bintuni (industri pengolahan)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata, serta industri pengolahan) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan serta pelatihan berkualitas, dengan *output*: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai pelatihan kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja
C1 C2	Kawasan Potensial Swasembada Pangan • C1: Kab. Manokwari* (padi dan pangan akuatik)	Penguatan kawasan potensial swasembada pangan padi dan pangan akuatik/*bluefood* berbasis perikanan tangkap melalui: • Penguatan produksi, dengan *output*: pengembangan kawasan padi,, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif,

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• C2: Kab. Manokwari Selatan* (padi) Kawasan Rentan Pangan • Kab. Pegunungan Arfak** (ubi dan hortikultura) • Kab. Teluk Wondama** (sagu dan pangan akuatik) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, pemberian pupuk bersubsidi, serta penyaluran benih ikan air laut • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi • Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan) yang terlatih GAP (*Good Agriculture Practices*), GHP (*Good Handling Practices*), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (*good agriculture practices*), GHP (*good handling practices*), dan PHT (pengendalian hama terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong *ownership* petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan dengan *output*: pengembangan kawasan ubi, hortikultura, sagu, dan pangan akuatik, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, serta peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan
C1 C3	Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C1: Kab. Manokwari* • C3: Kab. Teluk Bintuni* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Pegunungan Arfak** • Kab. Teluk Wondama** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui: • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM), pemetaan potensi EBT lainnya, serta pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
C3 C4	Kawasan Potensial Swasembada Air • C3: Kab. Teluk Bintuni* • C4: Kab. Kaimana* Kawasan Rawan Air • Kab. Manokwari** • Kab. Manokwari Selatan** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan/atau merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air	Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, melalui: • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan *output*: pembangunan embung dan tampungan air lainnya Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif dengan *output*: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air
D1 D2 D3 D4	Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • D1: Kab. Manokwari Selatan (kakao) • D2: Kab. Teluk Bintuni (udang dan kepiting) • D3: Kab. Teluk Wondama (perikanan dan rumput laut) • D4: Kab. Pegunungan Arfak (hortikultura dan pariwisata Danau Anggi Giji dan Anggi Gida) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, serta penataan pariwisata rintisan, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan sarana budi daya perikanan yang disalurkan ke masyarakat, pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha, peningkatan akses pembiayaan modal, pendukungan *event* daerah serta pengembangan desa wisata, serta pengembangan UMKM lokal, serta peningkatan daya saing masyarakat • Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan; perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat; pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; perluasan layanan penyiaran digital; pembangunan jalan akses simpul ekonomi; serta pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara • Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan *output*: masyarakat di daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah sepanjang hari: • Kab. Pegunungan Arfak (Daerah Tertinggal) Pengembangan sekolah berpola asrama: • Kab. Teluk Wondama (Daerah Tertinggal) • Kab. Manokwari Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik , dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan *output*: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan *output*: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual
	Provinsi Papua Barat	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
	Pelayanan kesehatan bergerak: • Kab. Teluk Bintuni (Daerah Tertinggal) • Kab. Kaimana • Kab. Pegunungan Arfak (Daerah Tertinggal)	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine* • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Percepatan operasionalisasi RSUD: • Kab. Pegunungan Arfak (Daerah Tertinggal) Peningkatan RS dari tipe D menjadi Tipe C: • Kab. Pegunungan Arfak (Daerah Tertinggal) • Kab. Kaimana Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat	kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta percepatan operasionalisasi RSUD di Kab. Pegunungan Arfak • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan • Penurunan kematian ibu dan anak melalui peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas layanan
	Pengendalian penyakit malaria: • Kab. Manokwari • Kab. Manokwari Selatan • Kab. Teluk Bintuni • Kab. Teluk Wondama • Kab. Fakfak • Kab. Kaimana Pengendalian penyakit TBC: • Kab. Teluk Bintuni • Kab. Manokwari Selatan • Kab. Pegunungan Arfak Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: Provinsi Papua Barat	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS
	Provinsi Papua Barat	Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya melalui: • Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua • Peningkatan gizi, dengan *output*: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum *stunting* terjadi serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari *buffer stock*, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan *output*: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan *output*: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB • Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi
	Pemberantasan IUU Fishing: • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: • Provinsi Papua Barat	Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU Fishing pada WPP 717, melalui: • Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan laut, dengan *output*: peningkatan operasi kapal dan *speedboat* pengawas, serta patroli mandiri • Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan *output*: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU *(illegal, unreported, unregulated) fishing*. • Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan *output*: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) • Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan *output*: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua • Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut
	Provinsi Papua Barat	Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah ulayat, melalui: • Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan *output*: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat • Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan *output*: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil • Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat
E1 E2	Kawasan Konservasi: • E1: TN Teluk Cenderawasih (Kab. Teluk Wondama) • E2: Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Fakfak)	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21. • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan *output*: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah. • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan *output*: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) • Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem
	Provinsi Papua Barat	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, melalui: • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, serta penerapan *nature-based solutions*, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pascatambang
	Provinsi Papua Barat	Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: • Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan *output*: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai *platform* terintegrasi pemerintahan di daerah • Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan *output*: pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah • Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung *smart government*, dengan *output*: peningkatan portal pelayanan publik dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS • Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP)

7.2 Provinsi Papua

PAPUA

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata
1. Kawasan Pariwisata Biak - Teluk Cenderawasih – Kab. Biak Numfor

Kawasan Perkotaan
2. Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura – Kota Jayapura

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Industri Berbasis Komoditas TCT
1. Kota Jayapura
2. Kab. Biak Numfor

Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT
3. Kota Jayapura
4. Kab. Biak Numfor
5. Kab. Jayapura
6. Kab. Kepulauan Yapen
7. Kab. Waropen

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Keerom: KSPP
2. Kab. Jayapura: potensial pangan, potensial air
3. Kab. Biak Numfor: potensial pangan
4. Kota Jayapura: potensial pangan, potensial energi
5. Kab. Mamberamo Raya: potensial energi, potensial air
6. Kab. Kepulauan Yapen: potensial pangan
7. Kab. Sarmi: potensial pangan

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*
1. Kab. Mamberamo Raya
2. Kab. Waropen
3. Kab. Supiori

**) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal*

Kawasan Perbatasan
PKSN dan Wilayah Pendukung
4. PKSN Jayapura – Kota Jayapura
5. PKSN Biak – Kec. Aimando Padaido, Kec. Padaido, Kec. Oridek, Kec. Biak Utara, Kec. Yawosi, Kec. Warsa, dan Kec. Bondifuar – Kab. Biak Numfor

Kecamatan Perbatasan Prioritas
6. Kec. Sawai – Kab. Mamberamo Raya
7. Kec. Pantai Timur, Kec. Sarmi Timur, Kec. Sarmi Selatan, Kec. Sarmi, Kec. Pantai Barat – Kab. Sarmi
8. Kec. Towe, Kec. Waris – Kab. Keerom
9. Kec. Supiori Utara, Kec. Supiori Barat, Kec. Kepulauan Aruri – Kab. Supiori

Kawasan Transmigrasi
10. KT Senggi – Kab. Keerom

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi
1. TN Teluk Cenderawasih –Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Waropen, dan Kab. Kepulauan Yapen
2. TN Mamberamo Foja –Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi
3. KKN Padaido – Kab. Biak Numfor

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
4. Kota Jayapura

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,4 (Rata-rata 2025–2029)	88,0	0,4	16,00 – 16,50	0,380 – 0,383	0,44	59,28	82,19	6,00 – 6,40
2029	7,3 (2029)	126,9	0,4	12,65 – 13,65	0,355 – 0,359	0,47	78,99	82,83	5,48 – 6,00

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Pertumbuhan: • A1: Kawasan Pariwisata Biak–Teluk Cenderawasih (Kab. Biak Numfor)	Penyiapan kawasan pariwisata Biak–Teluk Cenderawasih di Kab. Biak Numfor, melalui: • Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan jalan daerah • Pengembangan atraksi, dengan *output*: pendukungan *event* daerah dan pengembangan desa wisata • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan SPAM dan sistem pengelolaan air limbah domestik • Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan bumkam
A2	Kawasan Pertumbuhan: • A2: Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura (Kota Jayapura)	Pengembangan Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura, melalui: • Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan *output*: rencana induk (masterplan) • Penataan kawasan dan peningkatan citra kota dengan *output*: penguatan *branding* kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual • Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan jalan strategis, SPAM, SPAL, infrastruktur listrik dan TIK, PSU bidang perumahan, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna-cakalang-tongkol) Sentra Industri • B1: Kota Jayapura • B2: Kab. Biak Numfor Sentra Produksi • B3: Kota Jayapura	Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui: • Penguatan sentra produksi perikanan, dengan *output*: penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan serta penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat • Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan *output*: peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pengembangan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penyediaan sarana penyimpanan dan distribusi logistik produk, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, penumbuhan eksportir, industrialisasi koperasi melalui rantai pasok produksi, pembentukan dan penguatan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• B4: Kab. Biak Numfor • B5: Kab. Jayapura • B6: Kab. Kepulauan Yapen • B7: Kab. Waropen	koperasi, pelaku usaha, UMKM dalam rantai pasok, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan *output*: pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (*smart fisheries village*), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan • Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan, dengan *output*: hilirisasi produk akuakultur dan produk hilirisasi pangan hasil laut, pemberian bantuan pendanaan *matching fund* (BOPTN Penelitian) terkait produk hilirisasi kelautan perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital
	Provinsi Papua	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan *output*: pembangunan jembatan strategis, penanganan jalan daerah, serta pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong ruas jalan Jayapura–Sarmi • Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan *output*: *replacement* fasilitas Pelabuhan Sarmi di Kab. Sarmi, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Padaido dan Pelabuhan Pulau Owi di Kab. Biak Numfor, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Serui di Kab. Kepulauan Yapen, pembangunan fasilitas Pelabuhan Marsram di Kab. Supiori, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan angkutan penyebrangan perintis • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Numfor di Kab. Biak Numfor dan Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan *output*: pembangunan BTS 4G/*Lastmile* dan peningkatan akses internet, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital
	• Kab. Jayapura (perikanan) • Kab. Biak Numfor (perikanan, dan pariwisata) • Kota Jayapura (perikanan) • Kab. Kepulauan Yapen (perikanan) • Kab. Waropen (perikanan)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan dan pariwisata) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan *output*: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja
C1	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C1: Kab. Keerom	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kab. Keerom yang didukung dengan Kawasan Transmigrasi Senggi, melalui: • Penyiapan pengembangan kawasan, dengan *output*: optimasi lahan menjadi produktif, pembangunan embung pertanian dan non pertanian, penyiapan jaringan drainase dan irigasi, konektivitas transportasi desa, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju KSPP • Peningkatan produksi, dengan *output*: penyaluran benih jagung berkualitas, areal pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pangan, dan unit pengolah pupuk organik (UPPO) • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana produksi, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, serta alat dan mesin pertanian • Penguatan pascapanen dan tata kelola, dengan *output*: penyediaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kelembagaan ekonomi petani, pengembangan usaha koperasi, dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk *digital farming* • Pencetakan sawah • Pembangunan Bandara Senggi (Kab. Keerom) dalam rangka mendukung KSPP Keerom
C2 C3 C4 C6 C7	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C2: Kab. Jayapura* (padi dan pangan akuatik) • C3: Kab. Biak Numfor* (pangan akuatik) • C4: Kota Jayapura* (padi dan pangan akuatik) • C6: Kab. Kepulauan Yapen* (pangan akuatik) • C7: Kab. Sarmi* (pangan akuatik) Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Mamberamo Raya** (padi) • Kab. Supiori** (padi) Keterangan:	Penguatan kawasan swasembada pangan padi dan pangan akuatik/*bluefood* berbasis perikanan tangkap, melalui: • Penguatan produksi, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengembangan kawasan padi, pemberian pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian pra panen, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan • Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan), dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (*Good Agriculture Practices*), GHP (*Good Handling Practices*), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong *ownership* petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: pelatihan kelompok tani, penyediaan inkubator usaha koperasi, pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan *output*: pengembangan kawasan padi,

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, serta peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan
C2 C5	Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C2: Kota Jayapura* • C5: Kab. Mamberamo Raya* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Supiori** • Kab. Kepulauan Yapen** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui: • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), penyiapan pembangunan pabrik *ethanol* dalam rangka industrialisasi energi, pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
C5 C2	Kawasan Potensial Swasembada Air: • C2: Kab. Jayapura* • C5: Kab. Mamberamo Raya* Kawasan Rawan Air: • Kab. Keerom** • Kab. Biak Numfor** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas air tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super	Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil, melalui: • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya, dengan *output*: pembangunan embung dan tampungan air lainnya Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan *output*: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, penyediaan infrastruktur desalinasi di pulau-pulau kecil, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	prioritas ketahanan iklim bidang air	
D1 D2 D3	Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • D1: Kab. Mamberamo Raya (sagu dan kakao) • D2: Kab. Waropen (kakao dan kelapa) • D3: Kab. Supiori (kelapa) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian terintegrasi, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, pengembangan UMKM lokal, peningkatan daya saing masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, serta penyediaan dan pengawasan infrastruktur sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS • Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan *output*: masyarakat di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana
D4 D5 D6 D7 D8 D9	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan: PKSN dan Wilayah Pendukung • D4: PKSN Jayapura (Kota Jayapura) • D5: PKSN Biak, Kec. Aimando Padaido, Kec. Padaido, Kec. Oridek, Kec. Biak Utara, Kec. Yawosi, Kec. Warsa, Kec. Bondifuar (Kab. Biak Numfor) Kecamatan Perbatasan Prioritas • D6: Kec. Sawai (Kab. Mamberamo Raya) • D7: Kec. Pantai Timur, Kec. Sarmi Timur, Kec. Sarmi Selatan, Kec. Sarmi, Kec. Pantai Barat (Kab. Sarmi)	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Biak, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui: • Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, dengan *output*: peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT (SKPT Jayapura dan SKPT Biak) yang dikelola dan operasional sesuai standar, penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan • Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan *output*: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Papua • Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan *output*: *piloting* pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN, bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara, serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• D8: Kec. Towe, Kec. Waris (Kab. Keerom) • D9: Kec. Supiori Utara, Kec. Supiori Barat, Kec. Kepulauan Aruri (Kab. Supiori)	
D10	Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi • D10: KT Senggi (Kab. Keerom)	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Senggi, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, sarana permukiman di kawasan transmigrasi, serta perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), optimasi kawasan pertanian padi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, serta pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran • Penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil, dengan *output*: tenaga pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya, penyediaan instruktur yang berkinerja tinggi di kawasan transmigrasi
	Pengembangan sekolah terbuka: • Kab. Waropen (Daerah Tertinggal) Pengembangan sekolah berpola asrama: • Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Waropen (Daerah Tertinggal) • Kab. Jayapura • Kota Jayapura (PKSN Jayapura) Pengembangan sekolah sepanjang hari: • Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kota Jayapura (PKSN Jayapura)	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan *output*: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan *output*: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: • Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua	
	Provinsi Papua	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
	Pelayanan kesehatan bergerak: • Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Pembangunan RSUD kabupaten: • Kab. Supiori (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: • Kab. Keerom (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Waropen (Daerah Tertinggal) • Kab. Supiori (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine* • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta percepatan operasionalisasi RSUD di Kab. Supiori • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan • Penurunan kematian ibu dan anak melalui peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas layanan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sarmi (Kecamatan Perbatasan Prioritas) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: • Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua	
	Pengendalian penyakit TBC: • Kab. Jayapura • Kab. Kepulauan Yapen • Kab. Biak Numfor • Kab. Sarmi • Kab. Waropen • Kab. Supiori Pengendalian penyakit malaria: • Kab. Keerom • Kab. Jayapura • Kab. Sarmi • Kab. Mamberamo Raya • Kab. Waropen • Kab. Kepulauan Yapen • Kab. Biak Numfor • Kab. Supiori • Kota Jayapura Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: • Provinsi Papua	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data
	Provinsi Papua	Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya melalui: • Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua • Peningkatan gizi, dengan *output*: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum *stunting* terjadi serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari *buffer stock*, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan *output*: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan *output*: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB • Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi
	Pemberantasan IUU *Fishing*: • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: • Provinsi Papua	Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU *Fishing* pada WPP 717, melalui: • Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan *output*: peningkatan operasi kapal dan *speedboat* pengawas, serta patroli mandiri • Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan *output*: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU *(illegal, unreported, unregulated) fishing*. • Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan *output*: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) • Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan *output*: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua • Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut
	Provinsi Papua	Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui: • Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan *output*: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat • Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan *output*: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil (KAT) • Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat, dengan *output*: pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat
E1 E2 E3	Kawasan Konservasi: • E1: TN Teluk Cendrawasih (Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Waropen, dan Kab. Kepulauan Yapen)	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• E2: TN Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura, dan Kab. Keerom) • E3: KKN Padaido (Kab. Biak Numfor)	• Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi • Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan *output*: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah. • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan *output*: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon, pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan, dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) • Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem
E4	Lingkungan Hidup: • Provinsi Papua Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: • E4: Kota Jayapura	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat terhadap mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pemberian fasilitasi dan pembinaan dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, pembangunan pengaman pantai, pemulihan ekosistem mangrove, penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan
	Provinsi Papua	Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: • Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan *output*: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai *platform* terintegrasi pemerintahan di daerah • Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan *output*: pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur daerah, pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah • Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung *smart government*, dengan *output*: portal pelayanan publik dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS • Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP)

7.3 Provinsi Papua Pegunungan

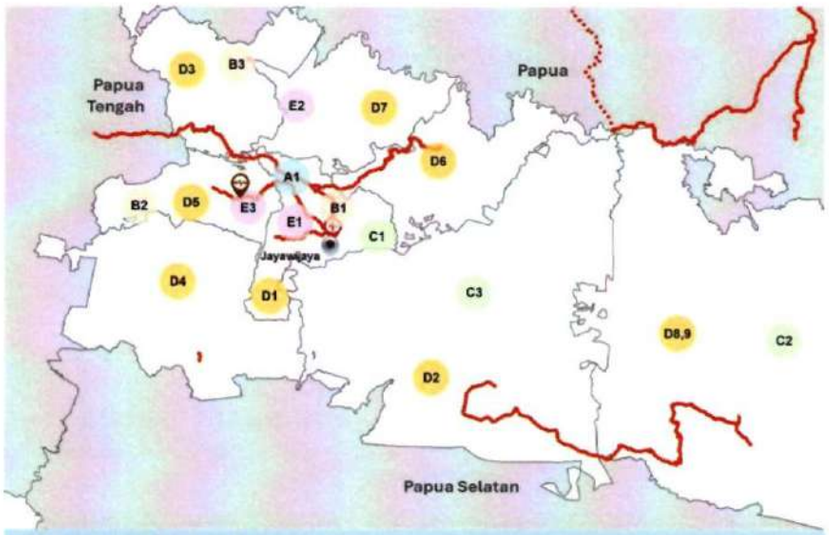

PAPUA PEGUNUNGAN

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Perkotaan

1. Ibu Kota Daerah Otonom Baru – Kab. Jayawijaya

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kopi

1. Kab. Jayawijaya
2. Kab. Lanny Jaya
3. Kab. Tolikara

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Jayawijaya: potensial pangan dan potensial energi
2. Kab. Pegunungan Bintang: potensial air
3. Kab. Yahukimo: potensial air

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*

1. Kab. Jayawijaya
2. Kab. Yahukimo
3. Kab. Tolikara
4. Kab. Nduga
5. Kab. Lanny Jaya
6. Kab. Yalimo
7. Kab. Mamberamo Tengah
8. Kab. Pegunungan Bintang

**) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal*

Kawasan Perbatasan

Kecamatan Perbatasan Prioritas

9. Kec. Iwur, Kec. Tarup, Kec. Oksibil, Kec. Oksamol, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Batom, Kec. Mofinop, dan Kec. Murkim – Kab. Pegunungan Bintang

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi

1. TN Lorentz –Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, dan Kab. Lanny Jaya
2. TN Mamberamo Foja – Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Pegunungan Bintang, dan Kab. Tolikara

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

3. Kab. Lanny Jaya

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,0 (Rata-rata 2025-2029)	19,1	0,1	30,00 – 31,00	0,377 – 0,383	0,43	59,28	83,53	1,75 – 2,10
2029	8,0 (2029)	28,6	0,1	17,50 – 18,50	0,339 – 0,343	0,45	78,99	84,15	1,68 – 2,00

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Pertumbuhan: • A1: Ibu Kota Daerah Otonom Baru (Kab. Jayawijaya)	Pengembangan Kab. Jayawijaya sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Pegunungan, melalui: • Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Pegunungan, dengan *output*: pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan, serta pembebasan lahan • Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan *output*: rencana induk (masterplan) • Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah dengan *output*: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Wamena • Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan SPAM , pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya • Penataan kawasan
B1 B2 B3	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas kopi) Sentra Produksi • B1: Kab. Jayawijaya • B2: Kab. Lanny Jaya • B3: Kab. Tolikara	Penguatan sentra produksi berbasis komoditas kopi, melalui: • Peningkatan produksi perkebunan, dengan *output*: percepatan rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan lahan, pemberian bibit unggul tanaman, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan • Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan *output*: pengembangan produk, pendampingan IKM, peningkatan kreativitas, informasi pasar, promosi dan pemasaran, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM, dengan *output*: pengembangan studi vokasi yang menerapkan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja, pelatihan vokasi industri *upskilling* dan *reskilling*, serta fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pedesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan dengan *output*: penjaminan HAKI, kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual serta peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk *digital farming* serta peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian *matching fund* (BOPTN penelitian)
	Provinsi Papua Pegunungan	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan *output*: dengan *output*: penanganan jalan daerah dan pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong (Towe Hitam–Oksibil, Jayapura–Wamena, dan Karubaga–Ilu–Mulia) • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai dan Bandar Udara Sobaham di Kab. Yahukimo, Bandar Udara Wamena di Kab. Jayawijaya, Bandar Udara Elelim di Kab. Yalimo, Bandar Udara Oksibil, Bandar Udara Batom, Bandar Udara Kiworok di Kab. Pegunungan Bintang, pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo, serta pengembangan angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat
	• Kab. Jayawijaya (perkebunan) • Kab. Lanny Jaya (perkebunan) • Kab. Tolikara (perkebunan)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah perkebunan sesuai kebutuhan DUDI, melalui: • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan serta pelatihan berkualitas, dengan *output*: jalan menuju fasilitas pendidikan, perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual, dan revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja
C1	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C1: Kab. Jayawijaya* (padi, ubi,	Penguatan kawasan potensial swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi dan ubi), hortikultura, dan peternakan (babi) melalui: • Penguatan produksi, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pemberian pupuk bersubsidi dan bibit

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	hortikultura, dan babi)	unggul tanaman, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura, serta bantuan ternak babi
	Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Mamberamo Tengah** (padi) • Kab. Nduga** (padi) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	• Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi. • Penguatan kapasitas SDM (petani dan peternak), dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk *GAP (Good Agriculture Practices), GHP (Good Handling Practices)*, dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu) • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan peternak yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output* pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis dan penguatan usaha koperasi melalui inkubator, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan *output*: pengembangan kawasan sagu dan padi, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, serta pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan
C1	Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C1: Kab. Jayawijaya* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Pegunungan Bintang** • Kab. Yalimo** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial energi melalui: • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
C2 C3	Kawasan Potensial Swasembada Air: • C2: Kab. Pegunungan Bintang* • C3: Kab. Yahukimo* Kawasan Rawan Air: • Kab. Tolikara** • Kab. Lanny Jaya** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas air tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air	Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air melalui: • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan *output*: pembangunan tampungan air Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan *output*: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8	Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • D1: Kab. Jayawijaya* (kopi dan pariwisata budaya Lembah Baliem) • D2: Kab. Yahukimo* (Kopi) • D3: Kab. Tolikara* (Kopi) • D4: Kab. Nduga* (Kopi) • D5: Kab. Lanny Jaya* (Kopi) • D6: Kab. Yalimo* (Kopi) • D7: Kab. Mamberamo Tengah* (Kopi) • D8: Kab. Pegunungan Bintang* (Kopi) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan penataan pariwisata rintisan, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, pendukungan *event* daerah serta pengembangan desa wisata, pengembangan UMKM lokal, peningkatan daya saing masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan; perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat; pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; perluasan layanan penyiaran digital; pembangunan jalan akses simpul ekonomi; serta pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara • Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan *output*: masyarakat di daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana
D9	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan	Pengembangan kawasan perbatasan di kecamatan perbatasan prioritas, melalui:

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Kecamatan Perbatasan Prioritas: • D9: Kec. Iwur, Kec. Tarup, Kec. Oksibil, Kec. Oksamol, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Batom, Kec. Mofinop, dan Kec. Murkim (Kab. Pegunungan Bintang)	• Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik • Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan *output*: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perbatasan negara di Provinsi Papua Pegunungan • Penguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan, dengan *output*: *Piloting* pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN, serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara
	Pengembangan sekolah berpola asrama: • Kab. Jayawijaya (Daerah Tertinggal) • Kab. Pegunungan Bintang (Daerah Sangat Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Yahukimo (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah terbuka: • Kab. Tolikara (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Mamberamo Tengah (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Yalimo (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Yahukimo (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Lanny Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Nduga (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Pegunungan Bintang (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah sepanjang hari: • Kab. Jayawijaya (Daerah Tertinggal)	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik , dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan *output*: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan *output*: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan	
	Provinsi Papua Pegunungan • Kab. Jayawijaya (Tradisi dan Budaya Lembah Baliem)	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, terutama tradisi dan budaya di Lembah Baliem, melalui: • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
	Pelayanan kesehatan bergerak: • Kab. Yalimo (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Yahukimo (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Lanny Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Nduga (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Pegunungan Bintang (Daerah Sangat Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Pembangunan RSUD provinsi • Kab. Jayawijaya (Daerah Tertinggal) Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: • Kab. Yahukimo (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Pegunungan Bintang (Daerah Sangat Tertinggal)	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine* • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta pembangunan RSUD Provinsi Papua Pegunungan • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Mamberamo Tengah (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Lanny Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan	
	Pengendalian penyakit malaria: • Kab. Jayawijaya • Kab. Pegunungan Bintang • Kab. Tolikara • Kab. Nduga • Kab. Lanny Jaya • Kab. Mamberamo Tengah • Kab. Yalimo • Kab. Yahukimo Pengendalian penyakit TBC: • Kab. Pegunungan Bintang • Kab. Yalimo Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: • Provinsi Papua Pegunungan	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data
	Provinsi Papua Pegunungan	Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya melalui: • Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua • Peningkatan gizi, dengan *output*: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum *stunting* terjadi serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari *buffer stock*, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan *output*: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		gizi dan kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan *output*: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB • Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi
	Provinsi Papua Pegunungan	Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, melalui: • Penguatan pertahanan keamanan Papua dengan *output* operasi intelijen kontra separatisme • Pembentukan keamanan berbasis komunitas, dengan *output*: penguatan Sistem Keamanan Lokal (Poskamling) dan peningkatan kerja sama TNI dan Polri dengan masyarakat lokal • Pemberdayaan pemuda terutama OAP untuk meningkatkan pertahanan keamanan distrik, dengan *output*: pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan serta pelatihan bela negara • Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan *output*: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua
	Provinsi Papua Pegunungan	Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah/ulayat, melalui: • Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan *output*: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat • Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan *output*: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil (KAT) • Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat, dengan *output*: pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat
E1 E2	Kawasan Konservasi: • E1: TN Lorentz (Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, dan Kab. Lanny Jaya) • E2: TN Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yalimo, dan Kab. Tolikara)	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi • Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan *output*: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan *output*: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) • Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem
E3	Lingkungan Hidup: • Provinsi Papua Pegunungan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: • E3: Lanny Jaya	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan *nature-based solutions*, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan
	Provinsi Papua Pegunungan	Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: • Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan *output*: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai platform terintegrasi pemerintahan di daerah • Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru • Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN dengan *output*: pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur daerah, pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah • Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung *smart government*, dengan *output*: peningkatan portal pelayanan publik dan penerapan PTSP berbasis OSS di daerah • Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP)

7.4 Provinsi Papua Tengah

PAPUA TENGAH

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata
1. Kawasan Pariwisata TN Teluk Cenderawasih – Kab. Nabire

Kawasan Pertambangan Emas-Tembaga-Perak
2. Kawasan Pertambangan Emas-Tembaga-Perak - Kab. Mimika

Kawasan Perkotaan
3. Ibu Kota Daerah Otonom Baru – Kab. Nabire

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kopi
1. Kab. Paniai
2. Kab. Dogiyai
3. Kab. Puncak Jaya

Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT
4. Kab. Nabire
5. Kab. Mimika

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Nabire: potensial pangan, potensial energi, potensial air
2. Kab. Mimika: potensial pangan, potensial energi, potensial air

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*
1. Kab. Paniai
2. Kab. Dogiyai
3. Kab. Deiyai
4. Kab. Puncak
5. Kab. Puncak Jaya
6. Kab. Intan Jaya

**) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal*

Kawasan Perbatasan
Kecamatan Perbatasan Prioritas
7. Kec. Mimika Barat, Kec. Mimika Timur, Kec. Mimika Timur Jauh, dan Kec. Jita – Kab. Mimika

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi
1. TN Teluk Cenderawasih – Kab. Nabire
2. TN Lorentz – Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya
3. TN Mamberamo Foja – Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
4. Kab. Deiyai

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tengah

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,7 (Rata-rata 2025-2029)	119,5	0,7	26,50 – 27,00	0,380 – 0,383	0,42	59,28	82,56	2,65 – 3,12
2029	8,6 (2029)	179,4	0,8	15,50 – 16,50	0,374 – 0,380	0,45	78,99	83,20	2,00 – 2,40

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A3	Kawasan Pertumbuhan: • A3: Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (Kab. Nabire)	Pengembangan Kab. Nabire sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, melalui: • Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, dengan *output*: pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan serta pembebasan lahan • Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan *output*: rencana induk (masterplan) • Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Douw Aturure Nabire • Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya • Penataan kawasan
A1	Kawasan Pertumbuhan: • A1: Kawasan Pariwisata TN Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire	Penyiapan kawasan pariwisata TN Teluk Cendrawasih di Kab. Nabire, melalui: • Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan jalan daerah • Pengembangan atraksi, dengan *output*: pendukungan *event* daerah dan pengembangan desa wisata • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan spam dan sistem pengelolaan air limbah domestik • Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam
A2	Kawasan Pertumbuhan: • A2: Kawasan pertambangan emas-tembaga-perak (Kab. Mimika)	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui hilirisasi industri berbasis SDA (emas, tembaga, dan perak) berorientasi ekspor di Kab. Mimika, melalui: • Peningkatan investasi dan ekspor • Fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan *output*: penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan, pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri, serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka • Peningkatan SDM berkualitas, dengan *output*: fasilitasi pendampingan SMK yang *link and match* dengan industri, serta pelatihan vokasi industri *upskilling* dan *reskilling*

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan implementasi penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan, melalui: reklamasi pascatambang
B1 B2 B3	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas kopi) Sentra Produksi • B1: Kab. Paniai • B2: Kab. Dogiyai • B3: Kab. Puncak Jaya	Penguatan sentra produksi berbasis komoditas kopi, melalui: • Peningkatan produksi perkebunan, dengan *output*: pengembangan kawasan kopi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan • Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan *output*: pendampingan/penerapan sertifikasi/pengembangan produk, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk *digital farming*
B4 B5	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna cakalang-tongkol) Sentra Produksi • B4: Kab. Nabire • B5: Kab. Mimika	Penguatan sentra produksi berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui: • Penguatan sentra produksi, dengan *output*: penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan serta penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat • Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan *output*: peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pembangunan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penguatan sarana distribusi logistik produk kelautan dan perikanan, analisa dan informasi pasar ekspor, fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk pada usaha mikro, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM, dengan *output*: percontohan penyuluhan/penerapan model pemberdayaan sosial ekonomi pada masyarakat kelautan dan perikanan, serta pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan perikanan di lokasi SKPT sesuai standar, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: peningkatan kapasitas kelembagaan pada kelompok usaha bersama, fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha pada UMKM kelautan dan perikanan, fasilitasi pengembangan BUMDesa, fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk pada usaha mikro, pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (*smart fisheries village*), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan, dengan *output*: hilirisasi produk akuakultur, produk hilirisasi pangan hasil laut, serta penerapan teknologi ekonomi digital
	Provinsi Papua Tengah	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis dan jalan trans, dengan *output*: pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong ruas Jalan Wagete-Timika, Mulia-Sinak, Ilu-Mulia-Enarotali, Karubaga-Ilu-Mulia, serta penanganan jalan daerah • Pengembangan pelabuhan dan jaringan pelayaran, dengan *output*: peningkatan layanan angkutan penyebrangan perintis • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Ilaga, Agandugume, dan Sinak di Kab. Puncak, Bandar Udara Mozes Kilangin di Kab. Mimika, dan Bandar Udara Douw Aturure di Kab. Nabire, standardisasi *airstrip* di Papua Tengah, pengembangan angkutan udara perintis penumpang, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang, serta angkutan udara perintis kargo • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat
	• Kab. Mimika (perikanan dan pertambangan) • Kab. Paniai (perkebunan) • Kab. Dogiyai(perkebunan) • Kab. Puncak Jaya (perkebunan) • Kab. Nabire (perikanan dan pariwisata)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan serta pelatihan berkualitas, dengan *output*: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta SMK yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja
C1 C2	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C1: Kab. Nabire* (padi dan pangan akuatik) • C2: Kab. Mimika* (padi, sagu, dan pangan akuatik)	Penguatan kawasan potensial swasembada pangan berbasis pertanian tanaman pangan (padi dan sagu) serta pangan akuatik/*bluefood* berbasis perikanan tangkap, melalui: • Peningkatan produksi, dengan *output*: pengembangan kawasan padi dan sagu, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pemberian pupuk bersubsidi, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, serta penyaluran benih ikan air laut • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan,

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Puncak Jaya** (ubi dan babi) • Kab. Intan Jaya** (ubi) • Kab. Dogiyai** (ubi dan hortikultura) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi • Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan), dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (*Good Agriculture Practices*), GHP (*Good Handling Practices*), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong *ownership* petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan *output*: pengembangan kawasan ubi dan hortikultura, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, bantuan ternak babi, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan
C1 C2	Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C1: Kab. Nabire* • C2: Kab. Mimika* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Puncak Jaya** • Kab. Intan Jaya** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui: • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM), pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
C1 C2	Kawasan Potensial Swasembada Air: • C1: Kab. Nabire* • C2: Kab. Mimika* Kawasan Rawan Air: • Kab. Puncak** • Kab. Puncak Jaya**	Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, melalui: • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan *output*: pembangunan embung dan tampungan air lainnya Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan *output*: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan/atau merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air	
D1 D2 D3 D4 D5 D6	Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • D1: Kab. Paniai (kopi) • D2: Kab. Dogiyai (kopi) • D3: Kab. Deiyai (kopi) • D4: Kab. Puncak (kopi) • D5: Kab. Puncak Jaya (kopi) • D6: Kab. Intan Jaya (kopi) *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, peningkatan sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat, pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha, pengembangan UMKM lokal, peningkatan kemandirian masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan; perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat; pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital; pembangunan jalan akses simpul ekonomi; serta pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara • Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan *output*: masyarakat di daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana
D7	Kawasan Afirmasi Kawasan perbatasan Kecamatan perbatasan prioritas: • D7: Kec. Mimika Barat, Kec. Mimika Timur, Kec. Mimika Timur Jauh, dan Kec. Jita (Kab. Mimika)	Pengembangan kecamatan perbatasan prioritas, melalui: • Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, penyediaan sarana pelayanan dasar, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik • Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan *output*: fasilitasi kampung siaga bencana terhadap warga masyarakat di lokasi rawan bencana, serta fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam di kawasan perbatasan. • Penguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan, dengan *output*: *piloting* pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama: • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah terbuka: • Kab. Dogiyai (Daerah Tertinggal) • Kab. Deiyai (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah sepanjang hari: • Kab. Paniai (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah berpola asrama: • Kab. Nabire • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik , dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan *output*: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan *output*: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual
	Provinsi Papua Tengah	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
	Pelayanan kesehatan bergerak: • Kab. Dogiyai (Daerah Tertinggal) • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) Pembangunan RSUD provinsi: • Kab. Nabire (Daerah Tertinggal) Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: • Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Deiyai (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Dogiyai (Daerah Tertinggal) • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine* • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua, dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta pembangunan RSUD Provinsi Papua tengah • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
	Pengendalian penyakit malaria: • Kab. Paniai • Kab. Dogiyai • Kab. Intan Jaya • Kab. Deiyai • Kab. Puncak • Kab. Puncak Jaya • Kab. Nabire • Kab. Mimika	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Pengendalian penyakit TBC: • Kab. Paniai • Kab. Nabire Pengendalian filariasis kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: Provinsi Papua Tengah	tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIS
	Provinsi Papua Tengah	Penguatan percepatan pencegahan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya melalui: • Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua • Peningkatan gizi, dengan *output*: : pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum *stunting* terjadi serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari *buffer stock*, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan *output*: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan *output*: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB • Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi
	Pemberantasan IUU *Fishing*: • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) • WPP 718 (perbatasan perairan dengan Australia) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: • Provinsi Papua Tengah	Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU *Fishing* pada WPP 717 dan 718, melalui: • Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan laut, dengan *output*: peningkatan operasi kapal dan *speedboat* pengawas, serta patroli mandiri • Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan *output*: lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU *(illegal, unreported, unregulated) fishing*. • Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan *output*: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) • Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan *output*: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua • Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Papua Tengah	Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah ulayat, melalui: • Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan *output*: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat • Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan *output*: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil • Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat
E1 E2 E3	Kawasan Konservasi: • E1: TN Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire) • E2: TN Lorentz (Kab. Mimika, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Paniai) • E3: TN Mamberamo Foja (Kab. Puncak dan Kab. Puncak Jaya)	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi • Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan *output*: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah. • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan *output*: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) • Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem
E4	Lingkungan Hidup: • Provinsi Papua Tengah Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: • E4: Kab. Deiyai	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: • peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan *nature-based solutions*, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pascatambang

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Papua Tengah	Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: • Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan *output*: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai *platform* terintegrasi pemerintahan di daerah • Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru • Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan *output*: pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah • Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung *smart government*, dengan *output*: peningkatan portal pelayanan publik dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS • Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP)

7.5 Provinsi Papua Selatan

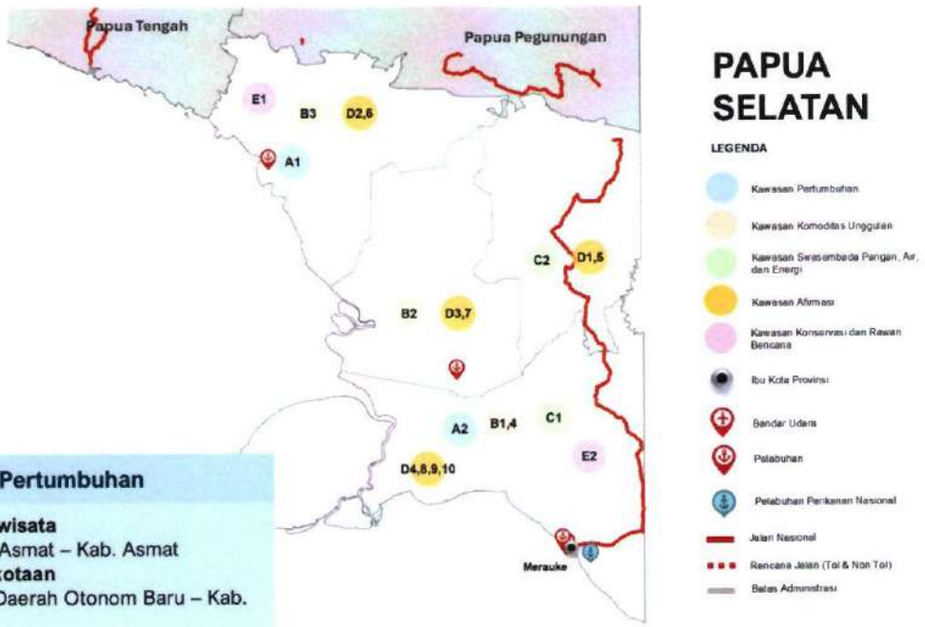

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata
1. Kawasan Asmat – Kab. Asmat

Kawasan Perkotaan
2. Ibu Kota Daerah Otonom Baru – Kab. Merauke

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Sagu
1. Kab. Merauke
2. Kab. Mappi
3. Kab. Asmat

Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT
4. Kab. Merauke

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Merauke: KSPP, potensial pangan, potensial energi
2. Kab. Boven Digoel: potensial air

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*
1. Kab. Boven Digoel
2. Kab. Asmat
3. Kab. Mappi

**) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal*

Kawasan Perbatasan

PKSN dan Wilayah Pendukung
4. PKSN Merauke, Kec. Ilwayab, Kec. Tabonji, Kec. Waan, Kec. Tubang, Kec. Okaba, Kec. Malind, dan Kec. Naukenjerai – Kab. Merauke
5. PKSN Tanah Merah, Kec. Kombut, Kec. Waropko, dan Kec. Ambatkwi – Kab. Boven Digoel

Kecamatan Perbatasan Prioritas
6. Kec. Agats dan Kec. Fayit – Kab. Asmat
7. Kec. Minyamur – Kab. Mappi

Kawasan Transmigrasi
8. KT Salor – Kab. Merauke
9. KT Muting – Kab. Merauke

Kawasan Perdesaan Prioritas
10. Kawasan Perdesaan Semangga,Tanah Miring, Kurik, dan Malind – Kab. Merauke

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

1. TN Lorentz – Kab. Asmat
2. TN Wasur – Kab. Merauke

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Selatan

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,8 (Rata-rata 2025–2029)	65,5	0,2	16,50 – 17,00	0,372	0,44	59,00	80,63	0,84 – 1,00
2029	6,7 (2029)	91,9	0,1	12,50 – 13,50	0,367 – 0,372	0,47	78,99	81,30	0,69 – 0,84

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A2	Kawasan Pertumbuhan: • A2: Kab. Merauke	Pengembangan Kab. Merauke sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, melalui: • Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, dengan *output*: pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan serta pembebasan lahan • Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan *output*: rencana induk (masterplan) • Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Ewer • Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, peningkatan akses internet tetap pitalebar untuk UMKM dan fasilitas umum, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya • Penataan kawasan
A1	Kawasan Pertumbuhan: • A1: Kawasan Asmat (Kab. Asmat)	Penyiapan kawasan Asmat, melalui: • Pengembangan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan jalan daerah dan pengembangan bandara Ewer (Kab. Asmat) • Pengembangan produk kepariwisataan, dengan *output*: pendukungan *event* daerah, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual pada produk ekonomi lokal, dan pengembangan produk ekonomi lokal • Pengembangan sentra pariwisata, dengan *output*: pengembangan desa wisata • Peningkatan kapasitas SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan *output*: pelatihan dan pembekalan sdm pariwisata serta sertifikasi sdm bidang pariwisata • Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan *output*: promosi terpadu secara nasional dan internasional • Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
B4	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna-cakalang-tongkol) Sentra Produksi • B4: Kab. Merauke	Penyiapan pengembangan sentra produksi berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui: • Penguatan sentra produksi perikanan, dengan *output*: penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat, serta pengembangan kampung nelayan • Pengembangan tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan *output*: peningkatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengembangan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penyediaan sarana penyimpanan dan distribusi logistik produk, penumbuhan eksportir, industrialisasi koperasi melalui rantai pasok produksi, pembentukan dan penguatan koperasi, pelaku usaha, UMKM dalam rantai pasok, pembentukan/pengembangan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan *output*: siswa SMK yang tersertifikasi kompetensi yang relevan dengan dunia kerja, sertifikasi awak kapal, dan pemberian akreditasi kepada lembaga pendidikan kelautan perikanan • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (*smart fisheries village*), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan • Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, pengembangan kampung nelayan, dan perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: hilirisasi produk akuakultur dan produk hilirisasi pangan hasil laut, pemberian bantuan pendanaan *matching fund* (BOPTN Penelitian) terkait produk hilirisasi kelautan perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital
B1 B2 B3	Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas sagu) Sentra Produksi • B1: Kab. Merauke (sagu) • B2: Kab. Mappi (sagu) • B3: Kab. Asmat (sagu)	Penguatan sentra produksi berbasis komoditas sagu, melalui: • Peningkatan produksi perkebunan, dengan *output*: pemberian bibit unggul tanaman, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan • Pengembangan tata niaga/pemasaran, dan promosi produk, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, BUMDesa, dan koperasi, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM, dengan *output*: pengembangan sekolah vokasi, serta Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan, penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk *digital farming* serta peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian *matching fund* (BOPTN penelitian)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan *output*: penanganan jalan daerah dan pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong (Iwur–Waropko, Merauke–Mappi) • Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan *output*: peningkatan pelayaran kapal Ro-Ro, penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Agats di Kab. Asmat, pengembangan fasilitas Pelabuhan Moor di Kab. Mappi, pembangunan fasilitas Pelabuhan Wowi di Kab. Asmat, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bade di Kab. Mappi, layanan angkutan laut perintis, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan penyeberangan perintis • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Ewer di Kab. Asmat, Bandar Udara Tanah Merah di Kab. Boven Digoel, Bandar Udara Mopah di Kab, Merauke, dan Bandar Udara Kepi di Kab. Mappi, pengembangan angkutan udara perintis penumpang, pengembangan angkutan udara perintis kargo, pengembangan angkutan BBM pesawat udara • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan *output*: pembangunan BTS 4G/*Lastmile*, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan digital
	• Kab. Merauke (perikanan dan perkebunan) • Kab. Mappi (perkebunan) • Kab. Asmat (perkebunan dan ekonomi kreatif)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan, perkebunan, ekonomi kreatif, serta industri pengolahan) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan *output*: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja
C1	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C1: Kab. Merauke	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Merauke yang didukung dengan kawasan transmigrasi Salor, melalui: • Pencetakan sawah • Peningkatan produksi, dengan *output*: penyaluran benih padi, areal pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) pangan, dan unit pengolah pupuk organik (UPPO) • Penyiapan pengembangan kawasan, dengan *output*: optimasi lahan menjadi produktif, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, konektivitas transportasi desa, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana produksi, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian pra panen, sistem drainase yang dibangun di kawasan transmigrasi, area penyaluran benih padi, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju KSPP • Penguatan sarana pascapanen dan tata kelola, dengan *output*: penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kelembagaan ekonomi petani, pengembangan usaha koperasi, dan peningkatan akses pembiayaan modal • Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk *digital farming*
C1	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C1: Kab. Merauke* (padi dan pangan akuatik) Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Boven Digoel** (padi) • Kab. Mappi** (sagu) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	Penguatan kawasan potensial swasembada pangan padi dan pangan akuatik/*bluefood* berbasis perikanan tangkap, melalui: • Penguatan produksi, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengembangan kawasan padi, pemberian pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian prapanen, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, serta penyaluran benih ikan air laut dan tawar • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan dan konektivitas (jalan, pelabuhan, dan bandara) sebagai akses menuju sentra pangan lokal, pembangunan fasilitas logistik (gudang penyimpanan pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan • Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan) yang terlatih GAP, GHP, dan PHT, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (*Good Agriculture Practices*), GHP (*Good Handling Practices*), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, mendorong *ownership* petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk, serta pendampingan untuk digitalisasi pertanian • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan *output*: pengembangan kawasan padi dan sagu, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, serta pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan
C1	Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C1: Kab. Merauke* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Mappi** • Kab. Asmat**	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan pada kawasan potensial energi, melalui: • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*) termasuk ethanol, pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Keterangan: • *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi • **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
C2	Kawasan Potensial Swasembada Air: • C2: Kab. Boven Digoel* Kawasan Rawan Air: • Kab. Merauke** • Kab Asmat** Keterangan: • *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi • **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air	Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, melalui: • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan *output*: pembangunan embung dan tampungan air lainnya Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan *output*: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air
D1 D2 D3	Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • D1: Kab. Boven Digoel (karet) • D2: Kab. Asmat (sagu dan ekonomi kreatif) • D3: Kab. Mappi* (sagu) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan Program Afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi berbasis pengembangan sentra perkebunan terintegrasi dan ekonomi kreatif, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, pendukungan *event* daerah, pengembangan desa wisata, pengembangan UMKM lokal, peningkatan kemandirian masyarakat, peningkatan daya saing masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, pengembangan sarana angkutan perintis darat dan udara, serta pengembangan Bandara Mindiptanah dan Lapter Bomakia (Kab. Boven Digoel) • Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan *output*: masyarakat di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana
D4 D5 D6 D7	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan: PKSN dan Wilayah Pendukung • D4: PKSN Merauke, serta Kec. Ilwayab, Tabonji, Waan, Tubang, Okaba, Malind, Naukenjerai (Kab. Merauke) • D5: PKSN Tanah Merah, serta Kec. Kombut, Waropko, Ambatkwi (Kab. Boven Digoel) Kecamatan Perbatasan Prioritas • D6: Kec. Agats dan Kec. Fayit (Kab. Asmat) • D7: Kec. Minyamur (Kab. Mappi)	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah dan Merauke, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui: • Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, penyediaan bibit unggul, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengolahan pasca panen komoditas, masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, peningkatan akses pembiayaan modal, serta pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk • Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan *output*: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Papua Selatan • Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan *output*: *piloting* pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN
D8 D9	Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi: • D8: KT. Salor (Kab. Merauke) • D9: KT. Muting (Kab. Merauke)	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salor dan Muting, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, sarana permukiman di kawasan transmigrasi, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), optimasi kawasan pertanian sagu, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, serta pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, dan penyediaan bibit unggul pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran • Penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil, dengan *output*: tenaga pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya, penyediaan instruktur yang berkinerja tinggi di Kawasan Transmigrasi
D10	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas: • D10: Kawasan Perdesaan Prioritas Semangga, Tanah	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Malind, melalui: • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Miring, Kurik, dan Malind (Kab. Merauke)	• Peningkatan aksesibilitas desa, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik, serta penyediaan moda transportasi desa • Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes • Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan *output*: fasilitasi penguatan tata kelola desa
	Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama: • Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Pengembangan sekolah berpola asrama: • Kab. Merauke (PKSN Merauke) Pengembangan sekolah sepanjang hari: • Kab. Boven Digoel (Daerah Tertinggal dan PKSN Tanah Merah) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik , dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan *output*: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan *output*: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual
	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, terutama tradisi dan budaya di Kab. Asmat, melalui: • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
	Pelayanan kesehatan bergerak: • Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan *output*: penugasan khusus

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Pembangunan RSUD provinsi: • Kab. Merauke Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: • Kab. Boven Digoel (Daerah Tertinggal dan PKSN Tanah Merah) • Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan	tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine* • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, serta pembangunan RSUD Provinsi Papua Selatan • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
	Pengendalian penyakit malaria: • Kab. Merauke • Kab. Asmat • Kab. Boven Digoel • Kab. Mappi Pengendalian penyakit TBC: • Kab. Mappi • Kab. Boven Digoel Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: • Provinsi Papua Selatan	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data
	Provinsi Papua Selatan	Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya, melalui: • Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua • Peningkatan gizi, dengan *output*: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum *stunting* terjadi serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari *buffer stock*, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan *output*: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan *output*: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB • Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi
	Pemberantasan IUU *Fishing*: • WPP 718 (perbatasan dengan Australia) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: • Provinsi Papua Selatan	Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU *Fishing* pada WPP 718, melalui: • Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan *output*: peningkatan operasi kapal dan *speedboat* pengawas, serta patroli mandiri • Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan *output*: lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU *(illegal, unreported, unregulated) fishing*. • Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan *output*: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) • Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan *output*: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua • Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut
	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui: • Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan *output*: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat • Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan *output*: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil • Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat, dengan *output*: pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
E1 E2	Kawasan Konservasi: • E1: TN Lorentz (Kab. Asmat) • E2: TN Wasur (Kab. Merauke)	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi • Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan *output*: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah. • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan *output*: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) • Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem
	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, serta penerapan *nature-based solutions*, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan
	Provinsi Papua Selatan	Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: • Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan *output*: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai platform terintegrasi pemerintahan di daerah • Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru • Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan *output*: pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur daerah, pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah • Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung *smart government*, dengan *output*: peningkatan portal pelayanan publik dan penerapan PTSP berbasis OSS di daerah • Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP)

7.6 Provinsi Papua Barat Daya

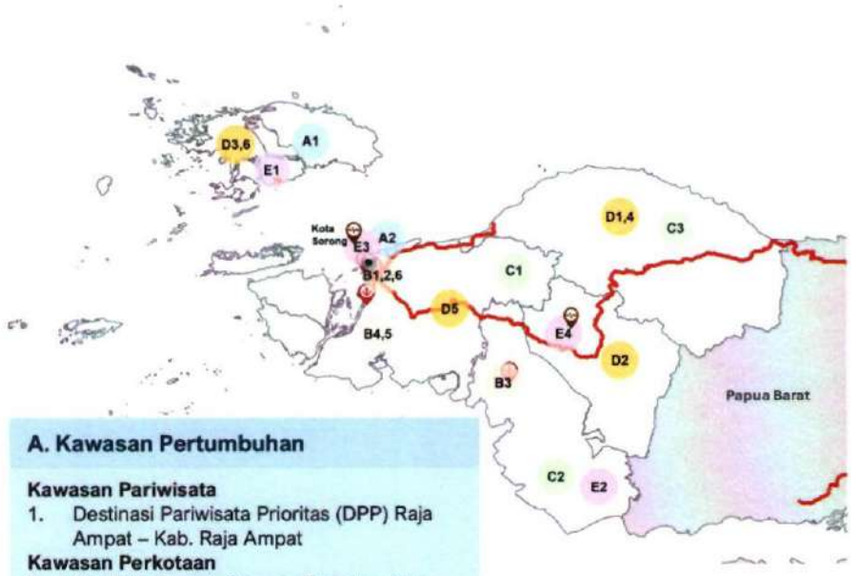

PAPUA BARAT DAYA

LEGENDA

- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata
1. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Raja Ampat – Kab. Raja Ampat

Kawasan Perkotaan
2. Ibu Kota Daerah Otonom Baru dan Kota Industri, Perdagangan, dan Jasa – Kota Sorong

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Industri Berbasis Komoditas Udang
1. Kota Sorong

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang
2. Kota Sorong
3. Kab. Sorong Selatan
4. Kab. Sorong

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut
5. Kab. Sorong
6. Kota Sorong

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Kab. Sorong: potensial pangan, potensial energi, potensial air
2. Kab. Sorong Selatan: potensial pangan
3. Kab. Tambrauw: potensial air

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*
1. Kab. Tambrauw
2. Kab. Maybrat

**) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal*

Kawasan Perbatasan

Kecamatan Perbatasan Prioritas
3. Kec. Ayau dan Kec. Kepulauan Ayau – Kab. Raja Ampat
4. Kec. Kwoor dan Kec. Abun – Kab. Tambrauw

Kawasan Transmigrasi
5. KT Klamono – Segun – Kab. Sorong

Kawasan Perdesaan Prioritas
6. Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Raja Ampat – Kab. Raja Ampat

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi
1. Geopark Raja Ampat, KKN dan KKD Kep. Raja Ampat, serta KKN Kep. Waigeo Sebelah Barat – Kab. Raja Ampat
2. Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni – Kab. Sorong Selatan

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
3. Kota Sorong
4. Kab. Maybrat

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,8 (Rata-rata 2025-2029)	64,9	0,2	17,60 – 18,00	0,300	0,49	1,08	82,89	6,30 – 6,80
2029	6,6 (2029)	89,4	0,2	11,76 – 12,76	0,295 – 0,300	0,52	23,09	83,52	5,32 – 5,92

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Pertumbuhan: • A1: DPP Raja Ampat (Kab. Raja Ampat)	Pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata pada kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Raja Ampat), melalui: • Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara DEO Sorong dan bandar udara perairan di Misool, Kab. Raja Ampat • Pengembangan atraksi, dengan *output*: pendukungan *event* daerah, pengembangan desa wisata, pengembangan jejaring di destinasi pariwisata, dan pelaksanaan kegiatan (*events*) nasional dan internasional • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala komunal, pembangunan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, penataan kawasan destinasi wisata, serta pengembangan amenitas dan aksesibilitas pariwisata • Pengembangan keterampilan SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan *output*: fasilitasi sertifikasi SDM bidang pariwisata dan penyelenggaraan pelatihan vokasi • Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan *output*: peningkatan publikasi dan promosi terpadu secara nasional dan internasional • Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan *output*: fasilitasi akses pembiayaan pariwisata berkualitas, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, pengembangan UMKM, serta pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam • Peningkatan kelestarian adat dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa, pelaksanaan operasi SAR, serta penyediaan jalur evakuasi bencana KTA Selat Dampier, KTA Misool, dan KTA Wayag
A2	Kawasan Pertumbuhan: • Ibu Kota Daerah Otonomi Baru dan Kota Industri, Perdagangan, dan Jasa (Kota Sorong)	Pengembangan Kota Sorong sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya serta kota industri, perdagangan, dan jasa, melalui: • Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya, dengan *output*: pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan serta pembebasan lahan • Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan *output*: rencana induk (masterplan) • Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara DEO Sorong

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan jalan strategis, pembangunan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya • Penataan kawasan dan peningkatan citra kota, dengan *output*: penataan kawasan, penguatan *branding* kawasan, dan penguatan promosi daya tarik kota
B1 B2 B3	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas udang) Sentra Industri • B1: Kota Sorong Sentra Produksi • B1: Kota Sorong • B2: Kab. Sorong Selatan • B3: Kab. Sorong	Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas udang, melalui: • Penguatan sentra produksi, dengan *output*: penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan serta penyaluran benih ikan udang ke masyarakat • Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk udang, dengan *output*: peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pembangunan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penguatan sarana distribusi logistik produk kelautan dan perikanan, analisa dan informasi pasar ekspor, fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk pada usaha mikro, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan *output*: percontohan penyuluhan/penerapan model pemberdayaan sosial ekonomi pada masyarakat kelautan dan perikanan, serta pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output* peningkatan kapasitas kelembagaan pada kelompok usaha bersama, fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha pada UMKM kelautan dan perikanan, pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas *(smart fisheries village)*, serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan • Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: pembangunan jalan strategis dan pengembangan pelabuhan pendukung industri udang, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat • Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan, dengan *output*: hilirisasi produk akuakultur, produk hilirisasi pangan hasil laut, serta penerapan teknologi ekonomi digital
B5 B6	Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas rumput laut) Sentra Produksi • B5: Kab. Sorong • B6: Kota Sorong	Penguatan sentra produksi berbasis komoditas rumput laut, melalui: • Penguatan sentra produksi, dengan *output*: revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi, pengendalian hama terpadu, serta peningkatan ketersediaan bibit rumput laut yang unggul • Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan *output*: pembangunan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penguatan sarana distribusi logistik produk kelautan dan perikanan, analisa dan informasi pasar ekspor, fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk pada usaha mikro, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, serta revitalisasi pasar rakyat • Peningkatan kualitas SDM, dengan *output*: percontohan penyuluhan/penerapan model pemberdayaan sosial ekonomi pada masyarakat kelautan dan perikanan, serta pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: pembangunan jalan strategis, pengembangan pelabuhan pendukung produksi rumput laut, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: peningkatan kapasitas kelembagaan pada kelompok usaha bersama, fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha pada UMKM kelautan dan perikanan, fasilitasi pengembangan BUMDesa, fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk pada usaha mikro, pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas *(smart fisheries village)*, serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan • Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan, dengan *output*: hilirisasi produk akuakultur, produk hilirisasi pangan hasil laut, serta penerapan teknologi ekonomi digital
	Provinsi Papua Barat Daya	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, dan jalan trans, dengan *output*: pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong, pembangunan jalan strategis, penanganan jalan daerah, pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke–Sorong–Makbon–Mega dan peningkatan layanan angkutan jalan perintis • Pengembangan pelabuhan dan jaringan pelayaran, dengan *output*: pengembangan fasilitas pelabuhan Makbon di Kab. Sorong, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Sausapor di Kab. Tambrauw, pembangunan fasilitas Pelabuhan Pulau Misool di Kab. Raja Ampat, peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan angkutan penyeberangan perintis • Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok di Kab. Sorong, dan pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan • Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi • Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat
	• Kab. Sorong (perikanan) • Kab. Sorong Selatan (perikanan) • Kota Sorong (perikanan dan industri) • Kab. Raja Ampat (pariwisata)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan, pariwisata, dan industri) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: • Penguatan dan penyediaan sarana prasarana serta pelatihan pendidikan berkualitas, dengan *output*: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK) • Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta SMK yang mengacu pada kebutuhan industri • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri • Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
C1 C2	Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C1: Kab. Sorong* (padi dan pangan akuatik) • C2: Kab. Sorong Selatan* (padi dan sagu) Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Tambrauw** (ubi dan pangan akuatik) • Kab. Maybrat** (ubi) Keterangan: • *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi • **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	Penguatan kawasan potensial swasembada pangan berbasis pertanian tanaman pangan (padi dan sagu) serta pangan akuatik/*bluefood* berbasis perikanan tangkap melalui: • Peningkatan produksi, dengan *output*: pengembangan kawasan sagu dan padi, pemberian pupuk bersubsidi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, serta penyaluran benih ikan air laut dan tawar • Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik • Penguatan kapasitas sdm (petani dan nelayan), dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (*good agriculture practices*), GHP (*good handling practices*), dan PHT (pengendalian hama terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong *ownership* petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk) • Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan dengan *output*: pengembangan kawasan ubi dan pangan akuatik, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, serta pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, serta peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan
C1	Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C1: Kab. Sorong* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Sorong Selatan** • Kab. Raja Ampat** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi	Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui: • Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM), pemetaan potensi EBT lainnya, serta pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk • Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
C1 C3	Kawasan Potensial Swasembada Air: • C1: Kab. Sorong* • C3: Kab. Tambrauw* Kawasan Rawan Air: • Kab. Sorong Selatan** • Kab. Raja Ampat** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan/atau merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air	Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan, terutama di pulau-pulau kecil, melalui: • Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan *output*: pembangunan embung dan tampungan air lainnya Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif dengan *output*: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, penyediaan infrastruktur desalinasi di pulau-pulau kecil, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air
D1 D2	Kawasan Afirmasi - Daerah Tertinggal*: • D1: Kab. Tambrauw (ubi dan tuna-cakalang-tongkol) • D2: Kab. Maybrat (ubi) *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, serta aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, peningkatan sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat, pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha, pengembangan UMKM lokal, peningkatan daya saing masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan; perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, serta pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara • Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan *output*: masyarakat di daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
D3 D4	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas: • D3: Kec. Ayau dan Kec. Kepulauan Ayau (Kab. Raja Ampat) • D4: Kec. Kwoor dan Kec. Abun (Kab. Tambrauw)	Pengembangan kawasan perbatasan di kecamatan perbatasan prioritas, melalui: • Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik, pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga • Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan *output*: fasilitasi kampung siaga bencana terhadap warga masyarakat dilokasi rawan bencana, fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam di kawasan perbatasan • Penguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan, dengan *output*: *piloting* pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN
D5	Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi: • D5: KT Klamono–Segun - (Kab. Sorong)	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Klamono–Segun di Kab. Sorong, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman di kawasan transmigrasi, serta perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan) • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan desa dan persebaran penduduk, dengan *output*: bantuan sarana pengembangan sosial budaya dan mental spiritual di kawasan transmigrasi, perpindahan dan penempatan transmigran serta bantuan catu pangan untuk transmigran. • Penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil, dengan *output*: tenaga pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya, penyediaan instruktur yang berkinerja tinggi di kawasan transmigrasi
D6	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas • D6: Kab. Raja Ampat (Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Raja Ampat)	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas di Kab. Raja Ampat, melalui: • Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R • Peningkatan aksesibilitas desa, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik, serta penyediaan moda transportasi desa • Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal berbasis komoditas kelapa dan pala, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam pengembangan agropolitan dan produk unggulan desa • Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan *output*: fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agropolitan
	Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama: • Kab. Tambrauw (Daerah Sangat Tertinggal)	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan *output*: penataan guru

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Pengembangan sekolah berpola asrama: • Kab. Raja Ampat*(Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kota Sorong Pengembangan sekolah sepanjang hari: • Kab. Maybrat (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Sorong Selatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: • Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya	dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan *output*: Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi, serta pendampingan dan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan *output*: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan, serta akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan *output*: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual
	Provinsi Papua Barat Daya	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan • Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal • Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
	Pelayanan kesehatan bergerak: • Kab. Raja Ampat (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Tambrauw (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Maybrat (Daerah Tertinggal) Pembangunan RSUD provinsi: • Kota Sorong Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: • Kab. Raja Ampat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine* • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua, dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta pembangunan RSUD Provinsi Papua Barat Daya • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Kab. Tambrauw (Daerah Tertinggal) • Kab. Maybrat (Daerah Tertinggal) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: • Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya	• Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
	Pengendalian penyakit malaria: • Kab. Tambrauw • Kab. Sorong • Kab. Raja Ampat • Kota Sorong • Kab. Maybrat Pengendalian penyakit TBC: • Kab. Sorong Selatan • Kab. Sorong • Kab. Tambrauw • Kab. Maybrat Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: • Provinsi Papua Barat Daya	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan hunian layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data
	Provinsi Papua Barat Daya	Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya melalui: • Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua • Peningkatan gizi, dengan *output*: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum *stunting* terjadi serta pemberian tata laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari *buffer stock*, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan *output*: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan *output*: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi
	Pemberantasan IUU *Fishing*: • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: • Provinsi Papua Barat Daya	Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU *Fishing* pada WPP 717, melalui: • Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan laut, dengan *output*: peningkatan operasi kapal dan *speedboat* pengawas, serta patroli mandiri • Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan *output*: lembaga pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU *(illegal, unreported, unregulated) fishing*. • Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan *output*: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) • Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan *output*: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua • Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut
	Provinsi Papua Barat Daya	Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah ulayat, melalui: • Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan *output*: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat • Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan *output*: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil • Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat
E1 E2	Kawasan Konservasi: • E1: *Geopark* Raja Ampat, KKN dan KKD Kep. Raja Ampat, serta KKN Kep. Waigeo Sebelah Barat (Kab. Raja Ampat) • E2: Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Kab. Sorong Selatan)	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 • Optimalisasi tata kelola kelembagaan kawasan konservasi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi • Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan *output*: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan *output*: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon, pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan, peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan, optimalisasi pendanaan, serta implementasi rencana induk pengembangan *geopark* • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem • Pengembangan potensi *geopark* Raja Ampat, dengan *output* pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata dan fasilitasi usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat
E3 E4	Lingkungan Hidup: • Provinsi Papua Barat Daya Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: • E3: Kota Sorong • E4: Kab. Maybrat	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: • Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, pembangunan pengaman pantai, pemulihan ekosistem mangrove, penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik funtuk mitigasi ancaman tsunami, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pasca tambang

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	Provinsi Papua Barat Daya	Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: • Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan *output*: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai platform terintegrasi pemerintahan di daerah • Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru • Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan *output*: pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah • Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung *smart government*, dengan *output*: peningkatan portal pelayanan publik dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS • Peningkatan dan pemutakhiran data Orang Asli Papua (OAP)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman